PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun 2025

[redacted]

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan pembangunan guna meningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;

b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pertajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Dipindai dengan CamScanner

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Dipindai dengan CamScanner

3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Tahun 2025.
(2) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
   c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
   d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
   e. bab V memuat penutup.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. rencana kerja dinas pendidikan kabupaten solok selatan;
   b. rencana kerja dinas kesehatan kabupaten solok selatan;
   c. rencana kerja dinas pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan kabupaten solok selatan;
   d. rencana kerja dinas perumahan, kawasan permukiman, lingkungan hidup dan perhubungan kabupaten solok selatan;
   e. rencana kerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten solok selatan;
   f. rencana kerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten solok selatan;
   g. rencana kerja dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten solok selatan;
   h. rencana kerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten solok selatan;
   i. rencana kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten solok selatan;
   j. rencana kerja dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten solok selatan;
   k. rencana kerja dinas komunikasi dan informatika kabupaten solok selatan;

Dipindai dengan CamScanner

l. rencana kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten solok selatan;
m. rencana kerja dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten solok selatan;
n. rencana kerja dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga kabupaten solok selatan;
o. rencana kerja dinas pertanian, ketahanan pangan dan perikannan kabupaten solok selatan;
p. rencana kerja dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten solok selatan;
q. rencana kerja sekretariat daerah kabupaten solok selatan;
r. rencana kerja sekretariat dprd kabupaten solok selatan;
s. rencana badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten solok selatan;
t. rencana kerja badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten solok selatan;
u. rencana kerja inspektorat daerah kabupaten solok selatan;
v. rencana kerja badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten solok selatan;
w. rencana kerja kecamatan koto parik gadang diateh kabupaten solok selatan;
x. rencana kerja kecamatan sungai pagu kabupaten solok selatan;
y. rencana kerja kecamatan sangir kabupaten solok selatan;
z. rencana kerja kecamatan sangir jujuan kabupaten solok selatan;
aa. rencana kerja kecamatan sangir batang hari kabupaten solok selatan;
bb. rencana kerja kecamatan pauh duo kabupaten solok selatan;
cc. rencana kerja kecamatan sangir balai janggo kabupaten solok selatan; dan
dd. rencana kerja kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten solok selatan;

(3) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala BAPPEDA.

Pasal 5

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilakukan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 4 September 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 4 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 22

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berlaku satu tahun yang berisikan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows* program. Proses tersebut diformulasikan melalui penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, Forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengintegrasikan program prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah serta Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal diatas maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, masing masing Rencana Kerja ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari:

1. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan;
2. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan;
3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan;
4. Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan;
5. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan;
6. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan;
7. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan;
8. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan;
9. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan;

Dipindai dengan CamScanner

10. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan;
11. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan;
12. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan;
13. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan;
14. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan;
15. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan;
16. Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Solok Selatan;
17. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
18. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan;
19. Rencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
20. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
21. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
22. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan;
23. Rencana Kerja Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan;
24. Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
25. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
26. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan;
27. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;
28. Rencana Kerja Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan;
29. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan; dan
30. Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun 2025

[redacted]

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam satu tahun anggaran yang memuat tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025. Oleh karenanya, dokumen ini akan menjadi sebagai acuan bagi aparatur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan anggaran, dalam hal ini Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perumusan program dan kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Selain itu juga disinkronkan dalam menunjang visi dan misi Kepala Daerah untuk Tahun 2024 dengan Program dan Kegiatan yang mengakomodir Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional. Melalui dokumen ini Bappeda mencoba merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berazaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Padang Aro, Juli 2024
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SOLOK SELATAN

TAUFIK EFFENDI, S.Pd, MM
NIP. 19670421 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 30

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 35

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 50

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 51

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 51

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 52

3.3 Program dan Kegiatan 52

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 57

BAB V PENUTUP 73

5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian 73

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 74

5.3 Rencana Tindak Lanjut 74

DAFTAR TABEL

Table 2.1	:	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda s/d Tahun 2023 Kabupaten Solok Selatan
Tabel 2.2	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Tabel 2.3	:	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Solok Selatan
Tabel 2.4	:	Usulan Program dan Kegiaan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tabel 3.1	:	Telaahan Kebijakan Nasional
Tabel 3.2	:	Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tabel 3.3	:	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda
Tabel 4.1	:	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Solok Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah menurut program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Sebagai dokumen perangkat daerah rencana kerja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Penyusunan rencana kerja perangkat daerah merupakan tindak lanjut dari penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan RKPD dengan berpedoman pada RPJMD serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026.

Sebagai Dokumen Tahunan Rencana Kerja mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan , dimana prinsip-prinsip dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD Tahun 2025.
2. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan dalam renja perangkat daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelatanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah.
3. Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Kerja Tahunan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daerah lainnya.

Rencana Kerja ini disusun dalam rangka mengevaluasi dan melengkapi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya atau kegiatan yang belum mencapai target serta mempertimbangkan kondisi terakhir tahun 2024 juga permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2025.

Mengingat arti strategis Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan Dokumen Renja Bappeda Tahun 2025 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan kegiatan dalam renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
3. Program dan Kegiatan dalam renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Proses penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada usulan kegiatan dari masing-masing bidang secara formal yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dan untuk tahun 2026 nantinya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang nantinya juga akan mempedomani RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.

Rencana kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lain karena disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Selanjutnya RPJM Daerah menjadi pedoman penyusunan RKPD tahunan dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 98 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Bappeda tahun 2025 ini **dimaksudkan** sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sedangkan **tujuan** dari Rencana Kerja Bappeda tahun 2025 adalah :

1. Sebagai penjabaran dari RPJMD dan Rencana Strategis Bappeda tahun 2021-2026;

2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja ini kami susun dengan sitematika sebagai berikut :

BAB I *PENDAHULUAN* , bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bagian ini memuat *Latar Belakang* yang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. *Landasan Hukum,* memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. *Maksud dan Tujuan* memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah. *Sistematika Penulisan,*

menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023,* memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Bappeda, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III *TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,* memuat tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Dearah, serta program dan kegiatan.

BAB IV *RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,* terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Solok Selatan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

BAB V *PENUTUP*

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Solok Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Solok Selatan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujutan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan–tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Solok Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dari output dan pengukuran kinerja program dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Solok Selatan selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Solok Selatan tahun 2023 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan 2021-2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAPPEDA s/d TAHUN 2024 KABUPATEN SOLOK SELATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan (2024)	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4*100%
5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.01	PERENCANAAN										
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen	100	100	100	100	100	100	50	50%
5.01.01.2.01	Perencanaan,	Ketersediaan	Persen	100	100	100	100	100	100	50	50%

	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu**									
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan perangkat daerah (Renstra, Renja/Renja-P RKA/RKA-P, DPA, DPPA)	Dokumen	38	6	6	6	6	6	**18**	47%
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	28	5	5	3	3	3	**11**	39%
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50%**
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	161	27	27	27	27	27	81	50%
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	36	300%

	Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan honornya									
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	1	1	1	1	1	3	50%
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**100**	-	-	-	-	-	-	**0%**
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	-	-	-	-	-	-	0%
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50%**

		perangkat daerah									
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Installasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	24	4	4	11	11	4	19	79%
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Laporan	24	4	4	4	4	4	12	50%
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	24	4	4	1	1	4	9	38%
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	24	4	4	2	2	4	10	42%
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	-	4	1	1	4	5	21%
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	4	4	2	2	4	10	42%
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang**	**Persen**	**100**	**50**	**100**	**-**	**-**	**100**	**25**	**25%**

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**tersedia**									
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	5	-	1	-	-	-	-	0%
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	1	1	-	-	-	-	1	100%
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Paket	12	-	4	-	-	2	2	17%
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	3	1	1	-	-	-	1	33%
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50%**
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	4	4	1	1	4	9	38%
5.01.01.2.08.000	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	Laporan	74	12	12	1	1	12	25	34%

2	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan									
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	24	4	4	1	1	4	9	38%
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		-	-	-	-	-	5	5	0%
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50%**
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pakjak dan perizinannya	Unit	9	5	6	8	8	7	20	222%

5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	7	1	1	1	1	1	3	43%
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah (IKU)**	**Persen**	**90**	**54,35**	**86**	**59,47**	**69**	**88**	**34**	**37%**
		Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPD dan RPJMD	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50%**
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu (RKPD, RKPDP, RPJMD, RPJPD)**	**Persen**	**100**	**75**	**100**	**75**	**75**	**100**	**42**	**42%**
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik Dokumen Perencanaan Daerah	Dokumen	7	1	1	2	2	2	5	71%
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Telaah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	15	-	2	-	-	-	-	0%

	Dokumen Kebijakan Lainnya										
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	5	1	1	1	1	1	3	60%
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	8	1	1	1	1	1	3	38%
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	7	1	1	2	2	1	4	57%
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kecamatan	42	7	7	7	7	7	21	50%
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	29	4	4	4	4	4	12	41%
5.01.02.2.02	**Analisis data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan**	**Persentase Ketersediaan Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**75**	**75**	**100**	**46**	**46%**

	Daerah	**Daerah**									
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	5	-	1	1	1	1	2	40%
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah OPD yang dibina terkait pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah	OPD	33	33	33	-	-	-	33	100%
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi dan Pengendalian**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**75**	**75**	**100**	**46**	**46%**
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	6	1	1	2	2	1	4	67%

5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	18	3	3	2	2	3	8	44%
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50%**
		Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	**Persen**	**90**	**69,99**	**84**	**87**	**104**	**86**	**40**	**45%**
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50%**
		Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persen**	**80**	**65,74**	**80**	**80**	**-**	**80**	**38**	**47%**
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	14	2	2	2	2	2	6	43%

	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunnya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)									
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	210	30	30	-	-	-	30	14%
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	24	4	4	4	4	4	12	50%
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Dokumen	12	2	2	-	-	-	2	17%

	Pemerintahan										
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunnya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	29	2	2	2	2	2	6	21%
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasi Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	69	9	12	-	-	-	9	13%
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	38	3	4	4	4	4	11	29%
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	Laporan	12	2	2	-	-	-	2	17%

	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia									
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50%**
		Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	**Persen**	**80**	**61,11**	**80**	**80**	**-**	**80**	**37**	**46%**
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	14	2	2	2	2	2	6	43%
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan	Dokumen	56	8	8	-	-	-	8	14%

	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	29	5	5	4	4	5	14	48%
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	Dokumen	12	2	2	-	-	-	2	17%
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	14	2	2	2	2	2	6	43%

5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen	42	6	6	-	-	-	6	14%
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	24	4	4	4	4	4	12	50%
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Dokumen	12	2	2	-	-	-	2	17%
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50%**
		Persentase Capaian	**Persen**	**80**	**62,85**	**80**	**80**	**-**	**80**	**37**	**46%**

		Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan									
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	14	2	2	2	2	2	6	43%
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	28	4	4	-	-	-	4	14%
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	24	4	4	4	4	4	12	50%

5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Dokumen	12	2	2	-	-	-	2	17%
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	14	2	2	2	2	2	6	43%
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen	41	6	6	-	-	-	6	15%
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Laporan	24	4	4	4	4	4	12	50%

	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Ikewilayahan	Dokumen	11	3	2	-	-	-	3	27%
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**										
5.05.02.2	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah**	**Persen**	**60**	**25**	**30**	**40**	**133**	**60**	**21**	**35%**
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persen**	**75**	**25**	**-**	**75**	**-**	**-**	**17**	**22%**

5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otononi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	1	-	1	1	-	2	200%
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen data kelitbangan dan peraturan yang dokumentasikan	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	0%
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persen**	**75**	**-**	**75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	1	1	-	-	-	1	100%
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Kajian tentang Pengembangan pariwisata yang disusun	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	0%

5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persen**	**75**	-	-	-	-	-	-	**0%**
5.05.02.2.02.0012	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan pangan	Jumlah kajian Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan pangan	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	0%
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah kajian Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	0%
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Indek Inovasi Daerah**	**Indek**	**700**	**377**	**530**	**530**	**100**	**580**	**248**	**35%**
5.05.02.2.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan Inovasi	20	7	4	4	4	4	-	0%

	Bersifat Inovatif	Jumlah Rekomendasi Inovasi Daerah									
5.05.02.2.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sosial dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	29	7	5	1	1	5	1	3%

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = 2025-2 = 2023) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

a) Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Capaian Kinerja Daerah (IKU)

b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah (IKK)

- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

b) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Faktor-faktor Penyebab

faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yaitu :

1. Adanya transisi perubahan nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan sebagaiamana tercantum dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Adanya Surat Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 900.1.15.5—1317 Tahun 2023 tentang perubahan Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3. Adanya refocusing anggaran pada beberapa program kegiatan dan sub kegiatan sehingga pelaksanaan rapat koordinasi menjadi terbatas

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2024 b.Efisiensi alokasi belanja.
2. Penambahan alokasi pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target
3. Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.

4. Melaksanakan koordinasi lintas instansi, sinergitas program/kegiatan sejenis dengan instansi terkait, presentasi pada pemangku kebijakan tentang kondisi yang ada dan memaksimalkan sumberdaya yang ada.
5. Pembuatan roadmap untuk mencari permasalahan inti serta kebijakan yang legitmate atas pelimpahan wewenang perlu segera ditetapkan

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Namun di sisi lain juga adanya keterbatasan sumber daya aparatur di lingkungan badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan telah dilakukan secara berkelanjutan dari tahunke tahun yang sesuai Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan umum dan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Pelaksanaan, Pembinaan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Pelaksanaan Kebijakan Teknis urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematik, produknya dirumuskan dengan sistematik dan didasarkan pada pemikiran logis dan objektif.

Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang dilakukan secara konseptual, dokumentasi maupun ekperimental.

Dengan demikian Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi beberapa ciri, antara lain:

a. Menghasilkan program yang bersifat umum;
b. Analisis perencanaan bersifat makro/luas;
c. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang;
d. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas;
e. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek (1 tahunan).

Dengan memahami gambaran mengenai unsur-unsur perencanaan dan pengertian pembangunan, dapat diperoleh suatu gambaran mengenai perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan terkandung beberapa hal pokok yang dapat dikatakan sebagai unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri. Adapun unsur-unsur dimaksud meliputi:

1. Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta. Ini berarti bahwa perencanaan hendaknya disusun dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi yang didukung dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada. Hal ini menjadi penting karena hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu program atau kegiatan;
2. Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa

dalam menyusun rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;

3. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perencanaan merupakan suatau alat/sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan;
4. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan;
5. Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

Saat ini yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan di Bappeda adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan peraturan yang berada di bawahnya termasuk Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, saat ini Bappeda telah melaksanakan ketentuan yang telah diamanatkan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah.

Dalam menjalankan fungsinya untuk merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda telah membentuk bidang-bidang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya program dan kegiatan pembangunan serta telah melibatkan secara aktif peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan. Bidang-bidang tersebut meliputi:

1. Sekretariat

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan;
3. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
5. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Badan. *Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan* mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi dibidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan. *Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam* mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi dibidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam. *Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah* mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi dibidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah. *Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia* mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Dengan membagi tugas ke dalam bidang-bidang diatas diharapkan akan mampu mengatasi komplekistas permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan. Gambaran Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Bappeda				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2023)	Tahun n - 1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1(2026)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	URUSAN PERENCANAAN											
1	Persentase Pencapaian Nilai SAKIP (Perencanaan)		√	80,00	83,33	86,67	93,33	65,6		86,67	93,33	
2	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah (IKU)		√	86	88	89	90	59,47		89	90	
3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPD dan RPJMD		√	100	100	100	100	100		100	100	
4	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		√	100	100	100	100	99,26		100	100	
5	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah		√	84	86	88	90	87		88	90	
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah		√	30	40	50	60	33,33		50	60	
2	Indeks Inovasi Daerah			510 (Inovatif)	580 (Inovatif)	640 (Inovatif)	700 (Inovatif)	530 (Inovatif)		640 (Inovatif)	700 (Inovatif)	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 98 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 4 (empat), Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelititan dan Pengembangan yang menjadi kewenangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kabupaten.

Secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan. ***Pelayanan dibidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan dibidang penelitian dan pengembangan ditunjukkan melalui kajian-kajian penelitian dan pengembangan daerah sehingga dapat menunjang perencanaan daerah.***

Bappeda selaku institusi perencana, penelitian dan pengembangan menyiapkan dokumen perencanaan daerah mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, perencanaan teknis pembangunan daerah, serta hasil penelitian dan pengembangan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi organisasi daerah dalam menyusun perencanaan teknis organisasi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Fungsi lain dari Bappeda adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator

yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga Masyarakat Tingkat Nagari, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi dan Sektor Swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya musrenbang berjenjang, mulai dari nagari sampai forum perangkat daerah;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang strategis, dan terpadu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perencanaan Daerah;
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pengelolaan data dan informasi;
7. Meningkatnya hasil kajian penelitian dan pengembangan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan daerah.

Fokus perencanaan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan dapat dilihat dari pencapaian Renstra Bappeda Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Indikator Persentase Pencapaian Nilai SAKIP Komponen Perencanaan pada Tahun 2023 terealisasi 65,6%
2. Indikator Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) pada Tahun 2023 terealisasi (59,47).
3. Indikator Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPD dan RPJMD pada Tahun 2023 terealisasi 100%.
4. Indikator Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2023 terealisasi 99,26%.
5. Indikator Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah pada Tahun 2023 terealisasi 87%.

6. Indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah pada Tahun 2023 realisasinya 33,3%.
7. Indikator Indeks Inovasi Daerah pada Tahun 2023 terealisasi 530 (Inovatif).

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Keberadaan Sekretariat dan empat bidang (Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Litbang; Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA; Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penyediaan data, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas.

Berdasarkan hal tersebut, maka **permasalahan dan hambatan yang dihadapi** dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Belum memadainya kualitas perencanaan pembangunan daerah (Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah)
   Hal ini disebabkan:
   a. Belum Optimalnya SDM Perencana secara baik.
   b. Belum optimalnya pemanfaatan dan ketersediaan data sebagai analisi untuk perencanaan pembangunan.
   c. Belum optimalnya kegiatan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pemanfaatannya sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang.
   d. Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan dengan sistem informasi penganggaran dan sistem informasi pengendalian, monitoring dan evaluasi.
   e. Rendahnya inovasi daerah dalam mendukung pencapaian target perencanaan.
2. Minimnya penelitian untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan (Rekomendasi kelitbangan yang dimanfatkan).

3. Minimnya inovasi daerah (Inovasi daerah dalam pelayanan pemerintahan)

   Hal ini disebabkan:

   a. Belum tersedianya SDM Kelitbangan secara baik
   b. Minimnya pelibatan perangkat daerah penanggungjawab urusan kelitbangan dalam penyusunan kajian-kajian yang ada pada perangkat daerah lain.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai Rancangan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Solok Selatan adalah:

"MEWUJUDKAN SOLOK SELATAN YANG MAU DAN SEJAHTERA"

Dengan menjalankan visi di atas Kabupaten Solok Selatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, ketersediaan infrastruktur daerah dan kawasan pertumbuhan yang terus dikembangkan. Juga diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat kemiskinan serta tingkat pengangguran dan terjaganya keamanan dan ketentraman masyarakat.

Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi serta dampaknya sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif
   - Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat
   - Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

- Meningkatnya daya saing kerja masyarakat

2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah
   - Meningkatnya perekonomian daerah
   - Mengurangi tingkat kemiskinan
   - Meningkatkan daya saing daerah
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani
   - Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang baik dan melayani
4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
   - Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata di kawasan pertumban serta melestarikan lingkungan
   - Meningkatnya penganggulangan bencana
5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dang Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
   - Menjaga pelestarian seni dan budaya yang ada
   - Meningkatkan daya saing kepemudaan dan olahraga
   - Menyelesaikan masalah sosial dan membangun masyarakat madani

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Disamping permasalahan seperti diatas, BAPPEDA memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mewujudkan Solok Selatan yang Maju dan Sejahtera.

Dalam usaha pencapaian Solok Selatan yang Maju dan Sejahtera Tahun 2024, BAPPEDA memiliki dinamika tantangan dan peluang pembangunan sebagai berikut:

1. Pentingnya peran BAPPEDA yang didukung oleh peraturan yang berlaku;
2. Tingginya kepercayaan Bupati dan perangkat daerah terhadap keberadaan BAPPEDA dalam hal perencanaan hingga pengkoordinasian pembangunan daerah;
3. Kualitas SDM BAPPEDA yang handal dan memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
4. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui *e-planning* dengan tetap mengikuti perkembangan teknologi tersebut;

5. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;
6. Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi.

5. Isu-Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

berdasarkan analisis gambaran pelayanan bappeda, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra bappeda, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi bappeda, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Adapun ***isu-isu penting*** penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota serta antar perangkat daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah
2. Masih rendahnya konsistensi dan berkelanjutan antara program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya
3. Partisipasi dan Kerjasama stakeholder dalam proses perencanaan, pengendalian pembangunan masih rendah
4. Pelaksanaan perencanaan partisipatif belum optimal yang ditandai masih rendahnya program/kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan daerah
5. Kompetensi SDM Perencana belum sesuai kebutuhan layanan
6. Belum optimalnya penggunaan system informasi perencanaan pembangunan daerah dan ketersediaan data pendukung pembangunan dalam mendukung perencanaan

7. Masih terdapatnya program/kegiatan yang direncanakan tanpa mempertimbangkan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
8. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan serta terbatasnya hasil riset dan kelitbangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk membandingkan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan analisis kebutuhan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 dan Rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara terperinci disajikan pada Tabel 2.3 berikut:

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN SOLOK SELATAN

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**7.799.000.016**	**URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				6.666.586.116	
	PERENCANAAN				**7.499.000.016**	**PERENCANAAN**				6.271.817.116	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100**	**3.499.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100**	4.783.098.766	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		***Ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu***	**100**	**20.000.000**	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu***	**100**	**20.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Solok Selatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra, Renja/P, RKA/P,DPA/P)	7	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Solok Selatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra, Renja/P, RKA/P,DPA/P)	7	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Solok Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Solok Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	0	-	

			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah***	**100**	**2.415.600.000**	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah***	**100**	3.597.522.978	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Solok Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	2.305.600.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Solok Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	3.488.137.978	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	100.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	109.385.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Solok Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Solok Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		***Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah***	**0**	-	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah***	**0**	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang-undangan	Solok Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	0	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang-undangan	Solok Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	0	-	

			Peraturan Perundang-Undangan					Peraturan Perundang-Undangan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		***Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah***	**100**	**363.000.000**	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah***	**100**	**500.379.800**	
	Penyediaan Komponen Installasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Solok Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	10.000.000	Penyediaan Komponen Installasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Solok Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	7.988.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Solok Selatan	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Solok Selatan	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	49.988.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Solok Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Solok Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	10.549.600	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Solok Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Solok Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	24.866.400	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Solok Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Solok Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	6.990.000	
	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	263.500.000	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	399.997.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Persentase barang milik daerah yang tersedia***	**100**	**300.000.000**	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase barang milik daerah yang tersedia***	**100**	234.621.238	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Solok Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	1	50.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Solok Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	1	41.482.490	
	Pengadaan Mebel	Solok Selatan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	-	Pengadaan Mebel	Solok Selatan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1	15.606.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Solok Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	5	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Solok Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	5	127.772.558	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Solok Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Solok Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	49.760.190	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Persentase ketersediaan jasa penunjang***	**100**	**65.600.000**	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase ketersediaan jasa penunjang***	**100**	163.545.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12	45.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12	39.955.000	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	17.600.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	15.590.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	0	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5	105.000.000	Penambahan Sub Kegiatan ini sebagai bentuk pemisahan Gaji ASN dan TKD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Persentase barang milik daerah yang terpelihara***	**100**	**334.800.000**	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase barang milik daerah yang terpelihara***	**100**	267.029.750	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	159.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	177.006.250	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Solok Selatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2	175.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Solok Selatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2	90.023.500	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN		**Persentase Capaian Sasaran**	**89**	**2.500.000.000**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN**		**Persentase Capaian Sasaran**	**89**	887.135.000	

	DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		**Pembangunan Daerah (IKU)**			**DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**		**Pembangunan Daerah (IKU)**			
			Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPD dan RPJMD	**100**				**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPD dan RPJMD**	**100**		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		***Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu (RKPD, RKPD P, RPJMD, RPJPD)***	**100**	**2.260.000.000**	***Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan***		***Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu (RKPD, RKPD P, RPJMD, RPJPD)***	**100**	786.306.000	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Solok Selatan	Jumlah dokumen rumusan Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah	2	350.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Solok Selatan	Jumlah dokumen rumusan Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah	2	130.000.000	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Solok Selatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Makro Daerah dengan Provinsi dan Nasional	0	90.000.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Solok Selatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Makro Daerah dengan Provinsi dan Nasional	0		
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Solok Selatan	Jumlah Berita Acara Konsultasi dokumen perencanaan Publik	2	75.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Solok Selatan	Jumlah Berita Acara Konsultasi dokumen perencanaan Publik	2	70.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Solok Selatan	Jumlah dokumen berita acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	140.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Solok Selatan	Jumlah dokumen berita acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	25.000.000	

	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Solok Selatan	Jumlah dokumen berita acara Musrenbang Tingkat kabupaten	2	160.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Solok Selatan	Jumlah dokumen berita acara Musrenbang Tingkat kabupaten	2	97.000.000	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Solok Selatan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	7	45.000.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Solok Selatan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	7	27.300.000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun dan Ditetapkan	6	1.400.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun dan Ditetapkan	6	437.006.000	
	Analisis data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		**Persentase Ketersediaan Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100**	**110.000.000**	***Analisis data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***		**Persentase Ketersediaan Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100**	55.779.000	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Solok Selatan	Jumlah dokumen analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	70.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Solok Selatan	Jumlah dokumen analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	25.779.000	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Solok Selatan	Jumlah OPD yang dibina terkait pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah	33	40.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Solok Selatan	Jumlah OPD yang dibina terkait pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah	33	30.000.000	

	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		***Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi dan Pengendalian***	**100**	**130.000.000**	***Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***		***Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi dan Pengendalian***	**100**	45.050.000	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Solok Selatan	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	3	50.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Solok Selatan	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	3	22.300.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Solok Selatan	Tersusun dan terlaporkannya capaian pembangunan daerah (IKU,IKK dan DAK)	4	80.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Solok Selatan	Tersusun dan terlaporkannya capaian pembangunan daerah (IKU,IKK dan DAK)	4	22.750.000	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		**Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100**	**1.500.000.016**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		**Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100**	601.583.350	
			Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	**90**				**Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah**	**90**		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		***Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	**100**	**507.000.000**	***Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***		***Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	**100**	193.423.000	
			Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang	**80**				***Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang***	**80**		

			Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					***Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Renstra, Renja, Renja Perubahan)	2	135.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Renstra, Renja, Renja Perubahan)	2	92.969.200	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di asistensi (Renstra, Renja, Renja Perubahan)	0	60.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di asistensi (Renstra, Renja, Renja Perubahan)	30	10.660.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Solok Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4	20.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Solok Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4	11.551.700	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan penyelarasan Program Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan dengan Perencanaan Provinsi dan	0	35.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan penyelarasan Program Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan dengan Perencanaan Provinsi dan	3		

			Nasional					Nasional			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Renstra, Renja, Renja Perubahan)	2	112.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Renstra, Renja, Renja Perubahan)	2	40.309.600	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diasistensi	0	65.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diasistensi	12	10.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Solok Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4	38.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Solok Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4	27.932.500	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan penyelarasan Program Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan dengan Perencanaan Provinsi dan Nasional	0	42.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan penyelarasan Program Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan dengan Perencanaan Provinsi dan Nasional	3	-	

	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		**Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**100**	**505.000.016**	***Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam***		**Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**100**	211.885.650	
			Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	**80**				**Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**80**		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Renstra, Renja, Renja Perubahan)	2	120.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Renstra, Renja, Renja Perubahan)	2	53.405.200	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diasistensi	8	65.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diasistensi	8	9.983.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Solok Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian (LP2KD dan laporan Pengendalian Triwulanan)	5	80.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Solok Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian (LP2KD dan laporan Pengendalian Triwulanan)	5	70.760.800	

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan penyelarasan Program Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan dengan Perencanaan Provinsi dan Nasional	3	35.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan penyelarasan Program Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan dengan Perencanaan Provinsi dan Nasional	3	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA (Renstra, Renja, Renja Perubahan)	2	80.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA (Renstra, Renja, Renja Perubahan)	2	42.236.800	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diasistensi	6	50.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diasistensi	6	14.999.850	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Solok Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4	40.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Solok Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4	20.500.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan penyelarasan Program Pemerintahan Kabupaten Solok	3	35.000.016	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan penyelarasan Program Pemerintahan Kabupaten Solok	3	-	

			Selatan dengan Perencanaan Provinsi dan Nasional			SDA		Selatan dengan Perencanaan Provinsi dan Nasional			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		**Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100**	**488.000.000**	***Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***		**Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100**	196.274.700	
			Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**80**				**Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**80**		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Renstra, Renja, Renja Perubahan)	2	110.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Renstra, Renja, Renja Perubahan)	2	65.303.900	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diasistensi	4	55.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diasistensi	4	7.500.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Solok Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian (Laporan Pengendalian Triwulanan)	4	45.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Solok Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian (Laporan Pengendalian Triwulanan)	4	40.384.000	

	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan penyelarasan Program Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan dengan Perencanaan Provinsi dan Nasional	3	35.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan penyelarasan Program Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan dengan Perencanaan Provinsi dan Nasional	3	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Renstra, Renja, Renja Perubahan)	2	115.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Renstra, Renja, Renja Perubahan)	2	50.236.900	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diasistensi	6	61.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diasistensi	6	7.500.000,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Solok Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4	32.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Solok Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4	25.349.900	

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan penyelarasan Program Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan dengan Perencanaan Provinsi dan Nasional	2	35.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan penyelarasan Program Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan dengan Perencanaan Provinsi dan Nasional	2	-	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**300.000.000**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				394.769.000	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		**Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah**	**50**	**300.000.000**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**		**Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah**		394.769.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		**Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**0**	-	***Pengembangan Inovasi dan Teknologi***		***Persentase Inovasi yang Dimanfaatkan***		-	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Solok Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	0	-	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan pangan	Solok Selatan	Jumlah kajian Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan pangan	-	-	
	Pengelolaan Data	Solok	Jumlah	0	-	Penelitian dan	Solok	Jumlah kajian	-	-	

	Kelitbangan dan Peraturan	Selatan	dokumen data kelitbangan dan peraturan yang dokumentasikan			Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Selatan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		***Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan***	**0**	-	***Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***		***Persentase Inovasi yang Dimanfaatkan***	-		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Solok Selatan	Jumlah dokumen kajian tentang Aspek-aspek Sosial yang disusun	0	-	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Solok Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	-		
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Solok Selatan	Jumlah Kajian tentang Pengembangan pariwisata yang disusun	0	-	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Solok Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Solok Selatan	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0	-	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Solok Selatan	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	75	300.000.000	

	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	-	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	300.000.000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		***Persentase Inovasi yang Dimanfaatkan***	**75**	**195.000.000**	***Pengembangan Inovasi dan Teknologi***		***Persentase Inovasi yang Dimanfaatkan***	-	94.769.000	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan pangan	Solok Selatan	Jumlah kajian Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan pangan	0		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan pangan	Solok Selatan	Jumlah kajian Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan pangan	-	-	
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Solok Selatan	Jumlah kajian Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	195.000.000	Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Solok Selatan	Jumlah kajian Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	-	-	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		***Indek Inovasi Daerah***	**640**	**105.000.000**	***Pengembangan Inovasi dan Teknologi***		***Indek Inovasi Daerah***	-	-	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Solok Selatan	Jumlah Rekomendasi Inovasi Daerah	4	55.000.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Solok Selatan	Jumlah Rekomendasi Inovasi Daerah	-	60.000.000	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Solok Selatan	Jumlah hasil-hasil kelitbangan yang disosialisasikan	5	50.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Solok Selatan	Jumlah hasil-hasil kelitbangan yang disosialisasikan	-	34.769.000	

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program /kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan

Sesuai dengan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Terdapat perbedaan pada rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan dimana pada rangcangan awal diambil dari renstra tahun renstra sedangkan hasil analisis kebutuhan yaitu berdasarkan untk mencapai target dan kebutuhan pencapaian sasaran)

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 anggaran pada Badan Perencanaan Daerah disesuaikan dengan Renstra yang telah disusun sebanyak Rp. 7.799.000.016,- Sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk pelaksanaan program/kegiatan dianggarkan sebanyak Rp. 6.666.586.116,-

Terdapatnya perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan Hasil Analisas Kebutuhan terdapatnya rumusan sub kegiatan baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD yaitu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang merupakan pemisahan dari Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berguna dalam pembayaran gaji Tenaga Kerja Daerah (TKD). Perbandingan lainnya dari Rancangan RKPD dengan Analisis Kebutuhan yaitu setelah dilakukan asistensi dan penelaahan terhadap rencana pelaksanaan terhadap beberapa sub kegiatan yang tidak dilaksanakan karena kekurangan anggaran.

Juga terdapat penyesuaian kebutuhan anggaran disebabkan adanya beberapa sub kegiatan yang tidak diakomodir dalam renja tahun ini, ini disebabkan bahwa capaian ouput dari kegiatan yang di hilangkan akan diakomodir oleh kegiatan yang muncul, sehingga terjadi penambahan anggaran dari subkegiatan tertentu.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk tahun 2025 usulan program dan kegiatan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan diperoleh mulai dari musrenbang tingkat kecamatan sampai dengan musrenbang kabupaten dan dari pemangku jabatan dan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah belum ada usulan program ataupun kegiatan dari masyarakat berdasarkan musrenbang yang dilaksanakan di kecamatan.

Usulan tersebut tentunya ada yang bisa terakomodir dan tidak terakomodir terkait dengan isu-isu penting yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta anggaran yang diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka memenuhi target kinerja. Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan belum ada usulan yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan dana bantuan dari APBD Propinsi ataupun APBN.

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA BAPPEDA KABUPATEN SOLOK SELATAN

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah, selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila.

Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Adapun kebijakan Nasional sebagai mana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 sebagai berikut:

TABEL 3.1
TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL

No.	Tema Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Nasional	
1	*2*	*3*	
1	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	1.	Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa
		2.	Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah
		3.	Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026, yaitu :

TABEL 3.2
TUJUAN DAN SASARAN RENJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Tujuan	Sasaran
1	*2*	*3*
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran renstra tahun 2016-2021, maka tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai LEADER dari perencanaan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 merupakan implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka melaksanakan visi dan misi pembangunan daerah di Kabupaten Solok Selatan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian SDGs
2. Pengentasan Kemiskinan
3. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah
4. Pengembangan Daerah Terisolir
5. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional
6. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagan Bappeda.

Pada Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, mempunyai Dua Urusan, yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Pada Urusan Perencanaan terdapat 3 program, 12 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Sedangkan untuk urusan penelitian dan pengembangan terdapat 1 program 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 adanya perbedaan antara Rancangan Awal dengan Analisa Kebutuhan dikarenakan adanya penambahan 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang merupakan pemisahan antar gaji aparatur sipil negara dengan tenaga kerja daerah. Dan untuk beberapa sub kegiatan belum terakomodir dalam rancangan awal/tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD yang disebabkan oleh:

1. Penyesuaian dengan kebijakan nasional dan provinsi
2. Penyesuaian dengan hasil evaluasi tahun 2024
3. Analisa Kebutuhan Operasional

Pagu Indikatif

Program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Solok Selatan di sajikan pada tabel berikut:

TABEL 3.3

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BAPPEDA

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
			Pelaksanaan Konsultasi Publik
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
III	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrasturktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrasturktur
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
IV	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berisi program/kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Solok Selatan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 yang meliputi narasi menjelaskan perencanaan pendanaan dan jumlah program kegiatan yang dilakukan)

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN SOLOK SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7		15	16	17
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			**6.666.586.116,00**					**6.486.865.058,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**6.666.586.116,00**					**6.486.865.058,00**	
5 01	**PERENCANAAN**			**6.271.817.116,00**					**6.026.365.058,00**	
5 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	**4.783.098.766,00**				-	**4.575.365.058,00**	
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00			Perangkat Daerah	-	20.000.000,00	
5 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	100 Persen	3.597.522.978,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	3.254.865.058,00	

5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.488.137.978,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		3.145.480.058,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	109.385.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		109.385.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	500.379.800,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	552.000.000,00	
5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.988.800,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		8.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	49.988.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.549.600,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	24.866.400,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	6.990.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		7.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	399.997.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia	100 Persen	234.621.238,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	242.500.000,00	
5 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	41.482.490,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	15.606.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		17.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	127.772.558,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	49.760.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	100 Persen	163.545.000,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	171.000.000,00	
5 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.955.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	15.590.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	105.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 Persen	267.029.750,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	335.000.000,00	
5 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	177.006.250,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		185.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	90.023.500,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5 01 02		**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPD dan RPJMD Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah (IKU)**	**100 Persen 89 persen**	**887.135.000,00**				-	**740.000.000,00**	
5 01 02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Ketersediaan Dokumen perencanaan tepat Waktu (RKPD, RKPD P, RPJMD dan RPJP	100 Persen	786.306.000,00			Perangkat Daerah	-	610.000.000,00	
5 01 02	2.01 0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah									
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02	2.01 0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik									
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	70.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02	2.01 0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah									
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	25.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	97.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.01 0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan									
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	7 Usulan	27.300.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.01 0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	6 Dokumen	437.006.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	55.779.000,00			Perangkat Daerah	-	70.000.000,00	

5 01 02 2.02 0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	25.779.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.02 0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah									
		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang	30.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi dan Pengendalian	100 Persen	45.050.000,00			Perangkat Daerah	-	60.000.000,00	
5 01 02 2.03 0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	22.300.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5 01 02 2.03 0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	22.750.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen 88 persen**	**601.583.350,00**				-	**711.000.000,00**	
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	88 Persen 100 Persen	193.423.000,00			Perangkat Daerah	-	290.000.000,00	
5 01 03 2.01 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	92.969.200,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5 01 03 2.01 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	10.660.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	11.551.700,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.01 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	40.309.600,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.01 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5 01 03 2.01 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	27.932.500,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	88 Persen	211.885.650,00			Perangkat Daerah	-	211.000.000,00	
5 01 03 2.02 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	53.405.200,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.02 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	9.983.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5 01 03 2.02 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	70.760.800,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		72.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.02 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	42.236.800,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		43.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.02 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	14.999.850,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	20.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		21.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	196.274.700,00			Perangkat Daerah	-	210.000.000,00	
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	65.303.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		68.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	7.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5 01 03 2.03 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	40.384.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		42.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	50.236.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		52.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	7.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	25.349.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah		27.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5 05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**394.769.000,00**					**460.500.000,00**	
5 05 02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan Dalam Perumusan Kebijakan Daerah**	**50 persen**	**394.769.000,00**				-	**460.500.000,00**	
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	75 Persen	300.000.000,00			Perangkat Daerah	-	350.000.000,00	
5 05 02 2.03 0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Perangkat Daerah		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Indeks Inovasi Daerah Persentase Inovasi yang Dimanfaatkan	640 Indeks 75 Persen	94.769.000,00			Perangkat Daerah	-	110.500.000,00	
5 05 02 2.04 0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif									
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4 Laporan	60.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Perangkat Daerah		60.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5 05 02 2.04 0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan									
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	4 Laporan	34.769.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Perangkat Daerah		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JUMLAH				**6.666.586.116,00**					**6.486.865.058,00**	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun ke 5 (lima) periode Renstra 2021-2026, dan Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025. Pembangunan Daerah program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai dan mendukung tercapainya visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Dimana dalam melaksanakan kegiatan yang telah diajukan, haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu efektif, efisien dan tepat guna.

5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adapun catatan penting yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Perlunya penyesuaian terhadap target yang ada pada Rencana Strategis kerena adanya beberapa sub kegiatan pada renstra yan tidak dilaksanakan karena penyesuaian pelaksanaan anggaran.
2. Penguatan capaian target di masing-masing sub kegiatan terutama di bidang-bidang teknis, terkait rendahnya persentase IKU di Perangkat Daerah
3. Perlunya penambahan anggaran, terutama di bidang-bidang teknis untuk lebih detail dan sering melakukan monev capai target pertriwulan Perangkat Daerah yang diampunya, sebagai dampak rendahya capaian IKK dan SPM di tiap Perangkat Daerah.
4. Penguatan pada kegiatan pengendaian di masing-masing bidang teknis, serta memberikan pemahaman lebih kepada Perangkat

Daerah yang diampu masing-masing bidang teknis, agar tercapainya persentasi nilai sakip komponen perencanaan.

5. Adanya kembali perhitungan jumlah fungsional yang baru mengingat terbatasnya jumlah perencana di Bappeda.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional yang menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk:
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025 maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demi penyempurnaan program dan kegiatan di masa mendatang bimbingan dan arahan dari Pimpinan Daerah serta masukan-masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tetap menjadi harapan kami. Dan penyusunan Rencana Kerja ini juga tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh aparatur Bappeda serta peran aktif *stakeholder*

yang bersangkutan. Atas segala bimbingan, arahan, dukungan, kerjasama dan masukan tersebut kami ucapkan terima kasih.

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN,



TAUFIK EFFENDI, S.Pd, MM
NIP. 19670421 199003 1 005

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Program Pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tupoksi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 ini mencakup Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan acuan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan.

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan sebagai dasar pembuatan Rencana Kerja Anggaran bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025, dan juga berfungsi sebagai bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan serta sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan Rencana Anggran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

Demikian dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 ini dibuat, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Tahun 2025.

Padang Aro, Juli 2024
Kepala BKPSDM

IRWANDI OSMAIDI, SE
NIP. 19670919 199003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 22
2.4 Terhadap Rancangan Awal RKPD 24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 41
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 43
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 46
3.4 Program dan Kegiatan 47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH . 50

BAB V PENUTUP 57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 Kabupaten Solok Selatan 9

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan 21

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Solok Selatan 25

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Solok Selatan 39

Tabel 3.1 Misi, Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kabupaten Solok Selatan 46

TABEL 3.2 Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan 47

TABEL 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Didalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Tahunan Daerah. Selain itu guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Proses Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, oleh karena itu

penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, evaluasi kinerja pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Rencana Kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, karena disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

m. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
o. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan;
p. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025;
b. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;
c. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang pada BKPSDM dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
f. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada pada BKPSDM.

b. Tujuan

Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja BKPSDM 2025 adalah dijabarkannya visi, misi Bupati dan Wakil Bupati serta program kerja Kepala Daerah, melalui pelaksanakan tugas pokok dan fungsi BKPSDM pada tahun anggaran berjalan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan 2025. Serta diharapkan adalah dapat memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan manajemen kepegawaian, maupun dalam penyelenggaraan aktivitas-aktivitas kegiatan internal di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Berisi Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Reviuw

terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dari pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Solok Selatan, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direlisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggran 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan 2 program yang didalamnya terdapat 10 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 34.921.150.853,-.

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan Pengukuran Kinerja untuk Tahun Anggaran 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam Pencapaian Kinerja.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan dan kelemahan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, pada umumnya telah memenuhi

target kinerja hasil/ keluaran karena merupakan kegiatan rutinitas tahunan dan kebutuhan kantor.

2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Pada Umumnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun Anggaran 2023 realisasi Kinerja maupun Keuangan terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan telah memenuhi target kinerja.

2.1.3 Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak ada realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2023.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/ Kegiatan

Adapun faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan kegiatan adalah :

1. Tersedianya Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Terlakasananya koordinasi antar Perangkat Daerah dengan baik.
3. Adanya komitmen antara pihak terkait.
4. Pembagian Tugas (job description).

Adapun untuk melihat lebih rinci terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023

Kabupaten Solok Selatan

Nama Perangkat Daerah: BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan (2024)	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = (8/7)*	*10*	*11 = (6+8+10)*	*12 = (11/5)*
	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan			***100***	***33,33***	***100***	***100,00***	100,00	***100,00***	**66,67**	**66,67**
	KEPEGAWAIAN			***100***	***33,33***	***100***	***100,00***	100,00	***100,00***	**66,67**	**66,67**

01.03.00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100,00**	100,00	**100,00**	**66,67**	**66,67**
5.03.01.2.02	**Administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	33,33	**100**	**97,00**	97,00	**100,00**	**66,17**	**66,17**
5.03.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1212	564,00	327	282,00	86,24	327,00	**665,50**	**54,91**
5.03.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24	8,00	4	4,00	100,00	4,00	**9,33**	**38,89**

5.03.01.2.05	**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Kemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**50,00**	**100**	**100,00**	100,00	**100,00**	**83,33**	**83,33**
5.03.01.2.05.10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Orang	50	50,00	0		#DIV/0!	0,00	**50,00**	**100,00**
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**43,25**	**100**	**23,25**	23,25	**100,00**	**63,79**	**63,79**
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	24	7,55	4	3,55	88,75	4,00	**8,81**	**36,70**
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	24	7,87	4	3,87	96,75	4,00	**9,18**	**38,26**

		disediakan									
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	24	7,84	4	3,84	96,00	4,00	**9,15**	**38,11**
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	24	8,00	4	4,00	100,00	4,00	**9,33**	**38,89**
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	16	4,00	4	4,00	100,00	4,00	**5,33**	**33,33**
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	7,99	4	3,99	99,75	4,00	**9,32**	**38,84**

5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**Persen**	**100**	0,00	**100**	**100,00**	100,00	**100,00**	**33,33**	**33,33**
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Julmah Peralatan dan Mesin Kantor Yang Disediakan	Unit	6	0,00	3	6,00	200,00	3,00	**1,50**	**25,00**
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia**	**Persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100,00**	100,00	**100,00**	**66,67**	**66,67**
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	8,00	4	3,83	95,75	4,00	**9,31**	**38,77**
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	24	8,00	4	4,00	100,00	4,00	**9,33**	**38,89**

5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	24	8,00	4	3,63	90,75	4,00	**9,27**	**38,63**
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Tenaga Pendukung Operasional Kantor yang dibayarkan Honornya	Laporan	16	0,00	12	0,00	0,00	12,00	**2,00**	**12,50**
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik Daerah yang terpelihara**		**100**	**33,33**	**100**	**100,00**	100,00	**100,00**	**66,67**	**66,67**
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan	Unit	7	2,33	7	3,99	57,00	7,00	**4,17**	**59,50**

		dibayarkan Pajaknya									
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	0,33	1	1,00	100,00	1,00	**0,67**	**66,67**
05.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN**	**Indeks Sistem Merit**	**Angka**	**350**	**176,50**	**300**	**222,00**	74,00	**300,00**	**263,50**	**81,08**
5.03.02.2.01	**Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase perencanaan & pengadaan pegawai yang sesuai dengan ANJAB & ABK**	**Persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100,00**	100,00	**100,00**	**66,67**	**66,67**
		Jumlah sistem informasi yang aktif	**Aplikasi**	**1**	**1,00**	**1**	**1,00**	100,00	**1,00**	**1,33**	**133,33**

5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Rencana kebutuhan Pegawai yang Disusun dan dievaluasi	Dokumen	6	2,00	1	1,00	100,00	1,00	**2,33**	**38,89**
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CASN/PNS yang dilakukan Pembekalan dan Pengambilan Sumpah	Orang	500	249,00	49	99,17	202,39	49,00	**273,70**	**54,74**
		Jumlah Tahap Pelaksanaan Rekuitmen CPNS yang terpenuhi sesuai dengan aturan	Tahap	30	5,00	5	3,11	62,20	5,00	**6,35**	**21,17**
		Jumlah Tahap Pelaksanaan Rekruitmen CPPPK yang terpenuhi sesuai aturan	Tahap	30	5,00	5	1,11	22,20	5,00	**6,02**	**20,06**
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	Jumlah PNS Pensiun yang Terlayani	Orang	588	98,00	80	0,00	0,00	80,00	**111,33**	**18,93**

	Pemberhentian	pengurusan Taspennya									
		Jumlah PNS yang terlayani Pengurusannnya	Orang	900	150,00	80	0,00	0,00	80,00	**163,33**	**18,15**
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	Lembaga	1	1,00	1	0,00	0,00	1,00	**1,17**	**116,67**
5.03.02.2.01.09	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang dikelola datanya	Orang	3467	3467,00	3444	441,23	12,81	3444,00	**4114,54**	**118,68**
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah PNS yang data kepegawaiannya telah dimutakhirkan	Orang	20802	3467,00	3467	331,00	9,55	3467,00	**4100,00**	**19,71**
		Jumlah PNS yang terlayani Pembuatan Karis dan Karsu	Orang	3000	500,00	500	45,00	9,00	500,00	**590,83**	**19,69**

5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Pegawai yang promosi dan mutasi berdasarkan talent pool**	**Persen**	**100**	33,33	**50**	**100,00**	200,00	**50,00**	**58,33**	**58,33**
5.03.002.2.02.001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen regulasi terkait Mutasi	Dokumen	6	1,00		0,00	0,00		**1,00**	**16,67**
		Jumlah Surat Keputusan JP dan JF yang telah diterbitkan	SK	300	50,00		0,00	0,00		**50,00**	**16,67**
		Jumlah mutasi yang dilaksanakan	Kali	30	20,00		15,00	0,00		**22,50**	**75,00**
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang difasilitasi kenaikan Pangkatnya secara tepat waktu	Orang	3600	1322,24	500	522,24	104,45	500,00	**1492,61**	**41,46**
		Jumlah PNS yang difasilitasi pelaksanaan ujian dinas dan ujian PI di	Orang	910	120,00	50	0,00	0,00	50,00	**128,33**	**14,10**

		Kab. Solok Selatan									
		Jumlah PNS yang diproses izin pemakaian gelar dan perhitungan masa kerjanya	Orang	180	68,11	50	38,11	76,22	50,00	**82,80**	**46,00**
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Lelang JPT yang dilaksanakan secara Terbuka	Jabatan	53	10,92	1	3,92	392,00	1,00	**11,74**	**22,15**
5.02.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan kinerja**	**Persen**	**100**	33,33	**50**	**100,00**	200,00	**50,00**	**58,33**	**58,33**
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Blueprint Assessment Center	Dokumen	6	46,18	1	45,18	4518,00	1,00	**53,88**	**897,94**
		Jumlah Pegawai yang dinilai Kompetensinya	Orang	295	85,00	2100	45,00	2,14	2100,00	**442,50**	**150,00**

5.03.02.2.03.04	Pengelolaan pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang diberikan bantuan dan difasilitasi tugas belajarnya	Orang	23	2,00	2	0,00	0,00	2,00	**2,33**	**10,14**
		Persentase ASN yang dibantu dan difasilitasi izin belajarnya	Persen	100	100,00	0	0,00	0,00	0,00	**100,00**	**100,00**
	Koordinasi dan Kerjasama pelaksanaan Diklat	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	200	0,00	0	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui impasing	Orang	600	100,00	0	0,00	0,00	0,00	**100,00**	**16,67**

		Jumlah Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama	Orang	600	109,29	0	9,29	0,00	0,00	**110,84**	**18,47**
		jumlah pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan jabatan	Orang	1500	333,23	10	83,23	832,30	10,00	**348,77**	**23,25**
5.02.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan indikator kinerja individu**	**Persen**	**100**	33,33	**50**	**100,00**	200,00	**50,00**	**58,33**	**58,33**
		Persentase Pegawai dengan Nilai SKP "Sangat Baik"	**Persen**	**100**	33,33	**80**	**100,00**	125,00	**80,00**	**63,33**	**63,33**

5.03.02.2.04.01	Penyusunan kebijakan penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Indikator kinerja ASN yang disusun secara akuntabel	Dokumen	6	1,36	1	0,36	36,00	1,00	**1,59**	**26,44**
		Jumlah dokumen Pola dan Pengambangan Karir ASN	Dokumen	6	1,36	1	0,36	36,00	1,00	**1,59**	**26,44**
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya secara objektif	Orang	21152	3723,00	3467	76,00	2,19	3467,00	**4313,50**	**20,39**
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi pegawai	Jumlah PNS yang diberi Penghargaan tanda Jasa (Satya Lencana Karya Satya)	Orang	2800	200,00	60	0,00	0,00	60,00	**210,00**	**7,50**
		Jumlah PNS yang diberikan Penghargaan karena Berprestasi	Orang	120	20,00	0	0,00	#DIV/0!	0,00	**20,00**	**16,67**

		Jumlah PNS yang diberikan Penghargaan Karena memasuki Masa Purna Bhakti	Orang	492	77,00	0	0,00	0,00	0,00	**77,00**	**15,65**
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Regulasi terkait disiplin, kode etik, dan kode prilaku	Dokumen	18	6,54	3	3,54	118,00	3,00	**7,63**	**42,39**
		Persentase ASN yang tidak melanggar disiplin	Persen	100	142,06	97	47,06	48,52	97,00	**166,07**	**166,07**
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian pelanggaran Disiplin ASN	Persentase pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti	Persen	100	139,65	100	39,65	39,65	100,00	**162,93**	**162,93**
		Persentase pelanggaran Kode etik yang ditindak lanjuti	Persen	100	139,65	100	39,65	39,65	100,00	**162,93**	**162,93**
		Peresentase Pelanggaran kode prilaku yang ditindaklanjuti	Persen	100	139,65	100	39,65	39,65	100,00	**162,93**	**162,93**

5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses izin Perceraian Pegawai	Persentase Pelayanan proses izin perceraian ASN	Persen	100	100,00	100	0,00	0,00	100,00	**116,67**	**116,67**
05.04	***PENDIDIKAN DAN PELATIHAN***			***75***	***47,12***	***70***	***48,29***	68,99	***70,00***	**66,84**	**89,11**
05.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kompetensi)**	**Indeks**	**75**	**33,33**	**70**	**100,00**	142,86	**70,00**	**61,67**	**82,22**
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kopetensi Teknis**	**Persentase Data ASN yang telah mengikuti Kompetensi teknis, fungsional, Struktural dan Pemerintahan manajerial**	**Persen**	**100**	33,33	**100**	**100,00**	100,00	**100,00**	**66,67**	**66,67**
2.04.02.2.01.01	Penyusunan kebijakan teknis dan rencana Pengembangan Kopetensi Teknis	Jumlah Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat	Dokumen	6	2,00	1	1,00	100,00	1,00	**2,33**	**38,89**

	Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Adminstrasi Penyelenggara Urusan pemerintah konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Analisa Kebutuhan Pengembangan Kopetensi non Clasical	Dokumen	6	2,00	1	1,00	100,00	1,00	**2,33**	**38,89**
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan kopetensi manajerial dan fungsional**	**Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat sesuai analisa kebutuhan diklat**	**Persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100,00**	100,00	**100,00**	**66,67**	**66,67**
2.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan pengembangan kopetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan	Jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar / Latsar	Orang	440	240,00	240	120,43	50,18	0,00	**260,07**	**59,11**
		Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional	Orang	440	40,00	8	20,07	250,88	8,00	**44,68**	**10,15**

	dan prajabatan	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan	Orang	100	6,00	6	3,01	50,17	0,00	**6,50**	**6,50**
		Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis	Orang	450	20,00	40	10,04	25,10	40,00	**28,34**	**6,30**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok Selatan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai fungsi penunjang Kepegawaian di Kabupaten Solok Selatan untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Badan beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Untuk pengukuran pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok selatan telah menetapkan 2 indikator sebagai alat ukur pencapaian target, yaitu:

1. Indeks Sistem Merit
2. Indeks Profesionalitas ASN

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Solok Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-2 (2023)	Tahu n n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Indeks Sistem Merit		IKU	Poin	250	300	325	350	176,5	222	325	350	
2	Indeks Profesionalitas ASN		IKU	Poin	65	70	75	80	47,12	48,29	75	80	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu- isu penting di bidang kepegawaian, berikut isu-isu tersebut antara lain:

1. Penyederhanaan birokrasi sesuai pidato Presiden Republik Indonesia.
2. Penerapan Sistem manajemen Kinerja sesuai amanat PP No. 30 Tahun 2019.
3. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur.
4. Nilai Sistem Merit.
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepegawaian.

Penempatan Aparatur sesuai kemampuan dan kompetensi Aparatur.

A. Kendala-kendala:
    1. Belum optimalnya dalam melaksanakan pelayanan dalam bidang kepegawaian.
    2. Masih rendahnya kompetensi SDM ASN.
    3. Belum Optimalnya dalam penataan dan penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang ada.
    4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan Perangkat Daerah yang dapat menunjang peningkatan pelayanan Perangkat Daerah.

B. Peluang:
    1. Perkembangan teknologi informasi bidang kepegawaian.
    2. Aparatur sudah mengikuti perkembangan aturan-aturan kepegawaian.
    3. Meningkatnya kedisiplinan pegawai melalui absensi elektronik dan penilaian kinerja yang berdampak terhadap penghasilan ASN.
    4. Peningkatan kuantitas sumber daya aparatur melalui seleksi CPNS 2022.

C. Kekuatan:

1. Semangat kerja ASN.
2. Loyalitas dan Dedikasi pegawai.
3. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian sudah mulai baik.
4. Pelaksanaan Sosialisasi Kepegawaian sudah dilaksanakan.
5. Penataan manajemen pelayanan Perangkat Daerah.
6. Kelemahan:
   i. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.
   ii. Jarak tempuh koordinasi dengan pemerintah provinsi dan BKN regional yang relatif jauh.
   iii. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menunjang pelayanan kepegawaian.
   iv. Masih kurangnya inovasi-inovasi pegawai dalam bekerja.
   v. Masih rendahnya tingkat kesadaran pegawai akan tingkat pencapaian kinerja.
   vi. Minimnya pengetahuan pegawai tentang perencanaan dan target yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
7. Tantangan:
   i. Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pelaporan kegiatan.
   ii. Perubahan dan perkembangan peraturan di bidang kepegawaian.
   iii. Penempatan aparatur birokrasi yang sesuai dengan kompetensi masih rendah.
   iv. Pengaruh politik terhadap kebijakan-kebijakan kepegawaian.
   v. Belum jelasnya pola karir ASN.

Berdasarkan analisis, kendala, peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan yang dihadapi di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Solok Selatan memiliki isu penting sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya Tata Kelola ASN
2. Rendahnya kapasitas dan kapabilitas kinerja pegawai dan organisasi sehingga berdampak kepada kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah masih rendah.

3. Manajemen kepegawaian yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme.
4. Masih Rendahnya Profesionalisme ASN
5. Rendahnya tingkat produktivitas ASN yang disebabkan minimnya Pendidikan dan pengembangan aparatur (diklat) baik diklat structural maupun fungsional
6. Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai kebutuhan yang nyata.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 dan Renstra Perangkat Daerah 2021 sd 2026, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM mengajukan 3 program yang terdiri dari 10 Kegiatan. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa terlaksana dengan baik dan mencapai target yang telah ditentukan. Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2025 yang merupakan review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Solok Selatan:

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Solok Selatan

Perangkat Daerah: BKPSDM

No	Rancangan Awal Renstra						Hasil Analisis Kebutuhan dari SIPD						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu	
1	*2*		*10*	*11*	*12*	*13*	*8*	*9*	*3*	*5*		*6*	*14*
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					*23.469.817.119*						*30.789.652.801*	
	KEPEGAWAIAN					*23.469.817.119*						*30.789.652.801*	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					*22.137.512.319*						*29.261.397.801*	
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kinerja pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	21.475.285.971	Administrasi keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kinerja pelayanan Keuangan	100	Persen	28.785.121.653	

									Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Solsel*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 102	Orang Orang	21.358.285.971	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Solsel*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 102	Orang Orang	28.668.121.653	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Solsel* *Solsel*	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen	117.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Solsel* *Solsel*	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen	117.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan Keinerja pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**366.638.348**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Keinerja pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**180.688.148**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	*Solsel*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	4.494.948	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	*Solsel*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	4.494.948	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Solsel*	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Paket	31.650.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Solsel*	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Paket	15.699.800	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Solsel*	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	Paket	5.498.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Solsel*	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	Paket	5.498.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Solsel*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	19.999.900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Solsel*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	19.999.900	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Solsel*	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	Laporan	4.995.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Solsel*	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	Laporan	4.995.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Solsel*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Solsel*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	130.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang	***Solsel***	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**100**	**Persen**	**27.500.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang**	***Solsel***	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**100**	**Persen**	**27.500.000**	

	Pemerintah Daerah	*Solsel*	**Julmah Peralatan dan Mesin Kantor Yang Disediakan**				**Pemerintah Daerah**	*Solsel*	**Julmah Peralatan dan Mesin Kantor Yang Disediakan**				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Solsel*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kantor Yang Disediakan	2	Unit	27.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Solsel*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kantor Yang Disediakan	2	Unit	27.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Solsel***	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia**	**100**	**Persen**	**156.100.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Solsel***	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia**	**100**	**Persen**	**156.100.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Solsel*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Solsel*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Solsel*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Laporan	38.520.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Solsel*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Laporan	38.520.000	

	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Solsel*	Jumlah Laporan penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Laporan	9.580.000	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Solsel*	Jumlah Laporan penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Laporan	9.580.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Solsel*	Jumlah Laporan Tenaga Pendukung Operasional Kantor yang dibayarkan Honornya	4	Laporan	105.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Solsel*	Jumlah Laporan Tenaga Pendukung Operasional Kantor yang dibayarkan Honornya	4	Laporan	105.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah	***Solsel***	**Persentase barang milik Daerah yang terpelihara**	**100**	**Persen**	**111.988.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah**	***Solsel***	**Persentase barang milik Daerah yang terpelihara**	**100**	**Persen**	**111.988.000**	
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Solsel*	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	90.988.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Solsel*	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	90.988.000	

	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Solsel*	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	21.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Solsel*	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	21.000.000	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN	***Solsel***	**Indeks Sistem Merit**	**325**	**Angka**	**1.014.079.800**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN**	***Solsel***	**Indeks Sistem Merit**	**325**	**Angka**	**1.064.414.000**	
	Kegitan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	***Solsel***	**Persentase perencanaan & pengadaan pegawai yang sesuai dengan ANJAB & ABK**	**100**	**Persen**	**298.570.800**	**Kegitan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	***Solsel***	**Persentase perencanaan & pengadaan pegawai yang sesuai dengan ANJAB & ABK**	**100**	**Persen**	**404.121.200**	
			Jumlah sistem informasi yang aktif	**1**	**Aplikasi**				**Jumlah sistem informasi yang aktif**	**1**	**Aplikasi**		
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	*Solsel*	Jumlah Dokumen Rencana kebutuhan Pegawai yang Disususn dan dievaluasi	1	dokumen	-	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	*Solsel*	Jumlah Dokumen Rencana kebutuhan Pegawai yang Disususn dan dievaluasi	1	dokumen	-	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	*Solsel*	Jumlah CASN / PNS yang dilakukan Pembekalan dan Pengambilan Sumpah	150	orang	229.615.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	*Solsel*	Jumlah CASN / PNS yang dilakukan Pembekalan dan Pengambilan	150	orang	329.626.300	

									Sumpah				
		Solsel	JumlahTahap Pelaksanaan Rekuitmen CPNS yang terpenuhi sesuai dengan aturan	5	Tahap			*Solsel*	JumlahTahap Pelaksanaan Rekuitmen CPNS yang terpenuhi sesuai dengan aturan	5	Tahap		
		Solsel	Jumlah Tahap Pelaksanaan rekuitmen CPPPK yang terpenuhi sesuai aturan	5	Tahap			*Solsel*	Jumlah Tahap Pelaksanaan rekuitmen CPPPK yang terpenuhi sesuai aturan	5	Tahap		
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	*Solsel*	Jumlah PNS Pensiun yang Terlayani	98	Orang	20.850.200	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	*Solsel*	Jumlah PNS Pensiun yang Terlayani	98	Orang	23.334.100	
		Solsel	Jumlah PNS yang terlayani Pengurusannnya	150	orang			*Solsel*	Jumlah PNS yang terlayani Pengurusannnya	150	orang		
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	*Solsel*	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1	Lembaga	20.005.400	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	*Solsel*	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1	Lembaga	21.711.300	Penambahan Anggaran karena Volume Kegiatan yang Bertambah

	Pengelolaan Data Kepegawaian	*Solsel*	Jumlah PNS yang data Kepegawaiannya telah dimutakhirkan	3467	orang	28.100.200	Pengelolaan Data Kepegawaian	*Solsel*	Jumlah PNS yang data Kepegawaiannya telah dimutakhirkan	3467	orang	29.449.500	
		Solsel	Jumlah PNS yang terlayani Pembuatan Karpeg, Karis dan Karsu	500	orang			*Solsel*	Jumlah PNS yang terlayani Pembuatan Karpeg, Karis dan Karsu	500	orang		
		Solsel	Pengelolaan Sisten Informasi Kepegawaian	3467	Orang			*Solsel*	Pengelolaan Sisten Informasi Kepegawaian	3467	Orang		
	Mutasi dan Promosi ASN	***Solsel***	**Persentase Pegawai yang promosi dan mutasi berdasarkan talent pool**	**50**	**Persen**	**160.153.000**	**Mutasi dan Promosi ASN**	***Solsel***	**Persentase Pegawai yang promosi dan mutasi berdasarkan talent pool**	**50**	**Persen**	**222.720.600**	
	Pengelolaan Mutasi ASN	*Solsel*	Jumlah Dokumen regulasi terkait Mutasi	1	dokumen		Pengelolaan Mutasi ASN	*Solsel*	Jumlah Dokumen regulasi terkait Mutasi	1	dokumen	-	
		Solsel	Jumlah Surat Kepeutusan JP dan JF yang Telah disusun Persentase	50	SK			*Solsel*	Jumlah Surat Kepeutusan JP dan JF yang Telah disusun Persentase	50	SK		
		Solsel	Jumlah mutasi yang dilaksanakan	5	kali			*Solsel*	Jumlah mutasi yang dilaksanakan	5	kali		

	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Solsel*	Jumlah PNS yang difasilitasi kenaikan Pangkatnya secara tepat waktu	800	orang	24.766.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Solsel*	Jumlah PNS yang difasilitasi kenaikan Pangkatnya secara tepat waktu	800	orang	86.290.800	
		Solsel	Jumlah PNS yang difasilitasi pelaksanaan ujian dinas dan ujian PI di Kab. Solok Selatan	120	orang			*Solsel*	Jumlah PNS yang difasilitasi pelaksanaan ujian dinas dan ujian PI di Kab. Solok Selatan	120	orang		
		Solsel	Jumlah PNS yang diproses izin pemakaian gelar dan perhitungan masa kerjanya	30	orang			*Solsel*	Jumlah PNS yang diproses izin pemakaian gelar dan perhitungan masa kerjanya	30	orang		
	Pengelolaan Promosi ASN	*Solsel*	Jumlah Lelang JPT yang dilaksanakan secara Terbuka	7	Jabatan	135.387.000	Pengelolaan Promosi ASN	*Solsel*	Jumlah Lelang JPT yang dilaksanakan secara Terbuka	7	Jabatan	136.429.800	
	Pengembangan Kompetensi ASN	***Solsel***	**Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan kinerja**	**50**	**Persen**	**344.686.000**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	***Solsel***	**Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan kinerja**	**50**	**Persen**	**218.308.000**	
	Pengelolaan Assesment Center	*Solsel*	Jumlah Blueprint Assessment Center	1	dokumen	300.000.000	Pengelolaan Assesment Center	*Solsel*	Jumlah Blueprint Assessment Center	1	dokumen	135.003.000	

		Solsel	Jumlah Pegawai yang dinilai Kopetensinya	40	orang			*Solsel*	Jumlah Pegawai yang dinilai Kopetensinya	40	orang		
		Solsel	Jumlah TKD yang dinilai Kompetensinya	600	Orang			*Solsel*	Jumlah TKD yang dinilai Kompetensinya	600	Orang		
	Pengelolaan pendidikan Lanjutan ASN	*Solsel*	Jumlah ASN yang diberikan bantuan dan difasilitasi tugas belajarnya	2	orang	31.650.000	Pengelolaan pendidikan Lanjutan ASN	*Solsel*	Jumlah ASN yang diberikan bantuan dan difasilitasi tugas belajarnya	2	orang	38.350.000	Penambahan Karena Jumlah ASN yang Tugas Belajar Bertambah
		Solsel	Persentase ASN yang dibantu dan difasilitasi izin belajarnya	100	Persen			*Solsel*	Persentase ASN yang dibantu dan difasilitasi izin belajarnya	100	Persen		
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	*Solsel*	Jumlah Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui impasing	100	orang	13.036.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	*Solsel*	Jumlah Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui impasing	100	orang	44.955.000	
		Solsel	Jumlah Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama	100	orang			*Solsel*	Jumlah Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama	100	orang		

		Solsel	jumlah pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan jabatan	250	orang			*Solsel*	jumlah pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan jabatan	250	orang		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	***Solsel***	**Persentase Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan indikator kinerja individu**	**n/a**	**Persen**	**210.670.000**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	***Solsel***	**Persentase Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan indikator kinerja individu**	**n/a**	**Persen**	**219.264.200**	
			Persentase Pegawai dengan Nilai SKP "Sangat Baik"	**76**	**Persen**				**Persentase Pegawai dengan Nilai SKP "Sangat Baik"**	**76**	**Persen**		
	Penyusunan kebijakan penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Solsel*	Jumlah Dokumen Indikator kinerja ASN yang disusun secara akuntabel	1	dokumen	11.650.000	Penyusunan kebijakan penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Solsel*	Jumlah Dokumen Indikator kinerja ASN yang disusun secara akuntabel	1	dokumen	12.794.200	
		Solsel	Jumlah dokumen Pola dan Pengambangan Karir ASN	1	dokumen			*Solsel*	Jumlah dokumen Pola dan Pengambangan Karir ASN	1	dokumen		
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Solsel*	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya secara objektif	3.467	orang	-	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Solsel*	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya secara objektif	3.467	orang	-	

	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi pegawai	*Solsel*	Jumlah PNS yang diberi Penghargaan tanda Jasa (Satya Lencana Karya Satya)	200	orang	34.525.000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi pegawai	*Solsel*	Jumlah PNS yang diberi Penghargaan tanda Jasa (Satya Lencana Karya Satya)	200	orang	36.474.700	
		Solsel	Jumlah PNS yang diberikan Penghargaan karena Berprestasi	20	orang			*Solsel*	Jumlah PNS yang diberikan Penghargaan karena Berprestasi	20	orang		
		Solsel	Jumlah PNS yang diberikan Penghargaan Karena memasuki Masa Purna Bhakti	77	orang			*Solsel*	Jumlah PNS yang diberikan Penghargaan Karena memasuki Masa Purna Bhakti	77	orang		
	Pembinaan Disiplin ASN	*Solsel*	Jumlah Regulasi terkait disiplin, kode etik, dan kode prilaku	3	dokumen	90.350.000	Pembinaan Disiplin ASN	*Solsel*	Jumlah Regulasi terkait disiplin, kode etik, dan kode prilaku	3	dokumen	92.575.700	
		Solsel	Persentase ASN yang tidak melanggar disiplin	95	Persen			*Solsel*	Persentase ASN yang tidak melanggar disiplin	95	Persen		
	Pengelolaan Penyelesaian pelanggaran Disiplin ASN	*Solsel*	Persentase pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti	100	Persen	34.945.000	Pengelolaan Penyelesaian pelanggaran Disiplin ASN	*Solsel*	Persentase pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti	100	Persen	36.160.900	
		Solsel	Persentase pelanggaran Kode etik yang ditindak	100	Persen			*Solsel*	Persentase pelanggaran Kode etik yang ditindak	100	Persen		

			lanjuti						lanjuti					
		Solsel	Peresentase Pelanggaran kode prilaku yang ditindaklanjuti	100	Persen			*Solsel*	Peresentase Pelanggaran kode prilaku yang ditindaklanjuti	100	Persen			
	Pelayanan Proses izin Perceraian Pegawai	*Solsel*	#REF!	100	Persen	39.200.000			Persentase pelanggaran kode etik yang ditindak lanjuti	100	Persen	41.258.700		
	Pengelolaan Non ASN/TKD	*Solsel*	Jumlah Tenaga Kontrak Daerah (Non ASN)	496	Orang	-			Jumlah Tenaga Kontrak Daerah (Non ASN)	496	Orang		Untuk Seleksi penerimaa n TKD	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	***Solsel***	**Persentase Capaian Indeks Profesionalitas ASN pada Dimensi kopetensi**	**75**	**Angka**	**318.225.000**	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	***Solsel***	**Persentase Capaian Indeks Profesionalitas ASN pada Dimensi kopetensi**	**75**	**Angka**	**463.841.000**		
	Pengembangan Kopetensi Teknis	***Solsel***	**Persentase Data ASN yang telah mengikuti Kompetensi teknis, fungsional, Struktural dan pemerintahan manajerial**	**100**	**Persen**	-	**Pengembangan Kopetensi Teknis**	***Solsel***	**Persentase Data ASN yang telah mengikuti Kompetensi teknis, fungsional, Struktural dan pemerintahan manajerial**	**100**	**Persen**	-		

	Penyusunan kebijakan teknis dan rencana Pengembangan Kopetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Adminstrasi Penyelenggara Urusan pemerintah konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan umum	*Solsel*	Jumlah Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat	1	dokumen	-	Penyusunan kebijakan teknis dan rencana Pengembangan Kopetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Adminstrasi Penyelenggara Urusan pemerintah konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan umum	*Solsel*	Jumlah Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat	1	dokumen	-	
			Jumlah Dokumen Analisa Kebutuhan Pengemangan Kopetensi non Clasical	1	dokumen				Jumlah Dokumen Analisa Kebutuhan Pengemangan Kopetensi non Clasical	1	dokumen		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan kopetensi manajerial dan fungsional	***Solsel***	**Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat sesuai analisa kebutuhan diklat**	**100**	**Persen**	**318.225.000**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan kopetensi manajerial dan fungsional**	***Solsel***	**Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat sesuai analisa kebutuhan diklat**	**100**	**Persen**	**463.841.000**	
	Penyelenggaraan pengembangan kopetensi bagi	*Solsel*	Jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar / Latsar	120	orang	318.225.000	Penyelenggaraan pengembangan kopetensi bagi	*Solsel*	Jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar / Latsar	120	orang	463.841.000	

	pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan		Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional	20	orang		pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan		Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional	20	orang		
			Diklat PIM	3	orang				Diklat PIM	3	orang		
			Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis	10	orang				Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis	10	orang		
	Koordinasi dan Kerjasama pelaksanaan Diklat	*Solsel*	Jumlah PNS yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Orang		Koordinasi dan Kerjasama pelaksanaan Diklat	*Solsel*	Jumlah PNS yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Orang	-	
						23.469.817.119						**30.789.652.801**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2025 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan.

Namun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyatakan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Merupakan Perangkat Daerah pelaksana fungsi Penunjang Kepegawaian, oleh karena itu sesuai dengan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak mengakomodir usulan masyarakat.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Solok Selatan

Nama Perangkat Daerah: BKPSDM

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Nihil**				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Kebijakan Nasional (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)

Perencanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan harus mempedomani dan merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta harus terjadi sinkronisasi program dan kegiatan secara berkesinambungan antara pengelola ASN (Menpan RB, BKN, LAN, BKD Provinsi dan BKPSDM Kabupaten/Kota) agar sasaran dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan dan tujuan Negara Indonesia yang salah satunya adalah *Good Government* dan Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara.

Aparatur Sipil Negara merupakan bagian terpenting dalam Sistem Penyelenggaraan Negara, dalam penyelenggaraan Negara ada 3 (tiga) bagian yang menjadi unsur Utama yaitu Sistem Pengelolaan Negara (Manajemen), Aparatur dan rakyat, untuk itu kualitas dan kuantitas aparatur sangat menentukan perkembangan Negara.

Beberapa kebijakan Nasional tentang Pengembangan kualitas/ komptensi ASN yaitu:

1) UU ASN telah menetapkan jenis kompetensi yang harus dikuasai ASN yaitu kompetensi Manajerial, teknis dan *social kultural*;

2) Perencanaan dan jaminan setiap ASN mendapat HAK untuk mengembangkan kompetensi setiap tahun dalam rangka pengembangan kariernya;

3) Variasi setiap jenis kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan.

Berikut tantangan Nasional pengelolaan ASN:

1) Target mewujudkan ASN profesional bagi birokrasi berkelas dunia;
2) Penerapan Sistem Merit dalam pengelolaan ASN (Basis Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja);
3) Sinergi antara pengelolaan ASN;
4) Penguatan unit pengelolaan ASN.

Setiap unit Pengelolaan ASN harus memiliki kesamaan VISI untuk mewujudkan kebijakan dan target yang telah ditetapkan guna menghadapi tantangan Nasional Pengelolaan ASN, berikut VISI dan MISI Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia:

Visi

→ Mewujudkan aparatur negara yang berkepribadian, bersih, dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi

Misi

→ 1. Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
2. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.
3. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Dari Visi dan Misi diatas, sebagai *Leading* Sektor unit Pengelolaan ASN, Menpan RB menetapkan beberapa tujuan dan sasaran strategi tahun 2020-2025 yaitu:

Tujuan Strategis Menpan RB 2020-2025:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
2. Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.

3. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.

4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas.

5. Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi.

3.1.2. Sasaran Kementerian PANRB 2020 - 2025

1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, dicapai dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di semua K/L/ provinsi/kabupaten/kota yang ditandai dengan diperolehnya nilai indeks RB yang "Baik", yaitu dalam kategori nilai B ke atas. Selain itu, didukung pula dengan tingginya tingkat persepsi masyarakat terhadap program Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan oleh semua lembaga Pemerintah. Pemerintahan yang efisien juga harus dapat diwujudkan dalam struktur kelembagaan dan tata laksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Kualitas ketatalaksanaan lembaga pemerintahan perlu ditingkatkan dengan diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi, yang akan mengefisienkan operasionalisasi.
2. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif, tercapai dengan diwujudkannya sasaran SDM Aparatur yang kompeten ditandai dengan telah diterapkannya pengisian jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan, serta diterapkannya pengembangan kompetensi bagi ASN minimal 12 hari kerja dalam 1 tahun. Demikian pula dalam hal kompetisi, dimana setiap lembaga pemerintah harus dapat menciptakan SDM Aparatur yang mampu menunjukkan kinerjanya melalui penerapan sistem penilaian kinerja yang baik dan mampu bersaing dalam mengisi posisi JPT yang lowong secara transparan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, dicapai antara lain dengan tercapainya sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja yang ditandai dengan indikator kinerja membaiknya nilai akuntabilitas kinerja instansi rata-rata secara nasional, dan meningkatnya penerapan sistem integritas oleh seluruh instansi pemerintah. Hal ini ditandai

dengan meningkatnya skor integritas secara nasional, besarnya persentase IP yang penerapan sistem integritasnya sudah Baik, serta besarnya persentase IP yang satu atau lebih unit kerja telah memperoleh predikat WBK/WBBM.

4. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas, dicapai antara lain dengan tercapainya sasaran peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencapaian sasaran Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik ditandai dengan indikator semakin banyaknya IP yang inovasinya mendapatkan pengakuan secara internasional. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator nilai indeks pelayanan publik secara nasional.
5. Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi, dicapai dengan pencapaian sasaran Terwujudnya Kementerian PANRB yang efektif dan efisien, Terwujudnya Kementerian PANRB yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, serta sasaran Terwujudnya pelayanan publik Kementerian PANRB yang berkualitas. Pencapaian sasaran Kementerian PANRB yang efektif dan efisien diukur dengan indikator Nilai RB Baik, tingkat efektivitas organisasi, dan besarnya persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Sasaran Terwujudnya Kementerian PANRB yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi diukur dengan indikator diperolehnya predikat WTP dari opini BPK, dan nilai akuntabilitas kinerja kementerian yang Baik. Terhadap sasaran yang ketiga, Terwujudnya pelayanan publik Kementerian PANRB yang berkualitas, diukur dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.

3.2. Telaahan Renstra BKN

Visi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020 – 2025 adalah: ***"Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025".*** Terdapat dua nilai yang menjadi tujuan utama pembentukan karakter Pegawai ASN, yaitu: Nilai pertama, profesional dengan penjelasan:

a) BKN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat peraturan perundang- undangan yang berlaku,

dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien; serta

b) BKN melakukan upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensinya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN dan pelayanan kepegawaian.

Nilai kedua adalah bermartabat dengan penjelasan: a) BKN berkomitmen untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepegawaian secara konsisten serta menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral yang membentuk citra positif BKN; serta b) menjaga integritas dan citra organisasi BKN sebagai lembaga pemerintah dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dengan menjadi lembaga terdepan dalam menerapkan prinsip profesionalitas, nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, dirumuskan misi BKN sebagai berikut:

a. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Kepegawaian
b. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian
c. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Peraturan Perundang- Undangan, Kinerja, dan Kesejahteraan Pegawai
d. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
e. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Manajemen Internal BKN

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi berdasarkan potensi dan permasalahan BKN, ditetapkan tujuan BKN tahun 2020-2025, sebagai berikut:

a. Terwujudnya Kualitas Manajemen ASN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pengelolaan PNS yang baik, yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS; pengembangan PNS (mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pola

karir); kompensasi (penggajian, tunjangan dan penghargaan); kesejahteraan PNS (Tabungan Hari Tua/THT dan perlindungan sosial). Indikasi lainnya adalah Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian secara akurat dan penyusunan *talent pool*); serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (*online*).

b. Terwujudnya Kualitas ASN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh tingkat profesionalisme ASN. Dalam hal ini, indikator peningkatan kualitas ASN dilihat dari semakin membaiknya nilai Indeks Profesionalitas ASN. Di sisi lain, indikasi keberhasilan dari sistem ini adalah berjalannya pengelolaan atau manajemen kepegawaian yang sesuai dengan norma, standar dan prosedur (NSP) kepegawaian di lingkungan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatnya kinerja PNS dalam melaksanakan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi unit kerjanya. Di samping itu, indikasi tercapainya tujuan ini adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan PNS, dikarenakan adanya sistem reward yang baik, dilaksanakannya rekomendasi-rekomendasi yang disusun oleh BKN terkait dengan pelanggaran-pelanggaran NSP kepegawaian.
c. Terwujudnya Pelayanan Prima di bidang Kepegawaian. Tercapainya tujuan ini diindikasikan dengan tingkat kualitas pelayanan kepegawaian, baik kualitas yang berhubungan dengan transparansi, keakuratan dan ketepatan waktu pelayanan. Selain itu, kualitas pelayanan ditunjukkan oleh tingkat kepuasan pelanggan (instansi/PNS) yang diperoleh melalui survei pelanggan.
d. Terwujudnya Manajemen Internal yang Akuntabel. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik, Opini WTP BPK, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal BKN, ketersediaan layanan informasi publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.

Sasaran strategis BKN dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan BKN serta kebijakan nasional dalam RPJMN adalah "Meningkatnya

Tingkat Profesionalisme Pegawai ASN". Pencapaian strategis diatas yang bersifat *impact* (sasaran *ultimate*), berikut ini sasaran *intermediate* yang akan dicapai dalam Program BKN yang dapat berfungsi dan memiliki manfaat terhadap capaian sasaran strategis. Sasaran strategis dalam mewujudkan visi dan misi BKN adalah:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN;
2. Keandalan sistem informasi ASN;
3. Meningkatnya disiplin pegawai;
4. Meningkatnya profesionalisme ASN;
5. Terwujudnya pelayanan kepegawaian dengan berbasis manajemen mutu;
6. Meningkatnya pelayanan pembinaan PNS
7. Terwujudnya BKN yang akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang baik

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi acuan dalam Menyusun Renja BKPSDM Kabupaten Solok Selatan diadopsi dari Renstra BKPSDM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Hubungan antara misi, tujuan dan sasaran dari BKPSDM Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Misi, Tujuan dan Sasaran
BKPSDM Kabupaten Solok Selatan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang baik bersih dan melayani	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit
2		Mewujudkan tata Kelola Pemerintah yang melayani	Meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN

3.4 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan BKPSDM 2025 memiliki 3 Program 10 kegiatan 38 sub kegiatan

TABEL 3.2

RUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintah Daerah
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN	Kegitan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
			Pengelolaan Data Kepegawaian
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
			Pengelolaan Promosi ASN
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assesment Center
			Pengelolaan pendidikan Lanjutan ASN
			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan kebijakan penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

			Pengelolaan Tanda Jasa Bagi pegawai
			Pembinaan Disiplin ASN
			Pengelolaan Penyelesaian pelanggaran Disiplin ASN
			Pelayanan Proses izin Perceraian Pegawai
			Pengelolaan Non ASN/TKD
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kopetensi Teknis	Penyusunan kebijakan teknis dan rencana Pengembangan Kopetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Adminstrasi Penyelenggara Urusan pemerintah konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan umum
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan kopetensi manajerial dan fungsional	Penyelenggaraan pengembangan kopetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan
			Koordinasi dan Kerjasama pelaksanaan Diklat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2025 bersumber dari dana APBD Murni, dengan rencana plafon anggaran yang telah ditetapkan pada RKPD kabupaten Solok Selatan Tahun 2025. Adapun rumusan Rencana Program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.

Tabel 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. SOLOK SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						29.795.652.991,00							25.962.359.599,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						32.795.652.991,00							25.962.359.599,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						30.329.817.991,00							24.432.858.099,00	
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						29.795.121.852,00							22.145.389.799,00	
	5.03.01.2.02.0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana pengelolaan keuangan				100 persen	29.795.121.852,00			Mengamanatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Serta Teknologi, Pendidikan Kesehatan, Prioritas Olahraga Kesejahteraan Dorobis, Serta Pelaksana Peran Para Hakim, Penuda Kehormatan serta Pemberian Delatifitas	Mengamanatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan SDM, digitalisasi layanan, dan pengelolaan ASN yang profesional, berintegritas, dan berkualitas. Pengelolaan keuangan harus tertib hukum dan pemerataan	100%			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				276 Orang/bulan	24.666.721.852,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Mengamanatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Serta Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prioritas Olahraga, Kesejahteraan Dorobis, serta Pengadilan Peran Para Hakim, Penuda Kehormatan serta Pemberian Delatifitas	Mengamanatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan SDM, digitalisasi layanan, dan pengelolaan keuangan harus tertib hukum dan pemerataan	100%			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyelenggaraan Administrasi Pensiunan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hak/ Pensiunan Administrasi Pensiunan Tugas ASN				4 Dokumen	117.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Mengamanatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Serta Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Program Olahraga, Kesejahteraan Dorobis, serta Pengadilan Peran Para Hakim, Penuda Kehormatan serta Pemberian Delatifitas	Mengamanatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan SDM, digitalisasi layanan, dan pengelolaan keuangan harus tertib hukum dan pemerataan	ASN		117.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	penerimaan, pengolahan dan pengiriman surat-menyurat, dokumen, laporan, agenda, arsip, publikasi, dan kehumasan	-			100 Dokumen	160.888.149.00			Mempertahankan Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Serta Tenaga Pendidikan Kesehatan, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pengadaan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Dinas Upacara, Pakaian Korpri, Pakaian Olahraga, Pakaian Batik, Pengadaan Pakaian Adat, Pengadaan Pakaian Hakim, Pakaian Jabatan Fungsional Tertentu, Pakaian Profesi Lainnya, Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Pakaian Sipil Lengkap Beserta Atribut dan Perlengkapannya, Pakaian Seragam Korpri, Pakaian Seragam Baret, Pakaian Seragam Topi, Pakaian Seragam Sepatu, Pakaian Seragam Tas, Pakaian Seragam Dasi, Pakaian Seragam Ikat Pinggang, Pakaian Seragam Kaos Kaki, Pakaian Seragam Kaos Tangan, Pakaian Seragam Kaos Dalam, Pakaian Seragam Kaos Olahraga, Pakaian Seragam Jaket, Pakaian Seragam Rompi, Pakaian Seragam Syal, Pakaian Seragam Jas Hujan, Pakaian Seragam Payung, Pakaian Seragam Jas Laboratorium, Pakaian Seragam Jas Praktek, Pakaian Seragam Jas Lab

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN NILAI RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pada Kepemimpinan dan Kerjasama				4 Laporan	135.090.590,00	Kab. Bintan, Tanjung Pinang, Kepulauan Seribu, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pemerintahan, Kesehatan, Pendidikan, Keuangan, Kesejahteraan Sosial, serta Penguatan Peran Para Pihak Pemuda, Gerakan Wanita dan Generasi Z) dan Pemuda Disabilitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja utama yang terukur, seperti waktu pelayanan, kepuasan masyarakat, dan efektivitas penggunaan anggaran, serta mendorong inovasi dalam pemberian layanan	ASN		265.090.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.04.2.07	Pengadaan Sarana Prasarana Aparatur Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Terfasilitasi	-			100 Persen	27.090.590,00			Mengembangkan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Pemuda, Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Pemuda Peran Para Pihak Pemuda, Gerakan Wanita dan Generasi Z) dan Pemuda Disabilitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja utama yang terukur, seperti waktu pelayanan, kepuasan masyarakat, dan efektivitas penggunaan anggaran, serta mendorong inovasi dalam pemberian layanan	ASN	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0030	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN NILAI RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Perkantoran				1 Unit	27.540.000,00	Kab. Bintan, Lingga, Kepulauan Seribu, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pemerintahan, Kesehatan, Pendidikan, Keuangan, Kesejahteraan Sosial, Gender, serta Penguatan Peran Para Pihak Pemuda, Gerakan Wanita dan Generasi Z) dan Pemuda Disabilitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja utama yang terukur, seperti waktu pelayanan, kepuasan masyarakat, dan efektivitas penggunaan anggaran, serta mendorong inovasi dalam pemberian layanan. Penyediaan transportasi yang baik, pemeliharaan kendaraan yang rutin, dan pengelolaan bahan bakar yang efisien	ASN		2.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang yang tersedia	-			100 Persen	194.700.000,00			Mengembangkan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Pemuda, Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Para Pihak Pemuda, Gerakan Wanita dan Generasi Z) dan Pemuda Disabilitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja utama yang terukur, seperti waktu pelayanan, kepuasan masyarakat, dan efektivitas penggunaan anggaran, serta mendorong inovasi dalam pemberian layanan. Penyediaan transportasi yang baik, pemeliharaan kendaraan yang rutin, dan pengelolaan bahan bakar yang efisien	ASN	-	156.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.04.001	Pemeliharaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN NILAI RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Layanan	5.040.000,00	Kab. Bintan, Lingga, Kepulauan Seribu, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Pemuda, Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Para Pihak Pemuda, Gerakan Wanita dan Generasi Z) dan Pemuda Disabilitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja utama yang terukur, seperti waktu pelayanan, kepuasan masyarakat, dan efektivitas penggunaan anggaran, serta mendorong inovasi dalam pemberian layanan. Penyediaan transportasi yang baik, pemeliharaan kendaraan yang rutin, dan pengelolaan bahan bakar yang efisien	ASN		6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.04.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibutuhkan				4 Layanan	94.500.000,00	Kab. Bintan, Lingga, Kepulauan Seribu, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Pemuda, Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Para Pihak Pemuda, Gerakan Wanita dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja utama yang terukur, seperti waktu pelayanan, kepuasan masyarakat, dan efektivitas penggunaan anggaran, serta mendorong inovasi dalam pemberian layanan	ASN		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.04.003	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RENJA RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Pengelolaan Jasa Pungutan dan Penanganan Kasus yang Diselesaikan				4 Layanan	9.582.000,00	Kab. Sinjai Selatan, Sinjai Barat, Sinjai Utara, Sinjai Timur	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	Mempercepat Pertanggung jawaban Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Teknologi, Pemeliharaan, Kesehatan, Prestasi, Ganjaran, Kesejahteraan, Gender, serta Pengupayaan Pemberian Penghargaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Pensiun, Cuti, Gaji, Tunjangan, Kenaikan Pangkat, Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai	Meningkatkan kualitas SDM untuk pertanggung jawaban dan pemberian bantuan yang tepat, akurasi dan ketuntasan, Pemberian kesejahteraan, serta kualitas pemerintah	ASN		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Layanan Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diselesaikan				4 Layanan	152.597.000,00	Kab. Sinjai, Sinjai Selatan, Sinjai Kabupaten Sinjai Barat	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	Mempercepat Pertanggung jawaban Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Teknologi, Pemeliharaan, Kesehatan, serta Pengupayaan Pemberian Penghargaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Pensiun, Cuti, Gaji, Tunjangan, Kenaikan Pangkat, Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai	Meningkatkan kualitas SDM untuk pertanggung jawaban dan pemberian bantuan yang tepat, akurasi dan ketuntasan, Pemberian kesejahteraan, serta kualitas pemerintah	ASN		165.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RENJA RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.09.0002	Penatausahaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik Daerah yang terinventaris	-			100 persen	111.468.000,00			Mempercepat Pertanggung jawaban Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Teknologi, Pemeliharaan, Kesehatan, Prestasi, Ganjaran, Kesejahteraan, Gender, serta Pengupayaan Pemberian Penghargaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Pensiun, Cuti, Gaji, Tunjangan, Kenaikan Pangkat, Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai	Meningkatkan kualitas SDM untuk pertanggung jawaban dan pemberian bantuan yang tepat, akurasi dan ketuntasan, Pemberian kesejahteraan, serta kualitas pemerintah	ASN	-	125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Administrasi Pajak dan Perizinannya				1 Unit	56.868.000,00	Kab. Sinjai Selatan, Sinjai Kabupaten Sinjai Barat Daya	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	Mempercepat Pertanggung jawaban Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Teknologi, Pemeliharaan, Kesehatan, Prestasi, Ganjaran, Kesejahteraan, Gender, serta Pengupayaan Pemberian Penghargaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Pensiun, Cuti, Gaji, Tunjangan, Kenaikan Pangkat, Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai	Meningkatkan kualitas SDM untuk pertanggung jawaban dan pemberian bantuan yang tepat, akurasi dan ketuntasan, Pemberian kesejahteraan, serta kualitas pemerintah	ASN		160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0003	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RENJA RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	71.340.000,00	Kab. Sinjai, Sinjai Selatan, Sinjai Kabupaten Sinjai Barat	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	Mempercepat Pertanggung jawaban Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Teknologi, Pemeliharaan, Kesehatan, Prestasi, Ganjaran, Kesejahteraan, Gender, serta Pengupayaan Pemberian Penghargaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Pensiun, Cuti, Gaji, Tunjangan, Kenaikan Pangkat, Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai	Meningkatkan kualitas SDM untuk pertanggung jawaban dan pemberian bantuan yang tepat, akurasi dan ketuntasan, Pemberian kesejahteraan, serta kualitas pemerintah	ASN		75.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-		-	-	1.364.414.400,00						-	1.446.352.160,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pengembangan dan Pemberian Kesejahteraan ASN	Jumlah Dokumen Aplikasi yang Dapat Terkoneksi dengan Pengelolaan Pegawai yang Sesuai dengan JALAN SPI ASN				1 Aplikasi 100 Persen	404.121.292,00			Mempercepat Pertanggung jawaban Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Teknologi, Pemeliharaan, Kesehatan, Prestasi, Ganjaran, Kesejahteraan, Gender serta Pengupayaan Pemberian Penghargaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Pensiun, Cuti, Gaji, Tunjangan, Kenaikan Pangkat, Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai	Meningkatkan kualitas SDM untuk pertanggung jawaban dan pemberian bantuan yang tepat, akurasi dan ketuntasan, Pemberian kesejahteraan, serta kualitas pemerintah	ASN	-	428.485.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan PNS dan PPPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kajian Kebijakan Pengelolaan SKCDesa (KPM)				1 Dokumen	329.829.300,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM,DANA ALOKASI UMUM	Memperhatikan Perencanaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Pangan, Gender, serta Penguatan Peran Pemerintah, Pemuda, Cendekiawan, Wanita, dan Generasi Z), dan Pencapaian Prioritas	Meningkatkan kualitas SDA melalui pemanfaatan energi yang berkelanjutan (bersih dan terbarukan), serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, Pengelolaan Perubahan Iklim, Mitigasi bencana	ASN		329.840.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Kelompok Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Permasalahan Administrasi Pemerintahan				12 Dokumen	73.704.700,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM,DANA ALOKASI UMUM	Memperhatikan Perencanaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Pangan, Gender, serta Penguatan Peran Pemerintah, Pemuda, Cendekiawan, Wanita, dan Generasi Z), dan Pencapaian Prioritas	Meningkatkan kualitas SDA melalui pemanfaatan energi yang berkelanjutan (bersih dan terbarukan), serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, Pengelolaan Perubahan Iklim, Mitigasi bencana	ASN		20.450.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0026	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	21.771.850,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kabupaten Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM,DANA ALOKASI UMUM	Memperhatikan Perencanaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Pangan, Gender, serta Penguatan Peran Pemerintah, Pemuda, Cendekiawan, Wanita, dan Generasi Z), dan Pencapaian Prioritas	Meningkatkan kualitas SDA melalui pemanfaatan energi yang berkelanjutan (bersih dan terbarukan), serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, Pengelolaan Perubahan Iklim, Mitigasi bencana	ASN		22.553.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				12 Dokumen	29.445.500,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM,DANA ALOKASI UMUM	Memperhatikan Perencanaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Pangan, Gender, serta Penguatan Peran Pemerintah, Pemuda, Cendekiawan, Wanita, dan Generasi Z), dan Pencapaian Prioritas	Meningkatkan kualitas SDA melalui pemanfaatan energi yang berkelanjutan (bersih dan terbarukan), serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, Pengelolaan Perubahan Iklim, Mitigasi bencana	ASN		135.565.655,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.03.02.2.Fill	Rekrut dan Promosi ASN	-	-	-	-	-	322.723.250,00			Memperhatikan Perencanaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Pangan, Gender, serta Penguatan Peran Pemerintah, Pemuda, Cendekiawan, Wanita, dan Generasi Z), dan Pencapaian Prioritas	Meningkatkan kualitas SDA melalui pemanfaatan energi yang berkelanjutan (bersih dan terbarukan), serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, Pengelolaan Perubahan Iklim, Mitigasi bencana	ASN	-	744.765.826,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.Fill.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				12 Dokumen	86.290.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM,DANA ALOKASI UMUM	Memperhatikan Perencanaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Pangan, Gender, serta Penguatan Peran Pemerintah, Pemuda, Cendekiawan, Wanita, dan Generasi Z), dan Pencapaian Prioritas	Meningkatkan kualitas SDA melalui pemanfaatan energi yang berkelanjutan (bersih dan terbarukan), serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, Pengelolaan Perubahan Iklim, Mitigasi bencana	ASN		24.764.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.32.0002	Pengelolaan Pensiun ASN														

NO	KODE	URAIAN / SEBAB URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Promosi ASN				10 Dokumen	134.479.463,00	Kab. Kota Seluruh, Semua Kecamatan Semua Kec.Dana	DANA TRANSFOR UMUM DANA ALOKASI UMUM	Mendorong Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Pekerja Digitalisasi Kesehatan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas Pemerintah Transformasi tata kelola pemerintah	ASN		140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksana pembinaan Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi dan Minat	-			50 Pegawai	219.205.262,00			Mendorong Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Pekerja Digitalisasi Kesehatan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas Pemerintah Transformasi tata kelola pemerintah	ASN	-	420.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengembangan Assessment Center														

NO	KODE	URAIAN / SEBAB URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Kota Seluruh, Semua Kecamatan Semua Kec.Dana	DANA TRANSFOR UMUM DANA ALOKASI UMUM	Mendorong Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Pekerja Digitalisasi Kesehatan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas Pemerintah Transformasi tata kelola pemerintah	ASN		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pemetaan Layanan ASN														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pemetaan Layanan				3 Orang	88.000.000,00	Kab. Kota Seluruh, Semua Kecamatan Semua Kec.Dana	DANA TRANSFOR UMUM DANA ALOKASI UMUM	Mendorong Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Pekerja Digitalisasi Kesehatan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas Pemerintah Transformasi tata kelola pemerintah	ASN		88.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0010	Pemberian Layanan Kepegawai ASN														

NO	KODE	URAIAN / SEBAB URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN Yang Dana				100 Orang	44.904.000,00	Kab. Kota Seluruh, Semua Kecamatan Semua Kec.Dana	DANA TRANSFOR UMUM DANA ALOKASI UMUM	Mendorong Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Pekerja Digitalisasi Kesehatan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas Pemerintah Transformasi tata kelola pemerintah	ASN		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Pemberian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pemberian Kinerja Pegawai berdasarkan Hasil/per Kinerja Individu Pemerintah Pegawai dengan Nilai SKP Target Baik Persentase terhadap hasil kinerja pegawai berdasarkan hasil/per kinerja individu				50 Pegawai 80 Persen 75 Persen	219.264.262,00			Mendorong Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Pekerja Digitalisasi Kesehatan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas Pemerintah Transformasi tata kelola pemerintah	ASN		420.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Pemutakhiran Kebijakan Pemberian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROBITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Berakhir dan Evaluasi Kinerja Asisten				1 Dokumen	10.494.200.00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan dan Luar Daerah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempunyai Pembiayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Serta Teknologi Pembukuan Keuangan Kesekretariatan, Prinsipe Otonomi Daerah Kesekretariatan Gender serta Pengusahan Pangan Pare mpuan Pemuda Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Pemuendan Disabilitas	Mempunyai an kualitas tata kelola pemerintahan yang akuan dan terhadap Daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pemerintah transformasi tata kelola pemerintah	ASN		42.059.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa dan Penghargaan														
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				29 Orang	36.474.700.00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan Semua Kantor Dinas	Dana TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempunyai Pembiayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Serta Teknologi Pembukuan Keuangan Kesekretariatan, Prinsipe Otonomi Daerah Kesekretariatan Gender serta Pengusahan Pangan Pare mpuan Pemuda Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Pemuendan Disabilitas	Mempunyai an kualitas tata kelola pemerintahan yang akuan dan terhadap Daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pemerintah transformasi tata kelola pemerintah	ASN		75.400.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.4001	Pemberian Gaji ke ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROBITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kesiapsiagaan				0 Orang	62.575.100.00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan Kantor Kantor Dinas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempunyai Pembiayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Serta Teknologi Pembukuan Keuangan Kesekretariatan, Prinsipe Otonomi Daerah Kesekretariatan Gender serta Pengusahan Pangan Pare mpuan Pemuda Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Pemuendan Disabilitas	Mempunyai an kualitas tata kelola pemerintah yang akuan dan terhadap Daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pemerintah transformasi tata kelola pemerintah	ASN		175.000.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.5008	Pengelolaan Penyelesaian Penanganan Dugaan ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Penanganan Dugaan ASN				1 Laporan	39.142.550.00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan Semua Kantor Dinas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempunyai Pembiayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Serta Teknologi Pembukuan Keuangan Kesekretariatan, Prinsipe Otonomi Daerah Kesekretariatan Gender serta Pengusahan Pangan Pare mpuan Pemuda Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Pemuendan Disabilitas	Mempunyai an kualitas tata kelola pemerintah yang akuan dan terhadap Daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pemerintah transformasi tata kelola pemerintah	ASN		80.000.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.6001	Pelayanan Kesehatan Narapidana Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROBITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pegawai yang Disiplin				0 Dokumen	61.258.150.00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kantor Dinas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempunyai Pembiayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Serta Teknologi Pembukuan Keuangan Kesekretariatan, Prinsipe Otonomi Daerah Kesekretariatan Gender serta Pengusahan Pangan Pare mpuan Pemuda Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Pemuendan Disabilitas	Mempunyai an kualitas tata kelola pemerintah yang akuan dan terhadap Daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pemerintah transformasi tata kelola pemerintah	ASN		55.000.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						483.241.888.18							1.352.002.882.89	
1	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rerata Predikomasi/Hari ASN (Dimensi Kompetensi) Rerata Predikomasi/Hari ASN	-		22 mumin 20 Angka		403.241.888.18					-		1.352.002.882.89	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional						465.541.258.30			Mempunyai Pembiayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Serta Teknologi Pembukuan Keuangan Kesekretariatan, Prinsipe Otonomi Daerah Kesekretariatan Gender serta Pengusahan Pangan Pare mpuan, Pemuda Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Pemuendan Disabilitas	Mempunyai an kualitas tata kelola pemerintah yang akuan dan terhadap Daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pemerintah transformasi tata kelola pemerintah	ASN		1.352.002.882.89	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROBITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Pengawasan				1 Laporan	462.941.370.40	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan Semua Kantor Dinas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempunyai Pembiayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Serta Teknologi Pembukuan Keuangan Kesekretariatan, Prinsipe Otonomi Daerah Kesekretariatan Gender serta Pengusahan Pangan Pare mpuan, Pemuda Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Pemuendan Disabilitas	Mempunyai an kualitas tata kelola pemerintah yang akuan dan terhadap Daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pemerintah transformasi tata kelola pemerintah	ASN		1.352.002.882.89	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		JUMLAH						20.789.652.901.00							25.362.002.882.89

BAB V

PENUTUP

Lebih dari sekedar memenuhi amanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, Dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar BKPSDM Kabupaten Solok Selatan memiliki dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan Program BKPSDM Kabupaten Solok Selatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan Program Kegiatan ke Dalam KUA, PPAS dan Perencanaan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi yang akan dijadikan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2025 sebagai wujud dari pencapaian kinerja Satuan Perangkat Daerah. Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadikan pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan BKPSDM. Meskipun perlu kami sampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif. Artinya, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Dikarenakan Rencana Kerja ini masih bersifat indikatif sehingga diperlukan penyempurnaan, Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen Rencana Kerja. Lebih lanjut kami berharap dokumen ini diharapkan dapat dijadikan gambaran awal rencana program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2025.

Padang Aro, Juli 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Irwandi Osmaidi, SE
NIP. 19670919 199003 1 006

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Karunia-Nya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan dapat menyusun ***" RENCANA KERJA AKHIR (RENJA) TAHUN 2025 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN"*** sebagai tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan maksud agar Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan mempunyai arah yang jelas dan memberikan batasan dasar serta etik pengelolaan APBD yang harus dipatuhi oleh pemangku kepentingan, sehingga pengelolaan dan tata cara penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan nilai normatif.

Rencana Kerja Akhir Tahun 2025 ini pada dasarnya untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan riil dari Perangkat Daerah supaya pelayanan dan capaian kinerja dapat ditingkatkan sesuai dengan anggaran yang akan dianggarkan melalui APBD Tahun 2025.

Rencana Kerja Akhir **(RENJA)** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana periode Tahun 2025.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rencana Kerja Akhir **(RENJA)** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025 ini dapat tersusun, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Solok Selatan umumnya dan khususnya dalam meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan dimasa-masa yang akan datang.

Padang Aro, 2024

KEPALA PELAKSANA,

NOVI HENDRIX, ST
NIP. 197707272005011006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 21

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 28

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 29

3.3 Program dan Kegiatan 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **35**

BAB V PENUTUP **41**

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Kabupaten Solok Selatan	9
Tabel 2.2	Capaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2023	17
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten SOlok Selatan	20
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD TAhun 2025 Kabupaten Solok Selatan	23
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	27
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/ Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun ini menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan tahun 2021 – 2026 yaitu **"MEWUJUDKAN SOLOK SELATAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA "**. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Urusan Penanggulangan Bencana terdapat pada Misi 4 yaitu "Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana yang dijabarkan dalam RPJMD tahun 2016-2021 yang selanjutnya diturunkan pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BPBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

Penyusunan Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 juga mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat SUB Urusan Bencana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok SelatanTahun 2024 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat dipropinsi Sumatra Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah kabupaten Solok Selatan Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4) ;
10. Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok selatan adalah sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran Perangkat Daerah untuk Tahun berikutnya.

b. Tujuan :

Adapun tujuan dari rencana kerja Badan Penanggulangan Becana Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah :

1. Meningkatkan upaya mitigasi bencana di daerah Kabupaten Solok Selatan.
2. Mendorong peran serta Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengembangkan upaya penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan pemahaman semua pihak terhadap penanggulangan bencana.
4. Meningkat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi :

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 **Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan

yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3 **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 **Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah**

2.5 **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian

terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Organisasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional,

telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,

perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan kegiatan ,

berisikan penjelasan mengenai faktor pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta

penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB V **PENUTUP,**

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja BPBD Solok Selatan adalah Mengurangi Resiko Bencana Masyarakat Solok Selatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPBD Solok Selatan ini menyajikan Program Penanggulangan Bencana berupa kegiatan Mitigasi Bencana / Pengurangan Resiko Bencana, Penanganan Darurat Akibat Bencana, dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana Alam sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dengan capaian Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD

Dalam evaluasi pelaksaan Program dan Kegiatan BPBD yang ada dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2023 maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
KABUPATEN SOLOK SELATAN

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu**	**100**	**Persentase**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1	05	01	**2.01**	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38	Dokumen	13,00	6,00	6,00	100,00	6,00	25,00	65,79
1	05	01	**2.01**	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	Laporan	10,00	5,00	5,00	100,00	5,00	20,00	66,67
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangiat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**Persentase**	0,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Orang/bulan	23,00	29,00	29,00	100,00	29,00	29,00	100,00
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honor	72	Dokumen	24,00	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	66,67
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	3,00	1,00	1,00	100,00	1,00	5,00	83,33
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persentase**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	140	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	25,00

1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	10,00
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persentase**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	Paket	8,00	4,00	4,00	100,00	4,00	16,00	66,67
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Paket	8,00	4,00	4,00	100,00	4,00	16,00	66,67
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	Paket	8,00	4,00	4,00	100,00	4,00	16,00	66,67
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	Paket	8,00	4,00	4,00	100,00	4,00	16,00	66,67
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20	Laporan	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	12,00	60,00
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	8,00	4,00	4,00	100,00	4,00	16,00	66,67
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang tersedia**	**100**	**Persentase**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	33,33
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	33,33
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia**	**100**	**Persentase**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	Laporan	8,00	4,00	4,00	100,00	4,00	16,00	66,67

1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	Laporan	24,00	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	66,67
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Laporan	8,00	12,00	12,00	100,00	-	20,00	83,33
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**100**	**Persentase**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit	8,00	17,00	17,00	100,00	18,00	18,00	75,00
1	05	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1	Unit	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	200,00
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Laporan	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	66,67
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**- % Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana** **- % penduduk terdampak bencana yang ditangani** **- % daerah pascabencana yang ditindaklanjuti penanganannya**	**40** **100** **80**	**Persentase** **Persentase** **Persentase**	**35** **100** **80**	**37** **100** **80**	**100** **0**	**100** **0**	**38** **100** **80**	**38** **100** **80**	**100** **100** **100**
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana**	**40**	**Persentase**	**35,00**	**36,00**	**100,20**	**278,33**	**38,00**	**173,20**	**433,00**
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Jumlah dokumen yang dilegalisasi	1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapat sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	7.500	Orang	500,00	1000,00	1002,00	100,20	1.000,00	2.502,00	33,36

1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**% Penduduk yang memperoleh pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan**	**0,25**	**Persentase**	**0,00**	**0,02**	**0,07**	**370,51**	**0,05**	**0,05**	**20,00**
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1	Dokumen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	500	Orang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	60,00
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota	78	Dokumen	26,00	13,00	13,00	100,00	13,00	52,00	66,67
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu, Warga Negara, Keluarga maupun Petugas	2	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi menimbulkan Bencana	5	Dokumen	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	40,00
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6	Kawasan	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	66,67
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	24	Dokumen	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,17
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	215	Orang	70,00	35,00	35,00	100,00	35,00	140,00	65,12
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontigensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	4	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	25,00

1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**% Penduduk terdampak bencana yang ditangani**	**100**	**Persentase**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1 x 24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	6	Dokumen	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	16,67
1	05	03	2.03	03	Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	6.000	Orang	3697,00	1000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.697,00	78,28
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.500	Orang	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	20,00
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang ditata**	**100**	**Persentase**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	6	Dokumen	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	16,67

- Program yang ada di RPJMD dan Renstra BPBD untuk Tahun 2023 terdapat 1 target Program dan 4 Kegiatan serta 15 Sub Kegiatan yang telah di tetapkan, dari 4 Kegiatan terakomodir 3 Kegiatan dan dari Sub Kegiatan tersebut 10 Sub Kegiatan terakomodir di dalam Renja. Sedangkan dalam anggaran yang di setujui atau DPA yang terakomodir sebanyak 3 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan, sedangkan 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan tidak terakomodir karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
- Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan Target 2 Sub Kegiatan di Renstra, sedangkan direnja dan DPA 1 Sub Kegiatan tidak terakomodir yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana
- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Renstra sebanyak 9 Sub Kegiatan dan terakomodir sebanyak 6 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
  a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan target awal 1 Dokumen dengan anggaran Rp. 492.387.299,-.
  b. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota dengan target awal 100 orang dengan anggaran Rp. 54.816.250,-
  c. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota dengan target 1 Posko dan diakomodir 1 Posko serta anggaran Rp. 399.407.994,-
  d. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan target 1 Destana dianggarkan Rp. 121.999.900,-
  e. Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dianggarkan Rp. 115.709.102,-
  f. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran awal Rp. 68.525.080,-.

- Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di Renstra terdapat sebanyak 3 Sub Kegiatan dan terakomodir sebanyak 3 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
  a. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 286.226.000,-
  b. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evalukuasi Korban Bencana dengan anggaran Rp. 44.999.796
  c. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota dengan anggaran Rp. 198.999.999,-

Secara garis besar dengan 1 program, 4 kegiatan yang ada dalam renstra yang diakomodir didalam RENJA dan DPA hanya 3 Kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 10 sub kegiatan, sedangkan kegiatan terakomodir di DPA sebanyak 10 sub kegiatan.

Beberapa Capaian Tahun 2023

Beberapa catatan umum capaian kinerja sepanjang Tahun 2023, antara lain:

a. Dalam Pencegahan dini terhadap bencana telah dilakukan kegiatan sebagai berikut :
   - Pelatihan Tim Reaksi Cepat untuk personil yang terlibat aktif dalam penanggulangan bencana sebanyak 35 orang
   - Terlaksananya sosialisasi bencana untuk masyarakat melalui tatap muka, baliho dan media sosial sebanyak 134.327 orang.

b. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana ada beberapa kegiatan :
   - Kegiatan Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) yang stanby 24 Jam Non Stop untuk menerima dan menyebarluaskan informasi bencana.
   - Kegiatan Penanganan bencana, kegiatan ini untuk pelaksanaan kegiatan saat terjadi bencana.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sampai saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Solok Selatan.

Susunan Organisasi Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan secara rangkap (*ex-officio)* dijabat oleh Sekretaris Daerah
2. Kepala BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari
3. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari :
   a. Subag Umum dan Kepegawaian
   b. Subag Keuangan
   c. Fungsi Subag Program
4. Unsur Pelaksana yaitu :
   a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dipimpim oleh seorang Kabid yang terbagi dalam dua bidang yaitu Bidang Pencegahan yang dipimpin oleh seorang Kasi dan Bidang Kesipsiagaan yang dipimpin oleh seorang Kasi.
   b. Bidang Kedaruratan dan Logistik. yang dipimpin oleh seorang Kabid Yang terbagi dalam dua bidang yaitu Bidang Kedaruratan yang dipimpin oleh seorang Kasi dan bidang Logistik yang dipimpin oleh seorang Kasi.
   c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dipimpin oleh seorang Kabid yang mana terbagi dam dua bidang Bidang Rehabilitasi yang dipimpin oleh seorang Kasi dan Bidang Rekonstruksi yang dipimpin oleh seorang Kasi.

Kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Solok Selatan adalah mengurangi kerugian dan dampak akibat bencana dengan melakukan kegiatan mitigasi bencana. Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Permendagri nomor 101 Tahun 2008 tentang SPM Sub Urusan Bencana.

Capaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2

CAPAIAN SPM SUB URUSAN BENCANA TAHUN 2023				
No.	**Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Hasil**
I	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**			
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB)	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/ ilegal	x 100 %	0%
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana	Persentase (%) jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	x 100 %	73,57%
II	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**			
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/ legal	x 100 %	85%
	Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/ legal	x 100 %	0%
	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	x 100 %	0,02%
	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	x 100 %	0,13%
	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penaggulangan bencana	x 100 %	100%
	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	x 100 %	0,00%
III	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**			
	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/ wabah zoonosis prioritas	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	x 100 %	0,00%
	Respon cepat darurat bencana	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	x 100 %	0,00%
	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	x 100 %	100%
	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	x 100 %	100%

Tabel. 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Solok Selatan

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	SPM	IKK	1000	2000	2000	2000	2452	2000	2000	2000	
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	SPM	IKK	0,10	0,15	0,20	0,25	0,13	0,15	0,20	0,25	
3	Persentase daerah pascabencana yang ditindaklanjuti	-	IKK	80	80	80	80	80	80	80	80	
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	SPM	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Adapun yang menjadi tujuan utama / tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah :

a. Melakukan kegiatan mitigasi bencana dengan optimal sehingga jumlah jiwa dan kerugian bencana dapat ditekan.
b. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
c. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
d. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
e. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
f. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
g. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
h. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
i. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
j. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Belum adanya gudang yang permanen, sehingga penyusunan dan pengaturan peralatan kebencanaan yang ada kurang memadai.
b. Kurangnya SDM yang memadai dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan kebencanaan.
c. Terbatasnya anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

d. Kurangnya dokumen-dokumen perencanaan penanggulangan bencana.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang ada untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dari review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 bila dibandingkan dengan hasil analisa kebutuhan Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Target pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana maka anggaran yang tersedianya masih kurang, namun kondisi keuangan yang terbatas , maka anggaran yang ada akan dioptimalkan untuk mencapai target pada Renstra dan RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Solok Selatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Output)	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Output)	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTERAMA KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					**5.586.562.800**	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTERAMA KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**5.586.562.800**	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BPBD**	**Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase**	**100**	**3.336.562.800**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BPBD**	**Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase**	**100**	**3.336.562.800**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu**	**Persentase**	**100**	**17.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu**	**Persentase**	**100**	**17.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran perangkat daerah	Dokumen	6	8.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran perangkat daerah	Dokumen	6	8.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	8.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	8.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**2.493.562.800**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**2.493.562.800**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	29	2.360.562.800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	29	2.360.562.800	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	125.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	125.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	8.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**43.500.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**43.500.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	35	35.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	35	35.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	8.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	8.500.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**273.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**273.000.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	8.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	8.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	30.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Peralatan rumah tangga yang disediakanJumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Peralatan rumah tangga yang disediakanJumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	25.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	5.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	5.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	194.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	194.600.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase barang milik daerah yang tersedia**	**Persen**	**100**	**5.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase barang milik daerah yang tersedia**	**Persen**	**100**	**5.000.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia**	**Persentase**	**100**	**39.500.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia**	**Persentase**	**100**	**39.500.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	-	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah yang yang terpelihara**	**Persentase**	**100**	**465.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah yang yang terpelihara**	**Persentase**	**100**	**465.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22	240.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22	240.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	BPBD	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	1	160.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	BPBD	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	1	160.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Laporan	1	35.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Laporan	1	35.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	
II	**Program Penanggulangan Bencana**		**% jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana**	**Persentase**	**39**	**1.280.000.000**	**Program Penanggulangan Bencana**		**% jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana**	**Persentase**	**39**	**1.280.000.000**	
			% penduduk terdampak bencana yang ditangani	**Persentase**	**100**	**720.000.000**			**% penduduk terdampak bencana yang ditangani**	**Persentase**	**100**	**720.000.000**	
			% daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti penanganannya	**Persentase**	**80**	**250.000.000**			**% daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti penanganannya**	**Persentase**	**80**	**250.000.000**	
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota		**Persentase (%) jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana**	**Persentase**	**39**	**375.000.000**	**Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota**		**Persentase (%) jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana**	**Persentase**	**39**	**375.000.000**	
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi	Dokumen	1	300.000.000	Penyusunan Kajian Resiko Bencana		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi	Dokumen	1	300.000.000	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah orang yang mendapat sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	2000	75.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah orang yang mendapat sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	2000	75.000.000	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		**% penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan**	**Persentase**	**0,20**	**1.125.000.000**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**% penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan**	**Persentase**	**0,15**	**1.125.000.000**	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	-	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	-	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	100	75.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	100	75.000.000	

	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	JumJumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota	Dokumen	13	250.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	JumJumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota	Dokumen	13	250.000.000	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu, Warga Negara, Keluarga maupun Petugas	Unit	1	25.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu, Warga Negara, Keluarga maupun Petugas	Unit	1	25.000.000	
	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi menimbulkan Bencana	Dokumen	1	25.000.000	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi menimbulkan Bencana	Dokumen	1	25.000.000	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	1	100.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	1	100.000.000	
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	5	250.000.000	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	5	250.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	35	150.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	35	150.000.000	
	Penyusunan Rencana Kontigensi	BPBD	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	Dokumen	1	250.000.000	Penyusunan Rencana Kontigensi	BPBD	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	Dokumen	1	250.000.000	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		**% penduduk terdampak bencana yang ditangani**	**Persentase**	**100**	**720.000.000**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**% penduduk terdampak bencana yang ditangani**	**Persentase**	**100**	**720.000.000**	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1 x 24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	320.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1 x 24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	320.000.000	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	1000	50.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	1000	50.000.000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	300	350.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	300	350.000.000	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**BPBD**	**Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang ditata**	**Persen**	**100**	**30.000.000**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**BPBD**	**Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang ditata**	**Persen**	**100**	**30.000.000**	
	Penguatan Kelembagaan Bencana	BPBD	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	30.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana	BPBD	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	30.000.000	
	Jumlah					**5.586.562.800**						**5.586.562.800**	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Adapun untuk usulan program dan kegiatan dari masyarakat maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan Perda nomor 5 Tahun 2010, tentang SOTK BPBD yang urusannya mencakup :

1. Urusan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan aparatur dan masyarakat yang ada di daerah rawan bencana.
2. Urusan Kedaruratan dan logistik yang menangani saat terjadinya bencana.
3. Urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang mengurus semua kegiatan pasca bencana.

Untuk menampung program dan kegiatan dari masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memperoleh dari :

1. Usulan dari musrenbang nagari dan kecamatan
2. Usulan dari masyarakat yang terdampak bencana di lokasi bencana
3. Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Sistem Nasional Penanggulangan Bencana.

Dari kegiatan Musrenbang yang diikuti di 7 Kecamatan maupun Musrenbang Kabupaten, maka tidak didapatkan usulan Kegiatan Prioritas dari Kecamatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten untuk dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 - 2024, Program Penanggulangan Bencana memiliki 9 Fokus Prioritas sebagai berikut :

1. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang undangan penanggulangan bencana
2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan dan akuntabel
3. Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
4. Peningkatan sarana dan prasarana mitigasi dalam pengurangan risiko bencana
5. Penguatan sistem kesiapsiagaan bencana
6. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (Collaborative social enginering)
7. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana
8. Penguatan sistem dan operasionalisasi penanganan darurat bencana
9. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekostruksi di daerah terdampak bencana

Dari 9 Prioritas Program Penanggulangan Bencana Nasional diatas maka Program Prioritas yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut :

1. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel dengan sub kegiatan :
   - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota
   - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota
2. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana telah mengakomodir berupa Sub Kegiatan :

- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/ Kota

3. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering), BPBD Kab. Solok Selatan dalam Rencana Anggaran Tahun 2025 telah mengakomodir berupa kegiatan :
   - Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota
   - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota
   - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
   - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota
   - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
   - Penyusunan Rencana Kontijensi
4. Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana telah mengakomodir berupa Sub kegiatan :
   - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota
   - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
   - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota.
5. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana mengakomodir Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi fator-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan Bencana di daerah dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kebencanaan dituntut untuk melaksanakan fungsi pengelolaan kebencanaan mulai dari kebijakan Pra Bencana sampai dengan fungsi koordinasi saat terjadi dan pasca bencana. Pada RPJMD 2021 – 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah terletak pada Misi 4 (empat) pembangunan infrastruktur, kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup

Untuk mewujudkan misi tersebut diatas maka disusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahunan Perangkat Daerah yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang selaras dengan tujuan dari misi tersebut.

Dengan adanya Rencana Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka setiap kegiatan dalam pencapaian tujuan tersebut diatas akan lebih terkoordinasi dengan baik beradasarkan tahap-tahap yang ditelah ditentukan sebelumnya pada Renja Perangkat Daerah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Solok Selatan tahun 2025.

Sesuai dengan paradigma penanggulangan bencana yang pada saat sekarang ini, yang lebih menitikberatkan pada upaya pengurangan risiko bencana melalui program/kegiatan pra bencana, yaitu upaya mitigasi, peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi kebencanaan, pelatihan serta penyebarluasan informasi kebencanan. Salah satu kegiatan unggulan pada saat prabencana ialah Pembentukan/Pembinaan Desa Tangguh Bencana yang didalamnya termuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka turut mewujudkan Visi Kabupaten Solok

Selatan Tahun 2021–2026 yaitu ***"MEWUJUDKAN SOLOK SELATAN MAJU DAN SEJAHTERA" serta*** tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Tujuan pembangunan berkelanjutan berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030, sesuai dengan kesepakatan global pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global. Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut diwujudkan dengan telah terbitnya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai tonggak utama yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan. Searah dengan kebijakan nasional serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan melaksanakan program/kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Solok Selatan dalam penanggulangan bencana, meningkatkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang bermuatan Pra bencana, Penanganan Kedaruratan, serta Penanganan Pasca Bencana yang kesemuanya juga merupakan upaya dalam rangka mencapai target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana yang didalamnya sudah memuat 3 jenis layanan dasar yaitu :

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Untuk melaksanakan semua amanat Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2025 mengelola 2 program sebagai berikut :

I. Program Penanggulangan Bencana yang terdiri atas 4 kegiatan yaitu :
   a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota yang terdiri atas Sub-Kegiatan :
      a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) RawanBencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
   b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana, terdiri atas Sub-kegiatan :
      a. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
      b. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
      c. Penyusunan Rencana Kontijensi
      d. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
      e. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
      f. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota
      g. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota.
   c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, terdiri atas Sub-Kegiatan :
      a. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas
      b. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.
      c. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota.
      d. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
      e. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
   d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, terdiri atas Sub-Kegiatan :
      a. Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota

II. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri atas :
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri atas Sub-Kegiatan :
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan, terdiri atas Sub-Kegiatan :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri atas Sub-Kegiatan :
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri atas Sub-Kegiatan :
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri atas Sub-Kegiatan :
   a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas Sub-Kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas Sub-Kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan sebuah hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan pada Tahun 2025. Data rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan dapat dilihat dalam table Rencana Kerja BPBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah				**5.643.841.792**					**7.128.265.770**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.643.841.792**					**7.128.265.770**
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN**				**5.643.841.792**					**7.128.265.770**
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan		100 Persen	4.244.384.833					4.591.265.770
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**3.266.484.833**					**3.589.365.770**
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 Orang/bulan	3.157.084.833	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3.464.365.770
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	109.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	125.000.000
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**320.400.000**					**328.400.000**
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disedlakan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.000.000

1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.000.000
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.000.000
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.000.000
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	5.400.000
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	250.000.000
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Jasa penunjang yang tersedia**		**100 Persen**	**197.500.000**					**198.500.000**
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.500.000
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	36.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	159.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	159.000.000
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara Persentase Barang milik Daerah yang Terpelihara**		**100 Persen**	**460.000.000**					**475.000.000**
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Unit	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	250.000.000

1	05	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	160.000.000
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	35.000.000
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	% Daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti penanganannya % masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana % penduduk terdampak		80 Persen 38 Persen 100 Persen	1.399.456.959					2.537.000.000
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase (%) jumlah penduduk di kawasan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana**		**38 Persen**	**80.000.000**					**102.000.000**
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2000 Orang	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	2000 Orang	102.000.000
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Pesentase (%) penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan**		**0.20 Persen**	**670.000.000**					**1.275.000.000**
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	50.000.000
1	05	03	2.02	18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	50 Orang	300.000.000

1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kawasan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	100.000.000
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	150.000.000
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	225.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	250.000.000
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	13 laporan	350.000.000
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi	1 Kawasan	75.000.000
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase (%) penduduk terdampak bencana yang ditangani**		**100 Persen**	**490.000.000**					**910.000.000**
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	15.000.000
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji	1 Dokumen	375.000.000
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Orang	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	25 Orang	75.000.000

1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Orang	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300 Orang	425.000.000
1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	20.000.000
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase (%) sistem dasar penanggulangan bencana yang ditata**		**100 Persen**	**159.456.959**					**250.000.000**
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	159.456.959	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	5 Kegiatan	250.000.000

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah **Program Tahunan** yang disesuaikan dengan Tupoksi yang dibebankan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan dan disinkronkan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para

pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Padang Aro, 2024

KEPALA PELAKSANA,



NOVI HENDRIX, ST

NIP. 197707272005011006

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Rankhir Renja Perangkat Daerah ini disusun untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi setiap elemen Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan dalam melaksanakan aktifitas, sehingga rencana capaian (target) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Dan merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Profesional dan Akuntabel". Dengan demikian, dokumen Rankhir Renja Perangkat Derah Tahun 2025 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen-dokumen yang lain, seperti Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan periode 2021-2026.

Usaha maksimal telah dilakukan dalam penyusunan dokumen Rankhir Renja BPKD Tahun 2025 ini, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan-masukan positif dan konstruktif bagi penyempurnaan dokumen ini tetap diperlukan.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan.

Padang Aro, 22 Juli 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

MARFIANDHIKA ARIEF, SE.Ak., CA
19800313 200501 1 005
Pembina Tingkat I (IV.b)

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKD TAHUN LALU **7**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKD 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKD 20

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKD 22

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD 52

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 65

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **66**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 66

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 66

3.3 Program dan Kegiatan 69

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAREAH **91**

4.1 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 91

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah 92

BAB V : PENUTUP **94**

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

DAFTAR TABEL

				Hal
1.	Tabel 2.1	:	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKD dan Pencapaian Renstra Renstra BPKD sampai Tahun 2024	11
2.	Tabel 2.2	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKD	21
3.	Tabel 2.3	:	Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025	54
4.	Tabel 2.4	:	Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025. (Nihil)	65
5.	Tabel 3.1	:	Identifikasi Kebijakan Nasional	66
6.	Tabel 3.2	:	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada BPKD Tahun 2025 dan Perkiraaan Maju Tahun 2026	71

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Yang kemudian dikerucutkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Mengacu kepada semua dokumen perencanaan daerah diatas, kemudian disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dan selanjutnya disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang, dan diusulkan untuk keterpaduan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, kemudian melalui review dari Tim APD melalu Forum Perangkat Daerah maka disusunlah Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rankhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk tahun 2025. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rankhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan yaitu : **Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**. Dengan sasaran *"Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel.*

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata supaya target kinerja dapat tercapai dengan efektif, efisien dan terukur, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
2. Meningkatnya Perencanaan Umum Keuangan Daerah yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan publik.
3. Meningkatnya Penyusunan Anggaran yang sistematis, terstruktur, komprehensif dan tepat waktu.
4. Meningkatkan perencanaan dan pemungutan Pendapatan Daerah yang mendukung kebutuhan Daerah.
5. Peningkatan Efektifitas, Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Perbendaharaan Umum Keuangan Daerah dan Penggunaan Anggaran Daerah.
6. Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah yang efektifitas, efesiensi.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembengunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja PerubahanPemerintah Daerah.
b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
c. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
d. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
e. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan ;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 – 2025;
j. Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

k. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Solok Selatan Tahun anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Sedangkan tujuan :

1. Acuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten.
2. Merumuskan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan selama tahun 2025.
3. Sebagai dasar untuk penyusunan laporan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN LALU.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKD.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal urgen yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM. Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian mengenai : Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKD.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan BPKD.

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB V PENUTUP.

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024 yang mengacu pada APBD tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2023 dan semester pertama (1) tahun 2024, realisasi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada hasil Laporan Kinerja tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Realisasi APBD untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tahun 2023.

   Mengacu pada program/kegiatan yang telah direncanakan pada RENJA tahun 2023, dari (4) empat program kegiatan semua realisasinya mencapai target sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun.

   Jadi dapat disimpulkan pada tahun anggaran 2023 ***tidak ada program kegiatan yang tidak mencapai target*** pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Solok Selatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Secara keseluruhan Realisasi Kinerja Program/kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun anggaran 2023 adalah sebesar 100%, dari target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Hal ini dibuktikan dengan analisa secara umum dari 3 (tiga) Program Kegiatan yang terkait dengan Indikator Kinerja yakni :

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah ; indikator kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP), saat ini masih dalam proses penyusunan LKPD tahun 2023.
b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; indikator kinerja persentase BMD yang berkondisi baik (75,76%) dengan realisasi capaian 100% dari target tersebut.
c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; Indikator kinerja Persentase Capaian Target Pajak Daerah dan Retribusi (100%), berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 111,34%.

Walaupun sampai saat ini dari segi pengalian potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan masih belum bisa dikatakan maximal, karena terbatasnya anggaran untuk pendataan objek pajak sehingga berpengaruh pada penetapan target PAD, Namun untuk realisasi capaian target PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2023 telah berhasil melebihi target yang ditetapkan dengan DPRD, dengan realisasi capaian sebesar 111,34%.

3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Walaupun sampai saat ini dari segi pengalian potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan masih belum bisa dikatakan maximal, karena terbatasnya anggaran untuk kajian analisis potensi pendapatan yang lebih menjanjikan, serta pendataan objek pajak sehingga berpengaruh pada rendahnya penetapan target PAD. Namun untuk realisasi capaian target PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2023 telah berhasil melebihi target yang ditetapkan dengan DPRD, dengan realisasi capaian sebesar 111,34%.

Dan hal ini masih bisa terus ditingkatkan dengan terus sama-sama berupaya dan berperan akftif antara pihak eksekutif dan legislative

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang menunjang dalam pengelolaan dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah. Salah satu kegiatan yang sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2023 terkait ini adalah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab tidak terealisasinya semua indikator kinerja yang telah ditetapkan diantaranya:

a. Kurangnya sarana penyebarluasan informasi yamg terbatas perihal regulasi yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga sosialisasi dari Pemerintah Daerah terhadap masyarakat mengenai kewajiban masyarakat terhadap Pendapatan Asli Daerah, baik yang bersumber dari PBB-P2,Galian-C,Retribusi Daerah, Pajak Reklame,Pajak Restoran, maupun PAD lainnya yang sah masih belum memadai.
b. Kurangnya kesadaran dari masyarakat didalam membayar pajak (PBB-P2).
c. Data PBB-P2 yang tidak akurat.
d. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pendapatan daerah yang sangat minim.
e. Kurangnya SDM tenaga pemungut PBB dilapangan yang profesional.
f. Terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan pendataan objek pajak.
g. Perencanaan anggaran BTL yang tidak matang dari awal oleh Perangkat Daerah sehingga terjadi kekurangan anggaran BTL di beberapa Perangkat Daerah dengan nilai yang cukup signifikan.
h. Kurangnya tenaga profesional di bidang IT.
i. Kurangnya kompetensi pengelola keuangan di Perangkat Daerah seperti (Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah, PPTK dan PPK).
j. Terkendalanya proses penyaluran dana dari pusat khusunya DAK yang disebabkan oleh hasil review APIP terhadap dana transfer /DAK tidak sesuai dengan output kegiatan yang diajukan oleh Perangkat Daerah terkait sehingga menyulitkan BPKD dalam pelaporan konsolidasi ke pusat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

k. Lambatnya respon Perangkat Daerah dalam menanggapi hasil verifikasi dokumen kelengkapan pencairan dari BUD sehingga memperlambat proses penyaluran dana ke Perangkat Daerah.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah berkurangnya sumber APBD tahun berikutnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut maka perlu diambil kebijakan dipihak pimpinan sebagai berikut :

- Menganggarkan kembali kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah bagi SDM pemungut pajak maupun terhadap masyarakat sebagai Wajib Pajak.
- Menempatkan tenaga-tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai kecakapan dan kemampuan akademis yang linier dengan keahliannya pada bidang pendapatan Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- Menambah Personil SDM di Bidang Pendapatan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan.
- Kembali melakukan analisis dan perhitungan ulang mengenai potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Berikut Lampiran tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKD dan Pencapaian Renstra BPKD s/d akhir Tahun 2023 pada Tabel 2.1/ T-C. 29 sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Tabel 2.1/ T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Nama Perangkat Daerah : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
5	*02*				**KEUANGAN**									
5	***02***	***001***	*-*	*-*	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***	***Cakupan layanan operasional kantor***	**100 *Persen***	***100***	***100 Persen***	***100 Persen***	**100%**	***100 Persen***	***300 Persen***	300%
5	***02***	***001***	***2.01***	*-*	***Kegiatan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan penganggaran tepat waktu***	**100 *Persen***	**100**	***100 Persen***	**100 *Persen***	**100%**	***100 Persen***	***300 Persen***	300%
5	*02*	*001*	*2.01*	*001*	*Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42 Dokumen	6	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	43%
5	*02*	*001*	*2.01*	*007*	*Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	4	4 Laporan	4 Laporan	100%	5 Laporan	13 Laporan	43%

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

5	***02***	***001***	***2.02***	-	***Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan***	**100**	***Persen***	***100***	***100***	***Persen***	***100***	***Persen***	***80%***	***100***	***Persen***	***100***	***Persen***	100%
5	*02*	*001*	*2.02*	*001*	*Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294	Orang	49	49	Orang	49	Orang	100%	49	Orang	147	Orang	50%
5	*02*	*001*	*2.02*	*002*	*Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	Dokumen	24	24	Orang	24	Orang	100%	24	Dokumen	72	Dokumen	100%
5	*02*	*001*	*2.02*	*003*	*Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	Jumlah SPJ, UP/GU/TU/LS yg diverfikasi	72	Dokumen	12	12	Dokumen	12	Dokume n	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	50%
5	*02*	*001*	*2.02*	*005*	*Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	1	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Dokumen	50%
5	***02***	***001***	***2.06***	-	***Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah***	**100**	***Persen***	***100***	***100***	***Persen***	***100***	***Persen***	**100%**	***100***	***Persen***	***300***	***Persen***	300%
5	*02*	*001*	*2.06*	*001*	*Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	Paket	4	4	Paket	4	Paket	100%	4	Paket	12	Paket	50%
5	*02*	*001*	*2.06*	*002*	*Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Paket	4	4	Paket	4	Paket	100%	4	Paket	12	Paket	50%
5	*02*	*001*	*2.06*	*003*	*Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	Paket	4	4	Paket	4	Paket	100%	4	Paket	12	Paket	50%
5	*02*	*001*	*2.06*	*005*	*Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	Paket	4	4	Paket	4	Paket	100%	4	Paket	12	Paket	50%
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan	4	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	12	Laporan	50%

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

5	02	001	2.06	009	*Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD dan Konsultasi SKPD*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	4	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	12	Laporan	50%
						Jumlah makan minum rapat yang disediakan	3000	Kotak	350	350	Kotak	350	Kotak	100%	700	Kotak	1050	Kotak	35%
5	***02***	***001***	***2.07***	-	***Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia***	***100***	***Persen***	***100***	***100***	***Persen***	***100***	***Persen***	**100%**	***100***	***Persen***	***300***	***Persen***	300%
5	02	001	2.07	005	*Sub Kegiatan: Pengadaan Mebeleur*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43	Paket	6	6	Paket	6	Paket	100%	3	Paket	15	Paket	35%
5	02	001	2.07	011	*Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.*	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	0	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	0	Unit	0%
5	***02***	***001***	***2.08***	-	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia***	***100***	***Persen***	***100***	***100***	***Persen***	***100***	***Persen***	**67%**	***100***	***Persen***	***300***	***Persen***	300%
5	02	001	2.08	001	*Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	Laporan	4	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	12	Laporan	50%
5	02	001	2.08	002	*Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Laporan	12	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	50%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Laporan	4	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	12	Laaporan	50%
5	02	001	2.08	003	*Sub Kegiatan: Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72	Unit	12	12	Unit	12	Unit	100%	12	Unit	36	Unit	50%
5	***02***	***001***	***2.09***	-	***Sub Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara***	***100***	***Persen***	***100***	***100***	***Persen***	***100***	***Persen***	**75%**	***100***	***Persen***	***300***	***Persen***	***300%***

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

5	*02*	*001*	*2.09*	*002*	*Sub Kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan*	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54	unit	9	9	unit	9	unit	100%	9	unit	27	unit	50%
5	*02*	*001*	*2.09*	*010*	*Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	2	2	Unit	2	Unit	0%	2	Unit	6	Unit	50%
5	*02*	*001*	*2.09*	*011*	*Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	2	2	Unit	2	Unit	100%	2	Unit	6	Unit	50%
						Jumlah Paket Pemindahan Arsip dan dokumen negara	18	Paket	3	3	Paket	3	Paket	100%	3	Paket	9	Paket	50%
5	***02***	***002***	-	-	***PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***	***OPINI BPK***	***WTP***	***OPINI BPK***	***WTP***	***WTP***	***OPINI BPK***	***WTP***	***OPINI BPK***	***100%***	***WTP***	***OPINI BPK***	***WTP***	***OPINI BPK***	***WTP***
5	02	002	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran yang tepat waktu	600	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	50%
5	*02*	*002*	*2.01*	*001*	*Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS*	Jumlah dokumen KUA PPAS Awal yg disahkan	12	Dokumen	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	6	Dokumen	50%
5	*02*	*002*	*2.01*	*002*	*Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	Jumlah KUPA PPAS Perubahan Tahun yg disahkan	12	Dokumen	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	6	Dokumen	50%
5	*02*	*002*	*2.01*	*005*	*Sub Kegiatan: Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD*	Jumlah DPA OPD yang diverifikasi	198	Dokumen/ OPD	33	33	Dokumen/ OPD	33	Dokumen/ OPD	100%	33	Dokumen/ OPD	99	Dokumen/ OPD	50%
5	*02*	*002*	*2.01*	*006*	*Sub Kegiatan: Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD*	Jumla Dokumen DPPA OPD yg disahkan	198	Dokumen/ OPD	33	33	Dokumen/ OPD	33	Dokumen/ OPD	100%	33	Dokumen/ OPD	99	Dokumen/ OPD	50%
5	*02*	*002*	*2.01*	*007*	*Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	Jumlah Perda tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tepat waktu sesuai aturan dan terdistribusinya APBD ke pihak terkait	12	Dokumen	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	6	Dokumen	50%

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

						Jumlah Ranperda tentang APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Perubahan	12	Dokumen	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	6	Dokumen	50%
5	*02*	*002*	*2.01*	*008*	*Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD*	Jumlah Perda tentang APBD dan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD Perubahan tepat waktu sesuai aturan dan terdistribusinya APBD	12	Dokumen	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	6	Dokumen	50%
						Jumlah Ranperbup Solok Selatan tentang Perubahan pertama penjabaran APBD	12	Dokumen	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	6	Dokumen	50%
5	*02*	*002*	*2.01*	*009*	*Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	Jumlah Perbup Standar Harga, Standar Biaya, Hak Keuangan DPRD, KKD, dan HSPK	30	Perbup	5	5	Perbup	5	Perbup	100%	5	Perbup	15	Perbup	50%
						Jumlah Regulasi tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yg ditetapkan	30	Dokumen	5	5	Dokumen	5	Dokumen	100%	5	Dokumen	15	Dokumen	50%
5	***02***	***002***	***2.02***	-	***Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah***	***Ketersediaan Dokumen Penyaluran dan Pelaporan Keuangan Daerah Tepat Waktu.***	***100***	***Persen***	***95***	***100***	***Persen***	***95***	***Persen***	**98%**	***100***	***Persen***	***290***	***Persen***	***290%***
5	*02*	*002*	*2.02*	*005*	*Sub Kegiatan: Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	Jumlah laporan realisasi dan konsolidasi dana transfer/DAK sesuai JUKNIS.	12	Laporan	2	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	6	Laporan	50%
5	*02*	*002*	*2.02*	*007*	*Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*	Persentase akurasi data gaji pegawai yang dapatdiakses melalui sistem applikasi gaji.	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	300%
5	*02*	*002*	*2.02*	*011*	*Sub Kegiatan: Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	Jumlah SP2D yang telah diterbitkan dan disahkan BUD.	48000	Dokumen	7560	8000	Dokumen	7560	Dokumen	95%	8000	Dokumen	23120	Dokumen	48%

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

5	***02***	***002***	***2.03***	-	***Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah***	***Laporan Keuangan Daerah disahkan tepat waktu dan mendapatkan OPINI WTP***	100	***Persen***	***100***	-	***Persen***	***100***	***Persen***	**100%**	***100***	***Persen***	***300***	***Persen***	300%
5	*02*	*002*	*2.03*	*004*	*Sub Kegiatan: Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*	Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan SKPD, BLUD.	12	Laporam	2	2	Laporam	2	Laporam	100%	2	Laporam	6	Laporam	50%
						Jumlah SKPD yg melakukan Konsolidasi Laporan Keuangan.	33	OPD	33	33	OPD	33	OPD	100%	33	OPD	99	OPD	300%
5	*02*	*002*	*2.03*	*005*	*Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	Jumlah Ranperda tentang Petanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disahkan.	6	Dokumen	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	50%
5	*02*	*002*	*2.03*	*009*	*Sub Kegiatan: Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	Jumlah RANPERDA tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yg disahkan.	4	Dokumen	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	75%
						Jumlah Standar Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Solok Selatan yg disahkan.	8	Buku	3	3	Buku	3	Buku	100%	3	Buku	9	Buku	113%
5	*02*	*002*	*2.03*	*010*	*Sub Kegiatan: Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*	Jumlah SISDUR tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yg disahkan.	6	Dokumen	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	50%
5	*02*	*002*	*2.03*	*011*	*Sub Kegiatan: Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	Jumlah OPD yang medapatkan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	33	OPD	33	33	OPD	33	OPD	100%	33	OPD	99	Event	300%

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

5	***02***	***002***	***2.04***	-	***Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah***	***Capaian Persentase penyaluran dana transfer daerah dan BTT***	**100**	***Persen***	***100***	***100***	***Persen***	***100***	***Persen***	**100%**	***100***	***Persen***	***300***	***Persen***	300%
5	*02*	*002*	*2.04*	*008*	*Sub Kegiatan: Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan ADD, DD, Bagi Hasil, Laporan Keuangan PPKD)*	42	Laporan	7	7	Laporan	7	Laporan	100%	7	Laporan	21	Persen	50%
5	*02*	*002*	*2.04*	*009*	*Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	Jumlah Laporan Tahunan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan BTT)	6	Laporan	1	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Persen	50%
5	***02***	***003***	-	-	***PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH***	***Persentase BMD dan Asset Daerah yang terkelola dengan baik***	**100**	***Persen***	**0**	***60,51***	***Persen***	**0**	***Persen***	**100%**	***100***	***Persen***	100	***Persen***	100%
5	***02***	***003***	***2.01***	-	**Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik Daerah**	***Persentase BMD dan Asset Daerah yang terkelola dengan baik***	0	***Persen***	***100***	-	***Persen***	***100***	***Persen***	**100%**	***100***	***Persen***	***300***	***Persen***	#DIV/0!
5	*02*	*003*	*2.01*	*003*	*Sub Kegiatan: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah*	Jumlah dokumen RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dan RKPBMD (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah)	12	Dokumen	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	6	Dokumen	50%
5	*02*	*003*	*2.01*	*005*	*Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah*	Jumlah OPD yang telah berbasis aplikasi dalam penatausahaan aset	100	OPD	33	33	OPD	33	OPD	100%	33	OPD	99	OPD	99%
5	*02*	*003*	*2.01*	*006*	*Sub Kegiatan: Inventarisasi Barang Milik Daerah*	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	300%
5	*02*	*003*	*2.01*	*007*	*Sub Kegiatan: Pengamanan Barang Milik Daerah*	Persentase pengamanan asset daerah baik secara fisik maupun bukti legal kepemilikan Pemda kab. Solok Selatan.	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	300%

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

5	*02*	*003*	*2.01*	*010*	*Sub Kegiatan: Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	Persentase Jumlah BMD yg dilakukan Pemusnahan dan Penghapusan	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	300%
						Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemda Solok Selatan	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	300%
5	*02*	*003*	*2.01*	*011*	*Sub Kegiatan: Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	Jumlah OPD yg sinkron rekapitulasi laporan asset OPD dengan laporan asset daerah	100	OPD	33	33	OPD	33	OPD	100%	33	OPD	99	OPD	99%
5	*02*	*003*	*2.01*	*012*	*Sub Kegiatan: Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	Jumlah OPD yg melakukan konsolidasi Asset	100	OPD	33	33	OPD	33	OPD	100%	33	OPD	99	OPD	99%
5	*02*	*003*	*2.01*	*013*	*Sub Kegiatan: Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	Persentase pendayagunaan dan pemanfaatan BMD	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	300%
5	***02***	***004***			***PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH***	***Peningkatan Pengelolaan dan Capaian Target PAD***	**100**	***Persen***	***103***	***100***	***Persen***	***103***	***Persen***	**98%**	***100***	***Persen***	***306***	***Persen***	306%
5	***02***	***004***	***2.01***	-	***Kegiatan: Pengelolaan pendapatan Daerah***	***Persentase Capaian Target Pajak dan Retribusi.***	**100**	***Persen***	***103***	***100***	***Persen***	***103***	***Persen***	**98%**	***100***	***Persen***	***306***	***Persen***	306%
5	*02*	*004*	*2.01*	*002*	*Sub Kegiatan: Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah*	Jumlah regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah yg diupdate	25	Regulasi	15	15	Regulasi	15	Regulasi	100%	15	Regulasi	45	Regulasi	180%
5	*02*	*004*	*2.01*	*005*	*Sub Kegiatan: Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	Jumlah Objek Pajak pendataan dan evaluasi NJOP PBB P2	24	Kecamatan	1	1	Kecamatan	1	Kecamatan	100%	4	Kecamatan	6	Kecamatan	25%
5	*02*	*004*	*2.01*	*011*	*Sub Kegiatan: Penagihan Pajak Daerah*	Jumlah realisasi PBB P2,PBB P3 dan BPHTB	48	Milyar	7	8	Milyar	7	Milyar	88%	8	Milyar	22	Milyar	46%
						Jumlah WP pajak PBB P2,PBB P3 danBPHTB yg telah dilakukan pemungutan.	540000	OP	90000	90000	OP	90000	OP	100%	90000	OP	270000	OP	50%

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

5	*02*	*004*	*2.01*	*013*	*Sub Kegiatan: Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	Jumlah Pelaporan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Provinsi dan Pusat	72	Dokumen	12	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	50%
						Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB P2	72	Kali	12	12	Kali	12	Kali	100%	12	Kali	36	Kali	50%

Catatan : ***untuk pengisian tabel pada kolom 5 (***) diisi dengan nilai nol***

Padang Aro, 26 Maret 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

MARHANDHIKA ARIEF, SE.Ak., CA
19800313 200501 1 005
Pembina Tingkat I (IV.b)

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (BPKD)

Analisis Kinerja Pelayanan BPKD tercermin dari capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam kelancaran proses pengelolaan keuangan daerah kabupaten solok selatan mulai dari Proses Penganggaran (APBD 2023, APBD 2024 dan APBDP 2023), Proseses Pencairan Dana ke Perangkat Daerah (Penerbitan SP2D), Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengolalaan Asset Daerah, dan Keberhasilan Kabupaten Solok Selatan dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD dengan Opini BPK "WTP".

Hal diatas sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan Fungsi Urusan Penunjang Kenuangan Pemerintahan, serta ketetentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Solok Selatan dapat terlihat pada Tabel 2.2/T-C.30 berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Tabel 2.2/ T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Prangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
KABUPATEN SOLOK SELATAN

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 5	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(th n-3)	(Th n-2)	(th n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	(th n-2)	(th n-1)	(th n)	(th n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Dalam Proses	WTP	WTP	
2	Persentase Pencapaian Target PAD			100%	100%	100%	100%	100%	126,49%	111,34%	100%	100%	
3	Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah			8,70%	9,35%	9,37%	9,58%	9,76%	9,35%	9,37%	9,37%	9,76%	
4	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan			30,70%	31%	30,20%	30,3%	30,20%	31%	30,20%	30,20%	30,20%	
5	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	
6	Rasio Belanja Urusan Pemerintah Umum (dikurangi Transfer expenditures)			64,10%	64,25%	64,50%	64,75%	64,75%	64,25%	64,50%	64,50%	64,75%	
7	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD			0,93%	0,93%	0,94%	0,94%	0,95%	0,94%	0,94%	0,94%	0,95%	
8	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Assets Management			4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun sebelumnya.			8,05%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	
11	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah.			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Solok Selatan, pada dasarnya Program/Kegiatan Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai *"Penunjang dibidang Keuangan"*. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas.
b. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang perlu diikuti dengan penyempurnaan regulasi, penguatan aspek kediklatan, dan aspek binwas.
c. Perlunya didorong implementasi reformasi birokrasi di daerah.
d. Pada aspek kelembagaan, perlunya terus diupayakan penataan dan penguatan kelembagaan, pembinaan dan pengawasan baik terhadap internal maupun terhadap pemerintah daerah.
e. Meningkatkan kualitas dan melakukan penataan terhadap sarana dan prasarana fisik yang mendukung tupoksi. Termasuk dalam hal ini adalah menjaga dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang akuntabel dan fleksibel.
f. Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
g. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
h. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk dan sinkronisasi untuk mempedomani indikator kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD agar selaras dengan penganggaran sampai dokumen DPA ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

i. Perlunya kajian ulang mengenai potensi PAD solok selatan, sehingga akan semakin meningkatkan capaian realisasi PAD kedepannya.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan kegiatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur serta dapat dipertanggungjawabkan.

2.3.1. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti

a. Melanjutkan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kegiatan Peningkatan SDM dan Disiplin Aparatur.
b. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi di daerah, upaya yang dilakukan antara lain melakukan penataan terhadap sarana dan prasarana fisik, melakukan pengembangan pada aspek pemerintahan, menyelenggarakan pendidikan kedinasan, serta mengembangkan kader SDM aparatur yang handal dan sesuai dengan kebutuhan.
c. Mempertahankan status "WTP" serta meningkatkan kualitas pelaporan Keungan Daerah Tahun 2024.
d. Melanjutkan peningkatan Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan, Serta Inovasi Pengelolaan Kuangan Daerah yang berbasis on-line.
e. Meningkatkan dan memperbaharui Sistem Applikasi Pendapatan Daerah, Pengamanan Asset Daerah, dan Sistem Arsip Elektronik.
f. Segera melakukan kajian akademis untuk menemukan potensi- potensi PAD baru, dan meningkatkan pengelolaan terhadap potensi yang sudah ada.

Untuk menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan, berikut terlampir Struktur Organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sampai saat ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Solok Selatan melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretaris ;
3. Kepala Bidang Pendapatan ;
4. Kepala Bidang Perbendaharaan ;
5. Kepala Bidang Akuntansi ;
6. Kepala Bidang Anggaran ;
7. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah ;
8. Kelompok JF Sub-Substansi Perencanaan ;
9. Kepala Sub Bagian Keuangan ;
10. Kelompok JF Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian ;
11. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan ;
12. Kelompok JF Sub-Substansi Penagihan;
13. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan ;
14. Kepala Sub Bidang Belanja Lansung;
15. Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Lansung ;
16. Kepala Sub Bidang Pembukuan ;
17. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan ;
18. Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Umum, Kebijakan dan Penyusunan Anggaran;
19. Kepala Sub Bidang Analisa Penatausahaan dan Pengendalian Anggaran;
20. Kelompok JF Sub-Substansi Perencanaan dan Pendayagunaan Aset;

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

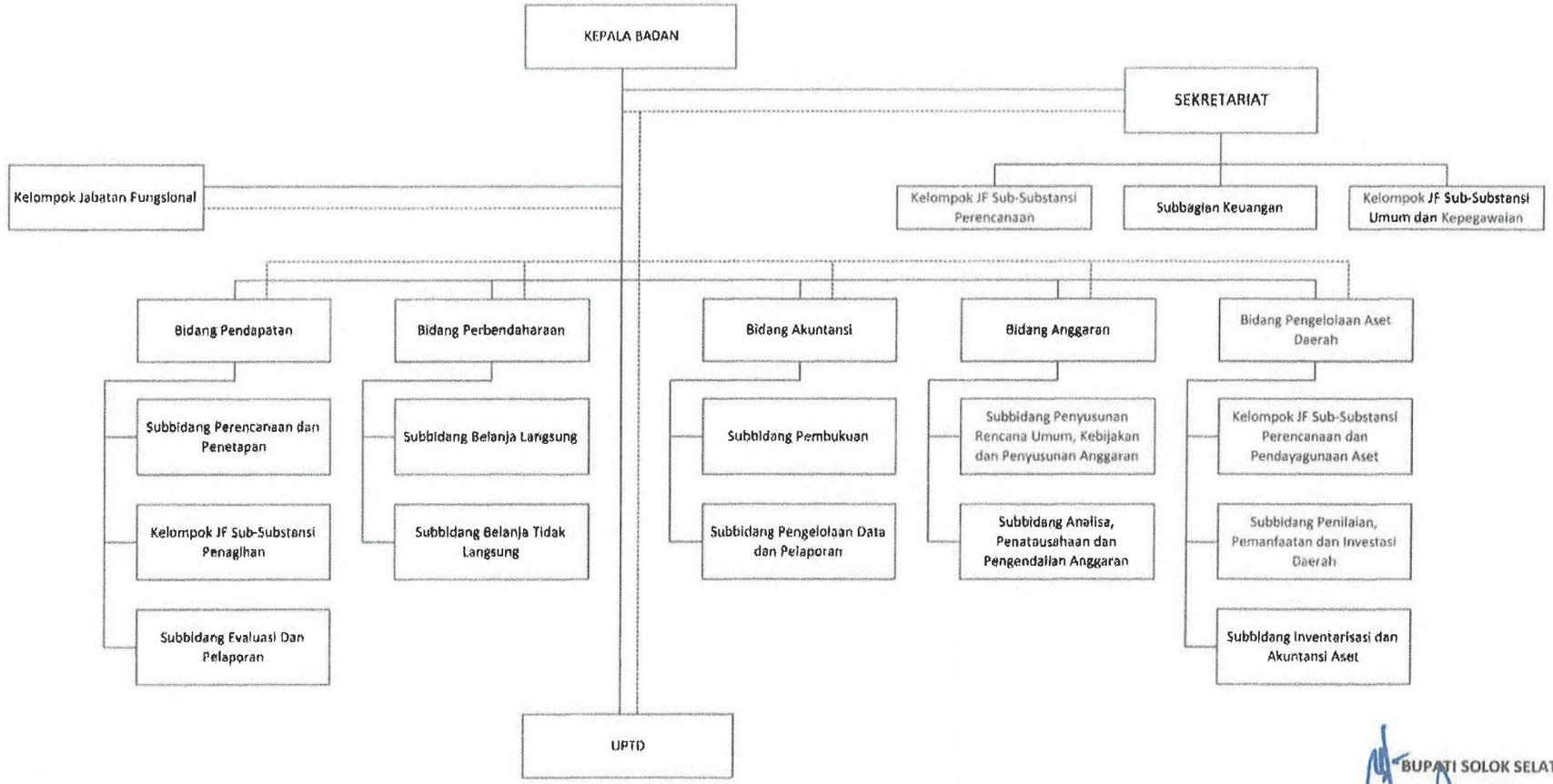
21. Kepala Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan dan Investasi Daerah;
22. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Akuntansi Aset.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Solok Selatan terbentuk Berdasarkan Perda Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten solok selatan no. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas perda nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati No 99 Tahun 2021 tentang kedududkan SOTK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Solok Selatan, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 99 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS

2) Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kabupaten.

3) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

I. **Kepala Badan**

(1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah sertatugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :

a) pembinaan Pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD).

b) perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Keuangan.

c) pelaksanaan pembinaan, dan evaluasi program dan kegiatan bidang Keuangan.

d) pelaksanaan Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

e) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan.

f) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Badan.

g) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

h) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang Pendapatan, Perbendaharaan, akuntansi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

anggaran, barang milik daerah dan unit pelaksana teknis Badan;

i) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

II.1. Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan strategis (Renstra) Badan sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD).
b. perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Keuangan.
c. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan bidang Keuangan.
d. pelaksanaan Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.
e. penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset.
f. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan.
g. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas.
h. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
i. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

II.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan anggaran Sub-Substansi Perencanaan.
b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang Keuangan.
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang Keuangan.
d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Keuangan.
e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran.
f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang Keuangan.
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Keuangan.
h. penyusunan laporan kinerja di bidang Keuangan.
i. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub-Substansi Perencanaan.
j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

II.3. Sub Bagian Keuangan

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakanfungsi :

a. penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan.
b. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan.
c. pelaksanaan urusan perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar.
d. pelaksanaan pengurusan gaji pegawai.
e. pelaksanaan administrasi keuangan.
f. penyiapan laporan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan
g. penyusunan laporan keuangan.
h. persiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
i. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan.
j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

II.4. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan aset penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakanfungsi :

a. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

b. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/Struktur, fungsional dan teknis;
c. pelaksanaan penyusunan/penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai, pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
d. pelaksanaan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan dilingkungan Badan;
e. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan Badan.
f. pelaksanaan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
g. Pelaksanaan administrasi / penataanusahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip.
h. pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat.
i. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum,pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak.
j. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU).
k. penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Negara.
l. penyusunan laporan dan pendokumentasian Aset.
m. penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

n. pelaksanaan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian.

o. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

p. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis Badan.

q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

II. Bidang Anggaran

(1) Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi dibidang Anggaran.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia.

b. pelaksanaan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya tidak secara langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.

c. penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) terkait dengan bidang Anggaran.

d. penyusunan Rencana Kerja (RENJA)/program dan kegiatan bidang Anggaran.

e. penyiapan bahan terkait dengan perumusan dan penyusunan kebijakan, pengendalian dan penyusunan serta penatausahaan Anggaran.

f. penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta petunjuk teknis Penyusunan Anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

g. penghimpunan dan penganalisaan dokumen RKA/DPPA-SKPD/PPKD.
h. perumusan dan penyusunan konsep rencana dan fasilitasi serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk.
i. perumusan dan penyusunan konsep rencana dan fasilitasi serta penyusunan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
j. perumusan dan penyusunan konsep rencana dan fasilitasi serta penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
k. pembinaan dan fasilitasi penyusunan anggaran Kas SKPD/PPKD.
l. pelaksanaan pencetakan dan verifikasi DPA/DPPA-SKPD/PPKD.
m. pelaksanaan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD).
n. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
o. pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kerja bidang Anggaran.
p. pemantauan dan evaluasi laporan kinerja dibidang Anggaran.
q. penyampaian saran pertimbangan kepada atasan menyangkut bidang Anggaran.
r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

II.1. Sub Bidang Penyusunan Rencana Umum, Kebijakan Dan Penyusunan Anggaran.

(1) Sub Bidang Penyusunan Rencana Umum, Kebijakan Dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Penyusunan Rencana Umum, Umum, Kebijakan Kebijakan Dan Penyusunan Anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penyusunan Rencana Umum, Kebijakan Dan Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan dan penganalisaan data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di Subbidang Penyusunan Rencana Umum, Kebijakan Anggaran.
b. pengumpulan dan analisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Penyusunan Rencana Umum dan Kebijakan Anggaran.
c. penyusunan rencana program dan/atau kegiatan Penyusunan Rencana Umum dan kebijakan dan Penyusunan Anggaran.
d. perumusan konsep pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam perencanaan kebijakan, analisa dan pengendalian serta penatausahaan dan penyusunan anggaran daerah.
e. penghimpunan seluruh bahan terkait dengan perumusan dan penyusunan kebijakan, pengendalian dan penyusunan Anggaran.
f. penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta petunjuk teknis Penyusunan Anggaran.
g. perumusan dan penyusunan konsep rencana, pembinaan dan fasilitasi serta penyusunan produk hukum serta Edaran tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
h. perumusan dan penyusunan konsep rencana dan fasilitasi serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk. perumusan dan penyusunan konsep rencana dan fasilitasi serta penyusunan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
i. perumusan dan penyusunan konsep rencana dan fasilitasi serta penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

j. penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut Perencanaan dan Kebijakan Anggaran untuk pembinaan dan tugas lainnya.
k. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasa menyangkut perencanaan dan kebijakan anggaran untuk pembinaan dan tugas lainnya
l. pembinaan dan evaluasi terhadaf staf dan memberikan penilaian melalui SKP dilingkungan Subbidang Rencana Umum dan Kebijakan Anggaran.
m. pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Penyusunan Rencana Umum dan kebijakan Anggaran.
n. pelaksanaan pendataan hasil kerja Rencana Umum dan Kebijakan Anggaran;
o. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.
p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

II.2. Sub Bidang Analisa dan Penatausahaan dan Pengendalian Anggaran

(1) Sub Bidang Analisa dan Penatausahaan dan Pengendalian Anggaran mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Analisa dan Penatausahaan dan Pengendalian Anggaran.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Analisa dan Penatausahaan dan Pengendalian Anggaran menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan dan analisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di Subbidang Analisa dan Pengendalian Anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

b. pengumpulan dan analisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Analisa dan Pengendalian Anggaran.
c. penyusunan rencana program dan/atau kegiatan Analisa dan Pengendalian Anggaran.
d. penghimpunan dan analisa dokumen RKA/DPPA-SKPD/PPKD.
e. pembinaan dan fasilitasi penyusunan anggaran Kas SKPD/PPKD.
f. pelaksanaan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD).
g. pelaksanaan pencetakan dan verifikasi DPA/DPPA-SKPD/PPKD.
h. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
i. penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut Perencanaan dan Penyusunan serta Penatausahaan Anggaran untuk pembinaan dan tugas lainnya
j. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadaf staf dan memberikan penilaian melalui SKP dilingkungan Subbidang Analisa dan Pengendalian Anggaran.
k. pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Analisa dan Pengendalian Anggaran.
l. pelaksanaan pendataan hasil kerja Analisa Analisa dan Pengendalian Anggaran.
m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.
n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

III. **Bidang Pendapatan**

(1) Bidang Pendapatan mempunyai tugasmerumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pematauan dan evaluasi dibidang Pendapatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pendaftaran/pendataan, pemeriksaan, penetapan, pembukuan, penagihan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. pelaksanaan pengelolaan penerimaan/pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak dan dana perimbangan pusat serta penerimaan daerah lainnya.
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi pendapatan daerah.
d. pelaksanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
e. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

III.1. Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Perencanaan dan Penetapan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan menyelenggarakanfungsi :

a. pengumpulan data rencana Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
b. penyusunan rencana program kerja subidang perencanaan dan penetapan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

c. perencanaan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

d. pembuatan Nota Perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kartu data.

e. pelaksanaan pendaftaran terhadap objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

f. pelaksanaan administrasi pengelolaan penerimaan / Pendapatan Daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana perimbangan Pusat serta penerimaan daerah lainnya.

g. penerbitan Surat Ketetapan Wajib Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) serta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

h. penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan (SKRDT), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil (SKRDN) serta Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

i. penyampaian SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, kepada Wajib Pajak Serta SKRD, SKRDT, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDN, kepada Wajib Retribusi.

j. penyesuaian Produk Hukum tentang Penetapan target PAD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

k. pemberian penilaian SKP terhadap staf subbidang terkait.

l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

III.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penagihan

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Penagihan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penagihan menyelenggarakan fungsi :

a. pengumpulan data rencana program / kegiatan pemungutan dan penagihan pendapatan daerah.

b. penyusunan rencana dan program kerja pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.

c. pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah.

d. penerimaan dan pengisian blangko keberatan dan permohonan banding dari wajib pajak, retribusi dan PBB P2.

e. pemberian penyuluhan dan sosialisasi pajak dan retribusi ke kecamatan dan nagari.

f. pengumpulan data wajib pajak daerah dan retribusi daerah untuk di lakukan pemungutan.

g. pelaksanan inventarisasi data permasalahan yang berhubungan dengan pemungutan pendapatan asli daerah.

h. pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

i. pengumpulan data sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah.
j. pemberian penilaian SKP terhadap staf sub bidang terkait.
k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

III.3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

(1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakanfungsi :

a. pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan realisasi pendapatan daerah.
b. penyusunan rencana program kegiatan subbidang evaluasi dan pelaporan.
c. pengumpulan dan analisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan evaluasi, monitoring dan pelaporan pendapatan daerah.
d. pelaksanaan Evaluasi, monitoring dan pelaporan target dan realisasi penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan monitoring pelaporan keorganisasi Perangkat Daerah dan unit kerja lainnya sebagai pengelola pendapatan daerah (PAD).
f. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan laporan target dan realisasi penerimaan daerah sektor PBB dengan instansi terkait.
g. pelaksanaan proses administrasi dan rekonsiliasi penerimaan daerah dengan organisasi Perangkat Daerah.
h. pelaksanaan evaluasi pendapatan tahunan pengkajian dan penilaian. penyampaian saran

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

dan pertimbangan kepada atasan menyangkut subbidang evalusi dan pelaporan pendapatan daerah untuk pembinaan.

i. pelaksanaan pendataan hasil kerja bidang evaluasi, monitoring dan pelaporan pendapatan daerah.

j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

IV. Bidang Akuntasi

(1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pematauan dan evaluasi dibidang Akuntansi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang akuntansi.

b. penyelenggaraan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP.

c. pelaksanaan koordinasi laporan keuangan Perangkat Daerah dan pembantuan.

d. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan penyusunan neraca.

e. penyelenggaraan rekonsiliasi bank dan evaluasi realisasi APBD.

f. penyelenggaraan penatausahaan keuangan selain kas.

g. penyusunan dan evaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.

h. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

i. pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkh atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

IV.1. Sub Bidang Pembukuan

(1) Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidangPembukuan.

(2) ntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembukuan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP.
b. pelaksanaan penelitian bukti kas penerimaan dan pengeluaran dari kas daerah.
c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan penyusunan neraca.
d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaporan pengelolaan dana tugas pembantuan.
e. penyusunan dan evaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
f. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
g. pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
h. pemberian pembinaan dan evaluasi terhadaf staf dan memberikan penilaian melalui SKP dilingkungan subbidang Pembukuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai
k. bidang tugasnya.

IV.2. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan

(1) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan menyelenggarakanfungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan daerah.
b. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
c. penyiapan bahan penyusunan laporan semesteran.
d. penyiapan bahan penyusunan laporan neraca daerah.
e. penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.
f. penyusunan naskah Pengantar penyampaian Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
g. penyiapan bahan informasi keuangan daerah.
h. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan APBD.
i. penyiapan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
j. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

k. pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.

l. pemberian pembinaan dan evaluasi terhadap staf dan memberikan penilaian melalui SKP dilingkungan subbidang Pengolahan data dan Laporan.

m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

V. Bidang Perbendaharaan

(1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugasmerumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pematauan dan evaluasi dibidang Perbendaharaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan.

b. penyelenggaraan kebijakan manajemen investasi.

c. penyelenggaraan penerbitan SP2D.

d. penyelenggaraan pengendalian pencairan APBD.

e. penyelenggaraan rekonsiliasi dan pelaporan dana perimbangan.

f. penyusunan dan evaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.

g. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahanpemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.

h. pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

V.1. Sub Bidang Belanja Langsung

(1) Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Belanja Langsung.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Belanja Langsung menyelenggarakanfungsi:

a. penyiapan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan belanja langsung.
b. pelaksanaan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan belanja langsung.
c. pelaksanaan pengujian SPM belanja langsung.
d. pelaksanaan proses penerbitan SP2D belanja langsung.
e. pelaksanaan pengendalian pencairan dana belanja langsung.
f. pelaksanaan penatausahaan dokumen SP2D belanja langsung.
g. penyiapan dan evaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
h. Pelaksanaan iventarisasi,identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
i. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadaf staf dan memberikan penilaian melalui SKP dilingkungan subbidang Belanja Langsung.
j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

V.2. Bidang Belanja Tidak Langsung

(1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Belanja Tidak Langsung.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Belanja Tidak Langsung menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan belanja tidak langsung.
b. pelaksanaan penatausahaan dan pembayaran gaji.
c. pelaksanaan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan belanja tidak langsung.
d. pelaksanaan pengujian SPM belanja tidak langsung.
e. pelaksanaan pemprosesan penerbitan SP2D belanja tidak langsung.
f. pelaksanaan pengendalian pencairan dana belanja tidak langsung.
g. pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh Pasal 21 gaji PNS dan Tabungan Perumahan (Taperum).
h. pelaksanaan sistem informasi gaji.
i. pemprosesan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) bagi pegawai yang pindah dan pensiun.
j. penyiapan bahan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dalam pelaksanaan anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

k. penyiapan dan evaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
l. pelaksanaan iventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
m. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap staf dan memberikan penilaian melalui SKP dilingkungan subbidang Belanja Tidak Langsung.
n. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

VI. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

(1) Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugasmerumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pematauan dan evaluasi dibidang Pengelolaan Aset Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala Badan.
b. penyusunan program/kegiatan Bidang Pengelolaan Aset Daerah.
c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan, pelayanan analisa pengadaan dan kebutuhan, pemanfaatan dan penggunausahaan serta inventarisasi, akuisisi dan investasi asset daerah.
d. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah.
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

VI.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendayagunaan Aset

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendayagunaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aset.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Sub-Substansi Perencanaan dan Fungsional Pendayagunaan Aset menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan dan analisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aset Daerah.
b. pengumpulan dan analisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Perencanaan dan Pendayagunaan Aset Daerah.
c. penyusunan rencana program dan/atau kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Aset Daerah.
d. penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Perencanaan dan Pendayagunaan Aset Daerah.
e. pengumpulan dan analisa data sebagai bahan penyusunan RKBMD, DKBMD, RKPBMD dan DKPBMD untuk pelaksanaan Perencanaan dan Pendayagunaan Aset Daerah.
f. pelaksanaan analisa pengadaan dan kebutuhan asset daerah barang inventarisasi daerah.
g. pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Perencanaan dan Pendayagunaan Aset Daerah.
h. pelaksanaan pendataan hasil kerja analisa perencanaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.

j. pemberian pembinaan dan evaluasi terhadap staf dan memberikan penilaian melalui SKP dilingkungan Sub-Substansi Perencanaan dan Pendayagunaan.

k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

VI.2. Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan dan investasi Daerah

(1) Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan dan investasi Daerah mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Penilaian, Pemanfaatan dan investasi Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan dan investasi Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan dan analisa data sebagai bahan perumusan kebijakan untuk pelaksanaan penilaian, pemanfaatan dan investasi aset daerah.

b. pengumpulan dan analisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan untuk pelaksanaan penilaian aset, pemanfaatan serta untuk investasi asset daerah.

c. Penyusunan rencana program dan/atau kegiatan penilaian, pemanfaatan dan investasi aset daerah.

d. penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria untuk penilaian, pemanfaatan dan investasi aset daerah. pengumpulan dan menganalisa data sebagai bahan pemrosesan pelaksanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

penilaian, pemanfaatan dan pelaksanaan investasi aset daerah.

e. penyelenggaraan pelayanan teknis dan administrasi penilaian, pemanfaatan dan investasi aset daerah.
f. penyiapan data sebagai bahan pemrosesan perubahan status hokum asset daerah.
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.
h. pemberian pembinaan dan evaluasi terhadap staf dan memberikan penilaian melalui SKP dilingkungan pemanfaatan dan investasi aset daerah.
i. Subbidang penilaian, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

VI.3. Sub Bidang Inventarisasi dan Akuntansi Aset

(1) Sub Bidang Inventarisasi dan akuntansi Aset mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Inventarisasi dan akuntansi Aset.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Inventarisasi dan akuntansi Aset menyelenggarakanfungsi :

a. penyiapan dan analisa data sebagai bahan perumusan kebijakan dibidang inventarisasi, dokumen dan akuntansi aset.
b. pengumpulan dan analisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan inventarisasi, dokumen dan akuntansi aset.
c. penyusunan rencana program dan/atau kegiatan inventarisasi, dokumen dan akuntansi aset.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

d. penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria inventarisasi, dokumen dan akuntansi aset.
e. pengumpulan dan analisa data sebagai bahan pemrosesan inventarisasi, dokumen dan akuntansi aset.
f. penyiapan data sebagai bahan pelaksanaan sensus barang daerah secara berkala.
g. penghimpunan dan pengolahan data laporan mutasi aset daerah.
h. pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi dalam hal inventarisasi, dokumen dan akuntansi aset.
i. pelaksanaan pendataan hasil kerja inventarisasi, dokumen dan akuntansi aset.
j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.
k. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap staf dan memberikan penilaian melalui SKP dilingkungan seksi inventarisasi, dokumen dan akuntansi aset.
l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang.

VII. UPTD

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD.

4) Sumber Daya Aparatur

(1) Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
(2) Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

(3) Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

5) Sarana dan Prasarana

(1) Mengembangkan Teknologi Informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manejemen pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.

(2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.

(3) Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

(4) Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rankhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan merupakan bagian dari RKPD tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembengunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja PerubahanPemerintah Daerah. Maka setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang seanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta dengan kabupaten yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2025 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat, dokumen perencanaan tingkat provinsi dan dokumen perencanaan tingkat kabupaten serta memperhatikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

dokumen-dokumen perencanaan di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Solok Selatan sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

Hal tersebut diatas tergambar pada Tabel 2.3/TC-3.1 mengenai Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025, di bawah ini :

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Tabel 2.3 / T-C.3.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Solok Selatan

Nama PD : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					-					-	
	KEUANGAN				**129.955.790.272**	**KEUANGAN**				**129.955.790.272**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Solok Selatan**	**Cakupan layanan operasional kantor**	**100%**	**25.385.201.002**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Solok Selatan**	**Cakupan layanan operasional kantor**	**100%**	**24.745.941.772**	
	Kegiatan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Solok Selatan**	**Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan penganggaran OPD tepat waktu**	**100%**	**66.165.000**	**Kegiatan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Solok Selatan**	**Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan penganggaran tepat waktu**	**100%**	-	
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Solok Selatan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun (Renstra, Renja/Renja-P RKA/RKA-P, DPA, DPPA)	6 Dokumen	33.000.000	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	-	
	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Solok Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja OPD (Lakip, PK, RKT, IKU, RAP, LKPJ, LPPD, EKPP, SIRUP dan SPIP)	11 Dokumen	33.165.000	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Solok Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	-	
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Solok Selatan**	**Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan**	**100%**	**23.961.969.612**	**Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Solok Selatan**	**Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan**	**100%**	**23.340.941.772**	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Solok Selatan	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	49 Orang	23.318.469.612	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Solok Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang dan BPJS seluruh ASN	22.692.761.772	

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

				BPJS seluruh Pemda		Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	648.180.000	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Solok Selatan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Dibayarkan honornya	24 Org	588.500.000	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Solok Selatan	Jumlah SPJ, UP/GU/TU/LS yg diverfikasi	50000 Lembar	27.500.000	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Solok Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	-	
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Solok Selatan	Laporan Keuangan BPKD	4 Dokumen	27.500.000	**Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Solok Selatan**	**Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan**	**100%**	**919.500.000**	
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**837.820.740**	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Solok Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.	4 Paket	5.000.000	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Solok Selatan	Peralatan listrik yang disediakan	10 Jenis	55.000.000	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Solok Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dsediakan.	4 Paket	250.000.000	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Solok Selatan	a). Alat Tulis Kantor yang disediakan	15 Jenis	350.000.000	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Solok Selatan	Jumlsh Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan.	4 Paket	40.000.000	
			b). Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Unit		Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan.	4 Paket	25.000.000	
			c). Perlengkapan gedung kantor	Paket		Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	599.500.000	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Solok Selatan	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan	20 Jenis	13.200.000	**Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Solok Selatan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia**	**100%**	-	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Solok Selatan	a). Bahan cetak yang disediakan	7 Jenis	35.574.000	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebeleur	Solok Selatan	Jumlah Mebeleur yang Disediakan.	6 Paket	-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

			b). Jumlah penggandaan yang disediakan	20000 Lembar		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Solok Selatan**	**Persentase Jasa Penunjang yang tersedia**	**100%**	**115.500.000**	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan minum tamu yang disediakan	100 Kotak		Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.500.000	
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD dan Konsultasi SKPD	Solok Selatan	a). Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	200 Kali	384.046.740	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	85.000.000	
			b). Jumlah makan minum rapat yang disediakan	500 Kotak		Sub Kegiatan: Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 Laporan	25.000.000	
						Sub Kegiatan: Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	90.000.000	
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Solok Selatan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia**	**100%**	**33.275.000**	**Sub Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Solok Selatan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**100%**	**370.000.000**	
	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebeleur	Solok Selatan	Jumlah meubeleur yang disediakan	6 Paket	33.275.000	Sub Kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	9 Unit	270.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Solok Selatan**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**100%**	**140.559.650**	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Solok Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Diehabilitasi.	2 Gedung	50.000.000	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Solok Selatan	Jumlah Materai yang disediakan	500 Buah	5.500.000	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Solok Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi.	2 Unit	50.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Solok Selatan	a). Jumlah pemakaian jasa listrik	60000 Kwh	91.499.650	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Solok Selatan**	**Opini BPK**	**WTP**	**103.236.348.500**	
			b). Jumlah pemakaian telepon/internet	3000000 Gb		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		**Persentase Ketersediaan Dokumen Penganggaran yang Tepat Waktu.**	**100%**	**1.117.856.000**	
			c). Jumlah pemakaian air	8000 Kubik		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Solok Selatan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun.	2 Dokumen	115.092.000	
			d). Jumlah kebutuhan minyak genset	2000 Liter		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	115.020.000	
	Sub Kegiatan: Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Solok Selatan	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Unit	43.560.000	Sub Kegiatan: Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Solok Selatan	Jumlah DPA-SKPD yg di verifikasi.	30 Dokumen	32.000.000	
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Solok Selatan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**100%**	**345.411.000**	Sub Kegiatan: Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Solok Selatan	Jumlah DPA Perubahan-SKPD yg di verifikasi.	30 Dokumen	32.000.000	
	Sub Kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Solok Selatan	a). Jumlah kendaraan dinas operasional yg terpelihara.	26 Unit (Roda empat 6 unit + Roda dua 17 unit)	180.411.000	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Solok Selatan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	325.231.000	
			b). Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional			Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Solok Selatan	Jumlah peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	280.054.000	
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Solok Selatan	a). Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 Gedung	110.000.000	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.	5 Dokumen	218.459.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

			b). Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.	1 Unit		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Solok Selatan	**Ketersediaan Dokumen Penyaluran dan Pelaporan Keuangan Daerah Tepat Waktu.**	**100%**	**165.000.000**	
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Solok Selatan	a). Jumlah gedung kantor dan rumah jabatan yg disewa	2 Unit	55.000.000	Sub Kegiatan: Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	30.000.000	
			b). Jumlah Paket Pemindahan Arsip dan dokumen negara	3 Paket		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Solok Selatan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4 Laporan	15.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Dalam dan Luar Solok Selatan**	**OPINI BPK**	**WTP**	**103.399.599.270**	Sub Kegiatan: Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Solok Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Org	120.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Solok Selatan**	**Persentase ketersediaan dokumen penganggaran yang tepat waktu**	**100%**	**1.677.972.120**	**Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Solok Selatan	**Laporan Keuangan Daerah Disahkan Tepat Waktu dan Mendapatkan Opini WTP.**	**100%**	**291.817.100**	
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Solok Selatan	Jumlah dokumen KUA PPAS Awal yg disahkan	2 Dokumen	209.326.700	Sub kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Solok Selatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	12.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Solok Selatan	Jumlah KUPA PPAS Perubahan Tahun yg disahkan	2 Dokumen	203.940.000	Sub kegiatan : Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendataan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LO dan Beban.	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendataan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LO dan Beban.	2 Dokumen	26.000.000	
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Solok Selatan	Jumlah DPA OPD yang diverifikasi	33 OPD / 33 Dokumen	55.000.000	Sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran.	Solok Selatan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran.	12 Laporan	40.000.000	
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Solok Selatan	Jumla Dokumen DPPA OPD yg disahkan	33 OPD / 33 Dokumen	55.000.000	Sub Kegiatan: Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Solok Selatan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	57.000.000	
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Solok Selatan	a). Jumlah Perda tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tepat waktu sesuai aturan dan terdistribusinya APBD ke pihak terkait	2 Dokumen	435.600.000	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Solok Selatan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	85.000.000	
			b). Jumlah Ranperda tentang APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Perubahan	2 Dokumen		Sub Kegiatan: Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Solok Selatan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	55.617.100	
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Solok Selatan	a). Jumlah Perda tentang APBD dan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD Perubahan tepat waktu sesuai aturan dan terdistribusinya APBD	2 Dokumen	432.577.420	Sub Kegiatan: Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Solok Selatan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	16.200.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.		b). Jumlah Regulasi tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yg ditetapkan	5 Dokumen	286.528.000	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Solok Selatan	Capaian Persentase Penyaluran Dana Transfer Daerah dan BTT	**100%**	**101.661.675.400**	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Dalam dan Luar Solok Selatan**	**Ketersediaan Dokumen Penyaluran dan Pelaporan Keuangan Daerah Tepat Waktu.**	**100%**	**496.100.000**	Sub Kegiatan: Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Solok Selatan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	7 Laporan	40.000.000	
								Jumlah Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	98.621.675.400	
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dalam dan Luar Solok Selatan	Jumlah laporan realisasi dan konsolidasi dana transfer/DAK sesuai JUKNIS.	2 Laporan	36.300.000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Solok Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	3,000.000.000	
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Solok Selatan	Persentase akurasi data gaji pegawai yang dapat diakses melalui sistem applikasi gaji.	100%	121.000.000	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Solok Selatan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola dengan baik**	**100%**	**1.135.500.000**	
	Sub Kegiatan: Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Solok Selatan	Jumlah SP2D yang telah diterbitkan dan disahkan BUD.	8000 Dokumen	338.800.000	**Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Solok Selatan**	**Persentase Barang Milik Daerahdan Aset Daerah yang berkondisi baik**	**100%**	**1.135.500.000**	
	Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Solok Selatan**	**Laporan Keuangan Daerah disahkan tepat waktu dan mendapatkan OPINI WTP**	**100%**	**830.477.100**	Sub Kegiatan : Penyusunan Standar BMD dan Standar KBMD	**Solok Selatan**	Jumlah Dokumen Standar BMD dan Standar KBMD yang disusun.	2 Dokumen	12.500.000	
	Sub Kegiatan: Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Solok Selatan	a). Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan SKPD, BLUD.	2 Laporan	193.600.000	Sub Kegiatan: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	13.500.000	
			b). Jumlah SKPD yg melakukan Konsolidasi Laporan Keuangan.	33 OPD		Sub Kegiatan: Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan BMD yang disusun	1 Dokumen	15.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Solok Selatan	Jumlah Ranperda tentang Petanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disahkan.	1 Dokumen	110.715.000	Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	950.000.000	
	Sub Kegiatan: Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Solok Selatan	a). Jumlah kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah.	1 Dokumen	95.712.100	Sub Kegiatan: Pengamanan Barang Milik Daerah	Solok Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	78.000.000	
			b). Jumlah RANPERDA tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yg disahkan.	1 Dokumen		Sub kegiatan : Penilaian Barang Milik Daerah	Solok Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	36.500.000	
			c). Jumlah Standar Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Solok Selatan yg disahkan.	1 Buku		Sub Kegiatan: Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	10.000.000	
	Sub Kegiatan: Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Solok Selatan	Jumlah SISDUR tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yg disahkan/ direvisi.	1 Dokumen	60.500.000	Sub Kegiatan: Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Solok Selatan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	20.000.000	
	Sub Kegiatan: Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dalam dan Luar Solok Selatan	Jumlah OPD peserta Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	33 OPD	114.950.000	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Dalam dan Luar Solok Selatan**	**Peningkatan Pengelolaan dan Capaian Target PAD**	**100%**	**838.000.000**	
	Sub kegiatan : Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dalam dan Luar Solok Selatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah yang dilaksanakan.	4 Kali	55.000.000	**Kegiatan: Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Dalam dan Luar Solok Selatan**	**Persentase Capaian Target Pajak dan Retribusi**	**100%**	**838.000.000**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

	Sub kegiatan : Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendataan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LO dan Beban.	Dalam dan Luar Solok Selatan	Jumlah OPD yang melakukan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendataan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LO dan Beban.	30 OPD	90.000.000	Sub Kegiatan: Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	2 Regulasi	15.000.000	
	Sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran.	Dalam dan Luar Solok Selatan	Jumlah OPD yang melakukan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran.	30 OPD	45.000.000	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Solok Selatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	251.000.000	
	Sub kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten	Dalam dan Luar Solok Selatan	Jumlah OPD peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten	30 OPD	65.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.	Solok Selatan	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang disediakan	3 Jenis	122.000.000	
						Sub Kegiatan: Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Solok Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1 Laporan	40.000.000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Solok Selatan**	**Capaian Persentase penyaluran dana transfer daerah dan BTT**	**100%**	**100.395.050.050**	Sub Kegiatan: Penagihan Pajak Daerah	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	160.000.000	
	Sub Kegiatan: Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Solok Selatan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan ADD, DD, Bagi Hasil, Laporan Keuangan PPKD)	7 Laporan	40.000.000	Sub Kegiatan: Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	25.000.000	
		Solok Selatan	Jumlah Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan Kuangan	1 Laporan	98.621.675.400	Sub Kegiatan : Penilaian PBB P2 serta BPHTB	Solok Selatan	Jumlah Objek Pajak PBB P2 dan BPHTB yang dilakukan penilaian.	1 Kecamatan	100.000.000	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Solok Selatan	Jumlah Laporan Tahunan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan BTT)	1 Laporan	1.733.374.650	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Solok Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penerapan dan Sosialisasi Non Tunai Penerimaan Retribusi Daerah.	12 Laporan	125.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Solok Selatan**	**Persentase BMD dan Asset Daerah yang terkelola dengan baik**	**100%**	**544.210.000**						
	Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Solok Selatan**	**Persentase BMD dan Asset Daerah yang terkelola dengan baik**	**100%**	**544.210.000**						

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

	Sub Kegiatan: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Solok Selatan	Jumlah dokumen RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dan RKPBMD (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah)	2 Dokumen	21.780.000							
	Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah	Solok Selatan	Jumlah OPD yang telah berbasis aplikasi dalam penatausahaan aset	33 OPD	24.200.000							
	Sub Kegiatan: Inventarisasi Barang Milik Daerah	Solok Selatan	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	2 Laporan	24.200.000							
	Sub Kegiatan: Pengamanan Barang Milik Daerah	Solok Selatan	Persentase pengamanan asset daerah baik secara fisik maupun bukti legal kepemilikan Pemda kab. Solok Selatan.	100%	60.500.000							
	Sub Kegiatan: Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Solok Selatan	a). Persentase Jumlah BMD yg dilakukan Pemusnahan dan Penghapusan	100%	116.765.000							
			b). Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemda Solok Selatan	100%								
	Sub Kegiatan: Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Solok Selatan	Jumlah OPD yg sinkron rekapitulasi laporan asset OPD dengan laporan asset daerah	33 OPD	24.200.000							
	Sub Kegiatan: Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Solok Selatan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yg disusun.	1 Laporan	24.200.000							
	Sub Kegiatan: Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Solok Selatan	b). Jumlah OPD perserta pembinaan penerapan E-BMD	33 OPD	68.365.000							
	Sub kegiatan : Penilaian Barang Milik Daerah	Dalam dan Luar Solok Selatan	Persentase BMD yg telah dilakukan penilaian oleh pihak berkompeten	40%	90.000.000							
	Sub Kegiatan : Penyusunan Standar BMD dan Standar Kebutuhan BMD	Dalam dan Luar Solok Selatan	Jumla Dokumen Standar BMD dan Standar Kebutuhan BMD yg disusun.	2 Dokumen	50.000.000							
	Sub kegiatan : Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Dalam dan Luar Solok Selatan	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yg telah disusun.	1 Dokumen	40.000.000							

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Solok Selatan**	**Peningkatan Pengelolaan dan Capaian Target PAD**	**100%**	**626.780.000**							
	Kegiatan: Pengelolaan pendapatan Daerah	**Solok Selatan**	**Persentase Capaian Target Pajak dan Retribusi.**	**100%**	**626.780.000**							
	Sub Kegiatan: Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Solok Selatan	Jumlah regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah yg diupdate	2 Regulasi	68.365.000							
	Sub Kegiatan: Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Solok Selatan	a). Jumlah Objek Pajak pendataan dan evaluasi NJOP PBB P2	4 Kecamatan	128.865.000							
			b). Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.	4 Laporan								
	Sub Kegiatan: Penagihan Pajak Daerah	Solok Selatan	a). Jumlah realisasi PBB P2,PBB P3 dan BPHTB	8 Milyar	326.700.000							
			b). Jumlah WP pajak PBB P2,PBB P3 dan BPHTB yg telah dilakukan pemungutan.	90000 OP								
	Sub Kegiatan: Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Solok Selatan	a). Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB P2	12 Kali	102.850.000							
		Dalam dan Luar Solok Selatan	b). Jumlah Pelaporan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Provinsi dan Pusat	12 Kali								
	Sub kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.	Dalam dan Luar Solok Selatan	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.	4	150.000.000							
	Sub kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.	Dalam dan Luar Solok Selatan	Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang disediakan.	3	300.000.000							
	Sub kegiatan : Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta BPHTB.	Solok Selatan	Jumlah Objek Pajak PBB P2 serta BPHTB yg dilakukan penilaian.	1 Kecamatan	100.000.000							
	Sub kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.	Solok Selatan	Jumlah Perda / Perbup yg direvisi dalam pengelolaan Retribusi Daerah.	1 Perbup/ Perda	250.000.000							
		Solok Selatan	Jumlah Laporan Monitoring penerapan penerimaan retribusi daerah non tunai.	12 Laporan								

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan sampai saat ini belum ada menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Dikarenakan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Program / kegiatan tidak berhubungan langsung dengan masyarakat.

Maka Usulan program/kegiatan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 **Nihil**.

Tabel 2.4 /T-C.3.2
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Solok Selatan

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan program pembangunan perencanaan nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa.

Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka medukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Program Nawacita dan Rencan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berikut identifikasi kebijakan nasional :

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1.	Kepastian dan Penegakan Hukum	APBN	
2.	Keamanan dan Ketertiban	APBN	
3.	Politik dan Demokrasi	APBN	
4.	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	APBN	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Bupati Solok Selatan. Sedangkan sasaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menunjang pencapaian **visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada misi ke-3 yaitu : "Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Melayani",** khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berperan penting dalam penyediaan dan penyusunan anggaran, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keungan daerah, sebagai pondasi untuk melakukan pembangunan dan perabaikan menuju kesejahteraan. Selain itu, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah menjadi kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.

Pada Misi ke-3 pada RPJMD Tahun 2021-2026 adalah "Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Melayani", dengan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik yang terpercaya, cepat, tepat, dan tanggap ; serta didukung oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik.
2. Peningkatan fasilitas operasional KAN dan peran organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan wirausaha dalam pembangunan.

3.2.1. Tujuan

Tujuan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Adapun tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tertuang dalam sasaran RPJMD dan RENSTRA BPKD adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

3.2.2. Sasaran

Selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD yaitu : "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Baik, Bersih dan Melayani", maka BPKD kabupaten Solok Selatan mempunyai sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional dan Akuntabel, dengan indikatornya ; Opini BPK (WTP), Persentase BMD Berkondisi Baik dengan target tahun 2025 sebesar 90,91%.
2. Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Transparant dan Akuntabel, dengan indikatornya ; Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diukur dari Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi, dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 98%.

Apabila dihubungan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan tujuan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, transparan dan akuntabel, dengan indikator tujuan adalah Opini BPK (WTP). Sasarannya adalah sebagai berikut:
   a. Anggaran Daerah yang Berkualitas dan tepat waktu.
   b. Laporan pertangunggjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah sesuai aturan berlaku.
   c. Akuntansi dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
   d. Penatausahaan Pengelolaan BMD Sesuai Peraturan.
   e. Peningkatan kualitas pengelolaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.
   f. Peningkatan penyaluran dan penatausahaan Dana Transfer Pusat dan Belanja Tidak Terduga.

2. Pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel, dengan indikator tujuan adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sasarannya adalah sebagai berikut:
   a. Optimalisasi penggalian potensi PAD
   b. Optimalisasi Pemungutan PAD
   c. Optimalisasi Penatausahaan dan Pelaporan PAD

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (dalam hal ini BPKD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD/ Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKD Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun program guna melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan asset daerah dan pengelolaan pendapatan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati Solok Selatan dalam melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan dibidang kelembagaan, analisa jabatan dan peningkatan kinerja serta ketata laksanaan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana organisasi dan Ketatalaksanaan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan, pada dasarnya kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai "Penyelenggara" setiap program pemerintahan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya.

Program dan kegiatan yang dirancang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 terdiri dari :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**

   Program ini bertujuan untuk memberikan Pelayanan Adm Perkantoran pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan efisiensi.

2. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah agar tercapainya laporan keuangan daerah yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

3. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan asset daerah mulai dari penyusunan RKBD, Penatausahaan BMD, Inventarisasi BMD dan Pengamanan BMD.

4. **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dan memaksimalkan potensi dan capaian target PAD.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada BPKD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2. :

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertfikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

TABEL 3.2 / T-C.3.3
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. SOLOK SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						**121.142.224.372,00**							**133.113.064.294,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**121.142.224.372,00**							**133.113.064.294,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**121.142.224.372,00**							**133.113.064.294,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**24.850.512.372,00**						-	**27.903.215.794,00**	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	23.340.512.372,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel	-	26.386.665.794,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	22.692.332.372,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		25.738.485.794,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	648.180.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		648.180.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	919.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel	-	920.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	250.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	40.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	25.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	599.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	220.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-	-	206.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	5.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		6.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	85.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	105.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		90.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	370.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang professional dan akuntabel	-	390.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	270.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang professional dan akuntabel		275.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang professional dan akuntabel		55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang professional dan akuntabel		60.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	-	-			-	**94.318.212.000,00**						-	**103.236.348.500,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	1.251.885.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel	-	1.117.856.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	156.935.200,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		115.092.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	158.578.400,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		115.020.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				33 Dokumen	38.842.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		32.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				33 Dokumen	38.812.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		32.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	327.061.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		325.231.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	293.655.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		280.054.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				5 Dokumen	238.001.800,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		218.459.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	165.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang professional dan akuntabel	-	165.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang professional dan akuntabel		30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang professional dan akuntabel		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				150 Orang	120.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang professional dan akuntabel		120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	291.817.100,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang professional dan akuntabel	-	291.817.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				4 Laporan	12.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang professional dan akuntabel		12.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				2 Dokumen	26.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang professional dan akuntabel		26.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang professional dan akuntabel		40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	57.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang professional dan akuntabel		57.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang professional dan akuntabel		85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	55.617.100,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang professional dan akuntabel		55.617.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	16.200.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang professional dan akuntabel		16.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	92,609,509,500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang professional dan akuntabel	-	101.661.675.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				7 Laporan	90,609,509,500,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang professional dan akuntabel		98.661.675.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	2.000.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang professional dan akuntabel		3.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	-	-			-	**1.135.500.000,00**						-	**1.135.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	1.135.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel	-	1.135.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebuluhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		12.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		13.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	950.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		950.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	78.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		78.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	36.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		36.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	-			-	**838.000.000,00**						-	**838.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	838.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang transparant dan akuntabel	-	838.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang transparant dan akuntabel		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	251.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang transparant dan akuntabel		251.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Unit	122.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang transparant dan akuntabel		122.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang transparant dan akuntabel		40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				1 Obyek Pajak	100.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang transparant dan akuntabel		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				2 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang transparant dan akuntabel		160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang transparant dan akuntabel		25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	125.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang transparant dan akuntabel		125.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	JUMLAH							**121.142.224.372,00**							**133.113.064.294,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 menetapkan bebarapa program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran dan ketersediaan anggaran sesuai dengan yg telah ditetapkan pada Rencana Strategis BPKD untuk periode 2021-2026.

Beberapa Rencana Kerja Prioritas pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk sub kegiatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi Penyusunan dan Verefikasi DPA-SKPD
4. Koordinasi Penyusunan dan Verefikasi Perubahan DPA-SKPD
5. Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
6. Koordinasi Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
7. Koordinasi Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
8. Koordinasi Penyusunan dan verefikasi RKA-SKPD
9. Koordinasi Penyusunan dan verefikasi Perubahan RKA-SKPD
10. Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Spervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya.
11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
12. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota
13. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
14. Koordinasi dan Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten.
15. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.
16. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuanga Pemerintah Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

17. Pembinaan akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten.
18. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
19. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
20. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
21. Penatausahaan Barang Milik Daerah
22. Inventarisasi Barang Milik Daerah
23. Pengamanan Barang Milik Daerah
24. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
25. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
26. Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten.
27. Analisa Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
28. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
29. Penagihan Pajak daerah
30. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, BPKD selain sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sehingga anggaran yang dikelola meliputi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku Perangkat Daerah dan PPKD.

Komposisi anggaran PPKD dialokasikan untuk Belanja Tidak Lansung Non Pegawai yang terdiri dari Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten dan Pemerintahan Nagari, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dan Pemerintahan Nagari, serta Belanja Tidak terduga. Sedangkan belanja BPKD selaku Perangkat Daerah terdiri dari Belanja Tidak Lansung yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Lansung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengelola pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Hasil Retribusi Daerah diperoleh dari pendayagunaan atas barang milik daerah yang disewa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan pemerintah daerah memperoleh imbalan uang tunai yang lansung dibayarkan ke Kas Daerah. Sedangkan Pengelolaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diantaranya berasal dari Pendapatan Bunga Deposito, Penerimaan Jasa Giro, Deviden atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD, Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan Pos Pendapatan Lain-lain.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan selain menjadi pengendali pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Program pengelolaan keuangan daerah terus diupayakan untuk dapat mengikuti dinamika peraturan dan ketentuan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang terus berubah dari tahun ke tahun. Harus disadari bahwa setiap perubahan yang terjadi adalah karena adanya keinginan dan dorongan untuk lebih baik dari hari sebelumnya. Perubahan perlu dilakukan untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang terjadi sebelumnya sehingga kita dapat mengevaluasi dan melakukan perbaikan disetiap aspek kearah yang lebih baik.

Rankhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2025 ini merupakan Rencana Kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan, dengan Terwujudnya Penyelenggaraan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Profesional dan Akuntabel melalui Rencana Kerja pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun 2025.

Secara ringkas sesuai Fungsi BPKD adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.
2. Dengan Dokumen renja ini diharapkan dapat direncanakan beberapa alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi utamanya dalam pengelolaan keuangan, asset dan pendapatan daerah, dimana saat ini penerapan laporan keuangan berbasis akrual dan penerapan teknologi informasi dalam SIPD terintegrasi secara online.
3. Dengan Dokumen renja ini diharapkan dapat direncanakan beberapa alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi utamanya dalam pengelolaan keuangan, asset dan pendapatan daerah, dimana saat ini penerapan laporan keuangan berbasis akrual dan penerapan teknologi informasi dalam SIPD terintegrasi secara online.
4. Ranwal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai bahan dalam menyusun usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan tahun lalu.

Dengan adanya Rankhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Kuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran tujuan dan sasaran dalam bentuk kinerja Perangkat Daerah diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Solok Selatan maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Padang Aro, 22 Juli 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

MARFIANDHIKA ARIEF, SE.Ak., CA
19800313 200501 1 005
Pembina Tingkat I (IV.b)

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dengan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 26

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 41

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 46

2,5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 69

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap kebijakan Nasional 71

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 71

3.3 Program dan Kegiatan 72

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 77

BAB V PENUTUP 161

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah SWT, karena dengan izin dan hidayah-Nya kami telah dapat menyelesaikan pembuatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 merupakan Perencanaan untuk pecapaian target kinerja dan keuangan yang berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Diharapkan dengan adanya Rencana Kerja 2025 ini maka segala macam kegiatan pada Dinas Kesehatan beserta Jajarannya dapat terlaksana dengan baik melalui sistem perencanaan kinerja dan keuangan yang terukur.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut memberikan kontribusi sehingga terselesaikannya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Solok Selatan.

Padang Aro, 2024

Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. PENDEWAL, M.H

NIP. 19840208 201101 1 007

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Kerja Tahunan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daerah lainnya.

Rencana Kerja ini disusun dalam rangka mengevaluasi dan melengkapi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya atau kegiatan yang belum mencapai target dan mempertimbangkan kondisi terakhir tahun 2024 juga permasalahan dan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dan tahun sedang berjalan. Rencana Kerja disusun mengacu pada kebijakan, RKPD Kabupaten Solok Selatan, RKPD Propinsi Sumatera Barat dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada usulan kegiatan dari masing-masing bidang, seksi dan sub bagian secara formal yang diformulasikan melalui forum musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan untuk Tahun 2026 nantinya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang juga akan mempedomani RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
o. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 ;
p. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
q. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
s. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
t. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
u. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 86 Tahun Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
v. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.
w. Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 dimaksud untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat

program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan yang diharapkan dalam penetapan dokumen Rencana Kerja di harapkan :

1. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan beserta Unit Pelaksana Teknis serta Jaringannya dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kesehatan di Kabupaten Solok Selatan selama Tahun 2025 dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi Kabupaten Solok Selatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pada bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait

dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Uraian Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Usulan Aplikasi SIPD

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan- kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja (LKj). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pemerataan sumber daya dan manajemen Kesehatan	% masyarakat yang memiliki jaminan Kesehatan	100%	95,92%	95,92%
		% Prevalensi Gizi Buruk	0.01%	0,14%	13%
		Menurunya Angka kematian ibu per 100.00 KH	180/100.000 KH	164,29 per 100.000 KH	109%
		Menurunya Angka kematian Bayi per 1.000 KH	5,17 per 1.000 KH	7,94 per 1000 KH	46%
		Visite Rate	2%	1,8%	90%
2	Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat	Persentase penduduk akses yang memiliki Jamban Sehat	100%	74,86%	74,86%
		Persentase penduduk yang mengakses air minum Sehat	100%	79.25%	79.25%
		Penghargaan Tatanan kabupaten/kota sehat	Wistara	Wiwerda	Wiwerda
		Jorong open defecation free (ODF)	70%	50%	44.33%

Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, namun ada beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya :

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota, pada kegiatan ini ada beberapa sub kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan sesuai dengan anggaran DAK Fisik yang didapatkan pada Tahun 2023.
2. Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota, pada kegiatan ini ada beberapa sub kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan seperti kegiatan Pelayanan Usia Produktif karena kurangnya koordinasi lintas program mengenai pelayanan usia produktif.
3. Pada sub kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) tidak tercapai dikarenakan Berdasarkan PMK nomor 14 tahun 2021.persyaratan penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi bagi Tempat pengolahan pangan seperti rumah makan,depot air minum dan restoran dimana pemilik harus memiliki sertifikat pelatihan laik higien sanitasi. Pada tahun 2023 telah dilakukan pelatihan untuk pemilik depot air minum sebanyak 51 depot dan rumah makan sebanyak 37 rumah makan.
4. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Kesehatan Masyarakat (UKBM), kegiatan ini tidak terlaksana karena belum terbentuknya pokjanal posyandu sehingga Bimtek tidak bisa dilaksanakan.

Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel. 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s / d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)	Terget Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s / d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)*100	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	**Cakupan Pelayanan Operasional Pelayanan Kantor**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	100	**100**	66,66	66,66
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu**		**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	42	10	7	7	100	7	24	57
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	30	10	5	5	100	5	20	67

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	2714	445	451	630	140%	451	1526	56
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	72	12	12	14	117%	12	38	53
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	6	1	1	1	100%	1	3	50
Administrasi Umum perangkat daerah	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	24	4	4	4	100	4	12	50
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	24	4	4	4	100	4	12	50
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	24	4	4	4	100	4	12	50
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	24	4	4	4	100	4	12	50
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	24	4	4	4	100	4	12	50

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Kesehatan	laporan	24	4	4	4	100	4	12	50
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pememrintah Daerah	**Persentase barang milik daerah yang tersedia**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	paket	340	136	10	136	1.360	10	282	83
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	24	4	4	4	100	4	12	50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	72	14	12	14	117	12	40	56
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	24	4	4	4	100	4	12	50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	12	40	2	8	400	2	50	417

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasinal Lapangan	Jumlah kendaran dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	24	40	5	6	120	5	51	213
Peningkatan Pelayanan BLUD	**Cakupan Layanan BLUD**		100	33,33	100	100	100	100	66,66	66,66
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menunjang pelayanan BLUD	Puskesmas	60	0	10	0	-	10	10	17
	RS Pratama		5	1	1	1	100	1	3	60
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Angka Kesakitan:**					26				
	Kasus baru TB BTA+	**per 100 ribu penduduk**	22	27	25	377	27	25	53	241
	Prevalensi kasus HIV	**per 10 ribu penduduk**	0,07	0,12	0,1	0	0,12	0,1	0	-
	Prevalensi Kasus diare	**per 100 ribu penduduk**	20,46	22,16	21,5	2,3	22,16	21,5	44	215
	Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita	**persen**	4,1	4,6	4,4	0	4,6	4,4	9	220
	Rata-rata kesakitan DBD	**per 100 ribu penduduk**	10,85	15,37	13,1	0,04	15,37	13,1	30	276
	API Malaria	**per 1000 penduduk**	0,01	0,01	-	0	0,01	-	0	-
	Angka Mortalitas penduduk (Angka kematian kasar)	**per 1000 penduduk**	18,05	20,07	19,39	0	20,07	19,39	40	222
	Persentase balita gizi buruk	**persen**	0,01	0,01	0,01	0,14	0,01	0,01	0	-
	Persentase balita kurang gizi	**persen**	6	6,5	6,3	1,86	6,5	6,3	13	217

	Persentase balita stunting	**persen**	13,1	13,6	13,4	3,4	13,6	13,4	27	206
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,66**	**66,66**
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	puskesmas	10	2	2	0	-	2	4	40
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	rumah dinas	6	0	1	0	-	1	1	17
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang dikembangkan	rumah sakit	2	1	0	1	#DIV/0!	0	2	100
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan	puskesmas	6	3	1	0	-	1	4	67
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	puskesmas	20	10	4	0	-	4	14	70
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pustu yang direhabilitasi	pustu	10	1	4	2	50	4	7	70
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	puskesmas	10	10	2	0	-	2	12	120
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	paket	28	1	4	1	25	4	6	21
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah jenis alat kesehatan yang dikalibrasi	jenis	10	1	0	1	#DIV/0!	0	2	20
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin	paket	6	2	1	1	100	1	4	67
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai	paket	6	2	1	1	100	1	4	67

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah paket pemeliharaan rutin dan berkala Alkes	paket	45	1	10	1	10	10	12	27
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pencapaian SPM Kesehatan**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
	Persentase ibu hamil yang melahirkan difasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
	Persentase bayi baru lahir umur 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
	Persentase balita yang umur 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
	Persentase orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66

	Persentase orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
	Persentase orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
	Persentase orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
	Persentase orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
	Persentase orang terduga berisiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DAK)	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	19572	2565	3234	9800	303	3234	15599	80

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DAK)	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	10970	2565	1954	4323	221	1954	8842	81
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	5870	2784	954	5185	544	954	8923	152
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	113418	10992	18903	21944	116	18903	51839	46
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	130068	15335	21678	33674	155	21678	70687	54
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	479010	0	79835	25288	32	79835	105123	22
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	28050	0	4675	14562	311	4675	19237	69
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	38330	23837	6574	30288	461	6574	60699	158
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	12600	1752	2100	3236	154	2100	7088	56
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	1640	648	260	1042	401	260	1950	119
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Penderita TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	2683	377	25	896	3.584	25	1298	48

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	20828	3310	3505	3422	98	3505	10237	49
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah penduduk yang dilayani pada kondisi KLB	Orang	30458	10482	5067	10529	208	5067	26078	86
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan gizi	Orang	2430	0	405	614	152	405	1019	42
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah jemaah haji yang mendapatkan tes kebugaran	Orang	140	0	20	29	145	20	49	35
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pemicuan jamban sehat dan air bersih	jiwa	200	0	0	3304	#DIV/0!	0	3304	1652
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah pelaksanaan Promosi Kesehatan	kali	42	0	6	0	-	6	6	14
Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	Puskesmas	4	2		2	#DIV/0!		4	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melaksanakan Surveilans Kesehatan	Puskesmas	4	8	0	8	#DIV/0!	0	16	400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang yang dilayani dengan masalah gangguan juwa	orang	121	267		267	#DIV/0!		534	441
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyuluhan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	kali	14	6	2	6	300	2	14	100

Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah pelayanan kesehatan daerah terpencil	nagari	0	4		4	#DIV/0!		8	#DIV/0!
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas	35	8	5	8	160	5	21	60
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan	jiwa	273750	162465	45.625	174887	383	45.625	382977	140
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional		1	300	0	0	#DIV/0!	0	300	30000
Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat	Tatanan Kabupaten Sehat		Wistara	Wiwerda	Wiwerda	Wiwerda	Wiwerda	Wiwerda	Wierda	Wiwerda
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang operasional	Rumah sakit	6	2	1	1	100	1	4	67
Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Tahun	6	8	1	1	100	1	10	167
Operasional Puskesmas Pakan Rabaa	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Pakan Rabaa	Tahun	6	2	1	1	100	1	4	67
Operasional Puskesmas Muaralabuh	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Labuh	Tahun	6	2	1	1	100	1	4	67
Operasional Puskesmas Pakan Selasa	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Pakan Selasa	Tahun	6	2	1	1	100	1	4	67
Operasional Puskesmas Lubuk Gadang	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Lubuk Gadang	Tahun	6	2	1	1	100	1	4	67

Operasional Puskesmas Bidar Alam	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Bidar Alam	Tahun	6	2	1	1	100	1	4	67
Operasional Puskesmas Talunan	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Talunan	Tahun	6	2	1	1	100	1	4	67
Operasional Puskesmas Mercu	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Mercu	Tahun	6	2	1	1	100	1	4	67
Operasional Puskesmas Abai	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Abai	Tahun	6	2	1	1	100	1	4	67
Operasional Puskesmas Lubuk Ulang Aling	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Lubuk Ulang Aling	Tahun	6	2	1	1	100	1	4	67
Operasional Puskesmas Sungai Kalu	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Kalu	Tahun	6	2	1	1	100	1	4	67
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah pelayanan fasilitas kesehatan lainnya yang melakukan operasional	Unit	6	8	1	8	800	1	17	283
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (DAU dan DAK)	Jumlah akreditasi puskesmas	Puskesmas	18	8	4	8	200	4	20	111
Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumah kasus KIPI	Kasus	20	20		0	#DIV/0!		20	100
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	jumlah puskesmas yang melaksanakan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Puskesmas	30	8	4	8	200	4	20	67

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang datanya diolah	Puskesmas	10	10	10 Puskesmas	8	10	8	8	80
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	**Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	kali	4	2	4	2	50	4	8	200
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Pembinaan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	kali	4	1	4	1	25	4	6	150
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi**	**persen**	**50**	**23**	**32**	65	**23**	**32**	50	50
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	kali	24	4	4	2	50	4	10	42

	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah puskesmas yang memiliki Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	puskesmas	**60**	10	10	8	80	10	28	47
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK	orang	200	23	30	0	-	30	53	27
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase ketersediaan farmasi**	**persen**	100	97	98,5	2	97	98,5	32,5	32,5
		Persentase ketersediaan alkes	**persen**	69	61	63	100	61	63	20,5	29
		Cakupan pengawasan PIRT	**persen**	95	90	92	65	90	92	30,2	32

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	kali	24	4	4	24	600	4	32	133
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	kali	24	4	4	4	100	4	12	50
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah P-IRT yang dikendalikan dan diawasi	pirt	720	**275**	125	23	18	125	423	59
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan	TPM	2525	**67**	421	0	-	421	488	19
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66

Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.	Jumlah pengawasan produk makanan dan minuman industri Rumah Tangga pada masayarakat	kali	72	0	12	0	-	12	12	17
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase Rumah Tangga yang menerapkan standar PHBS**	**persen**	**87**	**75**	**79**	34	**75**	**79**	63	29
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang dibina dalam upaya promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	puskesmas	10	**10**	10	8	80	8	26	260
Pelaksanaan sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase terlaksananya upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah puskesmas yang dibina dalam melaksanakan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	puskesmas	27	**10**	4	8	200	4	22	81

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	66,66	66,66
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	orang	41	**0**	0	0	#DIV/0!	0	0	0

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Secara defenitif Kabupaten Solok Selatan berdiri pada 7 Januari 2004, dengan ibu kota Padang Aro. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 pada pasal 29 bagian pertama yang menerangkan tentang kedudukan Dinas Kesehatan dan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesehatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2.1 Tugas

Dinas kesehatan Kabupaten Solok Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2.2.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan.
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan.
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala daerah terkait dengan bidang kesehatan.

2.2.3 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
   1. Kelompok Jabatan Fungsional
   2. Kelompok Jabatan Pelaksana
d. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, membawahi :
   1. Kelompok Jabatan Fungsional
   2. Kelompok Jabatan Pelaksana
e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
   1. Kelompok Jabatan Fungsional
   2. Kelompok Jabatan Pelaksana
f. UPTD Dinas Kesehatan

KEPALA DINAS

Tugas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan kabupaten serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kabupaten.

Fungsi

a. Perencanaan program kerja tahunan Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
C. Pelaksanaan koordinasi program yang berkaitan dengan instansi lain agar semua tugas dapat berjalan dengan baik;
d Pengkajian kebijakan teknis program kerja dan kegiatan pada Dinas kesehatan;
e. Pelaksanaan evaluasi pencapaian cakupan program kerja Dinas Kesehatan & memonitoring kegiatan bawahan agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik;
f. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan jajaran lintas program & lintas sektor untuk memberi informasi,menerima informasi & data dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas;

g. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD serta pelaksanaan tugas-tugas teknis;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yang meliputi kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit dan bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;

i. I Koordinasi pelaksanaan tugas kepada Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi; dan

J. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

SEKRETARIAT

Tugas

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.

Fungsi

a. Perencanaan program kerja tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

c. pengelolaan administrasi keuangan, mengkaji anggaran belanja dan mengendalikan administrasi belanja dan mengelola administrasi kepegawaian , naskah dinas dan kearsipan serta pembinaan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, pengelolaan urusan rumah tangga & perlengkapan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;

e. penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat, infokes & mengkaji bahan Renstra, LAKIP, LKPJ & LPPD Dinas berdasarkan peraturan yang berlaku;

f. penyelenggaraan peningkatan mutu dan profesionalisme sumbercdaya manusia bidang kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas

Melaksanakan Koordinasi penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan dinas.

Fungsi

a. Penyusunan program kerja sub bagian Perencanaan dan Umum sesuai dengan program kerja sekretariat;
b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
d. Pengkooordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
f. Pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
g. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
h. Penyusunan program kerja tahunan Dinas;
i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
j. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
k. Penyimpanan berkas-berkas keuangandan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
l. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
m. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan dinas; dan
n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas

Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan aset penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas.

Fungsi

a. Penyusunan program kerja sub bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja sekretariat;
b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan administrasi umum;
c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
g. Pelaksanaan pemberian infomasi dan komunikasi;
h. Pengelolaan perpustakaan dinas;
i. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
j. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Tugas

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat.

Fungsi

a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangandan sesuai kebijakan Kepala Dinas;
c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Tugas

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi

a. perencanaan program kerja tahunan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
c. pembuatan perumusan kebijakan teknis dibidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit berdasarkan peraturan perundang- undangan &sesuai kebijakan Pimpinan;
d. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit

tidak menular dan kesehatan jiwa;

e. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

g. pelaksanaan koordinasi & penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

h Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

1. pelaksanaan pemantauan & evaluasi kinerja Bidang P2P;

j. pelaporan pelaksanaan tugae kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Tugas

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi

a. pelaksanaan rapat untuk menggali informasi dan data, mengolah due menganalisis data, mengidentifikasi permasalahan, menetapkan alternatif kegiatan, menyusun prioritas kegiatan serta membuat uraian kegiatan;

b. penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang

pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasiari, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;

d penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;

e. penyiapan bahan kerja dengan mempelajari dan menindaklanjuti disposlsi kepala dinas, memberi arahan dan koreksi;

f. penyiapan rumusan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dengan mempelajari Peraturan - peraturan Seksi Yankes, kefarmasian, alkes dan PKRT serta SDM Kesehatan;

g. analisa data dan perumusan dalam bentuk informasi yang berhubungan dengan Yankes, kefarmasian, alkes dan PKRT serta SDM Kesehatan;

h pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program Yankes, kefarmasian, alkes dan PKRT serta SDM Kesehatan;

l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan niutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan

j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang Kesehatan dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.

UPTD Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. RSUD Solok Selatan

b. RSUD Batang Sangir

c. Puskesmas Koto Parik Gadang Diateh
d. Puskesmas Sungai Pagu
e. Puskesmas Pauh Duo
f. Puskesmas Sangir
g. Puskesmas Sangir Jujuan
h. Puskesmas Sangir Balai Janggo
i. Puskesmas Sangir Batang Hari
j. Puskesmas Lubuk Ulang Aling

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembagian urusan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan, peran Daerah Kabupaten/Kota mencakup :

1. Urusan Upaya Kesehatan
   a. Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
   b. Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten/.
   c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Urusan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
   a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.
   b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten/Kota.
3. Urusan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
   a. Penerbitan izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.
   b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).
   c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.
   d. Pengawasan *post market* produk makanan minuman industri rumah tangga.
4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Kabupaten/Kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kabupaten/Kota.

Hasil analisis dari pencapaian kinerja yang tertuang didalam program dan indikator kinerja 2022 akan dibahas dalam bentuk narasi sebagai berikut:

1. Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan tahun 2023 adalah 174.887 jiwa (95,92%), dengan rincian jumlah PBI adalah 120.046 (65,84%) dan jumlah Non PBI adalah 54.841 (30,08%).
2. Angka kematian ibu di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah 164,29 per 100.000 KH atau dengan capaian 109% atau dengan jumlah kematian ibu sebanyak 6 orang yang lebih meningkat dibanding tahun 2022 yaitu 258,87 per 100.000 KH dengan 7 kematian ibu sedangkan targetnya adalah 186 per 100.000 kelahiran hidup.
3. Angka kematian bayi di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu 7,94 per 1000 yang mana sebelumnya 5,17 per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2022 sedangkan target AKB sesuai Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan adalah 6,7 per 1000 Kelahiran Hidup.
4. pada tahun 2023 prevalensi gizi buruk berdasarkan data EPPGBM adalah 0,21 yaitu sebanyak 23 kasus gizi buruk dan ditangani 100%, sedangkan berdasarkan data SKI belum diketahui karena belum dirilis oleh Kementerian Kesehatan.
5. Cakupan *visite rate* di Kabupaten Solok Selatan tahun 2023 adalah 1,8%

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan berdasarkan renstra, terutama pada sasaran yang belum mencapai target seperti yang tertuang dalam kesimpulan diatas. Adapun upaya yang akan dilakukan dalam mancapai target sebagai berikut:

a. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan dengan pengutamaan pada upaya promotif-preventif terutama meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam rangka menekan jumlah kematian ibu dan bayi ditahun berikutnya.
b. Mengoptimalkan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Program dengan menggunakan stiker ini, dapat meningkatkan peran aktif suami (suami Siaga), keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman. Program ini juga meningkatkan persiapan menghadapi komplikasi pada saat kehamilan, termasuk perencanaan pemakaian alat/ obat kontrasepsi pasca persalinan.
c. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat terutama

dalam penggunaan jamban sehat dalam rangka mendukung terwujudnya jorong Stop BABS (Stop Buang Air Besar Sembarangan).

d. Penambahan anggaran untuk meningkatkan cakupan masyarakat miskin yang memperoleh jaminan kesehatan melalui Jamkesda.

e. Mendata kembali masyarakat yang belum mempunyai asuransi kesehatan masyarakat sehingga target JKN yang diharapkan sebesar 100% dapat tercapai.

Tabel. 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V	V	100%	100%	100%	100%	56,60%	87%	89%	92%	
2	Persentase ibu hamil yang melahirkan difasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	V	V	100%	100%	100%	100%	61,10%	88%	94%	100%	
3	Persentase bayi baru lahir umur 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V	V	100%	100%	100%	100%	95%	95%	93%	95%	

4	Persentase balita yang umur 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	V	V	100%	100%	100%	100%	59%	93%	95%	98%	
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V	V	100%	100%	100%	100%	91,40%	100%	96%	98%	
6	Persentase orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	V	V	100%	100%	100%	100%	29%	54%	96%	98%	
7	Persentase orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V	V	100%	100%	100%	100%	72%	100%	78%	79%	

8	Persentase orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V	V	100%	100%	100%	100%	31%	64%	74%	78%	
9	Persentase orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V	V	100%	100%	100%	100%	194%	100%	100%	100%	
10	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V	V	100%	100%	100%	100%	100%	91%	78%	81%	

11	Persentase orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V	V	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase orang terduga berisiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V	V	100%	100%	100%	100%	37,70%	68%	18%	20%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Solok Selatan, pada dasarnya kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai *"Pengarah"*. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan sebagai berikut:

a. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang perlu diikuti dengan penyempurnaan regulasi, penguatan aspek kediklatan, dan aspek binwas;
b. Distribusi tenaga kesehatan strategis (Dokter Spesialis, Dokter Umum, Perawat, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya) yang belum merata terutama pada daerah terpencil;
c. Masih terbatasnya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi;
d. Lemahnya upaya pembinaan dan apresiasi terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan;
e. Kabupaten Solok Selatan sebagai daerah Rawan Bencana;
f. Adanya dampak terhadap Perubahan Iklim;
g. Terjadinya transisi Epidemiologi dan Demografi yang menyebabkan pola penyakit berubah dari penyakit infeksi ke penyakit generatife yang berdampak pada beban ganda;
h. Masih kurang terpenuhinya minimal 9 tenaga Kesehatan perpuskesmas karena menyangkut kurang terdistribusinya tenaga Kesehatan dan masih kurangnya ketenagaan teknis di Puskesmas seperti tenaga sanitarian.
i. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas;
j. Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

k. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan

l. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan,maka perlu dilakukan peningkatan kinerja organisasi secara sistematis dan terstruktur dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

a. Melanjutkan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kegiatan Peningkatan SDM dan Disiplin Aparatur.
b. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi di daerah. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan penataan terhadap sarana dan prasarana fisik; melakukan pengembangan pada aspek pemerintahan, menyelenggarakan pendidikan kedinasan, serta mengembangkan kader SDM aparatur yang handal dan sesuai dengan kebutuhan.
c. Menjaga dan meningkatkan kualitas pelaporan LKPJ dan LPPD Kepala Daerah Tahun 2025.
d. Melanjutkan peningkatan Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan, Serta Inovasi Pemerintahan

Permasalahan dan Hambatan

4 isu strategis yang menjadi arahan Presiden, yaitu penurunan angka stunting, kematian ibu dan bayi; perbaikan pengelolaan sistem JKN; penguatan pelayanan kesehatan**;** serta isu terkait obat dan alat kesehatan.

Disamping 4 isu pokok tersebut, Dinas Kesehatan memandang perlu untuk menambahkan isu penting lainnya yaitu dukungan manajemen dalam peningkatan pelayanan kesehatan, yang termasuk di dalamnya adalah good governance, desentralisasi bidang kesehatan, dan struktur organisasi yang efektif dan efisien.

Penjabaran isu pokok pembangunan kesehatan tersebut di atas, meliputi:

a. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti: penduduk miskin.
b. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas.
c. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
d. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan.
e. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.
f. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional, dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas.
g. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan.
h. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor.
i. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal.
j. Belum tersedia biaya operasional yang memadai di Puskesmas.
k. Kualitas Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin dan kurang mampu belum optimal;
l. Kurang optimalnya sistem manajemen dan regulasi kesehatan;
m. Masih tingginya insiden / prevalensi penyakit menular yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa;
n. Masih rendahnya kesadaran untuk hidup masyarakat dalam lingkungan yang sehat;
o. Belum optimalnya pendataan kesehatan yang cepat, akurat dan valid yang berakibat terlambatnya penetapan kebijakan dan intervensi;
p. Masih rendahnya alokasi pembiayaan kesehatan;
q. Belum sesuainya standar kompetensi dan komitmen SDM Kesehatan;
r. Kebijakan tatalaksana keuangan daerah yang selalu berubah
s. Sinkronisasi perencanaan anggaran belum maksimal
t. Implementasi program yang bersipat promotif dan preventif masih lemah
u. Pengaturan terhadap sarana pelayanan kesehatan swasta belum baik

v. Jejaring komunikasi kesehatan diantara instansi pemberi layanan kesehatan belum optimal
w. Sistem informasi kesehatan belum terintegrasi

Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia** (terkait dengan peningkatan derajat kesehatan.
2. Masih fluktuatifnya Prevelensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita.
3. Belum tercapai prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
4. Belum tercapainya proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
5. Belum tercapainya persentase perempuan pernah kawin umur 15 - 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
6. Masih fluktuatifnya Angka Kematian Balita (AKBa) dan Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
7. Belum tercapainya Persentase kabupaten/kota (kecamatan/nagari) yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
8. Belum tercapainya target penurunan prevelensi tekanan darah tinggi sampai 24,3%.
9. Masih fluktuatifnya tingkat kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.

KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra. Kebijakan merupakan keputusan yang menentukan mengenai strategi akan dilakukan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan untuk mencapai sasaran :

1. Memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengembangkan kemampuan profesionalisme.
2. Memberikan Regulasi dan fasilitasi untuk menyusun Sistematika Pelaporan, Informasi dan Dokumentasi
3. Optimalisasi kualitas dan pelaksanaan sistem pelayanan dan administrasi kesehatan.
4. Meningkatkan kesempatan kepada PNS untuk meningkatkan kemampuan dibidang pelayanan dan administrasi kesehatan.
5. Optimalisasi pelayanan internal dan eksternal.
6. Memberikan fasilitasi dan regulasi penegakan supremasi hukum

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi, hambatan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, maka sangat di sadari bahwa pencapaian indikator-indikator di bidang kesehatan dalam tahap sekarang masih belum optimal. Kunci sukses dalam pembangunan kesehatan kedepan sangat ditentukan oleh adanya komitmen politis dari semua pihak, baik dari lingkungan eksekutif, legislatif maupun dari masyarakat termasuk swasta. Disamping itu kita masih menghadapi pula keterbatasan dalam sumberdaya pembiayaan dan sumberdaya manusia kesehatan. Oleh karenanya kunci sukses pembangunan kesehatan kita harus memprioritaskan pada bidang-bidang pembangunan kesehatan. Sampai tahun 2026 mendatang prioritas pembangunan kesehatan akan diarahkan pada :

1. Reformasi Pembiayaan Kesehatan melalui jaminan kesehatan masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah;
2. Peningkatalam Pelayanan Kesehatan terutama di daerah terpencil dalam rangka memberikan pemerataan akses pada pelayanan kesehatan yang berkualitas;
3. Ketersediaan obat dan alat kesehatan disetiap fasilitas kesehatan;
4. Pemberdayaan masyarakat, organisasi kemasyarakatan dalam mendukung upaya kesehatan di setiap jenjang administrasi;
5. Meningkatnya dukungan dana/anggaran untuk kesehatan dari sumber dana APBD dan APBN;
6. Terimplementasikannya nilai-nilai pembangunan kesehatan berupa :
   a. **Pro Rakyat,** yang maknanya semua program pembangunan kesehatan haruslah menghasilkan yang terbaik untuk rakyat;

b. **Inklusif,** yang maknanyasemua program pembangunan kesehatan haruslah melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh sektor Kesehatan saja;

c. Responsif, yang maknanya bahwa program kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat;

d. **Efektif,** yang bermakna program kesehatan haruslah menghasilkan sesuatu yang signifikan;

e. **Bersih** yang dimaknai bahwa program kesehatan harus bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan tidak memiliki muatan yang tidak berkaitan dengan kesehatan.

7. Dalam menyelenggarakan berbagai upaya pembangunan kesehatan prioritas, harus didukung dengan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dan peningkatan manajemen kesehatan termasuk penelitian dan pengembangan kesehatan yang memadai.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan merupakan bagian dari RKPD tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. RKPD merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta dengan kabupaten yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2025 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat, dokumen perencanaan tingkat provinsi dan dokumen perencanaan tingkat kabupaten serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Solok Selatan sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Solok Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
					76.318.850.000					**109.023.572.898**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	**Dinkes**	**Cakupan Pelayanan Operasional Pelayanan Kantor**	**100**	**36.118.850.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN**	**Dinkes**	**Cakupan Pelayanan Operasional Pelayanan Kantor**	**100**	**66.431.194.898**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dinkes**	**Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu**	**100**	**30.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinkes**	**Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu**	**100**		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinkes	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinkes	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinkes		

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dinkes**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah**	**100**	**35.206.925.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinkes**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah**	**100**	**63.706.010.521**	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dinkes	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	452	34.820.125.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dinkes	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	451	63.090.230.521	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinkes	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	361.800.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinkes	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	615.780.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinkes	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinkes	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1		
	Administrasi Umum perangkat daerah	**Dinkes**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**646.650.000**	**Administrasi Umum perangkat daerah**	**Dinkes**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**607.176.377**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinkes	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	60.900.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinkes	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	17.000.000	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkes	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkes	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	55.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinkes	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4	157.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinkes	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4	7.500.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinkes	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	68.250.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinkes	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	50.000.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinkes	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4	5.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinkes	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Kesehatan	4	205.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Kesehatan	4	472.676.377,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Dinkes**	**Persentase barang milik daerah yang tersedia**	**Dinkes**	**100.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinkes**	**Persentase barang milik daerah yang tersedia**	**Dinkes**	**50.000.000**	
	Pengadaan Mebel	Dinkes	Jumlah paket mebel yang disediakan	10	100.000.000	Pengadaan Mebel	Dinkes				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkes			50.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Dinkes**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**100**	**120.500.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinkes**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**100**	**1.768.000.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	2.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1.300	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	113.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	75.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	5.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	80	–	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	1.680.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Dinkes**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100**	**14.775.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinkes**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100**	**300.008.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Dinkes	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	14.775.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Dinkes	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	146.497.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau kendaraan lapangan	Dinkes	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas operasiona; yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	14.775.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Dinkes	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3	103.511.000	
	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang terpelihara	1		Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang terpelihara	1	50.000.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinkes	Cakupan Layanan BLUD	100		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinkes	Cakupan Layanan BLUD	100		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinkes	Jumlah puskesmas yang menunjang pelayanan BLUD	10	9.875.150.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinkes	Jumlah puskesmas yang menunjang pelayanan BLUD	10	0	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Solsel**	**Angka Kesakitan:**		**37.600.000.000**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Solsel**	**Angka Kesakitan:**		**116.927.821.814**	
		Solsel	Kasus baru TB BTA+	25			Solsel	Kasus baru TB BTA+	25		
		Solsel	Prevalensi kasus HIV	0,1			Solsel	Prevalensi kasus HIV	0,1		
		Solsel	Prevalensi Kasus diare	21,5			Solsel	Prevalensi Kasus diare	21,5		
		Solsel	Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita	4,4			Solsel	Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita	4,4		

		Solsel	Rata-rata kesakitan DBD	13,1			Solsel	Rata-rata kesakitan DBD	13,1		
		Solsel	API Malaria	0			Solsel	API Malaria	0		
		Solsel	Angka Mortalitas penduduk (Angka kematian kasar)	19,39			Solsel	Angka Mortalitas penduduk (Angka kematian kasar)	19,39		
		Solsel	Persentase balita gizi buruk	0,01			Solsel	Persentase balita gizi buruk	0,01		
		Solsel	Persentase balita kurang gizi	6,3			Solsel	Persentase balita kurang gizi	6,3		
		Solsel	Persentase balita stunting	13,4			Solsel	Persentase balita stunting	13,4		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	**Solsel**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia**	**100**	**8.585.719.884**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	**Solsel**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia**	**100**	**15.432.762.900**	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Solsel	Jumlah fasilitas keschatan lainnya yang dibangun	2	400.000.000	Pembangunan Fasilitas Keschatan Lainnya	Solsel	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	1	9.874.006.514,00	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Solsel	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	1	0	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Solsel	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun			
	Pengembangan Rumah Sakit	Solsel	Jumlah Rumah Sakit yang dikembangkan	0	500.000.000	Pengembangan Rumah Sakit	Solsel	Jumlah Rumah Sakit yang dikembangkan	1	940.000.000	

	Pengembangan Puskesmas	Solsel	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan	1	894.116.999	Pengembangan Puskesmas	Solsel				
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Solsel	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	4	400.000.000	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Solsel	Jumlah puskesmas yang terakreditasi			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Solsel	Jumlah Pustu yang direhabilitasi	4	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Solsel	Jumlah Pustu yang direhabilitasi	4	532.101.486	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Solsel	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2	400.000.000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Solsel	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Solsel	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4	2.741.602.885	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Solsel	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	150.000.000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Solsel	Jumlah jenis alat kesehatan yang dikalibrasi	0	-	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Solsel	Jumlah jenis alat kesehatan yang dikalibrasi	1	50.000.000	
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Solsel	Jumlah jenis alat kesehatan yang dikalibrasi	0	-	Pemeliharaan Alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Solsel	Jumlah jenis alat kesehatan yang dipelihara	1	96.761.000,00	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Solsel	Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin	1	2.600.000.000	Pengadaan Obat, Vaksin	Solsel	Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin	1	3.734.846.300	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Solsel	Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai	1	650.000.000	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Solsel	Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai	1		

	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Keschatan		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		Jumlah distribusi Alat Keschatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12	55.047.600	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Solsel**	**Persentase pencapaian SPM Kesehatan**	**100**	**28.864.280.116**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Solsel**	**Persentase pencapaian SPM Kesehatan**	**100**	**101.385.544.114**	
		Solsel	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			Solsel	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
		Solsel	Persentase ibu hamil yang melahirkan difasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	100			Solsel	Persentase ibu hamil yang melahirkan difasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	100		
		Solsel	Persentase bayi baru lahir umur 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			Solsel	Persentase bayi baru lahir umur 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
		Solsel	Persentase balita yang umur 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100			Solsel	Persentase balita yang umur 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100		

		Solsel	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			Solsel	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
		Solsel	Persentase orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100			Solsel	Persentase orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100		
		Solsel	Persentase orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			Solsel	Persentase orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
		Solsel	Persentase orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			Solsel	Persentase orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
		Solsel	Persentase orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			Solsel	Persentase orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
		Solsel	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			Solsel	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		

		Solsel	Persentase orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			Solsel	Persentase orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
		Solsel	Persentase orang terduga berisiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			Solsel	Persentase orang terduga berisiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DAK)	Solsel	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3.234	60.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DAK)	Solsel	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3.234	25.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Solsel	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1.954	40.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DAK)	Solsel	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1.954	25.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Solsel	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	954	50.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Solsel	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	954	62.016.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Solsel	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	18.903	40.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Solsel	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	18.903	25.410.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Solsel	Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	21.678	40.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Solsel	Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	21.678	27.570.200	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Solsel	Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	79.835	40.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Solsel	Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	79.835	17.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Solsel	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.675	40.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Solsel	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.675	24.322.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Solsel	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6.574	40.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Solsel	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6.574	10.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Solsel	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2.100	40.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Solsel	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2.100	276.925.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Solsel	Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan	260	40.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Solsel	Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan	260	9.500.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Solsel	Jumlah Penderita TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25	20.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Solsel	Jumlah Penderita TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25	305.500.700	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Solsel	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3.505	16.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Solsel	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3.505	7.350.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Solsel	Jumlah penduduk yang dilayani pada kondisi KLB	5.067	29.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Solsel	Jumlah penduduk yang dilayani pada kondisi KLB	5.067	9.600.000	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Solsel	Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi penduduk yang terdampak bencana	1	14.190.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Solsel	Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan gizi	405	23.700.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Solsel	Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan gizi	405	135.600.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Solsel	Jumlah jemaah haji yang mendapatkan tes kebugaran	20	22.201.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Solsel	Jumlah jemaah haji yang mendapatkan tes kebugaran	20	17.120.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Solsel	Jumlah penduduk yang mendapatkan pemicuan jamban sehat dan air bersih	0	25.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Solsel	Jumlah penduduk yang mendapatkan pemicuan jamban sehat dan air bersih	1	246.732.000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Solsel	Jumlah pelaksanaan Promosi Kesehatan	6	22.684.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Solsel	Jumlah pelaksanaan Promosi Kesehatan	6	284.535.200	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	Solsel	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya		60.000.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	Solsel	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	4	10.000.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Solsel	Jumlah puskesmas yang melaksanakan Surveilans Kesehatan	0	60.000.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Solsel	Jumlah puskesmas yang melaksanakan Surveilans Kesehatan	1	84.060.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Jiwa (ODMK)	Solsel	Jumlah Orang yang dilayani dengan masalah gangguan jiwa			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Jiwa (ODMK)	Solsel	Jumlah Orang yang dilayani dengan masalah gangguan juwa		12.800.000	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Solsel	Jumlah penyuluhan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2	15.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Solsel	Jumlah penyuluhan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2	54.742.800	1
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Solsel	Jumlah pelayanan kesehatan daerah terpencil	3	60.000.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Solsel	Jumlah pelayanan kesehatan daerah terpencil	3		
						Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil	1		
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Solsel	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5	35.285.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Solsel	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5	595.226.600	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Solsel	Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan	45.625	17.000.000.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Solsel	Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan	45.625	22.925.225.400	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Solsel	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	300		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Solsel	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	300	32.000.000	
	Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat	Solsel	Tatanan Kabupaten Sehat	Wiwerda	60.000.000	Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat	Solsel	Tatanan Kabupaten Sehat	Wiwerda	29.500.000	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Solsel	Jumlah Rumah Sakit yang operasional (RSUD Batang Sangir)	1	2.000.000.000	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Solsel	Jumlah Rumah Sakit yang operasional (RSUD Batang Sangir & RSUD Solok Selatan)	2	61.029.499.994	

	Operasional Pelayanan Puskesmas	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	1	7.937.510.116	Operasional Pelayanan Puskesmas	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	1		
	Operasional Puskesmas Koto Parik Gadang Diateh	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Koto Parik Gadang Diateh	1	122.500.000	Operasional Puskesmas Koto Parik Gadang Diateh	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Koto Parik Gadang Diateh	1	2.042.377.870	
	Operasional Puskesmas Sungai Pagu	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Pagu	1	125.000.000	Operasional Puskesmas Sungai Pagu	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Pagu	1	2.418.971.458	
	Operasional Puskesmas Pauh Duo	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Pauh Duo	1	52.200.000	Operasional Puskesmas Pauh Duo	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Pauh Duo	1	1.532.138.769	
	Operasional Puskesmas Sangir	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Sangir	1	120.200.000	Operasional Puskesmas Sangir	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Sangir	1	3.156.237.511	
	Operasional Puskesmas Sangir Jujuan	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Sangir Jujuan	1	101.000.000	Operasional Puskesmas Sangir Jujuan	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Sangir Jujuan	1	1.859.012.912	
	Operasional Puskesmas Sangir Balai Janggo	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Sangir Balai Janggo	1	83.200.000	Operasional Puskesmas Sangir Balai Janggo	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Sangir Balai Janggo	1	1.390.548.450	
	Operasional Puskesmas Mercu	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Mercu	1	51.400.000	Operasional Puskesmas Mercu	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Mercu	1		
	Operasional Puskesmas Sangir Batang Hari	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Sangir Batang Hari	1	81.200.000	Operasional Puskesmas Sangir Batang Hari	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Sangir Batang Hari	1	1.361.806.600	
	Operasional Puskesmas Lubuk Ulang Aling	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Lubuk Ulang Aling	1	82.200.000	Operasional Puskesmas Lubuk Ulang Aling	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Lubuk Ulang Aling	1	852.426.250	

	Operasional Puskesmas Sungai Kalu	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Kalu	1	85.000.000	Operasional Puskesmas Sungai Kalu	Solsel	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Kalu	1		
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	Solsel	Jumlah pelayanan fasilitas kesehatan lainnya yang melakukan operasional	1	45.000.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	Solsel	Jumlah pelayanan fasilitas kesehatan lainnya yang melakukan operasional	1	220.223.500	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (DAU dan DAK)	Solsel	Jumlah akreditasi puskesmas	4	25.000.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (DAU dan DAK)	Solsel	Jumlah akreditasi puskesmas	1	38.360.000	
	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Solsel	Jumah kasus KIPI		60.000.000	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Solsel	Jumah kasus KIPI	20	45.250.000	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Solsel	jumlah puskesmas yang melaksanakan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4	13.500.000	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Solsel	jumlah puskesmas yang melaksanakan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4	5.260.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Solsel								38.655.000	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Solsel								127.849.900	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Solsel**	**Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**100**	**100.000.000**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Solsel**	**Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**100**	**30.000.000**	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Solsel	Jumlah puskesmas yang datanya diolah	10 Puskesmas	100.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Solsel	Jumlah puskesmas yang datanya diolah	10 Puskesmas	30.000.000	

	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Solsel	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	100	50.000.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Solsel	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	100	79.514.800	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Solsel	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	4	25.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Solsel	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	4	55.000.000	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Solsel	Jumlah Pembinaan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	4	25.000.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Solsel	Jumlah Pembinaan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	4	24.514.800	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Solsel**	**Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi**	**32**	**50.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Solsel**	**Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi**	**32**	**751.273.900**	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	**Solsel**	**Persentase Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota**	**100**	**10.000.000**	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Solsel**	**Persentase Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota**	**100**	**8.644.800**	
	Pembinaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Solsel	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4	10.000.000	Pembinaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Solsel	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4	8.644.800	

	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah	**So lsel**	**Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota**	**100**	**10.000.000**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Solsel**	**Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota**	**100**	**153.053.100**	
	Perencanaan dan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Solsel	Jumlah puskesmas yang memiliki Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10	10.000.000	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Solsel	Jumlah puskesmas yang memiliki Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10	10.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			1	143.053.100	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Solsel**	**Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**30.000.000**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Solsel**	**Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**589.576.000**	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Solsel	Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK	30	30.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Solsel	Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK	30	589.576.000	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Solsel**	**Persentase ketersediaan farmasi**	**98,5**	**2.500.000.000**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Solsel**	**Persentase ketersediaan farmasi**	**98,5**	**410.373.000**	

		Solsel	Persentase ketersediaan alkes	63			Solsel	Persentase ketersediaan alkes	63		
		Solsel	Cakupan pengawasan PIRT	92			Solsel	Cakupan pengawasan PIRT	92		
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Solsel**	**Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**100**	**2.460.000.000**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Solsel**	**Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**100**	**148.524.000**	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Solsel	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4	2.460.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Solsel	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4	148.524.000	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Solsel**	**Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**100**	**20.000.000**	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Solsel**	**Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**100**	**246.072.000**	

	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Solsel	Jumlah P-IRT yang dikendalikan dan diawasi	125	20.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Solsel	Jumlah P-IRT yang dikendalikan dan diawasi	125	246.072.000	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Solsel**	**Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**100**	**10.000.000**	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Solsel**	**Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**100**	**5.777.000**	
	Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Solsel	Jumlah sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan	421	10.000.000	Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Solsel	Jumlah sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan	421	5.777.000	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Solsel**	**Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah**	**100**	**10.000.000**	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Solsel**	**Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah**	**100**	**10.000.000**	

			Tangga					Tangga			
	Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.	Solsel	Jumlah pengawasan produk makanan dan minuman industri Rumah Tangga pada masayarakat	12	10.000.000	Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.	Solsel	Jumlah pengawasan produk makanan dan minuman industri Rumah Tangga pada masayarakat	12	10.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Solsel**	**Persentase Rumah Tangga yang menerapkan standar PHBS**	**79**	**50.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Solsel**	**Persentase Rumah Tangga yang menerapkan standar PHBS**	**79**	**145.929.100**	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Solsel**	**Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan , Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**100**	**15.000.000**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Solsel**	**Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan , Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**100**	**49.000.000**	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Solsel	Jumlah Puskesmas yang dibina dalam upaya promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	10	15.000.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Solsel	Jumlah Puskesmas yang dibina dalam upaya promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	8	49.000.000	

	Pelaksanaan sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Solsel**	**Persentase terlaksananya upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**100**	**15.000.000**	**Pelaksanaan sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Solsel**	**Persentase terlaksananya upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**100**	**20.700.000**	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Solsel	Jumlah puskesmas yang dibina dalam melaksanakan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	4	15.000.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Solsel	Jumlah puskesmas yang dibina dalam melaksanakan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	4	20.700.000	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Solsel**	**Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**20.000.000**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Solsel**	**Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**76.229.100**	
	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Solsel	Jumlah Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	20.000.000	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Solsel	Jumlah Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	76.229.100	

Perbedaan antara rancangan awal dengan analisa sesuai kebutuhan pada anggaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak dianggarkan karena menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
2. Pada kegiatan Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat penambahan anggaran karena adanya kenaikan gaji dan penambahan pegawai dengan perubahan SOTK yaitu RSUD menjadi UPT Dinas Kesehatan.
3. Pada kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah terdapat pengurangan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan pada Tahun 2025.
4. Pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat pengurangan anggaran karena tidak ada pengadaan mebel pada Dinas Kesehatan hanya menganggarkan untuk rehabilitasi bangunan kantor.
5. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat penambahan anggaran karena untuk Tenaga Kontrak Daerah Dinas Kesehatan dianggarkan pada Dinas Kesehatan.
6. Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat penambahan anggaran karena untuk anggaran BBM Dinas Kesehatan dianggarkan pada kegiatan ini.
7. Pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD tidak lagi dianggarkan karena UPT BLUD tidak ada lagi dan dianggarkan pada masing-masing puskesmas.
8. Pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota terdapat penambahan anggaran karena menyesuaikan dengan anggaran DAK Fisik.
9. Pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdapat penambahan anggaran karena menyesuaikan dengan anggaran DAK Non Fisik.
10. Pada kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi terdapat pengurangan anggaran karena menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran.
11. Pada kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdapat penambahan anggaran karena saat ini terdapat 2 RSUD dikabupaten

Solok Selatan, sehingga membutuhkan tambahan anggaran untuk pengawasannya oleh Dinas Kesehatan.

12. Pada kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota terdapat pengurangan anggaran karena sesuai dengan kebutuhan.

    Pada beberapa kegiatan terdapat penambahan karena adanya anggaran DAK Non Fisik diantaranya :

13. Pada kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah
14. kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
15. kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
16. kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
17. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
18. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Musrenbang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	N I H I L				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap kebijakan Nasional

Salah satu prioritas Program nasional adalah melaksanakan reformasi birokrasi yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan dalam hal ini Dinas Kesehatan, memandang perlu menerapkan di daerah.

Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi yaitu :

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
4. pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
5. Penguatan sistem kesehatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**Angka harapan hidup**
		Prevalensi Stunting
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH
		Prevalensi balita stunting
		Prevalensi wasting (Gizi kurang dan Gizi Buruk) pada Balita
		Angka Morbiditas Penduduk (Angka Kesakitan)

Adapun sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2025 yaitu :

1. Meningkatnya Umur Harapan Hidup;
2. Menurunkan jumlah Kematian Ibu
3. Menurunkan jumlah Kematian Bayi
4. Menurunkan jumlah Gizi Kurang (BB/TB)
5. Meningkatnya Succes Rate pada penderita TB
6. Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki Akses Air Minum yang berkualitas
7. Meningkatnya persentase penduduk yang menggunakan Jamban Sehat
8. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga melalui Germas dan Keluarga sehat
9. Meningkatnya jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Prioritas Pembangunan Kesehatan pada Tahun 2021-2026 difokuskan pada delapan fokus prioritas yaitu :

1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan Keluarga Berencana (KB);
2. Perbaikan status gizi masyarakat;
3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan;
4. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan;
5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;
6. Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan;
8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Menyusun perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesehatan
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan
c. Pengawasan dan pengendalian dibidang kesehatan
d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan
e. Menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik

Sejalan dengan Visi Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026, sehingga untuk mendukung hal tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan berperan aktif untuk mewujudkan melalui visi ***"Mewujudkan Solok Selatan Maju dan Sejahtera"*** **.**

Pada Tahun 2025 Rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019, yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 5 Program, 20 kegiatan dan 80 sub kegiatan. Terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 ada beberapa perbedaan dengan analisa kebutuhan dikarenakan masih menyesuaikan dengan usulan pada Renstra Tahun 2021-2026.

Tabel 3.1

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Administrasi Umum perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Perlengkapan kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Fasilitas Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pengembangan Rumah Sakit
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
		Pengadaan Obat, Vaksin dan BMHP
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DAK)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DAK)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Jiwa (ODMK)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit
		Operasional Puskesmas Koto Parik Gadang Diateh
		Operasional Puskesmas Sungai Pagu
		Operasional Puskesmas Pauh Duo
		Operasional Puskesmas Sangir
		Operasional Puskesmas Sangir Jujuan
		Operasional Puskesmas Sangir Balai Janggo
		Operasional Puskesmas Sangir Batang Hari
		Operasional Puskesmas Lubuk Ulang Aling
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (DAU dan DAK)
		Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/kota	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pelaksanaan sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan Kewenangan Pemerintah Daerah di "Bidang Kesehatan". Pada Tahun 2025 Rencana kerja Dinas Kesehatan terdiri dari 5 Program, 20 kegiatan dan 80 sub dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						**109.023.572.898**								
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**109.023.572.898**							**72.935.694.521**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**109.023.572.898**							**72.935.694.521**	
1,	**1,02,01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Layanan Operasional kantor Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan***	-			**100 persen 100 Persen**	**66.431.194.898**						-	**64.648.160.521**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah*	-			100 persen	63.706.010.521			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan	-	61.556.010.521	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				452 Orang/bulan	63.090.230.521	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan		60.940.230.521	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	615.780.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan		615.780.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah*	-			100 persen	607.176.377			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan	-	941.650.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	17.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan		60.900.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	55.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan		150.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	7.500.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan		157.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	50.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan		68.250.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	5.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan		5.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	472.676.377	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan		500.000.000,	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase barang milik daerah yang tersedia*	-			100 persen	50.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan	-	50.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 persen	1.768.000.000			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan	-	1.800.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan		2.100.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	75.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan		113.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan		5.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.680.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan		1.680.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*	-			100 persen	300.008.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan	-	300.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	146.497.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan		200.000.000	DINAS KESEHATAN

	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	103.511.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan		50.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Dinas Kesehatan		50.000.000	DINAS KESEHATAN

2,	1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***API Malaria per 1000 penduduk Persentase balita gizi buruk Prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk Cakupan Layanan RSUD menuju Akreditasi Paripurna Rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk Persentase balita stunting Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar) kasus diare per 100 ribu penduduk Kasus baru TB BTA + per 100 ribu penduduk Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Persentase balita kurang gizi***	-			**0,01 per 1000 penduduk 0,01 persen 0,08 per 10 ribu penduduk 100 persen 10,85 per 100 ribu penduduk 13,2 persen 18,39 Per 1000 KH 20,80 per 100 ribu penduduk 23 Per 100.000 penduduk 4,2 persen 6,1 persen**	**41.284.802.000**						-	**8.517.534.000**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia Persentase pencapaian SPM Kesehatan*	-			100 persen 100 Persen	15.432.762.900			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu	-	4.155.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	9.874.006.514	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu		300.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				4 Unit	532.101.486	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu		500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	150.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu		150.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														

			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				50 Unit	50.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu		50.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	96.761.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	940.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu		400.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	3.734.846.300	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu		2.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				12 Paket	55.047.600	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu		55.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian SPM Kesehatan*	-			100 persen	25.742.524.300			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Masyarakat	-	1.212.534.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3234 Orang	25.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Masyarakat		60.000.000	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1954 Orang	25.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		40.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				954 Orang	62.016.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		50.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ba														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18903 Orang	25.410.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		40.000.000	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21678 Orang	27.570.200	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		40.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				79835 Orang	17.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		40.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4675 Orang	24.322.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		40.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															

			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6574 Orang	10.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		40.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2100 Orang	276.925.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		40.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				260 Orang	9.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		40.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				23 Orang	305.500.700	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Masyarakat		20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3505 Orang	7.350.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		16.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				5089 Dokumen	9.600.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		29.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	14.190.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Keschatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		13.690.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				405 Dokumen	135.600.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		23.700.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				20 Dokumen	17.120.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		22.201.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				200 Dokumen	246.732.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		25.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				6 Dokumen	284.535.200,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		22.684.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		60.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	84.060.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		60.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				121 Orang	12.800.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		19.974.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				2 Orang	54.742.800,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	595.226.600,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		35.285.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				45625 Dokumen	22.925.225.400,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		17.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	32.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		32.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														

			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	29.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		60.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	220.223.500,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		45.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota															
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	38.360.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		25.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															

			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				20 Laporan	45.250.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		60.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				4 Dokumen	5.260.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		13.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	38.655.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		40.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	127.849.900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		127.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi*	-			100 persen	30.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Rumah Sakit dan Puskesmas	-	100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	30.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Rumah Sakit dan Puskesmas		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota*	-			100 persen	79.514.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Rumah Sakit dan Puskesmas	-	50.000.000	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	55.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Rumah Sakit dan Puskesmas		25.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				4 Unit	24.514.800,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Rumah Sakit dan Puskesmas		25.000.000	DINAS KESEHATAN
3,	**1,02,03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi***	-			**45 persen**	**751.273.900,00**						-	**210.000.000**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota*	-			100 persen	8.644.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Tenaga Kesehatan	-	10.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														

			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	8.644.800,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Tenaga Kesehatan		10.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota*	-			100 persen	153.053.100,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Rumah Sakit dan Puskesmas	-	165.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				10 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Rumah Sakit dan Puskesmas		15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	143.053.100,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Rumah Sakit dan Puskesmas		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	589.576.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Tenaga Kesehatan	-	35.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				30 Orang	589.576.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Tenaga Kesehatan		35.000.000	DINAS KESEHATAN
4,	**1,02,04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi Persentase ketersediaan Farmasi Persentase ketersediaan alkes Cakupan pengawasan PIRT***	-			**100 persen 100 Persen 67 Persen 94 persen**	**410.373.000,00**						-	**2.500.000.000**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	-			100 persen	148.524.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	2.460.000.000	DINAS KESEHATAN

	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				4 Dokumen	148.524.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		2.460.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	-			100 persen	246.072.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	PIRT	-	20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				125 Dokumen	246.072.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	PIRT		20.000.000	DINAS KESEHATAN

	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*	-			100 persen	5.777.000,00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)	-	10.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				421 Dokumen	5.777.000,00	Kab. Solok Selatan , Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)		10.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga*	-			100 persen	10.000.000,00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat (Industri RT)	-	10.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				12 Unit	10.000.000,00	Kab. Solok Selatan , Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat (Industri RT)		10.000.000	DINAS KESEHATAN

5,	**1,02,05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga yang menerapkan standar PHBS***	-			**83 persen**	**145.929.100**						-	**60.000.000**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*	-			100 persen	49.000.000			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				10 Dokumen	49.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*	-			100 persen	20.700.000			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														

			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				4 Dokumen	20.700.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 persen	76.229.100			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				8 Dokumen	76.229.100	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		20.000.000	DINAS KESEHATAN
		UPT. PUSKESMAS KOTO PARIK GADANG DIATEH						**2.042.377.870**									
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.042.377.870**							**2.042.377.870**		
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.042.377.870**							**2.042.377.870**		

1,	**1,02,02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***API Malaria per 1000 penduduk Persentase balita gizi buruk Prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk Cakupan Layanan RSUD menuju Akreditasi Paripurna Rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk Persentase balita stunting Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar) Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar) Kasus diare per 100 ribu penduduk Kasus baru TB BTA+ per 100 ribu penduduk Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Persentase balita kurang gizi***	-			**0,01 per 1000 penduduk 0,01 Persen 0,08 per 10 ribu penduduk 100 persen 10,85 per 100 ribu penduduk 13,2 Persen 18,39 Per 1000 KH 18,39 Persen 20,80 per 100 ribu penduduk 23 per 100 ribu penduduk 4,2 persen 6,1 Persen**	**2.034.577.870,00**						-	**2.034.577.870**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian SPM Kesehatan*	-			100 persen	2.034.577.870,00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	2.034.577.870	UPT. PUSKESMA S KOTO PARIK GADANG DIATEH
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				646 Orang	25.920.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		25.920.000	UPT. PUSKESMAS KOTO PARIK GADANG DIATEH
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				617 Orang	10.695.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		10.695.000	UPT. PUSKESMAS KOTO PARIK GADANG DIATEH
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				530 Orang	29.700.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		29.700.000	UPT. PUSKESMAS KOTO PARIK GADANG DIATEH
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				587 Orang	12.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		12.000.000	UPT. PUSKESMAS KOTO PARIK GADANG DIATEH
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	120.360.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		120.360.000	UPT. PUSKESMAS KOTO PARIK GADANG DIATEH
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	11.400.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		11.400.000,00	UPT. PUSKESMAS KOTO PARIK GADANG DIATEH
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	52.470.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		52.470.000	UPT. PUSKESMAS KOTO PARIK GADANG DIATEH
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	89.520.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		89.520.000,00	UPT. PUSKESMAS KOTO PARIK GADANG DIATEH
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	1.606.402.870,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		1.606.402.870,00	UPT. PUSKESMAS KOTO PARIK GADANG DIATEH
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1.800.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		1.800.000,00	UPT. PUSKESMAS KOTO PARIK GADANG DIATEH
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				108 Orang	4.800.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		4.800.000,00	UPT. PUSKESMAS KOTO PARIK GADANG DIATEH
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	15.330.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		15.330.000,00	UPT. PUSKESMAS KOTO PARIK GADANG DIATEH
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	54.180.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		54.180.000,00	UPT. PUSKESMAS KOTO PARIK GADANG DIATEH
2,	**1,02,05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga yang menerapkan standar PHBS***	-			**83 persen**	**7.800.000,00**						-	**7.800.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 persen	7.800.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	7.800.000,00	UPT. PUSKESMAS KOTO PARIK GADANG DIATEH
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	7.800.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		7.800.000,00	UPT. PUSKESMAS KOTO PARIK GADANG DIATEH
		UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAGU						**2.418.971.458,00**								
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.418.971.458,00**							**2.418.971.458,00**	

	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.418.971.458,00**						**2.418.971.458,00**		
1,	**1,02,02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***API Malaria per 1000 penduduk Persentase balita gizi buruk Persentase balita gizi buruk Prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk Cakupan Layanan RSUD menuju Akreditasi Paripurna Rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk Persentase balita stunting Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar) Kasus diare per 100 ribu penduduk Kasus baru TB BTA+ per 100 ribu penduduk Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Persentase balita kurang gizi***	-			**0,01 per 1000 penduduk 0,01 persen 0,01 Persen 0,08 per 10 ribu penduduk 100 persen 10,85 per 100 ribu penduduk 13,2 Persen 18,39 Per 1000 KH 20,80 per 100 ribu penduduk 23 per 100 ribu penduduk 4,2 persen 6,1 Persen**	**2.414.311.458,00**					-	**2.414.311.458,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian SPM Kesehatan*	-			100 persen	2.414.311.458,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	2.414.311.458,00	UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAGU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	18.480.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		18.480.000,00	UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAGU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				610 Orang	9.225.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		9.225.000,00	UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAGU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4498 Orang	18.240.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		18.240.000,00	UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAGU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															

			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8 Orang	3.900.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		3.900.000,00	UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAGU
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	360.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		360.000,00	UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAGU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	158.675.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		158.675.000,00	UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAGU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	6.120.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		6.120.000,00	UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAGU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	30.885.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		30.885.000,00	UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAGU
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	94.080.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		94.080.000,00	UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAGU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	2.016.221.458,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		2.016.221.458,00	UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAGU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1.800.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		1.800.000,00	UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAGU
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				120 Orang	7.200.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		7.200.000,00	UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAGU
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	720.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		720.000,00	UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAGU
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	15.780.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		15.780.000,00	UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAGU
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				453 Dokumen	32.625.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		32.625.000,00	UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAGU
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga yang menerapkan standar PHBS***	-			**83 persen**	**4.660.000,00**						-	**4.660.000,00**	

	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 persen	4.660.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	4.660.000,00	UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAGU
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	4.660.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		4.660.000,00	UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAGU
		UPT. PUSKESMAS PAUH DUO						**1.532.138.769,00**								
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.532.138.769,00**							**1.532.138.769,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.532.138.769,00**							**1.532.138.769,00**	

1,	**1,02,02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***API Malaria per 1000 penduduk Persentase balita gizi buruk Prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk Cakupan Layanan RSUD menuju Akreditasi Paripurna Rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk Persentase balita stunting Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar) Kasus diare per 100 ribu penduduk Kasus baru TB BTA+ per 100 ribu penduduk Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Persentase balita kurang gizi***	-			**0,01 per 1000 penduduk 0,01 Persen 0,08 per 10 ribu penduduk 100 persen 10,85 per 100 ribu penduduk 13,2 Persen 18,39 Per 1000 KH 20,80 per 100 ribu penduduk 23 per 100 ribu penduduk 4,2 persen 6,1 Persen**	**1.529.738.769,00**						-	**1.529.738.769,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian SPM Kesehatan*	-			100 persen	1.529.738.769,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	1.529.738.769,00	UPT. PUSKESMAS PAUH DUO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				245 Orang	6.300.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		6.300.000,00	UPT. PUSKESMAS PAUH DUO

	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				245 Orang	8.550.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		8.550.000,00	UPT. PUSKESMAS PAUH DUO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				430 Orang	14.880.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		14.880.000,00	UPT. PUSKESMAS PAUH DUO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				402 Orang	6.720.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		6.720.000,00	UPT. PUSKESMAS PAUH DUO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	123.180.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		123.180.000,00	UPT. PUSKESMAS PAUH DUO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	6.600.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		6.600.000,00	UPT. PUSKESMAS PAUH DUO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	36.510.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		36.510.000,00	UPT. PUSKESMAS PAUH DUO
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	101.060.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		101.060.000,00	UPT. PUSKESMAS PAUH DUO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1.195.038.769,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		1.195.038.769,00	UPT. PUSKESMAS PAUH DUO
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		420.000,00	UPT. PUSKESMAS PAUH DUO
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				72 Orang	1.440.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		1.440.000,00	UPT. PUSKESMAS PAUH DUO
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	8.700.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		8.700.000,00	UPT. PUSKESMAS PAUH DUO
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	20.340.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		20.340.000,00	UPT. PUSKESMAS PAUH DUO
2,	**1,02,05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga yang menerapkan standar PHBS***	-			**83 persen**	**2.400.000,00**						-	**2.400.000,00**	

	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 persen	2.400.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	2.400.000,00	UPT. PUSKESMAS PAUH DUO
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		2.400.000,00	UPT. PUSKESMAS PAUH DUO
		UPT. PUSKESMAS SANGIR						**3.156.237.511,00**								
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.156.237.511,00**							**3.156.237.511,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.156.237.511,00**							**3.156.237.511,00**	

1,	**1,02,02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***API Malaria per 1000 penduduk Persentase balita gizi buruk Prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk Cakupan Layanan RSUD menuju Akreditasi Paripurna Rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk Persentase balita stunting Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar) Kasus diare per 100 ribu penduduk Kasus baru TB BTA+ per 100 ribu penduduk Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Persentase balita kurang gizi***	-			**0,01 per 1000 penduduk 0,01 Persen 0,08 per 10 ribu penduduk 100 persen 10,85 per 100 ribu penduduk 13,2 Persen 18,39 Per 1000 KH 20,80 per 100 ribu penduduk 23 per 100 ribu penduduk 4,2 persen 6,1 Persen**	**3.139.737.511,00**					-	**3.139.737.511,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian SPM Kesehatan*	-			100 persen	3.139.737.511,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	3.139.737.511,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				530 Orang	11.760.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		11.760.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR

	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	9.750.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		9.750.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				450 Orang	26.400.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		26.400.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	5.400.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		5.400.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	140.861.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		140.861.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	6.600.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		6.600.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	35.343.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		35.343.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															

			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	110.460.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		110.460.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	2.742.043.511,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		2.742.043.511,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	1.200.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		1.200.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				30 Orang	5.400.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		5.400.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	28.200.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		28.200.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	16.320.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		16.320.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR
2,	**1,02,05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga yang menerapkan standar PHBS***	-			**83 persen**	**16.500.000,00**						-	**16.500.000,00**	

	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 persen	16.500.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	16.500.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	16.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		16.500.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR
		UPT. PUSKESMAS SANGIR JUJUAN						**1.859.012.912,00**								
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.859.012.912,00**							**1.899.012.912,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.859.012.912,00**							**1.899.012.912,00**	

1,	**1,02,02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***API Malaria per 1000 penduduk Persentase balita gizi buruk Prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk Cakupan Layanan RSUD menuju Akreditasi Paripurna Rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk Persentase balita stunting Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar) Kasus diare per 100 ribu penduduk Kasus baru TB BTA+ per 100 ribu penduduk Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Persentase balita kurang gizi***	-			**0,01 per 1000 penduduk 0,01 Persen 0,08 per 10 ribu penduduk 100 persen 10,85 per 100 ribu penduduk 13,2 Persen 16,39 Per 1000 KH 20,80 per 100 ribu penduduk 23 per 100 ribu penduduk 4,2 persen 6,1 Persen**	**1.845.812.912,00**						-	**1.885.812.912,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian SPM Kesehatan*	-			100 persen	1.845.812.912,00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	1.885.812.912,00	UPT. PUSKESMA S SANGIR JUJUAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				292 Orang	29.610.000,00	Kab. Solok Selatan , Sangir Jujuan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER KHUSUS -DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		29.610.000,00	UPT. PUSKESMA S SANGIR JUJUAN

	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				292 Orang	6.825.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		6.825.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR JUJUAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1340 Orang	11.040.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		11.040.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR JUJUAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	12.137.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		12.137.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR JUJUAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				335 Orang	3.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		3.000.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR JUJUAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	150.790.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		190.790.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR JUJUAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	5.040.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		5.040.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR JUJUAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Survellans Kesehatan				1 Dokumen	22.260.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		22.260.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR JUJUAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	82.760.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		82.760.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR JUJUAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	1.521.150.912,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	-	Masyarakat		1.521.150.912,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR JUJUAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		1.200.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR JUJUAN
2,	**1,02,05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga yang menerapkan standar PHBS***	-			**83 persen**	**13.200.000,00**						-	**13.200.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 persen	13.200.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	13.200.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR JUJUAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	13.200.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		13.200.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR JUJUAN
		UPT. PUSKESMAS SANGIR BALAI JANGGO						**1.390.548.450**								
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.390.548.450**							**1.390.548.450**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.390.548.450**							**1.390.548.450**	

1,	**1,02,02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***API Malaria per 1000 penduduk Persentase balita gizi buruk Prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk Cakupan Layanan RSUD menuju Akreditasi Paripurna rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk Persentase balita stunting Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar) kasus diare per 100 ribu penduduk Kasus baru TB BTA + per 100 ribu penduduk Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Persentase balita kurang gizi***	-			**0,01 per 1000 penduduk 0,01 persen 0,08 per 10 ribu penduduk 100 persen 10,85 per 100 ribu penduduk 13,2 persen 18,39 Per 1000 KH 20,80 per 100 ribu penduduk 23 Per 100.000 penduduk 4,2 persen 6,1 persen**	**1.386.668.450,00**						-	**1.386.668.450,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian SPM Kesehatan*	-			100 persen	1.386.668.450,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	1.386.668.450,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR BALAI JANGGO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				377 Orang	25.200.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		25.200.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR BALAI JANGGO

	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				377 Orang	4.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		4.500.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR BALAI JANGGO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1185 Orang	8.280.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		8.280.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR BALAI JANGGO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Mendenita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				108 Orang	6.480.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampll dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		6.480.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR BALAI JANGGO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	110.400.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		110.400.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR BALAI JANGGO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	4.680.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		4.680.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR BALAI JANGGO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	73.110.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		73.110.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR BALAI JANGGO
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	73.860.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		73.860.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR BALAI JANGGO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	1.027.973.450,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		1.027.973.450,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR BALAI JANGGO
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		1.200.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR BALAI JANGGO
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				108 Orang	6.480.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		6.480.000	UPT. PUSKESMAS SANGIR BALAI JANGGO
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				165 Dokumen	14.385.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		14.385.000	UPT. PUSKESMAS SANGIR BALAI JANGGO
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	30.120.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		30.120.000	UPT. PUSKESMAS SANGIR BALAI JANGGO
2,	**1,02,05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga yang menerapkan standar PHBS***	-			**83 persen**	**3.880.000,00**						-	**3.880.000**	

	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 persen	3.880.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	3.880.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR BALAI JANGGO
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3.880.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		3.880.000	UPT. PUSKESMAS SANGIR BALAI JANGGO
		UPT. PUSKESMAS SANGIR BATANG HARI						**1.361.806.600,00**								
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.361.806.600,00**							**1.359.363.750**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.361.806.600,00**							**1.359.363.750**	

1,	**1,02,02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***API Malaria per 1000 penduduk Persentase balita gizi buruk Prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk Cakupan Layanan RSUD menuju Akreditasi Paripurna rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk Persentase balita stunting Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar) kasus diare per 100 ribu penduduk Kasus baru TB BTA + per 100 ribu penduduk Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Persentase balita kurang gizi***	-			**0,01 per 1000 penduduk 0,01 persen 0,08 per 10 ribu penduduk 100 persen 10,85 per 100 ribu penduduk 13,2 persen 18,39 Per 1000 KH 20,80 per 100 ribu penduduk 23 Per 100.000 penduduk 4,2 persen 6,1 persen**	**1.342.366.600,00**						-	**1.339.923.750**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian SPM Kesehatan*	-			100 persen	1.342.366.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	1.339.923.750	UPT. PUSKESMAS SANGIR BATANG HARI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				480 Orang	11.040.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		11.040.000	UPT. PUSKESMAS SANGIR BATANG HARI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	7.275.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		7.275.000	UPT. PUSKESMAS SANGIR BATANG HARI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	7.200.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		7.200.000	UPT. PUSKESMAS SANGIR BATANG HARI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8 Orang	1.320.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		1.320.000	UPT. PUSKESMAS SANGIR BATANG HARI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				14 Orang	2.400.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		2.400.000	UPT. PUSKESMAS SANGIR BATANG HARI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	223.620.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		223.620.000	UPT. PUSKESMAS SANGIR BATANG HARI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				38 Dokumen	6.720.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		6.720.000	UPT. PUSKESMAS SANGIR BATANG HARI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	29.100.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		29.100.000	UPT. PUSKESMAS SANGIR BATANG HARI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	53.920.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		53.920.000	UPT. PUSKESMAS SANGIR BATANG HARI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	949.006.600,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		945.363.750	UPT. PUSKESMAS SANGIR BATANG HARI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	360.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		360.000	UPT. PUSKESMAS SANGIR BATANG HARI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	3.600.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		3.600.000	UPT. PUSKESMAS SANGIR BATANG HARI
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				14 Orang	2.400.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS -DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		3.600.000	UPT. PUSKESMAS SANGIR BATANG HARI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	33.810.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS -DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		33.810.000	UPT. PUSKESMAS SANGIR BATANG HARI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	10.595.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS -DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		10.595.000	UPT. PUSKESMAS SANGIR BATANG HARI
2,	**1,02,05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga yang menerapkan standar PHBS***	-			**83 persen**	**19.440.000,00**						-	**19.440.000**	

	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 persen	19.440.000,00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	19.440.000,00	UPT. PUSKESMAS SANGIR BATANG HARI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	19.440.000,00	Kab. Solok Selatan , Sangir Batang Hari, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER KHUSUS -DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		19.440.000	UPT. PUSKESMAS SANGIR BATANG HARI
		UPT. PUSKESMAS LUBUK ULANG ALING						**852.426.250**								
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**852.426.250**							**655.828.920**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**852.426.250**							**655.828.920**	

1,	**1,02,02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***API Malaria per 1000 penduduk Persentase balita gizi buruk Prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk Cakupan Layanan RSUD menuju Akreditasi Paripurna rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk Persentase balita stunting Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar) kasus diare per 100 ribu penduduk Kasus baru TB BTA + per 100 ribu penduduk Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Persentase balita kurang gizi***	-			**0,01 per 1000 penduduk 0,01 persen 0,08 per 10 ribu penduduk 100 persen 10,85 per 100 ribu penduduk 13,2 persen 18,39 Per 1000 KH 20,80 per 100 ribu penduduk 23 Per 100.000 penduduk 4,2 persen 6,1 persen**	**852.426.250,00**						-	**655.828.920**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian SPM Kesehatan*	-			100 persen	852.426.250,00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	655.828.920	UPT. PUSKESMAS LUBUK ULANG ALING
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				180 Orang	8.680.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS -DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		6.320.000	UPT. PUSKESMAS LUBUK ULANG ALING

	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	4.225.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		4.225.000	UPT. PUSKESMAS LUBUK ULANG ALING
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	14.395.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		14.395.000	UPT. PUSKESMAS LUBUK ULANG ALING
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	6.800.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		6.800.000	UPT. PUSKESMAS LUBUK ULANG ALING
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 dokumen Dokumen	100.190.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		100.880.000	UPT. PUSKESMAS LUBUK ULANG ALING
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 dokumen Dokumen	8.680.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		8.680.000	UPT. PUSKESMAS LUBUK ULANG ALING
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 dokumen Dokumen	18.640.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		18.680.000	UPT. PUSKESMAS LUBUK ULANG ALING
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 dokumen Dokumen	63.120.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		56.360.000	UPT. PUSKESMAS LUBUK ULANG ALING
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 kegiatan Dokumen	603.566.250,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		416.048.920	UPT. PUSKESMAS LUBUK ULANG ALING
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 laporan Laporan	400.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		400.000	UPT. PUSKESMAS LUBUK ULANG ALING
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	400.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		400.000	UPT. PUSKESMAS LUBUK ULANG ALING
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 dokumen Dokumen	16.320.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		16.320.000	UPT. PUSKESMAS LUBUK ULANG ALING
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 dokumen Dokumen	7.010.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		6.320.000	UPT. PUSKESMAS LUBUK ULANG ALING
		RUMAH SAKIT BATANG SANGIR						**12.799.099.994,00**								
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.799.099.994,00**							**11.999.999.994**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**12.799.099.994,00**							**11.999.999.994**	

1,	**1,02,02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***API Malaria per 1000 penduduk Persentase balita gizi buruk Prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk Cakupan Layanan RSUD menuju Akreditasi Paripurna rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk Persentase balita stunting Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar) kasus diare per 100 ribu penduduk Kasus baru TB BTA + per 100 ribu penduduk Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Persentase balita kurang gizi***	-			**0,01 per 1000 penduduk 0,01 persen 0,08 per 10 ribu penduduk 100 persen 10,85 per 100 ribu penduduk 13,2 persen 18,39 Per 1000 KH 20,80 per 100 ribu penduduk 23 Per 100.000 penduduk 4,2 persen 6,1 persen**	**12.799.099.994,00**						-	**11.999.999.994**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia Persentase pencapaian SPM Kesehatan*	-			100 persen 100 Persen	4.999.999.994,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	4.999.999.994	RUMAH SAKIT BATANG SANGIR
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				46 Unit	4.999.999.994,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		4.999.999.994	RUMAH SAKIT BATANG SANGIR
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian SPM Kesehatan*	-			100 persen	7.799.100.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	7.000.000.000	RUMAH SAKIT BATANG SANGIR
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	7.799.100.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		7.000.000.000	RUMAH SAKIT BATANG SANGIR
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)						**48.230.400.000**								
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**48.230.400.000**							**48.131.400.000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**48.230.400.000**							**48.131.400.000**	

1,	**1,02,01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Layanan Operasional kantor Cakupan Pelayanan Operasional Pelayanan Kantor***	-			**100 persen 100 Persen**	**693.000.000**						-	**594.000.000**	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 persen	693.000.000			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Rumah Sakit	-	594.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	693.000.000	Kab. Solok Selatan , Sungai Pagu, Koto Baru	DANA TRANSF ER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Rumah Sakit		594.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

2,	**1,02,02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***API Malaria per 1000 penduduk Persentase balita gizi buruk Prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk Cakupan Layanan RSUD menuju Akreditasi Paripurna Rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk Persentase balita stunting Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar) kasus diare per 100 ribu penduduk Kasus baru TB BTA + per 100 ribu penduduk Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Persentase balita kurang gizi***	-			**0,01 per 1000 penduduk 0,01 persen 0,08 per 10 ribu penduduk 100 persen 10,85 per 100 ribu penduduk 13,2 persen 18,39 Per 1000 KH 20,80 per 100 ribu penduduk 23 Per 100.000 penduduk 4,2 persen 6,1 persen**	**47.537.400.000**						-	**47.537.400.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia Persentase pencapaian SPM Kesehatan*	-			100 persen 100 Persen	2.650.000.000			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	2.650.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	2.500.000.000	Kab. Solok Selatan , Sungai Pagu, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER KHUSUS -DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		2.500.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				200 Unit	150.000.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		150.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian SPM Kesehatan*	-			100 persen	44.887.400.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	44.887.400.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Saki															
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	44.887.400.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		44.887.400.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan adalah Program Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025. Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pengambil kebijakan dan seluruh pimpinan manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Kepala

dr. H. PENDEWAL, M.H
NIP. 19840208 201101 1 007

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perumusan program dan kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Selain itu juga disinkronkan dalam menunjang visi dan misi Kepala Daerah untuk Tahun 2025 dengan Program dan Kegiatan yang mengakomodir Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.

Harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang professional.

Padang Aro, Juli 2024

Kepala Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan
dan Olahraga

PAMIL RUSKAMDANI, M.Pd
NIP. 19870322 201101 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 22

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 22

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 33

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah..... 37

3.3. Program dan Kegiatan 39

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 41

BAB V. PENUTUP 71

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembagunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 126 mengatur bahwa Penyusuan Renja PD diawali dengan penyusunan Rancangan Awal Renja PD pada bulan Desember Tahun n-2 berpedoman kepada Renstra PD, hasil evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan. Rancangan Awal Renja PD ini akan menjadi referensi Bappeda dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Selanjutnya melalui asistensi dengan Bappeda dalam rangka penyamaan persepsi tentang prioritas pembangunan daerah dan mengacu kepada Rancangan RKPD, Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan Renja PD. Rancangan Renja PD menjadi bahan untuk didiskusikan dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah bersama para pamangku kepentingan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 selain mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, juga telah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Khusus terkait penggunaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan telah mempedomani pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Dokumen Renja PD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 ini diselesaikan setelah ditetapkannya RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati. Proses penyusunan Renja PD ini adalah melalui proses-proses menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Ini menggunakan data-data eksisting, analisis gap antara kondisi ideal eksisting, serta kajian-kajian tertentu untuk pengembangan sektor pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Solok Selatan.

2. Partisipatif, dilaksanakan dengan melakukan penjaringan ide dan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam sektor pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
3. Politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati Solok Selatan Tahun 2021–2026, serta capaian RPJMD Tahun 2016–2021.
4. Bottom-Up dan Top-Down
   a. Bottom-Up, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari Nagari sampai dengan Kabupaten.
   b. Top-Down, dilaksanakan dengan mengacu kepada rancangan Rencana Pembangunan instansi terkait pada level provinsi dan Pusat, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

   Kedua pendekatan Top - Down dan Bottom – Up ini diselaraskan dalam proses Konsultasi, Musrenbang dan Forum OPD.

Kabupaten Solok Selatan yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 memiliki topografi berbukit-bukit, dialiri banyak sungai, dan terletak pada kaki Gunung Kerinci yang terkenal karena tertinggi di Sumatera Barat. Ini memberikan augerah yang luar biasa bagi daerah ini, yaitu objek-objek wisata alam yang memukau diantaranya berupa air terjun, wisata sungai, kebun teh, goa, panorama dan lain sebagainya. Sejarah kerajaan-kerajaan dan adat di kawasan Kabupaten Solok Selatan juga menganugerahi daerah ini dengan objek-objek wisata sejarah dan budaya serta kesenian-kesenian yang memiliki daya tarik dan keunikan masing-masing. Semua potensi objek wisata ini diyakini akan menjadi sumber peningkatan perekonomian daerah bila dikelola dengan maksimal dan terencana.

Dengan begitu banyaknya potensi-potensi sumber pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan kebudayaan, maka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga memiliki tantangan dan tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan potensi dimaksud. Ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwasanya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,

Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dibetuknya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan adalah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 dan Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambah Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 No. 114, Tambahan Lembaran Negara No.5887);

7. Peraturaan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian da Evaluasi Pembagunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verivikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 – 2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;

16. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
17. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 ini adalah untuk dapat menjadi acuan atas arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini adalah untuk menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan agar diperoleh pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arahan dan acuan atas :

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025;
b. Penyusunan LKj Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025;
c. Jaminan keterkaitan dan konsistensi terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
d. Jaminan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 terdiri atas :

Bab I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,

Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah/perangkat daerah.

Pada bagian ini diuraikan mengenai rewiew hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 serta progres capaian kinerja dalam renstra periode 2021-2026, sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan Program dan Kegiatannya.

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Pada Tahun 2023 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga secara keseluruhan menganggarkan sebesar Rp. 14.481.931.249,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.671.766.821,00 atau 80,60 % dari total alokasi yang ada.

Berikut ini dapat disajikan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 (tabel T-C.29) berikut ini:

Tabel 2.1:
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Solok Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	URUSAN PARIWISATA									
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100** persen	**100** persen	**100** persen	**100 persen**	**100,00%**	**100 persen**	60 persen	**60,00%**
01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pereangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun aturan dan tepat waktu**	**100** persen	**100** persen	**0** persen	**0** persen	**100,00%**	**100** persen	60 persen	**60,00%**
01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	18 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	**0** dokumen	**0,00%**	**0** dokumen	0 dokumen	**0,00%**
01.2.01. 0006	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	18 dokumen	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	**100,00%**	dokumen	12 dokumen	**66,67%**
01.2.02	**Administrasi Keungan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah**	**100** persen	**100** persen	**100** persen	**100** persen	**100,00%**	**100** persen	60 persen	**60,00%**
01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan	180 Orang	55 Orang	30 Orang	27 Orang	**90,00%**	**27** Orang	109 Orang	**60,56%**

		Tunjangan																
01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honornya	127	Orang	28	Orang	21	Orang	13	Orang	**61,90%**	**21**	Orang	62	Orang	**48,82%**
		Jumlah Tenaga Pendukung Operasional Kantor yang dibayarkan honornya	26	Orang	17	Orang	0	Orang	0	Orang	**0,00%**	**0**	Orang	17	Orang	**65,38%**
01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	persen	**100**	persen	**100**	persen	**100**	persen	**100,00%**	**100**	persen	60	persen	**60,00%**
01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang disediakan	30	Jenis	5	Jenis	5	Jenis	5	Jenis	**100,00%**	**5**	Jenis	15	Jenis	**50,00%**
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	60	Jenis	8	Jenis	8	Jenis	8	Jenis	**100,00%**	**8**	Jenis	24	Jenis	**40,00%**
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30	Jenis	5	Jenis	5	Jenis	5	Jenis	**100,00%**	**5**	Jenis	15	Jenis	**50,00%**
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan	18	Jenis	18	Jenis	5	Jenis	5	Jenis	**100,00%**	**3**	Jenis	26	Jenis	**144,44%**
		Jumlah Pengggandaan yang disediakan	92.000	Lembar	35	Lembar	10.000	Lembar	10.000	Lembar	**100,00%**	**10.000**	Lembar	20.035	Lembar	**21,78%**
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	720	Kali	235	Kali	120	Kali	120	Kali	**100,00%**	**120**	Kali	475	Kali	**65,97%**
		Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Rapat yang disediakan	4.800	Kotak	860	Kotak	900	Kotak	900	Kotak	**100,00%**	**800**	Kotak	2.560	Kotak	**53,33%**
		Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Tamu yang disediakan	1200	Kotak		Kotak		Kotak		Kotak	**#DIV/0!**		Kotak	0	Kotak	**0,00%**
01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia**	**100**	persen	**100**	persen	**100**	persen	**100**	persen	**100,00%**	**100**	persen	60	persen	**60,00%**
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	2.600	buah	449	buah	200	buah	200	buah	**100,00%**		buah	649	buah	**24,96%**
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Telekomunikasi	1.200	GB	6.000	GB	5.000	GB	4.500	GB	**90,00%**	**5.000**	GB	5.000	GB	**416,67%**
		Jumlah pemakaian air		Kubik		Kubik		Kubik		Kubik	**55,93%**		Kubik	6.34	Kubik	**45,29%**

			14.000			1.663			3.000			1.678			3.000			1		
		Jumlah pemakaian jasa listrik	30.900	Kwh		6.570	Kwh		9.655	Kwh		5.713	Kwh	**59,17%**	**9.655**	Kwh		21.938	Kwh	**71,00%**
01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Laporan		0	Laporan		0	Laporan		0	Laporan	**0,00%**	**1**	Laporan		1	Laporan	**33,33%**
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	Laporan		0	Laporan		0	Laporan		0	Laporan	**0,00%**	1	Laporan		1	Laporan	**33,33%**
01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang tersedia**	**100**	persen		**100**	persen		**0**	persen		**0**	persen	**0,00%**	**0**	persen		100	persen	**100,00%**
01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operaasional Kepala yang tersedia	2	unit		0	unit		0	unit		0	unit	**0,00%**		unit		0	unit	**0,00%**
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	79	unit		0	unit		2	unit		2	unit	**100,00%**		unit		2	unit	**2,53%**
01.2.07.0009	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya disediakan	25	unit		0	unit		0	unit		0	unit	**0,00%**		unit		0	unit	**0,00%**
01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100**	persen		**100**	persen		**100**	persen		**100**	persen	**100,00%**	**100**	persen		60	persen	**60,00%**
01.2.09`0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	54	unit		3	unit		9	unit		3	unit	**33,33%**		unit		6	unit	**11,11%**
		Jumlah pajak dan perijinan kendaraan dinas/operasional	54	unit		3	unit		9	unit		3	unit	**33,33%**		unit		6	unit	**11,11%**
01.2.09`00010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dilaksanakan pemeliharaan	6	unit		1	unit		1	unit		1	unit	**100,00%**		unit		2	unit	**33,33%**
01.2.09`00011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saraana/prasarana gedung kantor dilaksanakan pemeliharaan	120	unit		15	unit		10	unit		10	unit	**100,00%**		unit		25	unit	**20,83%**
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI**	**Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola**	**15**	objek			objek		**13**	objek		**3**	objek	**23,08%**	**13**	objek		16	objek	**106,67%**

	PARIWISATA									
3.26.02.2.01	**Keg. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah DTW**	**15** objek	objek	**0** objek	**0** objek	**0,00%**	**13** objek	13 objek	**86,67%**
3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	jumlah penetapan keputusan kepala daerah tentang Daya Tarik Wisata	1 keputusan	0 keputusan	0 keputusan					
3.26.02.2.01.0009	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian/ Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Daerah	3 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	**0,00%**	**1** dokumen	2 dokumen	**66,67%**
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Monev	1 laporan	laporan	0 laporan	0 laporan	**0,00%**	**0** laporan	0 laporan	**0,00%**
3.26.02.2.02	**Keg. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Objek Wisata yang Dikembangkan**	**4** Objek Wisata	**0** Objek Wisata	**0** Objek Wisata	**0** Objek Wisata	**0,00%**	**3** Objek Wisata	3 Objek Wisata	**75,00%**
3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan KSP Daerah	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	**0,00%**	**0** dokumen	0 dokumen	**0,00%**
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarpras Kawasan Strategis Pariwisata	3 unit	0 unit	unit	0 unit	**0,00%**	**0** unit	0 unit	**0,00%**
3.26.02.2.03	**Keg. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Destinasi Pariwisata Dikelola**	**15** destinasi	**7** destinasi	**13** destinasi	**3** destinasi	**23,08%**	**13** destinasi	23 destinasi	**153,33%**
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan (RIPOW, AMDAL, DED dll)	5 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	dokumen	**0,00%**	**0** dokumen	0 dokumen	**0,00%**
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarpras Objek wisata terbangun	10 objek	7 objek	0 objek	0 objek	**0,00%**	**0** objek	7 objek	**70,00%**
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek wisata yang telengkapi sarana prasarana pengelolaannya	25 objek	7 objek	13 objek	3 objek	**23,08%**	**13** objek	23 objek	**92,00%**
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan terhadap kelompok penggiat pariwisata	33 kali	2 kali	0 kali	0 kali	**0,00%**	kali	2 kali	**6,06%**

3.26.02.2.04	**Keg. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perusahaan Swasta Berinvestasi pada sektor Pariwisata**	**4**	Perusahaan		Perusahaan	**0**	Perusahaan	**0**	Perusahaan	**0,00%**		Perusahaan	0	Perusahaan	**0,00%**
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Perikatan kerjasama /MoU Pemda dengan Swasta	4	kerjasama		kerjasama	0	kerjasama	0	kerjasama	**0,00%**	**0**	kerjasama	0	kerjasama	**0,00%**
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Destinasi Wisata Dipasarkan**	**15**	destinasi	**13**	destinasi	**13**	destinasi	**5**	destinasi	**38,46%**	**13**	destinasi	31	destinasi	**206,67%**
3.26.03.2.01	**Keg. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaksanaan Pemasaran Pariwisata**	**31**	kali		kali	**5**	kali	**5**	kali	**100,00%**	**5**	kali	10	kali	**32,26%**
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah aplikasi pemasaran pariwisata yang dikelola	1	aplikasi	1	aplikasi	0	aplikasi	0	aplikasi	**0,00%**	**0**	aplikasi	1	aplikasi	**100,00%**
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Promosi dan Pemasaran yang dilaksanakan/diikuti	31	event	6	event	5	event	5	event	**100,00%**	**6**	event	17	event	**54,84%**
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen data kepariwisataan yang dipublikasikan	12	dokumen	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	**100,00%**	**0**	dokumen	5	dokumen	**41,67%**
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama Pariwisata dalam dan Luar Negeri dan Kemitraan	Jumlah kerjasama pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri yang dikembangkan	9	kerjasama	0	kerjasama	0	kerjasama								
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Jumlah Ruang Kreatif Dikelola**	**1**	Ruang Kreatif	**0**	Ruang Kreatif	**1**	Ruang Kreatif	**1**	Ruang Kreatif	**100,00%**	**1**	Ruang Kreatif	2	Ruang Kreatif	**200,00%**
3.26.04.2.01	**Keg. Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi,**	**Jumlah Ruang Kreatif Dilengkapi Sarana dan Prasarana**	**1**	Ruang Kreatif	**0**	Ruang Kreatif	**1**	Ruang Kreatif	**1**	Ruang Kreatif	**100,00%**	**1**	Ruang Kreatif	2	Ruang Kreatif	**200,00%**

	Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota									
3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah ruang kreatif yang dikembangkan	1 kawasan	0 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	**100,00%**	**0** kawasan	1 kawasan	**100,00%**
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase objek wisata yang dikelola Pokdarwis**	**62** Persen	**25** Persen	**25** Persen	**25** Persen	**100,00%**	**25** Persen	75 Persen	**120,97%**
3.26.05.2.01	**Keg. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah Pelatihan untuk SDM Pariwisata dan Ekraf**	**16** Kali	**2** Kali	**3** Kali	**3** Kali	**100,00%**	Kali	5 Kali	**31,25 %**
3.26.05.2.01.0006	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peserta pelatihan kompetensi SDM pariwisata dan ekraf	500 orang	110 orang	0 orang	0 orang	**0,00%**	**0** orang	110 orang	**22,00 %**
	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah masyarakat peserta Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan	240 orang	orang	0 orang	0 orang	**0,00%**	**0** orang	0 orang	**0,00%**
3.26.05.2.01.0010	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang diikutkan Sertifikasi	80 orang	orang	0 orang	0 orang	**0,00%**	**0** orang	0 orang	**0,00%**
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah event pada objek wisata yang dikelola Pokdarwis	39 event	event	0 event	0 event	**0,00%**	**0** event	0 event	**0,00%**
		Jumlah pelatihan ekraf yang diselenggarakan	1 Kali	1 Kali	Kali	Kali	**100,00%**	**0** Kali	1 Kali	**100,00%**
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Industri Ekraf yang difasilitasi	70 Usaha	1 Usaha	3 Usaha	3 Usaha	**100,00%**	**0** Usaha	4 Usaha	**5,71%**
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekraf dilatih	400 Orang	60 Orang	0 Orang	0 Orang	**0,00%**	**0** Orang	60 Orang	**15,00 %**
	URUSAN KEBUDAYAAN								0 0	0,00%
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase lembaga adat aktif**	**100** persen	**100** persen	**100** persen	**100** persen	**100,00%**	**100** persen	60 persen	**60,00 %**

		Persentase kesenian dilestarikan	**100**	persen	**100**	persen	**100**	persen	**100**	persen	**100,00%**	**100**	persen	60	persen	**60,00 %**
2.22.02. 2.01	**Keg. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah atraksi budaya daerah yang dilestarikan**	**16**	atraksi	**17**	atraksi	**0**	atraksi	**0**	atraksi	**0,00%**	**0**	atraksi	17	atraksi	**106,25%**
2.22.02. 2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	4	objek	1	objek	6	objek	6	objek	**100,00%**	**6**	objek	13	objek	**65,00 %**
2.22.02. 2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan pelaku Kebudayaan	150	orang	60	orang	60	orang	60	orang	**100,00%**	**0**	orang	120	orang	**80,00 %**
2.22.02. 2.02	**Keg. Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kebudayaan Daerah**	**95**	sanggar	**74**	sanggar	**74**	sanggar	**74**	sanggar	**100,00%**	**90**	sanggar	48	sanggar	**50,11 %**
2.22.02. 2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah event tradisi budaya	30	event	6	event	6	event	6	event	**100,00%**	**6**	event	18	event	**60,00 %**
2.22.02. 2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah peserta pembinaan tradisi budaya	90	orang	50	orang	0	orang	0	orang	**0,00%**	**0**	orang	50	orang	**55,56 %**
2.22.02. 2.03	**Keg. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat**	**100**	persen	**100**	persen	**100**	persen	**100**	persen	**100,00%**	**100**	persen	60	persen	**60,00 %**
2.22.02. 2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah pelaku adat yang dibina/dilatih	470	orang	169	orang	120	orang	120	orang	**100,00%**	**60**	orang	349	orang	**74,26 %**
2.22.02. 2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah lembaga adat dibantu sarana prasaarana	19	unit		unit	4	unit	4	unit	**100,00%**	**1**	unit	5	unit	**26,32 %**
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Jumlah lembaga kesenian tradisional yang aktif**	**95**	lembaga	**74**	lembaga	**60**	lembaga	**74**	lembaga	**123,33%**	**90**	lembaga	48	lembaga	**50,11 %**
2.22.03. 2.01	**Keg. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sanggar kesenian yang dibina**	**95**	sanggar	**74**	sanggar	**60**	sanggar	**74**	sanggar	**123,33%**	**90**	sanggar	48	sanggar	**50,11 %**

2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM kesenian tradisional dilatih	730	orang	350	orang	120	orang	120	orang	**100,00%**	**110**	orang	580	orang	**79,45%**
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar seni yang ditingkatkan kapasitas tatakelolanya	62	sanggar	16	sanggar	16	sanggar	16	sanggar	**100,00%**	**0**	sanggar	32	sanggar	**51,61%**
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah objek sejarah didokumentasikan**	**1**	objek	**0**	objek	**0**	objek	**0**	objek	**0,00%**	**0**	objek	0	objek	**0,00%**
2.22.04.2.01	**Keg. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah objek sejarah didokumentasikan**	**1**	objek	**0**	objek	**0**	objek	**0**	objek	**0,00%**	**0**	objek	0	objek	**0,00%**
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah dokumentasi objek sejarah	1	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	**0,00%**	**0**	dokumen	0	dokumen	**0,00%**
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Jumlah cagar budaya dilestarikan**	**142**	unit	**130**	unit	**133**	unit	**130**	unit	**97,74%**	**130**	unit	130	unit	**91,55%**
2.22.05.2.01	**Keg. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah cagar budaya yang ditetapkan**	**142**	Cagar Budaya	**130**	Cagar Budaya	**133**	Cagar Budaya	**130**	Cagar Budaya	**97,74%**	**130**	Cagar Budaya	130	Cagar Budaya	**91,55%**
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah dokumen hasil Kajian Potensi Cagar Budaya	3	Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	**0,00%**	**0**	Dokumen	0	Dokumen	**0,00%**
		Jumlah Dokumen Master Plan Cagar Budaya disusun	1	Dokumen			1	Dokumen	1	Dokumen	**100,00%**	**0**	Dokumen	1	Dokumen	**100,00%**
		Jumlah peserta Diklat dan Sertifikasi SDM Cagar Budaya	200	Orang	150	Orang	50	Orang	50	Orang	**100,00%**	**0**	Orang	200	Orang	**100,00%**
2.22.05.2.02	**Keg. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah cagar budaya yang dilindungi**	**142**	Cagar Budaya	**130**	Cagar Budaya	**133**	Cagar Budaya	**130**	Cagar Budaya	**97,74%**	**130**	Cagar Budaya	260	Cagar Budaya	**183,10%**
2.22.05.2.02.0001	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	12	Cagar Budaya	130	Cagar Budaya	1	Cagar Budaya	0	Cagar Budaya	**0,00%**	**0**	Cagar Budaya	131	Cagar Budaya	**1091,67%**
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dikembangkan	142	Cagar Budaya	130	Cagar Budaya	0	Cagar Budaya	0	Cagar Budaya	**0,00%**	**0**	Cagar Budaya	130	Cagar Budaya	**91,55%**
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dimanfaatkan	142	Cagar Budaya	130	Cagar Budaya	0	Cagar Budaya	0	Cagar Budaya	**0,00%**	**0**	Cagar Budaya	130	Cagar Budaya	**91,55%**

	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										0,00%
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah Wirausaha Muda**	**1850** Orang	Orang	**250** Orang	**0** Orang	**0,00%**	**0** Orang	0 Orang	**0,00%**
2.19.02.2.01	**Keg.Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Peningkatan Ekonomi**	**1600** Orang	**47** Orang	**25** Orang	**25** Orang	**100,00%**	**0** Orang	72 Orang	**4,50%**
2.19.02.2.01.002	***Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas Daya saing Wirausaha Pemuda Pemula***	***Jumlah Pemuda mengikuti pelatihan Peningkatan Kapasitas Daya saing***	***45*** Orang	***47*** Orang	***0*** Orang	***0*** Orang	**0,00%**	**0** Orang	47 Orang	**104,44%**
2.19.02.2.01.004	***Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokaso, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan***	***Jumlah Pemuda Mengikuti Pelatihan dan Sosialisasi terkait Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan***	***30*** orang	***30*** orang	***0*** orang	***0*** orang	**0,00%**	orang	30 orang	**100,00%**
2.19.02.2.01.007	**Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi**		**0** orang	orang	**0** orang	**0** orang	**0,00%**	**0** orang	0 orang	**0,00%**
2.19.02.2.01.008	***Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda***	***Jumlah Pemuda Mengikuti Pelatihan dan Peningkatan Kepemimpinan dan Kepeloporan (Peserta Paskibra)***	***74*** orang	***74*** orang	***0*** orang	***0*** orang	**0,00%**	**0** orang	74 orang	**100,00%**
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah Atlet Berprestasi**	**141** orang	orang	orang	**0** orang	**#DIV/0!**	orang	0 orang	**0,00%**

2.19.03.2.01	**Keg.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sekolah Dibina dalam Pengembangan Olahraga pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP**	**24**	Persen	**20**	Persen	**20**	Persen	**20**	Persen	**100,00%**	**20**	Persen	100	Persen	**41,67 %**
2.19.03.2.01.0002	***Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan dasar***	***Jumlah Sekolah Yang dijadikan Piloting Kelas Olahraga pada tingkat Kecamatan***	***0***	Sekolah		Sekolah	***0***	Sekolah	***0***	Sekolah	**0,00%**		Sekolah	0	Sekolah	**0,00%**
2.19.03.2.01.0003	***Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota***	***Jumlah sarana Prasarana Olahraga tersedia Operasionala dan Pemeliharaan***	***15***	unit	***1***	unit	***1***	unit	***1***	unit	**100,00%**	**1**	unit	3	unit	**20,00 %**
2.19.03.2.02	**Keg. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Jumlah Event tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dilaksanakan/diikuti**	**5**	Event	**5**	Event	**2**	Event	**0**	Event	**0,00%**	**5**	Event	15	Event	**60,00 %**
2.19.03.2.02`0001	***Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi event dan Single Event tingkat Kabupaten/Kota***	***Jumlah Cabang Olahraga yang diikuti ke tingkat Provinsi dan Nasional***	***5***	Cabor	***5***	Cabor	***5***	Cabor	***0***	Cabor	**0,00%**	**5**	Cabor	5	Cabor	**100,00 %**
2.19.03.2.02`0002	***Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota***	***Jumlah Cabang Olahraga yang diikuti ke tingkat Provinsi dan Nasional***	***5***	Cabor		Cabor	***0***	Cabor	***0***	Cabor	**0,00%**	**5**	Cabor	5	Cabor	**100,00 %**
2.19.03.2.03	**Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Cabang Olahraga Prestasi dibina**	**100**	Persen	**100**	Persen		Persen	**0**	Persen	**0,00%**	**0**	Persen	100	Persen	**100,00 %**
2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlit Porprov tersedia	0	Orang		Orang		Orang	0	Orang	**0,00%**	**0**	Orang	0	Orang	**0,00%**
2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlet berprestasi yang dibina	100	Orang		Orang		Orang	0	Orang	**0,00%**	**0**	Orang	0	Orang	**0,00%**
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi kab/Kota	Jumlah Atlet berprestasi yang dibina	100	orang		orang	300	orang	0	orang	**0,00%**	**0**	orang	0	orang	**0,00%**

2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan bagi Atlit Olahraga Berprestasi	Jumlah Atlit berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional yang diberi penghargaan	100	orang		orang	0	orang	0	orang	**0,00%**	**0**	orang	0	orang	**0,00%**
2.19.03.2.04	**Keg.Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase Cabang Olahraga Dibina**	**100**	Persen	**20**	Persen	**20**	Persen	**20**	Persen	**100,00%**	**20**	Persen	60	Persen	**60,00%**
2.19.03.2.04.002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (KONI)/ Jumlah Cabang Olahraga yang dibina KONI	1 / 35	organisasi/Cabor		organisasi/Cabor	0	organisasi/Cabor	0	organisasi/Cabor	**0,00%**	**1/28**	organisasi/Cabor	1/28	organisasi/Cabor	**80,00%**
2.19.03.2.04.003	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/kota dengan lembaga terkait	Jumlah Organisasi Olahraga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (KONI)/ Jumlah Cabang Olahraga yang dibina KONI	35	Cabor	35	Cabor	28	Cabor	28	Cabor	**100,00%**	**28**	Cabor	63	Cabor	**180,00%**
	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Persentase cabang olahraga rekreasi dibina**	**100**	Persen	**25**	Persen	**25**	Persen	**25**	Persen	**100,00%**	**25**	Persen	75	Persen	**75,00%**
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Permasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah event olahtaga rekreasi	2	Event	2	Event	1	Event	1	Event	**100,00%**	**2**	Event	2	Event	**100,00%**
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**Persentase Gugus Depan Yang Aktif**	**100**	Persen	**20**	Persen	**20**	Persen	**20**	Persen	**100,00%**	**20**	Persen	60	Persen	**60,00%**
	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Persentase Organisasi Pramuka yang dibina**	**100**	Pesen	**20**	Pesen	**20**	Pesen	**20**	Pesen	**100,00%**	**20**	Pesen	60	Pesen	**60,00%**
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan tingkat Daerah	Jumlah Pembina Pramuka yang mengikuti peningkatan Kompetensi Pramuka Mahir Dasar	40	Orang	40	Orang	45	Orang	45	Orang	**100,00%**	**45**	Orang	45	Orang	**112,50%**
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan tingkat Daerah	Jumlah Kwaran Dibina Kwarcab	7	Kwaran	7	Kwaran	3	Kwaran	3	Kwaran	**100,00%**	**0**	Kwaran	7	Kwaran	**100,00%**

Pada table 2.1 diawal terlihat bahwa;

1. Kegiatan yang terdapat pada Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga, tidak dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan target kegiatan 0 (nol). Hal ini tidak terlepas dari ketersedian anggaran yang terbatas dan dukungan kinerja Perangkat daerah terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah;
2. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 yang memiliki target dengan realisasi kinerja yang 0 (nol) atau tidak tercapai adalah sebagai berikut;
    a. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota dengan target 1 kegiatan yaitu kegiatan Soina;
    b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota dengn target 5 cabor pada kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Poprov);
    c. Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya dengan target 1 cagar budaya yang dilindungi;
3. Kegiatan pada Tahun 2023 yang melebihi target kinerja terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target 60 Sanggar dengan realaisasi 74 sanggar.

Adapun factor penyebab tidak tercapainya target sebagai berikut;

1. Kegiatan Soina yang di rencanakan terlaksana pada Tahun 2023 tidak dilaksanakan oleh provinsi Sumatera Barat;
2. Sedangkan untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan atlet tidak tercapai target juga disebab kan oleh Pekan Olahraga Provinsi tidak dilaksanakan
3. Sedangkan untuk kegiatan pelindung tidak adanya tenaga ahli yang dimiliki oleh Kabupaten Solok Selatan.

Sedangkan kegiatan melebihi target disebabkan tingginya minat pemuda dalam mengembangkan kesenian dan budaya daerah.

Untuk Kegiatan Soina pada Tahun 2024 yang di targetkan telah terlaksana pada Triwulan III. Sedangkan untuk Poprov dianggarkan pada Tahun 2025, sejalan dengan Kegiatan Provinsi Sumatera Barat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan. Penetapan kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dapat disajikan pada tabel 2.2 (tabel T-C.30) berikut ini

Tabel 2.2:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	Tahun n+1 2025	Tahun n-2 2023	Tahun n 2025	Tahun n+1 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)
1	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan		√	15	15	15	15	4,7	15	15	
2	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD		√	2	2,5	3	3,5	3,24	3	3,5	
3	Persentase Lembaga Adat yang Aktif		√	57,89	68,42	78,95	92,11	63,64	78,95	92,11	
4	Persentase Lembaga Seni dan Budaya yang Aktif		√	43,01	48,39	53,76	59,14	63,83	53,76	59,14	
5	Persentase Objek Cagar Budaya yang dilestarikan		√	100	100	100	100	100,00	100	100	
6	Jumlah Event Olahraga		√	4	4	4	4	4	4	4	
7	Persentase Klup/ Perkumpulan Olahraga Aktif		√	100	100	100	100	100	100	100	
8	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organinasi Kepemudaan		√	5.25	10,55	15,75	20,75	9,30	15,75	20,75	
9	Partisipasi Pemuda dalam Ekonomi Mandiri		√	5,75	10,55	15,75	20,75	30,99	15,75	20,75	

CASCADING DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2024

VISI : MEWUJUDKAN SOLOK SELATAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA

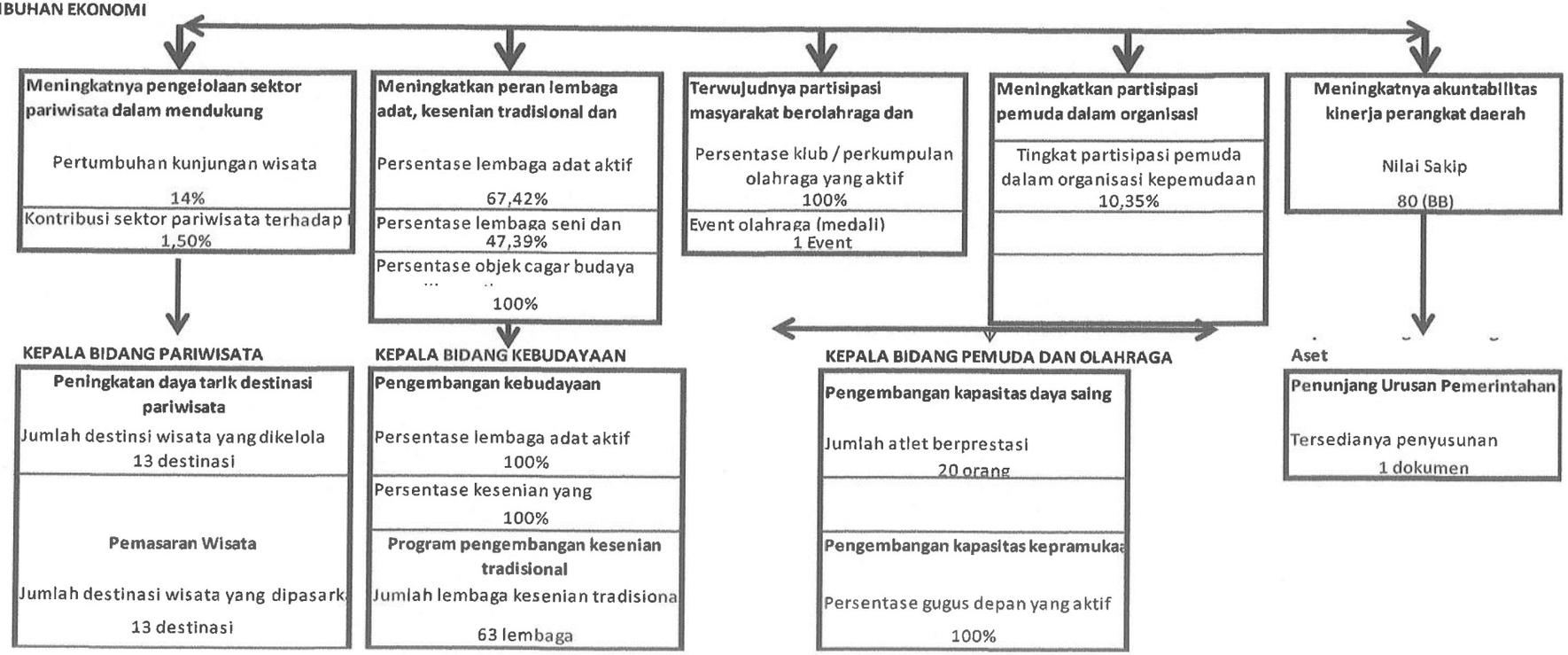
MISI : KE 2 PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAYA SAING DAERAH

KE 5 PELESTARIAN SENI, BUDAYA, OLAHRAGA dan PENANGAN PERMASALAHAN SOSIAL dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TUJU : MENINGKATKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

INDI : PERTUMBUHAN EKONOMI

Kepala Dinas



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, bahwa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai 3 (tiga) Instansi Pusat yaitu Kementrian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah belum terintegrasinya data-data pariwisata dan kebudayaan.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (milenium Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.
5. Peningkatan Pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan. Disamping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya dalam rangka pembangunan daerah sektor Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.

Dalam rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan 2024 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 1.350.000.000,00 ***(Satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)***. Penambahan ini untuk menunjang capaian kinerja Kepala Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dalam hal ini

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2025. Penambahan subkegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 (table T-C.31) berikut ini:

Tabel. 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Solok Selatan
OPD : Dinas Pariwisata Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Tancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga				17.056.252.967	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga				18.406.252.967
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				**6.888.850.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**7.415.850.000**
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		**jumlah atlet berprestasi Jumlah Atlet berprestasi**	**25 orang 25 orang**	**6.688.850.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		**jumlah atlet berprestasi**	**20 Atlet**	**7.215.850.000**
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Sekolah Dibina dalam Pengembangan Olahraga pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP**		**45.100.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sekolah Dibina dalam Pengembangan Olahraga pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP**	**20 Persen**	**545.100.000**
	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah sarana Prasarana Olahraga tersedia Operasionala dan Pemeliharaan	2 Unit	45.100.000	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah sarana Prasarana Olahraga tersedia Operasionala dan Pemeliharaan	3 Unit	545.100.000
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		**Jumlah atlet Daerah terseleksi dibina**	**300 Orang**	**2.300.000.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**		**Jumlah atlet Daerah terseleksi dibina**	**300 Orang**	**2.255.000.000**

	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah Cabor yang diikuti Jumlah atlet berprestasi yang dibina	28 Cabor 300 orang	2.300.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah Cabor yang diikuti Jumlah atlet berprestasi yang dibina	28 Cabor 300 orang	2.255.000.000
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		**Persentasr cabang olah raga dibina**	**100 Persen**	**2.900.000.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**		**Persentasr cabang olah raga dibina**	**100 Persen**	**2.945.000.000**
	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		Jumlah Dokumen Hasil peningkatan kerja sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten / Kota	1 Organisasi (KONI) 1 Dokumen	2.900.000.000	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		Jumlah Dokumen Hasil peningkatan kerja sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten / Kota	1 Organisasi (KONI) 1 Dokumen	2.945.000.000
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		**Persentase cabang olahraga rekreasi yang dibina**	**100 Persen**	**1.443.750.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**		**Persentase cabang olahraga rekreasi yang dibina**	**100 Persen**	**1.470.750.000**
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	1.443.750.000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	1.470.750.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		**Persentase gugus depan aktif**	**100 Persen**	**200.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		**Persentase gugus depan aktif**	**100 Persen**	**200.000.000**
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		**Persentase organisasi Pramuka yang dibina**	**100 Persen**	**200.000.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**		**Persentase organisasi Pramuka yang dibina**	**100 Persen**	**200.000.000**
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	200.000.000	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	200.000.000

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**380.000.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**886.060.408**
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		**Persentase kesenian yang di lestarikan** **Persentase kesenian yang di lestarikan** **Persentase lembaga adat aktif**	**100 %** **100 Persen** **100 %**	**370.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		**Persentase kesenian yang di lestarikan** **Persentase kesenian yang di lestarikan** **Persentase lembaga adat aktif**	**100 %**	**676.000.000**
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah pengelolaan kegiatan kebudayaan daerah** **Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kebudayaan Daerah**	**70 sanggar** **70 sanggar**	**260.000.000**	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah pengelolaan kegiatan kebudayaan daerah** **Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kebudayaan Daerah**	**15 Atraksi**	**566.000.000**
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6 Objek	260.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6 Objek	566.000.000
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat** **Persentase pembinaan sumberdaya manusia lembaga adat dan pranata adat**	**100 persen** **100 Persen**	**110.000.000**	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat** **Persentase pembinaan sumberdaya manusia lembaga adat dan pranata adat**	**100 persen** **100 Persen**	**110.000.000**
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	100 Orang	105.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	100 Orang	105.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit	5.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit	5.000.000

	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		**Jumlah lembaga kesenian tradisional yang aktif**	**70 Lembaga**	**10.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		**Jumlah lembaga kesenian tradisional yang aktif**	**85 Lembaga**	**210.060.408**
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Sanggar kesenian yang dibina Jumlah sanggar kesenian yang dibina**	**70 Sanggar 70 sanggar**	**10.000.000**	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Sanggar kesenian yang dibina Jumlah sanggar kesenian yang dibina**	**85 Sanggar**	**210.060.408**
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 grup	10.000.000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 Orang	210.060.408
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**9.787.402.967**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**10.104.342.559**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				**9.787.402.967**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**10.104.342.559**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Cakupan layanan operasional kantor**	**100 persen**	**5.210.052.967**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan layanan operasional kantor**	**100 persen**	**5.145.912.559**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**4.108.732.334**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**4.108.732.334**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.956.992.334	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.956.992.334

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	151.740.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	151.740.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**484.599.633**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**401.381.800**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.996.133	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.995.700
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	43.116.250	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	23.989.600
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	7.497.050	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	7.491.300
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3/15000 Paket	24.995.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3/15000 Paket	24.995.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120/800/200 Laporan	403.995.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120/800/200 Laporan	339.910.000
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	100 Persen	28.830.600

						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	28.830.600
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	**436.730.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketersedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	**426.980.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	4 Laporan	4.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	4 Laporan	4.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	200 Laporan	35.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	200 Laporan	35.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.980.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.980.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	387.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	387.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**100 Persen**	**179.991.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**100 Persen**	**179.987.825**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	149.991.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	149.990.750
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.999.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.997.075
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		**Jumlah Destinasi wisata yang dikelola**	**14 Objek**	**4.045.350.000**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		**Jumlah Destinasi wisata yang dikelola**	**14 Objek**	**4.179.430.000**
						Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		**Jumlah objek wisata yang dikembangkan**	**2 objek wisata**	**10.080.000**
						Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		**Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**10.080.000**
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		**Jumlah destinasi pariwisata dikelola**	**14 destinasi**	**4.045.350.000**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah destinasi pariwisata dikelola**	**14 destinasi**	**4.169.350.000**
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	4.045.350.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	4.019.350.000
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.000.000

	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		**Jumlah destinasi wisata yang dipasarkan**	**14 destinasi**	**442.000.000**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		**Jumlah destinasi wisata yang dipasarkan**	**14 destinasi**	**408.042.000**
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		**Jumlah pelaksanaan Pemasaran Pariwisata**	**6 kali**	**442.000.000**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah pelaksanaan Pemasaran Pariwisata**	**6 kali**	**408.042.000**
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Kegiatan	442.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Kegiatan	408.042.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		**Jumlah destinasi wisata yang dipasarkan**	**14 destinasi**	**90.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		**Persentase objek wisata yang dikelola oleh pokdarwis**	**57 Persen**	**370.958.000**
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		**Jumlah pelaksanaan Pemasaran Pariwisata**	**6 kali**	**90.000.000**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		**Jumlah pelaksanaan Pemasaran Pariwisata**	**3 kali**	**170.958.000**
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Ekonmi Kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	90.000.000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Ekonmi Kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 Orang	170.958.000
						Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Ekraf yang Dilatih	100 Orang	200.000.000
						Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100 Orang	200.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjaringan usulan masyarakat merupakan perwujudan proses Bottom Up dalam perencanaan pembangunan. Usulan-usulan masyarakat ini ditampung melalui reses-reses wakil rakyat, penyampaian proposal serta kunjungan ke bidang terkait ke Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.

Usulan-usulan ini kemudian diharmonisasi lewat musrenbang-musrenbang mulai dari jorong sampai ke kabupaten. Usulan untuk penyusunan Renja dan RKPD difinalkan pertimbangan skala prioritas serta kesesuaiannya dengan program pemerintah pada Musrenbang Kecamatan.

Usulan-usulan terkait Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagaimana Tabel 2.4 (Tabel T-C.32) berikut ini:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Solok Selatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (URAIAN)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)
1	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 visi Kemenparekraf/ Baparekraf adalah **"Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Visi ini selaras dan mendukung pencapaian visi Presiden Republik Indonesia, yaitu Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu:

1. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju;
2. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing;
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; dan
4. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju bermakna bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan harus mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini dalam rangka meningkatkan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan. Pemanfaatan teknologi tersebut tentunya harus mempertimbangkan aspek permintaan wisatawan maupun aspek kemampuan industri dalam mengadopsinya. Selain itu, pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu menyesuaikan terhadap perkembangan tren pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif di dunia, agar sektor ini tidak tertinggal dibanding dengan negara lain.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing bermakna bahwa produk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia harus dapat menjadi pilihan dibanding dengan produk serupa yang dihasilkan negara lain. Dalam konteks pariwisata, Indonesia harus mampu menjadi destinasi wisata pilihan wisatawan dunia dibandingkan dengan destinasi di beberapa negara tetangga seperti Thailand, Filipina dan Singapura. Sedangkan dalam konteks ekonomi kreatif, produk ekonomi kreatif Indonesia harus mampu menembus pasar dunia.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan bermakna pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat terus dinikmati hingga generasi berikutnya.

Oleh karena itu, tata kelola pariwisata maupun ekonomi kreatif Indonesia harus mendukung pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG's)yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal bermakna bahwa dalam pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif, harus fokus dan memprioritaskan kepada kearifan lokal. Mengangkat indikasi geografis Indonesia sebagai suatu originalitas dan identitas diri bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri, baik dalam bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif.

Misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah **"Memperkokoh Struktur Ekonomi Nasional yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Optimasi Pengelolaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif"**.

Kemenparekraf/Baparekraf akan turut serta berkontribusi dalam memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila, melalui penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif dan efisien dengan mengedepankan potensi yang dimiliki Indonesia. Dalam menyambut era industri 4.0, Kemenparekraf/Baparekraf akan selalu mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam negeri, baik secara kuantitas maupun kualitas industri dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Misi 2 ini akan menjadi fokus utama pekerjaan Kemenparekraf/Baparekraf dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama tahun 2020-2025.

Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8. Pada misi nomor 1 adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing. Sedangkan misi nomor 8 adalah Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Tujuan akhir Kemenparekraf/Baparekraf adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Sektor ini diharapkan menjadi salah satu solusi cepat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dalam mewujudkan Visi Presiden tahun 2024. Tujuan akhir tersebut dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (quality tourism experience), pariwisata yang berbasis ekonomi

kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, Pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar industri pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta Pilar kreativitas.

Pilar pertama terkait destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, dimana pilar ini menekankan pada pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif.

Pengembangan jumlah maupun jenis produk ekonomi kreatif akan mampu menggerakkan roda perekonomian nasional. Selain itu, pada pilar ini juga akan dilakukan pengembangan destinasi pariwisata berkualitas berdasarkan prioritas. Destinasi pariwisata berkualitas yang dimaksud adalah destinasi pariwisata yang mampu memenuhi unsur 3A, yaitu Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Pilar ini menegaskan pentingnya diversifikasi produk pariwisata untuk meningkatkan length of stay, dimana tidak hanya produk pariwisata baru yang dihasilkan, melainkan juga pasar baru yang belum disentuh selama ini melalui produk baru tersebut. Selain itu, pilar ini juga menekankan pentingnya untuk penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan sebagai bagian dari pengembangan Quality Tourism.

Pilar kedua adalah pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemasaran merupakan salah satu komponen penting dimana upaya pemasaran dilakukan guna menciptakan kebutuhan pelanggan akan produk pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam konteks pariwisata, pemasaran dilakukan terhadap ceruk pasar (niche market) untuk wisatawan mancanegara premium, yaitu menargetkan segmen wisatawan dengan belanja atau pengeluaran yang besar. Hal ini dilakukan melalui pemasaran produk pariwisata MICE, yaitu Meeting, Incentives, Conferencing dan Exhibition maupun melalui wisata minat khusus seperti diving, trekking, river cruising, dll. Pembangunan citra pariwisata nasional sebagai salah satu destinasi wisata dunia juga penting mengingat citra menjadi faktor utama dalam menentukan wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia.

Sedangkan dalam konteks ekonomi kreatif, paradigma pemasaran yang dilakukan adalah perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif. Pengembangan pasar dari narrow market menjadi broader market akan dilakukan secara masif, baik melalui regulasi yang berpihak kepada

masyarakat maupun melalui pemberdayaan masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi kreatif.

Pilar ketiga adalah industri pariwisata dan ekonomi kreatif, dimana pertumbuhan dan pengelolaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif juga merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan tujuan akhir Kemenparekraf/Baparekraf. Pilar ini menitikberatkan pada pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang mencakup 13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif. Tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif juga penting untuk dilakukan, khususnya dalam menciptakan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif dan sinergis. Selain itu, investasi pendanaan, dan akses pembiayaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan hal lain yang perlu diperhatikan dalam memperkuat ekosistem maupun pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pilar keempat adalah SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. SDM merupakan strategic weapon yang menentukan keberhasilan organisasi. Pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan melalui optimasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, sertifikasi profesional juga menjadi upaya lain dalam menjamin kualifikasi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif secara kompetensi. Selain SDM, pengembangan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif juga penting dilakukan untuk meningkatkan partisipasi komunitas dalam menggembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pilar terakhir adalah kreativitas, dimana terdapat 2 (dua) isu terkait pilar ini. Isu pertama adalah terkait perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual di Indonesia. Pemerintah perlu turun tangan untuk memastikan jaminan perlindungan hukum atas hasil kreativitas dan kekayaan intelektual masyarakatnya sehingga menjadi pemicu untuk menumbuhkembangkan kreativitas. Selain itu, perlu dilakukan juga upaya dalam mendorong munculnya kreasi masyarakat dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK.

Kelima pilar ini perlu dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. Namun kelima pilar ini perlu ditopang oleh pondasi yang kuat, agar bisa berdiri dan terlaksana sesuai rencana. Pondasi tersebut adalah aspek manajerial dalam organisasi yang menjadi aset strategis Kemenparekraf/Baparekraf, yaitu:

1. Riset dan inovasi pariwisata dan ekonomi kreatif

2. Regulasi yang mendukung pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
3. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna
4. Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf

Kebijakan nasional yang sangat berpengaruh dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Solok Selatan adalah hilangnya peruntukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Bidang Pariwisata di Kabupaten Solok Selatan setelah dua tahun berturut-turut diperoleh pada tahun 2019 dan 2020. Dan pada Tahun 2021 dan 2022 Kabupaten Solok Selatan tidak memperoleh alokasi DAK Fisik bidang Pariwisata. Tentu saja ini akan menuntut perhatian lebih besar dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Solok Selatan untuk penuntasan pembangunan sarana dan prasarana penunjang objek wisata.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan daerah dibidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Objek Wisata yang Representatif dengan memaksimalkan pembangunan, pembenahan dan pemanfaatan potensi alam Solok Selatan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan, dan Olahraga
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, budaya dan Olahraga
4. Meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara melalui promosi dan pemasaran yang optimal
5. Melestarikan adat dan kebudayaan daerah berasaskan ABS-SBK
6. Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan benda-benda kuno

Sasaran yang akan dicapai berdasarkan Tujuan diatas adalah :

1. **Mewujudkan Objek Wisata yang Representatif dengan memaksimalkan pembangunan, pembenahan dan pemanfaatan potensi alam Solok Selatan**

   Sasaran: Terwujudnya Objek Wisata yang Representatif dan berkualitas
2. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan, dan olahraga**

   Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan SDM pariwisata berkualitas
3. **Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, kebudayaan, dan Olahraga**

Sasaran:

a. Optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, budaya, dan olahraga

b. Meningkatnya produktivitas pelaku ekraf

4. Meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara melalui promosi dan pemasaran yang optimal

Sasaran: Meningkatnya kunjungan wisatawan

5. Melestarikan adat dan kebudayaan daerah berasaskan ABS-SBK

Sasaran:

a. Optimalnya penerapan ABS-SBK di kalangan masyarakat

b. Lestarinya seni dan budaya lokal

6. Meningkatnya pelestarian cagar budaya

Sasaran: Lestarinya cagar budaya

Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah**		**Pertumbuhan Ekonomi**	**2,4%**	**2,79%**	**4,07%**	**4,41%**	**4,52%**	**4,65%**
		Meningkatkan pengelolaan sektor pariwisata dalam mendukung perekonomian daerah	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	10%	15%	15%	15%	15%	15%
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,6%	2%	2,5%	3%	3,5%	4%
2	**Meningkatnya peran lembaga adat, seni dan budaya dalam interaksi sosial masyarakat**		**Persentase lembaga adat yang aktif (LKAAM, KAN, Bundo Kanduang)**	**47,37**	**57,89**	**68,42**	**78,95**	**92,11**	**100**
			Persentase lembaga Seni dan budaya yang aktif	**37,63**	**43,01**	**48,39**	**53,76**	**59,14**	**64,52**
		Meningkatkan peran lembaga adat, kesenian dan budaya tradisional dalam interaksi sosial masyarakat.	Persentase lembaga adat yang aktif	47,37	57,89	68,42	78,95	92,11	100
			Persentase lembaga Seni dan budaya yang aktif	37,63	43,01	48,39	53,76	59,14	64,52
			Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100	100
3	**Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja**		**Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja**	64,81	66,08	73,20	77,20	82,20	86,27
		Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi	Tingkat Partisipasi pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	1,56	5,25	10,35	15,55	20,75	25,55
			Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Ekomi Mandiri	0,50	5,75	10,55	15,75	20,75	25,55
4	**Meningkatnya Budaya Berolahraga masyarakat**		**Persentase klub / perkumpulan olahraga aktif**	100	100	100	100	100	100
		Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga	Event Olahraga (Medali)	4	4	5	5	5	5

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
2. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**
   a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota,
      Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota;
   b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi,
      Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota;
   c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga,
      Subkegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait;
   d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi,
      Subkegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
3. **Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**
   Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
   Subkegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
4. **Program Pengembangan Kebudayaan**
   a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota,
      Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
   b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
      1) Subkegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
      2) Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
5. **Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

6. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

   a. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota,
      Subkegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;

   b. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota,
      1) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
      2) Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi.

7. **Program Pemasaran Pariwisata**

   Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

   Subkegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

8. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

   a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar,
      Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;

   b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif,
      Subkegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian rencana strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra 2021-2026.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga didasarkan oleh beberapa factor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah. Hal ini tercantum pada Tabel 4.1 (Tabel T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.1.RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN SOLOK SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga						18.406.252.967,00							12.188.316.514,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.301.910.408,00							2.308.996.514,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						7.415.850.000,00							1.923.996.514,00	
1	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlit Berprestasi	-			20 Atlet	7.215.850.000,00						-	1.873.996.514,00	

	2	1 9	0 3	2. 01		Pembinaan dan Pengembang an Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sekolah dibina dalam pengembangan Olahraga pada jenjang pendidikan SD dan SMP	-			20 Persen	545.100.000 ,00			Memperk uat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi , Pendidika n, Kesehata n, Prestasi Olahraga, Kesetaraa n Gender, serta Penguata n Peran Perempua n, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyanda n Disabilita s	Meningkat kan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkat an sumber daya manusia yang kompetitif	Sarana Prasarana Olahraga	-	545.100.000 ,00	
	2	1 9	0 3	2. 01	00 05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota															

							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				3 Unit	545.100.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Sarana Prasarana Olahraga		545.100.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	1 9	0 3	2. 03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase cabang olahraga prestasi dibina	-			100 Persen	2.255.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya	Atlet	-	173.643.750,00	

																Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	manusia yang kompetitif				
	2	1 9	0 3	2. 03	00 09	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota															
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				300 Orang	2.255.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyanda	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Atlet		173.643.750,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

															n Disabilitas				
	2	1 9	0 3	2. 04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentasr cabang olah raga dibina	-			100 Persen	2.945.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Organisasi Olahraga	-	685.128.072,00	
	2	1 9	0 3	2. 04	00 06	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														

							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2.945.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Organisasi Olahraga		685.128.072,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	2	1 9	0 3	2. 05		Pembinaan dan Pengembang an Olahraga Rekreasi	Persentase cabang olahraga rekreasi yang dibina	-			100 Persen	1.470.750.0 00,00			Memperk uat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi , Pendidika n, Kesehata n, Prestasi Olahraga, Kesetaraa n Gender, serta Penguata n Peran Perempua n, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyanda n Disabilita s	Meningkat kan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkat an sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat	-	470.124.692 ,00	
	2	1 9	0 3	2. 05	00 10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional													

							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				100 Lembaga	1.470.750.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Masyarakat		470.124.692,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**2**	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase gugus depan aktif**	-			**100 Persen**	**200.000.000,00**						-	**50.000.000,00**	

	2	1 9	0 4	2. 01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase organisasi Pramuka yang dibina	-			100 Persen	200.000.000 ,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Organisasi Pramuka	-	50.000.000, 00	
	2	1 9	0 4	2. 01	00 03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah													

							Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	200.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Organisasi Pramuka		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	2 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						886.060.408,00								385.000.000,00	
3	**2**	**2 2**	**0 2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase lembaga adat aktif**	-			**100 Persen**	**676.000.000,00**						-	**370.000.000,00**	

	2	2 2	0 2	2. 01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah atraksi budaya daerah yang dilestarikan Jumlah Atraksi budaya daerah yang dilestarikan	-			15 atraksi 15 Atraksi	566.000.000 ,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Objek Pemajuan Kebudayaan	-	260.000.000 ,00	
	2	2 2	0 2	2. 01	00 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				6 Objek	566.000.000 ,00	Kab. Solok Selatan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Objek Pemajuan Kebudayaan		260.000.000 ,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

																Makmur				
	2	2 2	0 2	2. 03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pembinaan sumberdaya manusia lembaga adat dan pranata adat Persentase pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat	-			100 Persen 100 persen	110.000.000 ,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	lembaga adata dan pelaku adat	-	110.000.000 ,00	
	2	2 2	0 2	2. 03	00 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														

							Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				100 Orang	105.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	lembaga adata dan pelaku adat		105.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	2 2	0 2	2. 03	00 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	lembaga adata dan pelaku adat		5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

																Makmur				
4	**2**	**2 2**	**0 3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Jumlah lembaga kesenian tradisional yang aktif**	-			**85 Lembaga**	**210.060.408,00**						-	**15.000.000,00**	
	2	2 2	0 3	2. 01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sanggar kesenian yang dibina Jumlah Sanggar kesenian yang dibina	-			85 sanggar 95 sanggar	210.060.408 ,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Sanggar Seni dan Pelaku Seni	-	15.000.000, 00	
	2	2 2	0 3	2. 01	00 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														

							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				30 Orang	210.060.408,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Sanggar Seni dan Pelaku Seni		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**10.104.342.559,00**								**9.879.320.000,00**	
	3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**10.104.342.559,00**								**9.879.320.000,00**	
5	**3**	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Cakupan layanan operasional kantor**	-			**100 persen**	**5.145.912.559,00**						-	**4.729.970.000,00**	
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	4.108.732.334,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya	ASN	-	3.590.970.000,00	

																Pemberantasan Kemiskinan	saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif			
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	3.956.992.334,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	ASN		3.430.970.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	151.740.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkat	ASN		160.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

															Kemiskinan	an sumber daya manusia yang kompetitif				
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	401.381.800,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	ASN	-	480.000.000,00	
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4.995.700,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskin	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber	ASN		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

															an	daya manusia yang kompetitif				
	3	2 6	0 1	2. 06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	23.989.600,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	ASN		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	2 6	0 1	2. 06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	7.491.300,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkat	ASN		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

																Kemiskinan	an sumber daya manusia yang kompetitif					
	3	2 6	0 1	2. 06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	24.995.200,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	ASN		25.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	2 6	0 1	2. 06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	339.910.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan	Meningkat	ASN		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

																Kemiskinan	an sumber daya manusia yang kompetitif			
	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	-			100 Persen	28.830.600,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	ASN	-	21.000.000,00	
	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	28.830.600,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskin	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	ASN		21.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

															an	an sumber daya manusia yang kompetitif				
	3	2 6	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	-			100 Persen	426.980.000 ,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	ASN	-	448.000.000 ,00	
	3	2 6	0 1	2. 08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkat	ASN		6.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

																Kemiskinan	an sumber daya manusia yang kompetitif				
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				200 Laporan	35.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	ASN		45.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	9.980.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkat	ASN		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

															Kemiskinan	an sumber daya manusia yang kompetitif				
	3	2 6	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	378.000.000 ,00	Kab. Solok Selatan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	ASN		387.000.000 ,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	2 6	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			100 Persen	179.987.825 ,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya	ASN	-	190.000.000 ,00	

																manusia yang kompetitif					
	3	2 6	0 1	2. 09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	149.990.750 ,00	Kab. Solok Selatan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	ASN		150.000.000 ,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	2 6	0 1	2. 09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.997.075, 00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkat	ASN		40.000.000, 00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

															Kemiskinan	an sumber daya manusia yang kompetitif				
6	**3**	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah Destinasi wisata yang dikelola**	-			**15 Objek**	**4.179.430.000,00**						-	**4.254.350.000,00**	
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah objek wisata yang dikembangkan	-			2 objek wisata	10.080.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Pemerintah Daerah	-	50.000.000,00	
	3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10.080.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Percepatan transformasi ekonomi yang	Pemerintah Daerah		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

																Pemberantasan Kemiskinan	inklusif			
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata dikelola	-			15 destinasi	4.169.350.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Objek Wisata dan Pokdarwis	-	4.204.350.000,00	
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				3 Unit	4.019.350.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Objek Wisata dan Pokdarwis		4.019.350.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Objek Wisata dan Pokdarwis		185.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
7	**3**	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah destinasi wisata yang dipasarkan**	-			**15 destinasi**	**408.042.000,00**							-	**500.000.000,00**	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Pemasaran Pariwisata	-			7 kali	408.042.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Masyarakat/Wisatawan	-	500.000.000,00	
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														

							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Kegiatan	408.042.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Masyarakat/Wisatawan		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
8	**3**	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase objek wisata yang dikelola oleh pokdarwis**	-			**57 Persen**	**370.958.000,00**						-	**395.000.000,00**	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelatihan untuk SDM Pariwisata dan Ekraf	-			3 kali	170.958.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Pelaku Pariwisata	-	185.000.000,00	
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														

							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				100 Orang	170.958.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Pelaku Pariwisata		185.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekraf yang Dilatih	-			100 Orang	200.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Pelaku Pariwisata	-	210.000.000,00	
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				100 Orang	200.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Pelaku Pariwisata		210.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

| | | |

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun ke-4 (keempat) periode Renstra 2021-2026, Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang tercantum pada RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025. Program dan Kegiatan yang direncanakan bertujuan mencapai dan mendukung tercapainya visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Dimana dalam melaksanakan kegiatan yang telah diajukan haruslah sesuai dengan kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu efektif, efisien dan tepat guna.

Kaidah pelaksanaan program kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan tetap mempedomani RPJMD Kabupaten Solok Selatan dan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025 maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan.

Demi penyempurnaan program dan kegiatan di masa mendatang bimbingan dan arahan dari Pimpinan serta masukan-masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tetap menjadi harapan kami. Demikianlah Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 disusun untuk dapat dipertimbangkan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Padang Aro, Juli 2024

Kepala

PAMIL RUSKAMDANI, M.Pd
NIP. 19870322 201101 1 003

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan untuk periode satu tahun, yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun kegiatan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis periode 2021–2026 umumnya telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Pada Rencana Kerja tahun 2025 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada Renja periode 2024 juga direncanakan program kegiatan berkesinambungan sesuai dengan yang dirumuskan pada Renstra 2021-2026. Renja Tahun 2025 ini terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Pendidikan, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Renja Tahun 2025 disusun sebagai dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 serta digunakan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Renja ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi instansi baik pemerintah, masyarakat maupun mitra kerja.

Padang Aro, Juli 2024

Kepala

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SYAMSURIA, S.Pd. MM

Pembina Tk.I, IV/b

NIP.196807021992031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 2
C. Maksud dan Tujuan 3
D. Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 5
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 25
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 26
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 52
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 55
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 55
B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 55
C. Program dan Kegiatan 55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 62
BAB V PENUTUP 77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2019 s/d 2023 5

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD S/d Tahun Anggaran 2024 7

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 27

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan 51

Table 3.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025 54

Table 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan maju tahun 2026 61

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (RENJA PD) untuk periode satu tahun ke depan. Fungsi Renja PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangka Daerah.

Dengan demikian Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja (*LKj*).

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat dan penelaahan kebijakan Nasional.

Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan sebagai unsur pelaksana Pemerintahan dibidang pendidikan, sangat menyadari adanya perubahan-perubahan yang terjadi terutama adanya Otonomi Daerah. Untuk menghadapi perubahan tersebut, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan masukan-masukan dari berbagai pihak.

Perumusan Renja dilakukan dengan langkah-langkah pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaahan terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah, penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah, pembahasan forum Perangkat Daerah dan penyesuaian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

B. *Landasan Hukum*

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2022, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan Organisasi tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas pendidikan Kabupaten Solok Selatan;
10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

C. *Maksud dan Tujuan*

Maksud penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahun anggaran 2025;
2. Sebagai dasar dan tolak ukur penilaian kinerja;
3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah terjabarkannya visi, misi Bupati dan Wakil Bupati serta Program Kerja Kepala Daerah, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan pada tahun anggaran berjalan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan 2025. Diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan manajemen pendidikan maupun dalam penyelenggaraan aktivitas-

aktivitas kegiatan internal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

D. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026. Ruang lingkup Rencana Kerja meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN, Memberikan penjelasan tentang latar belakang penulisan rencana kerja. Landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023, Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada tahun 2023 dan perkiraan capaian pada tahun anggaran berjalan (2024), analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, Menjelaskan Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan tahun anggaran 2025;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;

BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

A. *Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*

Secara umum berdasarkan data capaian APM pada semua jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, belum mencapai target, namun ada beberapa bidang kegiatan yang belum terlaksana.

Tabel 2.1
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2019 s/d 2023
Kabupaten Solok Selatan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI						
1	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	18.838	18.963	19.863	19.863	18.531
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12	20.235	20.599	20.784	20.784	20.564
3	APM SD/MI	95,55	92,44	95,95	95,95	90,11
SMP/MTs						
1	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	7.094	6.650	7.417	7.417	7.060
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12					10.079
3	APM SMP/MTs	80,05	63,73	72,68	72,68	70,05

Capaian kinerja Program Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 berdasarkan capaian Renstra sampai Tahun 2023 rata-rata 65 %. Namun ada beberapa Kegiatan yang sudah tertuang dalam Renja Tahun 2024 namun belum terakmoodir dalam APBD 2024 yang disebabkan terbatasnya anggaran sehingga akan diakomodir pada APBD tahun 2025. Kegiatan atau Belanja Modal yang bersumber dari APBN (DAK) 100 % bisa terlaksanana.

Program kegiatan Belanja Modal yang anggaranya bersumber dari APBN atau DAK yang diberikan Oleh satuan pendidikan yang belum tuntas pada tahun sebelumnya (Tahun 2023) akan di lanjutkan pada tahun ini (Tahun 2024), sehingga sekolah yang memperoleh pembangunan dan rehabilitasi

sarana dan prasarana sekolah bisa tuntas dan bisa dimanfaatkan oleh peserta didik khususnya, sehingga kualitas sarana dan prasarana pendidikan bisa meningkat, disamping itu untuk peningkatan Kompetensi Pendidik yang belum tuntas akan tetap berlanjut pada Rencana Kerja Tahun 2025. Maka untuk melihat program kegiatan yang sudah terlaksana dan akan berlanjut pada tahun berikutnya bisa dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD S/d Tahun Anggaran 2024
Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran S/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
										Target Renja Perangkat daerah Th. 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th.2023	Tingkat capaian Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
					DINAS PENDIDIKAN										
1	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**Persen**	**100%**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,67**	**100%**
1	01	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,67**	**100%**
1	01	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	Orang	11.388	3.860	1882	1882	100	1882	7624	66,95
1	01	01	2.02	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honornya	Orang	262	98	29	29	100	29	156	59,54
1	01	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**Persen**	**100%**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,67**	**100%**

1	01	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	25	10	5	5	100	15	30	120
1	01	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah ATK yang Disediakan 2. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Paket	33	17	4	10	250	27	54	163,64
1	01	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga disediakan	Jenis	26	10	4	4	100	14	28	107,69
1	01	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak yang disediakan Jumlah penggandaan yang disediakan	Paket	31	16	4	4	100	20	40	129,03
1	01	01	2.06	0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan	Laporan	16	4	4	4	0	8	16	100
1	01	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan 2. Jumlah makan minum yang disediakan	Laporan	16	8	4	4	100	12	24	150
1	01	01	2.06	0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi yang dioperasikan	Aplikasi	4	2	1	1	100	3	6	150
1	**01**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan dinas**	**Persen**	**100%**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,67**	**100%**
1	01	01	2.08	0001	Sub Kegiatan Penyiapan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Lembar	4300	1617	500	500	100	2117	4234	98
1	01	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jumlah pemakaian telepon 2. Jumlah pemakaian air 3. Jumlah pemakaian jasa listrik 4. Jumlah pemakaian internet	Bulan	72	24	12	12	100	36	72	100

1	01	01	2.08	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	72	24	12	12	100	36	72	100
1	01	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor tersedia Kantor	Paket	39	1	0	0	0	1	2	5
1	**01**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan dinas**	**Persen**	**100%**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,67**	**100%**
1	01	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasonal atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah perizinan kendaraan dinas operasional	Unit	75	24	12	12	100	36	72	96
1	01	01	2.09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan yang dipelihara	Unit	6	2	1	1	100	3	6	100
1	01	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana, prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	0	0	0	0	0	0	0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK PAUD**	**Persen**	**100**	**73,63**	**75**	**35,11**	**46,81**	**75**	**61,25**	**61,25%**
						APK SD/MI	Persen	110	**102,47**	**100**	**104,29**	**104,29**	**105,75**	**104,17**	**94,70%**
						APK SMP/MTs	Persen	100	**88,4**	**100**	**102,87**	**102,87**	**100**	**97,09**	**97,09%**
						APM SD/MI	Persen	100	**93,28**	**100**	**93,40**	**93,40**	**100**	**95,56**	**95,56%**
						APM SMP/MTs	Persen	85	**73,71**	**82,35**	**76,8**	**93,26**	**82,35**	**77,62**	**91,32%**
						Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	99,75	99,92	99,92%
						Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA	Persen	100	100	100	100	100	100	100,00	100%
1	**01**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase Warga Usia 7 - 12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar**	**Persen**	**100**	**96,49**	**100**	**96,49**	**96,49**	**93,28**	**95,42**	**95,42%**

1	01	02	2.01	0003	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	Ruang	21	9	4	4	100	3	16	76
1	01	02	2.01	0005	Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah SD yang telah dibangun	Ruang	23	6	1	1	100	1	8	35
1	01	02	2.01	0006	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar yang telah dibangun	Ruang	225	80	28	28	100	6	114	51
1	01	02	2.01	0007	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah yang telah dibangun	Unit	5	5	0	0	0	1	6	120
1	01	02	2.01	0009	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	17	7	2	1	50	1	9	53
1	01	02	2.01	0010	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	0	0	0	0	1,00	1	100
1	01	02	2.01	0014	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mobiler SD dibutuhkan	Paket	900	101	1050	1050	100	178,00	1329	148
1	01	02	2.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi sedang berat	Unit	44	11	17,00	17	100	2,00	30	68
1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa SD/MI disediakan Seragam Sekolah	Orang	25.430	4908	3365	1683	50,01	2960,00	9551	38
						Jumlah siswa kurang mampu/ berprestasi yang diberi beasiswa	Orang	3.890	0	410	410	100	410	820	21
1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa disediakan	Paket	194	9	9	9	100,00	9	27	14
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	171	40,00	42	43	102,38	42,00	125	73

1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah dasar	Jumlah Pendidika dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	225	0	0	0	0	10	10	4
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik, Tenaga Kependidikan	Orang	1.074	180	300	300	100,00	150	630	59
1	01	02	2.01	0028	pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	300	35	35	35	100,00	35	105	35
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mngelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	822	136	137	137	100,00	137	410	50
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun	Ruang	30	0	0	0	0	5	5	17
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan dibidang pendidikan	Dokumen	36	0	0	0	0	12	12	33
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	Ruang	76	52	10	7	70,00	9	68	89
1	01	02	2.01	0050	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	822	272	137	137	100	131	540	66
1	01	02	2.01	0051	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	172	35	21	21	100,00	21	77	45
1	**01**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)**	**Persentase Warga Usia 13 - 15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,67**	**100%**
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang telah dibangun	Ruang	21	0	7	2	28,57	2	4	19
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium SMP yang dibangun	Ruang	33	0	7	2	28,57	2	4	12
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP yang dibangun	Unit	35	34	8	8	100,00	3	45	129

1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan SMP yang direhab	Ruang	12	0	0	0	0	2	2	17
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Toilet/Jamban SMP yang direhab	Paket	39	4	0	0	0	15	19	49
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang disediakan	Pasang / set	3000	12	247	247	100,00	142	401	13
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah disediakan	Unit	48	13	0	0	0	2	15	31
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Jumlah Siswa SMP/MTs disediakan Seragam Sekolah	Orang	17.260	5117	2260	2260	100,00	3710	11087	64
						Jumlah siswa kurang mampu/ berprestasi yang diberi beasiswa	Orang	4.271	0	410	410	100,00	410	820	19
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Sekolah Menegah Pertama	Orang	225	0	0	0	0	30	30	13
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi.	Orang	1125	259	180	20	11,11	250	529	47
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	80	64	32	32	100,00	12	108	135
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	218	70	35	35	100,00	35	140	64
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan dibidang pendidikan	Dokumen	36	0	0	0	0	12	12	33
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	214	70	35	35	100,00	35	140	65

1	**01**	**02**	**2.03**		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Angka Partisipasi Kasar PAUD**	**Persen**	**100**	**73,63**	**75**	**35,11**	**46,81**	**75,00**	**61,25**	**61,25**
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun	Paket	44	10	6	4	67	4	18	41
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang tersedia	Pasang / set	360	0	0	0	0	142	142	39
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	18	0,0	1490	742	50	2	744	4133
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	12.452	0	0	0	0	750	750	6
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD tersedia	Paket	29	0	0	0	0	3	3	10
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	30.416	0,00	5000	4161,00	83	5903	10064	33
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada PAUD	Orang	90	0,00	0	0	0	25	25	28
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	403	130,00	59	59	100	30	219	54
1	01	02	2.03	0017	pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	240	9,00	14	14	100	40	63	26
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	954	320	159	160,0	101	160	640	67
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Gedung Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU PAUD yang dibangun	Unit	13	0,00	0	0	0	2	2	15

1	**01**	**02**	**2.04**		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Persentase Angka Melek Huruf**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
						Rata-rata Lama Sekolah	**Persen**	**9,15**	**0**	**4138**	**1773**	**42,85**	**4500**	**1880**	**42**
1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	10	0	0	0	0	2	2	20
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Tenaga Pendidik dan tutor untuk pengembangn diri	Orang	80	0	0	0	0	20	20	25
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	80	50	20	20	100	20	90	113
1	01	02	2.04	0016	pembinaan kelembagaan dan manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Lembaga	78	24	12	12	100	12	48	62
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	Lembaga	48	24	12	12	100	12	48	100
1	01	02	2.04	0039	Pembangunan ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang telah dibangun	Ruang	10	0	0	0	0	1	1	10
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti proses Belajar	Orang	72	24	12	12	100	1.710	1746	2425
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal (PAUD, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan, SD dan SMP)**	**Persen**	**39,11**	**0**	**27,93**	**0**	**0**	**25**	**25**	**100**
1	01	03	2.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal (SD dan SMP)**	**Persen**	**39,11**	0	**27,93**	0	0	25	25	100

1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun	Dokumen	2	0	0	0	0	148	148	7400
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia	Buku	68.400	0	0	0	0	148	148	0
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun	Dokumen	9	0	5	5	100	5	10	111
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Guru PAUD, Kesetaraan/ Nonformal, SD dan SMP yang bersertifikat Pendidik**	**Persen**	**100**	**20**	**85**	**20**	**23,53**	**20**	**60**	**300**
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Rasi Guru dan Murid**	**Persen**	**100**	**30**	**85**	**30**	**35,29**	**30**	**90**	**300**
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Dokumen	20	5	5	5	100,00	3	13	65
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditingkatkan kompetensinya	Dokumen	500	225	225	240	106,67	3	468	94

B. *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM).

1. Potensi SDM Dinas pendidikan Kabupaten Solok Selatan

Jumlah Aparatur dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan keadaan pada tanggal 28 Februari 2024 adalah :

a. Berdasarkan Ketegori

NO	KATEGORI	JUMLAH
1	PNS	1.674
2	PPPK	209
3	TKD	13
	Jumlah	**1.895**

b. Berdasarkan Golongan Ruang

NO	KATEGORI	GOLONGAN	JUMLAH
1	PNS	I	2
2		II	74
3		III	1.254
4		IV	344
5	PPPK	5	0
6		7	0
7		9	209
	Jumlah		**1.883**

c. Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
1	PIM II	0
2	PIM III	0
3	PIM IV	6
	Jumlah	**6**

d. Berdasarkan Tingkat Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	II	1
2	III	4
3	IV	6
4	Fungsional Penyetaraan	4
	Jumlah	**15**

e. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	1
2	SLTP	2
3	SLTA	84
4	D1	2
5	D2	47
6	D3	18
7	S1	1.686
8	S2	43
7	S3	0
	Jumlah	**1.883**

2. Gedung Kantor dan Sekolah

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Jl. Poros 2 Jalur Depan Kantor Bupati, Jorong Timbulun, Kecamatan Sangir Padang Aro, berada ±0,5 Km dari Kantor Bupati Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang pada Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa untuk Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sementara untuk Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam mengelola kewenangan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan mengelola Sekolah pada Jenjang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar yaitu sebagai berikut :

Satuan Pendidikan per Kecamatan	PAUD		SD		SMP	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Sangir	1	19	31	2	8	1
Sangir Jujuan	1	10	12	0	4	0

Sangir Balai Janggo	1	10	9	3	3	1
Sangir Batang Hari	1	11	20	1	6	0
Sungai Pagu	3	11	22	1	4	0
Pauh Duo	1	13	16	0	4	1
Koto Parik Gadang Diateh	1	10	21	0	3	1
JUMLAH	9	84	131	7	**32**	**4**

3. Sistem Aplikasi Pelayanan Online

Dalam Pelayanan Administrasi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dilakukan sistem Online seperti Pelayanan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dikenal NUPTK Online, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, maka untuk urusan wajib Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pendidikan Dasar, Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten /Kota. Untuk pendataan baik PTK maupun Peserta Didik (Siswa) serta sarana dan prasarana melalui Dapodikdas untuk SD dan SMP dan Dapodikmen untuk SMA/SMK. Pendataan tersebut dilakukan sebagai dasar untuk pengeluaran SK Tunjangan Profesi dan tunjangan lainnya.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Solok Selatan

No	Indikator	SPM (Standar Nasional)	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analis
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	7	8	8	8	11	12	13	14	16
	PENDIDIKAN TK/PAUD											
	20% Anak usia 4-6 tahun mengikuti program TK/PAUD	100	Angka Partispasi PAUD	55,88	59,68	63,48	80	52,03	52,03	77,36	80,00	
	90% guru TK/PAUD memiliki ijasah yang sesuai kualifikasi standar kompetensi	100	Guru Memenuhi Kualifikasi S1/ D4	85,09	87,59	87,59	90,09	82,87	85,09	87,59	90,09	
	90% siswa memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	100	Pengadaan Alat Bermain Edukatif	100	100	100	100	85,00	87,57	90,00	100,00	
	60% siswa memiliki TK/PAUD yang menerapkan manajemen berbasis sekolah	100	Peningkatan Kompetensi Pengelolaan TK/PAUD	80,00	85,00	85,00	65,75	57,85	60,25	62,25	65,75	
	50% siswa usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada jalur formal mengikuti program PAUD non formal	100	% siswa usia 4-6 tahun yang terlayani pada jalur program PAUD non formal	76,76	80,25	80,25	60,75	47,23	47,23	55,25	60,75	
	50% guru TK/PAUD jalur formal telah mengikuti pelatihan bidang PAUD	100	Peningkatan kompetensi Guru TK/PAUD	100	100	100	100	65,28	75,00	80,00	85,00	
	PENDIDIKAN DASAR											
	APK SD	100	APK SD	100	100	102,25	105,75	115,41	115,29	102,25	105,75	
	APM SD	100	APM SD	99,20	99,5	99,75	100	99,08	99,18	99,75	100	
	APK SMP	100	APK SMP	100,00	100	100	100	89,06	93,40	100	100	
	APM SMP	100	APM SMP	76,90	77,25	80,75	82,35	76,32	76,79	80,75	82,35	

	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI	100	% kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/ MI dalam jarak kurang dari 3 km	65,50	65,80	65,80	60,25	55,02	55,75	60,00	60,25	
	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	100	% kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SMP/ MTs dalam jarak kurang dari 6 km	25,50	25,75	25,75	23,50	20,45	21,50	23,00	23,50	
	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	100	% SD/ MI yang semua rombongan belajar (rombel)nya tidak melebihi 32 orang	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	100	% SMP/ MTs yang semua rombel-nya tidak melebihi 36 orang	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	100	% SMP/ MTs yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik	65,00	65,50	65,50	60,75	52,73	53,25	60,25	60,75	

	Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang: guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	100	% SD/ MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/ madrasah dan staf kependidikan lainnya	95,25	95,50	95,50	85,50	80,50	80,75	85,25	85,50	
	Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang: guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	100	% SMP/ MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, dan staf kependidikan lainnya	95,25	95,50	95,50	85,50	80,50	80,75	85,25	85,50	
	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	100	% SD/ MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	100	100	100	100	95,00	95,50	100	100	
	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	100	% SMP/ MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran [atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran]	100	100	100	100	95,00	95,50	100	100	
	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	% SD/ MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	100	100	100	100	100	100	100	100	

	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	100	% SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV ≥ 70% (untuk daerah khusus ≥ 40%)	100	100	100	100	94,74	95,75	100	100	
	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan PKn	100	% SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan PKn	95,50	95,75	95,75	97,75	89,47	90,25	90,50	90,75	
	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	% Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik	100	100	100	100	97,30	97,30	100	100	
	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	100	% SMP/MTs yang memilki Kepala SMP/Mtsberkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	100	Jumlah pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	100	100	100	100	100	100	100	100	

	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	100	100 bila kab/ kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	100	% SD atau MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	85,50	85,75	85,75	87,5	81,08	81,50	85,00	85,00	
	PENDIDIKAN MENENGAH											
	APK SMA/SMK		APK SMA/SMK	79,71	81,25	83,00	85,75	83,57	85,11	83,00	85,75	
	APM SMA/SMK		APM SMA/SMK	64,3	66,6	69,25	72,65	63,53	64,06	69,25	72,65	
	Anak usia 16-18 tahun 60 % melanjutkan ke SMA/SMK		Angka Melanjutkan Ke SMA/SMK/MA	99,11	99,75	100	100	94,13	95,00	100	100	
	Angka Putus Sekolah tidak melebihi 1% dari jumlah siswa bersekolah		Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	1,2	1,15	1,15	1,00	3,17		1,25		TMT 1 Januari 2017 wewenang SLTA di Provinsi

	90% sekolah memiliki sarana dan prasarana sesuai standar teknis yang ditetapkan secara nasional		90% sekolah memiliki sarana dan prasarana sesuai standar teknis yang ditetapkan secara nasional				65,25		85,00		TMT 1 Januari 2017 wewenang SLTA di Provinsi
	80% sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administarsi dan kegiatan non mengajar		% sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administarsi dan kegiatan non mengajar				100		100		75 % Tenaga Adm masih Honorer
	90% jumlah guru yang diperlukan terpenuhi		% jumlah guru yang diperlukan terpenuhi				85,00		95		TMT 1 Januari 2017 wewenang SLTA di Provinsi
	90% guru memiliki kualifikasi sesuai dengan kompensasi yang ditetapkan nasional		% guru berkualifikasi S1/D4				98,25		100		TMT 1 Januari 2017 wewenang SLTA di Provinsi
	Jumlah siswa SMA/SMK perkelas antara 30-40 siswa		% SMA/ SMK yang semua rombel-nya antara 30 - 40 orang siswa				80,00		100,00		
	25% dari lulusan SMA melanjutkan ke Perguruan Tinggi		25% dari lulusan SMA melanjutkan ke Perguruan Tinggi				34,98		75,00		

4. Permasalahan dan Hambatan

Adapun yang menjadi Permasalahan dan hambatan dalam mencapai realisasi dari indikator kinerja Dinas Pendidikan, diantaranya ;

- Rendahnya ketersediaan sekolah yang sesuai dengan standar pendidikan.
- Masih rendahnya pemenuhan hak terhadap pelayanan dasar pendidikan.

Hal ini disebabkan diantaranya oleh ;

- Belum meratanya pendistribusian guru dan masih rendahnya profesionalitas guru dan tenaga kependidikan
- Rendahnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari *subject knowledge dan pedagogical knowledge* pada seluruh tingkatan pendidikan (dilihat dari persentase guru yang bersertifikasi pendidik dan nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik).
- Rendahnya ketersediaan, mutu dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan (dilihat dari ketersediaan mobiler, alat peraga pendidikan, labor, pustaka, dan pagar; untuk mutu dan kualitas adalan ruang kelas, sanitasi sekolah dll) yang disebabkan rendahnya tata kelola pendidikan dalam menciptakan iklim dan motivasi.
- Relatif tingginya biaya pendidikan yang dikeluarkan masyarakat sebagai akibat rendahnya aksebilitas masyarakat kesarana pendidikan (akibat keterbatasan sarana perhubungan).

C. *Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan tidak terlepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan yakninya

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (Terkait dengan Peningkatan kualitas pendidikan peningkatan derajad Kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat)

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTS) yang berkualitas dan dengan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin, dengan memberikan bantuan Beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu, memberikan Pakaian Seragam sekolah Gratis kepada Peserta Didik Baru untuk jenjang TK, jenjang SD Kelas 1 dan jenjang SMP Kelas VII, meningkatkan akses dan Sarana Prasarana Pendidikan, meningkatkan kualitas dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Dalam rangka mewujudkan Karakter Bangsa, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu :

1. Menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum;
2. Menerapkan sistem pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menciptakan lulusan pendidikan yang lebih berkualitas;
4. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (Pengawas);
5. Mendorong Sertifikasi dan Akreditasi Kelembagaan Pendidikan Formal (SD dan SMP);
6. Mendorong Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal, SKB dan PKBM;
7. Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak (TK, SD dan SMP).

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut uraian perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah, adapun detailnya dapat dilihat pada tabel. 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

No	RENCANA AWAL RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PENDIDIKAN				**266.649.404.106**	**DINAS PENDIDIKAN**				**264.547.599.407**	
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**266.649.404.106**	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**264.547.599.407**	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN				**266.649.404.106**	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN**				**264.547.599.407**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Cakupan Layanan Operasional Kantor Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan**		**194.529.308.048**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Cakupan Layanan Operasional Kantor Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan**		**194.529.308.048**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan tepat waktu**		**100.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan tepat waktu**		**0**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	5 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Pendidikan**	**Terlaksana Administrasi Keuangan**		**186.220.750.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Pendidikan**	**Terlaksana Administrasi Keuangan**		**192.756.478.097**	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pendidikan	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1882 Orang	185.670.750.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pendidikan	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1882 Orang	192.301.558.097	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Pendidikan	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	49 Org	500.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Pendidikan	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	49 Org	454.920.000	
5	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	2 Laporan	50.000.000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	0	-	
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dinas Pendidikan**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah**		**50.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dinas Pendidikan**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah**		-	

6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PERANGKAT DAERAH	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada PERANGKAT DAERAH	2 Laporan	50.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PERANGKAT DAERAH	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada PERANGKAT DAERAH	0	-	
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas Pendidikan**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian**		**69.250.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas Pendidikan**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian**		-	
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	55 Paket	19.250.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	0	-	
8	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Pendidikan	Jumlah Pegawai berdasarkan tugasa dan fungsi mengikuti pelatihan	10 Orang	50.000.000	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Pendidikan	Jumlah Pegawai berdasarkan tugasa dan fungsi mengikuti pelatihan	0	-	
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Pendidikan**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**495.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Pendidikan**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**568.652.900**	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	14,992,900	
10	Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Dinas Pendidikan	Jumlah Paket peralatan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	75.000.000	Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Dinas Pendidikan	Jumlah Paket peralatan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	50,000,000	
11	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	10.000.000	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	9,998,400	
12	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	35.000.000	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yg disediakan	4 Paket	35,005,600	
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	4 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	4 Laporan	10,000,000	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	4 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	4 Laporan	349,596,000	

15	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Electronik pada Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Electronik pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Electronik pada Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Electronik pada Perangkat Daerah	1 Aplikasi	99.060.000	
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Pendidikan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**100 Persen**	**730.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Pendidikan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**100 Persen**	**404.230.000**	
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pendidikan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pendidikan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0	198.099.000	
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	350.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	206.131.000	
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	75.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakandisediakan	0	34.750.000	
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Pendidikan**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**		**403.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Pendidikan**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**		**415.550.000**	
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pendidikan	jumlah Perangko/Materai 10000 yang disediakan	1000 Buah	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pendidikan	jumlah Perangko/Materai 10000 yang disediakan	1240 Buah	12.400.000	
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Dinas Pendidikan	Jumlah Rekening Sarana Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	95.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Dinas Pendidikan	Jumlah Rekening Sarana Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	105.150.000	
21	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	25.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	25.000.000	

22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Orang	273.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Orang	273.000.000	
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Pendidikan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**240.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Pendidikan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**322,333.500**	
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pendidikan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	175.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pendidikan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	179,349.000	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	I Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	I Unit	127.984.500	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	I Unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	I Unit	15,000.000	
II	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Dinas Pendidikan**			**71.595.096.058**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Dinas Pendidikan**			**47.957.506.710**	
9	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Dinas Pendidikan**	**APK SD/MI**	**103,07**	**35.597.561.906**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Dinas Pendidikan**	**APK SD/MI**	**103,07**	**27.519.566.150**	
			APM SD/MI	**92,44**				**APM SD/MI**	**92,44**		
			Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	**96,34**				**Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs**	**96,34**		
			Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SD	**62,52**				**Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SD**	**62,52**		
			% Ruang Kelas SD berkondisi rusak berat	**20,89**				**% Ruang Kelas SD berkondisi rusak berat**	**20,89**		
			% sekolah yang memiliki Ruang Perpustakaan SD	**70,55**				**% sekolah yang memiliki Ruang Perpustakaan SD**	**70,55**		

			% sekolah yang memiliki sarana olahraga SD	**97,22**				**% sekolah yang memiliki sarana olahraga SD**	**97,22**		
			% sekolah yang memiliki sarana sanitasi baik SD	**62,35**				**% sekolah yang memiliki sarana sanitasi baik SD**	**62,35**		
			Persentase Sekolah yang menerapkan proses belajar dengan menggunakan TIK	**55,00**				**Persentase Sekolah yang menerapkan proses belajar dengan menggunakan TIK**	**55,00**		
			% guru yang berpendidikan Minimal S1 SD	**91,40**				**% guru yang berpendidikan Minimal S1 SD**	**91,40**		
			Nilai rata-rata kompetensi guru SD/MIN/SDLB	**53,11**				**Nilai rata-rata kompetensi guru SD/MIN/SDLB**	**53,11**		
			% guru yang bersertifikasi pendidik SD/MIN/SDLB	**60,59**				**% guru yang bersertifikasi pendidik SD/MIN/SDLB**	**60,59**		
			Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi tingkat provinsi (orang)	**2,00**				**Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi tingkat provinsi (orang)**	**2,00**		
			Ketersediaan kurikulum nasional dan local	2,00				Ketersediaan kurikulum nasional dan local	2,00		
			Keterlaksanaan kurikulum nasional dan local	100				Keterlaksanaan kurikulum nasional dan local	100		
			Jumlah SD yang menerapkan pendidikan inklusi	7,00				Jumlah SD yang menerapkan pendidikan inklusi	7,00		
26	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	829.509.907	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0	302.836.900	
27	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	14 Ruang	735.200.000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	

28	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.764.680.000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	
29	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah Dibangun	34 Unit	3.338.240.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah Dibangun	34 Unit	1.898.189.950	
30	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	1.186.847.999	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	609.052.000	
31	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	520.640.000	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	938.896.000	
32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	129.432.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	363.936.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	
34	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	1.775.540.000	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	630.992.900	
35	Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	850 Paket	825.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	850 Paket	461.279.800	
36	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	50 Paket	5.020.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket	307.432.000	

37	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yg Dilaksanakan Pemeliharaan	16 Unit	160.000.000	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yg Dilaksanakan Pemeliharaan	0	0	
38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	75 Peserta Didik	750.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	75 Peserta Didik	500.506.000	
39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	75 Orang	100.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	75 Orang	35.029.000,00	
40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	728 Orang	850.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	728 Orang	580.253.000	
41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yg Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	60 Satuan Pendidikan	120.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yg Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	60 Satuan Pendidikan	72.800.000	
42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	137 Satuan Pendidikan	45.000.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	137 Satuan Pendidikan	45.000.000	
43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dlm Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	408 Orang	125.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan		408 Orang	124.987.400	
44	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	10 Ruang	3.661.120.000	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	10 Ruang	727.266.500	

45	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah laboratorium Sekolah Dasar yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	374.112.000	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	
46	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yg Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150 Orang	60.000.000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yg Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150 Orang	59.999.900	
47	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten	96.500.000	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten	96.500.000	
48	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yg dilaksanakan	137 Orang	38.360.000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yg dilaksanakan	137 Orang	38.359.900	
49	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan diBidang Pendidikan	25 Dokumen	175.000.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan diBidang Pendidikan	25 Dokumen	175.000.000	
50	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan dibidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Dokumen	215.000.000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan dibidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Dokumen	215.000.000	
51	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	140 Komunitas	100.000.000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendi dik yang terfasilitasi	140 Komunitas	100.000.000	
52	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kegiatan	75.000.000	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kegiatan	75.000.000	
53	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	250 Paket	130.000.000	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0	0	

54	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Baru SD yang bertambah	8 Ruang	1.981.984.000	Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Baru SD yang bertambah	8 Ruang	3.488.783.500	
55	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	502.650.000	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	
56	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis,pelatihanda n/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidik an yang dilaksanakan	100 Orang	75.000.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, pelatihan dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidik an yang dilaksanakan	100 Orang	75.000.000	
57	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	131 Satuan Pendidikan	353.700.000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	131 Satuan Pendidikan	3.757.599.900	
58	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	27 Ruang	4.530.760.000	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	
59	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4225 Peserta Didik	1.859.350.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4225 Peserta Didik	1.859.349.900	
60	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	25 Paket	2.520.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	25 Paket	718.139.100	
10	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Dinas Pendidikan**	**APK SMP/MTs**	**87,60**	**26.032.960.152**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Dinas Pendidikan**	**APK SMP/MTs**	**87,60**	**9.623.165.900**	
			APM SMP/MTs	63,73				APM SMP/MTs	63,73		
			Rasio Siswa dan guru SMP/MTs	58,13				Rasio Siswa dan guru SMP/MTs	58,13		
			Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100				Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100		

			Nilai rata-rata UN SMP/MTs	48,3				Nilai rata-rata UN SMP/MTs	48,3		
			Akreditasi Sekolah SMP'	97,44				Akreditasi Sekolah SMP'	97,44		
			Angka Melanjutkan SMP/MTs	84,91				Angka Melanjutkan SMP/MTs	84,91		
			Angka putus sekolah SMP/MTs	2,18				Angka putus sekolah SMP/MTs	2,18		
			Persentase kelulusan SMP/MTs	100				Persentase kelulusan SMP/MTs	100		
			Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SMP/MTs	81,82				Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SMP/MTs	81,82		
			% Ruang Kelas SMP/MTs berkondisi rusak berat	20,22				% Ruang Kelas SMP/MTs berkondisi rusak berat	20,22		
			% sekolah yang memiliki Ruang Perpustakaan SMP/MTs	97,22				% sekolah yang memiliki Ruang Perpustakaan SMP/MTs	97,22		
			% sekolah yang memiliki sarana sanitasi baik SMP/MTs	67,23				% sekolah yang memiliki sarana sanitasi baik SMP/MTs	67,23		
			% sekolah yang memiliki tempat beribadah SMP/MTs	52,78				% sekolah yang memiliki tempat beribadah SMP/MTs	52,78		
			% sekolah yang memiliki Laboratorium IPA SMP/MI	76,92				% sekolah yang memiliki Laboratorium IPA SMP/MI	76,92		
			Persentase Sekolah yang menerapkan proses belajar dengan menggunakan TIK	55				Persentase Sekolah yang menerapkan proses belajar dengan menggunakan TIK	55		
			% sekolah yang memiliki sarana olahraga SMP/MTs	80				% sekolah yang memiliki sarana olahraga SMP/MTs	80		

			% Bangunan SMP/MTs berkondisi baik	81,02				% Bangunan SMP/MTs berkondisi baik	81,02		
			% guru yang berpendidikan Minimal S1 SMP/MTs	91.40				% guru yang berpendidikan Minimal S1 SMP/MTs	91.40		
			Nilai rata-rata kompetensi guru SMP/MTs	53,11				Nilai rata-rata kompetensi guru SMP/MTs	53,11		
			% guru yang bersertifikasi pendidik SMP/MTs	60,59				% guru yang bersertifikasi pendidik SMP/MTs	60,59		
			Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi tingkat provinsi (orang)	2,00				Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi tingkat provinsi (orang)	2,00		
			Jumlah SMP yg menerapkan pendidikan inklusi	7,00				Jumlah SMP yg menerapkan pendidikan inklusi	7,00		
61	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	820.136.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yg Telah Dibangun	0	0	
62	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	1.450.400.000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	
63	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	1.061.808.000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	
64	Pembangunan Laboratorium	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	6 Ruang	2.204.672.000	Pembangunan Laboratorium	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	6 Ruang	1.242.534.200	
65	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	4 Ruang	1.926.280.352	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Serba Guna/ Aula yang Telah Dibangun	0	0	

66	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	1.892.576.000	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	483.427.000	
67	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah Dibangun	20 Unit	2.430.400.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah Dibangun	20 Unit	878.945.000	
68	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	106.296.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	
69	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang	2.356.320.000	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang	1.264.662.800	
70	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	176.648.000	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	
71	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	707.872.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	
72	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	Dinas Pendidikan	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	369.112.000	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	Dinas Pendidikan	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	
73	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Serba Guna/Aula	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Serba Guna/ Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	3 Unit	656.108.000	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Serba Guna/Aula	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Serba Guna/ Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0	0	
74	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	1.185.360.000	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	

75	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	595.180.000	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	
76	Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	500 Paket	605.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	500 Paket	719.176.000	
77	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 Paket	305.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0	0	
78	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4368 Peserta Didik	2.268.410.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4368 Peserta Didik	2.266.294.000	
79	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	75 Pserta Didik	750.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	75 Pserta Didik	497.657.000	
80	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50 Orang	75.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50 Orang	75.000.000	
81	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	462.077.800	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian romosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	256.612.000	
82	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	36 Satuan Pendidikan	225.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	36 Satuan Pendidikan	73.904.000	

83	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	36 Satuan Pendidikan	25.000.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	36 Satuan Pendidikan	25.000.000	
84	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS SMP	108 Orang	75.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS SMP	108 Orang	74,828,200	
85	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yg Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	108 Orang	95,000,000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yg Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	108 Orang	94,536,000	
86	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	15 Konten Digital	95,000,000	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	15 Konten Digital	95,000,000	
87	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	108 Orang	50,000,000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	108 Orang	50,000,000	
88	Koordinasi, perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15 Dokumen	50,000,000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan SMP	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	29,997,800	
89	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan dibidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	50,000,000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan dibidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	25,000,000	
90	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	48 Komunitas	75,000,000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	48 Komunitas	75,000,000	

91	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kegiatan	75.000.000	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kegiatan	75.000.000	
92	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	5312 Peserta Didik	166.260.000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	5312 Peserta Didik	714.060.000	
93	Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	5 Ruang	1.246.240.000	Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	0	0	
94	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, an/atau Magang/ PKL utk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	35.000.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, an/atau Magang/ PKL utk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	67.074.000	
95	Pengadaan perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Orang	225.000.000	Pengadaan perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0	0	
96	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	1.034.400.000	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	
97	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang tersedia	5 Paket	132.700.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang tersedia	5 Paket	539.457.900	
11	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		**- Angka partisipasi PAUD (%),**	**72,28**	**8.276.818.000**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		**- Angka partisipasi PAUD (%),**	**72,28**	**7.920.195.842**	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah guru TK bersertifikasi	30			Dinas Pendidikan	- Jumlah guru TK bersertifikasi	30		
		Dinas Pendidikan	% guru yang berpendidikan Minimal S1	91,40			Dinas Pendidikan	% guru yang berpendidikan Minimal S1	91,40		

98	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun	8 Unit	1.164.320.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun	3 Unit	1.168.837.842	
99	Pengadaan Mebel PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Mebel PAUD yang tersedia	100 Paket	125.000.000	Pengadaan Mebel PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Mebel PAUD yang tersedia	0	0	
100	Pengadaan perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang tersedia	3 Paket	285.000.000	Pengadaan perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang tersedia	0	0	
101	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5200 Peserta Didik	1.730.750.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5200 Peserta Didik	1.805.951.600	
102	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	7 Orang	50.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	7 Orang	46.147.600	
103	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yg Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	225.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yg Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberianpromosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	179.583.000	
104	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakam Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	164 Satuan Pendidikan	250.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	164 Satuan Pendidikan	195.850.200	
105	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	164 Satuan Pendidikan	40.000.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	164 Satuan Pendidikan	26.751.800	
106	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Tenaga yg Meningkat Kapasitasnya dlm Pengelolaan Dana BOP PAUD	328 Orang	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Tenaga yg Meningkat Kapasitasnya dlm Pengelolaan Dana BOP PAUD	328 Orang	29.999.900	

107	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	328 Orang	125.000.000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	24.999.900	
108	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yg telah dikembangkan	10 Konten Digital	75.000.000	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yg telah dikembangkan	5 Konten	24.999.900	
109	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi dibidang pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	75.000.000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi dibidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	24.999.900	
110	Koordinasi,perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15 Dokumen	65.000.000	Koordinasi,perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	21.208.000	
111	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Dokumen	100.000.000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Dokumen	27.458.800	
112	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Unit	505.496.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	514.426.900	
113	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	30 Komunitas	50.000.000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	24.998.000	
114	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	750.744.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	279.751.800	
115	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	150.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	30 Peserta Didik	100.054.800	

116	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, danatau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yg dilaksanakan	50 Orang	50.000.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, danatau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yg dilaksanakan	20 Orang	30.699.000	
117	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4200 Paket	425.000.000	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0	0	
118	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	361.108.000	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	
119	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	25 Paket	630.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	0	0	
120	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	5903 Orang	150.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	5903 Orang	2.519.625.000	
121	Rehabilitasi sedang/ berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Unit	338.760.000	Rehabilitasi sedang/ berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0	0	
122	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	505.640.000	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	807.168.000	
12	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Dinas Pendidikan**	**Angka Melek Huruf (%)**	**99,00**	**1.687.756.000**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Dinas Pendidikan**	**Angka Melek Huruf (%)**	**99,00**	**2.894.879.118**	
			Jumlah Penyelanggara Pendidikan Non Formal (KF dan Pengelola PKBM) (unit)	**20 Lembaga**				**Jumlah Penyelanggara Pendidikan Non Formal (KF dan Pengelola PKBM) (unit)**	**20 Lembaga**		
123	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30 Orang	30.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30 Orang	9.999.900	

124	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	35.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	34,999.800	
125	Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	50.000.000	Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	49,999.900	
126	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	20.000.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yg Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	19,999.900	
127	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dlm Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	40 Orang	25.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dlm Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	40 Orang	24,999.800	
128	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	36 Orang	30.000.000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25 Orang	5,987.500	
129	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi dibidang pendidikan yg dilaksanakan	36 Orang	30.000.000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi dibidang pendidikan yg dilaksanakan	25 Orang	19,999.900	
130	Koordinasi,Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	35.000.000	Koordinasi,Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	17,140.000	
131	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang	10 Dokumen	50.000.000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang	5 Dokumen	20.000.000	

			Pendidikan yang dilaksanakan					Pendidikan yang dilaksanakan			
132	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	12 Komunitas	35.000.000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas	19.999.800	
133	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Unit	505.496.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	0	
134	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	338.760.000	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	
135	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	60 Orang	50.000.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	60 Orang	35.000.000	
136	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan proses belajar	12 Satuan Pendidikan	453.500.000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan proses belajar	12 Satuan Pendidikan	2.418.200.000	
137	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yg Telah Dibangun	-	0	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yg Telah Dibangun	1 Unit	218.252.618	
III	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**		**Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (PAUD, Pendidikan Nonformal/, Kesetaraan, SD dan SMP) Persentase sekolah yang Menerapkan kurikulum muatan lokal (SD, SMP) Persetase Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD/SMP)**	**100 Persen 33,52 Persen 33,52 Persen**	**275.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**		**Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (PAUD, Pendidikan Nonformal/, Kesetaraan, SD dan SMP) Persentase sekolah yang Menerapkan kurikulum muatan lokal (SD, SMP) Persetase Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD/SMP)**	**100 Persen 33,52 Persen 33,52 Persen**	**304.473.200**	
13	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Dinas Pendidikan**	**Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD dan SMP)**	**33,52 Persen**	**160.000.000**	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**		**Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD dan SMP)**	**33,52 Persen**	**198.648.200,**	

			Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD, SMP)	**33,52 Persen**				**Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD, SMP)**	**33,52 Persen**		
			Persetase Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD/SMP)					**Persetase Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD/SMP)**			
138	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun	30 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun	0	0	
139	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia	-	0	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia	2500 Buku	134.147.000	
140	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal PendidikanDasar yang Meningkat Kompetensinya	50 Orang	45.000.000	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal PendidikanDasar yang Meningkat Kompetensinya	50 Orang	64.501.200	
141	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun	50 Dokumen	65.000.000	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun	-	0	
14	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Dinas Pendidikan**	**Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (PAUD, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan)**	**33,52 Persen**	**115.000.000**	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Dinas Pendidikan**	**Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (PAUD, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan)**	**33,52 Persen**	**105.825.000**	
			Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (PAUD, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan)	**33,52 Persen**				**Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (PAUD, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan)**	**33,52 Persen**		
142	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia	Dinas Pendidikan	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan	30 Dokumen	35.000.000	1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian	Dinas Pendidikan	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan	3 Dokumen	10.000.000	

	Dini dan Pendidikan Nonformal		Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun			Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun			
143	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	10 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	-	0	
144	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersedia	-	0	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersedia	2000 Buku	105.825.000	
IV	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Dinas Pendidikan**	**Persentase Guru PAUD, Kesetaraan/ Nonformal, SD dan SMP yang bersertifikasi pendidik**		**250.000.000**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Dinas Pendidikan**	**Persentase Guru PAUD, Kesetaraan/ Nonformal, SD dan SMP yang bersertifikasi pendidik**		**130.500.000**	
15	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Dinas Pendidikan**	**Persentase Pendidik PAUD, SD, SMP bersertifikat Pendidik**	**99 Persen**	**250.000.000**	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Dinas Pendidikan**	**Persentase Pendidik PAUD, SD, SMP bersertifikat Pendidik**	**99 Persen**	**130.500.000**	
145	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	85 Dokumen	600.000.000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	15 Dokumen	130.500.000	
146	1.01.2.19.0.00.01.0001 UPTD Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	UPTD Kecamatan KPGD	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	25 Satuan Pendidikan	30.000.000	1.01.2.19.0.00.01.0001 UPTD Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	UPTD Kecamatan KPGD	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	25 Satuan Pendidikan	2.742.840.000	
147	1.01.2.19.0.00.01.0002 UPTD Kecamatan Sungai Pagu	UPTD Kecamatan Sungai Pagu	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	27 Satuan Pendidikan	30.000.000	1.01.2.19.0.00.01.0001 UPTD Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	UPTD Kecamatan Sungai Pagu	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	27 Satuan Pendidikan	2.540.740.000	

148	1.01.2.19.0.00.01.0003 UPTD Kecamatan Pauh Duo	UPTD Kecamatan Pauh Duo	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	21 Satuan Pendidikan	30.000.000	1.01.2.19.0.00.01.0003 UPTD Kecamatan Pauh Duo	UPTD Kecamatan Pauh Duo	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	21 Satuan Pendidikan	1.498.280.000	
148	1.01.2.19.0.00.01.0004 UPTD Kecamatan Sangir	UPTD Kecamatan Sangir	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	31 Satuan Pendidikan	30.000.000	1.01.2.19.0.00.01.0004 UPTD Kecamatan Sangir	UPTD Kecamatan Sangir	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	31 Satuan Pendidikan	1.498.280.000	
149	1.01.2.19.0.00.01.0005 UPTD Kecamatan Sangir Balai Janggo	UPTD Kecamatan Sangir Balai Janggo	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	16 Satuan Pendidikan	30.000.000	1.01.2.19.0.00.01.0004 UPTD Kecamatan Sangir Balai Janggo	UPTD Kecamatan Sangir Balai Janggo	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	16 Satuan Pendidikan	1.215.340.000	
150	1.01.2.19.0.00.01.0006 UPTD Kecamatan Sangir Jujuan	UPTD Kecamatan Sangir Jujuan	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	16 Satuan Pendidikan	30.000.000	1.01.2.19.0.00.01.0004 UPTD Kecamatan Sangir Jujuan	UPTD Kecamatan Sangir Jujuan	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	16 Satuan Pendidikan	1.287.720.000	
151	1.01.2.19.0.00.01.0007 UPTD Kecamatan Batang Hari	UPTD Kecamatan Batang Hari	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	27 Satuan Pendidikan	30.000.000	1.01.2.19.0.00.01.0004 UPTD Kecamatan Batang Hari	UPTD Kecamatan Batang Hari	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	27 Satuan Pendidikan	1.287.720.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**0**					**5.757.155.000**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**0**					**5.757.155.000**	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				**0**					**5.757.155.000**	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Dinas Pendidikan**	**Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar**	**100 Persen**	**0**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Dinas Pendidikan**	**Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar**	**100 Persen**	**5.757.155.000**	
152	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik UPT SMPN Se Kabupaten Solok Selatan	Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	32 Satuan Pendidikan	0	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik UPT SMPN Se Kabupaten Solok Selatan	Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	32 Satuan Pendidikan	5.757.155.000	
	JUMLAH				**266.649.404.106**					**264.847.599.407**	

Catatan :

Pada pengajuan Renja Awal ada beberapa sub kegiatan yang diajukan untuk pendanaan dengan APBD sumber dana DAU, namun setelah dilakukan penelaahan terjadi pengurangan pendanaan, yang dikarenakan adanya penentuan prioritas pembangunan sesuai dengan ketersediaan anggaran untuk tahun 2025, disamping itu adanya beberapa pembangunan fisik, sarana dan prasaran gedung untuk tempat pendidikan yang ditunda penganggarannya dikarenakan ketersediaan tanah tempat pembangunan yang belum memadai (tidak tersedia), adanya belanja DAK Non Fisik (BOSP) yang semula hanya penganggaran Dana DAU setelah dilakukan review harus dianggarkan sekaligus DAK Non Fisik, serta adanya beberapa kegiatan nonfisik yang tidak dianggarkan karena kesiapan data yang kurang memadai serta dikhawatirkan terjadinya overlapping pendanaan (seperti pemberian bantuan siswa kurang mampu yang dikhawatirkan akan overlapping dengan penerima PKH dan PIP dari Dana APBN langsung).

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program Kegiatan Tahun 2025 akan dimulai dengan usulan dari masyarakat di Nagari dalam bentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Nagari. Hasil keputusan dinagari disampaikan ke Kecamatan masing-masing yang selanjutnya hasil Musrenbang Kecamatan dijadikan keputusan untuk dibawa pada Musrenbang tingkat Kabupaten. Hasil keputusan dari Musrenbang Kabupaten itulah salah satu bagian untuk dimasukkan pada Rencana Pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025. Hasil keputusan program tersebut dapat terlihat dari tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	DINAS PENDIDIKAN				
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN				
I	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Dinas Pendidikan**			
1	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Dinas Pendidikan**	**APK SD/MI**	**103,07**	
1.	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	**Dinas Pendidikan**	**Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun**	**7 Paket**	
a.	UPT SDN 25 KOTO KACIAK (MS)	Dinas Pendidikan	Jumlah Toilet yang dibangun	1 Paket	
b.	UPT SDN 02 LUBUK MALAKO	Dinas Pendidikan	Jumlah Pagar yang dibangun	1 Paket	
c.	UPT SDN 02 LUBUK MALAKO		Jumlah Halaman dipasang Paving block	1 Paket	
d.	UPT SDN 12 BIDAR ALAM	Dinas Pendidikan	Jumlah Pagar yang dibangun	1 Paket	
e.	UPT SDN 19 SAPAN SALAK	Dinas Pendidikan	Jumlah Pagar yang dibangun	1 Paket	
f.	UPT SDN 22 BATANG PASAMPAN	Dinas Pendidikan	Jumlah Pagar yang dibangun	1 Paket	
g.	UPT SDN 25 KOTO KACIAK	Dinas Pendidikan	Jumlah Pagar yang dibangun	1 Paket	
2.	**Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah**	**Dinas Pendidikan**	**Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat**	**1 Unit**	
a.	UPT SDN 05 SIRUMBUK (MS)	Dinas Pendidikan	Jumlah Rumah Dinas Guru/Kepala Sekolah	1 Unit	

			di Rehabilitasi Sedang/Berat		
3.	**Pengadaan Mebel Sekolah**	**Dinas Pendidikan**	**Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia**	**20 Unit**	
a.	UPT SDN 22 MUARO SANGIR (LIMAU SUNDAI) MS	Dinas Pendidikan	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	20 Unit	
4.	**Pembangunan Ruang Kelas Baru**	**Dinas Pendidikan**	**Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah**	**1 Unit**	
a.	UPT SDN 10 TALANTAM	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Unit	
2	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Dinas Pendidikan**	**APK SMP/MTs**	**87,60**	
			APM SMP/MTs	63,73	
1.	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP**		**Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun**	**2 Paket**	
a.	Pembangunan Pagar UPT SMPN 17 Solok Selatan	Dinas Pendidikan	Jumlah Pagar yang dibangun	1 Paket	
b.	Pembangunan Pagar UPT SMPN 18 Solok Selatan	Dinas Pendidikan	Jumlah Pagar yang dibangun	1 Paket	
3	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**	**Dinas Pendidikan**	**APK PAUD**	**87,60**	
1.	**Pengadaan Perlengkapan PAUD**	**Dinas Pendidikan**	**Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia**	**3 Paket**	
	Pengadaan Alat Permainan Educatif (APE) Luar Ruangan TK Raudatul Jannah	Dinas Pendidikan	Jumlah APE Luar Ruangan Tersedia	3 Paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*

Kebijakan Nasional pada Tahun 2025 sehubungan dengan Kegiatan Bidang Pendidikan adalah Tahun Pelajaran pertama 2024/2025 pelaksanaan Kurikulum Merdeka, oleh sebab itu secara nasional kebijakan pendidikan lebih diarahkan pada pelaksanaan sosialisasi serta penyediaan sarana penunjang program tersebut. Dampak dari kebijakan tersebut maka untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan gedung, RKB, maupun rehap akan berdampak anggaran yang sedikit.

B. *Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah*

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya Aksesibilitas Penduduk dalam memperoleh Pendidikan	APK PAUD APK SD/MI APK SMP/MTs APM SD/MI APM SMP/MTs
		Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan SNP (PAUD, SD, SMP, PKBM)

C. *Program dan Kegiatan*

Pada Tahun 2025 Dinas Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 90 tahun 2019 mempunyai 4 program 12 kegiatan dan 143 Subkegiatan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan peralatan perlengkapan kantor
			Penyediaan Perlatan Rumah Tangga
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat

			Perpustakaan Sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah
			Pengadaan Mebel Sekolah
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			Pembangunan Ruang Kelas Baru
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah
			Pembangunan Laboratorium
			Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			Pengadaan Mebel Sekolah
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
			Pembangunan Ruang Kelas Baru
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
			Pengadaan Mebel PAUD
			Pengadaan Perlengkapan PAUD
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
			Pengelolaan Dana BOP PAUD
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Pembangunan Ruang Kelas Baru
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga

		Nonformal/Kesetaraan	Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Pembangunan Ruang Kelas Baru
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
			Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
			Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
			Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	PROGRAM PENDIDIK DAN	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga**	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan

	TENAGA KEPENDIDIKAN	**Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai mana yang terdapat pada Dokumen Recana Kerja Perangkat Daerah seperti pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan maju tahun 2026
Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRA MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					DINAS PENDIDIKAN				**242.859.724.407**				**265.276.714.833**
1					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**242.859.724.407**				**265.276.714.833**
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN**				**242.859.724.407**				**265.276.714.833**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan**			**194.529.308.048**				**204.124.385.950**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksana Administrasi Keuangan**			**192.756.478.097**				**202.416.635.950**
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pendidikan	1882 Orang	192.301.558.097	DAU DAK		2083 Orang	201.916.635.950
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	49 Org	454.920.000	DAU		49 Org	500.000.000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**568.652.900**				**740.000.000**

1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Dinas Pendidikan	4 Paket	14.992.900	DAU		4 Paket	10.000.000
1	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas Pendidikan	4 Paket	50.000.000	DAU		4 Paket	75.000.000
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinas Pendidikan	4 Paket	9.998.400	DAU		4 Paket	10.000.000
1	01	01	2.06	04	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Dinas Pendidikan	4 Paket	35.005.600	DAU		4 Paket	35.000.000
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	Dinas Pendidikan	4 Laporan	10.000.000	DAU		4 Laporan	10.000.000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pendidikan	4 Laporan	349.596.000	DAU		4 Laporan	500.000.000
1	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Electronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Electronik pada SKPD	Dinas Pendidikan	2 Dokumen	99.060.000	DAU		2 Dokumen	100.000.000
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**			**404.230.000**				**339.750.000**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Dinas Pendidikan	15 Unit	198.099.000	DAU		9 Unit	105.000.000
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya tersedia	Dinas Pendidikan	I Unit	206.131.000	DAU		I Unit	200.000.000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**415.550.000**				**403.000.000**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Perangko/Materai 10000 yang disediakan	Dinas Pendidikan	1240 Buah	12.400.000	DAU		1000 Buah	10.000.000
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Rekening Sarana Komunikasi, Air dan Listrik	Dinas Pendidikan	12 Bulan	105.150.000	DAU		12 Bulan	95.000.000

1	01	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pendidikan	4 Laporan	25.000.000	DAU		4 Laporan	25.000.000
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	Dinas Pendidikan	13 Orang	273.000.000	DAU		13 Orang	273.000.000
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**322.333.500**				**225.000.000**
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Pendidikan	21 Unit	179.349.000	DAU		17 Unit	175.000.000
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Pendidikan	I Unit	127.984.500	DAU		I Unit	50.000.000
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Pendidikan	I Unit	15.000.000	DAU		I Unit	0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**47.957.506.710**	-	-	-	**60.457.328.883**
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**APK SD/MI**	Dinas Pendidikan	**103,07**	**27.819.566.150**	-	-	-	**33.200.574.107**
						APM SD/MI	Dinas Pendidikan	**92,44**					
						Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Dinas Pendidikan	**96,34**					
						Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SD	Dinas Pendidikan	**62,52**					
						% Ruang Kelas SD berkondisi rusak berat	Dinas Pendidikan	**20,89**					
						% sekolah yang memiliki Ruang Perpustakaan SD	Dinas Pendidikan	**70,56**					
						% sekolah yang memiliki sarana olahraga SD	Dinas Pendidikan	**97,22**					
						% sekolah yang memiliki sarana sanitasi baik SD	Dinas Pendidikan	**62,35**					
						Persentase Sekolah yang menerapkan proses belajar dengan menggunakan TIK	Dinas Pendidikan	**55,00**					
						% guru yang berpendidikan Minimal S1 SD	Dinas Pendidikan	**91,40**					

						Nilai rata-rata kompetensi guru SD/MIN/SDLB	Dinas Pendidikan	**53,11**					
						% guru yang bersertifikasi pendidik SD/MIN/SDLB	Dinas Pendidikan	**60,59**					
						Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi tingkat provinsi (orang)	Dinas Pendidikan	**2,00**					
						Ketersediaan kurikulum nasional dan local	Dinas Pendidikan	2,00					
						Keterlaksanaan kurikulum nasional dan local	Dinas Pendidikan	100					
						Jumlah SD yang menerapkan pendidikan inklusi	Dinas Pendidikan	7,00					
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Dinas Pendidikan	3 Ruang	302.836.900	DAU		3 Ruang	800.136.000
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah Dibangun	Dinas Pendidikan	34 Unit	1.898.189.950	DAU		37 Unit	3.318.240.000
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Dinas Pendidikan	5 Unit	609.052.000	DAU		5 Unit	694.320.000
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan	3 Ruang	938.896.000	DAU		3 Ruang	193.710.000
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan	15 Unit	630.992.900	DAU		15 Unit	440.590.000
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Dinas Pendidikan	850 Paket	461.279.800	DAU		500 Paket	600.000.000
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Dinas Pendidikan	50 Paket	307.432.000	DAU		50 Paket	5.000.000.000
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Dinas Pendidikan	75 Peserta Didik	500.506.000	DAU		75 Peserta Didik	750.000.000
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	75 Orang	35.029.000	DAU		75 Orang	100.000.000

1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Dinas Pendidikan	728 Orang	580.253.000	DAU		728 Orang	1.003.580.000
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Dinas Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	72.800.000	DAU		60 Satuan Pendidikan	120.000.000
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Dinas Pendidikan	137 Satuan Pendidikan	45.000.000	DAU		137 Satuan Pendidikan	45.000.000
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	408 Orang	124.987.400	DAU		408 Orang	175.000.000
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Labaratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium yang Telah Dibangun	Dinas Pendidikan	10 Ruang	727.266.500	DAU		15 Unit	5.481.680.000
1	01	02	2.01	35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Komunikasi dan Teknologi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah peserta Pelatihan Penggunaan Teknologi, Komunikasi dan Teknologi (TIK) untuk Pendidikan	Dinas Pendidikan	150 Orang	59.999.900	DAU		150 Orang	60.000.000
1	01	02	2.01	36	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Dinas Pendidikan	10 Konten Digital	96.500.000	DAU		275 Orang	96.500.000
1	01	02	2.01	37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Pelatihan penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	137 Orang	38.359.900	DAU		137 Orang	38.360.000
1	01	02	2.01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	25 Dokumen	175.000.000	DAU		275 Orang	175.000.000
1	01	02	2.01	39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dinas Pendidikan	10 Dokumen	215.000.000	DAU		411 Orang	215.000.000
1	01	02	2.01	41	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Dinas Pendidikan	140 Komunitas Belajar	100.000.000	DAU		140 Komunitas Belajar	100.000.000

1	01	02	2.01	43	Pemberian layanan pengaduan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan dan penanggulangan kejadian perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Dinas Pendidikan	10 Kegiatan	75.000.000	DAU		10 Layanan	75.000.000
1	01	02	2.01	47	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru SD yang bertambah	Dinas Pendidikan	8 Ruang	3.488.783.500	DAU		8 Ruang	1.301.112.107
1	01	02	2.01	49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dinas Pendidikan	100 Orang	75.000.000	DAU		100 Orang	75.000.000
1	01	02	2.01	50	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Dinas Pendidikan	137 Satuan Pendidikan	3.757.599.900	DAU		137 Satuan Pendidikan	353.700.000
					1.01.2.19.0.00.01.0001 UPTD Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	Dinas Pendidikan Kecamatan KPGD	25 Satuan Pendidikan	30.000.000	DAU		25 Satuan Pendidikan	50.000.000
					1.01.2.19.0.00.01.0002 UPTD Kecamatan Sungai Pagu	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	Dinas Pendidikan Kecamatan KPGD	27 Satuan Pendidikan	30.000.000	DAU		27 Satuan Pendidikan	50.000.000
					1.01.2.19.0.00.01.0003 UPTD Kecamatan Pauh Duo	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	Dinas Pendidikan Kecamatan KPGD	21 Satuan Pendidikan	30.000.000	DAU		21 Satuan Pendidikan	50.000.000
					1.01.2.19.0.00.01.0004 UPTD Kecamatan Sangir	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	Dinas Pendidikan Kecamatan KPGD	42 Satuan Pendidikan	30.000.000	DAU		42 Satuan Pendidikan	50.000.000
					1.01.2.19.0.00.01.0005 UPTD Kecamatan Sangir Balai Janggo	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	Dinas Pendidikan Kecamatan KPGD	16 Satuan Pendidikan	30.000.000	DAU		16 Satuan Pendidikan	50.000.000
					1.01.2.19.0.00.01.0006 UPTD Kecamatan Sangir Jujuan	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	Dinas Pendidikan Kecamatan KPGD	16 Satuan Pendidikan	30.000.000	DAU		16 Satuan Pendidikan	50.000.000

					1.01.2.19.0.00.01.0007 UPTD Kecamatan Sangir Batang Hari	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dalam pelaksanaan proses Belajar	Dinas Pendidikan Kecamatan KPGD	27 Satuan Pendidikan	30.000.000	DAU		27 Satuan Pendidikan	50.000.000
1	01	02	2.01	51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan	27 Ruang	9.626.312.500	DAU		27 Ruang	3.378.100.000
1	01	02	2.01	54	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Dinas Pendidikan	4225 Peserta Didik	1.859.349.900	DAU		4225 Peserta Didik	1.859.350.000
1	01	02	2.01	55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Dinas Pendidikan	25 Paket	718.139.100	DAU		25 Paket	2.500.000.000
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**APK SMP/MTs**	**Dinas Pendidikan**	**87,60**	**9.623.165.900**	-	-	-	**18.352.844.776**
						APM SMP/MTs	Dinas Pendidikan	63,73					
						Rasio Siswa dan guru SMP/MTs	Dinas Pendidikan	58,13					
						Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	Dinas Pendidikan	100					
						Nilai rata-rata UN SMP/MTs	Dinas Pendidikan	48,3					
						Akreditasi Sekolah SMP	Dinas Pendidikan	97,44					
						Angka Melanjutkan SMP/MTs	Dinas Pendidikan	84,91					
						Angka putus sekolah SMP/MTs	Dinas Pendidikan	2,18					
						Persentase kelulusan SMP/MTs	Dinas Pendidikan	100					
						Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SMP/MTs	Dinas Pendidikan	81,82					
						% Ruang Kelas SMP/MTs berkondisi rusak berat	Dinas Pendidikan	20,22					
						%.sekolah yang memiliki Ruang Perpustakaan SMP/MTs	Dinas Pendidikan	97,22					
						%.sekolah yang memiliki sarana sanitasi baik SMP/MTs	Dinas Pendidikan	67,23					
						%.sekolah yang memiliki tempat beribadah SMP/MTs	Dinas Pendidikan	52,78					
						%.sekolah yang memiliki Laboratorium IPA SMP/MI	Dinas Pendidikan	76,92					

						Persentase Sekolah yang menerapkan proses belajar dengan menggunakan TIK	Dinas Pendidikan	55					
						% sekolah yang memiliki sarana olahraga SMP/MTs	Dinas Pendidikan	80					
						% Bangunan SMP/MTs berkondisi baik	Dinas Pendidikan	81,02					
						% guru yang berpendidikan Minimal S1 SMP/MTs	Dinas Pendidikan	91,40					
						Nilai rata-rata kompetensi guru SMP/MTs	Dinas Pendidikan	53,11					
						% guru yang bersertifikasi pendidik SMP/MTs	Dinas Pendidikan	60,59					
						Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi tingkat provinsi (orang)	Dinas Pendidikan	2,00					
						Jumlah SMP yang menerapkan pendidikan inklusi	Dinas Pendidikan	7,00					
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Dinas Pendidikan	6 Ruang	1.242.534.200	DAU		6 Ruang	2.204.672.000
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Dinas Pendidikan	8 Unit	483.427.000	DAU		4 Unit	956.288.000
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Dinas Pendidikan	20 Unit	878.945.000	DAU		10 Unit	1.215.200.000
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan	14 Ruang	1.264.662.800	DAU		6 Ruang	1.006.280.000
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	Dinas Pendidikan	500 Paket	719.176.000	DAU		500 Paket	600.000.000
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Dinas Pendidikan	4368 Peserta Didik	2.266.294.000	DAU		4368 Peserta Didik	2.268.410.000
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Dinas Pendidikan	75 Pserta Didik	497.657.000	DAU		75 Pserta Didik	750.000.000

1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	50 Orang	75.000.000	DAU		50 Orang	75.000.000
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Dinas Pendidikan	250 Orang	256.612.000	DAU		250 Orang	462.077.800
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Dinas Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	73.904.000	DAU		36 Satuan Pendidikan	225.000.000
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Dinas Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	25.000.000	DAU		35 Satuan Pendidikan	25.000.000
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	108 Orang	74.828.200	DAU		108 Orang	75.000.000
1	01	02	2.02	48	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Dinas Pendidikan	108 Orang	94.536.000	DAU		108 Orang	95.000.000
1	01	02	2.02	49	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Dinas Pendidikan	15 Konten Digital	95.000.000	DAU		108 Orang	95.000.000
1	01	02	2.02	50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Dinas Pendidikan	108 Orang	50.000.000	DAU		108 Orang	50.000.000
1	01	02	2.02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	10 Dokumen	29.997.800	DAU		15 Dokumen	50.000.000
1	01	02	2.02	52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dinas Pendidikan	5 Dokumen	25.000.000	DAU		10 Dokumen	50.000.000

1	01	02	2.02	54	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Dinas Pendidikan	48 Komunitas Belajar	75.000.000	DAU		48 Komunitas Belajar	75.000.000
1	01	02	2.02	55	Pemberian layanan pengaduan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan dan penanggulangan kejadian perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Dinas Pendidikan	10 Kegiatan	75.000.000	DAU		10 Layanan	75.000.000
1	01	02	2.02	58	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Dinas Pendidikan	5312 Peserta Didik	714.060.000	DAU		5312 Peserta Didik	376.012.800
1	01	02	2.02	60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dinas Pendidikan	50 Orang	67.074.000	DAU		50 Orang	35.000.000
1	01	02	2.02	67	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Dinas Pendidikan	5 Paket	539.457.900	DAU		5 Paket	132.700.000
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**- Angka partisipasi PAUD (%),**	**Dinas Pendidikan**	**72,28**	**7.920.195.542**	-	-	-	**7.208.654.000**
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Dibangun	Dinas Pendidikan	3 Unit	1.168.837.842	DAU		8 Unit	1.164.320.000
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Dinas Pendidikan	3 Paket	66.683.600	DAU		3 Paket	285.000.000
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Siswa yang disediakan seragam	Dinas Pendidikan	5200 Orang	1.805.951.600	DAU		5200 Orang	1.730.750.000
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Dinas Pendidikan	7 Orang	46.147.600	DAU		7 Orang	50.000.000
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Dinas Pendidikan	350 Orang	179.583.000	DAU		350 Orang	225.000.000

1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Dinas Pendidikan	164 Satuan Pendidikan	195.850.200	DAU		164 Satuan Pendidikan	250.000.000
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Dinas Pendidikan	164 Satuan Pendidikan	26.751.800	DAU		164 Satuan Pendidikan	30.000.000
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	328 Orang	29.999.900	DAU		328 Orang	50.000.000
1	01	02	2.03	22	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Dinas Pendidikan	50 Orang	24.999.900	DAU		164 Peserta	75.000.000
1	01	02	2.03	23	Pembangunan Konten Digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Dinas Pendidikan	5 Konten Digital	24.999.900	DAU		164 Peserta	75.000.000
1	01	02	2.03	24	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Dinas Pendidikan	50 Orang	24.999.900	DAU		150 Peserta	75.000.000
1	01	02	2.03	25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah peserta Pelatihan Penyusunan Perencanaan Berbasis Data pada Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	5 Dokumen	21.208.000	DAU		15 Dokumen	65.000.000
1	01	02	2.03	26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dinas Pendidikan	10 Dokumen	27.458.800	DAU		10 Forum	100.000.000
1	01	02	2.03	28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Dinas Pendidikan	2 Ruang	514.426.900	DAU		2 Unit	505.496.000
1	01	02	2.03	29	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Dinas Pendidikan	10 Komunitas	24.998.000	DAU		30 Forum	50.000.000
1	01	02	2.03	30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Dinas Pendidikan	3 Unit	279.751.800	DAU		2 Unit	505.496.000
1	01	02	2.03	34	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Dinas Pendidikan	30 Peserta Didik	100.054.800	DAU		50 Orang	150.000.000

1	01	02	2.03	39	Bimbinga Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dinas Pendidikan	20 Orang	30.699.000	DAU		50 Orang	50.000.000
1	01	02	2.03	47	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Dinas Pendidikan	164 Satuan Pendidikan	2.519.625.000	DAU		164 Satuan Pendidikan	150.000.000
1	01	02	2.03	49	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Dinas Pendidikan	2 Unit		DAU		2 Unit	338.760.000
1	01	02	2.03	51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan	9 Ruang	807.168.000	DAU		2 Unit	338.760.000
1	**1**	**2**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Angka Melek Huruf (%)**	**Dinas Pendidikan**	**99,00**	**2.894.579.118**	-	-	-	**1.695.256.000**
						Jumlah Penyelanggara Pendidikan Non Formal (KF dan Pengelola PKBM) (unit)	**Dinas Pendidikan**	**20 Lembaga**					
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	30 Orang	9.999.900	DAU		60 Org	30.000.000
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Dinas Pendidikan	30 Orang	34.999.800	DAU		50 Orang	27.500.000
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Dinas Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	49.999.900	DAU		9 Satuan Pendidikan	50.000.000
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Dinas Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	19.999.900	DAU		12 Satuan Pendidikan	25.000.000
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	40 Orang	24.999.800	DAU		40 Orang	25.000.000

1	01	02	2.04	24	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Dinas Pendidikan	25 Orang	5.987.500	DAU		36 Orang	35.000.000
1	01	02	2.04	26	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Dinas Pendidikan	25 Orang	19.999.900	DAU		36 Orang	35.000.000
1	01	02	2.04	27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	5 Dokumen	17.140.000	DAU		36 Orang	35.000.000
1	01	02	2.04	28	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dinas Pendidikan	5 Dokumen	20.000.000	DAU		10 Forum	50.000.000
1	01	02	2.04	30	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Dinas Pendidikan	5 Komunitas	19.999.800	DAU		12 Komunitas	35.000.000
1	01	02	2.04	42	Bimbinga Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dinas Pendidikan	60 Orang	35.000.000	DAU		60 Orang	50.000.000
1	01	02	2.04	46	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Dinas Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	2.418.200.000	DAU		250 Orang	453.500.000
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (PAUD, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan, SD dan SMP) Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD, SMP) Persetase Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD/SMP)**	**Dinas Pendidikan**	**100 Persen 33,52 Persen 33,52 Persen**	**304.473.200**	**-**	**-**	**-**	**445.000.000**
1	**01**	**03**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD dan SMP)**	**Dinas Pendidikan**	**33,52**	**198.648.200**	**-**	**-**	**-**	**245.000.000**

1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia	Dinas Pendidikan	2.500 Buku	134.147.000	DAU		17100 Buku	150.000.000
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Dinas Pendidikan	50 Orang	64.501.200	DAU		50 Orang	45.000.000
1	**01**	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (PAUD, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan)**	**Dinas Pendidikan**	**33,52**	**105.825.000**	**DAU**		**75**	**200.000.000**
1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersedia	Dinas Pendidikan	2000 Buku	105.825.000	DAU		5200 Buku	50.000.000
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Guru PAUD, Kesetaraan/nonformal, SD dan SMP yang bersertifikasi pendidik**	**Dinas Pendidikan**		**130.500.00**	**DAU**	-	-	**250.000.000**
1	**01**	**05**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase Kepala Sekolah PAUD, SD dan SMP yang bersertifikat**	**Dinas Pendidikan**	**99,00**	**130.500.000**				**250.000.000**
1	01	05	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	15 Dokumen	130.500.000	DAU		25 Dokumen	125.000.000
					JUMLAH				**242.859.724.407**				**265.276.714.833**

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 ini disusun dan diharapkan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan semua Program dan Kegiatan. Rencana Kerja ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025.

Diharapkan Rencana Kerja ini dapat menjadi tolak ukur dan dipahami oleh seluruh Jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan, sehingga akan memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa dan bagaimana seluruh Jajaran Dinas Pendidikan bekerja untuk mencapai tujuan bersama, sehingga pada akhirnya seluruh Program dan Kegiatan yang direncanakan dapat terkondisi secara harmonis dan terlaksana dengan baik.

Padang Aro, Juli 2024

Kepala



SYAMSURIA, S.Pd. MM
Pembina Tk.I, IV/b
NIP.196807021992031006

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANNAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan dapat menyusun ***"RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025"*** sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan Kegiatan pembangunan dalam bidang Pertanian periode tahun 2025.

Kami berharap dukungan semua pihak, baik stakeholders dan instansi terkait lainnya dalam meneruskan pembangunan wilayah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang tidak terlepas dari visi dan misi yang telah ditetapkan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 ini dapat disusun disampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan Kabupaten Solok Selatan umumnya dan khusunya dalam meningkatkan kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan dimasa-masa yang akan datang.

Padang Aro, 2024
Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Solok Selatan

drh. NURHAYATI
NIP. 19670201 1999032003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Sampai dengan TW II dan Capaian Renstra 2021-2026 6

2.2. Cascading Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 30

2.3. Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 35

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan ddan Perikanan 35

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 38

2.6 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 60

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 62

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 62

3.3 Program dan Kegiatan 64

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 91

BAB V PENUTUP 98

Tabel 2.1 Realisasi Belanja Anggaran 2023 7
Tabel 2.2 Rekapitulasi evaluasi hasil renja dan capaian renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2024 . 14
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan TW II Tahun 2024 31
Tabel 2.4 Review Terhaddap Rancangan Awal RKPD 39
Tabel 2.5 Rekap Usulan Musrembang (Pokok-pokok Pikiran DPKPP Tahun 2025 61
Tabel 3.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) DPKPP Tahun 2025 66

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) adalah suatu presentasi pemikiran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan dan dapat dipertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Untuk mewujudkan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan yang telah ditetapkan ini, diperlukan Rencana Kerja sebagai arahan kepada organisasi untuk pengembangan pengukuran dalam pencapaian misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipasif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tesebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan 2012-2031;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

m. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan;

n. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 untuk memberikan landasan bagi para penyelenggara pemerintah dan para pelaku pembangunan pertanian di Kabupaten Solok Selatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuannya adalah mewujudkan keterpaduan perencanaan dan mempertajam skala prioritas pembangunan pertanian di Kabupaten Solok Selatan.

Adapun tujuan konkritnya adalah :

a. Untuk memasukkan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025.
b. Mengetahui hasil dan manfaat terhadap pelaksanaan pembangunan pertanian, meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
c. Agar seluruh program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran.
d. Sebagai bahan masukan dan landasan guna menyusun program dan kegiatan tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyusunan Renja.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pada bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan pada tahun lalu, analisis kinerja, permasalahan/hambatan yang dihadapi serta pemecahan masalah.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan

memuat tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025

BAB V Penutup

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra 2021-2026

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujutan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan–tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dari output dan pengukuran kinerja program dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tahun 2023 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan 2021-2026 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan 2023 dan realisasi APBD untuk Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tahun anggaran 2023.

Tabel 2.1 Realisasi Belanja Anggaran 2023

URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	**33,591,904,951**	**31,441,853,939**	**93.60**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**12,241,302,824**	**11,139,598,017**	**91.00**
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**10,000,000**	**9,970,000**	**99.70**
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000	9,970,000	99.70
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**124,000,000**	**108,930,950**	**87.85**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	124,000,000	108,930,950	87.85
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**11,338,673,321**	**10,309,984,512**	**90.93**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,055,973,321	10,033,514,512	90.75
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282,700,000	276,470,000	97.80
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**381,517,584**	**372,192,040**	**97.56**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,998,658	9,998,000	99.99
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98,420,483	93,360,900	94.86
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19,821,390	19,812,000	99.95
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48,019,700	48,015,000	99.99
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,995,000	4,950,000	99.10
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200,262,353	196,056,140	97.90
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**121,049,991**	**80,108,315**	**66.18**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,050,000	3,042,000	99.74
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,999,991	77,066,315	65.31
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**266,061,928**	**258,412,200**	**97.12**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196,105,400	188,541,200	96.14

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,970,000	9,965,000	99.95
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59,986,528	59,906,000	99.87
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	**45,296,000**	**43,665,000**	**96.40**
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**45,296,000**	**43,665,000**	**96.40**
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	45,296,000	43,665,000	96.40
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**338,794,828**	**316,521,700**	**93.43**
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**190,674,178**	**180,681,800**	**94.76**
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	28,091,400	23,386,900	83.25
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	69,583,028	69,065,900	99.26
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	92,999,750	88,229,000	94.87
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**25,121,850**	**24,621,000**	**98.01**
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25,121,850	24,621,000	98.01
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**122,998,800**	**111,218,900**	**90.42**
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	10,449,900	8,819,000	84.39
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	112,548,900	102,399,900	90.98
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**102,412,900**	**97,560,500**	**95.26**
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**13,039,400**	**9,520,000**	**73.01**
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	13,039,400	9,520,000	73.01
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**89,373,500**	**88,040,500**	**98.51**

Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	89,373,500	**88,040,500**	98.51
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**8,541,300**	**5,979,900**	**70.01**
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**8,541,300**	**5,979,900**	**70.01**
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	8,541,300	5,979,900	70.01
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**1,531,099,815**	**1,505,272,350**	**98.31**
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**279,276,000**	**264,014,300**	**94.54**
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	230,266,800	228,727,300	99.33
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	34,290,000	28,750,000	83.84
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	14,719,200	6,537,000	44.41
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**1,251,823,815**	**1,241,258,050**	**99.16**
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	807,558,000	798,256,550	98.85
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	444,265,815	443,001,500	99.72
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**48,285,850**	**29,507,850**	**61.11**
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**48,285,850**	**29,507,850**	**61.11**
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	48,285,850	29,507,850	61.11
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**15,528,202,640**	**14,941,271,626**	**96.22**
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**3,663,614,600**	**3,577,669,832**	**97.65**
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3,663,614,600	3,577,669,832	97.65

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**3,152,203,890**	**2,937,347,431**	**93.18**
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	199,290,960	53,785,921	26.99
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	69,621,870	66,840,000	96.00
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2,883,291,060	2,816,721,510	97.69
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**8,712,384,150**	**8,426,254,363**	**96.72**
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	8,665,504,250	8,388,706,563	96.81
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	46,879,900	37,547,800	80.09
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**1,866,779,641**	**1,657,909,780**	**88.81**
Pengembangan Prasarana Pertanian	**252,157,950**	**176,171,680**	**69.87**
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	201,283,050	165,042,780	82.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	50,874,900	11,128,900	21.88
Pembangunan Prasarana Pertanian	**1,614,621,691**	**1,481,738,100**	**91.77**
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3,193,100	3,189,000	99.87
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	535,928,050	520,977,400	97.21
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	-	-	0.00
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	-	-	0.00
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	51,581,050	50,403,800	97.72
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1,023,919,491	907,167,900	88.60
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**265,085,856**	**250,555,274**	**94.52**
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**101,751,406**	**99,392,374**	**97.68**

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	101,751,406	99,392,374	97.68
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	**25,704,800**	**24,990,000**	**97.22**
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	25,704,800	24,990,000	97.22
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**88,999,595**	**80,293,900**	**90.22**
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	37,599,801	33,063,650	87.94
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	51,399,794	47,230,250	91.89
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**48,630,055**	**45,879,000**	**94.34**
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	29,980,600	28,165,000	93.94
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	18,649,455	17,714,000	94.98
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**34,995,900**	**27,862,700**	**79.62**
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**34,995,900**	27,862,700	79.62
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	9,995,900	9,502,700	95.07
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	25,000,000	18,360,000	73.44
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**27,450,000**	26,831,850	97.75
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**27,450,000**	**26,831,850**	**97.75**
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	27,450,000	26,831,850	97.75
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**696,258,616**	589,756,597	84.70
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**696,258,616**	589,756,597	84.70
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	424,657,400	380,217,916	89.54
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	84,435,500	73,367,600	86.89

Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	117,166,000	86,711,465	74.01
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	69,999,716	49,459,616	70.66
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**496,837,858**	484,281,745	97.47
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**496,837,858**	484,281,745	97.47
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	297,575,888	291,760,670	98.05
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	199,261,970	192,521,075	96.62
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**360,560,923**	325,279,050	90.21
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	**360,560,923**	325,279,050	90.21
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	360,560,923	325,279,050	90.21
	33,591,904,951	**31,441,853,939**	**93.60**

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target kinerja program

Adapaun faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program atau kegiatan adalah adanya perencanaan yang baik dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun berjalan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, hal ini koordinasi sangat diperlukan dalam penyeimbangan pelaksanaan program atau kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian profram renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan progrram dan kegiatan terhadap target capaian program renstra adanya peningkatan ekonomi di bidang pertanian.

c. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Adapun kebijakan tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah dengan menyesuaikan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ynag dimaksud dan memberikan argumentasi atas program atau kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan untuk memennuhi target yang telah ditetapkan. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Rekapitulasi evaluasi hasil renja dan capaian renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN									
2	09					URUSAN KETAHANAN PANGAN									
2	09	02				II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Nagari Yang Memiliki Infrastruktur Kemandirian Pangan	43	100	21	21	100	26	21.00	48.84
2	09	02	1	01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nagari Yang Memiliki Infrastruktur Kemandirian Pangan	43	100	21	21	100	26	21	48.84
2	09	02	01	01	001	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Ketersediaan Lumbung Pangan	2	2	-	-	-	0	0	-
2	09	02	01	01	003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Kemnadirian Pangan lainnya	4	-	1	1.00	100	1	1	25.00
2	09	03				III. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85	77.8	119	80.1	68	83	80,1	
2	09	03	1	01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85	77.8	79	80.1	101	83	80,1	
2	09	03	1	01	001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Buku Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Pangan	5	-	1	1.00	100	1	1	20.00
2	09	03	1	01	002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat Pengembangan Pangan Pekarangan	42	7	7	4.00	57	7	18	42.86
2	09	03	1	01	003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya	Jumlah koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	5	-	1	-	-	1	0	-
2	09	03	1	01	0011	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	54	18	9	9.00	100	9	27	50.00
2	09	03	1	02		Pengelolaan dan keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan masyarakat	77	10	20	16	80	20	16	20.78
2	09	03	1	02	003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	77	10	20	16.00	80	21	31	40.26
2	09	03	1	04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Konsumsi Pangan Masyarakat sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	85	77.8	81	80.1	100	83	80.1	94.24
2	09	03	1	04	001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per tahun	Jumlah Buku Pola Pangan Harapan (PPH) yang Tersedia	1	-	78	1.00	1	1	1	100.00
2	09	03	1	04	002	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Masyarakat Penganekaragaman Konsumsi Pangan B2SA	12	4	2	2.00	100	2	32	266.67
2	09	03	1	04	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Dokumen Penanggulangan Kerawanan Pangan	6	2	1	-	-	1	2	33.33

2	**09**	**04**				**IV. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Nagari Rawan Pangan Yang Ditangani**	**1**	**2**	**100**	**1**	**1**	**100**	**1**	**100.00**
2	**09**	**04**	**2**	**01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan**	**1**	**2**	**1**	**1**	**100**	**2**	**1**	**100.00**
2	09	04	2	01	001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan di Nagari	9	2	1	1.00	100	2	3	33.33
2	**09**	**04**	**2**	**02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fasilitasi Penanganan Kerawanan Pangan**	**49**	**14**	**7**	**7**	**100**	**7**	**21**	**42.86**
2	09	04	2	02	002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK Penerima dalam Penanggunan Daerah Rawan Pangan	1,646	500	275	274.00	100	285	1024	62.21
2	**09**	**05**				**V. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Temuan Pelaku Usaha menggunakan Zat Berbahaya (Per 100 Sampel)**	**30**		**8**		**-**	**6**	**6**	**20.00**
2	**09**	**05**	**1**	**01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Wilayah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan**	**7**	**7**	**6**	**7**	**86**	**6**	**7**	**100.00**
2	09	05	1	01	002	Sertifikasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Sampel Analisis Mutu, Gizi, Keamanan Produk dan Konsumsi Pangan	30	20	8	-	-	6	20	66.67
3	**25**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
3	**25**	**04**				**VI. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah kelompok Pembudidaya Yang Dibina**	**166**	**30**	**45**	**40**	**89**	**55**	**40**	**24.10**
3	**25**	**04**	**2**	**02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah kelompok Pembudidaya Yang Dibina**	**166**	**30**	**45**	**40**	**89**	**30**	**40**	**24.10**
3	25	04	2	02	001	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Calon Induk Bersertifikat untuk kebutuhan UPR								
								2,460	800	400	200.00	50	600	1400	56.91
								6,500	2,400	1,400	200.00	14	1500	3900	44.71
3	25	04	2	02	002	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah Kali Pertemuan Pelaku Usaha Perikanan	11	4	2	1.00	50	2	7	63.64
							Jumlah Kelompok Pembinaan Pokdakan	65	20	10		-	10	30	46.15
							Jumlah Pembinaan Pokmaswas	25	36	20		-	20	20	80.00
							Jumlah Pembinaan Pelatihan kelompok	6	2	1		-	1	2	33.33
3	25	04	2	02	003	Pemberian Pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pelatihan Bagi Petugas dan Meningkatnya Kualitas SDM Pembudidaya	11	4	2	-	-	2	6	54.55
3	25	04	2	02	004	Pengelolaan Pembudidaya Ikan		-	-		-		0		
3	**25**	**04**	**2**	**04**		**Pengelolaan Pembudidaya Ikan**	**Jumlah Unit Perikanan yang Beroperasi**	**35**		**20**	**10**	**50**	**25**		-
3	25	04	2	04	002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Unit Pembenihan (BBI dan UPR)	27	34	19	19.00	100	21	53	196.30
							Jumlah Unit Pembangunan/Rehabilitasi Kolam	12	6	5	2.00	40	7	11	91.67
							Jumlah Pengadaan Mesin Pakan Ikan	11	4	2	-	-	2	6	54.55
3	25	04	2	04	003	Pemantauan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dana Operasional UPTD BBI Perikanan	2	2	2	2.00	100	2	2	100.00
3	25	04	2	04	004	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di darat	Jumlah Kelompok UPR dan Pokdakan dalam Penerapan Teknologi Budidaya	35	30	20	-	-	25	45	128.57
3	**25**	**06**				**VII. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan**	**Tingkat Konsumsi Ikan**	**35**	**32**	**33**	**36**	**108**	**34**	**35.86**	**102.45**
							Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	**19**	**5**	**15**	**4**	**27**	**17**	**2**	**10.53**
3	**25**	**06**	**2**	**02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah kelompok Pengolahan dan Pemasaran**	**19**	**5**	**15**	**4**	**27**	**17**	**2**	**10.53**

3	25	06	2	02	001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah Pelatihan Bagi Petugas Pembina Mutu pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	30	40	22	22.00	100	25	82	273.33
3	**27**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
3	**27**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan operasional kantor**	**100**	**20**	**100**	**-**	**-**	**0**	**25**	**25.00**
3	**27**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah**	**100**	**20**	**100**	**-**	**-**	**100**	**25**	**25.00**
3	27	01	2	01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang Disusun	4	-	1	-	-	1	2	50.00
3	27	01	2	01	002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan/Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	1	4	-	-	4	2	8.00
3	**27**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Keuangan**	**100**	**20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**25**	**25.00**
3	27	01	2	02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124	111	124	89.00	80	124	104	83.87
3	27	01	2	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	24	12	9.00	75	12	42	58.33
3	27	01	2	02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21	9	4	-	-	4	14	66.67
3	**27**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**25**	**25.00**
3	27	01	2	06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	8	4	4.00	100	4	14	58.33
3	27	01	2	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	8	4	4.00	100	4	14	58.33
3	27	01	2	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	8	4	4.00	100	4	14	58.33
3	27	01	2	06	003	Penyedian Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	8	4	4.00	100	4	14	58.33
3	27	01	2	06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	8	4	4.00	100	4	14	58.33
3	27	01	2	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	8	4	4.00	100	4	14	58.33
3	**27**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah**	**100**	**20**	**100**		**-**	**100**	**25**	**25.00**
3	27	01	2	07	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-								
3	27	01	2	07	005	Pengadaan mebelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60	4	30	-	-	0	4	6.67
3	27	01	2	07	006	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	0	0	-
							Kendaraan Roda 2 (dua)	-	-	-	-	-		0	-
							Kendaraan Roda 4	-	-	-	-	-		0	-
							Kendaraan Roda 3 BBI	-	-	-	-	-		0	0
3	27	01	2	07	007	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	-	-	-	1	2	200.00

							Pagar Kantor	-	-	-	-	-		-
							Gedung Gudang Alsin	-	-	-	-	-		-
							Gedung Arsip	-	-	-	-	-		-
							Pembangunan Rumah Penjaga Kantor	-	-	-	-	-		-
							Jalan dan taman Lingkungan Dinas	-	-	-	-	-		-
							Koridor di lingkungan kantor	-	-	-	-	-		-
							Gedung Kantor Dinas	1	1	-	-	-	1	-
3	**27**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jenisiah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan**	**2**	**2**	**2**	**2**	**100**	**2**	**2** **100.00**
3	27	01	2	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	7	4	4.00	100	4	15 62.50
3	27	01	2	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	21	7	4	4.00	100	4	15 71.43
3	27	01	2	08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		2		1.00	-	-	-
3	27	01	2	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		-		-	-	12	-
3	**27**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100**	**26**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50** **50.00**
3	27	01	2	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	672	276	112	102.00	91	112	516 76.79
3	27	01	2	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330	110	55	5.00	9	55	170 51.52
3	27	01	2	09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	4	2	1.00	50	-	7 63.64
							Rehab pagar kantor	-	-		-	-	-	-
							Rehap Gedung Kantor/Rumah Dinas	5	-	2	-	-	-	-
							Tenaga gedung kantor	6	-	-	-	-	-	-
							Rehab mushola	-	-		-	-	-	-
3	**27**	**02**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Meningkatnya produksi hasil pertanian**							-
							Padi	**679,706**	**105,129**	**110,382**	**87,584.23**	**79**	**115,760**	**298,779 42.76**
							Jagung	**538,276**	**175,878**	**93,169**	**78,713.78**	**76**	**113,240**	**327,365 60.82**
							Kacang tanah	**4,879**	**1,289**	**803**	**661.39**	**62**	**819**	**2,648 55.19**
							Kacang hijau	**2,808**	**11,424**	**464**	**9,556.00**	**2,859**	**472**	**23,716 828.85**
							Cabe	**44,808**	**12,001**	**7,274**	**1,570.70**	**22**	**7**	**24,881 54.55**
							Bawang merah	**27,808**	**6,104**	**4,474**	**3,284.90**	**73**	**5**	**12,219 45.22**
							Kelapa Sawit	**384,909**	**76,075**	**61,416**	**32,195.84**	**52**	**67**	**152,158 39.62**
							Kopi	**216,898**	**6,354**	**3,592**	**3,431.37**	**98**	**4**	**12,709 5.95**
							Pepaya	**1,158**	**-**	**182**	**-**	**-**	**200**	**- -**
							Durian	**202**	**1,441**	**33**	**216.00**	**655**	**34**	**1,857 919.33**
							Kapulaga	**34,008**	**613**	**5,417**	**-**	**-**	**6**	**1,226 3.60**
							Populasi ternak besar	**136,008**	**16,111**	**22,263**	**16,270.00**	**73**	**24**	**48,492 35.14**
							Telor	**2,738**	**922**	**452**	**352.27**	**78**	**461**	**1,612 62.90**

3	27	02	2	01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**100**	**28**	**100**		-	**100**	**60**	**60.00**
3	27	02	2	01	001	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi**					-				
							Frekwensi pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian komoditi tanaman pangan (teknologi dan spesifik lokasi)	48	48	-	-	-	-	48	100.00
							Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida	40	40	-	-	-	-	40	100.00
3	27	02	2	01	002	**Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**			-			-			
							Jumlah petani yang mengikuti pelatihan penggunaan sarana pasca panen komoditi tanaman pangan	200	-	50	-	-	50	0	-
							Jumlah kelembagaan UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan) yang terbentuk	83	-	15	-	-	28	0	-
							Jumlah bantuan alsintan yang dikaraki (brigade alsintan)	490	-	100	493.00	493	120	493	100.61
							Jumlah petani yang didampingi penyusunan RDKK, update dan entry data e-RDKK serta verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi	55,000	15,000	13,000	13,000.00	100	13,000	28000	50.91
							Pendampingan alsintan (Pendukung SSK) seperti : Handsprayer, Mesin Pelong Rumput dan Pompa Air	30	30	-	-	-	-	60	200.00
3	27	02	2	02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mitra Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase pemakaian bibit bersertifikat**	**100**	**28**	**100**	**100.00**	**100**	**100**	**60**	**60.00**
3	27	02	2	02	004	**Penjaminan Kemanfaatan dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman**						-			
							Jumlah varietas komoditi tanaman pangan yang di rumikan (padi sawah dan padi ladang), 2 MT setiap tahun	6	2	1	1.00	100	1	4	66.67
							Jumlah varietas komoditi tanaman hortikultura yang dirumitkan pada penangkar (cabe, kapul, manggis dan durian)	4	-	1	2.00	200	1	2	50.00
3	27	02	2	02	002	**Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman**						-			-
							Luasan pemakaian bibit unggul tanaman padi yang disebarkan (Padi sawah atau padi ladang) spesifik lokasi	200	200	-		-	-		-
							Terlaksananya Pengembangan Benih Unggul Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman Hortikultura	1	1	-	-	-	-	1	100.00
							Penambahan luasan kawasan cabai	3	3	-	-	-	-	3	100.00
							Penambahan luasan kawasan Bawang Merah	3	3	-	-	-	-	3	100.00
							Penambahan luasan kawasan Manggis	-	-	-	-	-	-	0	
							Penambahan luasan kawasan Durian	-		-	-	-	-	0	
							Penambahan luasan kawasan Pisang Roti Solsel	-		-	-	-	-	0	
							Jumlah Angka Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)	16,423	4,423	3,000.00	-	-	3,000	6346	38.64
						UPT BBI	Jumlah BBI yang dikelola	1	1	1	1.00	100	1	1	100.00
3	27	02	2	02	003	**Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman**						-			

							Optimalnya pemanfaatan SDG dan benih berlabel komoditi tanaman pangan/benih Padi	1,000	-	-	-	-	-	0	-
							Jumlah luasan pemakaian bibit unggul tanaman pangan	**25,920**	-	6,320	**1,380.00**	21	**6,579**	1380	4.85
							- Luasan pemakaian bibit unggul benih kacang tanah	110	-	20	21.00	105	25	21	19.09
							- Luasan pemakaian bibit unggul benih porang	110	-	20	-	-	25	0	-
							- Luasan pemakaian bibit unggul benih Padi	6,500	-	1,250	50.00	4	1,500	50	0.77
							- Luasan pemakaian bibit unggul benih Jagung	20,200	-	5,000	**64.00**	1	5,000	64	0.32
							Jumlah luasan bibit unggul tanaman hortikultura	**110**	-	26	**26.00**	100	**24**	26	23.64
							- Luasan pemakaian bibit unggul cabai	19	-	4		-	5	0	-
							- Luasan pemakaian bibit unggul bawang merah	18	-	4	9.00	225	4	9	50.00
							- Luasan pemakaian bibit unggul manggis	38	-	10	20.00	200	8	20	52.63
							- Luasan pemakaian bibit unggul durian	16	-	4	4.00	100	2	4	25.00
							- Luasan pemakaian bibit unggul pisang roti sokrat	19	-	4	-	-	5	0	-
							Jumlah luasan bibit unggul tanaman perkebuan	**635**	-	140	-	-	**140**	0	-
							- Jumlah luasan pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan/sawit	400	50	100	310.65	311	100	360.65	90.16
							- Jumlah luasan pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan/kopi	120	15	30	-	-	30	15	12.50
							- Jumlah pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan/pinang	40	10	10	1.09	11	10	11.09	27.73
							Meningkatnya pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan/sawit	50	-	-	-	-	-	0	-
							Meningkatnya pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan/kopi arabika	15	-	-	-	-	-	0	-
							Meningkatnya pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan/pinang	10	-	-	-	-	-	0	-
						UPT BBI	Jumlah bibit dihasilkan dan distribusikan	40,000	-	10,000	-	-	10,000	0	-
3	**27**	**02**	**2**	**03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase pelaksanaan peningkatan Mutu Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan ternak**	**100**	**20**	-		-	-		-
3	27	02	2	03	001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah kelompok tani ternak yang dalam pengawasan dan pembinaan	30	-	-	-	-	-	0	-
3	**27**	**02**	**2**	**08**		**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	**Persentase pelaksanaan pengawasan Obat**	**100**	**20**	-		-	-	**50**	**50.00**
3	27	02	2	08	001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah produk legal dan terdaftar	3	3	-	-	-	-	1	33.33
3	**27**	**02**	**2**	**09**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan PakanTernak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Makan ternak**	**100**	**20**	**100**		-	**100**	**50**	**50.00**
3	**27**	**02**	**2**	**09**	**001**	**Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**						-			
							Pengadaan bibit kecambah sawit	2	2	-	-	-	-	4	200.00
							Pengadaan bibit beraneka jenis tanaman buah	3,000	3,000	-	-	-	-	6000	200.00
							Jumlah lahan yang menggunakan bibit unggul (jagung)	5,000	5,000	-	-	-	-	10000	200.00

3	27	02	2	06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**Persentase pelaksanaan Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Makanan ternak**	100	20	100	100.00	100	100.00	80	80.00
3	27	02	2	06	004	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						-			
							Jumlah Ternak Sapi yang Didistribusikan	4,010	185	625	450.00	72	1,059.00	780	19.45
							Jumlah Unggas Yang didistribusikan	2,000	2,000	-	3,000.00	-	-	5000	250.00
3	27	02	2	06	002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yangSumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						-			
							Jumlah Luasan Hijauan Pakan Ternak (HPT)	125	-	25	5.00	24	25.00	5	4.80
3	27	03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Meningkatnya Produktifitas hasil pertanian**					-			
							Padi	**5.87**	**4.25**	**5**	**4.07**	**75**	**5.56**	**3.1425**	**53.53**
							Jagung	**5.91**	**5.14**	**6**	**5.18**	**93**	**5.68**	**3.865**	**65.46**
							Kacang tanah	**1.71**	**1.62**	**2**	**1.78**	**107**	**1.69**	**1.253885906**	**73.33**
							Kelapa Sawit	**12.10**	**5.26**	**12**	**3.25**	**27**	**12.09**	**3.4425**	**28.45**
							Kopi	**2.52**	**1.81**	**2**	**0.75**	**34**	**2.29**	**0.6925**	**27.46**
3	27	03	2	01		Pengembangan Prasarana Pertanian	**Persentase pengembangan Prasana Pertanian yang dimanfaatkan**	**100**	**20**	**100**		-	**100**	**75**	**75.00**
3	27	03	2	01	001	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B									
							Penambahan Luasan Bawang Merah	10	1		-	-	0	2	20.00
							Penambahan luasan kawasan manggis	15	10		-	-	0	20	133.33
							Jumlah Pelaporan Data Target dan Realisasi Luas Tanam dan Luas Panen komoditi Tanaman Pangan (padi) yang disusun	48	-	12	-	-	12	0	-
							Jumlah pelaksanaan ubinan swasembada	96	48	12	-	-	12	48	50.00
							Pengadaan Alat Ubinan beserta kelengkapan sebagai sarana Optimalisasi penguatan data produksi komoditi tanaman pangan melalui ubinan swasembada	8	-	-	-	-	0	0	-
							Jumlah luasan kawasan LP2B, KP2B dan LCP2B sesuai lokasi yang ditetapkan	44.608	8,922	8.922	8,921.00	100	8921.55	17842.55	40.00
3	27	03	2	01	006	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B						-			
							Lengkapnya dokumen pengusulan konversi HPK menjadi APL *Pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan, pemberdayaan petani, pemblayaan dan peran serta masyarakat terhadap lanjutan perlindungan LP2B lengkpanya dokumen pengusulan konversi HPK menjadi APL*	920	920		-	-	0	1840	200.00
							Ditetapkannya kawasan LP2B untuk meningkatkan produksi pertanian	7,000	7,000	-	-	-	0	7000	100.00

3	27	03	2	01	003	**Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya**						-		
							Ketersediaan Cost Sharing kegiatan APBN (Operasional, Perencanaan dan Pengawasan RJIT, Embung, dll)	100	20	100	28.20	28		148.2	148.20
							Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung peningkatan produksi komoditi tanaman pangan dari hilir hingga hulu	12	12	-		-		12	100.00
3	27	03	2	01	004	**Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan**	**Penyusunan masterplan pengembangan peningkatan produksi tanaman pangan (Spesifikasi Varietas Komoditi Tanaman Pangan)**	**2**	-	**1**	-	-	**0**	0	-
3	27	03	2	01	005	**Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian**	**Persentase pengembangan Prasana Pertanian yang dimanfaatkan**		-	-	-	-	**100**		
						Pembangunan Prasarana Pertanian	**Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian yang dimanfaatkan**	**100**	**20**	**100**		-		**50**	**50.00**
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Luas areal lahan pangan yang dialiri jaringan irigasi tersier	1,500	1,200	100		-	200	1800	120.00
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah unit embung yang dibangun	3	-	-	-	-	1	0	-
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan usaha tani/jalan produksi yang dibangun / direhab	23	24	1		-	2	47	204.35
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah unit Dam Parit yang dibangun	5	1	1	-	-	1	1	20.00
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah unit Pintu Air yang dibangun / direhab	11	2	3	-	-	0	2	18.18
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang dikelola	5	1	1	-	-	1	1	20.00
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						-			
							Pembangunan/Rehabilitasi perbibitan Sapi	4	-	1		-	1	0	-
							Jumlah unit kerja puskeswan dan BI dan Screen House	2	2	-		-	0	2	100.00
							Jumlah pembangunan / rehab Screen House	3	-	-		-	1	0	-
3	27	03	2	02		**Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum**	**Persentase Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum**	**100**		**100**		-	**100**	**0**	-
3	27	03	2	02	001	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Kelompok Tani Pengembangan Integrasi Ternak dengan Tanaman Sawit yang dibina	50	-	10	-	-	10	0	-
3	27	04				**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan penanggelangan kasus penyakit menular (hewan)**	**100**	**20**	**100**		-	**100**	**75**	**75.00**
3	27	04	2	01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pesentase penjaminan Kesehatan Hewan**	**100**	**20**	**100**	**100.00**	**100**	**100**	**75**	**75.00**
3	27	04	2	01	001	**Pengendalian dan Penanggelangan Penyakit Hewan dan Zoonosis**						-			
							Persentase hewan yang tervaksin	100	0.3	1	50.00	10,000	60	50.3	50.30
							Jumlah hewan yang di vaksin Rabies	13,700	4,230	2,500	1,760/60	44	2,500	6560	47.88
							Jumlah hewan yang di vaksin SE	6,000	700	1,500	-	-	1,500	1400	23.33

							Jumlah hewan yang di vaksin jembrana	4,000	-	1,000	-	-	1,000	0	-
						UPT PUSKESWAN	Jumlah pelayanan vaksinasi	15,000	3,000	3,000	2,861.00	95	3,000	5861	39.07
3	27	04	2	01	002	**Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**									
							Jumlah peraturan kepala daerah tentang Rabies dan turunannya sampai ke Nagari	1	-	-	-	-	0	0	-
							Pelayanan vaksinasi SE	5,200	5,200	-	-	-	0	5820	111.85
							Pelayanan vaksinasi jembrana	2,000	2,000	-	-	-	0	2000	100.00
3	27	04	2	02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pos pelayanan lalulitas ternak yang dikelola**	**100**		**100**	**100.00**	**100**	**100**	**25**	**25.00**
3	27	04	2	02	002	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pos pelayanan lalulintas ternak yang dikelola	2	-	2	2.00	100	2	2	100.00
3	27	04	2	03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Jasa Labortorium dan jasa medik Veteriner**	**100**	**20**	**100**	**100.00**	**100**	**100**	**75**	**75.00**
3	27	04	2	03	001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah sampel penyakit lamek yang diperiksa	150	130	30	30	100	30	265	176.67
3	27	04	2	03	002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah ternak yang mendapatkan jasa kesehatan hewan	46,000	5,729	8,000	7,988	100	8000	19454	42.29
3	27	04	2	04		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis**	**100**	**20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**75**	**75.00**
3	27	04	2	04	001	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pelaku/Unit Usaha yang Mendapatkan Pendampingan kelayakan teknis	49	9	8	8	100	9	20	40.82
3	27	04	2	04	002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Sampel Produk Peternakan yang di Uji	20	-	5	5	100	5	5	25.00
3	27	05				**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Cakupan penanggulangan bencana pertanian**	**100**	**20**	**100**	**100.00**	**100**	**100**	**75**	**75.00**
3	27	05	2	01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase bencana pertanian yang ditanggulangi**	**100**	**20**	**100**	**100.00**	**100**	**100**	**75**	**75.00**
3	27	05	2	01	001	**Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**						-			
							Cakupan wilayah pengendalian OPT tanaman pangan (padi)	28	-	7	6	86	7	6	21.43
							Sinkronisasi manajemen dan sistem peringatan awal dalam upaya pengendalian OPT di setiap kecamatan	7	7	-	4	-	0	18	257.14
							Terkendalinya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Sakit, Kopi Arabika dan Pinang	7	7	-	2	-	0	16	228.57
3	27	05	2	01	005	**Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan**						-			
							Jumlah Luas lahan sawah yang ikut Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	500	200	100	125	125	100	325	65.00
3	27	06				**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase rekomendasi yang dikeluarkan**	**100**	**20**	**100**	**100.00**	**100**	**100**	**75**	**75.00**
3	27	06	2	02		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Pertanian**	**100**	**20**	**100**		-	**100**	**75**	**75.00**

3	27	06	2	02	003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian						-		
							Jumlah perusahaan perkebunan yang diawasi	18	9	18	9	50	18	9	50.00
3	27	06	2	02		**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan,Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih / bibit Ternak pemeliharaan fasilitas RPH**	**100**		**100**		-	**160**	**25**	**25.00**
3	27	06	2	02	001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah usaha yang difasilitasi	13	1	3	-	-	3	2	15.39
3	27	7				**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**									
							Persentase ketersediaan penyuluh	**100**	**46.31**	**77**	**61.00**	**79**	**98.35**	**61**	**61.00**
							Persentase Kelompok tani berdasarkan kelas								
							Pemula	83	89.43	76	94.37	124	73.65	94.37	113.29
							Lanjut	44	10.23	23	5.62	25	24.88	5.62	12.92
							Madya	2	0.33	1	-	-	1.31	0	-
							Utama	0	-	0	-	-	0.15	0	-
3	27	7	2	01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Cakupan kelompok tani yang dibina**	**100**	**20**	**100**		-	**100**	**75**	**75.00**
3	27	7	2	01	004	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa**									
							Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan kapasitas SDMI	165	33	33	60	182	33	93	56.36
							Jumlah pelatihan Teknis, Temu Teknis, Temu Tugas, Temu Tehnologi, Temu Evaluasi, Temu lapang, Workshop dan metodhelogi	48	-	12	47	392	12	47	97.92
							Terlaksananya penerapan metodologi penyuluhan	45	11	8	8	100	8	24	53.33
							Tersusunnya Programa Penyuluhan pertanian Negeri, Kecamatan dan Kabupaten	33	33	-	-	-	0	66	200.00
							Terlaksananya pertemuan (Rapat Teknis, Temu Teknis, Temu Tugas, Temu Tehnologi, Temu Evaluasi, Temu lapang, Workshop dll)	24	24	-	-	-	0	36	150.00
							Training BPP (7 BPP)	28	14	-	-	-	0	14	50.00
							Penilaian terprestasi ketenagaan dan Kelembagaan penyuluh dan petani	7	7	-	-	-	0	7	100.00
							Peningkatan kelembagaan penyuluhan	-	33	-	-	-	0	0	-
							Terlaksananya pembinaan PUAP	234	78	39	20	51	39	137	58.55
3	27	7	2	01	002	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kec dan Desa**						-			
							Terbentuknya Indikasi Geografis Kopi Arabika Solok Selatan	5	1	1	1.00	100	1	2	40.00
							Tersedianya Informasi harga komoditi perkebunan	13	13	-	-	-	-	26	200.00
							Terdampingnya Kegiatan sumber dana APBN/APBD Prov dan RPL	3	3	-	-	-	-	3	100.00
							Pemumbuhan dan pengembangan Petani milenial, Pemumbuhan P4S dan magang, demplot, kaji Terap bagi petani milenial	10	10	-	-	-	-	10	100.00

							Peningkatan kelembagaan penyuluhan	50	25	25	30.00	120	-	55	110.00
							Pembinaan kelompok UP3HP	11	11	-	-	-	-	20	181.82
							Pemumbuhan kelompok UP3HP baru	11	2	-	-	-	-	2	18.18
							Sosialisasi dan Pelatihan Pengolahan hasil Pertanian hortikultura	21	5	-	-	-	4	9	42.86
							Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian	1	1	-	-	-	-	1	100.00
							Penguatan informasi pasar hasil pertanian	96	96	-	-	-	-	96	100.00
							Jumlah pengembangan petani milenial yang dibina	488		85	50.00	71	100	60	12.30
3	27	7	2	01	863	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian						-			
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyuluh pertanian	100	-	100	100.00	100	100	100	100.00
							Sarana dan Prasarana IT bagi BPP	7	7	-		-	-	14	200.00
							Gerobak BPP	7	7	-		-	-	7	100.00
							Honor Admin Kostratani	14	14	-		-	-	21	150.00
							Paket Data Admin BPP	1	1	-		-	-	1	100.00
							Penyediaan sarana Penyuluhan elektronik dan media lainnya bagi BPP dan Poktan/ng	7	7	-		-	-	7	100.00
							Penyediaan sarana pertemuan BPP	7	7	-		-	-	14	200.00
							Tersedianya operasional Kantor BPP	7	7	-		-	-	7	100.00
						UPT BBI	Terlaksananya Operasional BBI	1	1	-		-	-	2	200.00
						UPT PUSKESWAN	Jumlah pelayanan vaksinasi Rabies	2,000	1,230	-		-	-	2460	123.00
						Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah BUMP yang dibentuk	5	1	1	-	-	1	1	20.00
						Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan	105	14	18	12.00	67	21	26	24.76

Padang Aro, 2024
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

drh.Nurhayati
NIP. 196702011999032003

2.2 Cascading Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

KEPALA DINAS					
Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
30.73	31.73	31.73	33.32	36.73	38.57
Persentase Ketersediaan Pangan (%)					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
122,66	123,04	123,42	127.12	131,06	131,06
Skor Pola Pangan Harapan (%)					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
77	78	79	83	85	86
Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
1,08	1,15	1,24	1,33	1,43	1,53
Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
31,58	32,10	32,60	33,40	34,20	35,00

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit menetapkan Sasaran Pembanguan Pemda yang berorientasi hasil (outcome) dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Solok Selatan.

Mengidentifikasi faktor kunci yang mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah atas faktor kunci yang paling berpengaruh, dijadikan sasaran strategis pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Mengidentifikasi faktor kunci yang mempengaruhi pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Sasaran pertama Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam menunjang perekonomian daerah dengan indikator kinerja Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB memiliki target 31,73. Sasaran kedua Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan dengan indikator Persentase Ketersediaan Pangan memiliki target 123,42. Sasaran ketiga Meningkatnya Keberagaman dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat dengan indikator Persentase Skor Pola Pangan Harapan memiliki target 83. Sasaran keempat Meningkatnya Konstribusi Sub Sektor Perikanan dalam Menunjang Perekonomian Daerah dengan indikator Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB memioiki target 1,24. Sasaran kelima Meningkatnya Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat dengan indikator Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) memiliki target 35,96.

SEKRETARIS					
Jumlah inovasi perangkat daerah					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	1	1	0	1	1
Persentase ketersediaan data sektoral pada perangkat daerah					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
100	100	100	100	100	100
Nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan perangkat daerah					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

ANALIS PERENCANA AHLI MUDA					
Tersedianya penyusunan dokumen pelaporan perencanaan					
Jumlah dokumen					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	4	4	4	4	4

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET					
Tersedianya penyusunan dokumen pelaporan keuangan					
Jumlah dokumen					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	4	4	4	4	4

ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA					
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian dan perkantoran					
Persentase pelayanan administrasi kepegawaian dan perkantoran					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
100	100	100	100	100	100

KEPALA BIDANG PERKEBUNAN						
Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan						
Produksi tanaman perkebunan (Ton)						
Komoditi	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sawit	52,654	56,866	61,416	66,943	72,968	72,968
Kopi	3,139	3,319	3,502	3,678	3,862	3,862
Meningkatnya pengolahan hasil perkebunan						
Jumlah komoditi						
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Komoditi	2	2	2	2	2	2

KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						
Produksi tanaman pangan (Ton)						
Komoditi	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Padi	100,072	105,136	61,416	110,362	115,755	121,320
Jagung	86,259	89,743	93,369	113,239	120,924	120,924
Kacang Tanah	772	787	803	819	836	853
Porang	150	165	182	200	220	242
Meningkatnya pengolahan hasil tanaman pangan						
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Komoditi	2	2	2	2	2	2
Produksi tanaman hortikultura						
Komoditi	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Manggis	448	456	464	472	480	480
Cabe	7,026	7,149	7,274	7,401	7,530	7,530
Bawang Merah	4,305	4,387	4,474	4,564	4,655	4,655
Durian	30	31	33	34	36	38
Kapulaga	5,364	5,391	5,417	5,688	5,973	6,271
Meningkatnya pengolahan hasil hortikultura						
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Komoditi	2	2	2	2	2	2

KEPALA BIDANG PERIKANAN						
Mengembangkan dan meningkatnya nilai tambah produk unggulan perikanan						
Jumlah produksi perikanan budidaya						
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ton	1,991	2,159	2,343	2,542	3,595	2,758
Jumlah pokmaswas perairan umum						
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pokmaswas	23	25	27	29	31	33
Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan perikanan						
Jumlah poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasaran Ikan)						
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Poklahsar	11	11	15	17	18	19

KEPALA BIDANG SARANA PRASRANA DAN PENYULUHAN						
Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan						
Persentase peningkatan kelas kelompok tani						
Kelas	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pemula	73.04	81.18	76.06	73.65	69.01	833
Lanjut	24.20	17.8	22.66	24.88	29.21	435
Madya	2.61	0.94	1.19	1.31	1.6	23
Utama	0.15	0.09	0.08	0.15	0.15	3
Persentase ketersediaan penyuluh						
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
%	50.88	64.04	77.19	90.35	94.74	100
Meningkatnya ketersedian sarana dan prasarana pertanian						
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pertanian						
%	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	100	100	100	100	100	100

KEPALA KETAHANAN PANGAN						
Meningkatnya ketersediaan pangan berkualitas						
Prevalensi stunting						
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persen (%)	13,6	13,5	13,4	13,3	13,2	13,1
Skor pola pangan harapan (PPH)						
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persen (%)	77	78	79	83	85	86
Persentase nagari yang memiliki infrastruktur kemandirian pangan						
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
%	2	22	21	26	34	43
Persentase nagari rawan pangan yang ditangani						
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persen (%)	100	100	100	100	100	100
Persentase temuan pelaku usaha menggunakan zat berbahaya						
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persen (%)	0	10	8	6	4	2

KEPALA BIDANG PETERNAKAN						
Meningkatnya produksi peternakan Jumlah produksi peternakan						
Komoditi	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ternak Besar(Ekor)	19,815	20,905	22,263	23,688	25,010	26,136
Telur (Ton)	434.24	442.93	451.78	460.82	470.03	470.03

2.3. Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Penetapan kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2024 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024 (TW II)	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	78	79	83	85	77,8	80,1	80,1	85	
2	Persentase Nagari Yang Memiliki Infrastruktur Kemandirian Pangan	Unit	22	21	26	34	21	26	26	34	
3	Persentase Nagari Rawan Pangan yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Temu Pelaku Usaha Menggunakan Zat berbahaya	%	10	8	6	4	0	0	0	4	
5	Kontribusi sektor pertanian	Persen	31,73	31,73	33,32	36,73	25,85	27,19	27,19	36,73	
	Jumlah produksi : Padi	Ton	105,136	110,362	115,755	121,320	97,062	87,584	87,584	121,320	

	Jagung	Ton	89,743	93,369	113,239	120,924	95,105	70,173	70,173	120,924	
	Kacang tanah	Ton	787	803	819	836	551	661	661	836	
	Manggis	Ton	456	464	472	480	919	955	955	480	
	Cabe	Ton	7,149	7,274	7,401	7,530	30,274	10,155	10,155	7,530	
	Bawang merah	Ton	4,387	4,474	4,564	4,655	3,698	3,285	3,285	3,285	
	Kelapa Sawit	Ton	56,866	61,42	66,943	72,97	30,276	32,196	32,196	32,196	
	Kopi	Ton	3,319	3,502	3,678	3,862	2,763	3,431	3,431	3,431	
	Porang	Ton	165	182	200	220	0	0	0	0	
	Populasi ternak besar	Ekor	20,905	22,263	23,688	25,001	16,156	16,270	16,270	25,001	
	Telor	Kg	442,93	451,78	460,82	470,03	420	535.12	535.12	470,03	
	Produktivitas Pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	5,29	5,41	5,56	5,71	5,17	4,11	4,11	5,71	
6	Jumlah kelompok berdasarkan kelas :										
	- Pemula	Kelompok	958	893	953	893	953	1,509	1,509	893	
	- Lanjut	Kelompok	209	266	322	378	209	90	90	378	
	- Madya	Kelompok	11	14	21	21	11	0	0	21	
	- Utama	Kelompok	1	1	2	2	1	0	0	2	
7	Persentase penurunan penyakit hewan menular	%	30,6	32,13	33,34	33,42	10	47,87	47,87	33,42	

8	Mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan , perikanan Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan perikanan	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,79	4,07	4,41	4,52	4,02	4,57	4,57	4,52	
9	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		Ton/tahun	2159	2343	2542	3595	2618	3246	3246	3595	
10	Jumlah Pokmaswas Perairan Umum		Pokmaswas	25	27	29	31	24	24	24	31	
11	Tingkat Konsumsi Ikanm		Kg/Kapita/Tahun	32,1	32,6	33,4	34,2	31,92	35,86	35,86	34,2	

12	Jumlah Poklahsar (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran)	Poklahsar	11	15	17	18	1	2	2	18	

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan mengalami
permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

1. Permasalahan
    a. Masih belum sinkronnya program dan kegiatan APBD dalam mendukung kebijakan nasional melalui program dan kegiatan APBN
    b. Masih belum terealisasikannya seluruh usulan masyarakat, baik melalui Musrenbang maupun proposal
    c. Belum efektif pemanfaatan fasilitas yang ada untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan pertanian
    d. Masih rendahnya kualitas produk komoditi pertanian Kabupaten Solok Selatan
    e. Rendahnya akses pasar produk komoditi pertanian Kabupaten Solok Selatan
    f. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM yang mengelola fasilitas yang ada untuk mencapai target produksi komoditi pertanian
    g. Belum adanya database atau roadmap tentang potensi pengembangan kawasan pertanian
    h. Belum adanya peraturan daerah tentang lahan pangan pertanian berkelanjutan sesuai dengan tindak lanjut Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2. Hambatan
    a. Masih rendahnya alokasi APBD terhadap sektor pertanian
    b. Rendahnya dukungan stakeholder terhadap pembangunan sektor pertanian
    c. Sarana dan prasarana Kabupaten Solok Selatan yang masih belum baik, terutama jalan dalam mendukung pemasaran produk hasil pertanian

3. Tantangan
   a. Pemanfaatan fasilitas yang ada untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan pertanian
   b. Adanya penambahan sumber daya manusia sehingga secara kuantitas dapat mendukung kinerja dan perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut
   c. Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat dikembangkan dalam produksi pertanian
   d. Kawasan Kabupaten Solok Selatan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sektor pertanian, peternakan dan perkebunan
4. Peluang
   a. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Solok Selatan
   b. Adanya dukungan perguruan tinggi dalam mengembangan pembangunan pertanian di Kabupaten Solok Selatan
   c. Adanya dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka mendukung pembangunan pertanian di Kabupaten Solok Selatan
   d. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam pertanian. Salah satu jantung perekonomian Indonesia adalah pertanian. Peningkatan keunggulan komparatif di sektor prioritas integrasi, antara lain adalah pembangunan pertanian perlu terus dilakukan, mengingat bahwa luas daratan yang dimiliki Indonesia lebih besar dan tingkat konsumsi yang tinggi terhadap hasil pertanian. Oleh sebab itu, pertanian harus menjadi perhatian khusus Pemerintah dalam menghadapi MEA ini. Sekarang dengan lebih mengetahui

      apa saja yang menjadi tantangan para pelaku usaha pertanian, kita bisa lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi MEA. Kedepan, penguatan pertanian dalam negeri akan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Setelah diketahui permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian

Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan antara lain :

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Inovasi-inovasi di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
b. Penelitian-penelitian di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Solok Selatan dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi dan dinamika perubahan.
c. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi
d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pertanian, untuk meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi.
e. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses pembangunan pertanian dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan secara lebih terstruktur.
f. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi.

Sumber Daya Manusia Aparatur

a. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
b. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
c. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

a. Mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perkebunan untuk mendukung produksi dan produktivitas dalam menunjang pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perkebunan.
b. Pemanfaatan sarana dan prasarana bidang pertanian,

peternakan dan perkebunan sesuai dengan tuntutan tugas.

c. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

d. Pengembangan perluasan areal pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian.

Dengan terfomulasikannya isu-isu penting tersebut di atas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan misi Kepala Daerah Solok Selatan serta visi dan misi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan. Selain itu, diharapkan menimbulkan dampak terhadap capaian program nasional di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan dalam mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam dokumen Renja Perangkat DPKPP Kabupaten Solok Selatan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan. Disamping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya dalam rangka pembangunan daerah sektor pertanian, peternakan dan perkebunan. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.

Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tahun 2023 belum bisa direview berdasarkan rancangan awal RKPD, disebabkan rancangan awal RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan belum selesai.

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Terget Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokai	Indikator Kinerja	Terget Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN					DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18,384,953,372	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17,522,953,31	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85 kkcl/kapita/tahun	312,000,000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85 kkcl/kapita/tahun	181,000,000	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85 kkcl/kapita/tahun	160,000,000	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85 kkcl/kapita/tahun	60,000,000	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Kelompok Penerima Manfaat Pengembangan Pangan Pekarangan	7 Kecamatan	85,000,000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Kelompok Penerima Manfaat Pengembangan Pangan Pekarangan	7 Kecamatan	60,000,000	
	Pemantauan Stok Pangan		Jumlah Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan	9 Komoditi	70,000,000	Pemantauan Stok Pangan		Jumlah Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan	9 Komoditi	-	
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan NBM		Jumlah Dokumen Buku Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Pangan	1 Dokumen	5,000,000	Penyusunan Neraca Bahan Makanan NBM		Jumlah Dokumen Buku Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Pangan	1 Dokumen	-	

	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan masyarakat	17 Ton	72,000,000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan masyarakat	17 Ton	50,000,000	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	17 Ton	72,000,000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	17 Ton	50,000,000	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Jumlah Konsumsi Pangan Masyrakat sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	85 Kkcl/Kapita/Tahun	80,000,000	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Jumlah Konsumsi Pangan Masyrakat sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	85 Kkcl/Kapita/Tahun	71,000,000	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		Jumlah Buku Pola Pangan Harapan (PPH) yang Tersedia	1 Dokumen	-	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		Jumlah Buku Pola Pangan Harapan (PPH) yang Tersedia	1 Dokumen	-	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Kelompok Masyarakat Penganekaragaman Konsumsi Pangan B2SA	2 Kelompok	75,000,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Kelompok Masyarakat Penganekaragaman Konsumsi Pangan B2SA	2 Kelompok	71,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun		Jumlah Dokumen Penanggulangan Kerawanan Pangan	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun		Jumlah Dokumen Penanggulangan Kerawanan Pangan	1 Dokumen	-	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase Nagari Rawan Pangan Yang Ditangani	100%	78,000,000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase Nagari Rawan Pangan Yang Ditangani	100%	100,000,000	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Jumlah Dokumen Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	8,000,000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Jumlah Dokumen Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	-	

	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Jumlah Dokumen Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan di Nagari	1 Dokumen	8,000,000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Jumlah Dokumen Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan di Nagari	1 Dokumen	-	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitasi Penanganan Kerawanan Pangan	7 Kali	70,000,000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitasi Penanganan Kerawanan Pangan	7 Kali	100,000,000	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah KK Penerima dalam Penangganan Daerah Rawan Pangan	290 KK/by Name By Addres	70,000,000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah KK Penerima dalam Penangganan Daerah Rawan Pangan	290 KK/by Name By Addres	100,000,000	
	PROGRAM KEAMANAN PANGAN		Persentase Temuan Pelaku Usaha menggunakan Zat Berbahaya	2 sampel	30,000,000	PROGRAM KEAMANAN PANGAN		Persentase Temuan Pelaku Usaha menggunakan Zat Berbahaya	2 sampel	-	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Wilayah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	2 Kecamatan	30,000,000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Wilayah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	2 Kecamatan	-	
	Sertifikasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Sampel Analisis Mutu, Gizi, Keamanan Produk dan Konsumsi Pangan	2 sampel	30,000,000	Sertifikasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Sampel Analisis Mutu, Gizi, Keamanan Produk dan Konsumsi Pangan	2 sampel	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Jumlah produksi perikanan budidaya	65 Ton/ Tahun	242,236,898	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Jumlah produksi perikanan budidaya	65 Ton/ Tahun	320,000,000	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah kelompok Pembudidaya Yang Dibina	35 Kelompok	119,018,098	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah kelompok Pembudidaya Yang Dibina	35 Kelompok	200,000,000	

	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah kelompok Pembudidaya Yang Dibina	35 Kelompok	119,018,098	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah kelompok Pembudidaya Yang Dibina	35 Kelompok	200,000,000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah Unit Perikanan yang Beroperasi	30 Pokdakan	123,218,800	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah Unit Perikanan yang Beroperasi	30 Pokdakan	120,000,000	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Perikanan yang Beroperasi	30 Pokdakan	123,218,800	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Perikanan yang Beroperasi	30 Pokdakan	120,000,000	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Tingkat Konsumsi Ikan	34,56 kg/kapita/tahun	118,459,965	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Tingkat Konsumsi Ikan	34,56 kg/kapita/tahun	70,000,000	
			Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	18 Kelompok				Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	18 Kelompok		
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah kelompok Pengolahan dan Pemasaran	18 Kelompok	118,459,965	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah kelompok Pengolahan dan Pemasaran	18 Kelompok	70,000,000	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Pelatihan Bagi Petugas Pembina Mutu pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	28 Orang	118,459,965	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Pelatihan Bagi Petugas Pembina Mutu pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	28 Orang	70,000,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan operasional kantor	100%	15,041,953,372	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan operasional kantor	100%	14,128,215,771	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	13,368,080,109	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	12,701,810,109	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/ Bulan	13,119,190,109	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/ Bulan	12,419,190,109	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 Dokumen	248,890,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 Dokumen	282,620,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	739,715,963	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	408,892,462	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9,981,440	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	65,250,999	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	128,904,189	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	9,995,250	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	20,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	34,293,274	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	21,793,274	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4,995,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4,995,000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	615,200,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	208,199,999	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	49,170,800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	28,935,500	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	49,170,800	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	28,935,500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan	2 Jenis	465,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan	2 Jenis	465,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	124,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	124,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	336,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	336,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	419,986,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	523,577,700	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	112 unit	249,986,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	112 unit	299,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	10,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	30,315,300	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	160,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	194,262,400	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Meningkatnya produksi hasil pertanian		889,857,000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Meningkatnya produksi hasil pertanian		536,449,150	
			Padi	121,32 Ton				Padi	121,32 Ton		
			Jagung	120,924 Ton				Jagung	120,924 Ton		
			Kacang tanah	836 Ton				Kacang tanah	836 Ton		
			Manggis	480 Ton				Manggis	480 Ton		
			Cabe	7,53 Ton				Cabe	7,53 Ton		
			Bawang merah	4,655 Ton				Bawang merah	4,655 Ton		
			Kelapa Sawit	72,968 Ton				Kelapa Sawit	72,968 Ton		
			Kopi	3,862 Ton				Kopi	3,862 Ton		
			Porang	220 Ton				Porang	220 Ton		
			Durian	36 Ton				Durian	36 Ton		
			Kapulaga	5,973 Ton				Kapulaga	5,973 Ton		
			Populasi ternak besar	25000 Ekor				Populasi ternak besar	25000 Ekor		
			Telor	470,03 Ton				Telor	470,03 Ton		

	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100%	100,000,000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100%	78,902,150	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah petani yang mengikuti pelatihan penggunaan sarana pasca panen komoditi tanaman pangan	50 Orang	100,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah petani yang mengikuti pelatihan penggunaan sarana pasca panen komoditi tanaman pangan	50 Orang	78,902,150	
			Jumlah kelembagaan UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan) yang terbentuk	25 Unit				Jumlah kelembagaan UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan) yang terbentuk	25 Unit		
			Jumlah bantuan alsintan yang diawasi (brigade alsintan)	120 Unit				Jumlah bantuan alsintan yang diawasi (brigade alsintan)	120 Unit		
			Jumlah petani yang didampingi penyusunan RDKK, update dan entry data e-RDKK, serta verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi	1000 Orang				Jumlah petani yang didampingi penyusunan RDKK, update dan entry data e-RDKK, serta verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi	1000 Orang		
			Pendampingan alsintan (Pendukung SSK) seperti : Handsprayer, Mesin Potong Rumput dan Pompa Air	0 Unit				Pendampingan alsintan (Pendukung SSK) seperti : Handsprayer, Mesin Potong Rumput dan Pompa Air	0 Unit		

	Pengelolaan Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemakaian bibit bersertifikat	100%	789,857,000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemakaian bibit bersertifikat	100%	457,547,000
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Luasan pemakaian bibit unggul tanaman padi yang disebarkan (Padi sawah atau padi ladang) spesifik lokasi	0 Hektar	90,000,000	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Luasan pemakaian bibit unggul tanaman padi yang disebarkan (Padi sawah atau padi ladang) spesifik lokasi	0 Hektar	107,000,000
		Terlaksananya Pengembangan Benih Unggul Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman Hortikultura	0 Kegiatan			Terlaksananya Pengembangan Benih Unggul Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman Hortikultura	0 Kegiatan	
		Penambahan luasan kawasan cabai	0 Hektar			Penambahan luasan kawasan cabai	0 Hektar	
		Penambahan luasan kawasan Bawang Merah	0 Hektar			Penambahan luasan kawasan Bawang Merah	0 Hektar	
		Penambahan luasan kawasan Manggis	0 Hektar			Penambahan luasan kawasan Manggis	0 Hektar	
		Penambahan luasan kawasan Durian	0 Hektar			Penambahan luasan kawasan Durian	0 Hektar	
		Penambahan luasan kawasan Pisang Roti Solsel	0 Hektar			Penambahan luasan kawasan Pisang Roti Solsel	0 Hektar	
		Jumlah Angka Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)	3000 Ekor			Jumlah Angka Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)	3000 Ekor	

		Jumlah BBI yang dikelola	1 Unit		
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Optimalnya pemanfaatan SDG dan benih berlabel komoditi tanaman pangan/benih Padi		619,857,000	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
		Jumlah luasan pemakaian bibit unggul tanaman pangan			
		- Luasan pemakaian bibit unggul benih kacang tanah	30 Ha		
		- Luasan pemakaian bibit unggul benih porang	30 Ha		
		- Luasan pemakaian bibit unggul benih Padi	1750 Ha		
		- Luasan pemakaian bibit unggul benih Jagung	5200 Ha		
		Jumlah luasan bibit unggul tanaman hortikultura			
		- Luasan pemakaian bibit unggul cabai	5 Ha		
		- Luasan pemakaian bibit unggul bawang merah	5 Ha		

		Jumlah BBI yang dikelola	1 Unit		
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Optimalnya pemanfaatan SDG dan benih berlabel komoditi tanaman pangan/benih Padi		300,547,000	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
		Jumlah luasan pemakaian bibit unggul tanaman pangan			
		- Luasan pemakaian bibit unggul benih kacang tanah	30 Ha		
		- Luasan pemakaian bibit unggul benih porang	30 Ha		
		- Luasan pemakaian bibit unggul benih Padi	1750 Ha		
		- Luasan pemakaian bibit unggul benih Jagung	5200 Ha		
		Jumlah luasan bibit unggul tanaman hortikultura			
		- Luasan pemakaian bibit unggul cabai	5 Ha		
		- Luasan pemakaian bibit unggul bawang merah	5 Ha		

		- Luasan pemakaian bibit unggul manggis	10 Ha			- Luasan pemakaian bibit unggul manggis	10 Ha
		- Luasan pemakaian bibit unggul durian	5 Ha			- Luasan pemakaian bibit unggul durian	5 Ha
		- Luasan pemakaian bibit unggul pisang roti solsel	5 Ha			- Luasan pemakaian bibit unggul pisang roti solsel	5 Ha
		Jumlah luasan bibit unggul tanaman perkebunan				Jumlah luasan bibit unggul tanaman perkebunan	
		- Jumlah luasan pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan/sawit	100 Ha			- Jumlah luasan pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan/sawit	100 Ha
		- Jumlah luasan pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan/kopi	30 Ha			- Jumlah luasan pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan/kopi	30 Ha
		- Jumlah pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan/pinang	10 Ha			- Jumlah pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan/pinang	10 Ha
		Meningkatnya pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan/sawit	0 Ha			Meningkatnya pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan/sawit	0 Ha

		Meningkatnya pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan/kopi arabika	0 Ha			Meningkatnya pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan/kopi arabika	0 Ha	
		Meningkatnya pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan/pinang	0 Ha			Meningkatnya pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan/pinang	0 Ha	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah varietas komoditi tanaman pangan yang di murnikan (padi sawah dan padi ladang), 2 MT setiap tahun	1 Varietas	80,000,000	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah varietas komoditi tanaman pangan yang di murnikan (padi sawah dan padi ladang), 2 MT setiap tahun	1 Varietas	50,000,000
		Jumlah varietas komoditi tanaman hortikultura yang dimurnikan pada penangkar (cabe kaput, manggis dan durian)	1 Varietas			Jumlah varietas komoditi tanaman hortikultura yang dimurnikan pada penangkar (cabe kaput, manggis dan durian)	1 Varietas	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase perlaksanaan Penyedian Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Makanan ternak	100%	-	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase perlaksanaan Penyedian Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Makanan ternak	100%	-
	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Ternak Sapi yang Didistribusikan	835 Ekor	-	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Ternak Sapi yang Didistribusikan	835 Ekor	-
		Jumlah Unggas Yang didistribusikan	0 Ekor			Jumlah Unggas Yang didistribusikan	0 Ekor	

	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Produktifitas hasil pertanian		158,747,600	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		Padi	5,71 Ton/Ha		
		Jagung	5,80 Ton/Ha		
		Kacang tanah	1,69/Ton/Ha		
		Kelapa Sawit	12,05 Ton/Ha		
		Kopi	2,4 Ton/Ha		
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan Prasana Pertanian yang dimanfaatkan	100%	80,850,000	Pengembangan Prasarana Pertanian
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Ketersedian Cost Sharing kegiatan APBN (Operasional, Perencanaan dan Pengawasan RJIT, Embung, dll)	100%	80,850,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
		Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung peningkatan produksi komoditi tanaman pangan dari hilir hingga hulu	0 Kali		
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian yang dimanfaatkan	100%	77,897,600	Pembangunan Prasarana Pertanian

Meningkatnya Produktifitas hasil pertanian		301,366,000
Padi	5,71 Ton/Ha	
Jagung	5,80 Ton/Ha	
Kacang tanah	1,69/Ton/Ha	
Kelapa Sawit	12,05 Ton/Ha	
Kopi	2,4 Ton/Ha	
Persentase pengembangan Prasana Pertanian yang dimanfaatkan	100%	51,366,000
Ketersedian Cost Sharing kegiatan APBN (Operasional, Perencanaan dan Pengawasan RJIT, Embung, dll)	100%	51,366,000
Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung peningkatan produksi komoditi tanaman pangan dari hilir hingga hulu	0 Kali	
Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian yang dimanfaatkan	100%	250,000,000

	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang direhab/dibangun	1 unit	17,897,600	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang direhab/dibangun	1 unit	-
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan/Rehabilitasi perbibitan Sapi	1 unit	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan/Rehabilitasi perbibitan Sapi	1 unit	250,000,000
		Jumlah unit kerja puskeswan dan IB dan Screen House	1 unit			Jumlah unit kerja puskeswan dan IB dan Screen House	1 unit	
		Jumlah pembangunan / rehab Screen House	1 unit			Jumlah pembangunan / rehab Screen House	1 unit	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi yang direhab/dibangun		20,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi yang direhab/dibangun		-
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang dikelola	1 unit	40,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang dikelola	1 unit	-
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan penanggulangan kasus penyakit menular (hewan)	100%	116,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan penanggulangan kasus penyakit menular (hewan)	100%	-
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pesentase penjaminan Kesehatan Hewan	100%	60,000,000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pesentase penjaminan Kesehatan Hewan	100%	-
	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Persentase hewan yang tervaksin	65%	60,000,000	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Persentase hewan yang tervaksin	65%	-
		Jumlah hewan yang di vaksin Rabies	2500 ekor			Jumlah hewan yang di vaksin Rabies	2500 ekor	
		Jumlah hewan yang di vaksin SE	1500 Ekor			Jumlah hewan yang di vaksin SE	1500 Ekor	

		Jumlah hewan yang di vaksin jembrana	1000 Ekor			Jumlah hewan yang di vaksin jembrana	1000 Ekor	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Jasa Labortorium dan jasa medik Veteriner	100%	26,000,000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Jasa Labortorium dan jasa medik Veteriner	100%	-
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah ternak yang mendapatkan jasa kesehatan hewan	8000 Ekor	26,000,000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah ternak yang mendapatkan jasa kesehatan hewan	8000 Ekor	-
	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis	100%	30,000,000	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis	100%	-
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk	Jumlah Pelaku/Unit Usaha yang Mendapatkan Pendampingan kelayakan teknis	10 Unit	30,000,000	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk	Jumlah Pelaku/Unit Usaha yang Mendapatkan Pendampingan kelayakan teknis	10 Unit	-
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan penanggulangan bencana pertanian	100%	55,691,750	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan penanggulangan bencana pertanian	100%	20,000,000
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase bencana pertanian yang ditanggulangi	100%	55,691,750	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase bencana pertanian yang ditanggulangi	100%	20,000,000
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Cakupan wilayah pengendalian OPT tanaman pangan (padi)	7 Kecamatan	55,691,750	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Cakupan wilayah pengendalian OPT tanaman pangan (padi)	7 Kecamatan	20,000,000

		Sinkronisasi manajemen dan sistem peringatan awal dalam upaya pengendalian OPT di setiap kecamatan	7 Kecamatan			Sinkronisasi manajemen dan sistem peringatan awal dalam upaya pengendalian OPT di setiap kecamatan	7 Kecamatan	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Sawit, Kopi Arabika dan Pinang	7 Kecamatan			Terkendalinya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Sawit, Kopi Arabika dan Pinang	7 Kecamatan	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	100%	59,951,250	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	100%	600,000,000
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Pertanian	100%	47,951,250	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Pertanian	100%	600,000,000
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan perkebunan yang diawasi	18 Perusahaan	47,951,250	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan perkebunan yang diawasi	18 Perusahaan	600,000,000
	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih / bibit Ternak pemeliharaan fasilitas RPH	100%	12,000,000	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih / bibit Ternak pemeliharaan fasilitas RPH	100%	-
	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah usaha yang difasilitasi	3 Unti	12,000,000	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah usaha yang difasilitasi	3 Unti	-

	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase ketersediaan penyuluh	94.74%	458,752,400	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		Persentase Kelompok tani berdasarkan kelas			
		Pemula	69.01%		
		Lanjut	29.21%		
		Madya	1.60%		
		Utama	0.15%		
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan kelompok tani yang dibina	100%	458,752,400	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan kapasitas SDM	33 Orang	205,000,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
		Jumlah pelatihan Teknis, Temu Teknis, Temu Tugas, Temu Teknologi, Temu Evaluasi, Temu lapang, Workshop dan metodhelogi	12 Kali		
		Terlaksananya penerapan metodologi penyuluhan	8 Metode		
		Tersusunnya Programa Penyuluhan pertanian Nagari, Kecamatan dan Kabupaten	0 Orang		

Persentase ketersediaan penyuluh	94.74%	530,922,450
Persentase Kelompok tani berdasarkan kelas		
Pemula	69.01%	
Lanjut	29.21%	
Madya	1.60%	
Utama	0.15%	
Cakupan kelompok tani yang dibina	100%	530,922,450
Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan kapasitas SDM	33 Orang	220,000,000
Jumlah pelatihan Teknis, Temu Teknis, Temu Tugas, Temu Teknologi, Temu Evaluasi, Temu lapang, Workshop dan metodhelogi	12 Kali	
Terlaksananya penerapan metodologi penyuluhan	8 Metode	
Tersusunnya Programa Penyuluhan pertanian Nagari, Kecamatan dan Kabupaten	0 Orang	

		Terlaksananya pertemuan (Rapat Teknis, Temu Teknis, Temu Tugas, Temu Teknologi, Temu Evaluasi, Temu lapang, Workshop dll)	0 Kali			Terlaksananya pertemuan (Rapat Teknis, Temu Teknis, Temu Tugas, Temu Teknologi, Temu Evaluasi, Temu lapang, Workshop dll)	0 Kali	
		Training BPP (7 BPP)	0 Kali			Training BPP (7 BPP)	0 Kali	
		Penilaian berprestasi ketenagaan dan Kelembagaan penyuluh dan petani	0 BPP			Penilaian berprestasi ketenagaan dan Kelembagaan penyuluh dan petani	0 BPP	
		Peningkatan kelembagaan penyuluh	0			Peningkatan kelembagaan penyuluh	0	
		Terlaksananya pembinaan PUAP	39 Gapoktan			Terlaksananya pembinaan PUAP	39 Gapoktan	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terbentuknya Indikasi Geografis Kopi Arabika Solok Selatan	1 Kawasan	74,500,000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terbentuknya Indikasi Geografis Kopi Arabika Solok Selatan	1 Kawasan	75,672,550
		Tersedianya informasi harga komoditi perkebunan	0 Komoditi			Tersedianya informasi harga komoditi perkebunan	0 Komoditi	
		Terdampinginya Kegiatan sumber dana APBN/APBD Prov dan RPL	0 Dipa			Terdampinginya Kegiatan sumber dana APBN/APBD Prov dan RPL	0 Dipa	

		Penumbuhan dan pengembangan Petani milenial, Penumbuhan P4S dan magang, demplot, kaji Terap bagi petani milenial	0 Keltan		
		Peningkatan kelembagaan penyuluhan	0 Keltan		
		Pembinaan kelompok UP3HP	0 Keltan		
		Penumbuhan kelompok UP3HP baru	0 Keltan		
		Sosialisasi dan Pelatihan Pengolahan hasil Pertanian hortikultura	6 Pertemuan		
		Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian	0 Paket		
		Penguatan informasi pasar hasil pertanian	0 Informasi		
		Jumlah pengembangan petani melineal yang dibina	133 Petani		
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase ketersediana sarana dan prasarana penyuluh pertanian	100%	109,002,400	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Penumbuhan dan pengembangan Petani milenial, Penumbuhan P4S dan magang, demplot, kaji Terap bagi petani milenial	0 Keltan	
Peningkatan kelembagaan penyuluhan	0 Keltan	
Pembinaan kelompok UP3HP	0 Keltan	
Penumbuhan kelompok UP3HP baru	0 Keltan	
Sosialisasi dan Pelatihan Pengolahan hasil Pertanian hortikultura	6 Pertemuan	
Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian	0 Paket	
Penguatan informasi pasar hasil pertanian	0 Informasi	
Jumlah pengembangan petani melineal yang dibina	133 Petani	
Persentase ketersediana sarana dan prasarana penyuluh pertanian	100%	85,249,900

		Sarana dan Prasarana IT bagi BPP	0 BPP			Sarana dan Prasarana IT bagi BPP	0 BPP	
		Demplot BPP	0 Demplot			Demplot BPP	0 Demplot	
		Honor Admin Kostratani	0 Orang			Honor Admin Kostratani	0 Orang	
		Paket Data Admin BPP	0 Tahun			Paket Data Admin BPP	0 Tahun	
		Penyediaan sarana Penyuluhan elektronik dan media lainnya bagi BPP dan Posluhnag	0 Tahun			Penyediaan sarana Penyuluhan elektronik dan media lainnya bagi BPP dan Posluhnag	0 Tahun	
		Penyediaan sarana pertemuan BPP	0 BPP			Penyediaan sarana pertemuan BPP	0 BPP	
		Tersedianya operasional Kantor BPP	0 BPP			Tersedianya operasional Kantor BPP	0 BPP	
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan	24 Kali	70,250,000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan	24 Kali	150,000,000
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan penanggulangan kasus penyakit menular (hewan)	100%	278,974,000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan penanggulangan kasus penyakit menular (hewan)	100%	127,000,000
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pesentase penjaminan Kesehatan Hewan	100%	278,974,000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pesentase penjaminan Kesehatan Hewan	100%	127,000,000
	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Pesentase penjaminan Kesehatan Hewan	100%	278,974,000	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Pesentase penjaminan Kesehatan Hewan	100%	127,000,000

	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi hasil pertanian		154,219,637	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi hasil pertanian		175,000,000
		Padi	121,32 Ton			Padi	121,32 Ton	
		Jagung	120,924 Ton			Jagung	120,924 Ton	
		Kacang tanah	836 Ton			Kacang tanah	836 Ton	
		Manggis	480 Ton			Manggis	480 Ton	
		Cabe	7,53 Ton			Cabe	7,53 Ton	
		Bawang merah	4,655 Ton			Bawang merah	4,655 Ton	
		Kelapa Sawit	72,968 Ton			Kelapa Sawit	72,968 Ton	
		Kopi	3,862 Ton			Kopi	3,862 Ton	
		Porang	220 Ton			Porang	220 Ton	
		Durian	36 Ton			Durian	36 Ton	
		Kapulaga	5,973 Ton			Kapulaga	5,973 Ton	
		Populasi ternak besar	25000 Ekor			Populasi ternak besar	25000 Ekor	
		Telor	470,03 Ton			Telor	470,03 Ton	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemakaian bibit bersertifikat	100%	154,219,637	Pengelolaan Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemakaian bibit bersertifikat	100%	175,000,000
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Persentase pemakaian bibit bersertifikat	100%	120,000,000	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Persentase pemakaian bibit bersertifikat	100%	133,880,363
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	34,219,637	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	41,119,637
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	65 Ton/ Tahun	390,109,500	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	65 Ton/ Tahun	433,000,000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	390,109,500	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	433,000,000

	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Perikanan yang Beroperasi	30 Pokdakan	390,109,500	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Perikanan yang Beroperasi	30 Pokdakan	433,000,000

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan dalam pembuatan program dan kegiatan tahun 2025 dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku yang berkepentingan, seperti usulan dari kelompok masyarakat, LSM, kelompok tani, asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi dan lain-lainnya.

Program dan kegiatan tersebut diperoleh melalui hasil Musrenbang, proposal dan usulan aspirasi masyarakat yang terhimpun dalam rekapitulasi usulan program dan kegiatan. Usulan-usulan tersebut masih harus diseleksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan dan skala perioritas arah kebijakan pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan Kabupaten Solok Selatan serta berdasarkan segi kelayakan teknis program dan kegiatan.

Hasil usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 Kabupaten Solok Selatan belum dapat disajikan karena Musrenbang dan Forum OPD belum dilkasanakan

Tabel 2.5 Rekap Usulan Musrenbag (Pokok-Pokok Pikiran) Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	PAGU
1	Pengadaan bibit tanaman perkebunan (Bibit/kecambah sawit, pinang, kulit manis, Kopi, Karet dll)	Adanya Lahan Kosong Milik Masyarakat yang berpotensi untuk di tanami (ALPOKAT, KOPI DAN KEMIRI) 500.000 Batang	Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Utara	
2	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Lingkar Sawahtau Ke Kandang Baniah (750 Meter)	Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Tengah	
3	Bantuan Bibit Ikan Budidaya	Pengadaan Bibit Ikan Hias Untuk Di kembangkan di Nagari Pakan Rabaa Selatan	Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa	
4	Pengadaan bibit tanaman pangan	Bantuan Bibit Produktif untuk ketahanan Pangan Di Nagari Pakan Rabaa Tengah	Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Tengah	
5	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Lanjutan Rabat Beton Jalan Lingkar Sawah Tau sepanjang 750 Meter	Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Tengah	
6	Pengadaaan teknologi tepat guna pertanian / alat pertanian / Alsintan/Sapr odi	Bantuan Mesin Bajak Dan Alsintan Untuk Kelompok Tani Di Nagari Pakan Rabaa Timur Sebanyak 10 Kelompok Tani	Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Timur	
7	Pengadaan bibit tanaman hortikultura	Pengadaan Bibit Bawang Merah Untuk Kelompok Tani di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Sebanayak 12 Ton	Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Utara	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Kondisi pembangunan pertanian saat ini dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang tidak ringan, di samping gerak dinamika lingkungan strategis internasional, regional dan lokal yang semakin kompleks, untuk itu dibutuhkan kerjasama dan komitmen oleh para pelaku pembangunan pertanian di berbagai jenjang pemerintahan yang disesuaikan dengan karakteristik prospek dan potensi yang ada di masing- masing daerah. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2021- 2026.

Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan pertanian dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dirumuskan tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu komoditi pertanian
2. Meningkatkan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan

kelembagaan bagi pelaku utama

3. Meningkatkan pelayanan pencegahan dan
4. penanggulangan penyakit hewan

Sasaran yang hendak dicapai dan menjadi acuan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan diadopsi dari Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan. Sasaran harus disusun secara konsisten dengan rumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sasaran Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian
2. Meningkatnya nilai tambah komoditi pertanian
3. Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani
4. Meminimalkan penyakit hewan

Kegiatan pembangunan Pertanian 2026 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan strategis Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan yang mempunyai beberapa sasaran utama pada tahun 2026 yaitu :

3.2.1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian

Salah satu kegiatan utama sektor pertanian adalah usaha pertanian yang menghasilkan produksi komoditas pertanian primer, mencakup komoditas tanaman pangan (komoditi padi dan palawija), komoditas hortikultura (komoditi buah- buahan), komoditas perkebunan (kopi, karet, kelapa sawit) dan komoditas peternakan (daging, telur). Pada periode 5 (lima) tahun ke depan (2023-2026), sasaran peningkatan produksi akan lebih difokuskan kepada komoditi utama padi, komoditi jagung, komoditi jeruk, komoditi manggis, komoditi kopi, karet, kelapa sawit, daging dan telur.Produksi Komoditi Tanaman Pangan

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah

meningkatkan produksi padi sebesar 121.320 ton, produksi jagung yang ingin dicapai pada tahun 2025 sebesar 120.924 ton.

a. Produksi Komoditi Hortikultura

Pada tahun 2025, target produksi komoditi cabe sebesar 753 ton, produksi komoditi manggis sebesar 480 ton, produksi komoditi bawang merah sebesar 2.231 ton.

b. Produksi Komoditi Perkebunan

Selain target komoditi hortikultura, pencapaian produksi komoditi perkebunan pada tahun 2025 : 1) produksi komoditi kopi sebesar 3.862 ton, 2) produksi komoditi kelapa sawit sebesar 72.968 ton.

c. Produksi Peternakan

Target populasi ternak besar sebesar 2.501 ekor dan produksi telur sebesar 470 ton tahun 2025.

3.2.2. Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan Petani Peningkatan kemampuan kelembagaan petani pada tahun 2025 meliputi :

a. Jumlah kelompok pemula sebanyak 69,01 persen
b. Jumlah kelompok lanjut sebanyak 29,21 persen
c. Jumlah kelompok madya sebanyak 1,6 persen
d. Jumlah kelompok utama sebanyak 0,15 persen
e. Meminimalkan Penyakit Hewan

Untuk mendapatkan produksi peternakan yang optimum, perlu dilakukan usaha pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak. Persentase hewan yang terfaksin pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 65 persen.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 merupakan implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka melaksanakan visi dan misi pembangunan daerah sektor pertanian,

peternakan dan perkebunan di Kabupaten Solok Selatan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026
2. Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan dalam mencapai pembangunan pertanian Hasil Musrenbang, reses DPRD, masukan/proposal masyarakat petani dan usulan partisipatif lainnya

Program dan kegiatan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 meliputi 10 program, 20 kegiatan dan 39 subkegiatan, UPTD Balai Benih Induk meliputi 1 program 1 kegiatan 2 subkegiatan dan UPTD Pusat Kesehatan Hewan meliputi 1 program 1 kegiatan 1 subkegiatan dan Upt BBI Perikanan meliputi 1 Program 1 kegiatan dan 1 Subkegiatan. Total kebutuhan dana/pagu indikatif Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp. 17.522.953.371,- sedangkan sifat penyebaran

lokasi program dan kegiatan terfokus pada kawasan sektor pertanian, kelompok tani atau masyarakat.

Pagu Indikatif

Program dan kegiatan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

TABEL 3.1 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN - TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN						16.787.953.371,00							20.187.903.069,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						281.000.000,00							470.195.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						281.000.000,00							470.195.000,00	
I.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***Skor pola pangan harapan***	-			**85 persen**	**181.000.000,00**						-	**387.145.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Skor Pola Pangan Harapan*	-			85 skor	60.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Masyarakat	-	187.935.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Masyarakat	103.125.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi Stok Pangan				1 Dokumen	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Masyarakat		84.810.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah cadagan pangan pemerintah dan masyarakat*	-			17 Ton	50.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Masyarakat	-	91.410.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				17 Ton	50.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan /Pencegahan transformasi ekonomi yang inklusif	Masyarakat		91.410.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	-			2 Kelompok	71.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan /Pencegahan transformasi ekonomi yang inklusif	Masyarakat	-	107.800.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				2 Laporan	71.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan /Pencegahan transformasi ekonomi yang inklusif	Masyarakat		107.800.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***persentase nagari rawan pangan yang ditangani***	-			**100 persen**	**100.000.000,00**						-	**83.050.000,00**	

	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitasi Penanggulan Kerawanan Pangan*	-			7 Kali	100.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Masyarakat	-	83.050.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2025	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Masyarakat		83.050.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**16.506.953.371,00**							**19.717.708.069,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**390.000.000,00**							**467.715.000,00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)***	-			**3595 Ton/Tahun**	**320.000.000,00**						-	**311.973.000,00**	

	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan yang Dibina*	-			35 kelompok	200.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Pembudidaya Ikan	-	154.465.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				35 Kelompok	200.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Pembudidaya Ikan		154.465.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah unit Perikanan Yang Beroperasi*	-			30 Pokdakan	120.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Pembudidaya Ikan	-	157.508.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit	120.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Pembudidaya Ikan		157.508.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Jumlah Polahsar (Kelompok pengolahan dan pemasaran) Tingkat konsumsi ikan***	-			**18 Kelompok 34,20 kg/per kapita/tahun**	**70.000.000,00**						-	**155.742.000,00**	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah kali pertemuan pelaku usaha perikanan*	-			2 Kali	70.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Pelaku Usaha Perikanan	-	155.742.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				18 Pelaku Usaha	70.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Pelaku Usaha Perikanan		155.742.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**16.116.953.371,00**							**19.249.993.069,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Cakupan Layanan Operasional Kantor*	-			**100 Persen**	**14.128.215.771,00**						-	**16.053.997.709,00**	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Keuangan*	-			100 %	12.701.810.109,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	14.704.868.120,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				118 Orang/bulan	12.419.190.109,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		14.431.199.120,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				17 Dokumen	282.620.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		273.779.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	408.892.462,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	321.437.559,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	25.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		10.979.584,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	128.904.189,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		40.976.099,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	20.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		10.994.775,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	21.793.274,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		23.972.601,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4.995.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		5.494.500,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	208.199.999,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		229.020.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah*	-			100 Persen	28.935.500,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	54.087.880,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	28.935.500,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		54.087.880,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan*	-			2 Jenis	465.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	511.599.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		5.500.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	124.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		136.400.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	336.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		359.699.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara*	-			100 Persen	523.577.700,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	461.985.150,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				112 Unit	299.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		274.985.150,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	30.315.300,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		11.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	194.262.400,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		176.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Meningkatnya Produksi hasil Jagung Meningkatnya Produksi hasil pertanian Padi Meningkatnya Produksi hasil Porang Meningkatnya Produksi hasil populasi ternak besar Meningkatnya Produksi hasil Durian Meningkatnya Produksi hasil Kopi Meningkatnya Produksi hasil Bawang Merah Meningkatnya Produksi Telur Meningkatnya Produksi hasil Manggis Meningkatnya Produksi hasil Kapulaga Meningkatnya Produksi Hasil Kelapa Sawit Meningkatnya Produksi hasil Cabe Meningkatnya Produksi hasil Kacang Tanah***	-			**120924 Ton 121320 Ton 220 Ton 25010 Ekor 36 Ton 3862 Ton 4655 Ton 470,03 Ton 480 Ton 5973 Ton 72968 Ton 7539 Ton 836 Ton**	**536.449.150,00**					-	**2.203.142.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	-			100 Persen	78.902.150,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani	-	132.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	78.902.150,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani		132.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase pemakaian bibit bersertifikat*	-			100 Persen	457.547.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani	-	943.642.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman															
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	107.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani		134.750.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman															
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	300.547.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani		705.492.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				1 Varietas Unggul Baru (VUB)	50.000.000,00	Kab, Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani		103.400.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Persentase pelaksanaan Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Makanan ternak*	-			100 %	0,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani	-	1.127.500.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				10 Dosis	0,00	Kab, Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani		1.127.500.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Produktifitas pertanian Kelapa sawit (Ton/Ha) Produktivitas pertanian Ton/Ha/Tahun (Kacang Tanah) Produktivitas pertanian Ton/Ha/Tahun (Kacang Tanah) Produktifitas pertanian Kelapa sawit (Ton/Ha) Produktifitas Pertanian Kopi Produktifitas Pertanian (Ton/Ha) (Padi) Produktifitas Pertanian (Jagung)***	-			**12,05 Ton/Ha 1.59 Ton/Ha 169 Ton/Ha 18,70 Ton/Ha 2,4 Ton/Ha 5,71 Ton/Ha 5,80 Ton/Ha**	**301.366.000,00**						-	**294.935.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Persentase pengembangan Prasana Pertanian yang dimanfaatkan*	-			100 Persen	51.366.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani	-	105.985.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	51.366.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani		105.985.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian yang dimanfaatkan*	-			100 Persen	250.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani	-	188.950.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET				PRIORITAS				

		KEGIATAN		OPD	TAHUN 2023	2024	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani		27.500.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit														
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Kelompok Tani		131.200.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Kelompok Tani		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah jaringan irigasi/usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani		30.250.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Cakupan Penanggulangan Bencana Pertanian (Rata)***	-			**100 Persen**	**20.000.000,00**						-	**73.635.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Persentase bencana pertanian yang ditanggulangi*	-			100 Persen	20.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani	-	73.635.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				20 Ha	20.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani		73.635.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	***Persentase rekomendasi yang dikeluarkan***	-			**100 Persen**	**600.000.000,00**						-	**64.295.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian* *Persentase fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Pertanian*	-			100 Persen 100 %	600.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perusahaan Pertanian	-	64.296.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	600.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perusahaan Pertanian		64.296.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Persentase peningkatan Kelas Kelompok Tani (Utama)*** ***Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani (Madya)*** ***Persentase peningkatan Kelas Kelompok Tani (Lanjut)*** ***Persentase peningkatan Kelas Kelompok Tani (Pemula)*** ***Persentase ketersediaan penyuluh***	-			**0,15 Persen** **1,622** **Persen** **29,21** **Persen** **69.01** **Persen** **94,74** **Persen**	**530.922.459,00**						-	**559.987.360,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Cakupan kelompok tani yang dibina*	-			100 Persen	530.922.450,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani	-	559.987.360,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa															
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Unit	220.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani		242.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa															
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Unit	75.672.550,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani		94.212.360,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				7 Unit	85.249.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani		130.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				7 Unit	150.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani		93.775.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		UPTD PUSKESWAN						**127.000.000,00**							**338.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**127.000.000,00**							**338.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**127.000.000,00**							**338.000.000,00**	
1.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Cakupan Penanggulangan Kasus penyakit menular hewan***	-			**100 Persen**	**127.000.000,00**						-	**338.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Pesentase penjaminan Kesehatan Hewan Pesentase penjaminan Kesehatan Hewan*	-			100 % 100 Persen	127.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Masyarakat	-	338.000.000,00	UPTD PUSKESWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				1 Wilayah	127.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Perlumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Masyarakat	338.060.000,00		UPTD PUSKESWAN
		UPTD BALAI BENIH						**175.000.000,00**							**184.820.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**175.000.000,00**							**184.820.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**175.000.000,00**							**184.820.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Meningkatnya Produksi hasil Jagung*** ***Meningkatnya Produksi hasil pertanian Padi*** ***Meningkatnya Produksi hasil Porang*** ***Meningkatnya Produksi hasil populasi ternak besar*** ***Meningkatnya Produksi hasil Durian*** ***Meningkatnya Produksi hasil Kopi*** ***Meningkatnya Produksi hasil Bawang Merah*** ***Meningkatnya Produksi Telur*** ***Meningkatnya Produksi hasil Manggis*** ***Meningkatnya Produksi hasil Kapulaga*** ***Meningkatnya Produksi Hasil Kelapa Sawit*** ***Meningkatnya Produksi hasil Cabe*** ***Meningkatnya Produksi hasil Kacang Tanah***	-			**120924 Ton** **121,320 Ton** **220 Ton** **25010 Liter** **36 Ton** **3862 Ton** **4855 Ton** **470,03 Ton** **480 Ton** **5973 Ton** **72968 Ton** **7530 Ton** **636 Ton**	**175.000.000,00**						-	**184.820.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET				PRIORITAS				

		KEGIATAN		OPD	TAHUN 2023	2024	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase pemakaian bibit bersertifikat*	-			100 Persen	175.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani	-	184.820.000,00	UPTD BALAI BENIH
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	133.880.363,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani		139.590.000,00	UPTD BALAI BENIH
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	41.119.637,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Tani		45.230.000,00	UPTD BALAI BENIH
		UPTD BBI PAKAN SALASA						**433.000.000,00**							**442.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**433.000.000,00**							**442.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**433.000.000,00**							**442.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)***	-			**3595 Ton/Tahun**	**433.000.000,00**						-	**442.000.000,00**	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah unit Perikanan Yang Beroperasi*	-			30 Poktakan	433.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Pembudidaya Ikan	-	442.000.000,00	UPTD BBI PAKAN SALASA
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	433.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Kelompok Pembudidaya Ikan		442.000.000,00	UPTD BBI PAKAN SALASA
	JUMLAH							**17.522.953.371,00**							**21.152.723.069,00**	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan yang berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 yang meliputi yaitu :

A. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
   - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
   - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
   - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun pagu anggaran sebesar Rp. 0,-
   - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal pagu anggaran sebesar Rp. 71.000.000,-
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun pagu anggaran sebesar Rp. 0,-

B. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-

C. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

- Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-

2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota dana pagu anggaran Rp. 120.000.000,-

D. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil pagu anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-

E. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu anggaran sebesar Rp. 12.419.190.109,-
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pagu anggaran sebesar Rp. 282.620.000,-

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pagu anggaran sebesar Rp. 128.904.189,-
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pagu anggaran sebesar Rp. 21.793.274,-
- Fasilitasi Kunjungan Tamu pagu anggaran sebesar Rp. 4.995.000,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pagu anggaran sebesar Rp. 208.199.999,-

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Mebel pagu anggaran sebesar Rp. 28.935.500,-
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-

   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pagu anggaran sebesar Rp. 124.000.000,-

   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pagu anggaran sebesar Rp. 336.000.000,-
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pagu anggaran sebesar Rp. 299.000.000,-
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pagu anggaran sebesar Rp. 30.315.300,-
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pagu anggaran sebesar Rp. 194.262.400,-

F. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
   - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian pagu anggaran sebesar Rp. 78.902.150,-
2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman pagu anggaran sebesar Rp. 107.000.000,-
   - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman pagu anggaran sebesar Rp. 300.547.000,-
   - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Rp. 50.000.000,-
3. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
   - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain pagu anggaran sebesar Rp. 0,-

G. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

1. Pengembangan Prasarana Pertanian
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya pagu anggaran sebesar Rp. 51.366.000,-
   Pembangunan Prasarana Pertanian
   - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani pagu anggaran sebesar Rp. 0,-
   - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-
   - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani pagu anggaran sebesar Rp. 0,-

- Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan pagu anggaran sebesar Rp. 0,-

H. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
   - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-
2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner pagu anggaran sebesar Rp. 26.000.000,-
3. Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
   - Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-

I. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
   - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-

J. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian pagu anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-
2. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit

Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

- Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan pagu anggaran sebesar Rp. 0,-

K. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
   - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa pagu anggaran sebesar Rp. 220.000.000,-
   - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa pagu anggaran sebesar Rp. 75.672.550,-
   - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian pagu anggaran sebesar Rp. 85.249.900,-
   - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-

UPT Pusat Kesehatan Hewan

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
   - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan pagu anggaran sebesar Rp. 127.000.000,-

UPT Balai Benih Induk Pertanian

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1. Pengelolaan Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan,

dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman pagu anggaran sebesar Rp. 133.880.363,-
- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman pagu anggaran sebesar Rp. 34.219.637,-

UPT Balai Benih Ikan

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
    - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota pagu anggaran sebesar Rp. 433.000.000,-

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru,yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan adalah program dan kegiatan tahunan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.

Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan, selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Padang Aro . 2024
Kepala Dinas

drh. Nurhayati
NIP. 196702011999032003

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 merupakan kewajiban Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Renja disusun sebagai pegangan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam mengelola Keuangan guna melaksanakan program/ kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Solok Selatan 2024.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, maka segala kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun anggaran 2025 difokuskan pada Renja tersebut.

Kami menyadari Renja ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Mudah-mudahan Renja ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan.

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Renja ini. Dan semua pihak yang membuat dalam penyusunan Renja ini, kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Padang Aro.
Pada tanggal Juli 2024
KEPALA

Drs. PUTRA NUSA, M.Pd, MM
NIP. 196501081991031005

DAFTAR ISI

				Hal
KATA PENGANTAR			.....	1
DAFTAR ISI			.....	2
DAFTAR TABEL				
Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024	.....	13
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (SPM dan IKK)	.....	23
Tabel	2.3	Review Tehadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	.....	28
Tabel	2.4	Usula Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	.....	35
BAB I		PENDAHULUAN		
	1.1	Latar Belakang	.....	3
	1.2	Landasan Hukum	.....	4
	1.3	Maksud dan Tujuan	.....	6
	1.4	Sistematika Penulisan	.....	7
BAB II		HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	.....	8
	2.2	Aalisis Kierja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	.....	21
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaupate Solok Selatan	.....	25
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	27
	2.5	Peelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	.....	34
BAB III		TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	.....	36
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	.....	37
	3.3	Program dan Kegiatan	.....	39
BAB IV		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	.....	43
BAB V		PENUTUP	.....	49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembang,unan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk periode 6 (Enam) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah Dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas embangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Didalam renja perangkat daerah juga permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran renstra perangkat daerah dan RKPD sebagai rencana tahunan daerah. Selain guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada usulan kegiatan dari masing-masing bidang secara formal yang diinformasikan melalui forum musyarawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024. Dan untuk tahun 2026 nantinya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang juga akan mempedomani RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja ini memiliki keterkaiatan erat dengan Dokumen Perencanaa lain karena disusun dengan megacu kepada RPJMD Kaupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan segenap pemangku kepentingan (Stakerholder) dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD Daerah menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahunan dan Renstra Perangkat Daerah.

I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 153 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro,menengah, meningkatkan investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional;
7. Peraturan Pemerintah No 12 Th 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
20. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

I.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan bidang Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025.
2. Sebagai alat ukur penetapan kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan ke depan yang terarah dan terukur.
2. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Untuk menjabarkan visi, misi program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 serta merealisasikannya dalam Perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama kurun waktu 1(satu) tahun.
4. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Solok Selatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
5.

I.4. Sistimatika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pada Bab ini menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini menjelaskan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah dan Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada Bab ini memuat tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan maju Tahun 2025

BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Solok Selatan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai salah satu pelaksana kewenangan daerah otonom sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Perda Nom 06 Tahun 2008, menjalankan 2 (dua) urusan guna memberikan pelayanan prima kepada publik yaitu urusan Perpustakaan dan Kearsipan. Pada Rencana Kerja Tahunan (Renja) Tahun 2023 terdapat 5 (Lima) program dan 10 (Sepuluh) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.046.075.717 (Tiga miliar empat puluh enam juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari evaluasi dan penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024 masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat Pemerataan layanan Perpustakaan
2. Belum terpenuhinya koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan
3. Belum tersedianya tenaga perpustakaan yang kompeneten.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya layanan perpustakaan
5. Masih kurangnya perpustakaan yang telah memenuhi SNP
6. Kurangnya minat Masyarakat untuk mengunjungi Perpustakaan
7. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana Kearsipan
8. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah
9. Rendahnya penataan arsip dan dokumen OPD.
10. Terbatasnya sumber daya dalam pengelolaan kearsipan

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maka Pada kelembagaan, perlu

diupayakan penataan dan penguatan kearsipan, peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus didukung oleh sarana dan parasana yang memadai serta didukung oleh dana yang cukup, aparatur yang handal.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi anggarannya dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2023 seperti

1. Program Pembinaan Perpustakaan
   Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan Jumlah Pemustaka yang dikelola
   Indikator Jumlah Karya Cetak yang terhimpun
   Target 8 dengan realisasi 6 %

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun Anggaran 2023, realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan

Adapun realisasi dimaksud adalah sebagai berikut :

I. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

a. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota seperti
   1. Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah
   2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   3. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
   4. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
   5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

II. Urusan Perpustakaan

1. Program Pembinaan Perpustakaan :
   Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Kab/Kota
   A. Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan tinggkat Daerah Kabupaten/Kota
      Indikator
      a. Jumlah Pemustaka di solok selatan yang dihasilkan, target 250 Perpustakaan dengan realisasi 250 Sekolah
      b. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibina, target 12 Sekolah dengan realisasi 21 Sekolah

III. Urusana Kearsipan

1. Jumlah OPD, Nagari, dan Sekolah yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis Target 38 realisasi 39
2. Jumlah Arsip Jumlah Arsip Statis yang bernilai Sejarah yang Terkumpul, Target 1 Dokumen dengan Realisasi 1 Dokumen
3. Jumlah Arsip Pemekaran Daerah yang Diamankan, Target 1 Dokumen dengan realisasi 2 Dokumen

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2023 yaitu pada :

1. Program Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Kab/Kota
   Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan tinggkat Daerah Kabupaten/Kota
   Indikator Jumlah Sekolah yang dibina, Target 12 Sekolah dengan Realisasi 21 Sekolah
2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
   Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabungkan dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan desa/kelurahan
   Sub Kegiatan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan

Indikator Jumalah Arsip Pemekaran Daerah yang diselamatkan, Target 1 Dokumen dengan Realisasi 2 Dokumen.

2.1.4 Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

A. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja prog dan keg

Kurangnya kesadaran dan perhatian akan pentingnya data karya Cetak perangkat Daerah seperti OPD dan Nagari untuk memenuhi Data Karya Cetak yang di himpun

B. Faktor Penyebab terpenuhinya target kinerja dan program kegiatan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan telah terpenuhi target kinerja program kegiatan yaitu 100 persen karena tersedianya SDM dan anggaran yang mendukung kegiatan tersebut

2.1.5 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut

1. Meningkatkan Pembinaan terhadap Perpustakaan sekolah yang sesuai dengan stdandar Nasional Perpustakaan
2. Lebih Meningkatkan Pemeliharaan dan penyusunan Arsip Dinamis
3. Meningkatkan pelaksanaan Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis
4. Melaksanakan pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran Lintas Kabupaten Solok selatan
5. Melanjutkan peningkatan kapasitas SDM Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan melalui kegiatan Forum Group Discussion (FGD).
6. Pemanfaatan gedung layanan perpustakaan yang optimal
7. Penyediaan Gedung Depo Arsip Daerah

Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan ditujukan pada pencapaian visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan guna mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Solok Selatan melalui upaya-upaya peningkatan

dan pengembangan kemampuan baik administrasi maupun teknis operasional dengan mengedepankan prinsip nilai pertanggung jawaban dan profesionalisme.

Berikut tabel mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan dengan format tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel : 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2024

KABUPATEN SOLOK SELATAN

NAMA PD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARIPAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Sat	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
										Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4)
1.24.01					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persen		100	33,33	100	90	90	100	37,22	9,30
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	Jumlah Gaji Tenaga Harian Lepas (TKD)	100	33,33	100	91,9	91,9	100	37,5	24,49

2	23	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	orang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	138	40	20	23	115	25	**25**	**6,2**
2	23	1	2.02	02	Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi kantor	orang	Tersedianya Jasa tenaga pendukung administrasi kantor	24	8	4	2	50	4	**4**	**1**
2	**23**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persen**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**33,33**	**100**	**99,6**	**99,6**	**100**	**38,82**	**9,70**
2	23	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	24	8	4	4	100	4	**4**	**1**
2	23	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24	8	4	7	175	4	**4**	**1**
2	23	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	paket	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	24	8	0	3		4	**4**	**1**
2	23	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	24	8	4	8	200	4	**4**	**1**
2	23	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	24	8	4	3	75	4	**4**	**1**
2	23	1	2.06	09	Penyeleggaraan Rapat Koordinasi dan	laporan	Tersedianya Rapat	24	8	4	8	200	4	**4**	**1**

					Konsultasi SKPD		Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
2	**23**	**1**	**2.07**		**Pegadaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**persen**	**Terlaksananya Pegadaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**33,33**	**100**	**12,1**	**12,1**	**100**	**38,88**	**9,72**
2	23	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	unit	Tersedianya Mebel	40	0	10	86	860	10	**96**	**24**
2	23	1	2.07	10	Pegadaa Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	Jumlah Unit Sarana danPrasarana Gedug Kator da Bangunan Lainnya	8	6						
2	23	1	2.07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	336	56	20	6	30	80	**142**	**35,5**
2	**23**	**1**	**2.08**		**Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persen**	**Terlaksanaanya Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**	**100**	**33,33**	**100**	**299**	**299**	**100**	**72,05**	**18,01**
2	23	1	2.08	01	Penyedian Jasa Surat Menyurat	laporan	Tersedianya Jasa surat Menyurat	100	8	4	12	300	4	**24**	**6**

2	23	1	2.08	02	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik	laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik	24	8	4	12	300	4	**24**	**6**
2	23	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	laporan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24	8	4	12	300	4	**24**	**6**
2	**23**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persen**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**33,33**	**100**	**297**	297	100	**71,72**	**17,93**
2	23	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Layanan	Unit	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Layanan	30	10	5	15	300	5	**30**	**7,5**
2	23	1	2.09	09	Pemeliharaan / Rehailitasi Sarana da Prasana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	Tersedianya Pemeliharaan / Rehailitasi Sarana dan Prasana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan	9	2	1	3	300	2	**2**	**0,5**

							Lainnya								
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**orang**		**100**	**33,33**	**3.500**	**5.320**	**152**	**3700**	**9.120**	**2.280**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persen**	**Terlaksanan ya Pengelolaan Perpustakaa n Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**100**	**33,33**	**100**	**86,5**	**86,5**	**100**	**36,63**	**9,15**
2	**23**	**02**	**02.0 1**	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pustaka	Jumlah Pemustakan di Solok Selatan	**15**	**250**	**250**	**251**	**251**	**250**	**250**	**250**
2	**23**	**02**	**02.0 1**	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dok	Jumlah Regulasi yang dihasilkan	**1**	**0**	**8**	**6**	**75**	**8**	**14**	**3,5**
2	23	02	2.01	01	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standart Nasional Perpustakaan	pustaka	Jumlah Perpustakaa n Sekolah yang dibina	72	24	12	21	**175**	12	**57**	**14,25**
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	persen	Terlaksanany a Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	0	0	4	82	2.050	4	86	**21,5**

2	24	03	02.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Dok	Jumlah Arsip Pemekaran yang terselamatkan	6	1	1	2	**2**	**1**	**4**	**1**

2	23	3	02.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Naskah Kuno yang didaftarkan	5	1	1	82	82	1	84	**21**
2	23	3	02.01	1	Pengembangan, Pengolahan Pengalihmedian Naskah Kuno yang dimilki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Naskah kuno	Jumlah Naskah Kuno yang diolah	4	0	1	3	300	1	1	**0,25**
					BIDANG KEARSIPAN										
2	**24**	**02**			**PROGRAM PEGELOLAAN ARSIP**	**persen**	**Terlaksanaan ya Program Pengelolaan Arsip**	**100**	**33,33**	**100**	**125,69**	**125,69**	**70**	**38,17**	**9,54**
2	24	02	2	01	**Pengelolaa Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota**	**persen**	**Persentase Arsip Daerah yang Dikelola**	**100**	**33,33**	**100**	**135,4**	**135,4**	**100**	**268,73**	**67,18**
2	24	02	02.01		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	OPD	Jumlah Nagari, Sekolah dan OPD yang menerapkan arsip statis baku	33	39	1	1	**1**	**2**	**44,76**	**11,19**
2	24	02	02.01	2	Pegawasan Arip Diamis Kewengenagan Kabupaten/ Kota	OPD	Jumlah Arsip Dinamis OPD yang telah tertata dengan baik	46	18						
2	24	02			Pengelolaan Simpul Jaringan Infromasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Aplikasi	Jumlah Simpul Jaringan dalam sistem informasi kearsipan	5	0						

2	24	02	02.01	2	Penyedian Informasi dan akses layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/Kota melalui JIKN	Aplikasi	Jumlah Aplikasi Layanan Kearsipan Daerah	**5**	**0**						
2	24	02	02.01	3	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten	Orang	Jumlah Pengelola Arsip yang telah memahami Aplikasi JIKN	**120**	**0**						
2	24	02	02.01	4	Pengelolaan Simpul Jaringan Infromasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Aplikasi	Jumlah Simpul Jaringan dalam sistem informasi kearsipan	**1**	**0**						
2	24	2	2	02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota**	**persen**	**Jumlah Arsip Statis bernilai Sejarah Kabupaten Solok Selatan**	**100**	**100**	**100**	**81,7**	**81,7**	**100**	**50**	**12,5**
2	24	02	02.01	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Dok	Jumlah Arsip Statis yang terkumpul	4	0	1	1	**1**	**1**	**2**	**0,5**
2	**24**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**						**97,92**		**1**		**-**
2	**24**	**03**	**02.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkandan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/kelurahan**	**persen**	**Jumlah Arsip Daerah yang terselamatkan**	**100**	**33,33**	**1**	**99**	**99**	**1**	**33,33**	**8,33**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan adalah Pelaksana Teknis Bidang Perpustakaan Kearsipan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Solok Selatan No 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah sertatugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) dinas yang sesuai dengan RPJMD;
b. perumusan LPPD, LKPJ, LKj dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
c. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
d. pengoordinasian perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang
e. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
f. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati
g. pelaksanaan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
h. melakukan pembagian tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pembagian tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasiasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Adapun Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan sesuai Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut :

I. Urusan Perpustakaan :
   1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan
   2. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyrakat
   3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

II. Urusan Kearsipan
   1. Presentase OPD yang menerapkan Arsip secara Baku
   2. Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) pasal 40 dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
   3. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara,pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat di lihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (SPM DAN IKK)

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan(Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PUSTAKA**											
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan		√	3.500	3.700	3.900	4.100	3.500	3.700	3.900	4.100	
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyrakat		√	69	70	71	72	69	70	71	72	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		√	21	22	23	24	21	22	23	24	
II	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PUSTAKA**											
	Presentase OPD yang menerapkan Arsip secara Baku		√	27,27	45,45	60,61	75,76	7,55	45,45	60,61	75,76	

	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) pasal 40 dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	√	√	34	39	44	50	34	39	44	50	
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara,pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		√	3,02	3,16	4,05	4,2	3,02	3,16	4,05	4,2	

2.3 Isu -Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipana Kabupaten Solok Selatan

Berikut isu strategis terkait perumusan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manuasia (terkait dengan Peningkatan kualitas Pendidikan)
2. Peningkatan Pelayanan Publik yang *good governance* (terkait dengan peningkatan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah; Reformasi birokrasi; Profesionalitas ASN; dab indek kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pemerintah)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan Kearsipan.

Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021–2026. VISI Dinas Perpustakaan dan Kearsipan :

"Menjadikan Perpustakaan dan Arsip Bekal Ilmu dan Memori Pemerintah serta sebagai Bukti dan Bahan Pertanggug Jawaban"

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan. Tahun 2021 – 2026

Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan terciptanya pengelolaan bahan kearsipan dan perpustakaan guna aksesbilitas informasi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemerintahan;
2. Mewujudkan terciptanya pelaksanaan akuisisi arsip dan koleksi bahan pustaka guna tercukupinya pengguna arsip dan pustaka;
3. Mewujudkan tersedianya tenaga perpustakaan dan kearsipan yang berkualitas dan profesional;
4. Mewujudkan tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan dan

kearsipan yang memadai;

5. Mewujudkan apresiasi aparatur terhadap perpustakaan dan kearsipan;
6. Mewujudkan terciptanya pelayanan perpustakaan dan kearsipan kepada masyarakat melalui pelayanan prima, dan
7. Mewujudkan terciptanya kerjasama antar lembaga pemerintah maupun swasta dalam/luar negeri dibidang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.

Kebijakan yang diambil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan dalam tercapainya kelancaran dan keterpaduan untuk mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi adalah menetapkan Strategi yang diartikan sebagai langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Dengan memperhatikan permasalahan actual yang dihadapi maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Solok Selatan menetapkan sebagai berikut :

- Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk
- Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite
- Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk
- Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan
- Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat
- Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
- Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip
- Jumlah arsipinaktif yang telahdibuatkan daftar arsip
- Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik
- Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
- Jumlah Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana sesuai NSPK
- Jumlah Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi
- Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Substansi RKPD Tahun 2025 harus selaras dengan Dokumen Perencanaan Tingkat Pusat, Dokumen Perencanaan Tingkat Provinsi dan Dokumen Perencanaan Tingkat Kabupaten serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Solok Selatan sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat kita lihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel : 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan

KODE				Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
				Program / kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Catatan Penting
							Target	Sat					Target	Sat		
				Urusan Pemerintahan Perpustakaan dan Keaqrsipan					3.159.000.000	Urusan Peme rintahan Per pustakaan dan Keaqrsipan					4.566.948.785	
				SEKRETARIAT	sda				**3.159.000.000**	Sekretariat	sda				4.417.903.985	
01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	sda	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	%	**2.369.000.000**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sda	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	%	3.799.021.285	
01	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	sda	Persentase pe menuhan kinerja pelayanan ke uangan PD	100	%	**1.800.200.000**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	sda	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah	100	%	3.006.935.315	
01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	sda	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Orang	1.727.240.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	sda	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Orang	2.945.255.315	
01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	sda	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelak sanaan tugas ASN	4	Orang	72.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	sda	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksa naan tugas ASN	4	Orang	61.680.000	
01	2.03			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	sda	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah	100	%	**301.000.000**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	sda	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	201,085,970	

01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	sda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Jenis	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	sda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Jenis	5,000,000	
01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sda	Jumlah Paket Peralatan dan perlemgkapan kantor yang disediakan	4	Jenis	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sda	Jumlah Paket Peralatan dan perlemgkapan kantor yang disediakan	4	Jenis	26.500,000	
01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	sda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	Jenis	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	sda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	Jenis	15,000,000	
01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	sda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	Jenis	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	sda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	Jenis	25,000,000	
01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	sda	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4	Kotak	4.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	sda	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4	Kotak	6,000,000	
01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	sda	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4	Kali	252.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	sda	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4	Kali	123.585.970	
23	01	2. 07		**Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	sda	Persentase barang milik daerah yang tersedia	100	Unit	**110.000.000**	Pengadaan BMD Penun jang Urusan Pemerintah Daerah	sda	Persentase barang milik daerah yang tersedia	100	Unit	57,000,000	
23	01	2. 07	05	Pengadaan Mebel	sda	Jumlah paket mebel yang disediakan	10	Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	sda	Jumlah paket mebel yang disediakan	10	Unit	57,000,000	
23	01	2. 07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bagunan lainnya	sda	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	80	Unit	60.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bagunan lainnya	sda	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	80	Unit		

23	01	2. 08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	sda	Persentase Jasa Penunjang yang tersedia	100		**32.800.000**	Penyediaan Jasa Penun jang Urusan Pemerintah Daerah	sda	Persentase Jasa Penunjang yang tersedia	100		339.000,000	
23	01	2. 08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	sda	Jumlah lapran penyediaan jasa surat menyurat	4	Buah	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	sda	Jumlah lapran penyediaan jasa surat menyurat	4	Buah	4,000,000	
23	01	2. 08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	sda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	KWH	25.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	sda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	KWH	173.000,000	
23	01	2. 08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4	Unit	5.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4	Unit	15,000,000	
23	01	2. 08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	sda	Jumlah Pelayan Umum Kantor	6	Orang	126.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	sda	Jumlah Pelayan Umum Kantor	6	Orang	147.000.000	
23	01	2. 09		**Pemeliharaan BMD Penujang Urusan Pemerin tah Daerah**	sda	Persentase barang Milik daerah yang terpelihara	100	Unit	**125.000.000**	Pemeliharaan BMD Penujang Urusan Pemerin tah Daerah	sda	Persentase barang Milik daerah yang terpelihara	100%	Unit	195,000,000	
23	01	2. 09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliha raan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasiona l atau lapangan	sda	Jumlah kendaraan per orangan Dinas / kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	Unit	105.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliha raan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasiona l atau lapangan	sda	Jumlah kendaraan per orangan Dinas / kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	Unit	160,000,000	
23	001	2. 09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	sda	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	2	Unit	20.000.000	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	sda	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	2	Unit	35,000,000	

				URUSAN PEMERINTAHAN BID PERPUSTAKAAN	sda				**600,000,000**	Urusan Pemerintahan Bid Perpustakaan	sda				618.882.700	
002				**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**sda**	**Jumlah Kunjungan Perpustakaan (pustaka Konvensional dan Digital)**	**3700**		**600,000,000**	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**sda**	**Jumlah Kunjungan Perpustakaan (pustaka Konvensional dan Digital)**	**3700**		**618.882.700**	
23	002	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	sda	Jumlah Perpustakaan yang dikelola	15	%	**600,000,000**	Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Kab/Kota	sda	Jumlah Perpustakaan yang dikelola	15	Persen	548.946.700	
				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Jumlah pemustaka Elektronik yang terpelihara	250	Orang	250,000,000	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	sda	Jumlah pemustaka Elektronik yang terpelihara	250	Orang		
				Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		jumlah perpustakaan Disolom Selatan,	3	Pustaka	250,000,000	Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	sda	jumlah perpustakaan Di Solok Selatan,	3	Pustaka	459.796.700	
23	002	2.01	003	Pengembangan Kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat daerah kabupaten/kota	sda	Jumlah Regulasi yang dihasilkan,	1	Dokumen	-	Pengembangan Kekhasan koleksi perpus takaan daerah tingkat daerah kab/kota	sda	Jumlah Regulasi yang dihasilkan,	1	Dokumen	-	
						jumlah karya cetak yang terhimpun	8	Judul	32,500,000			jumlah karya cetak yang terhimpun	8	Judul	30,350,000	
23	002	2.01	004	Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	sda	Jumlah Perpustakaan sekolah yang dibina	12	Pustaka	12,500,000	Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar iseluruh wilayah kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	sda	Jumlah Perpustakaan sekolah yang dibina	12	Pustaka	58.800.000	
23	002	2.01		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	sda	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	3	Lomba		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	sda	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	3	Lomba	69.936.000	

23	002	2.01	'01	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	sda	Jumlah Lomba Gemar Membaca	3	Lomba		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	sda	Jumlah Lomba Gemar Membaca	3	Lomba	69.936.000	
				URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG KEARSIPAN	sda				**130.000.000**	Urusan Pemerinahan Bid Kearsipan	sda				149.044.800	
24	002			**PROGRAM PENGELO LAAN ARSIP**	sda	Persentase arsip daerah yang dikelola	70	%	**60.000.000**	**Program Pengelolaan Arsip**	sda	**Persentase arsip daerah yang dikelola**	70	%	97.322.400	
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	sda	Persentase arsip dinamis yang dikelola	100	%	45.000.000	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	sda	Persentase arsip dinamis yang dikelola	100	%	46.705.700	
24	002	2.01		Pemeliharaan dan penyusutan arsip Dinamis	sda	Jumlah arsip dinamis Nagari, Sekolah dan OPD Yang terpelihara	2	OPD	6.000.000	Pemeliharaan dan penyusutan arsip Dinamis	sda	Jumlah arsip dinamis Nagari, Sekolah dan OPD Yang terpelihara	2	OPD	24.682.700	
24	002	2.01	002	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	sda	Jumlah arsip dinamis OPD Yg telah tertata dengan baik	10	OPD	-	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	sda	Jumlah arsip dinamis OPD Yang telah tertata dengan baik	10	OPD	22.023.000	
24	002			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	sda	Jumlah Simpul Jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional yang dikelola	1	Aplikasi	10.000.000	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota	sda	Jumlah Simpul Jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional yang dikelola	1	Aplikasi	50.616.700	
24	02	2.01	003	Pemberdayaan kapesitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan Daerah Kabupaten	sda	Jumlah pengelola arsip yang telah memahami JIKN	25	Orang	5.000.000	Pemberdayaan kapesitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan Daerah Kabupaten	sda	Jumlah pengelola arsip yang telah memahami JIKN	25	Orang	50.616.700	
24	003			**PROGRAM PERLIN DUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	sda	**Persentase OPD yang telah melaku kan pengelolaan arsip secara baku**	100	%	**70,000,000**	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	sda	**Persentase OPD yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku**	100	%	51.722.400	

24	003	2. 02		**Perlindungan dan Penyelamat an arsip akibat bencana yang bersekala Kabupaten/Kota**	sda	Jumlah Arsip Daerah yang terselamatkan akibat bencana	1	Dok	**30,000,000**	Perlindungan dan Penyelamat an arsip akibat bencana yang bersekala Kab/Kota	sda	Jumlah Arsip Daerah yang terselamatkan akibat bencana	1	Dok	17.865.700	
24	003	2. 02	00 1	Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	sda	Jumlah Arsip Daerah akibat bencana yang diidentifikasi	1	Dok	30,000,000	Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	sda	Jumlah Arsip Daerah akibat bencana yang diidentifikasi	1	Dok	17.865.700	
24	003	2. 03		**Penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan dibubar kan,dan peme karan daerah kecamatan desa/kelurahan**	sda	Jumlah Arsip Pemekaran Daerah yang diselamatkan	1	Dok	**40,000,000**	Penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan/atau dibu barkan,dan pe mekaran daerah kecamatan desa/kelurahan	sda	Jumlah Arsip Pemekaran Daerah yang diselamatkan	1	Dok	3.856.700	
24	003	2. 03	00 3	pendampingan penyelamatan arsip bagi peme karan Lintas Kabupaten Solok selatan	sda	Jumlah Arsip Pemekaran Daerah yang diselamatkan	1	Dok	40,000,000	pendampingan penyelamatan arsip bagi peme karan Lintas Kabupaten Solok selatan	sda	Jumlah Arsip Pemekaran Daerah yang diselamatkan	1	Dok	33.856.700	
					sda	Julah Arsip Sejarah	1	Dokum en	-		sda	Julah Arsip Sejarah	1	Doku men		

Dari Tabel diatas dapat disimpulakan bahwa terdapatnya penambahandan pengurangan Analisis kebutuhan dari rancangan awal RKPD dikarenakan adanya penamahan kebutuhan dan peruahan rancagan dari perkiraan sebelumnya, seperti pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terjadinya penambahan an pengurangan anggaran yang disebabkan karena kenaikan Gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2025, dan terjadinya pengurangan pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD disebabkan karena telah dikembalikannya anggaran perjalanan dinas bidang ke masing-masing bidang.

Pada Kegiatan Pengadaan BMD penunjang Urusan Pemerintah Daerah terjadinya pengurangan anggaran dikarenakan tudak adanya anggaran pada sub bagian pengadaan Sarana dan Parasarana gedung kantor / bangunan lainnya. Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah terdapat penambahan anggaran secara signifikan dikarenakan oleh kenaikan tagihan Listrik dan Air pada Bangunan Kantor Dinas Perpustakaan yang baru dengan kapasitas yang lebih tinggi. dan pada sub kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor dikarenakan adanya kenaikan honor tenaga Kontrak daerah.

Pada Program Pengelolaan Arsip terdapat penambahan anggaran dikarenakan oleh penerapan Aplikasi Srikandi pada Sub Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam sistem informasi keasripan nasional yang dikelola.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2025 tidak ada menerima usulan Program dan Kegaiatan masyarakat. sesuai yang telah dituangkan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel : 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN SOLOK SELATAN

NAMA SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
	N I H I L					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Arah Kebijakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Arah kebijakan dan strategi program prioritas nasional ini adalah peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Untuk itu, Perpustakaan Nasional wajib menyusun program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi untuk menunjang keberhasilan tujuan pembangunan nasional sesuai RPJMN. Perpustakaan Nasional telah menyusun Rencana Strategis 2020-2024 melalui Peraturan Perpustakaan Nasional No. 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 yang memuat rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional hingga tahun 2025.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional pasal 3 point b yaitu "Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan untuk meningkatan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.". Dalam kepentingan ini Perpustakaan Nasional akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan (Rakornas Bidang Perpustakaan) tahun 2025, sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan konsolidasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang perpustakaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah terdapat dalam Renstra Perpustakaan Nasional RI, serta mendukung proses perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh jajaran pemangku kepentingan di bidang perpustakaan, dengan mekanisme bottom up dan top down planning,

di samping itu sebagai wadah konsolidasi, integrasi, harmonisasi, sinkronisasi dalam rangka penguatan dan penajaman program dan kegiatan, pula dalam upaya membangun interaksi atau interdependensi antara para pemangku kepentingan dengan Perpustakaan Nasional sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga dalam menjawab tantangan dan kebutuhan organisasi dan masyarakat.

3.1.2 Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang kearsipan dirumuskan

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang kearsipan dirumuskan atas dasar urgensi kearsipan bagi pembangunan bangsa dan negara. Setidaknya terdapat alasan pokok perlunya kearsipan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Kebutuhan Praktis Administrasi dan Manajemen Dalam kontek pemenuhan kebutuhan praktis administrasi dan manajemen nasional, pembangunan kearsipan diarahkan untuk dapat:
   a. Menjamin tersedianya arsip yang reliabel, autentik, lengkap dan dapat digunakan sepanjang dibutuhkan, melalui proses pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sistem kearsipan nasional;
   b. Menyediakan sistem kearsipan yang andal baik untuk arsip analog maupun digital yang digunakan oleh K/L/D;
   c. Membantu K/L/D dalam mengelola arsip untuk kepentingan pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, pemeriksaan, proteksi/mitigasi/sengketa hukum, dan kebutuhan lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter, Produktif dan Kompetitif	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

			Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
			Persentase Ketersedian Informasi Capaian Kinerja dan Keuangan
2.	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Persentase Kunjungan Perpustakaan (Pustaka Konvensional dan Digital)
			Persentase tingkat kegemaran membaca masyarakat
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Persentase Arsip Daerah yang Dikelola
			Persentase tingkat ketersedian arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja

			Persentase Tingkat Keeradaan dan Keutuhan Arsip Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan mengampu Satu urusan Pemerintah. Pada urusan tersebut terdapat 4 Program, 10 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

		3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel
		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	PROGRAM BIDANG PERPUSTAKAAN	1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kab/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

			2. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kab/Kota 4. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 5. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
	PENGELOLAAN ARSIP	1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	1. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 2. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
		2. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten /Kota	1. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
	PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	1. Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana

		2. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	1. Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan

Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Penyusunan Program dan kegiatan tersebut sudah dilakukan asistensi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan Kearsipan.

Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 sesuai dengan Tabel 4.1 sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANKAB. SOLOK SELATAN
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhi	Realisasi Capai	Prakiraan Capaia	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						4.566.948.785,00							3.412.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.566.948.785,00							3.412.000.000,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						4.417.903.985,00							3.302.000.000,00	
1	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	-			100 persen	3.799.021.285,00						-	2.656.000.000,00	
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah	-			100 Orang/Bulan 100 Persen	3.006.935.315,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Cakupan Layanan Operasional Kantor	-	1.814.400.000,00	
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2.915.255.315,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Cakupan Layanan Operasional Kantor		1.727.240.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	61.680.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Cakupan Layanan Operasional Kantor		87.150.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	201.085.970,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatkan Layanan Perpustakaan Daerah	-	301.000.000,00	
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatkan Layanan Perpustakaan Daerah		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	26.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatkan Layanan Perpustakaan Daerah		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatkan Layanan Perpustakaan Daerah		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatkan Layanan Perpustakaan Daerah		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatkan Layanan Perpustakaan Daerah		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	123.585.970,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatkan Layanan Perpustakaan Daerah		252.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-			4 unit	37.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Cakupan Layanan Operasional Kantor	-	200.000.000,00	
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	37.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Cakupan Layanan Operasional Kantor		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang tersedia	-			100 persen	339.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Cakupan Layanan Operasional Kantor	-	218.600.000,00	
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Cakupan Layanan Operasional Kantor		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	173.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Cakupan Layanan Operasional Kantor		64.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	13.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Cakupan Layanan Operasional Kantor		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	147.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Cakupan Layanan Operasional Kantor		126.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kator dan Bangunan laiya yang dipelihara/Direhabilitasi	-			2 unit	195.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Cakupan Layanan Operasional Kantor	-	125.000.000,00	
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					6 Unit	160.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Cakupan Layanan Operasional Kantor		105.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Cakupan Layanan Operasional Kantor		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah kunjungan perpustakaan (pustaka konvensional dan digital) Jumlah kunjungan perpustakaan (pustaka konvesional dan digital)	-			3900 orang 3900 orang	618.882.700,00						-	646.000.000,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikelola Jumlah Perpustakaan yang dikelola	-			13 Pustaka 13 Pustaka	348.946.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi. Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Jumlah Perpustakaan yang dikelola	-	371.000.000,00	
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				8 Perpustakaan	38.800.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Jumlah Perpustakaan yang dikelola		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	459.796.700,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Jumlah Perpustakaan yang dikelola		463.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				8 Eksemplar	30.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Jumlah Perpustakaan yang dikelola		33.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
							-				-	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Jumlah Perpustakaan yang dikelola		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	69.936.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Jumlah Kunjugan Perputakaan	-	75.000.000,00	
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota					3900 Orang	69.936.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Jumlah Kunjugan Perputakaan		75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							149.044.800,00								110.000.000,00	
3	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase arsip daerah yang dikelola	-			80 persen	97.322.400,00								-	30.000.000,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	-			10 OPD/Negari/Sekolah	46.705.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal	-	25.000.000,00	
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				2 Berkas	24.682.700,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Laporan	22.023.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional yang dikelola Jumlah Simpul Jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional yang dikelola	-			1 Aplikasi 1 Aplikasi	30.616.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal	-	5.000.000,00	
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	30.616.700,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase OPD yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku undefined	-			100 persen undefined	51.722.400,00								-	80.000.000,00	
	2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip daerah yang terselamatkan akibat bencana Jumlah Arsip Daerah yang terselamatkan akibat bencana	-			1 Dokumen 1 Dokumen	17.865.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal	-	40.000.000,00	
	2	24	03	2.02	0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				1 Arsip	17.865.700,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip pemekaran daerah yang diselamatkan Jumlah Arsip Pemekaran Daerah yang diselamatkan	-			1 Dokumen 1 Dokumen	33.856.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal	-	40.000.000,00	
	2	24	03	2.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan													
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan				1 Arsip	33.856.700,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
											JUMLAH	**4.566.948.785,00**						**3.412.000.000,00**	

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah Program Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Dalam pelaksanaannya Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempedomani Program dan Kegiatan yang tertuang didalam DPA yang nantinya akan ditetapkan dalam APBD Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan Rencana Tindak Lanjut untuk kegiatan yang tidak terakomodir didalam APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025 akan diusul kembali pada APBD Perubahan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Padang Aro.
Pada Tanggal Juli 2024
K E P A L A

Drs. PUTRA NUSA, M.Pd, MM
NIP.196501081993031005

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dan sekaligus mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Padang Aro, Juli 2024
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

ALFIS BASYIR, SE, M.Hum
NIP. 19700731 199403 1004

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2023 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 23

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal 25

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39

BAB III TUJUAN, SASARAN

3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional 42

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 44

3.3 Program dan Kegiatan 45

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 49

BAB V PENUTUP 64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 6

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 26

Tabel 2.4 Usulan Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan 39

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja 45

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2025 46

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengertian Renja Perangkat Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-progran dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Didalam Rencana Kerja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Kerja Tahunan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program perangkat daerah lainnya.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RPJMD 2021-2026 Kabupaten Solok Selatan.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 didasarkan pada usulan kegiatan dari masing-masing bidang secara formal yang yang diformulasikan dalam forum musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Disamping itu juga memperhatikan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial serta berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 Tahun (2021-2026) dan merupakan penjabaran teknis operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan 2021-2026.

Rencana Kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lain karena disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan segenap pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam pelaksanaan pembangynan selama lima tahun ke depan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD tahunan dan Renstra Perangkat Daerah

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari Tahun Anggaran 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indosesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional [SPPN] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom0r 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Selatan Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

10. Peraturan Bupat iSolok Selatan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
11. Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah ini adalah untuk memberi arah dan pedoman bagi pelaksana pembangunan dilingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sehingga kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RENJA adalah :

1. Sebagai alat untuk mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja.
2. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah kedalam program dan kegiatan bidang sosial pemerdayaan masyarakat dan desa/nagari
3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

Memuat Tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan dan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2025.

BAB. II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra 2016-2021, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan.

BAB. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat rumusan tujuan, sasaran program dan kegiatan Tahun 2025.

BAB. III Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB. IV Penutup

Bab ini memuat uraian penutup, lampiran rencana strategis dan rencana kinerja Tahun 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari total Anggaran yang dianggarkan untuk sebesar **Rp. 5.382.911.328,-** dipergunakan untuk membiayai 9 program dan 14 jenis kegiatan dan 29 sub kegiatan di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan. Pencapaian target dan realisasi anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 yaitu secara umum pencapaian Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk keuangan sebesar 93,03% dan fisik sebesar 93,03%.

Table 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan s/d Tahun 2024

No	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Sd Tahun Berjalan (Tahun 2024)	
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Renstra
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						URUSAN SOSIAL										
1	**1**	**06**	**01**			***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**Persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,66**	**66,66**
2	**1**	**06**	**01**	**2.02**		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,66**	**66,66**
3	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dn tunjangan	Orang/Bulan	166	58	29	29	100	29	116	69,88

4	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Admiinistrasi Keuangan yang Dibayarkan Honornya	Dokumen	24	8	4	4	100	4	16	66,67
6	**1**	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**% Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,66**	**66,66**
7	1	06	01	2.06	0001	penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	8	4	4	100	4	16	66,67
8	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24	8	4	4	100	4	16	66,67
9	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	24	8	4	4	100	4	16	66,67
10	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	8	4	4	100	4	16	66,67

11	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	8	4	4	100	4	16	66,67
12	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	JumlahLaporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	8	4	4	100	4	16	66,67
13	**1**	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**% Ketersediaan Sarana Prasarana Perkantoran**	**Persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,67**	**66,67**
14	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeuleur yang Disediakan	Unit	36	0	13	13	100	0	13	36,11
15	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Disediakan	Unit	36	0	2	1	50	15	20	55,56
16	1	06	01	2.07		Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya nya yang Disediakan	Unit	2	3	0	0	0		3	150
17	1	06	01	2.07		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Garasi yang dibangun	Unit	1	0	0	0	0	0	0	0
18	**1**	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**% Cakupan Layanan Perkantoran**	**Persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,66**	**66,66**

19	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	8	4	4	100	4	16	66,67
20	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Suberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	8	4	4	100	4	16	66,67
21	1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	8	4	4	100	4	16	66,67
22	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedikan	Laporan	12	0	0	0	0	12	12	100,00
23	**1**	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**% Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**Persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,66**	**66,66**
24	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	85	26	13	13	100	18	57	67,06

25	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	1	1	100	1	1	1
26	**1**	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase ketersediaan pendamping pemberdayaan sosial**	**Persen**	**100**	**33,33**	**40**	**100**	**100**	**100**	**66,66**	**66,67**
27	1	06	02	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM PSKS yang ditingkatkan Kemampuannya**	**Persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,66**	**66,67**
28	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang ditingkatkan kemampuannya dalam usaha kesejahteraan sosial	Lembaga	15	6	3	3	100	**3**	12	3
29	1	06	02	2.03		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Kasus Keluarga Bermasalah yang didampingi dan difailitasi	Kasus	75	0	0	0	0	0	0	0
30	**1**	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITAS SOSIAL**	**Persentase PPKS yang ditangani**	**Persen**	**88**	**72,56**	**76,00**	**74,16**	**74,16**	**80**	**80,00**	**91**

31	**1**	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah PPKS yang Mendapat Pelayanan Sosial**	**Orang**	**300**	**260**	**163**	**143**	**87,73**	**152**	**555,00**	**185**
32	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Bantuan Sosial	Orang	180	100	153	143	93	80	323	179
33	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan Alat Bantu	Orang	250	20	10	10	100	60	90	36
34	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga PMKS yang mendapatkan Bimbingan Sosial	Orang	140	0	0	0	0	0	0	100
35	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan kedaruratan	Orang	77	0	0	0	0	6	6	7,79

36	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	25	0	0	0	0	6	6	24,00
37	**1**	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitas Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Persentase PPKS Lainnya yang mendapat Rehabilitasi Sosial**	**Orang**	**250**	**6.651**	**200**	**200**	**100**	**196**	**7.047**	**2.819**
38	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan Bantuan Permakanan	Orang	250	6.651	200	200	100	196	7.047	2.819
39	1	06	04	2.02	0014	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Berpartisipasi dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Lembaga	3	3	0	0	0	**0**	3	100
40	**1**	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan memiliki jaminan sosial**	**Persen**	**100**	**100**	-	-	**100**	**100**	**0**	**0**
41	**1**	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak - anak Terlantar**	**Jumlah Anak Terlantar Mendapat perlindungan dan jaminan sosial**	**Orang**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42	1	06	05	2.01		Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terlayani	Orang	7	0	0	0	0	0	0	0
43	**1**	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**% Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Yang Tervalidasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
44	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS, BPNT dan PBI JKN Yang Tervalidasi	Persen	100	100	0	0	100	100	100	100
45	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS, BPNT dan PBI JKN Yang Tervalidasi	Persen	100	100	100	100	100	100	0	100
46	1	06	06			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana yang ditangani**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
47	**1**	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**% Korban Bencana alam dan sosial yang Terlayani**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
48	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Persentase Penanganan Korban Bencana Sosial dan Korban Bencana Alam	Persen	100	100	100	100	100	100	100	**100**
49	1	06	06	2.01		Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Bantuan Sandang	Persen	100	0	0	0	0	0	0	0

50	**1**	**06**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola**	**TMP**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
51	1	06	06	2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola**	**TMP**	**1**	1	0	0	0	0	**1**	**1**
52	1	06	06	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang Dipelihara	TMP	1	1	0	0	0	0	1	1
53	**2**	**13**				**URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**										
54	**2**	**13**	**05**			***PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT***	**Persentase lembaga kemasyarakatan nagari (LPMN) aktif**	**Persen**	**100**	**89,74**	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

55	**2**	**13**	**05**	**2.01**		***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota***	**% Lembaga Pemberdayaan dan keuangan Aktif**	**Persen**	**100**	**89,74**	**75,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
56	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan , Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Adat	Persentase Lembaga Adat yang Terbina	Persen	600	33,33	100	100	100	100	66,67	66,67
57	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Anggota LPMN dan KPM yang Dibina	Orang	600	200	100	70	70	100	370	61,67
58	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang dibina	Lembaga	47	39	47	39	39	39	0	0
59								Kelompok UEM	60				0	0	0	0

60								Nasabah	346				0	0	0	0
61							Jumlah Bumnag yang Dibina	Bumnag	47				39	0	39	82,98
62	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah POSYANTEK yang Dibina	Posyantek	20				0	8	0	0
63	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Event	1				0	0	0	0
64	**2**	**13**	**03**			***PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA***	**Jumlah Kerjasama nagari di fasilitasi**	**Kerjasama**	**10**	**5**	**5**	**5**	**100**	**10**	**2**	**2**
65	**2**	**13**	**03**	**2.01**		***Fasilitasi Kerjasama antar Desa***	**Jumlah Kerjasama yang Difasilitasi**	**Kerjasama**	**10**	**5**	**5**	**5**	**100**	**10**	**2**	**2**
66	2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/ kota	Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi	4	5	5	5	100	4	2	2
67							KP-SPAMS	KP-SPAMS	1116	0			0	0	0	0
68							Organisasi Rantau	Organisasi Rantau	2	0			0	0	0	0
69																
70	**2**	**13**	**02**			***PROGRAM PENATAAN DESA***	**Jumlah nagari pemekaran**	**Nagari**	**23**	**0**	**3**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**
71							**persentase nagari mandiri**	**Persen**	**48.94**	**17,95**	**29,73**	**28,21**	**28,21**	**36,17**	**36,17**	**73,90**

72	**2**	**13**	**02**	**2.01**		***Penyelenggaraan Penataan Desa***	**% Penataan Desa**	**Persen**	**100**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
73	2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah nagari pemekaran yang difasilitasi	Nagari	25	-	-		8	5	8	32
74	2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi Tata Kewilayahannya	Nagari	25	-	-		8	0	8	32
75	2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Regulasi yang ditetapkan tentang penataan Kewenangan nagari	Dokumen	1	-	-		1	8	1	100
76	**2**	**13**	**04**			***PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA***	**Persentase nagari lengkap administrasi pemerintahan nagari (Perencanaan, Keuangan, dan Aset)**	**Persen**	**90**	**90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
77	**2**	**13**	**04**	**2.01**		***Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa***	**% Nagari Tertib Administrasi pemerintahan Desa**	**Persen**	**100**	**90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
78	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang dibina dalam pengelolaan administrasi pemerintahan	Nagari	47	47	47	47	47	47	47	100,00

79							Jumlah Profil Nagari yang Disusun Berbasis IT	Nagari	47	0	0	0	0	0	0	0
80	2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyelenggaraan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum yang Dibuat	Dokumen	60	10	0	0	20	10	40	
81	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa	Nagari	47	47	0		47	47	47	100,00
82	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan	Nagari	47	47	47	47	0	47	0	0
83							Jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam Pengelolaan Aset Desa	Nagari					0	0	0	0
84	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	141		0		141	0	141	141
85	2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Nagari	47		0		47	0	47	39

86	2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Perna/Perwana yang Dievaluasi	Perna/Perwana	47		0		47	0	47	39
87	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdes dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Pengurus Bumnag yang Dilatih	Orang	117		0		117	0	117	100
88							Persentase Bumnag aktif	Persen	100		0		60,53	0	60,53	60,53
89	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Wali Nagari yang Dipilih	Pilwana	32		0		0	0	0	0
90	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil Nagari yang Disusun Berbasis IT	Nagari	47		0		0	0	0	0
91	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam Pengelolaan Aset Desa	Nagari	39		0		39	0	47	47

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target :

- Program Rehabilitasi Sosial dengan realisasi 74,16
- Program Penataan Desa dengan realisasi 28,21 %

2.1.2 Ralisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Sembilan Program yang dilaksanakan, terdapat enam program telah memenuhi target kinerja. Program yang telah memenuhi target kinerja tersebut adalah :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebesar 100 %.
- Program Pemberdayaan Sosial 100 %
- Program Penanganan Bencana 100 %
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Hukum Adat sebesar 100 %
- Program Peningkatan Kerjasama Desa 100 %
- Program Administrasi Pemerintahan Desa sebesar 100 %

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kineja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi target yang telah direncanakan.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya adalah :

- Belum tersedianya data beberapa jenis PPKS seperti anak terlantar, gelandangan dan pengemis sehingga ada beberapa jenis PPKS yang menjadi target kinerja OPD tidak dapat dilaksanakan.
- Pemberian bantuan tidak boleh tumpang tindih dengan bantuan yang berasal dari sumber dana lain baik Dana Desa, APBD Propinsi maupun APBN sehingga kesulitan untuk menetapkan penerima bantuan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Adapun capaian kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Solok Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK /IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Ditangani		√	76	79	82	88	74,16	79	82	88
2	Persentase Cakupan Pelayanan PPKS		√	76	80	84	88	74,16	79	82	88
3	Persentase Nagari Mandiri		√	29,78	36,17	42,55	48,94	28,21	36,17	42,55	48,94
4	Jumlah Nagari Mnadiri		√	14	18	22	25	11	15	22	25
5	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal		√	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
6	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri		√	35,90	46,15	56,41	64,10	28,21	38,46	56,41	64,10
7	% Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	√		100	100	100	100	0	0	0	0
8	% Penyandang Disabilitas yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	√		100	100	100	100	100	100	100	100
9	% Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	√		100	100	100	100	100	100	100	100
10	% Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	√		100	100	100	100	100	100	100	100
11	% Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi		√	100	100	100	100	100	100	100	100

	Kebutuhan Dasarnya diluar panti										

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan tahun 2023 adalah :

- Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Ditangani baru 74,16 % dari 76 % yang ditargetkan. Terdapat gap sebesar 1,84 %. Hal ini disebabkan karena terbatasnya alokasi anggaran untuk penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang bersumber dari dana APBD serta tidak tersedianya data yang valid terkait jumlah fakir miskin, gelandangan dan pengemis.
- Indikator Persentase Nagari Mandiri

  Target persentase nagari mandiri untuk tahun 2023 adalah 29,78 % sementara capaiannya adalah yang ditetapkan adalah 28,21 %. Terdapat gab sebesar 1,57 %. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2026 sebesar 48, 94 % masih terdapat gap sebesar 20,73 %. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang tidak hanya menjadi tanggungjawab Dins Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saja tapi juga memerlukan sinergi lintas OPD dan juga pihak pemerintahan nagari melalui penggunaan dana desanya. Koordinasi berbagai pihak masih sangat dibutuhkan untuk mendorong tingkat kemandirian desa melalui pelaksanaan program-program yang dapat mendorong kemandirian masyarakat desa.
- Indikator Jumlah Nagari Mandiri dengan target 14 Nagari pada Tahun 2023 teralisasi 11 Nagari atau 28,21 %. Terdapat gap sebesar 7,69 % jika dibandingkan dengan target.
- Untuk indikator Pengentasan Desa Tertinggal dengan target 7,69 % terealisasi 100 % karena semenjak Tahun 2022 tidak ada desa tertinggal di Kabupaten Solok Selatan.
- Untuk indikator Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri dengan target 35,90 % pada Tahun 2023 dan terealisasi sebesar 28,21 %.
- Untuk indikator % Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti capaian 0. Karena data anak terlantar diluar panti tidak tersedia sehingga kalaupun dianggarkan belanja penanganannya kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
- Untuk indikator, % Penyandang Disabilitas yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti, % Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti dan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti serta% Korban Bencana Alam dan Sosial yang

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti yang menjadi target SPM tercapai 100 % sesuai dengan target tahunan.

2.3 Isu-Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas

Adapun yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- Belum terdatanya penyandang disabilitas , miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas
- Masih rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial
- Belum adanya kegiatan pendampingan psikososial korban bencana sosial
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Penyediaan infrastruktur wilayah, ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup

Secara garis besar faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelayanan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari adalah sebagai berikut :

A. Kekuatan (Streght)

- Adanya Permensos RI Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota.
- Adanya dukungan Dana dari APBD Provinsi dan APBN (Dekonsentrasi).
- Adanya Komitmen yang tinggi mulai dari pimpinan sampai dengan staf dalam mengatasi masalah sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
- Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang jelas.
- Jumlah pendamping kesejahteraan sosial yang memadai

B. Kelemahan (weakness)

- Kualitas sumberdaya manusia pemberdayaan yang terbatas
- Sarana dan Prasarana Penunjang belum memadai
- Kesempatan diklat yang terbatas

- Koordinasi belum optimal
- Kurangnya besaran dana untuk mendukung pencapaian target SPM melalui danVisi misi Kabupaten Solok Selatan

C. Peluang (Opprtunities)

- Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan
- Komitmen yang tinggi dari eksekutif dan legislatif dalam pembangunan Bidang sosial Pemberdayaan Masyarakat dan desa
- Tersedianya lembaga-lembaga pemberdayaan dan keuangan masyarakat di nagarii
- Terbentuknya pemerintahan nagari dan penyerahan sebagian urusan ke nagari
- Dukungan dari lembaga-lembaga/stakeholder terkait.
- Adanya potensi dalam Pembangunan kesejahteraan sosial seperti : ORSOS, perusahaan-perusahaan melalui dana CSR dan lembaga sosial lainya yaitu LKKS, BAZNAS, WKSBM, Karang Taruna dll.
- APBD untuk bidang sosial

D. Tantangan

- Kondisi ekonomi, politik dan stabilitas keamanan yang penuh ketidak pastian.
- Tuntutan reformasi dan Good Governance.
- Kemajuan dan terjadinya era globalisasi dalam berbagai bidang (IPTEK, Industri, Komunikasi dan Informasi).
- Intensitas pembangunan yang semakin meningkat.
- Perubahan paradigma perencanaan pembangunan.
- Peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan nagari masih rendah

E. Faktor Penentu Keberhasilan

Untuk memacu pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan khususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari diidentifikasikan faktor-faktor penentu keberhasilan diantaranya :

- Peningkatan profesionalisme aparat dalam menjalankan tugas dan kegiatan.

- Adanya sistem informasi sosial, pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/Nagari yang handal yang menghasilkan pedoman dalam pengambilan kebijakan pembangunan mulai dari data, informasi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas serta responsibilitas.
- Tersedianya sumberdaya manusia yang profesional dengan sistem pengembangan karir berdasarkan merit system.
- Adanya komitmen dari seluruh pegawai maupun pimpinan dan masyarakat akan perlunya sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam pembangunan untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.
- Adanya produk/jasa unggulan yang menjadikan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagai institusi sosial pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang berorientasi pada perbaikan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Solok Selatan.
- Adanya Komitmen dari seluruh pegawai maupun pimpinan dan masyarakat akan perlunya perbaikan kondisi hidup masyarakat yang berorientasi pada keberhasilan mengangkat taraf hidup masyarakat.
- Adanya Standar dan Prosedur yang tetap untuk program-program sosial pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari untuk Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Solok Selatan 2021-2026, namun dengan adanya usulan pemangku kepentingan (Masyarakat) pada saat musrenbang kecamatan maka usulan tersebut akan disesuaikan dengan perencanaan kinerja dinas untuk memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat, pencapaian target Renstra SKPD 2021-2026 dan pencapaian target SPM bidang Sosial sehingga masyarakat Solok Selatan yang maju dan sejahtera sesuai visi kepala daerah terpilih dapat terwujud.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD / Renstra SKPD Tahun 2025

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Nagari

Kabupaten Solok Selatan

NO	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				**4.237.270.251**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**6.973.326.712**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100%**	**3.572.270.251**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100%**	**6.390.767.312**	
	Administrasi Keuangan		**Persenase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**2.953.000.000**	**Administrasi Keuangan**		**Persenase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**4.084.872.762**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Solok Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	29 Orang	2.843.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Solok Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	29 Orang	3.976.572.762	

		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Solok Selatan	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	110.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Solok Selatan	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	108.300.000	
		Administrasi Umum		**Persenase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**262.282.751**	**Administrasi Umum**		**Persenase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**208.976.600**	
		penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Solok Selatan	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.201.388	penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Solok Selatan	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.039.400	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Solok Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Solok Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	24.993.600	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Solok Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4.681.363	Penyediaan peralatan rumah tangga	Solok Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4.677.300	
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Solok Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakandan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20.400.000	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Solok Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakandan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20.474.300	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Solok Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	7.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Solok Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	6.960.000	

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	146.832.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Solok Selatan**	**% Ketersediaan Sarana Prasarana Perkantoran**	**100%**	**86.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Solok Selatan**	**% Ketersediaan Sarana Prasarana Perkantoran**	**100%**	**47.339.400**	
		Pengadaan Mebel	Solok Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	15.000.000	Pengadaan Mebel	Solok Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	16.502.700	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Solok Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	71.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Solok Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	30.836.700	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Solok Selatan**	**% Cakupan Layanan Perkantoran**	**100%**	**46.382.500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Solok Selatan**	**% Cakupan Layanan Perkantoran**	**100%**	**1.825.510.750**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.500.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	36.882.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	24.000.750	

		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	10.010.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Solok Selatan	-	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	76 Laporan	1.788.000.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Solok Selatan**	**% Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**100%**	**224.605.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Solok Selatan**	**% Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**100%**	**224.067.800**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	13 Unit	195.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	194.987.200	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Solok Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.605.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Solok Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.080.600	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Solok Selatan**	**Persentase ketersediaan pendamping pemberdayaan sosial**	**80%**	**150.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Solok Selatan**	**Persentase ketersediaan pendamping pemberdayaan sosial**	**80%**	**50.000.000**	

		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Solok Selatan**	**Persentase SDM PSKS yang ditingkatkan Kemampuannya**	**100%**	**150.000.000**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Solok Selatan**	**Persentase SDM PSKS yang ditingkatkan Kemampuannya**	**100%**	**50.000.000**	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Solok Selatan	Jumlah lembaga yang ditingkatkan kemampuannya dalam usaha kesejahteraan sosial	3 Lembaga	100.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Solok Selatan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga	50.000.000	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial KeSumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Solok Selatan	Jumlah Kasus Keluarga Bermasalah yang Didampingi dan Difasilitasi	15 Kasus	50.000.000						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Solok Selatan**	**Persentase PPKS yang ditangani**	**76 Persen**	**200.000.000**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Solok Selatan**	**Persentase PPKS yang ditangani**	**76 Persen**	**319.913.600**	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Solok Selatan**	**Jumlah PPKS yang Mendapat Pelayanan Sosial**	**80%**	**160.000.000**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Solok Selatan**	**Jumlah PPKS yang Mendapat Pelayanan Sosial**	**80%**	**264.035.700**	

		Penyediaan Permakanan	Solok Selatan	Jumlah PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Bantuan Sosial	36 Orang	55.000.000	Penyediaan Permakanan	Solok Selatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	142.000.000	
		Penyediaan Alat Bantu	Solok Selatan	Jumlah PPKS yang mendapatkan Bantuan Alat Bantu	50 Orang	50.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Solok Selatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	102.036.000	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Solok Selatan	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan kedaruratan	5 Orang	25.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Solok Selatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	9.999.800	
		Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	Solok Selatan	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Penelusuran Keluarga	5 Orang	30.000.000	Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	Solok Selatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	9.999.900	

		Rehabilitas Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	**Solok Selatan**	**Persentase PPKS Lainnya yang mendapat Rehabilitasi Sosial**	**50 Orang**	**40.000.000**	**Rehabilitas Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Solok Selatan**	**Persentase PPKS Lainnya yang mendapat Rehabilitasi Sosial**	**143 Orang**	**55.877.900**	
		Penyediaan Permakanan	Solok Selatan	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan Bantuan Permakanan	50 Orang	40.000.000	Penyediaan Permakanan	Solok Selatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	143 Orang	55.877.900	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Solok Selatan	**Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan memiliki jaminan sosial**	**100%**	**200.000.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Solok Selatan**	**Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan memiliki jaminan sosial**	**100%**	**82.645.900**	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Solok Selatan	**% Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Yang Tervalidasi**	**100%**	**200.000.000**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Solok Selatan**	**% Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Yang Tervalidasi**	**100%**	**82.645.900**	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Solok Selatan	Persentase data DTKS, BPNT dan PBI JKN Yang Tervalidasi	100%	200.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Solok Selatan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	19.122 Keluarga	82.645.900	

		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Solok Selatan**	**persentase korban bencana yang ditangani**	**100%**	**70.000.000**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Solok Selatan**	**Persentase korban bencana yang ditangani**	**100%**	**129.999.900**	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Solok Selatan**	**% Korban Bencana alam dan sosial yang Terlayani**	**100%**	**70.000.000**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Solok Selatan**	**% Korban Bencana alam dan sosial yang Terlayani**	**100%**	**129.999.900**	
		Penyediaan Makanan	Solok Selatan	Persentase Penanganan Korban Bencana Sosial dan Korban Bencana Alam	**100%**	70.000.000	Penyediaan Makanan	Solok Selatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	129.999.900	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Solok Selatan**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola**	**1 TMP**	**45.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Solok Selatan**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola**	**1 TMP**	**0**	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Solok Selatan**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola**	**1 TMP**	**45.000.000**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Solok Selatan**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola**	**1 TMP**	**0**	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Solok Selatan	Jumlah TMP yang Dipelihara	1 TMP	45.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Solok Selatan	Jumlah TMP yang Dipelihara	1 TMP	0	
		URUSAN PEMBERDAYAAN	**Solok Selatan**			**470.000.000**	**URUSAN PEMBERDAYAAN**	**Solok Selatan**			**282.172.000**	

		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Solok Selatan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LPMN) Aktif**	**100%**	**100.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Solok Selatan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LPMN) Aktif**	**100%**	**106.096.600**	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Solok Selatan**	**% Lembaga Pemberdayaan dan keuangan Aktif**	**90%**	**100.000.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Solok Selatan	**% Lembaga Pemberdayaan dan keuangan Aktif**	**100%**	**106.096.600**	

		Fasilitasi Penataan , Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Solok Selatan	Persentase Lembaga Adat yang Terbina	100%	30.000.000	Fasilitasi Penataan , Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	11 Dokumen	23.930.700	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Solok Selatan	Jumlah Anggota LPMN dan KPM yang Dibina	100 Orang	30.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Solok Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	39 Lembaga	30.987.900	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Solok Selatan	Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang dibina	47 Lembaga	20.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	39 Dokumen	31.189.000	

									Pendapatan Asli Desa			
		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Solok Selatan	Jumlah POSYANTEK yang Dibina	20 Posyantek	20.000.000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Solok Selatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	8 Laporan	19.989.000	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**Solok Selatan**	**Jumlah Kerjasama nagari di fasilitasi**	**10 Kerjasama**	**150.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Solok Selatan**	**Jumlah Kerjasama nagari di fasilitasi**	**10 Kerjasama**	**37.937.700,00**	
		Fasilitasi Kerjasama antar Desa	**Solok Selatan**	**Jumlah Kerjasama yang Difasilitasi**	**10 Kerjasama**	**150.000.000**	**Fasilitasi Kerjasama antar Desa**	**Solok Selatan**	**Jumlah Kerjasama yang Difasilitasi**	**10 Kerjasama**	**37.937.700,00**	
		Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/ kota	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	10 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/ kota	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	10 Dokumen	37.937.700,00	
		PROGRAM PENATAAN DESA	**Solok Selatan**	***Jumlah nagari pemekaran***	**5 Nagari**	**100.000.000**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Solok Selatan**	**Jumlah Nagari Pemekaran**	**5 Nagari**	**52.350.900**	
			Solok Selatan	***Persentase nagari mandiri***	**42,55%**			**Solok Selatan**	**Persentase Nagari Mandiri**	**42,55%**		
		Penyelenggaraan Penataan Desa	**Solok Selatan**	***% Penataan Desa***	**100%**	**100.000.000**	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Solok Selatan**	**% Penataan Desa**	**100%**	**52.350.900**	

		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Solok Selatan	Jumlah nagari pemekaran yang difasilitasi	5 Nagari	50.000.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Solok Selatan	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5 Nagari	16.641.000	
		Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Solok Selatan	Jumlah nagari yang difasilitasi Tata Kewilayahannya	5 Nagari	30.000.000	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Solok Selatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	5 Nagari	19.021.900	
		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Solok Selatan	Jumlah Regulasi yang ditetapkan tentang penataan Kewenangan nagari	1 Perda	20.000.000	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Solok Selatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	47 Desa	16.688.000	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Solok Selatan**	**Persentase nagari lengkap administrasi pemerintahan nagari (Perencanaan, Keuangan, dan Aset)**	**85%**	**120.000.000**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Solok Selatan**	**Persentase nagari lengkap administrasi pemerintahan nagari (Perencanaan, Keuangan, dan Aset)**	**100%**	**85.786.800**	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Solok Selatan**	**% Nagari Tertib Administrasi pemerintahan Desa**	**100%**	**120.000.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Solok Selatan**	**% Nagari Tertib Administrasi pemerintahan Desa**	**100%**	**85.786.800**	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Solok Selatan	Jumlah Nagari yang dibina dalam pengelolaan administrasi pemerintahan	47 Nagari	63.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	47 Dokumen	50.057.000	

		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Solok Selatan	Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa	47 Nagari	20.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	47 Dokumen	14.999.800	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Solok Selatan	Jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan	47 Nagari	37.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	47 Dokumen	20.730.000	
		JUMLAH				**4.707.270.251**	**JUMLAH**				**7.255.498.712**	

Untuk Tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mangajukan usulan awal sebesar Rp. 4.707.270.251,- hal ini sesuai dengan rencana yang terdapat pada Renstra 2021-2026. Namun karena ada perubahan yang terjadi yaitu penambahan jumlah ASN, pemindahan anggaran belanja Tenaga pendukung administrasi kantor dari BKPSDM ke Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta adanya penyesuaian terhadap besaran belanja pengelola keuangan dan penambahan jumlah kendaraan maka pagu yang diusulkan untuk Tahun 2025 adalah Rp. 7.255.498.712,-

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memperhatikan usulan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Tahun 2024 terdapat tujuh usulan yang ditujukan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan. Usulan tersebut sebanyak 16 usulan terkait dengan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Tahun 2025

No.	Usulan Kegiatan	Lokasi	Ket
1.	Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga bagi PMKS/Miskin	Nagari Pakan Rabaa, Kab. Solok Selatan	
2.	Bantuan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Nagari Sako Pasia Talang	
3.	Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga bagi PMKS/Miskin	Pasir Talang Barat, Kab. Solok Selatan	
4.	Bantuan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Nagari Batang Lolo Pakan Rabaa Tengah, Kab. Solok Selatan	
5.	Bantuan Pengembangan Ekonomi bagi PMKS/Miskin	Nagari Pakan Rabaa Timur Jorong Pinti Kayu Ketek - Jorong Manggih, Kab. Solok Selatan	
6.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Jorong, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Aagari kapau alam pauh duo, Kab. Solok Selatan	

	Masyarakat Hukum Adat)		
7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Jorong, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)	koto baru,kecamatan Sungai Pagu	
8	Penanganan Korban Bencana (Pemenuhan bantuan sandang dan pangan) /Dapur Umum	jorong Alai, Sako Selatan Pasia	
9	Bantuan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jorong Sawah Siluak Nagari Sako Selatan Pasia Talang	
10	Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga bagi PMKS/Miskin	Talao Sungai Kunyit	
11	Bantuan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pakan Rabaa Tengah, Kab. Solok Selatan	
12	Bantuan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Nagari Pasir Talang Selatan, Kab. Solok Selatan	
13	Penanganan Korban Bencana (Pemenuhan bantuan sandang dan pangan) /Dapur Umum	Nagari sako pasia talang, Kab. Solok Selatan	
14	Perlu adanya peningkatan kapasitas bagi Lembaga Masyarakat yg ada dinagari karena banyaknya perubahan di posisi dalam organisasi lembaga masyarakat	Pulakek Koto Baru	
15	Bantuan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pakan Rabaa Utara	
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Jorong, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)	Lubuk Ulang Aling	

Ada 16 usulan program kegiatan yang disampaikan oleh kecamatan pada Musrenbang Kecamatan terintegrasi usulan-usulan tersebut umumnya sejalan dengan Tupakosi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Usulan tersebut terkait dengan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan mulai dari KAN, LPMN, BUMNAG serta Pemberian Bantuan untuk masyarakat

miskin dan pemberian bantuan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial terutama untuk lansia, anak terlantar, dan penyandang disabilitas. Usulan tersebut dapat diakomodir melalui Renja OPD Tahun 2025.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2025–2025

Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2025 adalah :

- Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab
- Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
- Mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum
- Mewujudkan Indonesia yang aman damai dan bersatu
- Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
- Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari
- Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
- Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam pergaulan internasional

Terdapat delapan arah pembangunan nasional jangka panjang Tahun 2005-2025. Dua diantaranya yaitu Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan dan Desa.

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan sebagai salah satu perangkat daerah berkontribusi untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan pemerintah dengan cara meyusun program kegiatan yang menjadi urusannya sesuai dengan arah pembangunan nasional tersebut dengan berpedoman kepada dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan yang merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Dimana dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan 2021-2026 telah ditetapkan beberapa tujuan yang 2 diantaranya yaitu **peningkatan Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** dan **Meningkatnya Peran Nagari, Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan** menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Dalam rangka Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, adabeberapa program prioritas yang

dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Pelayanan Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6. Program Peningkatan Kerjasama antar Desa
7. Program Administrasi Pemerintahan Desa
8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Disamping itu Kementerian Sosial melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 09/HUK/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten telah menetapkan target SPM yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Ada 5 jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu :

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabiltas terlantar diluar panti
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kab/kota.

Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang harus diterima oleh penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar , gelandangan dan pengemis di luar panti berupa pelayanan data dan pengaduan, kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar.Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi : (a) pemenuhan kebutuhan permakanan, (b) sandang, (c) alat bantu, (d) perbekalan kesehatan, (e) bimbingan fisik, mental dan spiritual dan sosial kepada penyandang masalah sosial tersebut, (f) pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlanar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan masyaraka, (g) Fasilitasi pembuatan NIK, akta kelahiran, surat nikah, kartu identitas anak, (h) akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, (i) pemberian

pelayanan penelusuran keluarga, (j) pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dan (k) layanan rujukan. Dengan target kinerja 100 % berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan melalui assesmen dari pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial.

Sedangkan Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana alam dan sosial adalah : (a) makanan, (b) penyediaan sandang, (c) penyediaan tempat penampungan, (d) penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan (e) pelayanan dukungan psikososial dengan target kinerja 100 %.

Dengan telah adanya Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial tersebut maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat di daerah kabupaten/ kota berkewajiban untuk menerapkan dan mengusahakan pencapaiannya selaku instansi teknis di daerah melalui penjabaran didalam program dan kegiatan pada tahun 2025 dan tahun – tahun berikutnya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1 TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Mengevaluasi kinerja pembangunan tahun 2023 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2025 dengan melihat kondisi kekinian dibidang sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Mengarahkan pencapaian visi Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026.
- Menyusun kebijakan pembangunan bidang sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang dituangkan dalam susunan program dan indikasi kegiatan tahun 2025 dengan melihat keterkaitan dengan visi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
- Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dari seluruh sektor pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya pembangunan.

Sementara tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 sendiri adalah :

⇨ Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS)

⇨ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nagari dan Daerah

3.2.2 SASARAN

Adapun sasaran kegiatan yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Meningkatnya Kemandirian Desa

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
Tahun Anggaran 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Tujuan 1 : Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu PelayananKesejahteraan Sosial (PPKS)	
• Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	• Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Ditangani
Tujuan 2 : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nagari dan Daerah	
• Meningkatnya Kemandirian Desa	• Persentase Nagari Mandiri

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 9 program, 15 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Tahun 2025

PROGRAM	SUB KEGIATAN / KEGIATAN
Tujuan 1 : Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
Program Penanganan Bencana	**Kegiatan** : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan** : Penyediaan Makanan
Program Pemberdayaan Sosial	**Kegiatan** : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan** : 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
Program Rehabilitasi Sosial	**Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut UsiaTerlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial **Sub Kegiatan :** 1.Penyediaan Permakanan 2.Penyediaan Alat Bantu 3.Pemberian Layanan Kedaruratan 4.Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga **Kegiatan :** Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial **Sub Kegiatan** : Penyediaan Permakanan
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	**Kegiatan** : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan** : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan 2 : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nagari dan Daerah	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	**Kegiatan : Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota** **Sub Kegiatan :** • Fasilitasi Penataan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat • Peningkatan kapasitas Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat • Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan pemerintah Desa dalam Meningkatkan pendapatan Asli desa • Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Program Peningkatan Kerjasama Desa	**Kegiatan** : Fasilitasi Kerjasama antar Desa **Sub Kegiatan** : Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/ kota
Program Penataan Desa	**Kegiatan** : Penyelenggaraan Penataan Desa **Sub Kegiatan** : • Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan mengacu pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Implementasi pencapaian visi dan misi tersebut tertuang dalam Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 yang memuat program dan kegiatan menurut skala prioritas dalam pencapaian kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa di Solok Selatan.

Adapun rencana kerja dan pendanaan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKAB. SOLOK SELATAN

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
															Prioritas				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						7.255.498.712,00							6.605.015.431,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.973.326.712,00							6.135.015.431,00
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						6.973.326.712,00							6.135.015.431,00
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	-			100 %	6.390.767.312,00						-	5.435.015.431,00
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.084.872.762,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	ASN	-	2.960.000.000,00
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	3.976.572.762,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	ASN		2.850.000.000,00
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													

							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	108.300.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	ASN		110.000.000,00
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	208.976.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	DinsosPMD	-	307.965.431,00
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.039.400,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	DinsosPMD		5.300.000,00
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	24.993.600,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	DinsosPMD		26.250.000,00
	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4.677.300,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	DinsosPMD		4.915.431,00
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	20.474.300,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	DinsosPMD		21.500.000,00
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	6.960.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	DinsosPMD		7.000.000,00
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	146.832.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	DinsosPMD		243.000.000,00

	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Perkantoran	-			100 %	47.339.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Barang Milik Daerah	-	77.750.000,00
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	16.502.700,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Barang Milik Daerah		15.750.000,00
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	30.836.700,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Barang Milik Daerah		62.000.000,00
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Perkantoraan	-			100 Persen	1.825.510.750,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	DinsosPMD	-	1.817.300.000,00
	1	06	01	2.08	0001	Penyedinan Jasa Surat Menyurat													

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	DinsosPMD		4.000.000,00
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	24.000.750,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	DinsosPMD		29.000.000,00
	1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	10.010.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	DinsosPMD		6.300.000,00
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				76 Laporan	1.788.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	DinsosPMD		1.778.000.000,00

	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			100 %	224.067.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Barang Milik Daerah	-	272.000.000,00
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	194.987.200,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Barang Milik Daerah		197.000.000,00
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.080.600,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Barang Milik Daerah		75.000.000,00
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase ketersediaan pendamping pemberdayaan sosial	-			80 Persen	50.000.000,00						-	150.000.000,00
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM psks yang Ditingkatkan Kemampuannya Persentase SDM PSKS yang Ditingkatkan Kemampuannya	-			100 Persen 80 %	50.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	ORSOS	-	150.000.000,00

	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	ORSOS		150.000.000,00
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	319.913.600,00						-	200.000.000,00
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	264.035.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis diluar Panti	-	160.000.000,00
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	142.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis diluar Panti		55.000.000,00
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	102.036.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis diluar Panti		50.000.000,00
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan													

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	9.999.800,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis diluar Panti		25.000.000,00
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	9.999.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis diluar Panti		30.000.000,00
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS Lainnya yang Mendapat Rehabilitasi Sosial	-			143 Orang	55.877.900,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	PMKS Lainnya	-	40.000.000,00
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				143 Orang	55.877.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	PMKS Lainnya		40.000.000,00
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	-			100 %	82.645.900,00						-	250.000.000,00

	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Tervalidasi	-			100 Persen	82.645.900,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Data Terpadu Kesejahteraa n Sosial (DTKS)	-	250.000.000,00
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				29122 Keluarga	82.645.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Data Terpadu Kesejahteraa n Sosial (DTKS)		250.000.000,00
5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani	-			100 persen	129.999.900,00						-	100.000.000,00
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencan alam dan sosial yang terlayani	-			100 %	129.999.900,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Korban Brncana Alam dan Sosial	-	100.000.000,00
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	129.999.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Korban Brncana Alam dan Sosial		100.000.000,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN						282.172.000,00							470.000.000,00
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						282.172.000,00							470.000.000,00

6	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	-	-			-	52.350.900,00						-	100.000.000,00
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-			-	52.350.900,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Nagari	-	100.000.000,00
	2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa													
							Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				5 Desa	16.641.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Nagari		50.000.000,00
	2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa													
							Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				5 Desa	19.021.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Nagari		30.000.000,00
	2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa													
							Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				47 Desa	16.688.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Nagari		20.000.000,00

7	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Kerjasama Nagari Difasilitsi	-			10 Kerjasama	37.937.700,00						-	150.000.000,00
	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama yang Difasilitasi	-			10 Kerjasama	37.937.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Perguruan Tinggi	-	150.000.000,00
	2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota													
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				10 Dokumen	37.937.700,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Perguruan Tinggi		150.000.000,00
8	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari Lengkap Administrasi Pemerintahan Nagari (Perencanaan, Keuangan dan Aset	-			100 %	85.786.800,00						-	120.000.000,00
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	-			100 %	85.786.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Nagari	-	120.000.000,00
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													

							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				47 Dokumen	50.057.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Nagari		63.000.000,00
	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa													
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				47 Dokumen	14.999.800,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Nagari		20.000.000,00
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa													
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				47 Dokumen	20.730.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Nagari		37.000.000,00
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa													
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				47 Laporan	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Nagari		0,00

9	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LPMN) Aktif	-			100 %	106.096.600,00						-	100.000.000,00
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemberadayaan dan Keuangan Aktif	-			100 %	106.096.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Lembaga Pemberdaya an dan Keuangan	-	100.000.000,00
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				11 Dokumen	23.930.700,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Lembaga Pemberdaya an dan Keuangan		30.000.000,00
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				39 Lembaga	30.987.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Lembaga Pemberdayaan dan Keuangan		30.000.000,00
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa													
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				39 Dokumen	31.189.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Lembaga Pemberdayaan dan Keuangan		20.000.000,00
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				8 Laporan	19.989.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Lembaga Pemberdayaan dan Keuangan		20.000.000,00
											J U M L A H	**7.255.498.712,00**						**6.605.015.431,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang memuat program kegiatan yang akan dilaksanakan dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 akan sangat bergantung pada besarnya komitmen penyelenggara pemerintah dan peran aktif masyarakat. Harapan dari tersusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan adalah agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan bidang sosial, pemebrdayaan masyarakat dan desa/nagari bagi aparatur Dinas Sosial pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok selatan Tahun 2025.

Padang Aro, Juli 2024

KEPALA DINAS SOSIAL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ALFIS BASYIR, SE, M.Hum

Nip. 19700731199403 1004

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 merupakan kewajiban Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja disusun sebagai pegangan bagi setiap Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan guna melaksanakan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Solok Selatan 2025.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, maka segala kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 difokuskan pada Rencana Kerja tersebut.

Kami menyadari Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Mudah-mudahan Rencana Kerja ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan.

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja ini. Dan semua pihak yang membuat dalam penyusunan Rencana Kerja ini, kami ucapkan terimakasih.

Padang Aro, Juli 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Solok Selatan

H. HAMUDIS, S.Pd

NIP. 196806011995121002

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR **1**

DAFTAR ISI **2**

DAFTAR TABEL **3**

BAB I PENDAHULUAN **4**

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Landasan Hukum 7

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 ..... **12**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.... 12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 28

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 38

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **39**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 39

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah ... 40

3.3 Program dan Kegiatan 42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....47

BAB IV PENUTUP **53**

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/d Tahun 2024 Kabupaten Solok
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok
Tabel	2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Solok Selatan
Tabel	2.4	Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Solok Selatan
Tabel	3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Solok Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan perangkat daerah untuk periode 1 Tahun berjalan. Didalam rencana kerja perangkat daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Kerja Tahunan Daerah.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Rencana Kerja). Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan

Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan pada usulan kegiatan dari masing-masing bidang secara formal yang di formulasikan melalui forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) sebagai mana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Dan untuk Tahun 2026 nantinya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang nantinya juga akan mempedomani RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan Dokumen Perencanaan lain karna disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 – 2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan segenap pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 Tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahunan dan Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 berdasarkan pada :

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
b. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan;
h. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 40 Tahun 2009, tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 Kabupaten Solok Selatan;
j. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 91 Tahun 2021, tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan;
k. Peraturan Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Nomor 16 Tahun 2024 Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

a.Maksud

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 dimaksud untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2025.

b.Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan kedepan yang terarah dan terukur.
2. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Untuk menjabarkan visi, misi program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 serta merealisasikannya dalam Perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan selama kurun waktu 1(satu) tahun.
4. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang meliputi lantar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga subtansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024, Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum evaluasi pelaksanaan Renja Kerja perangkat daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH , Pada Bagian ini dijelaskan mengenai Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, berisi program/kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Perangkat Daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Sesuai target kinerja

Pada Standar Pelayanan Minimal Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan terdapat 5 indikator kinerja dari Lima indikator tersebut telah mencapai target 100%. Target kinerja dan capaian pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga dengan jumlah persentase Capaian sebesar 99,%
2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan persentase Capaian 97,89 %
3. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun dengan persentase Capaian 100%
4. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan persentase Capaian 61.17%
5. Jumlah Perangkat Daerah yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Capaian 6 Perangkat Daerah

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024.

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan sebagai salah satu pelaksana kewenangan daerah otonom sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232) urusan guna memberikan pelayanan prima kepada public yaitu urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Rencana Kerja Tahunan (Rencana Kerja) Tahun 2023 terdapat 5 (Lima) program dan 12 (Duabelas) kegiatan dengan 30 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan usulan sumber biaya yang berasal dari APBD Kabupaten Solok Selatan. Rencana Pendanaan tersebut sebesar Rp. 4.350.454.840,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bersumber dari APBD Kabupaten Solok Selatan Rp. 4.350.454.840,-
- Bersumber dari APBD Provinsi Rp.-

Daftar usulan Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja 2024 yaitu seperti pada table 3.1. Dari program/kegiatan yang tertuang dan Rencana Kerja Tahunan (Rencana Kerja) Tahun 2024 yang terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah Sebanyak 5 (lima) program dan 11 (Sebelas) kegiatan dengan total anggaran adalah sebesar Rp. 5.329.769.156,- yang bersumber dari:

- APBD Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp. 5.329.769.156,-
- APBD Provinsi sebesar Rp.–
- APBN sebesar Rp.–

Program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

Pada Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tidak ada Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja

1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten /kota
   a. Administrasi Keungan Perangkat Daerah

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu mampu memenuhi kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar (90,3%)

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu mampu memenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 1 tahun baru teralisasi sebesar (96,5%)

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar (93,9%)

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 12 bulan sebesar (96,1%)

2. Program Pendaftaran Penduduk

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebesar (90,8%)

b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebesar (81,5%)

c. Program Pencatatan Sipil

a. Pelayanan Pencatatan Sipil

Capaian pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebesar (76,5%)

b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Capaian pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebesar (78,0%)

d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Pengumpulan Data Kependudukan Danpemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan

Capaian pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan Dan pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebesar (77,4%)

b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Capaian pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebesar (79,2%)

e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

a. Penyusunan Profil Kependudukan

Capaian pelaksanaan kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebesar (74,3%)

Adapun faktor pendukung tercapainya Target Kinerja pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil antara lain:

1.Tersedianya Anggaran untuk pelaksanaan program Dan Kegiatan

2.Terlaksananya Koordinasi antar perangkat daerah dengan baik

3. Adanya Komitmen antara pihak terkait

4.Pembagian Tugas (Job Description)

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja

Dalam hal ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan terdapat Pencapaian Program/Kegiatan yang melebihi dari target dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Kartu Keluarga Target 98 % yang memiliki kk sebanyak 54.923 dengan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 55.161 dengan persentase Capaian sebesar 99,56 %
2. Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki KTP Target 94% jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang sudah Rekam KTP-EL sebanyak 123.640 dengan penduduk 17 tahun keatas tercapai sebanyak 131.391 dengan persentase Capaian 94,10 %
3. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Target 50% jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA yaitu tercapai sebanyak 30,297 dengan jumlah anak wajib KIA sebayak 54,615 dengan persentase Capaian 55,47%.

Adapun faktor pendukung tercapainya Target Kinerja pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil antara lain:

1.Tersedianya Anggaran untuk pelaksanaan program Dan Kegiatan

2.Terlaksananya Koordinasi antar perangkat daerah dengan baik

3. Adanya Komitmen antara pihak terkait

4.Pembagian Tugas (Job Description)

2.1.4 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Dalam hal Penataan Administrasi Kependudukan dengan rincian Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Akta Kematian, Secara umum Masyarakat di kabupaten Solok Selatan sudah memiliki dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan)

2.1.5 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk Meningkatkan target kinerja Program/Kegiatan

Langkah - langkah yang perlu dilakukan adalah:

- penambahan personil ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui BKPSDM sesuai dengan kebutuhan SOTK Dinas.
- Penambahan Anggaran yang menjadi Program Prioritas secara Nasional
- Penambahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan .

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 tersaji dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Solok Selatan

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2021 ad 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja DUKCAPIL tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Satuan	Target		Target Renja DUKCAPIL 2023	Realisasi Renja DUKCAPIL 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen	100	33	100	100	100	100	66	66
2.12.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Persen	100	33	100	100	100	100	66	66
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	Laporan	30	4	5	5	100		5	16
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Prasarana untuk Meningkatkan Imun Tubuh dalam rangka pelaksanaan Pelayanan pada Masa Covid-19	Dokumen	1	1					1	100
2.12.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	50	50

2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	167	21	30	29	97	30	13	8
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	24	4	4	4	100	4	2	8
		Jumlah tenaga pendukung operasional kantor yang dibayarkan	Orang	23				0	0	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangakat Daerah	Persentase Jumlah Peserta Sosialisasi	Persen	100	100	100	100	100	100	50	50
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Soslalisasi	Orang	50	50			0	0	50	100
2.12.01.2.06	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum	Persen	100	100	100	100	100	100	50	50
2.12.01.2.06.01	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instlasi Listrik atau penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	24	4	4	4	0	4	12	50
2.12.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	24	4	4	4	100	4	12	50
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan Rumah tangga yang disediakan	Paket	24	4	4	4	100	4	12	50
2.12.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandan yang disediakan	Paket	24	4	4	4	100	4	12	50
		Jumlah Paket barang cetakan dan penggandan yang disediakan	Paket	24		4	4	100	4	8	33
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasiltasi kunjungan tamu	Laporan	16		4	4	0	4	0	0
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Laporan	24	4	4	4	100	4	12	50
				24		4	4	100		4	17

2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia**	**Persen**	100	100	100	100	100	100	50	50
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	24	4	4	4	**100**	4	12	50
2.12.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	24	12	12			12	24	100
				24			12	**100**			
				24							
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan kantor yang disediakan	Laporan	24	4	4	4	**100**	4	12	50
2.12.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga pendukung operasional kantor yang dibayarkan	orang	12	2		2		12	3	22
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik Daerah yang terpelihara**	**Persen**	100	100	100	100	100	100	50	50
2.12.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	8	8	8	8	**100**	8	24	3
			Unit	8	8	8	8	**100**	8	24	3

2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	1		1	1	100	1	2	2
2.12.01.2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase barang milik daerah yang tersedia	Persen	100		100	100	100	100	33	33
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	unit					0		0	0
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainya	Jumlah unit sarana dan prasaran gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	3				0		0	0
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase rumah tangga yang memiliki KK,	person	100	99	98	99	104	98	49	49
		Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP	person	100	102	100	101	101	100	51	51
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	persen	85	48	40	48	115	80	24	28
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	50	50
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk	Orang	47000		16000	1500	9	70000	11917	25
2.12.02.2.01.02	Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang di terbitkan	Dokumen	339332		87200	60000	69	69212	21535	8
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Nagari yang melaksanakan Pelayanan terpadu,	Nagari	282	37	47	25	53	47	18	8
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelnporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen kependudukan (KIA)	Dokumen	60500		12000	7000	58	13500	3417	6
2.12.02.2.01.08	Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Data Untuk Pengambilan Kebijakan Pendaftaran Penduduk	Paket Data	30	6					1	3

2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang terfasilitasi	Persen	100		78		0	100	17	17
2.12.02.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan pendaftaran Penduduk	Bulan	305		12	5	42	18	4	1
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta Sosialisasi	orang	300		180		0	100	17	6
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan sipil**	Persen	100	104	97,5	95	97	100	50	50
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Persen	100		97,5	95	97	100	33	33
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	dokumen	47506		10.500		0	9.476	9476	20
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Orang	282	37	47	47	100	47	131	46
2.12.03.2.01.03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil melalui Pemuatlhiran	Paket Data	39		7		0	8	8	21

2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase jumlah penduduk yang terpasilitasi penyelenggaraan pencatatan sipil	Persen	100		90		0	100	17	17
2.12.03.2.02.03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Tahun	216		35	15	43	45	60	28
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Isbath Nikah	Kali	17		4	4	100	7	11	65
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Orang	305		50	55	110	61	19	6
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Perangkat Derah yang Memiliki Akses pemanfaatan Data kependudukan	Persen	100	25	48		0	72	16	16
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Ketersediaan data Administrasi Kependudukan	Persen	100		100	100	100	100	33	33
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kecpendudukan	Jumlah OPD dan Instansi yang memiliki hakAkses	OPD	420		30	30	100	26	56	13
		Jumlah MOU atau PKS pemanfaatan data kependudukan	MOU	191		15	15	100	37	52	27
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan	Persen	100		100		0	100	17	17
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah dikab/kota dalam penertiban Informasi adm Kependudukan	Jumlah Koordinasi dalam Penertiban SIAK	Kali	150		30	15	50	10	25	17

2.12.04.2.03.03	Fasilitasi TerkaitPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jenis Perangkat, untuk Pengembangan dan Pemeliharaan Perangkat SIAK	Jenis	75		15	15	100	15	5	7
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi SIAK	Orang	200		100	49	49	100	25	12
2.12.04.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan SIAK	Persen	100		100		0	100	17	17
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlatihnya Pengelola Siak dan Operator	Orang	330						0	0
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Ketersediaan Dokumen Profil Kependudukan**	Dokumen	6		1	1	100	1	2	33
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah Buku Profil Kependudukan Yang Diterbitkan**	Buku	1000		200	200	100	200	67	7
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Kependudukan Yang Diterbitkan	Buku	1000		200	140	70	200	57	6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Indikator Kinerja yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan. Capaian Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sampai dengan keadaan Desember 2023

Pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan. Metode perbandingan capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NAMA PERANGKAT DAERAH :DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	INDIKATOR	SPM/STANTAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase rumah tangga yang memiliki KK		√	98	100	100	100	99,65	100	100	100	
2	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP		√	100	100	100	100	101,88	100	100	100	
3	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak		√	50	60	75	85	47,01	60	60	75	
4	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil		√	100	100	100	100	97,70	100	100	100	
5	Persentase perangkat daerah yang memiliki akses pemanfaatan data kependudukan		√	72	100	100	100	25	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis yang Terkait Dengan Pelayanan

Sekaitan dengan koordinasi dan sinergi program dengan Propinsi berjalan sesuai dengan tuntutan lembaga tingkat pusat (Kementrian Dalam Negeri). Berdasarkan tupoksi yang telah ada dan juga telah berkoordinasi/konsultasi dengan pemerintahan provinsi dan pusat tentang permasalahan dan kebutuhan daerah dimana setiap tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan telah melaksanakan sinkronisasi Data dan Program kerja dan rapat forum komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap bulan se Provinsi Sumatera Barat.

Isu penting dalam Program Penataan Administrasi Kependudukan adalah :

a. Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun (Nawacita Pertama Target Nasional tahun 2019 tuntas 81,12%)
b. Penuntasan Perekaman KTP Elektronik bagi Wajib KTP
c. Peningkatan cakupan penerbitan Akta Kematian

2.3.2 Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Permasalahan : Masih belum optimalnya layanan Administrasi Kependudukan.

Penyebabnya adalah :

1. Belum Optimalnya pelayanan Dan Pengelolaan Administrasi Kependudukan terutama bagi daerah terpencil,perbatasan Kabupaten Dan Kawan Perusahaan
2. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalm pentingnya pengurusan administrasi Kependudukan
3. Sulit nya aksesbilitas dan jaringan komunikasi bagi masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan
4. Rendahnya dukungan stakeholder terkait pengumpulan data kependudukan

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

a. Belum optimalnya Pencapaian Kinerja Program Terhadap Visi, Misi Kepala Daerah, Program Nasional/Internasional seperti SPM dan MDGS.
b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
c. Luasnya jangkauan terhadap Pelayanan
d. Perangkat alat Perekaman Data Elektronik dikecamatan sering mengalami kerusakan
e. Belum tersedianya tenaga teknis khusus untuk perbaikan perangkat alat tersebut.

Tantangan Dan Peluang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Barat, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu sistem pelayanan berstandar Internasional terhadap masyarakat pada lingkup Negara Indonesia yang dilaksanakan untuk Warganegara Indonesia dimana pun berada diseluruh dunia.

Berdasarkan kondisi dan potensi di berbagai bidang yang merupakan kondisi lingkungan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (Analisa SWOT). Lingkungan internal meliputi

Kekuatan *(Strengths)* dan Kelemahan *(Weaknesses)*. Lingkungan eksternal meliputi Peluang *(Opportunity)* dan Ancaman (*Threaths)*. Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S) :

1) Komitmen untuk meningkatkan pelayanan informasi Administrasi Kependudukan.
2) Telah diberlakukannya Peraturan perundang undangan tentang Administrasi Kependudukan.
3) Semakin Maju Teknologi Informasi .

KELEMAHAN (W) :

1) Keterbatasan sumber daya aparatur
2) Kurangnya koordinasi dengan unit kerja terkait.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O) :

1) Dukungan Dari DPRD untuk tingkatkan Pelayanan.
2) Adanya Komitmen antara pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah daerah Khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.
3) Semua pelayanan untuk Masyarakat pada semua lembaga baik pemerintah maupun swasta berbasis Nik

ANCAMAN (T) :

1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang persyaratan administrasi kependudukan
2) Terjadinya tunggak kerja pada waktu tertentu.
3) Adanya percaloan dalam pengurusan dokumen kependudukan

2.3.4 Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Peningkatan Pelayanan Publik yang Good Governance (Terkait dengan peningkatan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah ; Reformasi Birokrasi;

Profesionalitan ASN; Dan Indeks Kepuasan masayrakat terhadap pelayanan pemerintah).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian perbandingan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan hasil analisa kebutuhan, setelah anggaran disahkan terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD,data rincinya dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN SOLOK SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Rencana Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN**		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	100 Persen	3.150.000.000	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN**		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	100 Persen	4.400.048.984	
1	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100 Persen	4.307.000	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan pelaporan tepat waktu		14.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukcapil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	5 laporan	4.307.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukcapil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	5 laporan	14.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.565.389.992	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.742.108.973	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dukcapil	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	2.547.389.992	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dukcapil	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	30 orang/bulan	3.621.628.973	pegawai bertambah
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukcapil	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen	18.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukcapil	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honornya	4 Dokumen	120.480.000	
3	Administrasi umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	298.992.568	Administrasi umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	239.119.611	
	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dukcapil	Jumlah paket komponen instlasi Listrik atau penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	11.313.500	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dukcapil	Jumlah paket komponen instlasi Listrik atau penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	5.000.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dukcapil	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	42.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dukcapil	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	34.999.400	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dukcapil	Jumlah paket peralatan Rumah tangga yang disediakan	4 Paket	16.227.930	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dukcapil	Jumlah paket peralatan Rumah tangga yang disediakan	4 Paket	8.308.500	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dukcapil	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandan yang disediakan	4 Paket	22.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dukcapil	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandan yang disediakan	4 Paket	24.279.711	
			Jumlah Paket barang cetakan dan penggandan yang disediakan	4 Paket	30.000.000			Jumlah Paket barang cetakan dan penggandan yang disediakan	4 Paket		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dukcapil	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan	9.300.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dukcapil	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan	8.190.000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukcapil	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	4 Laporan	157.951.138	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukcapil	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	4 Laporan	158.342.000	
					10.200.000						
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah**	Dukcapil	Persentase barang milik daerah yang tersediah	100 Persen	-	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah**	Dukcapil	Persentase barang milik daerah yang tersediah	100 Persen	30.031.100	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainya	Dukcapil	Jumlah unit sarana dan prasaran gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainya	Dukcapil	Jumlah unit sarana dan prasaran gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	30.031.100	
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen	**94.480.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen	**191.789.500**	
	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Dukcapil	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	7.050.000	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Dukcapil	Tersedianya jasa surat menyurat	4 Laporan	2.000.000	
	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dukcapil	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	45.130.000	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dukcapil	Jumlah pemakaian jasa listrik,	12 Laporan	69.999.500	
					8.000.000			Jumlah pemakaian telpon/internet			
					7.300.000			Jumlah pemakaian air			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dukcapil	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan kantor yang disediakan	4 Laporan	27.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dukcapil	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Laporan	14.790.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dukcapil	Jumlah tenaga pendukung operasional kantor yang dibayarkan honornya			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dukcapil	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	12 Laporan	105.000.000	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen	**186.830.440**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen	**182.999.800**	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dukcapil	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit	169.330.440	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dukcapil	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit	169.997.900	
				8 unit	4.500.000				8 unit		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dukcapil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 unit	13.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dukcapil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 unit	13.001.900	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dukcapil	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung Kantor atau bagunan			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dukcapil	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung Kantor atau bagunan			

7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah yang tersediah	100 Persen	-	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah yang tersediah	100 Persen	-	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Dukcapil	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Dukcapil	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya			
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainya	Dukcapil	Jumlah unit sarana dan prasaran gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainya	Dukcapil	Jumlah unit sarana dan prasaran gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			
II			Persentase rumah tangga yang memiliki KK,	**100 persen**				Persentase rumah tangga yang memiliki KK,	**100 persen**		
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP	**100 Persen**	**1.700.000.000**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP	**100 Persen**	**392.641.200**	
			Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	**75 Persen**				Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	**75 Persen**		
8	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 Persen	**1.040.000.000**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 Persen	**322.162.200**	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dukcapil	Jumlah Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk	7000 orang	100.000.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dukcapil	Jumlah Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk	7000 orang	20.999.900	
	Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang di terbitkan	90000 Dokumen	237.302.000	Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang di terbitkan	69212 Dokumen	138.336.000	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	Jumlah Nagari yang melaksanakan Pelayanan terpadu,	47 Nagari	431.373.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	Jumlah Nagari yang melaksanakan Pelayanan terpadu,	47 Nagari	35.946.000	
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dukcapil	Jumlah Data Untuk Pengambilan Kebijakan Pendaftaran Penduduk	10000 Dokumen	241.925.000	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dukcapil	Jumlah Data Untuk Pengambilan Kebijakan Pendaftaran Penduduk	13500 Dokumen	92.795.100	
	Pengumpulan,Analisis dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Dukcapil	Jumlah Data Untuk Pengambilan Kebijakan Pendaftaran Penduduk	5 Paket Data	29.400.000	Pengumpulan,Analisis dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Dukcapil	Jumlah Data Untuk Pengambilan Kebijakan Pendaftaran Penduduk	5 Paket Data	34.085.200	
9	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**		Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang terfasilitasi	100 Persen	**660.000.000**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**		Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang terfasilitasi	100 Persen	**70.479.000**	

	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	Jumlah Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kab/kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk	67 Kali	410.000.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	Jumlah Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kab/kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk		22.042.000	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	Jumlah peserta sosialisasi pendataran penduduk	50 orang	250.000.000	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	Jumlah peserta sosialisasi pendataran penduduk	50 orang	48.437.000	
III	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan sipil**	100 Persen	**200.000.000**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan sipil**	100 Persen	**111.354.900**	
10	**Pelayanan Pencatatan Sipil**		Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	100 Persen	**124.750.000**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**		Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	100 Persen	**23.354.900**	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dukcapil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang di terbitkan	9002Dokumen	22.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dukcapil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang di terbitkan	9476 Dokumen	10.352.800	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dukcapil	Jumlah Nagari yang melaksanakan Pelayanan terpadu,	47 Nagari	80.700.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dukcapil	Jumlah Nagari yang melaksanakan Pelayanan terpadu,	47 Nagari	10.749.400	
	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dukcapil	Jumlah Data Untuk Pengambilan Kebijakan Pencatatan Sipil	8 Paket Data	22.050.000	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dukcapil	Jumlah Data Untuk Pengambilan Kebijakan Pencatatan Sipil	8 Paket Data	2.252.700	
11	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**Persentase jumlah penduduk yang terpasilitasi penyelenggaraan pencatatan sipil**	**100 Persen**	**75.250.000**	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		Persentase jumlah penduduk **yang terpasilitasi penyelenggaraan pencatatan sipil**	**100 Persen**	**88.000.000**	
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Dukcapil	Jumlah Koordinasi antar lembaga Pemerintahan dan lembaga non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	45 kali	30.250.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Dukcapil	Jumlah Koordinasi antar lembaga Pemerintahan dan lembaga non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	45 kali		
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Dukcapil	Jumlah Sidang Isbat yang dilaksanakan	3 kali	-	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Dukcapil	Jumlah Sidang Isbat yang dilaksanakan	3 kali	50.000.000	
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Dukcapil	Jumlah peserta Sosialisasi Pencatatan Sipil	61 Orang	45.000.000	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Dukcapil	Jumlah peserta Sosialisasi Pencatatan Sipil	61 Orang	38.000.000	

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		**Persentase Perangkat Derah yang Memiliki Akses pemanfaatan Data kependudukan**	100 Persen	**110.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**Persentase Perangkat Derah yang Memiliki Akses pemanfaatan Data kependudukan**	100 Persen	**150.940.900**	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		**Persentase Ketersediaan data Administrasi Kependudukan**	100 Persen	**30.000.000**	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**		**Persentase Ketersediaan data Administrasi Kependudukan**	100 Persen	**73.520.300**	
Kerjasama Pemanfaatan Data Ke kecpendudukan	Dukcapil	Jumlah OPD dan Instansi yang memiliki hakAkses	26 OPD	30.000.000	Kerjasama Pemanfaatan Data Ke kecpendudukan	Dukcapil	Jumlah OPD dan Instansi yang memiliki hak Akses	25 OPD	73.520.300	
		Jumlah MOU atau PKS pemanfaatan data kependudukan	40 MOU				Jumlah MOU atau PKS pemanfaatan data kependudukan	39 MOU		
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		**Persentase Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan**	100 Persen	60.000.000	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Persentase Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan**	100 Persen	77.420.600	
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah dikab/kota dalam penertiban informasi adm Kependudukan	Dukcapil	Jumlah Koordinasi dalam Penertiban SIAK	30 Kali	30.000.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah dikab/kota dalam penertiban informasi adm Kependudukan	Dukcapil	Jumlah Koordinasi dalam Penertiban SIAK	30 Kali		
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dukcapil	Jenis Perangkat, untuk Pengembangan dan Pemeliharaan Perangkat SIAK	15 Jenis	30.000.000	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dukcapil	Jenis Perangkat, untuk Pengembangan dan Pemeliharaan Perangkat SIAK	15 Jenis	54.999.900	
Sosialisasi Terkait Pengelolan Informasi Administrasi Kependudukan	Dukcapil	Jumlah peserta sosialisasi SIAK	100 orang	-	Sosialisasi Terkait Pengelolan Informasi Administrasi Kependudukan	Dukcapil	Jumlah peserta sosialisasi SIAK	100 orang	22.420.700	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		**Persentase Pembinaan dan Pengawasan SIAK**	100 Persen	**20.000.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Persentase Pembinaan dan Pengawasan SIAK**	100 Persen	-	
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dukcapil	Jumlah peserta Bimbingan teknis SIAK	66 Orang	20.000.000	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dukcapil	Jumlah peserta Bimbingan teknis SIAK	66 Orang		

V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Ketersediaan Dokumen Profil Kependudukan	1 Dokumen	40.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Ketersediaan Dokumen Profil Kependudukan	1 Dokumen	35.000.300	
15	Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah Buku Profil Kependudukan Yang Diterbitkan	200 Buku	40.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah Buku Profil Kependudukan Yang Diterbitkan	200 Buku	35.000.300	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dukcapil	Jumlah Buku Profil Kependudukan Yang Diterbitkan	200 Buku	40.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dukcapil	Jumlah Buku Profil Kependudukan Yang Diterbitkan	210 Buku	35.000.300	
	JUMLAH				5.200.000.000					5.089.986.284	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk Tahun 2025 usulan program dan kegiatan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan belum diperoleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai dari musrenbang tingkat kecamatan sampai dengan musrenbang kabupaten.Sekaitan dengan hal tersebut isu-isu penting yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta anggaran yang diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka memenuhi target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan belum ada usulan untuk mendapatkan dana bantuan dari APBD Propinsi.

TABEL 2.3

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

TAHUN 2025

KABUPATEN SOLOK SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu prioritas Program nasional adalah melaksanakan reformasi birokrasi yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten solok selatan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil, memandang perlu menerapkan di daerah.

Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara dan telah ditindaklanjuti oleh Kementrian Dalam Negeri khusus Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia. Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran anak Usia 0-18 Tahun 2024 dengan Target Nasional 100% dan penuntasan perekaman KTP-elektronik dengan target 99,4% dan dilanjutkan dengan kegiatan Penerbitan Kartu Identitas anak (KIA).dengan target Nasional 70%

Disamping itu mempedomani apa yang telah dituangkan oleh Biro Pemerintahan Bagian Kependudukan dan pencatatan Sipil Propinsi Sumatera Barat dengan Program Prioritasnya Peningkatan Kepemilikan KTP-elektronik dan Akta Kelahiran.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan melaksanakan program prioritas yang telah dituangkan pada program Pusat dan Propinsi. Mengacu pada Program Dan Kegiatan maka dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan menggulirkan beberapa Kinerja prioritas antara lain:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

1. Meningkatnya Tertib Adminisrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Tertib Adminisrasi Pencatatan Sipil
3. Meningkatnya pemanfaatan Database Kependudukan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya Tertib Adminisrasi Kependudukan	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga (Jumlah Kartu Keluarga Yang Diterbitkan), KTP Dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
2	Meningkatnya Tertib Adminisrasi Pencatatan Sipil	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dibawah 0-18 tahun (Jumlah Akata Kelahiran Usia 0-18 Tahun yang Diterbitkan), Akta Kematian Dan Kepemilikan Akta Perkawinan
3	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbangunnya sistem informasi layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Jumlah laporan data kependudukan yang diterbitkan)
		Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Jumlah Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah yang disetujui)

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil antara lain yaitu Penerbitan Kartu Keluarga (KK) , Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran/ Akta Kematian serta Dokumen penting lainnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam Penyelenggaraan kegiatan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menyusun Rencana Kerja program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2025. Dan hal ini untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusunlah Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan yang berpedoman kepada RPJMD 2021-2026.Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **"Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Yang Akurat dan Aman Tahun 2026".**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Solok Selatan. Tahun 2021-2026 misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Update Database kependudukan yang benar dan akurat melalui Pelayanan menggunakan SIAK Online.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Membudaya.
3. Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan Stelsel aktif berupa Pelayanan menggunakan mobil keliling.
4. Mewujudkan Pendokumentasian Dokumen Kependudukan secara tertib dan terpadu.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019,mengampu satu urusan yaitu Urusan Pemerintahan. Pada urusan tersebut terdapat 5 Program , 13 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan.Terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 ada beberapa perbedaan dengan analisa kebutuhan dikarenakan dengan masih menyesuaikan dengan usulan pada Renstra tahun 2021-2026.

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Tujuan Dan sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

RUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA**	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Installasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Fasilitasi Kunjungan

			Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan 2. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2	**PENDAFTARAN PENDUDUK**	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen

			atas Pendaftaran Penduduk 3.Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 4. Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 5.Pengumpulan Analisis dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
3	**PENCATATAN SIPIL**	Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 2. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 3. Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Fasilitasi terkait

			Pencatatan Sipil 3. Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
4	**PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1. Kerjasama Pemanfaatan Data Ke kependudukan
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah dikab/kota dalam penertiban Informasi adm Kependudukan 2. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3. Sosialisasi Terkait Pengelolan Informasi Administrasi Kependudukan
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Penyusunan Profil Kependudukan	1. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 berisi program/kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Perangkat Daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, adalah sebagaimana tercantum pada Bab III tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026. Perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN SOLOK SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Prograk Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**		100 Persen	**4.400.048.984**			100 Persen	**4.904.938.878**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan pelaporan tepat waktu**		**100 Persen**	**14.000.000**			**100 Persen**	**15.000.000**
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	Dukcapil	5 laporan	14.000.000	DAU		5 laporan	15.000.000
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**3.742.108.973**			**100 Persen**	**4.104.271.870**
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukcapil	30 orang/bulan	3.621.628.973	DAU		30 orang/bulan	3,983,791,870
2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dukcapil	4 Dokumen	120.480.000	DAU		4 Dokumen	120,480,000
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**239.119.611**			100	**326.692.024**
2	12	01	2.06	0001	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instlasi Listrik atau penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dukcapil	4 Paket	5.000.000	DAU		4 Paket	12,444,850
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dukcapil	4 Paket	34.999.400	DAU		4 Paket	53,655,947
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan Rumah tangga yang disediakan	Dukcapil	4 Paket	8.308.500	DAU		4 Paket	18,667,275
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandan yang disediakan	Dukcapil	4 Paket	24,279,711	DAU		4 Paket	33,205,000
						Jumlah Paket barang cetakan dan penggandan yang disediakan	Dukcapil			DAU			
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Dukcapil	4 Laporan	8.190.000	DAU		4 Laporan	9,300,000

2	**12**	**01**	**2.06**	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Dukcapil	4 Laporan	158.342.000	DAU		4 Laporan	199.418.952
							Dukcapil			DAU			
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah**	Persentase barang milik daerah yang tersedlah		100 Persen	**30.031.100**			100 Persen	**35.000.000**
2	**12**	**01**	**2.07**	0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainya	Jumlah unit sarana dan prasaran gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Dukcapil	1 unit	30.031.100	DAU		1 unit	35.000.000
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia		100 Persen	**191.789.500**			100 Persen	**227.211.500**
2	12	01	2.08	0001	Penyedlaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah laporan penyedlaan jasa surat menyurat	Dukcapil	4 Laporan	2.000.000	DAU		4 Laporan	7.750.000
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyedlaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disedlakan	Dukcapil	12 Laporan	69.999.500	DAU		12 Laporan	70.000.000
							Dukcapil			DAU			
							Dukcapil			DAU			
2	12	01	2.08	0003	Penyedlaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyedlaan jasa peralatan kantor yang disedlakan	Dukcapil	4 Laporan	14.790.000	DAU		4 Laporan	33.961.500
2	12	01	2.08	0004	Penyedlaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	Dukcapil	12 Laporan	105.000.000	DAU		12 Laporan	115.500.000
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang terpelihara		100 Persen	**182.999.800**			100 Persen	**196.763.484**
2	12	01	2.09	0002	Penyedlaan jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dukcapil	8 unit	169.997.900	DAU		8 unit	181.763.484
							Dukcapil			DAU			
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Dukcapil	1 unit	13.001.900	DAU		1 unit	15.000.000
2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung Kantor atau bagunan	Dukcapil	1 unit		DAU			
2	**12**	**01**	**2.10**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang tersediah		100 Persen	-			100 Persen	-
2	**12**	**01**	**2.10**	0001	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	Dukcapil	1 unit		DAU		1 unit	

2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase rumah tangga yang memiliki KK,		**100 persen**	**392.641.200**			**100 persen**	**1.389.000.000**
						Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP		**100 Persen**				**100 Persen**	
						Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak		**75 Persen**				**85 Persen**	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan		100 Persen	**322.162.200**			100 Persen	**1.109.000.000**
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk	Dukcapil	7000 Dokumen	20.999.900	DAU		7000 orang	115.159.050
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang di terbitkan	Dukcapil	69212 Dokumen	138.336.000	DAU		90000 Dokumen	261.032.200
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Nagari yang melaksanakan Pelayanan terpadu,	Dukcapil	47 Nagari	35.946.000	DAU		47 Nagari	472.110.000
2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Data Untuk Pengambilan Kebijakan Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	13500 Dokumen	92.795.100	DAU		10000 dokumen	229.828.750
	12	02	2.01	0008	Pengumpulan,Analisis dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Data Untuk Pengambilan Kebijakan Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	5 Paket Data	34.085.200	DAU		5 paket data	30.870.000
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang terfasilitasi		100 Persen	**70.479.000**			100 Persen	**280.000.000**
2	12	02	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kab/kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk	Dukcapil	61 Kali	22.042.000	DAU		67 Kali	40.000.000
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta sosialisasi pendaturan penduduk	Dukcapil	50 orang	48.437.000	DAU		50 orang	240.000.000

2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan sipil**		100 Persen	**111.354.900**			100 Persen	**240.000.000**
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil		100 Persen	**23.354.900**			100 Persen	**146.725.000**
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang di terbitkan	Dukcapil	9476 Dokumen	10.352.800	DAU		9002 Dokumen	21.450.000
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Nagari yang melaksanakan Pelayanan terpadu,	Dukcapil	47 Nagari	10.749.400	DAU		47 Nagari	102.122.500
2	12	03	2.01	0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Data Untuk Pengambilan Kebijakan Pencatatan Sipil	Dukcapil	8 Paket Data	2.252.700	DAU		8 Paket Data	23.152.500
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Persentase jumlah penduduk yang terpasilitasi penyelenggaraan pencatatan sipil		100 Persen	**88.000.000**			100 Persen	**93.275.000**
2	12	03	2.02	0003	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Koordinasi antar lembaga Pemerintahan dan lembaga non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Dukcapil	45 kali		DAU		45 kali	33.275.000
2	12	03	2.02	0006	Fasiltasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Sidang Isbat yang dilaksanakan	Dukcapil	3 kali	50.000.000	DAU		3 kali	20.000.000
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta Sosialisasi Pencatatan Sipil	Dukcapil	61 Orang	38.000.000	DAU		67 Orang	40.000.000

2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Perangkat Derah yang Memiliki Akses pemanfaatan Data kependudukan**		100 Persen	**150.940.900**			100 Persen	**153.000.000**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Persentase Ketersediaan data Administrasi Kependudukan**		100 Persen	**73.520.300**			100 Persen	**38.000.000**
2	12	04	2.01	0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Ke kecpendudukan	Jumlah OPD dan Instansi yang memiliki hakAkses	Dukcapil	26 OPD	73.520.300	DAU		26 OPD	38.000.000
						Jumlah MOU atau PKS pemanfaatan data kependudukan	Dukcapil	39 MOU				40 MOU	
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan		100 Persen	**77.420.600**			100 Persen	**115.000.000**
2	12	04	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah dikab/kota dalam penertiban Informasi adm Kependudukan	Jumlah Koordinasi dalam Penertiban SIAK	Dukcapil	30 Kali		DAU		30 Kali	30.000.000
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jenis Perangkat, untuk Pengembangan dan Pemeliharaan Perangkat SIAK	Dukcapil	15 Jenis	54.999.900	DAU		15 Jenis	60.000.000
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi SIAK	Dukcapil	100 orang	22.420.700	DAU			25.000.000
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan SIAK		100 Persen	-			100 Persen	-
1	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah peserta Bimbingan teknis SIAK	Dukcapil	66 Orang				66 Orang	

2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Perangkat Derah yang Memiliki Akses pemanfaatan Data kependudukan**		100 Persen	**150.940.900**			100 Persen	**153.000.000**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Persentase Ketersediaan data Administrasi Kependudukan**		100 Persen	**73.520.300**			100 Persen	**38.000.000**
2	12	04	2.01	0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Ke kecpendudukan	Jumlah OPD dan instansi yang memiliki hakAkses	Dukcapil	26 OPD	73.520.300	DAU		26 OPD	38.000.000
						Jumlah MOU atau PKS pemanfaatan data kependudukan	Dukcapil	39 MOU				40 MOU	
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan		100 Persen	**77.420.600**			100 Persen	**115.000.000**
2	12	04	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah dikab/kota dalam penertiban Informasi adm Kependudukan	Jumlah Koordinasi dalam Penertiban SIAK	Dukcapil	30 Kali		DAU		30 Kali	30.000.000
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jenis Perangkat, untuk Pengembangan dan Pemeliharaan Perangkat SIAK	Dukcapil	15 Jenis	54.999.900	DAU		15 Jenis	60.000.000
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi SIAK	Dukcapil	100 orang	22.420.700	DAU			25.000.000
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan SIAK		100 Persen	-			100 Persen	-
1	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah peserta Bimbingan teknis SIAK	Dukcapil	66 Orang				66 Orang	
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Ketersediaan Dokumen Profil Kependudukan**		1 Dokumen	**35.000.300**			1 Dokumen	**40.000.000**
2	**12**	**05**	2.01		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah Buku Profil Kependudukan Yang Diterbitkan**		200 Buku	**35.000.300**			200 Buku	**40.000.000**
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Kependudukan Yang Diterbitkan	Dukcapil	200 Buku	35.000.300	DAU		200 Buku	40.000.000
					JUMLAH				**5.089.986.284**		-		**6.726.938.878**

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,maka diharapkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sesuai dengan visi Dan misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam kaitan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya telah berupaya mencurahkan segala daya dan upaya untuk mencapai kinerja yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat dalam hal pelayanan Dokumen Kependudukan dan peningkatan Sumber Daya Aparatur.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 merupakan acuan didalam menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 baik uraian kegiatan maupun jumlah anggarannya. Dalam melaksanakan kegiatan yang telah diajukan, haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu efektif, efisien dan tepat guna.

Setelah Rencana Kerja ini dibuat, maka perlu dipersiapkan Kebijakan umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2025 serta Pra RKA, RKA dan DPA.Dalam penganggaran/pendanaannya harus mengoptimalkan anggaran yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan indikator kinerja dan tolak ukurnya.

Oleh sebab itu demi penyempurnaan program dan kegiatan di masa mendatang bimbingan dan arahan dari Pimpinan Daerah serta masukan-masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tetap menjadi harapan kami. Atas segala

bimbingan, arahan, dukungan, kerjasama dan masukan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Padang Aro, Juli 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN SOLOK SELATAN

H.HAMUDIS.S.Pd

NIP.196806011995121002

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5

2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Kominfo 14

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika 18

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 19

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 30

BAB.III TUJUAN DAN SASARAN PERANGAKAT DAERAH 32

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 32

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 34

3.3. Program dan kegiatan 35

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOLOK SELATAN 38

BAB. V PENUTUP 46

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2025, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, Provinsi dalam hal ini Dinas Komunikasidan Informasi Provinsi Sumatera Barat. Oleh karenanya, substansi Renja /harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat Provinsi, dan tentunya mengacu pada RKPD Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hokum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 04/ PER/ M.KOMINFO/ 03/ 2010, LL KEMENKOMINFO.
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/ PER/ M.KOMINFO/ 12/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Deerah Tahun

2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lemabaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3)
14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 89 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 89).
15. Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 42).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam rangka perwujudan kepemerintahan yang baik *(good governance).* Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasidan Informatika

adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu 1 Tahun Anggaran (periode 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025).

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini adalah sebagai berikut :

- **BAB I Pendahuluan :** Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;
- **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu :**Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- **BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah :** Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD, serta Program dan Kegiatan;
- **BAB IV Rencana Kerjadan Pendanaan Perangkat Daerah**
- **BAB V Penutup.**

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan adalah penjabaran perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam pencapaian tujuan–tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dari output dan pengukuran kinerja program dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan selama Tahun 2024 dan perkiraan target Tahun 2025.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026 mengacu pada hasil laporan kinerja Tahunan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan 2024 dan realisasi APBD untuk Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun anggaran 2024.

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah mencapai nilai rata-rata capaian kinerja output sebesar 96,21%. Adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 7.009.969.795,-Berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	1. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Nilai Indeks SPBE	2,34	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.285.343.854
				Program Aplikasi Informatika	Rp. 2.263.697.239
		Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap layanan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	80%	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 1.445.265.568
		Tingkat keamanan informasi daerah	33%		Rp. 46.999.760
2	Meningkatkan penyelenggaraan tatistic sektoral	Persentase data sektoral OPD yang dikelola	100%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 85.050.000

Uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja output Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Program informasi dan komunikasi publik terdiri dari satu kegiatan yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/ kota dan beberapa sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan media komunikasi publik dengan anggaran Rp. 57.964.000,- sudah sebesar Rp. 54.410.000,- atau sebesar 93,87%.
2. Pelayanan informasi publik dengan anggaran Rp. 26.331.900,- terealisasi sebesar Rp. 26.040.800,- atau sebesar 98,89%.
3. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas dengan anggaran Rp. 1.228.008.497,- terealisasi sebesar Rp. 992.837.090,- atau 80,85%.
4. Penyediaan/ pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/ kota dengan anggaran Rp. 232.102.891,- terealisasi sebesar Rp. 232.102.891,- atau sebesar 97,44%.

b. Program penyelenggaraan statistik sektoral terdiri dari satu kegiatan yaitu penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup pemerintah daerah kabupaten/ kota dan satu sub kegiatan yaitu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral. Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 85.050.000,- terealisasi sebesar Rp. 81.457.440,- atau sebesar 95,78%.

c. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi terdiri dari satu kegiatan yaitu penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/ kota dan satu sub kegiatan yaitu penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/ kota. Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 46.999.760,- terealisasi sebesar Rp. 43.851.401,- atau sebesar 93,30%.

Berikut disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023
Diskominfo Kabupaten Solok Selatan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome) dan Program/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021 s/d 2026	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			**100**							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**100**		**100**	**100**	**100.00%**	**100**	**100**	**100.00%**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			38							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bul	41	26	34	32	94,12%	34	26	63.41%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	10	20	10	10	100.00%	10	10	100.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah**		**100**				0.00%	**100**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	9		6	5	116,67%	7	7	78%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10		5	5	40.00%	4	4	40%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10		20	23	115.00%	23	***23***	230%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24		8	8	575%	23	23	96%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome) dan Program/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021 s/d 2026	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	120		150	300	200%	150	150	125%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100		70	70	100%	80	80	106,67%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang milik daerah yang tersedia**		***100***					100		
	Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit			1	0				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	12		1	3	200%	1	1	33,33%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang**		**100**					**100**	**100**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	461		410	300	73,1%	410	420	102,44%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	26,000		25.000	25.000	100,00%	25,000	25,000	100,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13		11	12	100,00%	12	12	100,00%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome) dan Program/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021 s/d 2026	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7		2	2	100%	5	5	83,33%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2		2	2	100%	1	1	50.00%
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Layanan Akses Informasi Interaktif Masyarakat dan Penambahan Penguatan Radio Penambahan Penguatan Radio	Media Komunikasi	1		500	500	100%	1	1	50.00%
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Jumlah OPD yang telah memiliki website dan aktif	OPD	33		30	30	100%	33	33	103.13%
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan Terjalinnya kerjasama dengan media dan kehumasan	Kelompok	40		10	10	100%	35	35	500,00%
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendudkung Penyebarluasan Informasi dan Kumunikasi publik yang	Item	30		30	31	103,33%	6	6	30,00%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome) dan Program/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021 s/d 2026	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kabupaten/Kota	disediakan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan prasarana Pendukung, Penyebarluasan Informasi dan komunikasi publik yang disediakan									
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								100		
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								100		
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sub Domain pemerintah daerah yang ditata dan diawasi	Sub domain	28		24	23	95,83%	12	12	48.00%
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang terhubung dengan internet Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	OPD	33		30	30	100.00%	33	33	100.00%
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								89		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi Jumlah tenaga pengamanan Sistem server dan Aplikasi	orang	2		1	1	100.00%	1	1	100.00%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome) dan Program/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021 s/d 2026	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah Tenaga Programer yang dibayarkan	orang	12		7	4	66,67%	7	7	100.00%
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Internet Satelit (Vsat) yang terdata, Jumlah Menara Telekomunikasi yang terdata	BTS	30		9	9	100%	1	1	3,85%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Persentase elemen data sektoral yang dikelola**	**Persen**	**100**				100%	100		77,78%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**Persen**	**100**				100%	80		77,78%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome) dan Program/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021 s/d 2026	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen Database Statistik Sektoral OPD yang valid Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah dokumen sektoral yang disediakan (Kecamatan dalam angka, PDRB, Solok Selatan dalam angka)	dokumen	9		9	9	100%	9	9	77,78%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Tingkat keamanan informasi daerah**	**Persen**	**100**		**7**	**7**	100%	**7**	**7**	87,500%
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal**	**Persen**	**100**		7	7	100%		7	87,500%
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan strategis yang diamankan Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kegiatan	11		7	7	100%	7	7	87,500%

1. Memfasilitasi ketersedian jaringan komunikasi dan mengatasi beberapa titik blank spot dibeberapa daerah.
2. Menyediakan aplikasi sistem informasi dan basis data yang terkoneksi antar Perangkat Daerah (PD) dan portal layanan masyarakat mudah diakses.
3. Penyebarluasan informasi melalui operasional studio radio,
4. Memberikan informasi kepada masyarakat guna terbentuknya kepemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif melalui pengelolaan dan pengembagan website dan pengelolaan PPID.
5. Serta menyelenggarakan kegiatan pengumpulan data statistik dan melaksanakan kegiatan persandian dan pengamanan informasi.

   Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan mendukung seluruh fasilitas antara lain :

   a. Penyediaan, pengelolaan sistem Informasi melalui media baru dalam bentuk domain situs web pemerintah Kabupaten Solok Selatan maupun sub domain yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) hingga kecamatan dan nagari. Hal ini merupakan salah satu program dalam melaksanakan pengembangan e-Government dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses informasi dan layanan pemerintahan, serta ikut berpartisipasi didalam pembangunan dengan menggunakan media internet.
   b. Layanan maintenance, penyediaan jaringan komputer dan Internet. Komputer dan jaringan internet adalah produk teknologi yang life designatau life cycle-nya relatif pendek serta rentan gangguan serta kerusakan. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pemeliharaan komputer dan pengecekan jaringan secara berkala. Layanan pembuatan jaringan LAN dilakukan untuk memberikan perluasan akses internet bagi Perangkat Daerah (PD) yang memerlukannya.
   c. Fasilitasi akses koneksi internet dan intranet bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sampai ke tingkat Kecamatandan Nagari agar dapat meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 sampai bulan Desember, ada beberapa item yang dijadikan indikator capaian kinerja yaitu :

1. Pembangunan Jaringan Lokal Area Network (LAN) antar PD
   Pembangunan Jaringan Lokal Area Network (LAN) antar PD dengan hasil sebanyak 33 terhubung dalam jaringan internet dan LAN yang merupakan salah satu tahap pembangunan dan pengembangan e-Government di Kabupaten Solok Selatan.

2. Website Pemerintah Daerah
   Website sebagai sarana sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang berisi informasi-informasi yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Di Kabupaten Solok Selatan website pemda sudah dibawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan.
3. Kegiatan Pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi
   Indikator pencapaian dari kegiatan Pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi diantaranya berupa adanya pengawasan dan pengurangan titik blank spot dibeberapa daerah di Kabupaten Solok Selatan.

Setelah terbentuknya Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan, maka perlu ditetapkan indikator dan tolak ukur untuk tercapainya target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan yang mengacu kepada tugas pokok antara lain ;

1. Melakukan kegiatan pengembangan e-Government
2. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan Informasi dan layanan komunikasi
3. Penyusunan bahan-bahan data persandian dan statistik daerah
4. Pemberitaan sebagai publikasi dan sosialisasi informasi dan desentralisasi terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Adapun yang menjadi indikator kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan yang sesuai dengan tugas pokok tersebut diatas adalah :

d. *Collecting data* dan *security data* agar seluruh informasi yang dibutuhkan baik untuk institusi pemerintah maupun masyarakat dapat terkendali dalam satu sistem data center serta menghasilkan data dan informasi yang uptodate/terkini dan real time.

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOLOK SELATAN

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Nilai Indeks SPBE		√	2,34	2,54	2,74	2,94	2,98	3,00	2,74	2,94	
2	Persentase Jorong yang dilayani Akses Telekomunikasi		√	92,2	94,8	97	100	90,9	94,80	97	100	
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		√	85	100	100	100	81,21	100	100	100	
5	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota		√	50,22	58,48	66,74	76	70,03	58,48	66,74	76	
6	Persentase Organisasai Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Tingkat Keamanan Informasi Daerah		√	100	100	100	100	66	100	100	100	

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Analisis isu Sumberdaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu 2 (dua) Tahun kebelakang (Tahun 2022-2023) serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dan penyebab pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika belum optimal:

Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (Indeks SPBE);
2. Masih adanya daerah yang belum terjangkau akses telekomunikasi;
3. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dibidang Teknologi Informasi baik dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika maupun seluruh Dinas Pemerintah Daerah Kab. Solok Selatan;
4. Keterbukaan Informasi Publik pada saat ini, baik antar sektor dilingkungan pemerintahan, pemerintah dengan *stakeholders* maupun pemerintah dengan masyarakat masih belum maksimal;
5. Pengelolaan Radio masih terbatas baik dari sisi jangkauan siaran maupun kelengkapan sarana dan prasarana;
6. Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi tingkat Nagari di Kabupaten Solok Selatan. Yang menjadi penyebab masalah antara lain:
    - Masih minimnya infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung jaringan yang disebabkan karena faktor geografi yang berbukitan ;
    - Terbatasnya kapasitas Bandwith internet dalam mengoptimalkan kebutuhan data internet keseluruh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari ;

7. Perlunya pelatihan dan peningkatan pengetahuan Teknologi Informasi;
8. Belum maksimalnya operator website setiap PD dalam membuat dan mempublikasikan berita PD di website masing-masing PD;
9. Perlunya memaksimalkan pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disetiap PD.

   Penyebab :

   1) Masih terdapat Blankspot Area;
   2) Belum terintegrasi system informasi manajemen dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah antar PD, Kabupaten Kecamatan dan Nagari (e-Government);
   3) Masih Minimnya Infrastruktur Telekomunikasi seperti jaringan telepon, Fax, Free WI-FI area pada kawasan tertentu;
   4) Minimnya pemanfaatan website solselkab.go.id dalam penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah daerah dan promosi potensi daerah.
   5) Ketersediaan data yang tidak cukup, belum berkualitas dan belum up to date serta belum dapat diakses secara luas;

10. Permasalahan Urusan Statistik sebagai berikut :

    Penyebab:

    - Lemahnya kemampuan aparatur PD sehingga ketersediaan dan keakuratan data primer dan sectoral sangat rendah;
    - Tidak tersedianya publikasi data untuk evaluasi, pengendalian dan perencanaan pembangunan pada waktu yang ditentukan (data tidak tersedia tepat waktu).

11. Permasalahan Urusan Persandian sebagai berikut :

    Belum optimalnya pengamanan data informasi daerah.

    Penyebab:

    Belum optimalnya PD yang menangani persandian yang disebabkan keterbatasan SDM dibidang Persandian.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:

- Adanya penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan sesuai Permendagri No 90 Tahun 2019, sehingga sebagian harus dilakukan penggabungan kegiatan dalam penyesuaiannya.

Tabel 2.3

Review Tehadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**8.396.510.315**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**8.618.209.645**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**8.246.510.314**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**8.453.209.645**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**4.939.490.969**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**4.868.079.645**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**100 Persen**	**4.006.360.420**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**100 Persen**	**4.077.803.645**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bul	3.916.000.420	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bul	3.981.035.645

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 orang	90.360.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 orang	96.768.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**	**356.122.400**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**	**320.900.000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Jenis	9.100.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Jenis	12.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Peralatan dan perelengkapan kantor yang disediakan	10 paket	41.200.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Peralatan dan perelengkapan kantor yang disediakan	10 paket	38.200.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Diskominfo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 paket	15.018.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Diskominfo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 paket	17.500.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	15 paket	38.481.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	15 paket	43.000.000

		yang Disediakan					yang Disediakan		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskominfo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	298 laporan	9.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskominfo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	298 laporan	5.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 laporan	242.922.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 laporan	205.200.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kominfo	**Persentase barang milik daerah yang tersedia**		**30.270.549**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kominfo	**Persentase barang milik daerah yang tersedia**		**40.000.000**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				**0**	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				**0**
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kominfo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30.270.549	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kominfo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	40.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kominfo	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang**		**190.511.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kominfo	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang**		**193.376.000**

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 410 lembar	4.182.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 410 lembar	5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan 25000 Kwh	51.729.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan 25000 Kwh	52.676.000
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kominfo	Jumalh laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 laporan	17.600.000	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kominfo	Jumalh laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 laporan	15.700.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kominfo	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penyelenggaran umum kantor yang disediakan	7 laporan	117.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kominfo	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penyelenggaran umum kantor yang disediakan	7 laporan	120.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kominfo	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**		**246.448.595**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kominfo	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**		**236.000.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kominfo	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	11 Unit	196.448.595	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kominfo	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	11 Unit	201.000.000

		perizinan							
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kominfo	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	Unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kominfo	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	Unit	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				**1.103.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**				**1.222.000.000**
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				**1.103.000.000**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**1.222.000.000**
Relasi Media	Solok Selatan	Jumlah aktifitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1.terverifikasi dewan pers, 2. terdaftar di Dinas kominfo dan 3aktif dalam kegiatan relasi media	35 Laporan	750.000.000	Relasi Media	Solok Selatan	Jumlah aktifitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1.terverifikasi dewan pers, 2. terdaftar di Dinas kominfo dan 3aktif dalam kegiatan relasi media	0 Dokumen 1 website 4 radio	850.000.000

Pelayanan Informasi Publik	Solok Selatan	Jumlah permohonan informasi Publik yang diselenggarakan sesuai peraturan perundangan	20 Permohonan	40.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Solok Selatan	Jumlah permohonan informasi Publik yang diselenggarakan sesuai peraturan perundangan	0 Dokumen 33 OPD	56.000.000
Diseminasi Informasi	Solok Selatan	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	80 persen	138.000.000	Diseminasi Informasi	Solok Selatan	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	0 Dokumen 35 Media	135.000.000
Pengelolaan Media Komunuikasi Publik	Solok Selatan	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	95.000.000	Pengelolaan Media Komunuikasi Publik		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		106.000.000
Penyususnan Konten	Solok Selatan	Jumlah Konten informasi publik	10 konten	80.000.000	Penyususnan Konten	Solok Selatan	Jumlah Konten informasi publik	6 jenis 0 Unit 20 Item	75.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				**2.313.797.350**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**				**2.363.130.000**
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				**27.250.000**	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**53.250.000**

Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Solok Selatan	Jumlah dokumen Pengelolaaan Nama domaian dan Sub Domain Pemerintah Daerah Serta Domain Pemerintah Desa	12 Dokumen	27.250.000	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Solok Selatan	Jumlah dokumen Pengelolaaan Nama domaian dan Sub Domain Pemerintah Daerah Serta Domain Pemerintah Desa		53.250.000
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				**2.286.547.350**	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**2.309.880.000**
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Solok Selatan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	10 Aplikasi	364.890.000	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Solok Selatan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	0 Dokumen 1 Orang	299.880.000
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Solok Selatan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupataen/Kota Cerdas	7 Unit	17.836.000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Solok Selatan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupataen/Kota Cerdas	0 Unit 7 Orang	25.000.000

Penyediaan akses internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Solok Selatan	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakn oleh Dinas	30 Perangkat	1.903.821.350	Penyediaan akses internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Solok Selatan	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakn oleh Dinas	0 Dokumen 26 Vsat 57 Menara	1.985.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				**109.779.001**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**115.000.000**
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				**109.779.001**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				**115.000.000**
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				**109.778.001**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**115.000.000**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Solok Selatan	Jumlah dokumen Database Statistik Sektoral OPD yang valid Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah dokumen sektoral yang disediakan (Kecamatan dalam angka,	1 Dokumen 0 Dokumen 9 Dokumen	109.779.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Solok Selatan	Jumlah dokumen Database Statistik Sektoral OPD yang valid Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah dokumen sektoral yang disediakan (Kecamatan dalam angka, PDRB, Solok Selatan dalam angka)	1 Dokumen 0 Dokumen 9 Dokumen	115.000.000

		PDRB, Solok Selatan dalam angka)							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				**40.222.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**50.000.000**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				**40.222.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				**50.000.000**
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				**40.222.000**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**50.000.000**
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Solok Selatan	Jumlah kegiatan strategis yang diamankan Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	8 Kegiatan 0 Perangkat Daerah	40.222.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Solok Selatan	Jumlah kegiatan strategis yang diamankan Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	8 Kegiatan 0 Perangkat Daerah	50.000.000
8.396.510.315					**8.618.209.645**				

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun dalam proses ini Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap seluruh perangkat daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2024
KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB. III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGAKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional merupakan dasar penyususnan Rencana Strategis Kementian/Lembaga (RenstraK/L). RenstraK/L merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi,, tujuan, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan dari Kementrian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra K/L sebagai bagian dari perencanaan nasional harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rangka sinkronisasi perencanaan Pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijkanan Pembangunan nasional.

Kebijakan nasional Pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika diarahkan pada Upaya mendukung pencapaian kedaulatan pengan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, Pembangunan infrastruktur, percepatan Pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industry, berdasarkan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut maka sesuai dengan kebijakan Kementrian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya ketersedian dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informasi untuk mendukung focus Pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan Pembangunan;

2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyaiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;

3. Terselenggaranya tata Kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman;

4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata Kelola yang berintegritas, berish, efektif dan efisien.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pada Urusan Komunikasi Dan Informasi Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informsi dan Komunikasi(TIK) di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah yang tiap tahunnya di evaluasi oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh instansi Pemeritah dalam hal ini Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daera. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Mentri Pendayaagunaan Aparatur Sipil Negera dan Reformasi Birikrasi Nomor 59 Tahun 2020 bahwa lingkup pelaksanaan SPBE ada pada 4 domain. Domain tersebut antara lain :

1. Domain Kebijakan Internal SPBE
2. Domain Tata Kelola SPBE
3. Domain Manajemen SPBE
4. Domain layanan SPBE

Pemanfaatan Tik dalam Dinas Komunikasi Dan Informatika meliputi infrastruktur jaringan, aplikasi dan keamanan inroamsi. Untuk meningkatkan system pemerintah berbasis elektronik diperlukan keterpaduan antar stakeholder dalm mewujudkan suabuah tata Kelola yang efektif.

1. Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat. Dalam hal ini berkaitan dengan data-data sektoral Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang disusun dalam sebuah dokumen.

2. Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika KabupatenSolok Selatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok Selatan. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan harus sejalan dengan pencapaian **Visi** dan **Misi** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan.

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok SelatanTahun 2025 adalah:

"Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih"

Dengan indikator adalah Nilai Indeks SPBE. Target kinerja dari Indikator tujuan yang ingin dicapai untuk tahun 2025 adalah sebesar 3,00

Sasaran

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah tercapai. Maka sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik

Sasaran tersebut diatas memiliki indikator yang digunakan mengukur keberhasilan kinerja PD dan indikator dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2025
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Nilai Indeks SPBE	3,01

3.3. Program dan Kegiatan

Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, berdasarkan pertimbangan pada pencapaian program nasional, pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan, pencapaian SPM bidang Komunikasi dan Informasi, peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik dan pencapaian penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Program dan Kegiatan Rancangan Awal Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 berdasarkan hasil pemetaan dari Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang direncanakan sebanyak 4 Program, 10 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

   b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
      - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
   - Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
   - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
   - Sub Kegiatan Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
   - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

b. Kegiatan Pengelolaan E-government diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
- Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/ Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

BAB. IV

4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOLOK SELATAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembengunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan adanya Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan PD. Maka dengan ini Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Solok Selatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**8.396.510.315,00**				**8.568.811.646**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**8.396.510.315,00**				**8.568.811.646**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	Kominfo	**100 Persen**	**4.939.490.965,00**	**DAU**		**100 Persen**	**4.983.681.646**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**4.006.360.420,00**				**4.007.803.646**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kominfo	34 Orang/bul	3.916.000.420,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kominfo	34 Orang/bul	3.981.035.646
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah tenaga pengelola keuangan yang dibayarkan honorarium	Kominfo	0 Dokumen	90.360.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kominfo	0 Dokumen 10 orang	96.768.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	Kominfo	**100 Persen**	**356.122.400,00**		Kominfo	**100 Persen**	**321.500.000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen intalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kominfo	4 paket	9.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen 100 Persen	12.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kominfo	10 Paket	41.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen 100 Persen	38.200.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kominfo	8 Paket	15.018.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen 100 Persen	17.500.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kominfo	0 Paket 23 Jenis	38.481.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen 100 Persen	43.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kominfo	298 laporan	9.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen 100 Persen	5.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kominfo	110 laporan	242.922.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		100 Persen 100 Persen	205.200.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Umum			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang milik daerah yang tersedia**	Kominfo		**30.270.549,00**				**40.000.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kominfo	5 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen 100 Persen	
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kominfo	4 unit	30.270.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen 100 Persen	40.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang**	Kominfo		**190.511.000,00**				**193.378.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kominfo	0 Laporan 410 lembar	4.182.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen 100 Persen	5.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Kominfo	0 Laporan 25000 Kwh	51.729.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		100 Persen 100 Persen	52.678.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Disediakan				Umum			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perelengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	Kominfo	2 Laporan	17.600.000,00				15.700.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kominfo	7 laporan	117.000.000,00				120.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	Kominfo		**246.448.595,00**				**236.000.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kendaraan Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dak perizinannya	Kominfo	11 Unit	196.448.595	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen 100 Persen	201.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kominfo	0 Unit		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen 100 Persen	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kominfo	1 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen 100 Persen	35.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				**1,103.000.000,00**				**1,222.000.000**
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				**1,103.000.000,00**				**1.222.000.000**
	Relasi Media	Jumlah aktifitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi dewan pers, 2. Terdaftar di Dinas Kominfo dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	Solok Selatan	35 Laporan	750.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85 Persen	850.000.000
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Solok Selatan	20 permohonan	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85 Persen	50.000.000
	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Solok Selatan	80 persen	138.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85 Persen	135.000.000
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi public milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Solok Selatan	6 jenis 0 Unit 20 Item	95.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85 Persen	100.000.000
	Penyususnan Konten	Jumlah konten informasi publik	Solok Selatan	10 Konten	80.000.000,00				75.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				**2.313.797.350,00**				**2.363.130.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				**27.250.000,00**				**53.250.000**
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sub Domain pemerintah daerah yang ditata dan diawasi	Solok Selatan	0 Dokumen 12 Subdomai	27.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	53.250.000
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				**2.286.547.350,00**				**2.309.880.000**
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Solok Selatan	10 Aplikasi	364.890.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		88.88 Persen	299.880.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Solok Selatan	0 Unit 7 Orang	17.836.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		88.88 Persen	25.000.000
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Solok Selatan	30 Perangkat daerah	1.903.821.350,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		88.88 Persen	1.985.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				**109.779.001,00**				**115,000,000**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				**109.779.001,00**				**115,000,000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				**109.779.001,00**				**115.000.000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen Database Statistik Sektoral OPD yang valid Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah dokumen sektoral yang disediakan (Kecamatan dalam angka, PDRB, Solok Selatan dalam angka)	Solok Selatan	1 Dokumen 0 Dokumen 9 Dokumen	109.779.001,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	115,000,000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				**40.222.000,00**				**50.000.000**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				**40.222.000,00**				**50.000.000**
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				**40.222.000,00**				**50.000.000**
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan strategis yang diamankan Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Solok Selatan	8 Kegiatan 0 Perangkat Daerah	40.222.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	50.000.000
TOTAL					**8.396.510.315,00**				**7.105.125.000**

BAB. V
PENUTUP

Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan sebagai salah satu PD dilingkup Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan.

Semoga Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikankepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Padang Aro, Juli 2024

KEPALA DINAS

FIRDAUS FIRMAN, S,IP., M.E.
NIP. 19810105 200604 1 009

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia Nya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan ini selesai disusun.

Penyusunan Renja ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta memperhatikan arahan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. Renja ini juga disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Serta berpedoman pada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Tujuan utama disusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kesempatan kerja, pengurangan angka pengangguran serta peningkatan kualitas tenaga kerja dan kesejahteraan transmigrasi. Kami menyadari bahwa tantangan yang dihadapi tidaklah mudah, namun dengan kerja keras, sinergi dan komitmen bersama, kami yakin dapat mewujudkan tujuan tersebut.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja ini, baik berupa saran dan kritikan yang membangun. Akhir kata kami berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan bagi kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

Padang Aro, 19 Juli 2024

KEPALA DINAS,

JONI FIRMANSYAH, ST

NIP. 197906042006041006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	I.1. Latar Belakang	1
	I.2. Landasan Hukum	2
	I.3. Maksud dan Tujuan	5
	I.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023**	8
	II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renja 2024	8
	II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20
	II.3. Cascading Kinerja	23
	II.4. Isu-isu PentingPenyelenggaraan Tugasdan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30
	II.5. Review Terhadap Rancangan RKPD	32
	II.6. PenelaahanUsulan Program danKegiatanMasyarakat	48
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI**	49
	III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	49
	III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	51
	III.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025	52
BAB IV	**RENCANA KERJA TAHUN 2025**	60
	IV.1. Program, Kegiatan, Dan Sub KegiatanTahun 2025	60
BAB V	**PENUTUP**	66

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perencanaan yang spesifik, untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntable, efisien dan efektif serta perencanaan yang matang dan terarah.

Perencanaan disusun baik di Tingkat Pusat maupun Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Kerja perangkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026, yang diarahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja 2025 didasarkan pada analisis situasi terkini serta evaluasi kinerja tahun sebelumnya.Data dan informasi yang relevan dikumpulkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan, tantangan, serta potensi yang ada di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya juga dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan hambatan yang dihadapi.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun Anggaran 2025.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

8. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2023 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);

14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 948 Tahun 2016) ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019) ;

21. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.226/MEN/2000 tentang Perubahan Beberapa Pasal Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025.;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
27. Perbub Nomor 16 Tahun 2024 tentang RKPD Tahun 2025;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2025 ini adalah untuk merumuskan program dan kegiatan konkret yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam satu tahun anggaran. Dengan adanya rencana ini, setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Melalui Rencana Kerja, visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dijabarkan ke dalam program-program strategis yang dapat dilaksanakan secara bertahap. Hal ini memungkinkan pencapaian visi dan misi tersebut menjadi lebih terukur.

Rencana Kerja membantu dalam pengorganisasian sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dengan menetapkan prioritas kegiatan dan alokasi sumber daya yang tepat, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program dapat ditingkatkan. Dengan adanya rencana yang terstruktur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mengukur kinerja dan progres pencapaian setiap program dan kegiatan secara teratur. Hal ini memungkinkan identifikasi permasalahan yang muncul dan pengambilan tindakan korektif secara cepat dan tepat.

Rencana Kerja memungkinkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada stakeholders, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya.Dengan mengikuti rencana yang telah disusun, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan publik dapat terwujud.

Rencana Kerja juga menjadi basis untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah lainnya, sektor swasta, dan masyarakat sipil.Kolaborasi ini penting dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan dampak positif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025 ini yaitu untuk membantu dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi yang jelas dalam pengembangan sektor tenaga kerja dan transmigrasi. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mengarahkan upaya untuk mencapai perubahan yang diinginkan.Dengan memiliki rencana yang terstruktur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mengalokasikan sumber daya yang tersedia dengan lebih efisien dan efektif.Hal ini membantu dalam memaksimalkan hasil dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kerja membantu dalam memastikan konsistensi dan kontinuitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun ke tahun.Hal ini memungkinkan adanya pembangunan yang berkelanjutan dan terencana dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Dengan fokus pada pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan, Rencana Kerja membantu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam meningkatkan kualitas layanan yang disediakan kepada masyarakat. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti pelatihan tenaga kerja, bantuan penempatan tenaga kerja, fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan pelayanan ketransmigrasian

Dengan demikian, tujuan utama dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan adalah untuk membantu mencapai visi dan misi Dinas tersebut melalui pengembangan kebijakan yang terarah, alokasi sumber daya yang efektif, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Awal Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistimatika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2024
- II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- II.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD
- II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- III.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- III.3. Program dan Kegiatan

BAB IV Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

BAB V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renja 2024

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan dimana Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah membantu Kepala Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kegiatan-kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditujukan untuk mendukung tercapainya kinerja sebagaimana terdapat pada Rencana Strategis.

Pada tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Solok Selatan telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.Dalam mencapai sasaran yang telah dimuat dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026,anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan Rp. 3.056.814.081,- *(tiga milyar lima puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh satu rupiah)* dan terealisasi 92,03 % dengan rincian realisasi Belanja Pegawai Rp. 1.929.910.808,- (Satu milyar Sembilan ratus dua puluh sembilan juta Sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan rupiah), Belanja Barang dan jasa Rp. 799.952.928,- *(tujuh ratus sembilan puluh Sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah)* dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 5.500.000,- *(limajuta lima ratus ribu rupiah).*

Ada empat (4) Program, lima(5) Kegiatan, dan 6 (enam) Sub Kegiatan dilaksanakan di Tahun 2023, yang dapat dirinci berikut ini:

Tabel 2.1.

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja	Pagu Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Pagu (%)
I.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran	50%	2.589.864.083,-	93,93%
II.	Perencanaan Tenaga Kerja	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaa n sesuai kebutuhan	100%	80.000.000,-	99,88%
III.	Pelatihan Kerja danProduktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan yang diterima di Dunia Kerja atau Berwirausaha	45 %	217.034.998,-	96,23%
IV.	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20,82%	17.600.000,-	68,98%
V.	Hubungan Industrial	Perssentase pencegahan dan tindak lanjut pnyelesaian hubungan industri	100%	152.315.000,-	52,33%

Target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi didasarkan pada sasaran-sasaran.Sasaran tersebut merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah. Capaian sasaran tersebut dapat di lihat sebagaimana pada tabel berikut ini:

Table 2.2. Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	• Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan sesuai kebutuhan	50 %
		• Persentase Peserta Pelatihan yang diterima di Dunia Kerja atau Berwirausaha	45 %
		• Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20,82%
		• Persentase Pencegahan dan Tindak Lanjut Penyelesaian Hubungan Industrial	100%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini table 2.3 :

Tabel 2.3 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI S/D TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2024 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target 2023	Realisasi Kinerja 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10) = 5+7+9	(11) = 10/4
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
2	07	01	201		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
2	07	01	201	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yg disusun	38 dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	19 Dokumen	50,0%
2	07	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yg disusun	30 laporan	5 Laporan	5 laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	15 Laporan	50%
2	07	01	202		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
2	07	01	202	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	21 org/bulan	21 org/bln	21 org/bulan	18 org/bln	100%	19 org/bln	21 Org/ bulan	50%
2	07	01	202	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	50%
2	07	01	202	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	50,00%

2	**07**	**01**	**206**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**100%**	**25%**	**25,00%**
2	07	01	206	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	12 Paket	50%
2	07	01	206	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	12 Paket	50,00%
2	07	01	206	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	12 Paket	50%
2	07	01	206	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	12 Paket	50%
2	07	01	206	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16 Laporan	0	0	0		4 Paket	4 Paket	25%
2	07	01	206	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Lapo ran	50%
2	**07**	**01**	**207**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yg tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**100%**	**100%**	**50%**
2	07	01	207	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	1 Paket				0	-	33,33%
2	07	01	207	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Paket	1 Paket				0	-	25%
2	07	01	207	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit				0	-	20%
2	07	01	207	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		0			0		0,00%
2	**07**	**01**	**208**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	07	01	208	01	Sub Kegiatan Penyiapan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 laporan	8 Laporan	4 laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	16 Laporan	66,7%

2	07	01	208	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	66,7%
2	07	01	208	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	8 Laporan	4 laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	16 Laporan	66,7%
2	07	01	208	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan					24 Laporan	100%
2	**07**	**01**	**209**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	07	01	209	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
2	07	01	209	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas operasional dan lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
2	07	01	209	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Laporan		0			1 Laporan	1 Laporan	25%
2	07	01	209	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2	07	01	209	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	1 Unit		0					
2	**07**	**02**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Ketersediaan Dokumen Tanaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar**	**100%**	**0%**	**50%**	**50%**	100%	**0%**	50%	50,00%
2	**07**	**02**	**201**		**Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja**	**2 Dokumen**	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 dokumen	1 dokumen	50,00%
2	07	02	201	01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	0 dokumen	1 dokumen	50,00%
2	07	03			**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase Peserta Pelatihan yang diterima di Dunia Kerja atau Berwirausaha**	**65,00%**	**33,5%**	**45%**	**50%**	**111%**	**50%**	**47%**	**72%**

2	**07**	**03**	**201**		**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih dan Bersertifikat**	**1048 org**	**400 orang**	**80 Orang**	**96 orang**	**120%**	**96 Org**	**592 Org**	**56%**
2	07	03	201	01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	568 org	240 org	80 org	48 org	50%	48 org	336 Org	60%
2	07	03	201	02	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Fasilisati operasional Balai latihan Kerja, jumlah pelatihan yg dilaksanakan oleh BLK	72 bln, 30 pelatihan	24 Buln, 10 pelatihan		3 Buln, 3 pelatihan	100,00%	12 bulan , 3 pelatihan	27 bln, 13 Pelatihan	37,5%
2	07	03	201	03	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana pelatihan kerja	Jumlah sarana pelatihan	4 Paket		0					0,00%
2	**07**	**03**	**202**		**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina**	**100%**	0%	**0%**	0%	**100%**	**100%**	**100%**	100,00%
2	07	03	202	01	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	100%	5 lembaga	5 lembaga	100,00%
2	07	04			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**23,82%**	**20,53 %**	**20,82%**	**40%**	**192%**	**22,82%**	**22,19%**	**93,2%**
2	07	04	201		**Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penempatan tenaga kerja melalui layanan antarkerja**			0 Orang				-	0,00%
2	07	04	201	02	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Jumlah layanan antarkerja daerah	24 kali		0					0,00%
2	07	04	201	03	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Frekuensi bimbingan kepada pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	400 orang		0					0,00%
2	**07**	**04**	**203**		**Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Bursa Kerja Online/ Job Fair**	**2270 Orang**	**833 org**	**440 orang**	**306 org**	**69,5%**	**450 org**	**1589 Org**	**70%**
2	07	04	203	01	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	72 laporan	24 laporan		12 laporan	100%	12 laporan	48 laporan	66.7%
2	07	04	204	02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2244 orang	833 org	440 orang	306 org	69,5%	450 orang	1589 Orang	70,8%

2	07	04	205	03	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Job Fair (Pameran Kesempatan Kerja)	15 Perusahaan		15 perusahaan		0%	15 Perusahaan	15 Perusahaan	100,00%
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Pencegahan dan Tindak Lanjut Penyelesaian Hubungan Industrial**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**100%**	**100,00%**	**100%**	**30%**	**30%**
2	**07**	**05**	**201**		**Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit, BPJS, SP/SB yang tercatat**	**17,95%**	**12,50%**	**17,95%**	**53,19%**	**296%**	**17,95%**	**53,19%**	**296%**
2	07	05	201	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit, BPJS, SP/SB yang tercatat	40 Perusahaan	5 perusahaan	10 perusahaan	25 perusahaan	250%	10 Perusahaan	25 Perusahaan	63%
2	**07**	**05**	**202**		**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**100%**	**606 org**	**27%**
2	07	05	202	01	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pencegahan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	4 Sosialisasi							0,00%
2	07	05	202	02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang ditangani melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator/Tenaga terkait Hubungan Industrial.	100%	100%		100%	100,00%		100%	100%
3	**32**	**02**			**Program Perencanaan Kawasan transmigrasi**	**Persentase perencanaan Kawasan transmigrasi**	**25%**	**5%**	**25%**	**5%**	20,00%	0%	5%	20,00%
3	**32**	**02**	**201**		**Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**Terlaksananya Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi**	**25%**	**5%**	**25%**	**5%**	20,00%	0%	5%	25,00%

3	32	02	201	01	Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	1 Dokumen				-	1 Dokumen	25,00%
3	32	02	201	03	Sub Kegiatan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dokumen Perencanaan Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan transmigrasi	1 Dokumen	1 Dokumen					1 Dokumen	25,00%
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Terlaksananya Penataan Satuan Kawasan Transmigrasi**	**10%**	**10%**					10%	100,00%
3	**32**	**03**	**201**		**Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Kabupaten /Kota**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Transmigrasi**	1 Dokumen	**1 Dokumen**					1 Dokumen	100,00%
3	32	03	201	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Laporan Perencanaan kerjasama antar daerah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	1 Laporan	1 Laporan					1 Laporan	100%
3	32	03	201	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen perencanaan penataan penduduk	1 Dokumen						1 Dokumen	100%
3	**32**	**04**			**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase Pengembangan Kawasan transmigrasi**	**5%**	**5%**					**5%**	100%
3	**32**	**04**	201		**Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**Terlaksananya pengembangan Satuan Kawasan Pemukiman pada Tahap Kemandirian**	**1 Kawasan**	**1 Kawasan**					**1 Kawasan**	100%
3	32	04	201	02	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dlm rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan					1 Kegiatan	100%

Padang Aro, 20 Maret 2024

KEPALA DINAS

JONI FIRMANSYAH, ST

NIP. 19790604 200604 1006

Untuk Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan disediakan anggaran Rp. 3.056.814.081,- (*tiga milyar lima puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh satu rupiah*) yang direncanakan untuk Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 799.952.928,- (*tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*) dan belanja modal sebesar Rp. 5.500.000,- (*lima juta lima ratus ribu rupiah*)

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Penggunaan Anggaran Tahun 2023, terdapat lima (5) Program yang dilaksanakan beserta pagu anggaran yaitu:

Tabel 2.4. Program, Indikator, Target dan Penganggaran Tahun Anggaran 2023

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja	Pagu Tahun 2023 (Rp)
I.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	2.589.864.338,-
II.	Perencanaan Tenaga Kerja	Ketersediaan dokumen tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar	50%	80.000.000,-
III.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan yang diterima di Dunia Kerja atau Berwirausaha	45%	217.034.998,-
IV.	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20.82%	17.600.000,-
V.	Hubungan Industrial	Persentase pencegahan dan tindak lanjut penyelesaian hubungan industrial	100%	152.315.000,-

II.1.1 Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Tidak memenuhi Target

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target pada Tahun 2023 terdapat pada kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja. Target awal jumlah pencari kerja yang terdaftar pada bursa kerja on-line adalah 440 orang sementara realisasinya sebanyak 306 orang. Pendanaan yang kecil, menyebabkan keterbatasan untuk sosialisasi kegiatan ini.Selain itu perekrutan pegawai PPPK dan CPNS tahun 2023 oleh pemerintah tidak mewajibkan adanya kartu AK I. Demikian juga

perusahaan yang membuka lowongan kerja.Kedua hal tersebut, besar pengaruhnya untuk peningkatan pendataan pencari kerja on-line.

Dari kegiatan Monitoring evaluasi Hubungan Industrial di Perusahaan di dapat data 4.017 orang tenaga kerja ber KTP solok selatan. Angka ini menurun dari tahun 2022 dengan data 5.803 orang. Penurunan terjadi sebanyak 1.786 orang.

II.1.2. RealisasiProgram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Yang telah Memenuhi Target Kinerja

Program Hubungan Industrial kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dapat mencapai target hingga 100% dengan terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial dalam batas wewenang kabupaten.

II.1.3. Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Yang melebihi Target Kinerja

Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2023 sebesar 76,52 % dapat dikatakan melampaui target awal sebesar 76,15%. Jadi Target Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 dapat mencapai target, bahkan melebihi.

Hal ini ditandai juga dengan kegiata-kegiatan ketenagakerjaan yang dilaksanakan hampir semua mencapai atau melebhi target.

Program Pelatihan Kerja melebihi target capaian tenaga kerja terlatih yang diterima di dunia kerja dan atau berwira usaha dari target awal 45 % menjadi 50 %. Capaian Program Penempatan Tenaga Kerja, target awalnya adalah 20,82 % Tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan dengan realisasi 40 %.

Program Hubungan Indusrtrial Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota target awalnya adalah 22,50 % realisasinya melebihi target sebesar 53,19 %. Dari 10 perusahaan yang ditargetkan menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit, BPJS, SP/SB yang tercatat), realisasinya ada 25 perusahaan dari 47 perusahaan yang wajib memiliki peraturan perusahaan yang lengkap.

Program / Kegiatan yang melebihi target dapat juga berupa program kegiatan yang wajib dilaksanakan, meskipun tidak ada anggaran disediakan. Seperti kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Aktifitas perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan wajib yang tidak bisa ditiadakan meskipun Anggaran Khusus untuk Kegiatan tersebut tidak disediakan.

II. 1.4. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya/ Terpenuhinya Target Kinerja

Pada kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, data pencari kerja yang diperoleh tidak memenuhi target, karena kurangnya anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sehingga hanya cukup untuk pelayanan di kantor saja. Sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas promosi kegiatan di media social seperti facebook dan instagram. Disamping itu persyaratan perekrutan Tenaga Kerja di perusahaan-perusahaan dan penerimaan CPNS pada tahun 2023 tidak mewajibkan melampirkan kartu AK.I.

II.1.5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra

adalah :

- Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja
- Terlaksananya Pelayanan Umum Pemerintah daerah
- Tersedianya Pencari kerja bersertifikat kompetensi yang mampu bersaing didunia kerja atau berwirausaha
- Tersedianya informasi pasar kerja sehingga didapat data pencari kerja Solok Selatan
- Terlaksananya Pengawasan Hubungan Industrial yang baik yang mencakup pelaksanaan peraturan perusahaan dan pencegahan perselisihan hubungan industry

II.1.6. Kebijakan / Tindakan Perencanaan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Tersebut

Tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/ terpenuhinya target kinerja yang sering terjadi tersebut, diantaranya :

- Mempersiapkan kegiatan atau inovasi yang memungkinkan untuk mendapatkan data pencari kerja semaksimal mungkin.

- Mempersiapkan pelatihan kerja yang sangat dibutuhkan dunia kerja kekinian yang lebih menarik dan gampang untuk dikembangkan oleh ex peserta pelatihan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan dua (2) urusan yaitu urusan tenaga kerja yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan transmigrasi yang merupakan urusan pemerintahan pilihan.

Pada Tahun 2023, sudah dilaksanakan perbaikan akan kinerja tahun 2022. Seperti angka penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja on-line pada tahun 2022 masih sangat kecil.Usaha yang dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan WA grup Pencaker sebagai wadah komunikasi pencari kerja yang telah terdaftar pada Bursa Kerja on-line tersebut.Memperluas persepsi cakupan penempatan pencari kerja dengan memanfaatkan data peserta pelatihan sebagai pencari kerja dan penempatan Tenaga kerja di perusahaan serta data Calon Pekerja Migran.

Melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.15/MEN/X/2010 serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan atas lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.15/MEN/X/2010, Pemerintah menyusun SPM Bidang Ketenagakerjaan. Berdasarkan peraturan tersebut di atas maka diperoleh Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana Table 2.5 berikut:

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target IKK tahun 2025	TARGET RENSTRA OPD						REALISASI (%)		PROYEKSI	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
6.	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit, BPJS, SP/SB yang tercatat**		17,95%	12,82%	15,38%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	12,50%	53,19%	17,95%	17,95%
7.	**Tingkat Partisipasi Angkatan kerja**		78,47%	73,83%	74,99%	76,15%	77,31%	78,47%	79,63%	72,67%	76,52%	77,31%	78,47%

Tabel 2.5 :PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. SOLOK SELATAN

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target IKK tahun 2025	TARGET RENSTRA OPD						REALISASI (%)		PROYEKSI	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1.	**Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi**		2,12 %	1,80%	1,88%	1,98%	2,04%	2,12%	2,20%	3,021%	10,76%	2,04%	2,12 %
2.	**Persentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan**		22,82%	19,82%	19,82%	20,82%	21,82%	22,82%	22,82%	20,53%	40%	21,82%	22,82%
3.	**Persentase kasus tenaga kerja yang ditangani**		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	**Persentase kegitan yg dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	**Tingkat Produktifitas tenaga kerja (berdasarkan ADHK)**		47%	46%	47%	47%	47%	47%	47%			47%	47%

II.3. Cascading Kinerja

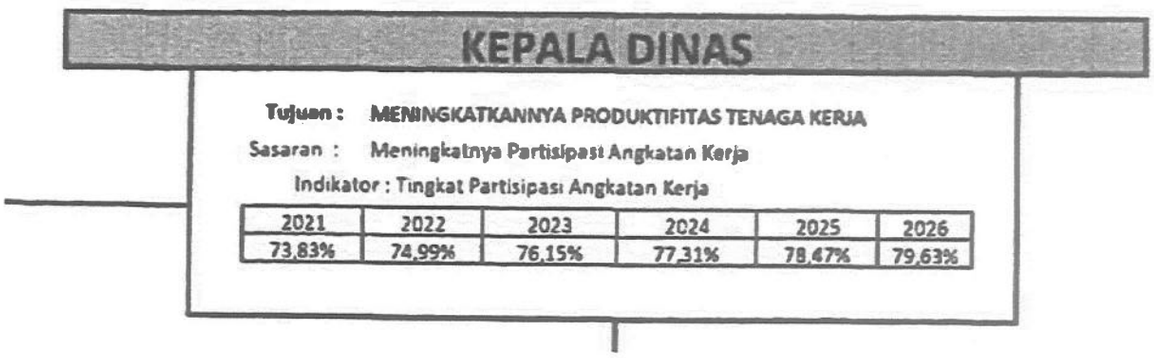
Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) Tahun 2025, konsep cascading kinerja menjadi penting dalam memastikan keselarasan antara tujuan strategis organisasi dengan rencana tindakan operasional di tingkat yang lebih rendah. Cascading kinerja mengacu pada proses penurunan dan penyesuaian tujuan, strategi, dan indicator kinerja dari tingkat tertinggi organisasi hingga tingkat terendah.

Pada tingkat tertinggi organisasi yaitu pada level pemerintah daerah Renja akan menetapkan visi, misi dan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hal ini :

- Visi Solok Selatan adalah : "*Mewujudkan Solok Selatan yang maju dan sejahtera*"
- Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi adalah : "*Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Kompetitif*"
- Tujuan strategis yang ingin dicapai dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah :"Meningkatnya produktifitas tenaga kerja".

  Tujuan strategis ini diturunkan ketingkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai bagian dari perencanaan tahun 2025. Dapat dilihat pada diagram cascading kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :



Dari sini, akan dikembangkan program-program dan kegiatan spesifik yang mendukung pencapaian tujuan strategis ditingkat eselon III.

Di tingkat eselon III, untuk Bidang Tenaga Kerja sasaran yang ingin dicapai beserta indikator pada masing-masing program yang direncanakan tergambar pada diagram cascading berikut :

Kepala Bidang Tenaga Kerja

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tenaga kerja

Indikator : Persentase Peserta Pelatihan yang diterima di Dunia Kerja atau berwirausaha

2021	2022	2023	2024	2025	2026
40%	40%	45%	50%	60%	65%

Sasaran 2 : terwujudnya hubungan industrial tenaga kerja dengan penyedia kerja yang baik

Indikator : Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

2021	2022	2023	2024	2025	2026
12,82%	15,38%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%

Sasaran 3 : Meningkatnya perluasan informasi kesempatan kerja

Indikator : Persentase peningkatan Pencaker yang mendaftar pada bursa kerja

2021	2022	2023	2024	2025	2026
3,38%	1,45%	4,76%	2,27%	4,44%	4,26%

Padang Bidang Transmigrasi, sasaran yang ingin dicapai beserta indikator tergambar pada diagram berikut :

Kepala Bidang Transmigrasi

Sasaran 1 Peningkatan produktifitas tenagakerja di kawasan transmigrasi

Indikator :

Jumlah dokumen perencanaan produktifitas Tenaga kerja di kawasan transmigrasi

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 dokume	1 dokume				

Sebagai penanggung jawab pelayanan operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sasaran yang akan dicapai Sekretaris Dinas tergambar pada diagram berikut :

SEKRETARIS

Tujuan :Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

Sasaran : Terpenuhinya Layanan Operasional Kantor

Indikator

1. Cakupan pelayanan operasional perkantoran

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Masing-masing eselon III dibantu oleh beberapa pejabat eselon IV dan atau Pejabat Fungsional yang mendapatkan mandat dan tanggung jawab sesuai bidang kerja dan tupoksinya.Adapun tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mendukung sasaran eselon III yang memimpinnya tergambar pada diagram berikut :

A. Sekretaris

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Tujuan Terpenuhinya Layanan Operasional Kantor

Sasaran 1: Tersedianya gaji, tunjangan dan honorarium ASN serta gaji TKD

Indikator :

1. Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
21 org/bln	20 org/bln	20 org/bln	20 org/bln	21 org/bln	21 org/bln

2. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2021	2022	2023	2024	2025	2026
12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen

3. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Sasaran 2 : Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Indikator :

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2021	2022	2023	2024	2025	2026
7 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	7 dokumen	6 dokumen

2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2021	2022	2023	2024	2025	2026
5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan **Terpenuhinya Layanan Operasional Kantor**

Sasaran 1: Tersedianya kebutuhan untuk administrasi umum dinas

Indikator :

1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket

2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket

3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket

4. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket

5. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan

6. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan

Sasaran 2 Tersedianya sarana dan prasarana kantor

1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Paket				1 Paket	1 Paket

2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket

3. Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yg Disediakan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

4. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
		3 unit	3 unit	3 unit	3 unit

Sasaran 3. Tersedianya jasa penunjang urusan dinas

1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan

2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan

4. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

Sasaran 4. Pemeliharaan barang milik daerah

1. Jumlah kendaraan dinas jabatan yg terpelihara

2021	2022	2023	2024	2025	2026
7 unit	7 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit

2. Jumlah kendaraan dinas operasional yg terpelihara

2021	2022	2023	2024	2025	2026
		5 unit	5 unit	5 unit	5 unit

3. Jumlah gedung kantor/bangunan yang dipelihara

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 unit	0	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

4. Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara

2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	0	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

5. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

B. Kepala Bidang Tenaga Kerja

Membawahi tiga pejabat fungsional yang masing-masing memiliki tugas dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

Instruktur Sub Koordinator Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja (Eselon IV/a)

Sasaran 1 : Meningkatnya kompetensi tenaga kerja

Indikator : jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi

2021	2022	2023	2024	2025	2026
120 org	128 org	80 org	80 org	80 org	80 org

Sasaran 2 : meningkatnya kualitas lembaga pelatihan kerja

Indikator : jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi

2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga

Sasaran 3 : terbangunnya kerjasama dengan penyedia kerja

Indikator : jumlah kerjasama dengan penyedia kerja

2021	2022	2023	2024	2025	2026
		3 kerjasama	4 kerjasama	4 kerjasama	5 kerjasama

Pengantar Kerja Sub Koordiator Penempatan Tenaga Kerja & Perluasan Kesempatan Kerja (Eselon IV/a)

Sasaran 1 : Penyebarluasan informasi pasar kerja

Indikator 1 : Jumlah informasi lowongan kerja yang disampaikan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1 media	3 media	3 media	3 media	3 media

ket : jumlah media atau obyek lowongan kerja / perusahaan

Sasaran : Partisipasi perusahaan pada bursa kerja

Indikator 2 : Jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam bursa kerja

2021	2022	2023	2024	2025	2026
		15 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan

Mediator Hubungan Industri Sub Koordiantor Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Eselon IV/a)

Sasaran : Terlaksananya Pengawasan Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator : Jumlah Perusahaan yang diawasi

2021	2022	2023	2024	2025	2026
5 prshan	10 prshan	11 prshan	12 prshan	14 prshan	15 prshan

Sasaran : Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Indikator : Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan sesuai kewenangan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran : Terlaksananya penyebarluasan informasi terkait tata kelola kerja yang layak

Indikator : Jumlah informasi yang disampaikan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1 sosialisasi	1 sosialisasi	1 sosialisasi	1 sosialisasi

Selain itu Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Memiliki Unit Pelayanan Teknis Balai latihan kerja (BLK) yang langsung dibawahi oleh kepala dinas, dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

KEPALA UPTD LEMBAGA BALAI KERJA (eselon IV.a)

Kegiatan Operasional UPTD Loka Latihan Kerja (LLK)

Indikator : Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi pencari Kerja

KEPALA TATA USAHA UPTD BALAI LATIHAN KERJA (eselon IV.b)

Kegiatan Operasional UPTD Loka Latihan Kerja (LLK)

Indikator : Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi pencari Kerja

Balai latihan kerja melaksanakan kegiatan pelatihan tenaga kerja dengan standar kompetensi.Kepala Balai Latihan Kerja dibantu oleh Kepala Tata Usaha dalam mengadministrasikan kegiatan-kegiatannya.

Dapat terlihat bahwa dalam pelaksanaannya, cascading memungkinkan koordinasi yang efektif antara berbagai tingkatan dalam hierarki organisasi.Informasi dan sumber daya dapat dialokasikan dengan lebih tepat, memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan memiliki dampak yang maksimal.

Dengan keterkaitan yang kuat antara cascading dan Renja 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diharapkan bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja akan menjadi lebih terkoordinasi, terarah, dan berdampak positif bagi pembangunan daerah dan negara.Melalui penerapan konsep cascading kinerja dalam perencanaan RENJA 2025, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil telah direncanakan dengan baik untuk mendukung visi, misi, dan tujuan strategis organisasi secara keseluruhan.

II.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Secara garis besar faktor internal dan eksternal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strength)
    1) Termuat dalam Renstra Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024
    2) Termuat dalam Renstra Kementrian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
    3) Termuat dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026
    4) Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang jelas.
    5) Adanya Komitmen yang tinggi mulai dari pimpinan sampai dengan staf dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

2. Kelemahan (Weakness)
    1) Terbatasnya tenaga instruktur pelatihan yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
    2) Belum adanya Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan dan tenaga penguji peralatan di perusahaan
    3) Belum adanya Gedung sendiri Balai Latihan Kerja.
    4) Terbatasnya Sarana Prasarana Pelatihan Kerja

5) Belum adanya sarana workshop
6) Kurangnya besaran dana untuk mendukung pencapaian target SPM melalui dana APBD
7) Belum tersedianya dokumen pendukung Transmigrasi

3. Peluang (Opportunities)
   1) Tersedianya sumberdaya alam yang cukup melimpah untuk diolah, sehingga jika dilaksanakan pengolahan SDA tersebut akan menyerap tenaga kerja.
   2) Iklim kondusif yang dapat mendukung pembangunan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
   3) Kesempatan kerja dalam dan luar negeri dan program pemerintah untuk pemagangan kenegara tetangga dan negara maju lainnya diAsia serta kerjasama lintas sektor dalam penyediaan kesempatan kerja.
   4) Tersedianya peraturan perundangan di Bidang tenaga Kerja dan Transmigrasi.
   5) Dukungan dari lembaga-lembaga/stakeholder terkait.

4. Ancaman (Threats)
   1) Rendahnya pertumbuhan pada penyediaan lapangan kerja
   2) Rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta tuntutankompetensi tenaga kerja yang standar dan berdaya saing sebagai dampak dari globalisasi pasar kerja.
   3) Pemahaman masyarakat tentang Pembangunan kawasan Transmigrasi yang masih rendah

5. Faktor Penentu Keberhasilan

   Untuk memacu pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan diidentifikasikan faktor-faktor penentu keberhasilan diantaranya:
   1) Penempatan Aparatur yang sesuai dengan bidang keahliannya
   2) Peningkatan profesionalisme aparat dalam menjalankan tugas dan kegiatan.
   3) Peningkatan kualitas dan produktifitas bagi tenaga kerja dengan memberikan keterampilan dan pelatihan.
   4) Mengantisipasi kesempatan kerja disektor informal.
   5) Pelatihan berorientasi penempatan

6) Perlindungan hak-hak dasar pekerja
7) Optimalisasi pendayagunaan fasilitas dilingkungan DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi
8) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut mensukseskan program transmigrasi
9) Peningkatan manajemen aparatur Balai Latihan Kerja
10) Peningkatan Koordinasi antar instansi terkait dalampenyelenggaraan transmigrasi.

II.5. Review Terhadap Rancangan RKPD

RKPD Tahun 2025 merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja OPD Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) telah memuat perkiraan kebutuhan OPD sesuai dengan pagu dana (Plafon) yang telah diberikan sebagaimana yang tertera pada Tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6 : REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN SOLOK SELATAN

Kode	RANCANGAN RENJA 2025					ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/Bidang urusan pemerintah program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan dan/ pagu indikatif	Urusan/ Bidang urusan pemerintah program dan kegiatan	Indikator kinerja program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dan/ pagu indikatif	
	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengtan pelayanan dasar				3.987.114.808,-	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengtan pelayanan dasar				3.987.114.808,-	
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100%	3.328.114.808,-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100%	3.328.114.808,-	
01.02.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Solok Selatan	100%	0	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Solok Selatan	100%	0	

01.2.01.01	Sub Keguiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yg disusun	Solok Selatan	6 dokumen	0	Sub Keguiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yg disusun	Solok Selatan	6 dokumen	0	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yg disusun	Solok Selatan	5 laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yg disusun	Solok Selatan	5 laporan	0	
2.07.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**100%**	**2.597.450.348**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**12 Bulan**	**2.597.450.348**	
2.07.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20 org/bulan	2.510.690.348	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20 Orang/ bulan	2.510.690.348	
2.07.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12 Dokumen	86.760.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9 Orang	86.760.000	

2.07.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Laporan	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Laporan	0	
2.07.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**100%**	**298.450.000**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum Kantor**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**100%**	**298.450.000**	
2.07.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4 Paket	5.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4 Paket	5.000.000	
2.07.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4 Paket	22.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4 Paket	22.000.000	
2.07.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4 Paket	5.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4 Paket	5.000.000	

2.07.01. 2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4 Paket	25.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4 paket	25.000.000	
2.07.01. 2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4 Laporan	5.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4 Laporan	5.000.000	
2.07.01. 2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Di dalam dan Luar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4 Laporan	236.450.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Di dalam dan Luar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4 Laporan	236.450.000	
2.07.01 .2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yg tersedia**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**100%**	**20.000.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana kantor**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**100%**	**20.000.000**	
2.07.01. 2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	
2.07.01. 2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 paket	20.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 paket	20.000.000	

2.07.01. 2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0	
2.07.01. 2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0	
2.07.01 .2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**100%**	**195.964.460**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**100%**	**195.964.460**	
2.07.01. 2.08.01	Sub Kegiatan Penyiapan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	4 laporan	3.500.000	Sub Kegiatan Penyiapan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	4 laporan	3.500.000	

2.07.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	12 Laporan	38.464.460	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	12 Laporan	38.464.460	
2.07.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	4 laporan	28.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	4 laporan	28.000.000	
2.07.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	12 Laporan	126.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	12 Laporan	126.000.000	
2.07.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**100%**	**216.250.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**100%**	**216.250.000**	

2.07.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2 Unit	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharа dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2 Unit	0	
2.07.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas operasional dan lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5 Unit	161.250.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas operasional dan lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharа dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5 Unit	161.250.000	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 laporan	5.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharа	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Unit	5.000.000	

2.07.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Unit	50.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Unit	50.000.000	
2.07.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0	
2.07.02	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Ketersediaan Dokumen Tanaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**		**0**	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Ketersediaan Dokumen Tanaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**		**0**	
2.07.02.2.01	**Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**		**0**	**Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**		**0**	

2.07.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0	
2.07.03	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase Peserta Pelatihan yang diterima di Dunia Kerja atau Berwirausaha**	**Solok Selatan**	**60%**	**333,102,000**	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase Peserta Pelatihan yang diterima di Dunia Kerja atau Berwirausaha**	**Solok Selatan**		**333,102,000**	
2.07.03.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih dan Bersertifikasi**	**Solok Selatan**	**80 orang**	**333,102,000**	**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih dan Bersertifikasi**	**Solok Selatan**	**80 orang**	**333,102,000**	
2.07.03.2.01.01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	48 orang	183.102.000	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	48 Orang	183.102.000	

2.07.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Fasilisati operasional Balai latihan Kerja, jumlah pelatihan yg dilaksanakan oleh BLK	Di dalam dan Luar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Fasilisati operasional Balai latihan Kerja, jumlah pelatihan yg dilaksanakan oleh BLK	Di dalam dan Luar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0	
2.07.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana pelatihan kerja	Jumlah paket sarana prasarana pelatihan yang disediakan	Di dalam dan Luar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Paket	150.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana pelatihan kerja	Jumlah paket sarana prasarana pelatihan yang disediakan	Di dalam dan Luar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		150.000.000	
2.07.03.2.02	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina**	**Solok Selatan**		**0**	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina**	**Solok Selatan**		**0**	
2.07.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Solok Selatan		0	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Solok Selatan		0	

2.07.04	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**Di Dalam dan Luar Kabupaten Solok Selatan**	**22,82%**	**20.328.000**	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**Di Dalam dan Luar Kabupaten Solok Selatan**	**23,82%**	**20.328.000**	
2.07.04 .2.01	**Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penempatan tenaga kerja melalui layanan antarkerja**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**		**0**	**Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penempatan tenaga kerja melalui layanan antarkerja**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**		**0**	
2.07.04. 2.01.02	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Jumlah layanan antarkerja daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Jumlah layanan antarkerja daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0	
2.07.04. 2.01.03	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Frekuensi bimbingan kepada pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Frekuensi bimbingan kepada pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0	
2.07.04 .2.03	**Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Bursa Kerja Online**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**470 orang**	**20.328.000**	**Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Bursa Kerja Online**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**470 Orang**	**20.328.000**	

2.07.04.2.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	465 orang	5.816.000	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	465 orang	5.816.000	
2.07.04.2.03.03	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Job Fair (Pameran Kesempatan Kerja)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15 Perusahaan	14.512.000	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Job Fair (Pameran Kesempatan Kerja)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15 Perusahaan	14.512.000	
2.07.05	**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Pencegahan dan Tindak Lanjut Penyelesaian Hubungan Industrial**	**Di dalam dan Luar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**100%**	**305.570.000**	**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Pencegahan dan Tindak Lanjut Penyelesaian Hubungan Industrial**	**Di dalam dan Luar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**100%**	**305.570.000**	

2.07.05.2.02	**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**100%**	**305.570.000**	**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**100%**	**305.570.000**	
2.07.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pencegahan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi	1 Sosialisasi	300.000.000	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pencegahan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi	1 Sosialisasi	300.000.000	

2.07.05.2.02.02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang ditangani melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator/Tenaga terkait Hubungan Industrial.	Di dalam dan Luar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100%	5.570.000	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang ditangani melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator/Tenaga terkait Hubungan Industrial.	Di dalam dan Luar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100%	5.570.000	
JUMLAH					**3.987.114.808,-**					**3.987.114.808,-**	

II. 6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang baik dan matang perlu mendengarkan usulan-usulan dari masyarakat maupun pihak yang berkepentingan sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku di Indonesia.

Usulan yang disampaikan oleh masyarakat ataupun pihak yang berkepentingan tersebut dapat dilihat pada Table 2.7 di bawah ini:

Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Kursus/Pelatihan Menjahit/Bordir/ Sulaman	Jorong Koto Birah, Nagari Pulakek Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja		
2.	Pelatihan Komputer				
3.	Pelatihan Tata Boga				
4.	Pelatihan Otomotif/ Perbengkelan				
5.	Pelatihan Las				
6.	Pelatihan Sablon dan Peralatan				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia, visi yang akan dituju yaitu:

1) Pembangunan Infrastruktur

   Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat:

   1. Kawasan Industri Kecil,
   2. Kawasan Ekonomi Khusus,
   3. Kawasan Pariwisata,
   4. Kawasan Persawahan,
   5. Kawasan Perkebunan, dan
   6. Tambak-Tambak Perikanan

2) Pembangunan Sumber Daya Manusia

   Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi.

3) Mendorong Investasi

   Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya.

4) Reformasi Birokrasi

   Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin *simple*, semakin lincah, *mindset* berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga.

5) Penggunaan Anggaran

   Menjamin penggunaan Anggaran yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari Anggaran Belanja yang disediakan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2024

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,4% - 6,0 %
2. Tingkat Kemiskinan 6,5% - 7,0%
3. Gini Rasio 0,370% - 0,374%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,0% - 4,6%
5. Indeks Pembangunan Manusia 75,54%

Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap,
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat,
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh,
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

7 AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN IV TAHUN 2020-2024

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan,
3. Hal-hal yang dapat dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi sekaitan dengan agenda pembangunan ini yaitu dapat melalui:
4. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah,
5. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
6. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
7. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
8. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
9. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing, yang dapat dilakukan melalui:
   a. Pengentasan kemiskinan
   b. Peningkatan produktivitas dan daya saing
10. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
11. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,

    Yang dapat dilakukan melalui:

    a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah

b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan
c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK
d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien
e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur

12. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
13. Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Rencana Kerja Tahun 2025 di dasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SASARAN TAHUN 2025
	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	**78,47%**

Tujuan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, merupakan sasaran strategis perangkat daerah yang tertuang dalam Dokumen Renstra periode 2021-2026. Sebagaimana diketahui, kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi tujuan dinas yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan adalah "terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter, produktif dan kompetitif" dengan sasaran "meningkatkan produktifitas tenaga kerja".

III.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

SolokSelatan Maju, memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang.Hal ini ditunjukkan dengan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik, ketersediaan infrastruktur daerah dan kawasan pertumbuhan.

Solok Selatan Sejahtera memilikiarti: meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran, serta meningkatnya keamanan dan ketentraman masyarakat.

Misi dalam pencapaian Visi tersebut yang diembanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan dalam tugas dan fungsinya meningkatkan produktifitas tenaga kerja mempunyai beberapa Program sebagaimana yang termuat di dalam RPJMD Tahun 2021-2026 diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
   Tolak ukur dan hasil dari program ini adalah Persentase peserta pelatihan yang diterima di dunia kerja atau berwirausaha.
3. Program Penempatan Tenaga Kerja;
   Tolak ukur dan hasil dari program ini adalah persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan.
4. Program Hubungan Industrial;
   Tolak ukur dan hasil dari program ini adalah persentase pencegahan dan tindaklanjut penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Disamping berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan dalam mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra 2021-2026) juga terdapat program-program pendukung terwujudnya tujuan dan sasaran program tersebut.

Secara keseluruhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan merencanakan 4 Program pada tahun 2025,

yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

PEMERINTAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRASNMIGRASI

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	1					2	3		4	5	6	7	8	9	10
	2					**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**					**3.987.114.808,-**				**4.456.000.000**
	2	07				**URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN**					**3.987.114.808,**				**4.456.000.000**
	2	07	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**persen**	**Solok Selatan**	**100**	**3.328.114.808,-**			**100 %**	**3.522.000.000**
	2	07	01	201		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu**	**%**	**Solok Selatan**	**100**				**100%**	**10.000.000**
	2	07	01	201	01	Sub Keguiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen		**6**				6 Dokmen	**5.000.000**
	2	07	01	201	06	Sub Keguiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yg disusun	Laporan		**5**				1 Laporan	**5.000.000**
	2	07	01	202		**Administrasi Keungan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah**	**persen**		**100**	**2.597.450.348**			**100 %**	**2.690.000.000**
	2	07	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	Orang/bulan		20	2.510.690.348			20	2.600.000.000

	2	07	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honornya	dokumen		12	86.760.000			12 dokumen	90.000.000
	2	07	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	Laporan		1					
	2	07	01	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**persen**		**100**	**298.450.000**			**100 %**	**364.000.000**
	2	07	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket		4	5.000.000			4 Paket	5.000.000
	2	07	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket		4	22.000.000			4 Paket	22.500.000
	2	07	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket		4	5.000.000			4 Paket	5.500.000
	2	07	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket		4	25.000.000			4 Paket	25.500.000
	2	07	01	206	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah LaporanFasilitasi kunjungan tamu	Laporan		4	5.000.000			4 Laporan	5.500.000
	2	07	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan		4	236.450.000			4 Laporan	300.000.000
	2	07	01	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yg tersedia**				**20.000.000**			**100 %**	**23.000.000**
	2	07	01	207	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0	0				
	2	07	01	207	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	paket		1	20.000.000			1 paket	23.000.000
	2	07	01	207	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							

	2	07	01	207	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							
	2	07	01	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia**	**persen**		**100**	**195.964.460**			**100 %**	**204.000.000**
	2	07	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan		4	3.500.000			4 Laporan	4.000.000
	2	07	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan		12	38.464.460			12 Laporan	40.000.000
	2	07	01	208	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan		4	28.000.000			4 Laporan	30.000.000
	2	07	01	208	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	laporan		12	126.000.000			12 Laporan	130.000.000
	2	07	01	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**persen**		**100**	**216.250.000**			**100 %**	**231.000.000**
	2	07	01	209	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit							
	2	07	01	209	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas operasional dan lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		7	161.250.000			7 unit	170.000.000
	2	07	01	209	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	laporan		1	5.000.000			1 laporan	6.000.000
	2	07	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dilaksanakan pemeliharaan	unit		1	50.000.000			1 unit	55.000.000

	2	07	01	209	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara									
	2	07	02			**PROGRAM PERNCANAAN TENAGA KERJA**	**Ketersediaan dokumen rencana tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar**	%							**50%**	**100.000.000**
	2	07	02	201		**Kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja (RTK)**	**Tersedianya dokumen rencana tenaga kerja**	Dokumen							**1 Dokumen**	**100.000.000**
	2	07	02	201	01	**Sub Keg. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja MAkro**	**Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja MAkro**	Dokumen							1 Dokumen	100.000.000
	2	07	03			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA**	**Persentase peserta pelatihan yang diterima di dunia kerja atau berwirausaha**	persen		**60**	**333,102,000**				**65%**	455.000.000
	2	07	03	201		**Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi**	**Jumlah Pencari kerja yang dilatih dan bersertifikasi**	orang		80	**333,102,000**				160	**440.000.000**
	2	07	03	201	01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	orang		48	183.102.000				80 orang	300.000.000
	2	07	03	201	02	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Fasilisati operasional Balai latihan Kerja, jumlah pelatihan yg dilaksanakan oleh BLK	bulan, pelatihan								
	2	07	03	201	03	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana pelatihan kerja	Jumlah paket sarana prasarana pelatihan yang disediakan	Paket		1	150.000.000				1 paket	140.000.000
	2	07	03	202		**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina**								**100%**	15.000.000
	2	07	03	202	01	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina								5 Lembaga	15.000.000

	2	07	04			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga kerja yang terfdaftar yang ditempatkan**	persen		**22,82%**	**20.328.000**			**22,82%**	**21.500.000**
	2	07	04			**Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penempatan tenaga kerja melalui layanan antarkerja**								
	2	07	04	201	02	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Jumlah layanan antarkerja daerah								
	2	07	04	201	03	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Frekuensi bimbingan kepada pencari kerja yang terdaftar di kab/kota								
	2	07	04	201		**Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Bursa Kerja Online/ Job Fair**	orang		**470**	**20.328.000**			**490 orang**	**21.500.000**
	2	07	04	203	02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	orang		**465**	5.816..000			**485 orang**	6.500.000
	2	07	04	203	03	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Job Fair (Pameran Kesempatan Kerja)	Perusahaan		**15**	14.512.000			**15 perusahaan**	15.000.000
	2	07	05			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRI**	**Persentase Pencegahan dan Tindak Lanjut Penyelesaian Hubungan Industrial**	persen		**100**	**305.570.000**			**14 %**	**357.500.000**
	2	07	05	201		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit, BPJS, SP/SB yang tercatat**	persen			**0**				
	2	07	05	201	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit, BPJS, SP/SB yang tercatat	Perusahaan			0				

	2	07	05	202		**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial**	persen		**100**	**305.570.000**			**100%**	**357.500.000**
	2	07	05	202	01	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pencegahan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	sosialisasi		1	300.000.000			1 Sosialisasi	350.000.000
	2	07	05	202	02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang ditangani melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator/Tenaga kerja terkait Hubungan Industrial.	persen		100	5.570.000			100%	7.500.000

BAB IV
RENCANA KERJA TAHUN 2025

IV.1. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan dalam pelaksanaan tugas mempunyai lima (5) Program Kegiatan dengan target yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

   Tolak ukur dan hasil dari program ini adalah Persentase terlaksananya Pelayanan Administrasi dengan hasil 100%.

   Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

   Tabel 4.1

NO.	RENCANA KEGIATAN	OUTCOME
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah
3.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yg tersedia
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara

1.1. Rencana Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah:

Tabel 4.2

NO.	RENCANA SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	20 Orang
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	1 Laporan

1.2. Rencana Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah:

Tabel 4.3

NO.	RENCANA SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
5.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan
6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan

1.3. Rencana Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah:

Tabel 4.4

NO.	RENCANA SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket

1.4. Rencana Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah:

Tabel 4.5

NO.	RENCANA SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pemakaian internet	12 Laporan
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan
4.	Sub Kegiata Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan

1.5. Rencana Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah:

Tabel 4.6

NO	RENCANA SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas operasional dan lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit
2.	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 laporan
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit
4.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 Unit

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja;

Tolak ukur dan hasil dari program ini adalah meningkatnya kompetensi pencari kerja. Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

Tabel 4.7

NO	RENCANA KEGIATAN	OUTCOME
1.	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih dan Bersertifikasi

2.1 Rencana Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi adalah:

Tabel 4.8

NO	RENCANA SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET
1.	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	48 orang
3.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah paket sarana prasarana pelatihan yang disediakan	1 Paket

3. Program Penempatan Tenaga Kerja;

Tolak ukur dan hasil dari program ini adalah persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan.

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9

NO.	RENCANA KEGIATAN	OUTCOME
1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Bursa Kerja Online/ Job Fair

3.1 Rencana Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja adalah:

Tabel 4.10

NO.	RENCANA SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET
1.	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	465 orang
2.	Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Job Fair (Pameran Kesempatan Kerja)	15 perusahaan

4. Program Hubungan Industrial,

Tolak ukur dan hasil program ini adalah persentase pencegahan dan tindaklanjut penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 4.11

NO	RENCANA KEGIATAN	OUTCOME
1.	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial

4.1. Rencana Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota adalah:

Tabel 4.12

NO	RENCANA SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET
1.	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pencegahan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	1 sosialisasi
2.	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang ditangani melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator/Tenaga kerja terkait Hubungan Industrial.	100 %

BAB V

PENUTUP

Seiring dimulainya periode Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan telah menghadapi berbagai tantangan dan meraih berbagai pencapaian. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam menjalankan program-program yang telah dilaksanakan. Selama tahun-tahun yang terlah berlalu, Kami mengalami berbagai perubahan dan melakukan adaptasi terhadap dinamika yang terus berkembang, termasuk tantangan dari berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dengan semangat kerja keras, dedikasi dan inovasi, kami berhasil meraih target kinerja yang direncanakan. Diharapkan dengan disusunnya Renja 2025 ini, pencapaian yang telah diperoleh dapat dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan. Kami percaya bahwa kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi dan misi Dinas.

Demikian Dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 ini disusun. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dan pembahasan bagi pemangku kepentingan dalam Forum Pemerintah Daerah untuk memberikan saran dan masukan sehingga dapat menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan di masa akan datang.

Padang Aro, 19 Juli 2024

KEPALA DINAS,

JONI FIRMANSYAH, ST

NIP. 197906042006041006

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T atas berkat dan rahmat-Nya, kami masih di berikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu tugas ini di Dinas Perinindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sekaligus penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima Tahunan, dimana Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan selama Tahun 2025.

Dalam urusan Peindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Rencana Kerja ini merupakan Kegiatan yang juga menjadi solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nantinya senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan ini kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Padang Aro, 15 Juli 2024

KEPALA

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM

AKMAL HAMDI, S.H

NIP.19760615 200604 1 006

DAFTAR ISI

		Hal.
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sistematis Penulisan	4
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**	
	2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu...	6
	2.2. Analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
	2.2.1. Jenis Pelayanan	27
	2.2.2. Ruang Lingkup Pelayanan	28
	2.2.3. Cascading Kinerja	32
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	42
	2.3.1. Kondisi Saat ini	42
	2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi ..	42
	2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	43
	2.3.4. Kondisi Eksternal dan Internal	43
	2.3.5. Formulasi Isu-isu Penting	44
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	45
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	71
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN**	
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	73
	3.1.1. Sektor Industri	73
	3.1.2. Sektor Perdagangan	73
	3.1.3. Sektor Koperasi dan UKM	74
	3.1.4. Sektor Koperasi dan UKM	74
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	75
	3.2.1. Tujuan	75
	3.2.2. Sasaran	76
	3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025	78

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

4.1. Rencana Kerja..... 82

4.1.1. Program dan Kegiatan..... 82

4.1.2. Pendanaan..... 82

BAB V **PENUTUP** 104

.....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

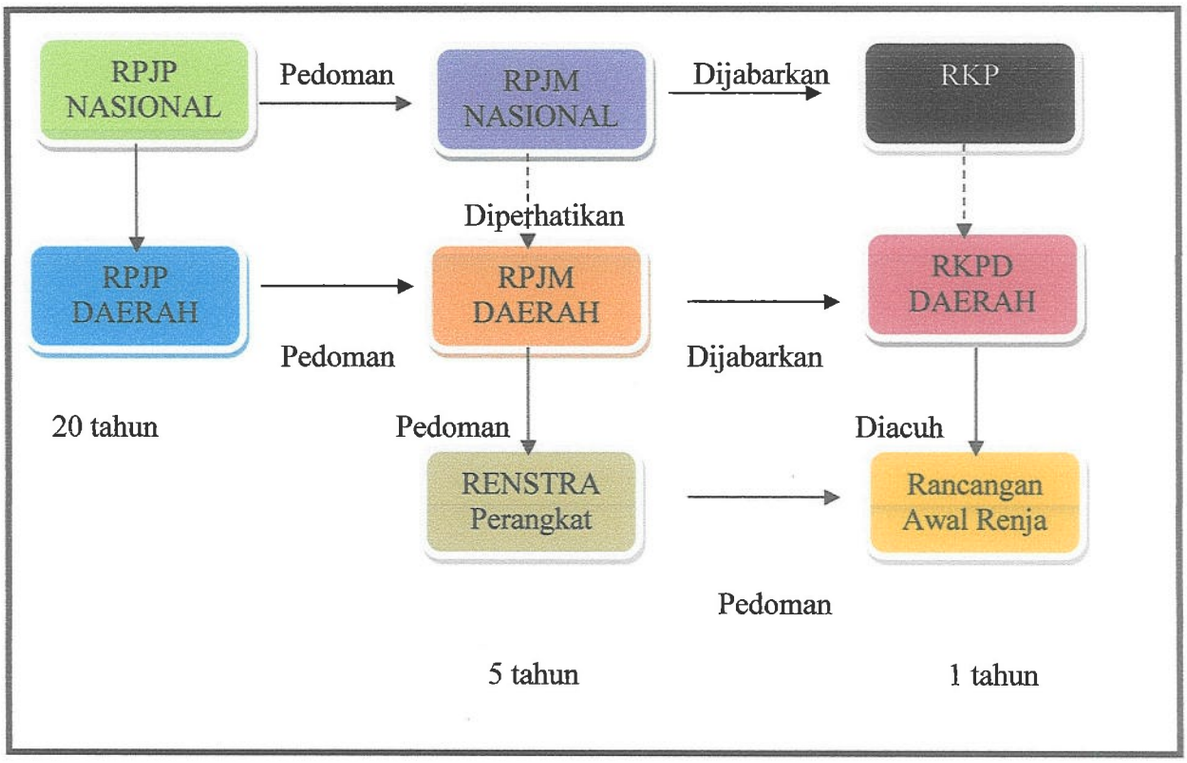
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Adapun salah satu dokumen tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan yang sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari renstra Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja Perangkat Daerah memuat tentang sasaran yang akan dicapai arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaaan yang berpedoman pada Dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Mengacu pada pada uraian di atas maka Penyusunan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan perioritas daerah.

Adapun alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai mana pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1 Alur Perencanaan daerah Menurut UU No. 25/2004



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dibentuknya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15). Untuk penyusunan Renja ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden No 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

6. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
8. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Solok Selatan 2016.
9. Peraturan Daerah no 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 - 2026.
10. Peraturan Bupati Solok Selatan nomor 16 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2025.
11. Peraturan Bupati Solok Selatan nomor 40 Tahun 2016 Tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.
12. Peraturan Bupati Solok Selatan No. 81 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi serta tata kerja dinas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.
13. Keputusan Kepala Dinas mengenai Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud dari Rencana Kerja (Renja) ini adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik.

2. Tujuan

Tujuannya adalah Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan serta target akan diraih pada Tahun 2025 oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Renja perangkat daerah, proses penyusunan Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD, Renstra perangkat daerah dengan Renja K/L dan Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undangan dan peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja perangkat daerah.

1.4. Sistematis Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PADA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2023 dan Capaian Renstra tahun 2021-2026

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM pada Selama Tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan dalam DPA Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dengan total nilai anggaran keseluruhan untuk belanja langsung sebesar **Rp. 8.135.848.502,-** dengan realisasi anggaran mencapai **Rp. 7.735.977.924,-.** Dengan demikian, serapan anggaran mencapai angka persentase 95,09 %. Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2023 sebagaimana ditampilkan di bawah ini :

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Sesuai Belanja Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) Realisasi Anggaran
1	**Belanja**	**8.135.848.502**	**7.735.977.924**	**95,09**
1.1	**Belanja Operasional**	**7.624.563.335**	**7.226.246.231**	**94,77**
1.1.1	- Belanja Pegawai	3.154.252.604	3.066.926.750	97,23
1.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	4.470.310.731	4.159.319.481	93,04
1.2	**Belanja Modal**	**511.285.167**	**509.731.693**	**99,69**
1.2.2	Belanja Modal Peralatan	496.285.167	494.731.693	99,69
1.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.000.000	15.000.000	100

Berdasarkan tabel diatas secara umum realisasi anggaran telah mencapai diatas 94%, artinya terdapat efektifitas dan efisiensi terhadap penggunaan anggaran.

Untuk mencapai Program dan Kegiatan pada Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 mencakup sebagai berikut ;

1. Pada urusan rutin Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan terdapat 1 Program dan 4 Kegiatan.
2. Pada urusan Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan terdapat 2 Program dan 2 Kegiatan.
3. Pada urusan Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan terdapat 4 Program dan 7 Kegiatan.
4. Pada urusan Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan terdapat 5 Program dan 5 Kegiatan.

Dengan menggunakan format penetapan Kinerja, pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Capaian Sasaran kinerja untuk tahun 2023 diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan diatas 80% dan capaian keuangan sebesar 95,09%, dengan capaian kinerja dan keuangan tersebut Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya. Dari 13 Program dan 22 kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan tahun 2023 tingkat realisasi dan capaian fisik kinerja sesuai dengan yang direncanakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.2
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*7*	*8*	*9*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**3,519,868,699**	**3,413998,330**	**96.99**
1	**Administrasi Keuangan Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah**	**3,154,252,604**	**3,066,926,750**	**97.23**
a	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	3,046,552,604	2,964,626,750	97.31
b	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan	107,700,000	102,300,000	94.99

		honornya			
2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**195,743,304**	**180,820,706**	**92.38**
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,000,000	7,980,000	99.75
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,765,000	50,004,250	98.50
c	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000	9,993,000	99.93
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27,500,000	27,498,000	99.99
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,750,000	6,745,000	99.93
f	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92,728,304	78,600,456	84.76
3	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**55,625,000**	**55,389,899**	**99,58**
a	Penyediaan Jasa surat menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5,500,000	5,500,000	100,00
b	Penyediaan Jasa komunikasi,Sumber Daya Air Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	50,125,000	49,489,899	99,53
4	**Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**114,247,791**	**110,860,975**	**97.04**
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	85,640,700	82,269,850	96.06
b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5,000,000	4,997,000	99.94
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	23,607,091	23,594,125	99.95

	lainnya	dipelihara /direhabilitasi			
	URUSAN PERINDUSTRIAN		**683,735,403**	**663,552,528**	**97.04**
II	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Jumlah Sentra Industri Kabupaten yang dibangun dan dikembangkan**	**628,637,403**	**619,829,028**	**98.60**
5	**Penyusuna dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sentra Industri Kabupaten yang dibangun**	**628,637,403**	**619,829,028**	**98.60**
		Jumlah Sentra Industri Kabupaten yang dikaembangkan			
a	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah sentra industri yang dikembangkan	23,366,400	23,245,900	99.48
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah lembaga pemerhati dan pencinta produk kerajinan daerah yang dikerjasamakan	605,271,003	596,583,128	98.56
		Jumlah sentra industri yang representatif			
		Jumlah IKM yang dilatih			
III	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase Kepatuhan Perusahaan dalam Pelaporan ke Aplikasi SIINAS**	**55,098,000**	**43,693,500**	**79.30**
6	**Penertiban Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis sistim informasi industri nasional (SINAS)**	**Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang diterbit**	**55,098,000**	**43,693,500**	**79.30**

a	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industry dalam lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	jumlah industri yang di pantau izin industri Jumlah Dokumen Data base IKM	55,098,000	43,693,500	79.30
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UMKM		**2,432,762,900**	**2,190,343,323**	**90.04**
IV	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Aktif**	**72,361,500**	**65,925,700**	**91.11**
7	**Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Koperasi Aktif**	**72,361,500**	**65,925,700**	**91.11**
	Pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koperasi Sektor Rill yang dibina jumlah USP koperasi yang dibina	72,361,500	65,925,700	91.11
V	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase KSP/USP Koperasi Sehat**	**8,878,000**	**5,349,900**	**60.26**
8	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**Jumlah KSP/USP Koperasi Sehat**	**8,878,000**	**5,349,900**	**60.26**
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah Koperasi KSP/USP yang dinilai Kesehatannya	5,422,000	4,014,000	74.03

	Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota				
	Penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang berprestasi	3,456,000	1,335,900	38.65
VI	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Koperasi yang memiliki Laporan Keuangan baik**	**204,453,000**	**178,509,000**	**87.31**
9	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam satu daerah Kabupaten/Kota**	**Persen Pengurus/Pengelola Koperasi yang diberikan Pelatihan**	**204,453,000**	**178,509,000**	**87.31**
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Anggota/Pengurus Koperasi yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian	204,453,000	178,509,000	87.31
VII	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Pertumbuhan UMKM**	**461,475,400**	**425,776,681**	**92.26**
10	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah usaha mikro yang difasilitasi standarisasi produk, sertifikasi dan perijinan serta kemitraan**	**461,475,400**	**425,776,681**	**92.26**
a	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang di input ke aplikasi ODS Jumlah Usaha Mikro	24,250,000	23,095,000	95.24
b	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra	11,677,000	11,089,000	94.96
c	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang diberi dukungan Fasilitasi	30,512,000	27,764,731	91.00

		Standarisasi dan Sertifikasi			
d	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah lembaga/kelompok pelaku usaha yang difasilitasi	94,697,000	91,709,550	96.85
e	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Inkubasi	5,375,000	4,209,000	78.31
f	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	294,964,400	267,909,400	90.83
VIII	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Peningkatan Skala Usaha**	**1,685,595,000**	**1,514,782,042**	**89.87**
11	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya**	**1,685,595,000**	**1,514,782,042**	**89.87**
a	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Pelatihan	1,685,595,000	1,514,782,042	89.87
		Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sarana Pemasaran			
		Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sarana Produksi			
IX	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pemanfaatan sarana distribusi perdagangan**	**1,111,111,000**	**1,084,541,133**	**97.61**
12	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola**	**1,075,046,000**	**1,060,321,333**	**98.63**
a	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Kios yang dibangun/direhabilitasi	452,446,000	450,870,833	99,65

		Jumlah Los yang dibangun/rehabilitasi			
		Panjang Drainase yang dibangun/ditingkatkan/Rehab			
		Pengadaan/Rehabilitasi air bersih			
b	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah UPT Pasar yang difasilitasi	622,600,000	609,450,500	97.89
13	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina**	**36,065,000**	**24,219,800**	**67.16**
a	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Yang diBina dan diberdayakan	36,065,000	24,219,800	67.16
X	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Koefisien Harga barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu**	**163,916,000**	**160,822,250**	**98.11**
14	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di tingkat daerah kaupaten/kota**	**Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**18,636,000**	**18,274,800**	**98.06**
a	Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah lokasi yang diawasi ketersediaan barang pokok	18,636,000	18,274,800	98.06
15	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Koefisien Harga barang Kebutuhan Pokok antar waktu**	**135,830,000**	**133,377,650**	**98.19**

a	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Operasi Pasar Jumlah Paket Bazar	135,830,000	133,377,650	98.19
16	**Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase Pupuk dan Pestisida bersubsisi yang tersalurkan**	**9,450,000**	**9,169,800**	**97.03**
a	pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Persentase penyaluran pupuk bersubsidi terhadap alokasi pupuk bersubsidi	9,450,000	9,169,800	97.03
XI	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapanny a bertanda tera sah yang berlaku**	**203,414,500**	**201,748,760**	**99.18**
17	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanny a (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan**	**203,414,500**	**201,748,760**	**99.18**
a	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat standard Metrologi dan perlengkapan yang tersedia Jumlah alat UTTP yang ditera Jumlah alat Standard Metrologi yang dikalibrasi jumlah gedung metrologi yang dibangun	194.082.000	192.951.260	99.42
b	Pengawasan/Pen yuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha/pemilik UTTP yang dilakukan penyuluhan	9,332,500	8,797,500	94.27
XII	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Daerah (lokal)**	**21,040,000**	**21,001,600**	**99.82**

18	**Pelaksanaan Promosi,pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri**	**Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Daerah (lokal)**	**21,040,000**	**21,001,600**	**99.82**
a	Pelaksanaan promosi, penggunaan produk dalam negeri di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Even Promosi yang dilaksanakan	11,193,000	11,154,800	99.66
b	Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Produk yang di pasarkan dan digunakan Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Lokal Melalui Kemitraan dengan Ritail, Market Place, Perhotelan, dan Jasa Akomodasi	9,847,000	9,846,800	100.00
Total			**8,135,848,502**	**7,735,977,924**	**95,09**

a. Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya/terpenuhinya target kinerja program.

Adapun faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang cukup baik dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi anatara program dan pagu anggaran yang tersedia.

b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Perangkat Daerah.

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanaakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan sehingga implikasi yang timbul dari pelakasanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rentra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan.

c. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan pengagaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelakasanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan.

Untuk evaluasi capaian prioritas dan target program Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentsra Perangakat Daerah Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program Dan Kegiatan Tahun (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+ 7 + 9)	11=10/4
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Persentase Koperasi Aktif**	**70,43**	**53,90**	**65,22**	**55,3**	**84,79**	**67,83**	**59,01**	**76,52**
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Koperasi Aktif**	**70,43**	**53,90**	**65,22**	**55,3**	**84,79**	**67,83**	**59,01**	**76,52**
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sektor Rill yang dibina	74	58	74	58	78,38	74	63	85,13
		Jumlah KSP/USP Koperasi yang dibina	53	45	53	45	84,90	53	48	90,56

				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Persentase KSP/USP Koperasi Sehat**	**27.12**	**11,66**	**16,95**	**24**	**141,59**	**20,34**	**24**	**88,5**
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah KSP/USP Koperasi Sehat**	**10**	**7**	**10**	**6**	**60,00**	**12**	**13**	**130**
				Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi KSP/USP yang dinilai Kesehatannya	16	11	13	13	100,00	14	38	237,5
				Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang berprestasi	16	3	3	0	0	3	6	37,5
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase Koperasi yang memiliki Laporan Keuangan baik**	**27.12**	**56,25**	**35,65**	**24,24**	**67,99**	**38,26**	**39,58**	**145,96**
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persen Pengurus/Pengelola Koperasi yang diberikan Pelatihan**	**10**	**1,65**	**1**	**0,78**	**78**	**1**	**3,43**	**34,3**
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Anggota/Pengurus Koperasi yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian	410	90	30	140	466,67	30	260	63,41
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase Koperasi yang meningkat skala usaha**	**26,96**	**25**	**0**	**0**	**0**	**23,48**	**25**	**92,73**
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Koperasi yang difasilitasi Pendampingan Kelembagaan dan Usaha**	**60**	**50**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**	**83,33**

				Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberikan Dukungan difasilitas Pemasaran dan Kemitraan	16	14	0	0	0	12	14	87,5
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase Pertumbuhan UMKM**	**0.25**	**-5,37**	**0,51**	**5,77**	**1131,37**	**0,50**	**5,77**	**2.308**
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Jumlah usaha mikro yang difasilitasi standarisasi produk, sertifikasi dan perijinan serta kemitraan**	**828**	**130**	**144**	**144**	**100**	**149**	**423**	**51,09**
				Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang di input ke aplikasi ODS	9880	1259	9800	1669	17,03	9820	1959	19,83
					Jumlah Usaha Mikro	9880	9274	9800	9828	100,29	9820	9828	99,47
				Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra	530	34	85	97	114,11	90	221	41,7
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang diberi dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi	65	25	10	5	50	10	40	61,54
						85	25	15	7	46,67	15	47	55,29
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah lembaga/kelompok pelaku usaha yang difasilitasi	10	0	2	5	250	2	7	70
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Inkubasi	18	2	2	0	0	2	4	22,22
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan	120	315	30	120	400	30	465	387,5

				dan Kewirausahaan	Kewirausahaan								
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase Peningkatan Skala Usaha**	**0,85**	**0,16**	**0,15**	**0,15**	**100**	**0,15**	**0,31**	**36,47**
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya**	**645**	**15**	**15**	**15**	**100**	**15**	**45**	**6,98**
				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Pelatihan	179	282	35	120	342,85	36	438	244,69
					Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sarana Pemasaran	50	10	10	28	280	10	48	96
					Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sarana Produksi	50	10	10	431	4.310	10	451	902
				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase pemanfaatan sarana distribusi perdagangan**	**23**	**70**	**100**	**100**	**100**	**87,46**	**85,82**	**373,13**
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola**	**98**	**80**	**85**	**85**	**100**	**95**	**86,67**	**88,44**
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Kios yang dibangun/direhabilitasi	85	1	6	0	0	20	21	24,70
					Jumlah Los yang dibangun/rehabilitasi	15	1	4	4	100	1	6	40
					Panjang Drainase yang dibangun/ditingkatkan/Rehab	566	451	0	0	0	0	451	79,68

					Pengadaan/Rehabilitasi air bersih	2	2	2	0	0	0	2	100
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana distribusi Perdagangan	Jumlah UPT Pasar yang difasilitasi	1	1	1	1	100	1	1	100
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina**	**33**	**26**	**33**	**26**	**78,79**	**33**	**28,33**	**85,86**
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Yang diBina dan diberdayakan	33	26	33	26	78,79	33	28,33	85,86
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Koefisien Harga barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu**	**5**	**12-15**	**11-14**	**8,86**	**119,45**	**10-13**	**8,86**	**56,43**
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah lokasi yang dipantau	7	7	7	7	100	7	7	100
				Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah lokasi yang diawasi ketersediaan barang pokok	7	7	7	7	100	7	7	100
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Koefisien Harga barang Kebutuhan Pokok antar waktu**	**10-13**	**12-15**	**11-14**	**8,86**	**119,45**	**10-13**	**8,86**	**56,43**
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Operasi Pasar	7	7	7	7	100	7	7	100
					Jumlah Paket Bazar	18.110	1820	3.300	3300	100	4300	9420	52,01

				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pupuk dan Pestisida bersubsisi yang tersalurkan**	**100**	**100**	**100**	**80,49**	**80,49**	**100**	**93,5**	**93,5**
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Persentase penyaluran pupuk bersubsidi terhadap alokasi pupuk bersubsidi	100	100	100	80,49	80,49	100	93,5	93,5
				PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku**	**51**	**53**	**48**	**22,66**	**47,21**	**50**	**41,87**	**82,13**
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	**Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan**	**1300**	**636**	**1200**	**530**	**44,17**	**1300**	**822**	**63,23**
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Alat standard Metrologi dan perlengkapan yang tersedia	500	231	331	331	100	500	331	66,2
					Jumlah alat UTTP yang ditera	1300	636	1200	530	44,17	1300	822	63,23
					Jumlah alat Standard Metrologi yang dikalibrasi	370	0	231	0	0	400	0	0
					jumlah gedung metrologi yang dibangun	1	1	1	1	100	0	1	100
				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha/pemilik UTTP yang dilakukan penyuluhan	330	80	80	80	100	100	260	78,79
				Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah alat UTTP yang dilakukan penyidikan	120	0	48	35	72,92	40	75	62,5

				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Daerah (lokal)**	**89**	**41,67**	**56**	**33,33**	**59,52**	**83**	**52,67**	**59,18**
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Daerah (lokal)**	**89**	**41,67**	**56**	**33,33**	**59,52**	**83**	**52,67**	**59,18**
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat kabupaten/Kota	Jumlah Even Promosi yang dilaksanakan	5	5	4	4	100	5	14	280
				Pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang di pasarkan dan digunakan	30	5	4	4	100	4	13	43,33
					Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Lokal Melalui Kemitraan dengan Ritail, Market Place, Perhotelan, dan Jasa Akomodasi	21	5	4	5	125	4	14	66,67
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah**	**222**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**135,14**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	146	50	25	26	104,00	25	101	69,18
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honornya	72	24	12	12	100,00	12	48	66,67

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**140**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**214,28**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan listrik yang disediakan	24	5	5	5	100	4	14	58,33
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK yang disediakan	24	17	4	4	100	4	25	104,17
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga yang disediakan	24	2	2	2	100	4	4	33,33
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	24	6	6	6	100	4	16	66,67
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum tamu yang disediakan	600	150	150	150	100	150	450	75
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah makan minum rapat yang disediakan	6446	992	1125	1125	100	1200	3317	51,46
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	24	8	4	4	100	4	16	66,67
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	72	24	12	12	100	12	48	66,67
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	103	34	17	17	100	17	68	66,02

				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	103	34	17	17	100	17	68	66,02
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang terpelihara	1	0	1	1	100	1	1	100
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang terpelihara	2	2	2	2	100	2	2	100
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Jumlah Sentra Industri Kabupaten yang dibangun dan dikembangkan**	**4**	**1**	**4**	**4**	**100**	**4**	**4**	**100**
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Jumlah Sentra Industri Kabupaten yang dibangun**	**1**	**1**	**1**	**1**	**100**	**1**	**1**	**100**
					Jumlah Sentra Industri Kabupaten yang dikembangkan	**4**	**4**	**4**	**4**	**100**	**4**	**4**	**100**
				Koordinasi, singkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah sentra industri yang dikembangkan	4	0	4	3	75	4	3	75
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah lembaga pemerhati dan pencinta produk kerajinan daerah yang dikerjasamakan	1	1	1	1	100	1	1	100
					Jumlah sentra industri yang representatif	1	1	1	1	100	1	1	100
					Jumlah IKM yang dilatih	1020	110	220	118	53,64	220	448	43,92
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	**Persentase Kepatuhan Perusahaan dalam Pelaporan ke Aplikasi SIINAS**	**100**	**100**	**100**	**33,33**	**33,33**	**100**	**77,78**	**77,78**

				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang diterbit**	**100**	**100**	**100**	**53**	**53**	**100**	**84,33**	**84,33**
						9	**4**	**6**	**6**	**100**	**9**	**6**	**66,67**
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Izin perizinan (IUI) yang terintegrasi	120	0	30	53	176,67	30	83	69,17
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah industri yang di pantau izin industri	980	125	150	157	104,7	200	482	49,18
					Jumlah Dokumen Data base IKM	4	2	1	1	100	1	4	100

Padang aro, 15 Juli 2024

Kepala Dinas

Akmal Hamdi, SH

Nip.19760615 200604 1 006

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan diberi mandat berupa tugas melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan dan menyukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan mempunyai fungsi yaitu :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.
2. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi.

Kegiatan pelayanan langsung yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha yang dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dalam era otonomi daerah dan reformasi birokrasi pemerintah adalah sebagai berikut :

2.2.1 Jenis Pelayanan

a. Pengesahanan Badan Hukum Koperasi

Pengesahan badan hukum koperasi adalah bentuk pengakuan legislasi/pengesahan kegiatan orang-orang yang mempunyai niat dan tujuan yang sama dalam sebuah koorporate/kelompok yang dikeluarkan oleh lembaga resmi bernama Notaris/Pejabat Kenoktariatan.

b. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi adalah bentuk pengakuan terhadap perubahan kepengurusan dan lain-lain yang disepakati oleh anggota koperasi melalui Rapat Anggota Koperasi (RAK) yang memenuhi kuorum dan hasilnya merupakan keputusan tertinggi dalam perubahan anggaran dasar rumah tangga.

c. Pelaksanaan Operasi Bazar Pasar Murah

Pelaksanaan operasi bazar pasar murah merupakan bentuk kepedulian dan responbiliti pemerintah daerah terhadap suatu kondisi/keadaan dimana terjadinya lonjakan harga akibat dari kenaikan bahan bakar inflasi, hari besar keagamaan dll.

2.2.2. Ruang Lingkup Pelayanan

a. Pengesahan Badan Hukum Koperasi

Pelaksanaan Pengesahan badan hukum koperasi dilaksanakan setiap hari sesuai dengan usulan pengesahan badan hukum yang masuk

b. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Pelaksanaan Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi sama halnya dengan pengesahan badan hukum dilaksanakan setiap hari sesuai dengan usulan perubahan ARD yang masuk.

c. Pelaksanaan Bazar Pasar Murah

Pelayanan/kegiatan bazar pasar murah dapat dilaksanakan sesuai kondisi/keadaan dimana terjadinya lonjakan harga akibat dari kenaikan bahan bakar minyak, inflasi, hari besar keagamaan dll.

Sebagai gambaran untuk analisa pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
Kabupaten Solok Selatan

No	Indikator	SPM	Target IKK 2025	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I.	**Urusan Koperasi dan UKM**											
1.	Pesentase Pertumbuhan Koperasi yang Meningkat Kekuatan Usaha dan Kelembagaannya		8,7%	3,48 %	5,22 %	6,96 %	8,7%	3,85%	5,30%	6,96 %	8,7%	
2.	Persentase KSP/USP Koperasi Berprestasi		18,92%	18,11 %	13,51 %	13,51 %	18,92%	0%	0%	13,51 %	18,92%	
3.	Presentase Usaha Mikro yang menjadi WIrausaha		5%	5 %	5 %	5 %	5%	41,63%	5,13%	5 %	5%	
II.	**Urusan Perdagangan**											
4.	Presentase Sektor Perdagangan		21,3%	20,3 %	20,5 %	21 %	21,3%	21,34%	21,49%	21 %	21,3%	
5.	Presentase Peningkatan Produk Unggulan Daerah (lokal)		70	40 %	50 %	60 %	70	%	33,33%	60 %	70	
6.	Presentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP) Pusat Perbelanjaan dan (IUTM/IUTS/SIUP)Tok		89%	74 %	77 %	85 %	89%	61,70%	77,05%	85 %	89%	

No	Indikator	SPM	Target IKK 2025	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	o Swalayan											
7.	Presentase Kinerja Realisasi Pupuk		40%	25 %	30 %	35 %	40%	28,84%	80,49%	35 %	40%	
8.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya (UTTP) bertanda tera yang sah yang berlaku		40%	54 %	56 %	58 %	40%	53 %	44,17%	58 %	40%	
III	**Urusan Perindustrian**											
9.	Kontribusi Sektor Perindustrian		5,2%	4,95 %	4,98 %	5 %	5,2%	4,27%	4,17%	5 %	5,2%	
10.	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kota		5,5%	4,85 %	5 %	5 %	5,5%	18,68%	32,65%	5 %	5,5%	
11.	Persentase Pertumbuhan Izin Industri		20%	5 %	10 %	15 %	20%	%	%	15 %	20%	
12.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan RIPIN yang diterapkan dalam RPIK		42%	35 %	38 %	40 %	42%	40%	50%	40 %	42%	
13.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industry (IPUI) kecil dan industry menengah yang		100%	100 %	100 %	100 %	100%	0 %	0 %	100 %	100%	

No	Indikator	SPM	Target IKK 2025	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	dikeluarkan instansi terkait											
14.	Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha Kawasan industry (IUKI) dan izin perluasan Kawasan industry (IPKI) yang lokasinya di daerah kota/kabupaten		100%	100 %	100 %	100 %	100%	0 %	0%	100 %	100%	
15.	Tersedianya Informasi industry secara lengkap dan terkini		100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	

2.2.3 Cascading Kinerja

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis , Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut adalah cascading kinerja per unit organisasi:

1. Kepala Dinas

KEPALA DINAS

Sasaran 1: Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dan perdagangan dalam menunjang perekonomian daerah

Indikator:

1. Persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB

2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.40%	4.95%	4.98%	5.00%	5.20%	5.40%

2. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

2021	2022	2023	2024	2025	2026
20.3%	20.5%	21.34%	21.34%	21.6%	22.0%

Sasaran 2: Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM terhadap perekonomian daerah

Indikator:

1. Persentase pertumbuhan Koperasi berkualitas

2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.40%	3.48%	5.22%	6.96%	8.70%	10.43%

2. Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha

2021	2022	2023	2024	2025	2026
5%	5%	5%	5%	5%	5%

2. Sekretaris

SEKRETARIS

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan Administrasi di Dinas Perindagkop dan UKM

Indikator:

1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Cakupan sarana dan prasarana dalam kondisi baik

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Persentase ketersediaan informasi capaian kinerja dan keuangan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Kepala UPT Pasar

KEPALA UPT PASAR

Sasaran 1 : Terkelolanya Pasar Kabupaten

Indikator :

1.jumlah pasar kabupaten yang dikelola

2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	2	2	2	2	2

Sekretariat :

4. Fungsional Perencana

FUNGSIONAL PERENCANA

Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan Dinas Perindagkop dan UKM

Indikator :

1. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas Perindagkop dan UKM tepat waktu

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Persentase ketersediaan dokumen Laporan kinerja tepat waktu

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.Persentase ketersediaan dokumen laporan perencanaan tepat waktu

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%

5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sasaran 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian dan meningkatkan Profesionalisme Aparatur

Indikator :

1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Cakupan ketersediaan Sarana dan prasarana dalam kondisi baik

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Tingkat Kehadiran ASN Dinas Perindagkop dan UKM

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%

4. Cakupan layanan administrasi kepegawaian ASN

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%

5. Cakupan Layanan administrasi umum Dinas Perindagkop

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%

6. Persentase Ketersediaan data Dinas Perindagkop dan UKM

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%

7. Jumlah Inovasi Dinas Perindagkop danUKM

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	1	1	1	1

6. Kepala Sub Bagian Keuangan

KASUBAG KEUANGAN

Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Keuangan Dinas Perindagkop dan UKM

Indikator :

1.Persentase ketersediaan dokumen laporan keuangan Dinas Perindagkop dan UKM tepat waktu

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Persentase ketersediaan dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran tepat waktu

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Terfasilitasinya administrasi penggunaan anggaran tepat waktu

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%

4. Ketersediaan data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal tepat waktu

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Bidang Koperasi dan UKM :

7. Kepala Bidang Koperasi dan UKM

KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi

Indikator :

1. Persentase Koperasi Aktif

2021	2022	2023	2024	2025	2026
60	62.61	65.22	67.83	69.57	70.43

2. Persentase KSP/USP Koperasi Sehat

2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.17%	13.56%	16.95%	20.34%	23.73%	27.12%

3. Persentase Koperasi yang memiliki laporan keuangan yang baik

2021	2022	2023	2024	2025	2026
71.00%	74.00%	77.00%	85.00%	89.00%	89.00%

Sasaran 2 : Meningkatnya skala usaha koperasi

4. Persentase Koperasi yang meningkat skala usaha

2021	2022	2023	2024	2025	2026
18.26%	20.00%	21.74%	23.48%	25.22%	26.96%

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas UMKM dalam perekonomian daerah

1. Persentase Pertumbuhan UMKM

2021	2022	2023	2024	2025	2026
0.10%	1.02%	0.51%	0.50%	0.50%	0.25%

2. Persentase Peningkatan Skala Usaha UMKM

2021	2022	2023	2024	2025	2026
0.10%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%

8. Fungsional Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi

JF Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi

Sasaran 1 : Pembinaan Koperasi

Indikator :

1. Jumlah Koperasi yang dibina

2021	2022	2023	2024	2025	2026
78	79	80	81	82	83

Sasaran 2 : Pengawasan Kepatuhan Koperasi

Indikator :

1. Jumlah Koperasi yang diawasi kepatuhan usahanya (izin usaha)

2021	2022	2023	2024	2025	2026
59	53	53	53	53	53

Sasaran 2 : Penilaian Koperasi

Indikator :

3. Jumlah Koperasi yang dinilai kualitas kelembagaannya

2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	12	13	14	15	16

9. Fungsional Bina Usaha Koperasi

JF Bina Usaha Koperasi

Sasaran 1 : Pembinaan SDM Koperasi

Indikator :

1. Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya

2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	30	30	30	30	30

Sasaran 1 : Meningkatnya pendampingan terhadap pengembangan koperasi

Indikator :

1. Jumlah koperasi yang didampingi usahanya

2021	2022	2023	2024	2025	2026
42	45	48	50	54	60

10. Fungsional Pemberdayaan UMKM

JF Pemberdayaan UMKM

Sasaran 1 : terlaksananya pendampingan terhadap pelaku UMKM

Indikator :

1.Jumlah UMKM yang diberikan pendampingan usaha

2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	15	15	15	15	15

Sasaran 2 : Pembinaan Pelaku UMKM

Indikator :

1.jumlah UMKM yang dibina

2021	2022	2023	2024	2025	2026
80	80	85	90	95	100

Sasaran 3 : Pendataan UMKM di Daerah

Indikator :

1.jumlah UMKM yang terdaftar pada database UMKM

2021	2022	2023	2024	2025	2026
9722	9800	9820	9840	9890	9980

Sasaran 4 : Meningkatnya UMKM yang terstandarisasi

Indikator :

1.jumlah UMKM yang berizin dan bersertifikat

2021	2022	2023	2024	2025	2026
177	122	144	149	154	159

Sasaran 5 : Terlaksananya fasilitasi permodalan terhadap

Indikator :

1.jumlah UMKM yang mendapat akses permodalan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	50	55	56	58	60

Bidang Perdagangan dan Pasar :

11. Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN dan PASAR

Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan UMKM Sektor Perdagangan

Indikator :

2.Persentase Pertumbuhan UMKM Sektor perdagangan (Pelaku usaha Perdagangan)

2021	2022	2023	2024	2025	2026
0.10%	1.02%	0.51%	0.50%	0.50%	0.25%

Sasaran 2 : Meningkatnya skala UMKM Sektor Perindustrian

Indikator :

Persentase UMKM Sektor Perdagangan yang meningkat skala usahanya

2021	2022	2023	2024	2025	2026
0.10%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%

Sasaran 3 : Stabilisasi Ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar

Indikator :

1.Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%

12. Fungsional Penataan dan Pembinaan Pasar

JF-Penataan dan Pembinaan Pasar

Sasaran 1 : Meningkatkan penataan dan pembinaan sarana perdagangan

Indikator :

1.jumlah sarana pasar kabupaten yang dimanfaatkan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
396	489	783	832	851	871

2.jumlah pasar yang dibina

2021	2022	2023	2024	2025	2026
33	33	33	33	33	33

13. Fungsional Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian

JF Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian

Sasaran 1 : Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Indikator :

1. Persentase Pupuk dan Pestisida bersubsidi yang tersalurkan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang ditera/tera

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1026	1200	1300	1300	1300	1300

3. Presentase harga , stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang diawasi

2021	2022	2023	2024	2025	2026
100	100	100	100	100	100

Sasaran 2 : Meningkatnya layanan informasi ketersediaan bahan pokok dan barang penting di pasar

1. Koefisien harga kebutuhan pokok antar waktu

2021	2022	2023	2024	2025	2026
12- 15	12- 15	11- 14	10- 13	10- 13	10- 13

2. jumlah laporan harga barang pokok dan barang penting yang

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	1	1	1	1

14. Fungsional Promosi dan Bina Usaha Perdagangan

JF Promosi dan Bina Usaha Perdagangan

Sasaran 1 : Meningkatnya Penggunaan produk daerah (lokal)

Indikator :

1. Jenis Produk yang digunakan dalam kegiatan pemerintah

2021	2022	2023	2024	2025	2026
8	12	15	21	23	24

Sasaran 2 : Meningkatnya pelaku UMKM sektor perdagangan yang terstandarisasi dan terintegrasi

Indikator :

2. jumlah pelaku UMKM sektor perdagangan yang berizin dan bersertifikat

2021	2022	2023	2024	2025	2026
71%	74%	77%	85%	89%	89%

Sasaran 3 : Pembinaan Pelaku UMKM Sektor Perdagangan

Indikator :

2. jumlah pelaku UMKM sektor perdagangan yang dibina

2021	2022	2023	2024	2025	2026
71%	74%	77%	85%	89%	89%

Bidang Perindustrian :

15. Kepla Bidang Perindustrian

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan UMKM Sektor Perindustrian

Indikator :

2.Persentase Pertumbuhan UMKM Sektor Perindustrian (Penambahan Jumlah IKM)

2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.63%	4.80%	5.00%	5.50%	5.80%	6.00%

Sasaran 2 : Meningkatnya skala UMKM Sektor Perindustrian

Indikator :

Persentase UMKM Sektor Perindustrian yang meningkat skala usahanya

2021	2022	2023	2024	2025	2026
0.10%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%

16. Fungsional Industri Agro

JF Industri Agro

Sasaran 1 : Pendataan UMKM Sektor Perindustrian Agro di

Indikator :

1.Jumlah UMKM Sektor Perindustrian Agro yang terdaftar

2021	2022	2023	2024	2025	2026
323	338	353	370	388	406

Sasaran 2 : Pembinaan pelaku UMKM Sektor Perindustrian Agro

Indikator :

1.Jumlah Pelaku UMKM Sektor Perindustrian Agro yang dibina

2021	2022	2023	2024	2025	2026
12	43	86	86	86	86

Sasaran 3 : Meningkatnya Pengembangan Sentra Industri Agro

Indikator :

1.Jumlah Sentra Industri Agro yang dikembangkan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	2	2	2	2	2

17. Fungsional Industri Non Agro

JF Industri Non Agro

Sasaran 1 : Pendataan UMKM Sektor Perindustrian Non Agro

Indikator :

1.Jumlah UMKM Sektor Perindustrian Non Agro yang

2021	2022	2023	2024	2025	2026
587	528	552	579	607	636

Sasaran 2 : Pembinaan pelaku UMKM Sektor Perindustrian Non Agro

Indikator :

1.Jumlah Pelaku UMKM Sektor Perindustrian Non Agro yang dibina

2021	2022	2023	2024	2025	2026
18	67	134	134	134	134

Sasaran 3 : Meningkatnya Pengembangan Sentra industri Non Agro

Indikator :

1.Jumlah Sentra Industri Agro yang dikembangkan

2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	2	2	2	2	2

18. Fungsional kelembagaan Pengembangan Teknologi dan Perlindungan Usaha

JF Kerjasama Kelembagaan Pengembangan Teknologi dan Perlindungan Usaha

Sasaran 1 : Meningkatnya industri yang terstandarisasi dan

Indikator :

1. Jumlah UMKM yang berizin dan bersertifikat

2021	2022	2023	2024	2025	2026
104	156	216	443	845	1042

Sasaran 2 : Terlaksananya pendampingan terhadap pelaku UMKM Sektor Perindustrian

Indikator :

1. Jumlah UMKM sektor perindustrian yang diberikan pendampingan usaha

2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	110	220	220	220	220

2.3. Isu-isu Penting Penyelengggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas poko dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta Stakeholder guna terwujudnya Visi Pembanguan Daerah dan pencapaian program pembangunan lima tahunan masa bakti Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Potensi sumber daya alam Kabupaten Solok Selatan (cadangan hutan, pertanian, perikanan, emas, biji besi dll) sangat potensial untuk menumbuh kembangkan koperasi, perindustrian dan perdagangan yang berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia. Walaupun di beberapa sektor sudah menujukan tren positif namun belum maksimal dan berdampak merata terhadap masyarakat.

2.3.1. Kondisi saat ini

1. Kerjasama dan saling keterkaitan dalam pembinaan dan pengembangan permodalan kepada koperasi, Industri Kecil menengah maupun perdagangan dengan BUMN maupun perusahaan swasta sudah mulai terprogram salah satu diantaranya fasilitasi dengan perusahan Telkom dalam permodalan UMKM melalui bantuan pinjaman dengan suku bunga relatif lebih kecil namun belum berjalan secara optimal.
2. Sarana dan parasarana dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat/kelompok koperasi, IKM maupun perdagangan belum memadai.
3. Tugas fungsional yang ada belum maksimal sesuai dengan formasi yang diharapkan.
4. Sistem dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penataan, dan pengolaan aset, kekayaan daerah telah berjalan dengan baik namun belum optimal.
5. Tingkat produktifitas dan kesadaran PNS dalam mengemban tugas, berkreasi dan berinovasi rata-rata belum maksimal.
6. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pembinaan terdadap koperasi, perindustrian dan perdagangan diperoleh dari APBD dan APBN yang relatif terbatas

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Belum Optimalnya pengembangan Kerjasama dalam pembinaan dan pengembangan permodalan kepada koperasi, Industri Kecil menengah maupun perdagangan dengan BUMN maupun perusahaan swasta dapat terprogram dan berjalan secara optimal.

2. Masih kurangnya sarana dan parasarana penunjang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat/kelompok koperasi, IKM maupun perdagangan .
3. Belum lengkapnya formasi sehingga tugas fungsional belum terlaksana maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
4. Belum maksimalnya sistem dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penataan, dan pengolaan aset, kekayaan daerah belum berjalan secara optimal.
5. Masih kurangnya semangat dan etos kerja PNS dalam mengembanan tugas, berkreasi dan berinovasi rata-rata belum maksimal.
6. Belum optimalnya penambahan pembiayaan dalam pelaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pembinaan terdadap koperasi, perindustrian dan perdagangan diperoleh dari APBD dan APBN.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Belum optimnalnya pencapaian misi ke 2 penignkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah.
2. Belum optimalnya pencapaian Koperasi berkualitas, wirausaha baru, dan pertumbuhan ekonomi daerah di lingkup usaha mikro.

2.3.4. Kondisi Eksternal dan Internal

1. Peluang

a. Kebijakan pemerintah pusat dibidang koperasi sangat memeberikan peluang yang sangat signifikan, dapat dilihat dari dijadikannya kegiatan koperasi sebagai landasan fundamental terhadap kemajuan ekonomi kerakyatan.
b. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menciptakaan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi para investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
c. Sumber daya alam yang memadai dan berlimpah.
d. Adanya kerjasama dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dalam rangka pengembangan SDM dan Teknologi tepat guna.
e. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat Solok Selatan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman , sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dari luar.

2. Ancaman

a. Persaingan dengan produk luar yang memeliki keunggulan.
b. Pola hidup masyarakat yang cendrung konsumtif.
c. Ancaman global dengan akan diberlakukannya Masyarakat ekonomi Asia (MEA).

d. Keterbatasan pelaku usaha/pelaku bisnis yang memilik jiwa kewirausahaan yang tinggi *(Enterpreneurship)*
e. Lemahnya jiwa kompetitor/persaingai dengan pihak luar.
f. Krisis ekonomi, tingkat inflasi yang tinggi akibat melakukan penambangan liar.

3. Kekuatan

a. Jumlah aparat yang berpendidikan dan SDM yang memadai.
b. Adanya dukungan pembiayaan dari APBD/APBN dan kerjasama stokholder yang terkait.
c. Adanya lembaga penjamin pinjaman daerah.
d. Ketersedian sarana dan prasasrana yang memadai sehingga memudahkan aktifits mobilitas arus barang kebutuhan.
e. Adanya peran serta positif lembaga LSM, Dekranasda serta PKK dll yang terkait di dalam memajukan badan hukum koperasi, industri dan perdagangan.

4. Kelemahan

a. Keterbatasan tenaga fungsional di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan dalam mengoptimalkan fungsi palayanan, penyuluhan kepada masyarakat.
b. Sikap ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam berusaha relatif rendah.
c. Belum terbentuknya UPT Metrologi Legal yang dpat memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk Tera Ulang UTTP secara langsung dan cepat belum maksimal.
d. Penyebaran sumber-sumber informasi kepada masyarakat belum maksimal dan belum merata.

2.3.5 Formulasi Isu-isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk ditindak lanjuti dalam Program dan Kegiatan

Dari Berbagai permasalahan tersebut diatas, melahirkan beberapa isu strategis yang berlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2016-2021 yang terbagi menjadi isu nasional dan isu global dengan perincian sebagai berikut :

Isu Nasional yang lebih dikenal dengan Sembilan Agenda Cita-cita Nasional (Nawacita) adalah sebagai berikut :

1. Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman melalui penciptaan lapangan kerja baru.
2. Membangun tatakelola pemerintahan yang bersih.

3. Memperkuat daerah-daerah dan Nagari.
4. Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas KKN.
5. Meningkatkan kulaitas pendidikan yang mengarah kepada penciptaan teknologi.
6. Meningkatkan produktifitas dan daya saing masyarakat di pasar lokal sampai dengan internasional.
7. Kemadirian ekonomi dengan menggerakan sektor ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter dengan peningkatan SDM.
9. Menumbuhkan jiwa korsa (kepedulian) dari segi sosial kemasyarakatan.

Isu Global

1. Isu efek rumah kaca yang berdampak terhadap pemanasan global.
2. Perluasan pasar Non tradisional.
3. Diversifikasi Produk Ekspor.
4. Penerapan Teknologi 4.0

Terkait dengan pembangunan daerah terencana, diharapkan mampu mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Solok Selatan masa priode kepala daerah lima tahun mendatang. Dengan pengertian tetap berorientasi kepada program *Millenium Developmnet Goals* terutama mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran dengan menciptakan lapagan kerja baru dengan tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup, serta meningkatkan angka partisipasi murni (APM) anak sekolah dan lain-lain.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan telah sesuai dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan guna dilaksanakan dilalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur dan dan yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dan identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah berikut pendanaan indikatif.

2. Program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan Dokumen Renstra Perangkat Daerah.Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan melibatkan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultansi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Dalam konteks pembangunan sektor industri, perdagangan Koperasi dan UKM dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai masalah dan tantangan melayani dan kebutuhan masyarakat. Melalui dokumen rencana kerja ini akan diketahui tidak terdapat program dan kegiatan yang diluar rancangan awal RKPD namun terdapat perbedaan besaran nominal anggaran yang disebabkan karena kebijakan anggaran, keterbatasan APBD dan pemenuhan program prioritas nasional. Untuk Review Rancangan RKPD dapat dilihat pada Tabel. 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025
Kabupaten Solok Selatan

Rancangan Awal RKPD					Rencana Analisa Kebutuhan				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM				8.425.000.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM				8.023.544.646
Program/Kegiatan	indikator Kin erja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Kab Solok Selatan	69,57 %	72.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Kab Solok Selatan	0	0
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi Aktif	Kab Solok Selatan	69,57 %	72.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi Aktif	Kab Solok Selatan	0	0

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,Kemandirian, Ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota Kemandirian, Ketangguhan, serta	Jumlah Koperasi Sektor Rill yang dibina Jumlah KSP/USP koperasi yang dibina	Kab Solok Selatan	74 Unit 53 Unit	46.000.000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,Kemandirian,Ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota Kemandirian, Ketangguhan, serta	Jumlah Koperasi Sektor Rill yang dibina Jumlah KSP/USP koperasi yang dibina	Kab Solok Selatan	0	0
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memiliki izin usaha	Kab Solok Selatan	39 unit	26.000.000	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memiliki izin usaha	Kab Solok Selatan	0	0
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Persentase KSP/USP Koperasi Berprestasi**	**Kab Solok Selatan**	**23,73 %**	**82.000.000**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase KSP/USP Koperasi Berprestasi**	**Kab Solok Selatan**	**23,73 %**	**9.907.904**
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah KSP/USP koperasi sehat**	**Kab Solok Selatan**	**14 unit**	**82.000.000**	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah KSP/USP koperasi sehat**	**Kab Solok Selatan**	**14**	**9.907.904**

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi KSP/USP yang dinilai Kesehatannya	Kab Solok Selatan	15 Unit	41.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi KSP/USP yang dinilai Kesehatannya	Kab Solok Selatan	15	9.907.904
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang berprestasi	Kab Solok Selatan	3 unit	41.000.000	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang berprestasi	Kab Solok Selatan		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase Koperasi yang memiliki Laporan Keuangan baik**	**Kab Solok Selatan**	**40%**	**66.000.000**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Koperasi yang memiliki Laporan Keuangan baik**	**Kab Solok Selatan**	**38,26 %**	**173.456.750**
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengurus/Pengelola Koperasi yang diberikan Pelatihan**	**Kab Solok Selatan**	**1%**	**66.000.000**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengurus/ Pengelola Koperasi yang diberikan Pelatihan**	**Kab Solok Selatan**	**1%**	**173.456.750**
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Anggota/Pengurus Koperasi yang mengikuti Pelatihan Perkoperasiann	Kab Solok Selatan	30 Orang	66.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Anggota/Pengurus Koperasi yang mengikuti Pelatihan Perkoperasiann	Kab Solok Selatan	60 Orang	173.456.750

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase Koperasi yang meningkat skala usaha**	**Kab Solok Selatan**	**25,22 %**	**32.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang meningkat skala usaha**	**Kab Solok Selatan**	**0**	**0**
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah koperasi yang difasilitasipendampingan kelembagaan dan uaha**	**Kab Solok Selatan**	**54 koperasi**	**32.000.000**	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koperasi yang difasilitasi pendampingan kelembagaan dan uaha**	**Kab Solok Selatan**	**0**	**0**
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan difasilitasi pemasaran dankemitraan	Kab Solok Selatan	14 koperasi	32.000.000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan difasilitasi pemasaran dankemitraan	Kab Solok Selatan	0	0

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase Pertumbuhan UMKM**	**Kab Solok Selatan**	**0,50%**	**271.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Pertumbuhan UMKM**	**Kab Solok Selatan**	**0,50%**	**473.250.250**
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Jumlah usaha mikro yang difasilitasi standarisasi produk, sertifikasi dan perijinan serta kemitraan**	**Kab Solok Selatan**	**154 UMKM**	**271.000.000**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah usaha mikro yang difasilitasi standarisasi produk, sertifikasi dan perijinan serta kemitraan**	**Kab Solok Selatan**	**154 UMKM**	**473.250.250**
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang diinput ke aplikasi ODS Jumlah usaha mikro	Kab Solok Selatan	9840 UMKM 9840 Usaha Mikro	55.000.000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang diinput ke aplikasi ODS Jumlah usaha mikro	Kab Solok Selatan	0	0
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra	Kab Solok Selatan	95 Usaha Miko	35.000.000	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra	Kab Solok Selatan	0	0

Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang diberi dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Jumlah Usaha Mikro yang diberi dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi	Kab Solok Selatan	10 halal/ UMKM 15 merek /UMKM	46.000.000 15.000.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang diberi dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Jumlah Usaha Mikro yang diberi dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi	Kab Solok Selatan	5 halal/ UMKM 10 merek/ UMKM	40.000.000
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah lembaga/kelompok pelaku usaha yang difasilitasi	Kab Solok Selatan	2 lembaga	40.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah lembaga/kelompok pelaku usaha yang difasilitasi	Kab Solok Selatan	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Peserta inkubasi	Kab Solok Selatan	2 orang	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Peserta inkubasi	Kab Solok Selatan		

Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	Kab Solok Selatan	30 orang	60.000.000	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	Kab Solok Selatan	120 orang	433.250.250
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase Peningkatan Skala Usaha**	**Kab Solok Selatan**	**0,15%**	**122.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Peningkatan Skala Usaha**	**Kab Solok Selatan**	**0,15%**	**1.064.159.000**
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya menjadi Usaha Kecil**	**Kab Solok Selatan**	**15 Usaha Mikro**	**122.000.000**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya menjadi Usaha Kecil**	**Kab Solok Selatan**	**15 Usaha Mikro**	**1.064.159.000**
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan,pemasaran,SDM serta desain dan teknologi dalam Pengembangan Produksi dan	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pelatihan Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi sarana pemasaran Jumlah Usaha mikro yang	Kab Solok Selatan	38 umkm 10 umkm 10 umkm	122.000.000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan,pemasaran,SDM serta desain dan teknologi dalam Pengembangan Produksi dan	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pelatihan Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi sarana pemasaran Jumlah Usaha mikro yang	Kab Solok Selatan	60 umkm 50 umkm 400 umkm	**1.064.159.000**

	difasilitasi sarana produksi					difasilitasi sarana produksi			
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase Perusahaan yang memiliki Izin**	**Kab Solok Selatan**	**89%**	**90.000.000**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Perusahaan yang memiliki Izin**	**Kab Solok Selatan**	**0**	**0**
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	**Persentase Rekomendasi izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang difasilititasi penerbitannya**	**Kab Solok Selatan**	**100%**	**55.000.000**	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Persentase Rekomendasi izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang difasilitasi penerbitannya**	**Kab Solok Selatan**	**0**	**0**

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi perizinan yang terintegrasi	Kab Solok Selatan	100 izin	55.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi perizinan yang terintegrasi	Kab Solok Selatan	0	0
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang dikendalikan.**	**Kab Solok Selatan**	**100%**	**35.000.000**	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang dikendalikan.**	**Kab Solok Selatan**	**0**	**0**
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Tempat penyimpanan barang berbahaya	Kab Solok Selatan	14 lokasi	35.000.000	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Tempat penyimpanan barang berbahaya	Kab Solok Selatan	0	0

	yang diperiksa					yang diperiksa			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Kab Solok Selatan**	**87,46 %**	**820.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Kab Solok Selatan**	**85,00 %**	**645.000.000**
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola**	**Kab Solok Selatan**	**95%**	**700.000.000**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola**	**Kab Solok Selatan**	**90%**	**645.000.000**
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Kios yang dibangun atau direhabilitasi / Jumlah Los yang dibangun atau rehabilitasi/ Pengadaan atau Rehabilitasi air bersih	Kab Solok Selatan	1 unit	250.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Kios yang dibangun atau direhabilitasi/ Jumlah Los yang dibangun atau rehabilitasi / Pengadaan atau Rehabilitasi air bersih	Kab Solok Selatan	1 unit	0
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi	Jumlah UPT Pasar yang	Kab Solok	1 UPT	450.000.000	Fasilitasi Pengelolaan	Jumlah UPT Pasar	Kab Solok	1 UPT	645.000.000

Perdagangan	difasilitasi	Selatan			Sarana Distribusi Perdagangan	yang difasilitasi	Selatan		
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Pesentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina**	**Kab Solok Selatan**	**100%**	**120.000.000**	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Pesentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina**	**Kab Solok Selatan**	**0**	**0**
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Yang diBina dan diberdayakan	Kab Solok Selatan	33 Pengelola	120.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Yang diBina dan diberdayakan	Kab Solok Selatan	0	0
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Koefisien Harga barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu**	**Kab Solok Selatan**	**10-13**	**315.000.000**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Koefisien Harga barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu**	**Kab Solok Selatan**	**10-13**	**508.000.000**
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab Solok Selatan**	**100**	**100.000.000**	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah**	**Kab Solok Selatan**	**100**	**8.000.000**

						Kabupaten/ Kota			
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah lokasi yang dipantau	Kab Solok Selatan	7 lokasi	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah lokasi yang dipantau	Kab Solok Selatan	7 lokasi	8.000.000
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah lokasi yang diawasi ketersediaan barang pokok	Kab Solok Selatan	7 Lokasi	50.000.000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah lokasi yang diawasi ketersediaan barang pokok	Kab Solok Selatan	7 Lokasi	500.000.000
Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	Jumlah paket bazar	Kab Solok Selatan	3700 paket	140.000.000	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	Jumlah paket bazar	Kab Solok Selatan	10.000 paket	500.000.000
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pupuk dan Pestisida bersubsisi yang tersalurkan**	**Kab Solok Selatan**	**100%**	**50.000.000**	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pupuk dan Pestisida bersubsisi yang tersalurkan**	**Kab Solok Selatan**	**0**	**0**

Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	persentase penyaluran pupuk bersubsidi	Kab Solok Selatan	100%	50.000.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	persentase penyaluran pupuk bersubsidi	Kab Solok Selatan	0	0
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku**	**Kab Solok Selatan**	**50**	**775.000.000**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku**	**Kab Solok Selatan**	**30**	**67.000.000**
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan**	**Kab Solok Selatan**	**1300 uttp**	**775.000.000**	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan**	**Kab Solok Selatan**	**1300 uttp**	**67.000.000**

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat standard Metrologi dan perlengkapan yang tersedia/jumlah alat UTTP yang ditera/jumlah alat metrologi yang dikalibrasi/jumlah gedung metrologi yang dibangun	Kab Solok Selatan	1300 uttp	565.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat standard Metrologi dan perlengkapan yang tersedia/jumlah alat UTTP yang ditera/jumlah alat metrologi yang dikalibrasi/jumlah gedung metrologi yang dibangun	Kab Solok Selatan	1300 uttp	67.000.000
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	jumlah UTTP yang dilakukan penyuluhan	Kab Solok Selatan	100%	160.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	jumlah UTTP yang dilakukan penyuluhan	Kab Solok Selatan	0	0
Penyidikan metrologi legal	jumlah UTTP yang dilakukan penyidikan	Kab Solok Selatan	40	50.000.000	Penyidikan metrologi legal	jumlah UTTP yang dilakukan penyidikan	Kab Solok Selatan	0	0
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam**	**Kab Solok Selatan**	**78%**	**102.000.000**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM**	**Persentase Pengguna**	**Kab Solok Selatan**	**83%**	**50.000.000**

	Daerah (lokal)				**NEGERI**	**an Produk dalam Daerah (lokal)**			
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Persentase Peningkatan Penggunaan produk dalam daerah (lokal**	**Kab Solok Selatan**	**83%**	**102.000.000**	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persentase Peningkatan Penggunaan produk dalam daerah (lokal**	**Kab Solok Selatan**	**83%**	**50.000.000**
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah event promosi yang dilaksanakan	Kab Solok Selatan	5 Event	52.000.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah event promosi yang dilaksanakan	Kab Solok Selatan	0	0
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang dipasarkan dan digunakan/Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Lokal Melalui Kemitraan dengan Ritail, Market Place, Perhotelan, dan Jasa Akomodasi	Kab Solok Selatan	4 produk/ 4 umkm	25.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang dipasarkan dan digunakan /Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Lokal Melalui Kemitraan dengan Ritail,	Kab Solok Selatan	25 produk umkm	50.000.000

						Market Place, Perhotelan, dan Jasa Akomodasi			
peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah Jaringan sistem dan Infomasi Perdagangan	Kab Solok Selatan	6	25.000.000	peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah Jaringan sistem dan Infomasi Perdagangan	Kab Solok Selatan	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		**Kab Solok Selatan**		**6.678.000.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**		**Kab Solok Selatan**		**4.912.770.742**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terlaksanaanya operasional pelayanan kantor**	**Kab Solok Selatan**	**100%**	**3.411.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksanaanya operasional pelayanan kantor**	**Kab Solok Selatan**	**100%**	**4.259.770.742**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu**	**Kab Solok Selatan**	**100%**	**40.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu**	**Kab Solok Selatan**	**100%**	**0**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggara	Kab Solok Selatan	6 dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pengangga	Kab Solok Selatan	4	0

	n perangkat daerah yang disusun					ran perangkat daerah yang disusun			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kenerja dan laporan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Kab Solok Selatan	5 dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kenerja dan laporan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Kab Solok Selatan	5	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya jasa administrasi Keuangan**	**Kab Solok Selatan**	**100%**	**2.819.650.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya jasa administrasi Keuangan**	**Kab Solok Selatan**	**100%**	**3.537.394.646**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Kab Solok Selatan	25 orang	2.674.650.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Kab Solok Selatan	26 orang	3.412.394.646
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honornya	Kab Solok Selatan	12 orang	125.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honornya	Kab Solok Selatan	11 orang	125.000.000
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan yang disusun	Kab Solok Selatan	1 Dokumen 100 IKM	20.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan yang	Kab Solok Selatan	0	0

						disusun			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya jasa administrasi Umum**	**Kab Solok Selatan**	**100%**	**319.750.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya jasa administrasi Umum**	**Kab Solok Selatan**	**100%**	**313.376.096**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan listrik yang disediakan	Kab Solok Selatan	4 paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan listrik yang disediakan	Kab Solok Selatan	4 paket	5.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK yang disediakan	Kab Solok Selatan	4 paket	60.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK yang disediakan	Kab Solok Selatan	4 paket	38.284.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab Solok Selatan	4 paket	8.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab Solok Selatan	4 paket	5.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetak yang disediakan/penggandaan yang disediakan	Kab Solok Selatan	4 paket	22.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetak yang disediakan /penggandaan yang disediakan	Kab Solok Selatan	4 paket	25.000.000
fasilitas kunjungan tamu	Jumlah makan dan minum tamu yang disediakan	Kab Solok Selatan	4 dokumen	6.750.000	fasilitas kunjungan tamu	Jumlah makan dan minum tamu yang disediakan	Kab Solok Selatan	4 dokumen	3.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat konsultasi dan koordinasi	Kab Solok Selatan	48 kali/1125 kotak	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat konsultasi dan	Kab Solok Selatan	48 kali/1125 kotak	237.092.096

	yang dilaksanakan /jumlah makan minum raapt yang disediakan					koordinasi yang dilaksanakan/jumlah makan minum raapt yang disediakan			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang milik daerah yang tersedia**	**Kab Solok Selatan**	-	-	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang tersedia**	**Kab Solok Selatan**	**100%**	**13.000.000**
Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeluer yang disediakan	Kab Solok Selatan	-	-	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeluer yang disediakan	Kab Solok Selatan	-	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang disediakan	Kab Solok Selatan	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang disediakan	Kab Solok Selatan	1 unit	13.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**Kab Solok Selatan**	**100%**	**63.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**Kab Solok Selatan**	**100%**	**251.000.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	Kab Solok Selatan	300 buah	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	Kab Solok Selatan	300 buah	3.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pelakaian jaa listrik/jumlah pemakaian jasa telepon/internet/jumlah pemakaian air	Kab Solok Selatan	16,55 KWH/ 105.000 GB/ 2250 kubik	60.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pelakaian jaa listrik/jumlah pemakaian jasa telepon/internet/jumlah pemakaian air	Kab Solok Selatan	16,55 KWH/ 105.000 GB/ 2250 kubik	60.000.000
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	**Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan**	**Kab Solok Selatan**	**8 TKD**	**180.000.000**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Kab Solok Selatan**	**100%**	**163.600.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Kab Solok Selatan**	**100%**	**145.000.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara/Jumlah Perizinan	Kab Solok Selatan	17 unit/ 17 unit	115.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara /Jumlah Perizinan	Kab Solok Selatan	17 unit/ 17 unit	115.000.000

	Kendaraan Dinas/Operasional				Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang terpelihara	Kab Solok Selatan	20 unit	8.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang terpelihara	Kab Solok Selatan	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang terpelihara	Kab Solok Selatan	2 unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang terpelihara	Kab Solok Selatan	2 unit	30.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Kab Solok Selatan	3 unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Kab Solok Selatan	0	0
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Jumlah Sentra Industri Kabupaten yang dibangun dan dikembangk**	**Kab Solok Selatan**	**4 sentra**	**2.084.000.000**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Jumlah Sentra Industri Kabupaten yang dibangun dan dikemban**	**Kab Solok Selatan**	**4 sentra**	**630.000.000**

	an					**gkan**			
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Jumlah Sentra Industri Kabupaten yang dibangun/jumlah sentra industri kabupaten yang dibangun**	**Kab Solok Selatan**	**1 Sentra/4 sentra**	**2.084.000.000**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sentra Industri Kabupaten yang dibangun/ jumlah sentra industri kabupaten yang dibangun**	**Kab Solok Selatan**	**1 Sentra /4 sentra**	**630.000.000**
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Sentra Industri yang akan dikembangkan	Kab Solok Selatan	4 sentra	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Sentra Industri yang akan dikembangkan	Kab Solok Selatan	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah lembaga pemerhati dan pencinta produk kerajinan daerah yang dikerjasamakan/Jumlah sentra industri yang representatif/	Kab Solok Selatan	1 lembaga/ 1 sentra / 220 IKM	1.964.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah lembaga pemerhati dan pencinta produk kerajinan daerah yang dikerjasamakan/Jumlah sentra	Kab Solok Selatan	1 lembaga/1 sentra /220 IKM	630.000.000

	Jumlah IKM yang dilatih					industri yang representa tif/Jumlah IKM yang dilatih			
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	**Persentase Kepatuhan Perusahaan dalam Pelaporan ke Aplikasi SIINAS**	**Kab Solok Selata n**	**100%**	**183.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KO TA**	**Persentas e Kepatuha n Perusahaa n dalam Pelaporan ke Aplikasi SIINAS**	**Kab Solok Selatan**	**100%**	**23.000.000**
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Rekomendas i Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan**	**Kab Solok Selata n**	**100 izin indus tri kecil/ 9 izin indus tri besar**	**183.000.000**	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rekomend asi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)**	**Kab Solok Selatan**	**100 izin indust ri kecil/ 9 izin indust ri besar**	**23.000.000**

	Kabupaten/ Kota yang					**Kewenangan Kabupaten/Kota yang**			
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Izin perizinan (IUI) yang terintekgrasi	Kab Solok Selatan	30 izin	25.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Izin perizinan (IUI) yang terintekgrasi	Kab Solok Selatan		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah industri yang di pantau izin industri/Jumlah Dokumen Data base IKM	Kab Solok Selatan	200 industri/1 dokumen	158.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah industri yang di pantau izin industri/Jumlah Dokumen Data base IKM	Kab Solok Selatan	150 industri/1 dokumen	23.000.000
Jumlah				**8.425.000.000**	***Jumlah***				**7.903.544.646**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pembangunan yang telah direncanakan didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tenang Tahapan, Penyusunan Penggendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Adapun usulan program dan kegiatan pemangku kepentingan bersumber dari hasil musrembang kecamatan, usulan proposal dari kelompok/lembaga swadaya masyarakat serta pelaku UMKM.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendapat usulan dan saran program dan kegiatan dari para *stakeholders,* baik dari masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, maupun masyarakat atau organisasi lainnya guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah dan pencapaian program pembangunan lima Tahunan masa bakti Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan. Usulan-usulan yang ada disesuaikan dengan Target RPJMD Tahun 2021-2026 dan tugas pokok setiap bidang di Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Solok Selatan.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Solok Selatan. merupakan penjabaran dari susunan dari program yang dilakukan seiring dengan kebijakan Anggaran dan komitmen bersama. Namun dalam pelaksanaannya didukung dengan regulasi yang mengaturnya. Untuk usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Solok Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM/Pinjaman Modal	Kecamatan Pauh Duo Kecamatan Sungai Pagu Kecamatan KPGD	Jumlah UMKM yang difasilitasi	1.200.000.000	Usulan Kelompok UMKM
2.	Pengembangan Produk Unggul Daerah (Pelatihan, Pengembangan, Produksi olahan berbahan durian)	Kec. Sangir	Jumlah UMKM yang difasilitasi	1.000.000.000,	Usulan Musrembang tingkat Kecamatan
3.	Pengembangan sarana dan prasarana UMKM	7 Kecamatan	Jumlah UMKM yang difasilitasi	1.000.000.000,-	Usulan Pokok Fikiran DPRD Kabupaten Solok Selatan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Sektor Industri

a. Arah dan kebijakan Nasional di Sektor Perindustrian

Secara nasional, sektor industri telah menjadi tulang punggung perekonomian bangsa, yang diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian sebagai basis kekuatan ekonomi dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka menentukan arah dan kebijakan pembangunan industri nasional di masa yang akan datang , pemerintah telah mengeluarkan Peratutan Presiden Nomor 28 tahun 2008 Tentang Industri Nasional, yang didalamnya diatur mengenai pemberian fasilitas berupa insentif fiskal dan non fiskal, dan kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pengusaha industri tertentu, seperti industri perioritas tinggi, industri pionir, industri yang dibangun didaerah terpencil dan lainnya.

3.1.2. Sektor Perdagangan

a. Arah dan Kebijakan Nasional di Sektor Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam lima tahun kedepan lebih banyak mengarah kepada pembangunan/revetalisasi 5 (lima) ribu pasar rakyat yang ada di Indonesia. Pembangunan pasar tradisional tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah memberi ruang lebih kepada pelaku usaha kecil menegah lokal untuk memperjual belikan hasil usaha mereka guna menghadapi gempuran produksi luar negeri seiring dengan dibukanya/dimulainya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pemerintah mencoba memberikan sebuah bentuk perlindungan dan jaminan kepada masyakatat berupa diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang penetapan Pupuk Bersubsidi sebgai Barang dalam Pengawasan, sehingga dengan demikian petanih lebih gampang memperoleh pupuk dan terhindar dari monopoli dan penyimpanan dari pihak distributor.

3.1.3. Sektor Koperasi

a. Arah dan Kebijakan Koperasi Nasional

Secara nasional, sektor perkoperasian sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena koperasi menganut paham sosial atau kekerabatan dan memfokuskan diri kepada kelompok masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pembangunan dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sebagai salah satu upaya untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, maka diperlukan keberadaan koperasi dalam setiap aktifitas ekonomi di Indonesia maka Pemerintah menetapkan Undang-undang nomor 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian.

3.1.4. Sektor UMKM

a. Arah dan Kebijakan tentang UMKM

Sektor UMKM yang terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar juga merupakan solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran. Tren positif ini yang perlu terus dijaga pertumbuhannya agar sector UMKM dalam skala yang besar mampu mengatasi masalah pengangguran di Indonesia

pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian global karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian dunia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu Pondasi Perekonomian Nasional, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kontribusi UMKM mencapai 99% dari seluruh unit usaha, kontribusi terhadap PDB sebesar 60,5% dan mampu menyerap tenaga kerja 96,9%. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjelma sebagai salah satu pilar vital perekonomian Indonesia UMKM telah terbukti tahan terhadap krisis, bahkan menjadi *booster* pemulihan ekonomi pada saat krisis, termasuk pandemi Covid-19 saat ini. Namun demikian, umumnya UMKM di berbagai daerah di Indonesia menghadapi tantangan, beberapa tantangan tersebut antara lain akses keuangan, pemasaran/promosi, inftrastruktur dan teknologi, regulasi dan birokrasi serta keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan. Untuk itu dibutuhkan sinergi dan peran dari berbagai pihak terkait untuk meningkatkan penguatan sektor UMKM sebagai salah satu gerbong penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sesuai pasal 97 Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa kebijakan pemerintah yang telah dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia adalah :

1. Pembangunan infrastruktur, Infrastruktur yang memadai akan membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar mereka. Pembangunan infrastruktur konektivitas digital, seperti *Satelit Palapa Ring* dan *Base Transceiver Station*, sehingga pelaku usaha yang berada di daerah terpencil akan terhubung secara digital.
2. Program Pembiayaan, sekitar 18 juta UMKM belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal dan sekitar 46 juta UMKM masih membutuhkan tambahan pembiayaan untuk modal kerja dan investasinya. Pemerintah memberikan dukunganmelalui program KUR dan pembiayaan Ultra Mikro
3. Digitalisasi UMKM, Digitalisasi dapat memberikan banyak manfaat bagi UMKM, termasuk efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing. Hingga Januari 2022, sebanyak 17,2 juta UMKM telah terdigitalisasi. Targetnya, 40 juta UMKM akan terdigitalisasi pada tahun 2024
4. Sinergi dan Koordinasi, peningkatan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademi, dan juga sektor swasta, termasuk juga bagaimana mengembangkan skema keuangan syariah untuk UMKM sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Rencana strategis Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Solok Selatan memerlukan integrasi dari berbagai faktor pendukung organisasi seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya sehingga mampu menjawab setiap perubahan yang terjadi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal oraganisasi. Oleh karena itu analisa lingkungan organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi berbagai perubahan untuk mencapai tujuan, baik jangka pendek maupun

tujuan jangka menengah. Yang menjadi tujuan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Solok Selatan adalah:

1. Meningkatkan Kontribusi Sektor Perindustrian dan Perdagangan dalam menunjang perekonomian daerah.
2. Meningkatnya Peran Koperasi dan UKM terhadap perekonomian daerah.

Tujuan, sasaran, indikator dam target kinerja yang ditetapkan untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk tahun 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	4,52 %
		Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dan perdagangan dalam menunjang perekonomian daerah	Presentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	5,2 %
			Presentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	21,6 %
		Meningkatnya peran koperasi dan UMKM terhadap perekonomian daerah	Presentase Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	8,7%
			Presentase usaha mikro menjadi wirausaha	5%

3.2.2 Sasaran

Tujuan 1: . Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

No	SASARAN	No	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM Sektor Perindustrian.	1.	Persentase Pertumbuhan UMKM Sektor Perindustrian (Penambahan Jumlah IKM).
2.	Meningkatnya skala UMKM Sektor Perindustrian.	1.	Persentase UMKM Sektor Perindustrian yang meningkat skala usahanya.

Tujuan 2: Meningkatkan Usaha Perdagangan serta Perlindungan Konsumen

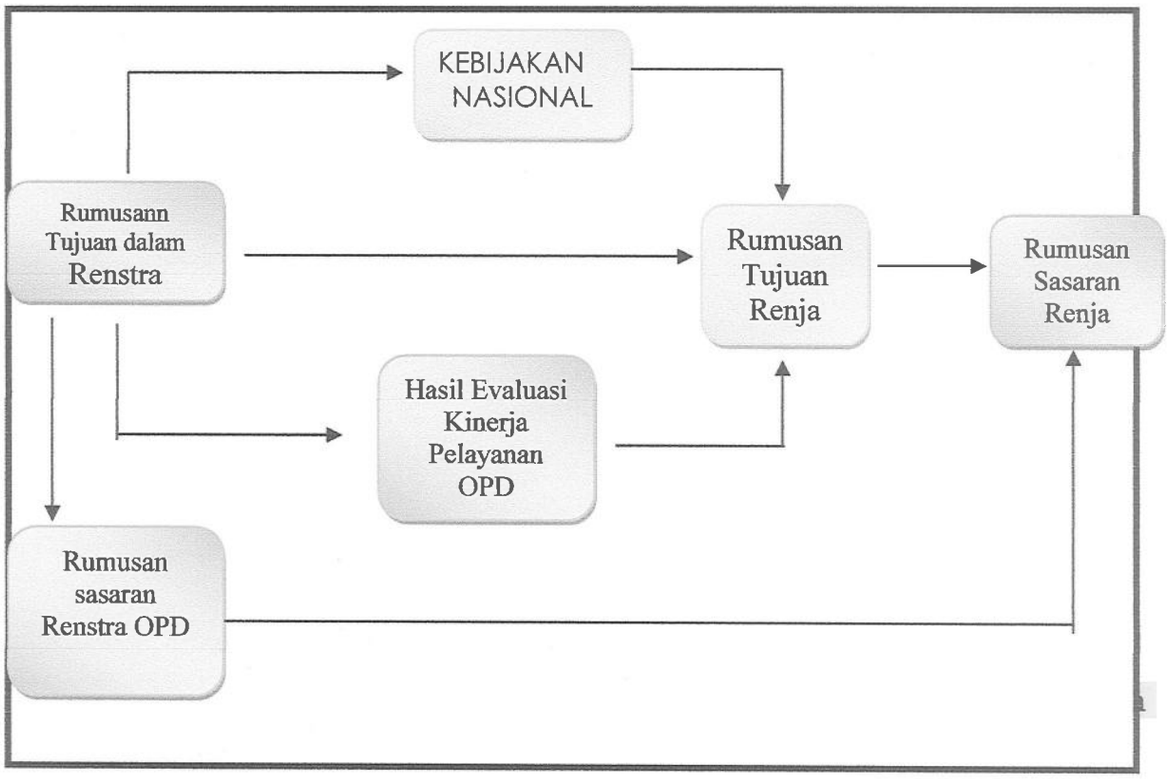
No	SASARAN	No	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM Sektor Perdagangan Meningkatnya kemampuan pelaku usaha perdagangan.	1.	Persentase Pertumbuhan UMKM Sektor perdagangan (Pelaku usaha Perdagangan).
2.	Stabilisasi Ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar.	2.	Persentase Stabilitas harga bahan pokok dan barang penting di pasar.

Tujuan 3: Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi

No	SASARAN	No	INDIKATOR KINERJA
1.	Jumlah Koperasi Aktif Meningkatnya.	1.	Persentase KSP/USP
		2.	Koperasi Sehat
		3.	Persentase Koperasi yang memiliki laporan keuangan yang baik.
2.	Meningkatnya skala usaha koperasi.	1.	Persentase Koperasi yang memiliki laporan keuangan yang baik.
		2.	Persentase Koperasi yang meningkat skala usaha.
3.	Meningkatnya kualitas UMKM dalam perekonomian	1.	Persentase Pertumbuhan UMKM.
		2.	Persentase Peningkatan Skala Usaha.

Langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar. 3.1
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja OPD



3.3 Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan

1. Menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah, terkait dengan peningkatan daya saing daerah dengan pemberdayaan UMKM.
2. Pengentasan kemiskinan Ekstrim sesuai dengan urusan pilihan wajib koperasi ukm, perindustrian dan perdagangan.
3. Pengembangan potensi daerah khususnya di sektor UMKM.
4. Penciptaan nilai tambah produk unggul derah hasil pertanian, kehutanan dan lainya.
5. Sebagai penunjang pencapaian sasaran strategis dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.

B. Rincian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

e. Fasilitas kunjungan tamu

d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Mebel

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan jasa surat-menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainya.

II. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,

Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

a. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

b. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

V. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

a. Pengembangan Usaha Mikro

VI. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.

b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana distribusi Perdagangan.

VII. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

a. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

VIII. PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang.

IX. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

a. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

X. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

XI. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja

4.1.1 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2025 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan merencanakan sebanyak 11 program 16 kegiatan dan 30 sub kegiatan merupakan urusan pilihan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan. Program dan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Pedagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Rencana program prioritas beserta indicator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk setiap program proritas tersebut. Pemilihan program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas diharapkan dapat menunjukan Akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator Kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi.

4.1.2 Pendanaan

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Adapun uraian rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Preangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju tahun 2026
Kabupaten Solok Selatan

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. SOLOK SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						**7.258.544.646,00**							**6.084.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.720.773.904,00**							**352.500.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**1.720.773.904,00**							**352.500.000,00**	
1.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	-	-			-	**9.907.904,00**						-	**41.500.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah KSP/USP koperasi sehat* *Jumlah KSP/USP Koperasi Sehat*	-			14 unit 14 Unit	9.907.904,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Koperasi	-	41.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				15 Unit Usaha	9.907.904,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang Inklusif	Koperasi		41.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	-	-			-	**173.456.750,00**						-	**66.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persen Pengurus/Pengelola Koperasi yang diberikan Pelatihan* *Persentase pengurus/pengelola koperasi yang diberikan pelatihan*	-			50.9 Persen 1 persen	173.456.750,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang Inklusif	Koperasi	-	66.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				60 Orang	173.456.750,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Koperasi		86.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	-	-			-	**473.250.250,00**						-	**122.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah usaha mikro yang difasilitasi standarisasi produk, sertifikasi dan perijinan serta kemitraan Jumlah usaha mikro yang difasilitasi standarisasi produk, sertifikasi dan perizinan serta kemitraan Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Standarisasi Produk, Sertifikasi dan Perizinan serta Kemitraan*	-			154 Unit Usaha 154 Unit Usaha 154 Unit Usaha	473.250.250,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	-	122.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				15 Unit Usaha	40.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang Inklusif	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)		62.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				120 Orang	433.250.250,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang Inklusif	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	-	-			-	**1.064.159.000,00**						-	**123.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah usaha mikro yang meningkat skala usahanya Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Skala Usahanya Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya menjadi Usaha Kecil*	-			15 Usaha Mikro 50 Usaha Mikro 15 Usaha Mikro	1.064.159.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	-	123.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				500 Unit Usaha	1.064.159.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)		123.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**5.537.770.742,00**							**5.732.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**625.000.000,00**							**520.000.000,00**	
1.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	-	-			-	**508.000.000,00**						-	**195.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokon dan Barang Penting ditingkat daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	8.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perdagangan	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perdagangan		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Koefisien harga barang kebutuhan pokok antar waktu Koefisien Harga barang Kebutuhan Pokok antar waktu*	-			10-13 Koefisien 10,13 %	500.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perdagangan	-	145.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	500.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perdagangan		145.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	-	-			-	**67.000.000,00**						-	**300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan* *Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan*	-			1300 Unit 1,300 Unit	67.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perdagangan	-	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				700 Unit	67.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Pasar Muara Labuh Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Pakan Rabaa Timur Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Lubuk Malako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perdagangan		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	-	-			-	**50.000.000,00**						-	**25.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	** Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Daerah (lokal) " Presentase peningkatan penggunaan produk dalam daerah (lokal)*	-			83 Persen 83 %	50.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perdagangan	-	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				25 UMKM	50.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perdagangan		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**4.912.770.742,00**							**5.212.000.000,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**4.259.770.742,00**						-	**3.369.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah* *Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah*	-			100 % 100 Persen	3.537.394.646,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perindustrian	-	2.840.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	3.412.394.646,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perindustrian		2.710.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perindustrian		130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah* *Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah*	-			100 % 100 Persen	313.376.096,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	-	-	302.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	-		6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	38.284.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	-		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	5.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	-		8.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	25.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	-		22.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	-		6.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	237.092.096,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase barang milik daerah yang tersedia* *Persentase barang milik daerah yang tersedia*	-			100 % 100 Persen	13.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perindustrian	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	13.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perindustrian		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 %	251.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perindustrian	-	71.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perindustrian		3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	60.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perindustrian		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perindustrian		8.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	180.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang Inklusif	Perindustrian		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara* *Presentase barang milik daerah yang terpelihara*	-			100 % 100 %	145.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang Inklusif	Perindustrian	-	155.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	115.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perindustrian		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	30.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perindustrian		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	-	-			-	**630.000.000,00**						-	**1.680.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah sentra industri kabupaten yang dibangun* *Jumlah Sentra Industri Kabupaten yang dibangun* *Jumlah sentra industri yang dikembangkan*	-			1 Sentra 1 Sentra 4 sentra	630.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perindustrian	-	1.680.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	630.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perindustrian		1.680.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	-	-			-	**23.000.000,00**						-	**163.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang diterbit Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha (IPU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota yang diterbitkan*	-			109 Izin Industri kecil/besar 100 Izin Industri Kecil	23.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromeriti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perindustrian	-	163.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	23.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromeriti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif	Perindustrian		163.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		UPTD PASAR						**645.000.000,00**							**480.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**645.000.000,00**							**480.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**645.000.000,00**							**480.000.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	-	-			-	**645.000.000,00**						-	**480.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola* *Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan di kelola*	-			95 % 95 %	645.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang Inklusif	Perdagangan	-	480.000.000,00	UPTD PASAR
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	645.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Pasar Muara Labuh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Percepatan transformasi ekonomi yang Inklusif	Perdagangan		480.000.000,00	UPTD PASAR
	JUMLAH							7.903.544.646,00							6.564.500.000,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait denngan perencanaan pembangunan daerah khususnya sektor koperasi industri dan perdagangan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. *Community Base Depelopment* (CBD) dengan keterlibatan leih banyak para pelaku (stake holder) dalam menciptakan Good Government sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes ke bawah sehingga keberpihakkan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rencana Kerja (Renja) juga dapat dijadikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pemimpin manajemen dan staf Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Padang Aro, 15 Juli 2024

KEPALA
DINAS PERINDAGKOP DAN UKM

AKMAL HAMDI, S.H
NIP. 19760617 200604 1 006

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami telah dapat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas P2KB,PP&PA Kab, Solok Selatan Tahun 2025 disusun berpedoman pada Renstra Dinas P2KB,PP&PA yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan , lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta perkiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Rencana Kerja Dinas P2KB,PP&PA dengan Renstra Dinas P2KB,PP&PA, serta berpedoman pada hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja tahun berjalan yang bertujuan unluk memastikan bahwa rumusan kegiatan altematif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Rencana Kerja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra.

Akhimya, kami berharap semoga Rencana Kerja ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan daerah menuju masa depan yang lebih baik.

Padang Aro, Juli 2024

Kepala DP2KB,PP&PA

Kab. Solok Selatan

dr. ERAWATI

NIP. 19780505 200802 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Landasan Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 24
2.5. Penelaahan Usulan Progran dan Kegiatan Masyarakat 42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 47
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 47
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 48
3.3. Program dan Kegiatan 49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 54
4.1. Program dan Kegiatan 54
PENUTUP 67

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah menurut Undang-undang No 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan.

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, meliputi: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal;c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang kemudian akan disusun menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan sebagai salah satu Organisasi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban juga menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan rancangan awal RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari dibuatnya Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam Perangkat Daerah DP2KB,PP&PA dan menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan

selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi sumber daya yang dimiliki.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025;
b. Sebagai Instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan laporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2023, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah, hasil review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja-PD, serta Program dan Kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

Bab V. PENUTUP

Berisi penutup, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan melaksanakan 10 program dengan 18 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Pagu dana yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2023 adalah sebesar Rp. 7.833.298.254,-. Adapun realisasi keuangan di akhir tahun 2023 sebesar Rp. 7.287.225.220,0 atau sekitar 93,03%.

Pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 10 program dengan 19 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Pagu dana yang dikelola adalah sebesar Rp9.418.530.535,-. Perkiraan capaian pada tahun 2024 diperkirakan akan sama kondisinya seperti tahun 2023.

2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja.

Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja adalah Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan target Indeks Pemberdayaan Gender 55,3 dengan capaian 48,04, Serta Program Pembinaan Keluarga Berencana, Indikator Kinerja Cakupan Akseptor KB aktif, dengan target 82,25%, realisasi 80,12%.

2.1.2 Realisasi Program Yang Memenuhi Target Kinerja.

Secara umum rata-rata program/kegiatan yang dilaksanakan sudah mencapai target kinerja.

2.1.3 Realisasi Program Yang Melebihi Target Kinerja.

Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja diantaranya adalah Sub Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga

Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Target Persentase OPD Responsif Gender sebesar 55% realisasi sebesar 100%.

Selain itu Program Perlindungan Perempuan dengan indikator kinerja Rasio KDRT (per 1000 penduduk) 0,015 capaian 0,010 juga melebihi target kinerja dengan tingkat capaian 150%.

2.1.4 Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Solok Selatan menunjukkan penurunan dalam tiga tahun dari Tahun 2021-2023. Penurunan pertumbuhan IDG ini disebabkan adanya penurunan pada indikator pembentuk IDG terutama keterlibatan perempuan dalam parlemen yang dari tahun 2021-2023 adalah 0 atau tidak ada anggota parlemen perempuan yang menunjukkan rendahnya kesadaran perempuan untuk ikut berkiprah di dunia politik. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender dicapai melalui Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak serta program peningkatan kualitas keluarga. Namun dengan anggaran yang sangat terbatas Dinas Pengendalian Penduduk, Keuarga Berencana, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan belum mampu secara maksimal untuk mempengaruhi peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender.

Masih belum tercapainya pencapaian target Cakupan Akseptor KB Aktif dikarenakan masih adanya masyarakat terutama yang berada di wilayah yang jauh dari fasilitas pelayanan yang belum terjangkau layanan KB, keterbatasan personil Penyuluh KB yang bertugas di wilayah kerja Kabupaten Selatan Juga menjadi salah satu penghambat.

Terpenuhinya / melebihi target kinerja pada beberapa program / kegiatan diantaranya didukung oleh adanya dukungan dana DAK Non Fisik yang sangat menunjang pelaksanaan kegiatan. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan lembaga terkait.

2.1.5 Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Perangkat Daerah.

Implikasi yang timbul atas pencapaian Tahun 2023 terhadap Target Capaian Program Tahun berikutnya adalah menjadi acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun berikunya. Capaian kinerja yang masih belum mencapai target, untuk dikaji kemungkinan penyesuaian target atau penyesuaian bentuk teknis kegiatan agar target dapat dicapai.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor Faktor Tidak Tercapainya Target Program/Kegiatan.

Perbaikan perencanan dilakukan untuk peningkatan kualitas tata Kelola keuangan serta memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai target kinerja. Penggunaan anggaran dituntut agar dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, setiap rupiah harus dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran.

Langkah perbaikan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pada tahun 2023 dan 2024 dan menganalisa kendala yang ada guna dilakukan perbaikan untuk tahun 2025;
2. Memprioritaskan Kegiatan dan Anggaran yang potensial untuk peningkatan pencapaian kinerja;
3. Melakukan Efiensi penggunaan anggaran.
4. Melakukan evaluasi secara rutin dan berkala terkait pencapaian program dan target kinerja
5. Memperkuat koordinasi dengan mitra kerja dalam pencapaian program.

Evaluasi Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 dan Prakiraan Capaian Tahun 2024 dapat dilihat Sebagaimana dalam tabel 2.1 dibawah ini:

Table 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan

s/d Tahun 2024

No	KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	
												Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
	1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11 = (6+8+10)*	*12 = 11/5*
1	2	0 8	0 2				**Program: Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Indeks Pemberdayaan Gender**	**Indeks**	**60**	**48.04**	**55.30**	**48.7**	**88%**	**57**	**50.40**	**84%**
2	2	0 8	0 2	2	0 1		**Keg: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD Responsif Gender**	**%**	**100**	**20**	**54.54**	**88**	**161%**	**72.72**	**88**	**88%**
3	2	08	02	2	01	0002	Sub Keg: Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	60	10	10	0	0%	10	20	33%

4	2	08	02	2	01	0003	Sub Keg: Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah dokumen advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dokumen	30	10	5	5	100%	5	20	67%
5	**2**	**08**	**02**	**2**	**03**		**Keg: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**jumlah lembaga yang difasilitasi**	**lembaga**	**18**	**6**	**3**	**3**	**100%**	**3**	**12**	**67%**
6	2	08	02	2	03	0002	Sub Keg: Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah lembaga yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya	lembaga	18	6	3	3	100%	3	12	**67%**
7	**2**	**08**	**04**				**Program: Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sesuai standar**	**%**	**60**	**20**	**30**	**30**	**100%**	**40**	**50**	**83%**
8	**2**	**08**	**04**	**2**	**01**		**Keg: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase peningkatan kualitas keluarga**	**%**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**66.67**	**67%**
9	2	08	04	2	01	0001	Sub Keg: Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten	dokumen	30	10	5	5	100%	5	20	67%

10	2	08	04	2	01	0002	Sub Keg; pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kab/kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Dokumen	18	6	3	3	100%	3	12	67%
11	2	08	04	2	01	0003	pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	72	24	12	12	100%	12	48	67%
12	**2**	**08**	**05**				**Program: Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak**	**Persentase OPD yang responsif Gender**	**%**	**100**	**20**	**54.54**	**88**	**161%**	**72.72**	**88**	**88%**
13	**2**	**08**	**05**	**2**	**01**		**Keg: Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase ketersediaan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten**	**%**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**66.67**	**67%**
14	2	08	05	2	01	0001	Sub Keg: penyediaan data gender dan anak di kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Dokumen	5	2	1	1	100%	1	4	80%
15	**2**	**08**	**03**				**Program: Perlindungan Perempuan**	**Rasio KDRT (per 1000 penduduk)**	**Rasio**	**0.005**	**0.01**	**0.015**	**0.010**	**150%**	**0.012**	**0.010**	**50%**
16	**2**	**08**	**03**	**2**	**01**		**Keg: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani**	**%**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**66.67**	**67%**

17	2	08	03	2	01	0002	Sub Keg: Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	jumlah dokumen advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten kota	Dokumen	25	5	5	5	100%	5	15	60%
18	**2**	**08**	**07**				**Program: Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase pengaduan tindakan kekerasan anak yang ditangani**	**%**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**66.67**	**67%**
19	**2**	**08**	**07**	**2**	**01**		**Keg: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani**	**%**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**66.67**	**67%**
20	2	08	07	2	01	0002	Sub Keg: Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	Jumlah Kegiatan Forum anak yang terselenggara	kegiatan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
21	**2**	**08**	**07**	**2**	**02**		**Keg: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani**	**%**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**66.67**	**67%**
22	2	08	07	2	02	0005	Sub Keg: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	60	0	20	18	90%	20	38	63%
23	**2**	**08**	**06**				**Program: Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Status kabupaten layak ana**	**status**	**5**	**Belum**	**sudah**	**sudah**	**100%**	**sudah**	**sudah**	**100%**

24	**2**	**08**	**06**	**2**	**02**		**Keg: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Status kabupaten layak anak**	**status**	**sudah**	**Belum**	**sudah**	**sudah**	**100%**	**sudah**	**sudah**	**100%**
25	2	08	06	2	02	0004	Sub Keg: Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	**1**	1	100%	1	3	60%
26	**2**	**14**	**04**				**Program: Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera**	**%**	**41.2**	**na**	**35.1**	**na**	**na**	**na**	**na**	**na**
27	**2**	**14**	**04**	**2**	**02**		**Keg: Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**jumlah peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**organisasi**	**42**	**14**	**7**	**7**	**100%**	**7**	**28**	**67%**

28	2	14	04	2	02	0002	Sub Keg: Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan	42	7	7	7	100%	7	21	50%
29	**2**	**14**	**04**	**2**	**01**		**Keg: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah kegiatan pemilihan duta genre yang diikuti**	**kegiatan**	**12**	**4**	**2**	**2**	**100%**	**2**	**8**	**67%**
30	2	14	04	2	01	0028	Sub Keg: Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia(BKL), Unit Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiata	orang	12	4	2	2	100%	0	6	50%

31	2	14	04	2	01	0005	Sub Keg: Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	1	0	0	0%	0	1	100%
32	2	14	04	2	01	0008	Sub Keg: Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	laporan	6	0	2	2	100%	2	4	67%
33	**2**	**14**	**03**				**Program: Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Cakupan akseptor KB akti**	**%**	**83.25**	**48.99**	**82.25**	**80.12**	**97%**	**82.4**	**82**	**98%**
34	**2**	**14**	**03**	**2**	**01**		**Keg: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**persentase pelaksanaan advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB**	**%**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**66.67**	**67%**
35	2	14	03	2	01	0009	Sub Keg: Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	unit	1	1	1	1	100%	0	1	100%

36	2	14	03	2	01	0012	Sub Keg: Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa Cetak dan Elektronik serta media luar ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	24	8	4	4	100%	4	16	67%
37	2	14	03	2	01	0011	Sub Keg: Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	laporan	35	7	7	7	100%	7	21	60%
38	2	14	03	2	01	0010	Sub Keg: Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan	42	14	7	7	100%	7	28	67%

39	**2**	**1 4**	**0 3**	**2**	**0 4**		**Keg: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**persentase peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**	**%**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**66.67**	**67%**
40	2	14	03	2	04	0001	Sub Keg: Penguatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	organisasi	42	14	7	7	100%	7	28	67%
41	2	14	03	2	04	0006	Sub Keg: Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	kampung	35	14	18	18	100%	18	22	63%
42	**2**	**1 4**	**0 3**	**2**	**0 3**		**Keg: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase ketersediaan obat dan alat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten**	**%**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**66.67**	**67%**

43	2	14	03	2	03	0010	Sub Keg: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	orang	42	14	7	7	100%	7	28	67%
44	2	14	03	2	03	0011	Sub Keg: Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergera	laporan	130	129	0	0	0%	0	129	99%
45	2	14	03	2	03	0003	Sub Keg: Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metoda Kontrasepsi angka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP	orang	10000	7974	9000	8757	97%	9200	9,200	92%
46	**2**	**14**	**03**	**2**	**02**		**Keg: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**persentase tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang ditingkatkan kapasitasnya**	**%**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**66.67**	**67%**
47	2	14	03	2	02	0003	Sub Keg: Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	jumlah pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk lapangan petugas KB / Penyuluh (PKB/PLKB)	kali	100	0	100	100	100%	0	100	100%
48	2	14	03	2	02	0004	Sub Keg: Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	1925	385	**385**	385	100%	385	1155	60%
49	**2**	**14**	**02**				**Program: Pengendalian Penduduk**	**Laju pertumbuhan penduduk**	**%**	**0.45**	**0.29**	**0.45**	**0.54**	**83%**	**0.45**	**0.54**	**83%**

50	**2**	**14**	**02**	**2**	**02**		**Keg: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah yang dipetakan**	**%**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**66.67**	**67%**
51	2	14	02	2	02	0020	Sub Keg: Penyusunan profil kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	dokumen	1	0	1	0	0%	0	1	100%
52	2	14	02	2	02	0013	Sub Keg: Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	72	24	12	12	100%	12	48	67%
53	**2**	**14**	**01**				**Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten dan kota**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**%**	**100**	**33.33**	100	**100**	**100%**	**100**	**66.67**	**67%**
54	**2**	**14**	**01**	**2**	**02**		**Keg: Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**66.67**	**67%**
55	2	14	01	2	02	0001	Sub Keg: Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	150	42	26	22	85%	22	86	57%
56	2	14	01	2	02	0002	Sub Keg: Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72	24	12	12	100%	12	48	67%
57	**2**	**14**	**01**	**2**	**06**		**Keg: Administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**33.33**	100	**100**	**100%**	**100**	**66.67**	**67%**

58	2	14	01	2	06	0001	Sub Keg: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	Paket	24	8	4	4	100%	4	16	67%
59	2	14	01	2	06	0002	Sub Keg: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24	8	4	4	100%	4	16	67%
60	2	14	01	2	06	0003	Sub Keg: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	24	8	4	4	100%	4	16	67%
61	2	14	01	2	06	0005	Sub Keg: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	24	8	4	4	100%	4	16	67%
62	2	14	01	2	06	0009	Sub Keg: Penyediaan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	8	4	4	100%	4	16	67%
63	2	14	01	2	06	0008	Sub Keg: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	8	4	4	100%	4	16	67%
64	**2**	**14**	**01**	**2**	**07**		**Keg; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**%**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**66.67**	**67%**
65	2	14	01	2	07	0006	Sub Keg: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang disediakan	Unit	20	3	4	0	0%	1	4	20%

66	**2**	**14**	**01**	**2**	**08**		**Keg; Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**%**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**66.67**	**67%**
67	2	14	01	2	08	0001	Sub Keg: Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	8	4	4	100%	4	16	67%
68	2	14	01	2	08	0002	Sub Keg: Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	24	8	4	4	100%	4	16	67%
69	2	14	01	2	08	0003	Sub Keg: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	24	8	4	4	100%	4	16	67%
70	2	14	01	2	08	0004	Sub Keg: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	8	4	4	100%	4	16	67%
71	**2**	**14**	**01**	**2**	**09**		**Keg: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**%**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**66.67**	**67%**
72	2	14	01	2	09	0002	Sub Keg: penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan diibayarkan Pajaknya	Unit	47	8	10	10	100%	12	30	64%
73	2	14	01	2	09	0009	Sub Keg: Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	6	2	1	1	100%	1	4	67%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan bertanggung jawab atas 2 urusan pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan pada periode Renstra 2021-2026 adalah sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Adapun Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Indek Pembangunan Gender		√	97.15	97.70	98.25	98.70	95.33	97.70	98.25	98.70	
2	Persentase Penyelesaian Kasus Terhadap Anak dan Perempuan		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD		√	12.67	12.67	12.68	12.68	9.99	12.67	12.68	12.68	
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait		√	0.0032	0.003	0.0028	0.0026	100	0.003	0.0028	0.0026	
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		√	0.5	0.3	0.2	0.10	6.37	0.3	0.2	0.10	
6	Cakupan akseptor KB aktif		√	85.2	86.5	88.00	90	80.12	86.5	88.00	90	
7	Laju Pertumbuhan Penduduk		√	0.35	0.30	0.25	0.2	1.53	0.30	0.25	0.2	
8	TFR (Angka Kelahiran Total)		√	2.20	2.10	2.10	2.1	2.44	2.10	2.10	2.1	

9	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		√	69	70.5	72	73.5	80.12	70.5	72	73.5	
10	Persentase kebutuhan ber-KB yang terpenuhi		√	100	100	100	100	88.63	100	100	100	

Beberapa indikator Kinerja telah mencapai target seperti Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak, Indeks Pembangunan Gender sudah hampir mencapai target, dengan realisasi 95.33 dari target sebesar 97.15 pada tahun 2023, begitu juga untuk indikator Persentase Penyelesaian Kasus Terhadap Anak dan Perempuan rata-rata memenuhi target di setiap tahunnya, karena semua kasus yang dilaporkan ke Dinas P2KB,PP&PA didampingi dengan tuntas. Untuk Anggaran Responsif Gender belum memenuhi target yang menggambarkan bahwa masih banyak penganggaran yang tidak menggunakan kajian berbasis gender. Sementara untuk Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) belum mencapai target karena masih banyak kejadian kekerasan terhadap perempuan.

Sedangkan untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana masih belum mencapai target adalah cakupan akseptor KB aktif dengan realisasi 80.12% dari target 85.2% sedangkan untuk Laju Pertumbuhan Penduduk,TFR (Angka Kelahiran Total),Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) dan Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) juga masih belum memenuhi target.

2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra.

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk 2 urusan, yaitu urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fokus pelayanan yang diberikan adalah pelayanan Keluarga Berencana, serta keluarga sejahtera guna mendukung pengendalian penduduk serta mendukung percepatan penurunan stunting.

Pencapaian Target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2023 yaitu :

1. Indeks Pembangunan Gender tercapai 95.33.
2. Persentase Penyelesaian Kasus Terhadap Anak dan Perempuan tercapai 100%
3. Persentase ARG pada belanja langsung APBD tercapai 9.99
4. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait 100
5. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 6.37
6. Cakupan akseptor KB aktif tercapai 80.12
7. Laju Pertumbuhan Penduduk tercapai 1.53

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi Dinas P2KB,PP&PA dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya diuraikan sebagai berikut :

a. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi adalah Belum optimalnya pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.

Penyebab :

- ✓ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam ber KB hal ini dapat dilihat dari rasio akseptor KB dan Cakupan peserta KB Aktif;
- ✓ Tingginya angka kelahiran terutama pada rumah tangga miskin;
- ✓ Masih terbatasnya Kapasitas tenaga dan kelembagaan program KB;
- ✓ Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB;
- ✓ Belum optimalnya advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi adalah Belum optimalnya peran serta gender dalam pembangunan serta rendahnya pencapaian Kabupaten Layak Anak.

Penyebab:

- ✓ Masih terdapatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- ✓ Masih terdapatnya kasus kriminalisasi dan eksploitasi anak yang dikarenakan rendahnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

- ✓ Masih minimnya ketersediaan kebijakan serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
- ✓ Belum optimalnya peran lembaga pengarustaaan gender dan anak dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
- ✓ Kurangnya wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangakan usaha
- ✓ Kurangnya kebijakan daerah yang mengatur kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, sehingga implementasi kebijakan masih dilakukan secara parsial.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif.
2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani
4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dang Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan pencapaian target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung tercapainya misi 1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif, serta misi 5 Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dang Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Adapun Kondisi dan lingkungan internal yang dapat menjadi kekuatan (strengths) maupun kelemahan (Weaknes) bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

1. Kekuatan (Strenghts)
   a. Memiliki Visi dan misi yang jelas.
   b. Koordinasi yang baik antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan lintas sektor terkait program Bangga Kencana .

c. Pegawai yang berdedikasi tinggi sehingga mempunyai komitmen tinggi dan etos kerja yang baik.

d. Adanya penambahan pegawai dari unsur tenaga kesehatan (Bidan), sehingga dapat mempercepat proses pelayanan KB kepada Masyarakat.

2. Kelemahan (Weaknes)

a. Rasio PKB dengan Desa atau kelurahan belum ideal.

b. Terbatasnya pegawai tetap berbasis Psikolog

3. Tantangan

a. Pengembangan Kampung KB mandiri

4. Peluang

a. Akan ada pengadaan Sistem Informasi Data Keluarga yaitu penyediaan perangkat Infrastruktur Teknologi Informasi di semua Balai Penyuluhan KB, sehingga dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana menjadi tepat sasaran pada tingkat kecamatan untuk program sector lainnya yang saling terintegrasi dan bersinergi.

b. Adanya bantuan DAK baik fisik maupun non fisik yang mendukung kegiatan program KB.

c. Setiap desa mempunyai PPKBD dan SUB PPKBD yang dapat menjadi kepanjangan tangan para Penyuluh KB.

5. Isu - Isu Penting

- ✓ Belum tercapainya Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
- ✓ Masih Fluktuatifnya Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
- ✓ Belum tercapainya Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
- ✓ Belum tercapainya Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.
- ✓ Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (Terkait dengan Peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan derajad Kesehatan; dan peningkatan kesejahteraan masyarakat).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
						6,680,000,000						8,617,714,748	
	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak					1,280,000,000						1,912,671,486	
1	**Program: Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Kab. Solok selatan**	**Indeks Pemberdayaan Gender**	**58.5**	**Indeks**	**500,000,000**	**Program: Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Kab. Solok selatan**	**Indeks Pemberdayaan Gender**	**58.5**	**Indeks**	**685,275,300**	
2	**Keg: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Solok selatan**	**Persentase OPD Responsif Gender**	**90**	**%**	**55,000,000**	**Keg: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Solok selatan**	**Persentase OPD Responsif Gender**	**90**	**%**	**14,373,000**	
3	Sub Keg: Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Kab. Solok selatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten Kota	10	Kali	30,000,000	Sub Keg: Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Kab. Solok selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender(PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	**10**	Dokumen	14,373,000	

4	Sub Keg: Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Solok selatan	Jumlah Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	5	kali	25,000,000	Sub Keg: Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Solok selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	**0**	Perangkat Daerah	-	
5	**Keg: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Solok selatan**	**jumlah lembaga yang difasilitasi**	**3**	**lembaga**	**445,000,000**	**Keg: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Solok selatan**	**jumlah lembaga yang difasilitasi**	**3**	**lembaga**	**670,902,300**	
6	Sub Keg: Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Kab. Solok selatan	Jumlah lembaga yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya	3	lembaga	445,000,000	Sub Keg: Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Kab. Solok selatan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	**200**	Orang	670,902,300	
7	**Program: Perlindungan Perempuan**	**Kab. Solok selatan**	**Rasio KDRT (per 1000 penduduk)**	**0.009**	**Rasio**	**100,000,000**	**Program: Perlindungan Perempuan**	**Kab. Solok selatan**	**Rasio KDRT (per 1000 penduduk)**	**0.009**	**Rasio**	**40,850,500**	
8	**Keg: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Solok selatan**	**persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani**	**100 %**	**%**	**100,000,000**	**Keg: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Solok selatan**	**persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani**	**1**	**%**	**40,850,500**	

9	Sub Keg: Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Kab. Solok selatan	jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten kota	5	Kali	100,000,000	Sub Keg: Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Kab. Solok selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Perangkat Daerah	40,850,500	
10	**Program: Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Kab. Solok selatan**	**Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sesuai standar**	**50**	**%**	**550,000,000**	**Program: Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Kab. Solok selatan**	**Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sesuai standar**	**50**	**%**	**961,021,500**	
11	**Keg: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Solok selatan**	**persentase peningkatan kualitas keluarga**	**100**	**%**	**550,000,000**	**Keg: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Solok selatan**	**persentase peningkatan kualitas keluarga**	**100**	**%**	**961,021,500**	
12	Sub Keg: Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kab/kota	Kab. Solok selatan	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten	5	kali	25,000,000	Sub Keg: Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kab/kota	Kab. Solok selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) danPerlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Perangkat Daerah	69,021,500	

13	Sub Keg; pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kab/kota	Kab. Solok selatan	Jumlah Pelaksanaan KIE Kesetaraan Gender	3	kali	25,000,000	Sub Keg; pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kab/kota	Kab. Solok selatan	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	**3**	Dokumen	102,000,000	
14	pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kab/kota	Kab. Solok selatan	jumlah pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten	12	Kali	500,000,000	pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kab/kota	Kab. Solok selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	**12**	Dokumen	790,000,000	
15	**Program: Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak**	**Kab. Solok selatan**	**Persentase OPD yang responsif Gender**	**90**	**%**	**40,000,000**	**Program: Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak**	**Kab. Solok selatan**	**Persentase OPD yang responsif Gender**	**90**	**%**	-	
16	**Keg: Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Solok selatan**	**persentase ketersediaan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten**	**100**	**%**	**40,000,000**	**Keg: Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Solok selatan**	**persentase ketersediaan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten**	**100**	**%**	-	
17	Sub Keg: penyediaan data gender dan anak di kewenangan kab/kota	Kab. Solok selatan	jumlah data gender dan anak yang tersedia	1	Dokumen	40,000,000	Sub Keg: penyediaan data gender dan anak di kewenangan kab/kota	Kab. Solok selatan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	**0**	Dokumen	-	

18	**Program: Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Kab. Solok selatan**	**Status kabupaten layak anak**	**sudah**	**status**	**50,000,000**	**Program: Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Kab. Solok selatan**	**Status kabupaten layak anak**	**sudah**	**status**	**31,396,186**	
19	**Keg: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Solok selatan**	**Status kabupaten layak anak**	**sudah**	**status**	**50,000,000**	**Keg: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Solok selatan**	**Status kabupaten layak anak**	**sudah**	**status**	**31,396,186**	
20	Sub Keg: Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok selatan	Jumlah Kegiatan KLA (Kabupaten Layak Anak yang terselenggara)	1	Kegiatan	50,000,000	Sub Keg: Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**1**	Dokumen	31,396,186	
21	**Program: Perlindungan Khusus Anak**	**Kab. Solok selatan**	**Persentase pengaduan tindakan kekerasan anak yang ditangani**	**100**	**%**	**40,000,000**	**Program: Perlindungan Khusus Anak**	**Kab. Solok selatan**	**Persentase pengaduan tindakan kekerasan anak yang ditangani**	**100**	**%**	**194,128,000**	
22	**Keg: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Solok selatan**	**persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani**	**100**	**%**	**40,000,000**	**Keg: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Solok selatan**	**persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani**	**100**	**%**	-	
23	Sub Keg: Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	Kab. Solok selatan	Jumlah Kegiatan Forum anak yang terselenggara	1	Kegiatan	40,000,000	Sub Keg: Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	Kab. Solok selatan	Jumlah Kegiatan Forum anak yang terselenggara	**0**	Kegiatan	-	

24	**Keg: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Solok selatan**	**persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani**	**0**	**%**	-	**Keg: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Solok selatan**	**persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani**	**100**	**%**	**194,128,000**	
25	Sub Keg: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok selatan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	0	Orang	-	Sub Keg: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok selatan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	**60**	Orang	194,128,000	
26	**Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					**5,400,000,000**	**Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					**6,705,043,262**	
27	**Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten dan kota**	Kab. Solok selatan	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100**	**%**	**3,000,000,000**	**Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten dan kota**	Kab. Solok selatan	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100**	**%**	**3,608,401,262**	
28	**Keg: Administrasi keuangan perangkat daerah**	Kab. Solok selatan	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**2,480,240,000**	**Keg: Administrasi keuangan perangkat daerah**	Kab. Solok selatan	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**2,788,798,612**	
29	Sub Keg: Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Solok selatan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26	Orang/Bulan	2,373,240,000	Sub Keg: Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Solok selatan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	**26**	Orang/Bulan	2,716,918,612	
30	Sub Keg: Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Solok selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	107,000,000	Sub Keg: Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Solok selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**12**	Dokumen	71,880,000	

31	**Keg: Administrasi umum perangkat daerah**	Kab. Solok selatan	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**261,810,000**	**Keg: Administrasi umum perangkat daerah**	Kab. Solok selatan	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**270,015,600**	
32	Sub Keg: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Solok selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	4	Paket	8,850,000	Sub Keg: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Solok selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	**4**	Paket	5,988,800	
33	Sub Keg: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Solok selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	23,125,000	Sub Keg: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Solok selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**4**	Paket	27,266,300	
34	Sub Keg: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Solok selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	6,435,000	Sub Keg: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Solok selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**4**	Paket	5,982,500	
35	Sub Keg: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Solok selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	15,000,000	Sub Keg: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Solok selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	**4**	Paket	22,443,000	
36	Sub Keg: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Solok selatan	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	8,400,000	Sub Keg: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Solok selatan	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**4**	Laporan	4,995,000	
37	Sub Keg: Penyediaan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Solok selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	200,000,000	Sub Keg: Penyediaan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Solok selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**4**	Laporan	203,340,000	

38	**Keg; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Solok selatan	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**100**	**%**	**30,950,000**	**Keg; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Solok selatan	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**100**	**%**	**20,587,600**	
39	Sub Keg: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Solok selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang disediakan	4	Unit	30,950,000	Sub Keg: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Solok selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang disediakan	**4**	Unit	20,587,600	
40	**Keg; Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kab. Solok selatan	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**100**	**%**	**27,000,000**	**Keg; Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kab. Solok selatan	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**100**	**%**	**291,199,500**	
41	Sub Keg: Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kab. Solok selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	2,000,000	Sub Keg: Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kab. Solok selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**4**	Laporan	5,000,000	
42	Sub Keg: Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Solok selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	15,000,000	Sub Keg: Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Solok selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	**12**	Laporan	13,999,500	
43	Sub Keg: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Solok selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Laporan	10,000,000	Sub Keg: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Solok selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	**4**	Laporan	20,200,000	
44	Sub Keg: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Solok selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	-	Sub Keg: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Solok selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**12**	Laporan	252,000,000	

45	**Keg: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kab. Solok selatan	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100**	**%**	**200,000,000**	**Keg: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kab. Solok selatan	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100**	**%**	**237,799,950**	
46	Sub Keg: penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Solok selatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	43	Unit	130,000,000	Sub Keg: penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Solok selatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	**43**	Unit	216,881,250	
47	Sub Keg: Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Solok selatan	Jumlah gedung kantor/bangunan yang dipelihara	1 unit	unit	70,000,000	Sub Keg: Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Solok selatan	Jumlah gedung kantor/bangunan yang dipelihara	**1 unit**	unit	20,918,700	
48	**Program: Pengendalian Penduduk**	**Kab. Solok selatan**	**Laju Pertumbuhan penduduk**	**0.45**	**%**	**50,000,000**	**Program: Pengendalian Penduduk**	**Kab. Solok selatan**	**Laju Pertumbuhan penduduk**	**0.3**	**%**	**102,060,000**	
49	**Keg: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Solok selatan**	**persentase perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah yang dipetakan**	**100**	**%**	**50,000,000**	**Keg: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Solok selatan**	**persentase perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah yang dipetakan**	**100**	**%**	**102,060,000**	
50	Sub Keg: Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Solok selatan	Jumlah Laporan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang dibuat	12	Laporan	50,000,000	Sub Keg: Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Solok selatan	Jumlah Laporan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang dibuat	**12**	Laporan	102,060,000	
51	**Program: Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Kab. Solok selatan**	**Cakupan Akseptor KB aktif**	**82.4**	**%**	**2,200,000,000**	**Program: Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Kab. Solok selatan**	**Cakupan Akseptor KB aktif**	**86.5**	**%**	**2,358,282,000**	

52	**Keg: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Kab. Solok selatan**	**persentase pelaksanaan advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB**	**100**	**%**	**593,601,000**	**Keg: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Kab. Solok selatan**	**persentase pelaksanaan advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB**	**100**	**%**	**1,657,234,400**	
53	Sub Keg: Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab. Solok selatan	Jumlah sarana dan distribusi sarana KIE Program KKBPK yang tersedia dan didistribusikan	**1**	Unit	13,000,000	Sub Keg: Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab. Solok selatan	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	**0**	Unit	-	
54	Sub Keg: Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Solok selatan	Jumlah balai penyuluhan KKBPK yang tersedia pengelolaan operasionalnya	**7**	**unit**	289,500,000	Sub Keg: Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Solok selatan	**Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)**	**7**	Laporan	872,173,400	

55	Sub Keg: Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Solok selatan	jumlah pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK MELALUI rakorcam, Rakordes dan Minilok di setiap kecamatan	7	Laporan	151,086,000	Sub Keg: Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Solok selatan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	**7**	Laporan	685,071,000	
56	Sub Keg: Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa Cetak dan Elektronik serta media luar ruang	Kab. Solok selatan	jumlah kegiatan promosi KIE Program KKBPK	4	Dokumen	140,015,000	Sub Keg: Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa Cetak dan Elektronik serta media luar ruang	Kab. Solok selatan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	**4**	Dokumen	99,990,000	
57	**Keg: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Kab. Solok selatan**	**persentase tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang ditingkatkan kapasitasnya**	**100**	**%**	**287,200,000**	**Keg: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Kab. Solok selatan**	**persentase tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang ditingkatkan kapasitasnya**	**100**	**%**	**169,051,600**	

58	Sub Keg: Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Solok selatan	jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang digerakkan	385	Orang	287,200,000	Sub Keg: Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Solok selatan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP	**385**	Orang	169,051,600	
59	**Keg: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Solok selatan**	**persentase ketersediaan obat dan alat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten**	**100**	**%**	**917,373,000**	**Keg: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Solok selatan**	**persentase ketersediaan obat dan alat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten**	**100**	**%**	**306,182,000**	
60	Sub Keg: Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metoda Kontrasepsi angka Panjang (MKJP)	Kab. Solok selatan	jumlah peserta KB yang menggunakan MKJP	9,000	Orang	168,568,000	Sub Keg: Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metoda Kontrasepsi angka Panjang (MKJP)	Kab. Solok selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	**9000**	Orang	306,182,000	
61	Sub Keg: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Solok selatan	Jumlah kegiatan sosialisasi pembinaan kader yang dilakukan	7	Kegiatan	15,000,000	Sub Keg: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Solok selatan	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	**0**	Orang	-	
62	Sub Keg: Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Solok selatan	jumlah pelayanaan KB Bergerak	55	Kegiatan	733,805,000	Sub Keg: Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Solok selatan	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	**0**	Laporan	-	

63	**Keg: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Kab. Solok selatan**	**persentase peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**	**100**	**%**	**401,826,000**	**Keg: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Kab. Solok selatan**	**persentase peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**	**100**	**%**	**225,814,000**	
64	Sub Keg: Penguatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Kab. Solok selatan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3	organisasi	13,500,000	Sub Keg: Penguatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Kab. Solok selatan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**0**	organisasi	-	
65	Sub Keg: Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPKdi Kampung KB	Kab. Solok selatan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	28	Kampung	388,326,000	Sub Keg: Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Solok selatan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	**28**	Kampung	225,814,000	
66	**Program: Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Kab. Solok selatan**	**Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera**	**39.60**	**%**	**150,000,000**	**Program: Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Kab. Solok selatan**	**Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera**	**39.6**	**%**	**636,300,000**	
67	**Keg: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kab. Solok selatan**	**Jumlah kegiatan pemilihan duta genre yang diikuti**	**2**	**Laporan**	**130,000,000**	**Keg: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kab. Solok selatan**	**Jumlah kegiatan pemilihan duta genre yang diikuti**	**2**	**Laporan**	-	

68	Sub Keg: Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Solok selatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	0	Laporan	-	Sub Keg: Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Solok selatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	**0**	Laporan	-	
69	Sub Keg: Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia(BKL), Unit Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga)		Jumlah kegiatan pemilihan duta genre yang diikuti	2	Kegiatan	130,000,000	Sub Keg: Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia(BKL), Unit Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga)		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	**0**	Kelompok	-	

70	**Keg: Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kab. Solok selatan**	**jumlah peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**7**	**organisasi**	**20,000,000**	**Keg: Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kab. Solok selatan**	**jumlah peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**7**	**organisasi**	**636,300,000**	
71	Sub Keg: Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)	Kab. Solok selatan	jumlah sosialisasi / pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga terhadap organisasi masyarakat yang dilakukan	7	Laporan	20,000,000	Sub Keg: Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)	Kab. Solok selatan	Jumlah Laporan Hasil Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	**7**	Laporan	636,300,000	

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas terdapat perbedaan yang antara rancangan awal RKPD dengan analisa hasil kebutuhan. Rancangan awal RKPD merupakan rencana kegiatan dan anggaran berdasarkan Rencana Strategis yang disusun pada awal periode Renstra. Sedangkan analisa kebutuhan adalah rencana kegiatan dan anggaran terkini yang telah disesuaikan dengan hasil asistensi bersama Bappeda.

Perbedaan antara rancangan awal dan hasil analisa kebutuhan diantaranya disebabkan oleh adanya Dukungan anggaran DAK Fisik dan Non Fisik yang sebelumnya belum teridentifikasi pada rancangan awal. Seperti pada Sub Kegiatan Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS), Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metoda Kontrasepsi angka Panjang (MKJP) dan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang mendapat dukungan DAK Non Fisik BOKB, sehingga hasil kebutuhan lebiih besar dari rancangan awal.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja Dinas P2KB,PP&PA Kabupaten Solok selatan didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Untuk Tahun 2025 tidak ada usulan program kegiatan dari masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DP2KB,PP&PA, seperti tergambar pada tabel. 2.4 dibawah ini:

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Perangka : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
t Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan

Nihil

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan nasional yang terkait langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi DP2KB,PP&PA Tahun 2025 adalah Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas.

Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut DP2KB,PP&PA memiliki program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM dan Kesetaraan Gender. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, yang didalamnya terdapat pembinan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta upaya-upaya penurunan stunting, dimana Penurunan Stunting juga menjadi perhatian utama Presiden.

Program Pembinaan Keluarga Berencana guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Serta program Pengarusutamaan gender yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Selaras dengan arah kebijakan dan strategi BKKBN yang tertuang dalam Rencana Strategis BKKBN yang secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2025, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2025.

Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

a. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:

a) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
b) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
c) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

d) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.
e) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
f) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
g) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.

b. menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:

a) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
b) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
c) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
d) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.

c. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:

a) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
b) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas P2KB,PP&PA yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas P2KB,PP&PA dengan target kinerja untuk tahun 2025.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
3. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari korban kekerasan.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target 2025
1	*2*	*3*	*4*	*7*
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Prevelansi stunting	13.30
		Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	59.00
2	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender	97.70
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	57.00
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari korban kekerasan.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	4.00

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 mencakup 2 Urusan. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 3 Program, 5 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 6 Program, 8 kegiatan dan 11 Sub Kegiatan. Seperti terlihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	**Program: Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** Sub Kegiatan: Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota ; **Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** Sub Kegiatan: Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota.
2	**Program: Perlindungan Perempuan**	**Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** Sub Kegiatan: Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota.
3	**Program: Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** Sub Kegiatan: Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kab/kota ; pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kab/kota ; pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kab/kota.
4	**Program: Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak**	**Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** Sub Kegiatan:

		penyediaan data gender dan anak di kewenangan kab/kota.
5	**Program: Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** Sub Kegiatan: Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
6	**Program: Perlindungan Khusus Anak**	**Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana		
7	**Program: Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** Sub Kegiatan: Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metoda Kontrasepsi angka Panjang (MKJP) ; Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ; Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak ; **Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal** Sub Kegiatan: Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK ; Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK ;
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) ; Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa Cetak dan Elektronik serta media luar ruang .

		Kegiatan : **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** Sub Kegiatan: Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). **Kegiatan :** **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** Sub Kegiatan: Penguatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB ; Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPKdi Kampung KB.
8	**Program: Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Kegiatan :** **Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** Sub Kegiatan: Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS). **Kegiatan :** **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** Sub Kegiatan: Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga).
9	**Program: penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten dan kota**	**Kegiatan :** **Administrasi keuangan perangkat daerah** Sub Kegiatan: Penyediaan gaji dan tunjangan ASN ; Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN. **Kegiatan :** **Administrasi umum perangkat daerah** Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor ;

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ; Fasilitasi Kunjungan Tamu ; Penyediaan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ; **Kegiatan :** **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. **Kegiatan :** **Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat menyurat ; Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. **Kegiatan :** **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** Sub Kegiatan: penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan ; Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 secara detail dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

TABEL 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKAB. SOLOK SELATAN
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						**8.617.714.748,00**							**7.055.000.000,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.617.714.748,00**							**7.055.000.000,00**	
	2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**1.912.671.486,00**							**1.515.000.000,00**	
1	**2**	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Indeks pemberdayaan gender**	-			**58,5 indeks**	**685.275.300,00**						-	**600.000.000,00**	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD Responsif Gender	-			60 %	14.373.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah	-	55.000.000,00	
	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	14.373.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota														
							Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				33 Orang	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga yang difasilitasi	-			3 lembaga	670.902.300,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah	-	545.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				200 Orang	670.902.300,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		545.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**2**	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio KDRT (per 1000 penduduk) Rasio KDRT (per 1000 penduduk)**	-			**0,009 per 1000 penduduk 0,009 Rasio**	**40.850.500,00**						-	**125.000.000,00**	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	-			100 %	40.850.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Penduduk Perempuan	-	125.000.000,00	
	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				33 Perangkat Daerah	40.850.500,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Penduduk Perempuan		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	**2**	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar**	-			**50 persen**	**961.021.500,00**						-	**650.000.000,00**	
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan kualitas keluarga	-			100 %	961.021.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Kelompok Masyarakat	-	650.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				33 Perangkat Daerah	69.021.500,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Kelompok Masyarakat		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	102.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Kelompok Masyarakat		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	790.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Kelompok Masyarakat		600.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	2	08	05			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase OPD yang responsif gender**	-			**90 persen**	**0,00**						-	**40.000.000,00**	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten	-			100 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah	-	40.000.000,00	
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	**2**	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Status kabupaten layak anak**	-			**sudah status**	**31.396.186,00**						-	**50.000.000,00**	
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Status kabupaten layak anak	-			100 % sudah status status	31.396.186,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	50.000.000,00	
	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	31.396.186,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6	**2**	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase pengaduan tindakan kekerasan anak yang ditangani**	-			**100 persen**	**194.128.000,00**						-	**50.000.000,00**	
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	194.128.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Anak Korban Kekerasan	-	50.000.000,00	
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				60 Orang	194.128.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN [illegible]	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Anak Korban Kekerasan		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**6.705.043.262,00**							**5.540.000.000,00**	
7	**2**	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan**	-			**100 persen 100 Persen**	**3.608.401.262,00**						-	**3.090.000.000,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah	-			100 % 100 Persen	2.788.798.612,00			-	-	Organisasi Perangkat Daerah	-	2.478.732.000,00	
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	2.716.918.612,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Organisasi Perangkat Daerah		2.371.732.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	71.880.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Organisasi Perangkat Daerah		107.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum	-			100 % 100 Persen	270.015.600,00			-	-	Organisasi Perangkat Daerah	-	318.318.000,00	
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.988.800,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Organisasi Perangkat Daerah		8.850.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	27.266.300,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		28.125.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	5.982.500,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		10.943.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	22.443.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		18.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4.995.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		8.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	203.340.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		244.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	-			100 Persen	20.587.600,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah	-	30.950.000,00	
	2	14	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	20.587.600,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		30.950.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	-			100 % 100 Persen	291.199.500,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah	-	47.000.000,00	
	2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		2.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13.999.500,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	22.443.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		18.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4.995.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		8.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	203.340.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		244.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	-			100 Persen	20.587.600,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah	-	30.950.000,00	
	2	14	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	20.587.600,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		30.950.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	-			100 % 100 Persen	291.199.500,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah	-	47.000.000,00	
	2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		2.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13.999.500,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	20.200.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	252.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara Persentase barang milik daerah yang terpelihara	-			100 % 100 Persen	237.799.950,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah	-	215.000.000,00	
	2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				43 Unit	216.881.250,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		145.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.918.700,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8	**2**	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Laju pertumbuhan penduduk Laju pertumbuhan penduduk**	-			**0,45 persen 0,45 Persen**	**102.060.000,00**						-	**50.000.000,00**	
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah yang dipetakan persentase perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah yang	-			100 % 100 Persen	102.060.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Data Kependudukan Kabupaten Solok Selatan	-	50.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	102.060.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Data Kependudukan Kabupaten Solok Selatan		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9	**2**	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Cakupan akseptor KB aktif Cakupan akseptor KB aktif**	-			**82,75 persen 82,75 Persen**	**2.358.282.000,00**						-	**2.105.500.200,00**	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	persentase pelaksanaan advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB persentase pelaksanaan advokasi, KIE Pengendalian	-			100 Persen 82,75 %	1.657.234.400,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Kelompok Masyarakat	-	593.601.000,00	
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana														
							Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Unit	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Kelompok Masyarakat		13.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	872.173.400,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-KELUARGA BERENCANA, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Kelompok Masyarakat		289.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				7 Laporan	685.071.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Kelompok Masyarakat		151.086.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				4 Dokumen	99.990.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Kelompok Masyarakat		140.015.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	persentase tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang ditingkatkan kapasitasnya persentase tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang ditingkatkan	-			100 % 100 Persen	169.051.600,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Kader PPKBD dan Sub PPKBD	-	287.200.000,00	
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				385 Orang	169.051.600,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Kader PPKBD dan Sub PPKBD		287.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan obat dan alat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten persentase ketersediaan obat dan alat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten	-			100 % 100 Persen	306.182.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Fasilitas Kesehatan Penyedia Layanan KB	-	822.873.200,00	
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1200 Orang	306.182.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Fasilitas Kesehatan Penyedia Layanan KB		168.568.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	001C	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi														
							Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				385 Orang	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	**Meningkatkan kualitas** Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Fasilitas Kesehatan Penyedia Layanan KB		220.500.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														
							Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				55 Laporan	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Fasilitas Kesehatan Penyedia Layanan KB		433.805.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	persentase peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB persentase peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan	-			100 Persen 60 %	225.814.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Kelompok Masyarakat BKB,BKR, BKL,PIK R	-	401.826.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB															
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan				3 Organisasi	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Kelompok Masyarakat BKB,BKR, BKL,PIK R		113.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04	0005	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas															
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				18 Kampung	225.814.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Kelompok Masyarakat BKB,BKR, BKL,PIK R		288.326.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	**2**	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Persentase keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera**	-			**39,60 persen 39,6 Persen**	**636.300.000,00**						-	**294.499.800,00**	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan pemilihan duta genre yang diikuti Persentase keluarga yang dibina	-			2 Kegiatan 100 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Kelompok Masyarakat BKB,BKR, BKL,PIK R	-	274.499.800,00	
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)															
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				2 Laporan	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan ketahanan sosial dan budaya	Kelompok Masyarakat BKB,BKR, BKL,PIK R		144.499.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi														
							Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				7 Kelompok	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kelompok Masyarakat BKB,BKR, BKL,PIK R		130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga jumlah peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan	-			7 organisasi 7 Organisasi 7 Organisasi	636.300.000,00			-	-	Kelompok Masyarakat BKB,BKR, BKL,PIK R	-	20.000.000,00	
	2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
							Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				7 Laporan	636.300.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Kelompok Masyarakat BKB,BKR, BKL,PIK R		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
										J U M L A H	**8.617.714.748,00**							**7.055.000.000,00**	

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sehingga terdapat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah, dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan dalam bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan.

Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada program dan kegiatan dalam Renstra serta memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Padang Aro, Juli 2024

Kepala Dinas

dr. ERAWATI

NIP. 197805052008022002

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji Dan Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena Atas Rahmat Dan Hidayahnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan(Disperkimlh-hub) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025dapat Awal dengan Baik. Kami Mengucapkan Terimakasih Kepada Semua Pihak yang Telah Memberikan Kontribusi dalam Penyusunanan ini.

Renja Disperkimhub Tahun 2025 Merupakan Dokumen Perencanaan DisperkimlhhubUntuk Periode 1 (satu) Tahun Sebagai Penjabaran dari Rencana Strategis Disperkimlhhubtahun 2021-2026 dan Juga Dijadikan Sebagai Pedoman dalam Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 di DisperkimlhhubKabupaten Solok Selatan. Dokumen Ini Memberikan Gambaran Tentang Program dan Kegiatan yang Dikerjakan pada Tahun 2025

Kami Berharap Dokumen Renja Ini Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai.

Dalam penyusunan Renja ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renja Dinas menuju Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang responsif dan aspiratif

Solok Selatan, 2024

Plt, Kepala

Mimi Ariesma Putri, S.H

NIP. 19770424 201101 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 9

1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 12

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,Lingkungan Hidup danPerhubungan ... 12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 37

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 38

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 41

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 54

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 56

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 56

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 56

3.3. Program dan Kegiatan 58

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 60

BAB V PENUTUP 73

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 13
Tabel 2. 2 Pencapaian Target Kinerja dan Program Sesuai Perjanjian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 15
Tabel 2. 3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup .. 17
Tabel 2. 4 Pencapaian Target Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 20
Tabel 2. 5 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan 22
Tabel 2. 6 Pencapaian Target Kinerja Urusan Perhubungan 23
Tabel 2. 7 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 24
Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 37
Tabel 2. 9 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Solok Selatan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Perhubungan 42
Tabel 2. 10 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman,Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan 54

Tabel 4. 1 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman,Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan 62

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana kerja yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun. Rencana Awal Renja Perangkat Daerah disusun guna mengoperasionalkan Renstra-Perangkat Daerah tahun rencana yang dimaksud. Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD ini merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan sehingga semua rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan terutama dibidang Infrastruktur Kabupaten Solok Selatan untuk masa yang akan datang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan dan Rencana Kinerja Tahunan ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan serta berusaha untuk tetap fokus pada pencapaian target Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Linkungan Hidup dan Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatanyang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

Proses penyusunan Rencana Renja Perangkat Daerah, Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra–

Perangkat Daerah) dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah
   Anggota tim adalah pejabat dan staf yang benar-benar siap dalam hal waktu, dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja Perangkat Daerah.
b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
   Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.
c. Penyusunan Agenda Kerja
   Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja sampai dengan penetapan Renja Perangkat Daerah
d. Pengumpulan Data dan Informasi
   Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut :
   1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan analisis
   2. Mengumpulkan data/informasidari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
   3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Rencana Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam

Penyusunan Renja Perangkat Daerah agar terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan Perangkat Daerah dengan rencana tahunan propinsi dan nasional, maka dalam menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerahharus berpedoman juga kepada arah kebijakan pembangunan Propinsi dan Nasional sehingga akan memudahkan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Solok Selatan.

Bahwa proses perencanaan daerah dimulai dengan penyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun. Untuk penjabaran teknis RPJMD, disusunlah Renstra SKPD sebagai penentu arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan yang juga untuk masa waktu 5 tahunan. Untuk perencanaan tahunan daerah disusunlah RKPD sebagai dokumen yang memuat prioritas program dan kegiatan. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.

Berpedoman pada Renstra perangkat daerah dan RKPD, maka setiap Perangkat Daerah akan menyusun rencana kerja tahunan berupa Renja untuk pencapaian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Setelah finalisasi Renja, akan disusun KUA dan PPAS Perangkat Daerah yang berisi uraian program dan kegiatan, sasaran, indikator sasaran yang ingin dicapai serta besaran pagu dana per kegiatan. Berdasarkan PPAS akan disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berisi uraian belanja per kegiatan yang nantinya menjadi dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD).

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, Bidang lingkungan hidup dan Bidang Perhubungan
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, Bidang lingkungan hidup dan Bidang Perhubungan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Program pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat daerah selama lima tahun telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan PermukimanLingkungan Hidup dan Perhubungan Solok Selatan tahun 2021 s/d 2026. Rencana kinerja tahunan disusun dengan didasarkan pada isu strategis yang tengah dihadapi pada tahun yang bersangkutan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar antara isu strategis di setiap perubahan tahun, karena pada intinya arah kebijakan pelaksanaan proses pembangunan selalu mengedepankan aspek-aspek lingkungan yang terus berkembang dan akan membawa pengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Terkait dengan itu Rencana Kerja Tahun 2025 berisi sasaran, arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Solok Selatan dalam rangka menghadapi dan menjawab isu strategis tersebut melalui pelaksanaan program dan kegiatannya selama satu tahun yakni terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Masing-masing kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau target sesuai dengan kebijakan yang ditempuh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Solok Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi diantaranya

a. Perumusan kebijakan daerah terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
b. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
c. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
d. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
e. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah;

f. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
g. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
h. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan
i. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan
j. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan
k. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten
l. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker
m. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten
n. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten
o. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
p. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan
q. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai
r. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan
s. Pelaksanaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan
t. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi;
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perumahan;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kawasan Permukiman;

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,Lingkungan Hidup danPerhubungan

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023pada Dinas Perumahan Kawasan PermukimanLingkungan Hidup dan perhubungan adalahRp.28.829.955.806,00 dengan Realisasi Rp.27.033.096.231,00

2.1.1.Capaian Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada tahun 2023 menyusun Perjanjian Kinerja berdasarkan DPA yang telah diterbitkan dengan indikator dan target urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagai berikut :

- Persentase Rumah Bagi Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota target 100%
- Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani target 100%
- Persentase Rumah Layak Huni target 91,75%
- Persentase Rumah yang Mendapatkan Akses PSU 1.25%

Untuk mencapai Perjanjian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan perhubungan memiliki anggaran sebesar Rp.25.229.701.629,00terdiri atas 5 program, 10 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan Realisasi Rp.23.747.890.221,00 atau sebesar 94%. Target perjanjian kinerja tahun 2023 terealisasi dengan rincian realissi perjanjian kinerja sebagai berikut :

- Persentase Rumah Bagi Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/KotaTarget 100% Realisasi 100%
- Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani target 100% Realisasi 0%
- Persentase Rumah Layak Huni target 91,75% Realisasi 91.50%
- Persentase Rumah yang Mendapatkan Akses PSU 1.25% Realisasi 1.25%

2. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan

Perjanjian kinerja tahun 2023 urusan perumahan dan kawasan permukiman tercapai didukung oleh pencapaian kinerja seluruh program kegiatan, Adapun capaian kinerja keluaran masing masing kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Program/ Kegiatan	Target	Realisasi
Program Pengembangan Perumahan ▪ Persentase ketersediaan Rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah Kabupaten/kota	100 %	100 %
Kegiatan pendataan penyediaan rehabilitasi korban bencana atau relokasi program kabupaten kota ▪ Jumlah Dokumen Penyediaan rehabilitasi rumah korban bencana atau rehabilitasi kabuoaten/kota	3 Dokumen	1 Dokumen
Sub Kegiatan Pendataan dan Veifikasi Penerima rumah bagi korban bencan alam atau relokasi kabuppaten kota ▪ Jumlah rumah korban bencana atau relokasi pemerintah yg di data	3 unit	3 unit
Kegiatan : Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program kabupaten kota ▪ Jumlah orang atau sukarelawan yang mengikuti sosialisasi Standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota	150 orang	0 orang
Sub Kegiatn sosialisasi standar teknis penyediaan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana ▪ Jumlah Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana yang mendapatkan sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	150 orang	0 orang
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota ▪ Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 unit	3 unit

Urusan Program/ Kegiatan	Target	Realisasi
Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi korban bencana ▪ Jumlah Rumah yg di rehabilitsi	3 unit	3 unit
Kegiatan Pendistribusian dan serah terima rumah agi korban bencana atau relokasi kabupaten kota ▪ Persentase rumah korban Bencana Alam atau relokasi yang didistribusikan	100 %	100 %
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian rumah konam bencana kabupaten/kota atau relokasi kabupaten/kota ▪ Jumlah rumah yang dibangun	3 Unit	3 Unit
Program Kawasan Permukiman ▪ Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha Kab/Kota yang ditangani	100 %	0 %
Kegiatan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman ▪ Jumlah Regulasi yang diterbitkan	1 regulasi	1 regulasi
Sub Kegiatan Penyusunan atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pemngembangan kawasan permukian dan pemukiman kumuh ▪ Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh ▪ Persentase Rumah Layak Huni	91.75 %	91.50 %
Kegiatan Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten kota ▪ Berkurangnya jumlah unit RTLH	40 unit	40 unit
Sub Kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan lua 10(sepuluh) ha ▪ jumlah rumah yang diperbaiki	40 unit	40 unit
ProgramPeningkatan prasarna dan saran Utilitas umum (PSU) ▪ Persentase Rumah yang mendapatkan akses PSU	1.25 %	1.25 %
KegiatanUrusan Penyelenggaraan PSU Perumahan ▪ Jumlah rumah yang sudah dilengkapi PSU	500 unit	545 unit
Sub Kegiatan Penyediaan Prasaran sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian ▪ Taman Kabupaten yang dibangun ▪ Taman Kabupaten yang dipelihara ▪ Jumlah LPJU yang dimeterisasi	5 lokasi 5 lokasi 100 unit	3 lokasi 5 lokasi 79 unit

Urusan Program/ Kegiatan	Target	Realisasi
▪ Jumlah penyediaan LPJU ▪ Jumlah LPJU yang dipelihara ▪ Tegihan Rek Listrik LPJU yang dibayar ▪ panjang Drainase lingkung yang dibangun ▪ Panjang Jalan Lingkung yang dibangun	50 unit 100 unit 600 kwh 0 meter 3000M	50 unit 200 unit 600 kwh 0 meter 5556 M

3. Analisis kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja dan Program sesuai Perjanjian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dari capaian program dan kegiatan sebagaimana tabel pada point 2, maka output kegiatan sebagaimana tersebut berdampak kepada pencapaian target kinerja yang diperjanjikan dengan Kepala Daerah. Gambaran pencapaian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Pencapaian Target Kinerja dan Program Sesuai Perjanjian Kinerja
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Perjanjian kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian kinerja	Program/kegiatan yang mendukung
1	Persentase Rumah Bagi Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	100	100	100	Program Pengembangan Perumahan ▪ Kegiatan pendataan penyediaan rehabilitasi korban bencana atau relokasi program kabupaten kota ▪ Kegiatan Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program kabupaten kota ▪ Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota ▪ Kegiatan Pendistribusian dan serah terima rumahb agi korban bencana atau relokasi kabupaten kota
2.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani	100%	0%	0%	ProgramKawasan Permukiman ▪ Kegiatan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman
3.	Persentase Rumah Layak Huni	91.75%	91.50%		Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh ▪ Kegiatan Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten kota

No.	Perjanjian kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian kinerja	Program/kegiatan yang mendukung
4.	Persentase Rumah Yang Mendapatkan Akses PSU	1,25%	1.25%		ProgramPeningkatan prasarna dan saran Utilitas umum (PSU) ▪ Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

b) Urusan Lingkungan Hidup

1. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sesuai Target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan pada tahun 2023 menyusun Perjanjian Kinerja berdasarkan DPA yang telah diterbitkan dengan indikator dan target urusan bidang lingkungan hidup sebagai berikut :

- Indeks Kualitas Air (IKA) target 67,59
- Indeks Kualitas Udara (IKU) target 93,26
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) target 75,64
- Persentase Cakupan Layanan Persampahan target80%
- Persentase Pengelolaan Persampahan target 60%
- Persentase Pengurangan Sampah target 5%

Untuk mencapai Perjanjian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan perhubungan memiliki anggaran sebesar Rp.2.919.253.116,00terdiri atas 7 program, 8 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan Realisasi Rp.2.678.205.547,00 atau sebesar 92%.

Target perjanjian kinerja tahun 2023 terealisasi dengan rincian realissi perjanjian kinerja sebagai berikut :

- Indeks Kualitas Air (IKA) target 67.59realisasi 59.60
- Indeks Kualitas Udara (IKU) target 93,26 realisasi 91.42
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) target 75,64 realisasi 71.99
- Persentase Cakupan Layanan Persampahan target 80% realisasi
- Persentase Pengelolaan Persampahan target 60% realisasi
- Persentase Pengurangan Sampah target 5% realisasi.

2. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan

Perjanjian kinerja tahun 2023 urusan Lingkungan Hidup tercapai didukung oleh pencapaian kinerja seluruh program kegiatan, Adapun capaian kinerja keluaran masing masing kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 3
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi
Program Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup ▪ Indeks kualitas Air (IKA) ▪ Indeks kualitas Udara (IKU) ▪ Indeks kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	 67.68 93.26 75.64	 59.60 91.42 71.99
Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten kota ▪ Persentase objek yang teridentivikasi pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup yang ditangani	 100%	 100%
Sub Kegiatan koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksankan Terhadap Media Tanah air Udara dan Laut ▪ Jumlah Pemantauan kualitas air ▪ Jumlah Pemantauan kualitas udara ▪ Jumlah Pemantauan kualitas tanah	 50 titik 21 titik 15 titik	 50 titik 10 titik 7 titik
▪ **Sub Kegiatan** Koordinasi sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi gas Rumah kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim ▪ Jumlah pengembangan teknologi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	 15 kelompok	 7 kelompok
Sub Kegiatan Pengelolaan laboratorium Kabupaten/Kota ▪ jumlah laboratorium yang dikelola	 1 unit	 1 unit
Kegiatan Penanggulangan pencemarandan/atau kerusakan lingkungan hidupkabupaten/kota ▪ Persentase Ketersediaan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup Pada Masyrakat ▪ Jumlah dokumen Lingkungan hidup yang dipublikasikan	 1 dokumen	 1 dokumen
Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (LB3)dan Limbah Berbahaya dan Beracun ▪ Persentase usaha dan/atau kegiatan yang		

Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi
taat terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	100%
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 ▪ Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 sesuai persyaratan administrasi dan teknis	10 kegiatan	10 kegiatan
Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 ▪ Jumlah laporan persetujuan pengumpulan limbah B3	1 laporan	1 laporan
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup **(PPLH)** ▪ Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	
Kegiatan pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota ▪ Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat implementasi PPLH	7 kegiatan	15 kegiatan
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin lingkungan dan/atau izin PPLH ▪ Jumlah rekomendasi /izin yang dikeluarkan	5 rekomendasi	4rekomendasi
PROGRAM Peingkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat • Persentase Kader Lingkungan yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	53 %	50 %
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan hidup dan lembaga kemasyrakatan Tingkat Daerah kabupaten Kota • Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 Kelompok Mayarakat	25 Kelompok Mayarakat
Sub Kegiatan Pendampingan gerakan peduli Lingkungan Hidup • jumlah organisasi msyarakat peduli lingkungan	25 Kelompok Mayarakat	25 Kelompok Mayarakat
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diterima	50 %	17 %

Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Jumlah Penghargaan LH yang diterima	12 Penghargaan	2 Penghargaan
Sub Kegiatan Pemilihan kinerja Masyrakat /lembaga masyrakat dunia Usaha / Dunia Pendidikan Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup • jumlah masyarakat,sekolah,perusahaan yang mendapatkan penghargaan	12 masyarakat/ sekolah/perus ahaan	3 masyarakat/ sekolah/perus ahaan
Program **PenangananPengaduan Lingkungan Hidup** • Persentase tindak lanjut aduan masyarakat/penegakan hukum lingkungan	100 %	100 %
Kegiatan Penyelesain Pengaduan Masyarakat dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kab/Kota • Jumlah penyelesaian pengaduan	2 tindak lanjut aduan	8 tindak lanjut aduan
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota • jumlah pengaduan masyarakat	2 aduan	8 aduan
Program Pengelolaan Persampahan • Cakupan Layanan Persampahan		
Kegiatan Pengelolaan Persampahan • Persentase timbulan sampah yang ditangani • Persentase Pengurangan Sampah	65 % 5 %	
Sub Kegiatan Pengurangan sampah dengan Melakukan Pembatasan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali • jumlah pengurangan sampah di TPS 3R • Jumlah Pengurangan Sampah di Nagari • Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	500 M3 3100M3 10 produk	500 M3 3100 M3 2 Produk
Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan Pengumpulan pengakutan pengolahan dan pemprosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten Kota • Jumlah timbulan sampah yang ditangani	16.425M3	12 123 M3
Sub Kegiatan Peningkatan peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan • kelompok peduli sampah aktif • Pelatihan Persampahan	8 Kelompok 7 kali	15 kelompok 0 Kali
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasaran Pengelolaan Persampahan Di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota • jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	5 unit	3 unit

3. Analisis kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja dan Program sesuai Perjanjian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Dari capaian program dan kegiatan sebagaimana tabel pada point 2, maka output kegiatan sebagaimana tersebut berdampak kepada pencapaian target kinerja yang diperjanjikan dengan Kepala Daerah. Gambaran pencapaian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Pencapaian Target Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No.	Perjanjian kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian kinerja	Program/kegiatan yang mendukung
1	IKA	67.68	59.60	88%	▪ Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup ▪ Kegiantan Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup ▪ Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (b3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3 ▪ Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 ▪ Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ▪ Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten ▪ Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat ▪ Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan,dan Penyuluhan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ▪ Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat ▪ Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota ▪ Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup ▪ Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyrakat terhadap PPLH
2	IKU	93,26	91.42	98%	
3	IKTL	75.64	71.99	95%	

					Kabupaten/Kota
4	Persentase Cakupan Layangan Persampahan	80%			▪ **Program Pengelolaan Persampahan** ▪ Kegiatan Pengelolaan Sampah ▪ Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali ▪ Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota ▪ Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
5	Persentase Pengelolaan Sampah	60%			
6	Persentase Pengurangan Sampah	5%			

c. Urusan Perhubungan

1. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sesuai Target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Urusan Perhubungan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada tahun 2023 menyusun Perjanjian Kinerja berdasarkan DPA yang telah diterbitkan dengan indikator dan target urusan bidang Perhubungan sebagai berikut :

- Rasio Konektifitas target 0,48%

Untuk mencapai Perjanjian Kinerja Urusan Perhubungan tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan perhubungan memiliki anggaran sebesar Rp.681.001.061,00terdiri atas 1 program, 6 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan Realisasi Rp.607.000.184,00 atau sebesar 89%.

Target perjanjian kinerja tahun 2023 terealisasi dengan rincian realissi perjanjian kinerja sebagai berikut :

- Rasio Konektifitas target 0,48% realisasi 0.48%

2. Analisis kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja dan Program sesuai Perjanjian Kinerja Urusan Perhubungan

Dari capaian program dan kegiatan sebagaimana tabel pada point b, maka output kegiatan sebagaimana tersebut berdampak kepada pencapaian

target kinerja yang diperjanjikan dengan Kepala Daerah. Gambaran pencapaian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 5
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan

Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi
Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) • Rasio konektifitas	0.48 %	0.48 %
Kegiatan Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota • Persentase jumlah perlengkapan jalan yang telah disediakan	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota • Jumlah pengadaan rambu-rambu lalu lintas di jalan kabupaten	26 unit	33 unit
Kegiatan Pengelolaan terminal Penumpang Tipe C • Jumlah terminal Tipe C yang Beroperasi	2 lokasi	1 lokasi
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal • Jumlah sarana dan prasarana terminal yang direhab	2 lokasi	1 lokasi
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor • Persentase jumlah kendaraan yang diuji	100%	48%
Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian berkala kendaraan Bermotor • Jumlah pengadaan alat uji kendaraan bermotor	4 Unit	1 Unit
Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor • Jumlah kendaraan wajib uji yang teregister	12 Unit	807 unit
Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian berkala Kendaraan Bermotor • Jumlah bukti kartu uji yang disediakan	1260 Buah	600 buah
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas Untuk jaringan Jalan Kabupaten / Kota • Persentase Kegiatan MRLL Yang Dilaksanakan	100%	100%
Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten / Kota • Jumlah dokumen WTN • Jumlah koordinasi forum lalu lintas	1 dokumen 2 kegiatan	0 dokumen 5 Kegiatan
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas pelaksanaan Kebijakan untuk jalan kab / Kota • Jumlah Pengamanan dan Pengawasan MRLL	6 Kegiatan	17 kegiatan

Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan kab / Kota • Jumlah Dokumen Andalalin yang disetujui	2 Dokumen	0 Dokumen
Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Penilaian Hasil Andalalin • Jumlah Dokumen Andalalin yang dinilai	2 Dokumen	0 Dokumen
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / Atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota • Persentase Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Angkutan Yang Dilaksanakan	100%	100%
Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan / atau barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota • Jumlah pengawasan dan penertiban angkutan umum barang dan orang	12 laporan	12 aporan

3. Analisis kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja dan Program sesuai Perjanjian Kinerja Urusan Perhubungan

Dari capaian program dan kegiatan sebagaimana tabel pada point 2, maka output kegiatan sebagaimana tersebut berdampak kepada pencapaian target kinerja yang diperjanjikan dengan Kepala Daerah. Gambaran pencapaian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Pencapaian Target Kinerja Urusan Perhubungan

No.	Perjanjian kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian kinerja	Program/kegiatan yang mendukung
1	Rasio Konektivitas	0.49	0.49	100	▪ Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) ▪ Kegiatan Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota ▪ Kegiatan Pengelolaan terminal Penumpang Tipe C ▪ Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ▪ Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas Untuk jaringan Jalan Kabupaten / Kota ▪ Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan kab / Kota ▪ Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / Atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota

Tabel 2. 7
Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100 Persen	100%	100%	100%	1 00%	100%	50%	70%
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerinntahan	100 Persen 100 Persen	95.17	100%	100%	100%	100%	50%	70%
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kinerja pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah Persetase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen 100 %	95.96	100%	100%	100%	100%	50%	70%
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	97.94	60 Orang	60 Orang	100%	78 orang	69 Orang	70%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45 Dokumen	68.65	16 Orang	16 orang	100%	16 orang	16 orang	70%
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			93.49						
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	65	20 Jenis	20 Jenis	100%	24 jenis	10 jenis	70%
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	93.70	15 Jenis	15 Jenis	100%			70%
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	99.73	40 Jenis	40 Jenis	100%	20 Jenis	7 Jenis	70%
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	56.28	10 Jenis	10 Jenis	100%	14 Jenis	6 Jenis	70%
1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan					4 Laporan	0 Laporan	0%
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	97.10	50 Kali	50 Kali	100%	60 kali	35 Kali	70%
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik Daerah yang tersedia	100 Persen		100 Persen			100%	0%	70%
1	04	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	10 Unit							70%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan								
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Yang Tersedia	100 Persen 100 Persen	67.68				100%	25%	70%
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	100						70%
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61.22	28000 Kwh	28000kwh	100%			70%
1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0.73	29 Unit	29 unit	100%			70%
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		1 laporan	1 laporan	100%			70%
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang Terpelihara Persentase Barang milik Daerah yang terpelihara	100 Persen 100 Persen	91.41				100%	50%	70%
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	51 Unit	85.64	15 Unit			51 Unit	35 Unit	70%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	99.92	2 Unit			2 Unit	2 Unit	70%
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten	100 Persen	90.89						
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota yang disusun Jumlah Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah korban bencana dan relokasi program Pemerintah Kabupaten / Kota	1 Dokumen 1 Dokumen		0			1 dokumen	0 dok	
1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	6 Dokumen		1 Dokumen					
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan	Terlaksananya Diklat	1 Kegiatan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	untuk TimTeknis/Fasilitator penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah Terlaksananya diklat Untuk Tim Teknis / Fasilitator penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah	1 Kegiatan							
1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	2 Orang		1 Kali			6 orang	0 orang	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	6 Unit 6 Unit	98.40	3 Unit	3 Unit	100%	2 unit	0 Unit	
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	97.09	3 Unit	3 Unit	100%	2 Unit	0 Unit	
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi	Jumlah Rumah bagi	2 Unit Rumah	98.87	15 Unit	-	-	-		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Korban Bencana	Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun								
1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	100 Persen 100 Persen	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
1	04	02	2.04	0003	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	6 Rumah Tangga	3.69	3	3	100%	2 RT	0 RT	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	100 Persen	40.85				100%	0%	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Perbaikan RTLH dan PSU di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha Persentase perbaikan RTLH dan PSU di Kawasan Permukiman	100 Persen 20 Persen					100%	0%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha								
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	4 Unit Rumah		40 Unit	40 Unit	100%	14 Unit	0 Unit	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah yang mendapat akses PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	1,25 Persen	97.43	1.25	1.25	100%	1.25%	50%	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah rumah yang sudah dilengkapi PSU Jumlah rumah yang sudah dilengkapi PSU	500 Unit 500 Unit	97.45						
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	45 Dokumen					1 dokumen	0 dokumen	
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	7 Lokasi	97.43						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup yang Disusun								
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase KLHS yang disusun Persentase KLHS yang disusun	1 Persen 100 Persen					100%	100%	
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen							
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan Lahan	67,52 indeks 67,62 indeks 93,26 indeks 75,64 indeks	31.09	67.59 93.26 75.64	59.60 91.42 71.99	88% 98% 95%	67.59 93.26 75.64	67.62 93.26 75.64	67.65 93.27 75.66
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase objek yang teridentifikasi pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup yang ditangani Persentase objek yang teridentivikasi pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup yang ditangani	100 Persen 100 Persen	23.03				100%	50%	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10 Dokumen	49.17						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 persen 100 persen	93.86				100%	30%	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat implementasi PPLH Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat implementasi PPLH	15 Usaha/Kegiatan 5 Kegiatan	93.86	5 usaha/kegiatan	2 usaha/kegiatan	13%	15	3	
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	5 Badan Usaha		15 usaha/kegiatan	15 usaha/kegiatan	100%	15	8	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Kader Lingkungan yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Jumlah Kader Lingkungan yang	63 orang 70 orang	82.42						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup								
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 Kegiatan 1 Kegiatan	82.42				-	-	
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	10 Dokumen	90.14				10	1	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat / penegakan hukum lingkungan hidup	100 persen	86.40	100%	100%	100%	100%	100%	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH Jumlah Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH	2 Kegiatan 2 Buah	86.40	2 tindak lanjut	8 tindak lanjut	100%	2	0	
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan	2 Pengaduan	86.40	2 pengaduan	8 pengaduan	100%	2	0	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani								
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan Layanan Persampahan Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Persentase Pengurangan Sampah	100 persen 65 persen 5 persen	91.19						
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah Persentase timbulan sampah yang ditangani	5 Persen 45 Persen	91.19				5% 40%	5% 40%	
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 Kelompok	72.26				6 kelomoik	6 kelompok	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	79.52				5 unit	1 Unit	
2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	15 Ton	69.69						
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah	Jumlah sampah yang	182 Ton	93.64				182 ton	90 ton	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan								
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	0								
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten /Kota Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas Rasio konektifitas	0,304 Persen 0.21 Persen 0,51 rasio							
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Jumlah Kendaraan yang telah diuji	100 Persen							
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4 Unit					4 Unit	0 Unit	
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	2000 Unit					2000 Unit	0 Unit	
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian	1300 Dokumen					1300 Dok	1300 Dok	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Kendaraan Bermotor	Berkala Kendaraan Bermotor								
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan MRLL yang Dilaksanakan	100 Persen							
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan					26 Laporan	35 Laporan	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan hidup dan Perhubungan Tahun Anggaran 2023menjalankan tiga urusan pemerintahan yaitu urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Perhubungan. Dalam menjalankan tupoksi nya terdapat beberapa kegiatan yang dijalankan untuk memenuhi target Standar Pelayanan Miniman (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pada tahun 2023 terdapat beberapa indikator yang telah mencapai target dan ada yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/standarnasional	IKK	TargetRenstraPerangkatDaerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2025	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase ketersediaan Rumahbagi korban bencana danrelokasi program pemerintah Kabupaten	√		100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kawasan permukiman kumuhdi bawah10 Ha. Yangditangani	√		100	100	100	100	0				
3	Persentase rumahlayak huni	√		91.25	91.50	91.75	92	100		92	92.25	
4	Persentase rumah yang mendapat akses PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas umum)	√		1.25	1.25	1.25	1.25	100	1.25	1.25	1.25	
5	Ketersediaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten		√	30	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/standarnasional	IKK	TargetRenstraPerangkatDaerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2025	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks kualitas Air (IKA)		√	67,53	67.56	67.59	67.62	56,67	59.60	67.65	67.68	
2	Indeks kualitas Udara (IKU)		√	93.26	93.26	93.26	93.26	91.90	91.42	93,26	93.26	
3	Indeks kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		√	75.64	75.64	75.64	75.64	75.07	71.99	75.64	75.64	
4	Persentase cakupan layanan persampahan		√	45	75	80	100			100	100	
5	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten		√	30	45	60	65			65	70	
6	Persentase penguranganan sampah		√	5	5	5	5			5	5	
1	Meningkatnya Ketersediaan Konektivitas Antar Wilayah		√	0.48	0.49	0.49	0.49	42.46		0.51	0.54	
			√	0.27	0.25	0.23	0.25			0.21	0.19	
				30.3	30.4	30.4	30.03			30.4	38.4	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman,Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan yang harus segera ditindaklanjuti, yaitu:

2.3.1.Pemenuhan Kebutuhan Pembiayaan

Guna pemenuhan kebutuhan pembiayaan maka perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan alokasi anggaran perangkat daerah melalui alternatif pembiayaan lainnya selain melalui APBD dengan menjajaki kemungkinan pembiayaan melalui program DAK, Dana hibah Provinsi ataupun bantuan keuangan dari Pemerintah daerah lainnya.

2.3.2.Masalah Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, PSU Perumahan dan Permukiman

Masih terdapatnya lingkungan permukiman yang belum didukung dengan PSU yang memadai. Keterbatasan lahan menjadi salah satu penyebabnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya penarikan PSU secara sepihak maupun dengan cara menarik kewajiban dari para pengembang untuk menyerahkan PSU (fasos/Fasum) kepada Pemerintah daerah. Masalah terkait lainnya adalah masih belum terpenuhinya kebutuhan PSU perumahan yang inklusif (ramah difabel dan lansia).

2.3.3.Masalah Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

Belum tersedianya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka perlu segera dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana
- Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana
- Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada
- Rehabilitasi dan atau pembangunan Rumah bagi korban bencana

2.3.4.Masalah Permukiman Kumuh

Dari luas Kabupaten Solok Selatan yang seluas 3.346,20 km2 (sumber data RPJMD 2021-2026), luas kawasan permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2020 tercatat seluas11,32 Ha (Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 660.166-2021 18 Juni 2021 tentang Permukiman Kumuh) tersebar di 2 titik lokasi pada 1 kecamatan dengan luasan rata-rata dibawah 10 Ha. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus melakukan penataan kawasan permukiman kumuh tersebut dalam rangka mendukung pencapaian target nasional kawasan kumuh 0%. Di samping itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga akan berkerjasama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian PUPR dalam rangka penanganan kawasan kumuh di Kabupaten

Solok Selatan. Guna mendukung rencana tersebut maka perlu segera dilakukan review dan revisi terhadap Keputusan Bupati Nomor 660.166-2021 18 Juni 2021 tentang Lokasi Permukiman Kumuh agar luasan kumuhnya memenuhi persyaratan diatas 10Ha untuk dapat ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat maupun oleh Kementrian PUPR.

2.3.5. Masalah Lingkungan Hidup

Perkembangan Kabupaten Solok Selatan dari berbagai aspek akan menimbulkan dampak penurunan kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan Lingkungan Hidup secara bijaksana menuntut adanya pegetahuan yang cukup tentang lingkungan dan akibat dapat timbul karena faktor alam maupun manusia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai isu/permasalahan lingkungan harus mendalam agar dapat menentukan kebijakan yang akan diambil dalam pembangunan nantinya. Berdasarkan data dan inventarisasi data terolah , dilakukan penetapan isu/permasalahan prioritas di Kabupaten Solok Selatan

- Belum optimlnya pengelolaan sampah

  Pengelolaan persampahan di Kabupaten Solok Selatan belum dapat dilakukan secara maksimal karena belum beroperasinya Tempat Temprosesan Akir Sampah, masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana persampahan, belum optimalnya penerapan regulasiyang mengatur pengelolaan sampah, perlunya peningkatan kapasitas kinerja Aparatur Sipil Negara, serta perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah dengan baik
- Peningatan alih fungsi lahan

  Alih fungsi lahan atau disebut juga sebagai konversi lahan merupakan perubahan sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain dan mempengaruhi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan terjadi karena karena masyarakat di Kabupaten Solok Selatan memerlukan lebih banyak lahan untuk memenuhi kebutuhannya, seiring dengan berkembangnya populasi. Conth alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan yaitu alih fungsi kawasan hutan, alih fungsi lahanpertanian menjadi kawasan industri, alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman
- Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tidak adil dan tidak berkelanjutan Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan adalah pemanfaatan yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan

masyarakat Kabupaten Solok Selatan tanpa mengurangi potensinya untu memenuhi kebutuhan masyarakat di masa mendatang

2.3.6.Masalah Perhubungan

- Belum maksimalnya pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan
- Para pengguna jasa transportasi masih mengeluhkan lemahnya penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan
- Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan
- Masih minimnya sumber daya aparatur di sektor perhubungan
- Masih minimnya dana untuk pengelolaan sektor perhubungan
- Belum seluruh aksebilitas di Jorong/Nagari yang ada di Kabupaten Solok Selatan terpenuhi, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memasarkan hasil bumi mereka ke pusat-pusat pemasaran
- Belum terjangkaunya seluruh pelosok jorong/nagari oleh moda transportasi, sehingga biaya operasional yang dbutuhkan menjadi tinggi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan dalam menjalankan tiga urusan pemerintahan memiliki target kinerja sebagaimana tertuang dalam renstra OPD, baik berupa target SPM, target IKK maupun program unggulan Kepala Daerah. Untuk mencapai target tersebut telah disusun Rancangan Awal Renja Tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.9.

Tabel 2. 9
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Solok Selatan,
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Perhubungan

No.	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Cakupan Layanan Operasional Kantor Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerinntahan	100 Persen 100 Persen	11.401.962,82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Cakupan Layanan Operasional Kantor Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerinntahan	100 Persen 100 Persen	11.401.962,82	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan Kinerja pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah Persetase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen 100 %	6.995.050	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan Kinerja pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah Persetase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen 100 %	10.314.950,32	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	6.613.240,96	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	10.058.236,82	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45 Dokumen	259.713,50	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45 Dokumen	256.713,50	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan			668.350,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan			327.000,00	

No.	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		, Semua Kel/Desa					, Semua Kel/Desa				
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	20.500,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	10.000,000	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	80.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	25.000,000	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	14.600,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	7.000,000	
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	50.506,25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	30.000,000	
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	11.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	5.000,000	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	494.600,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	250.000,000	
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua	Persentase barang milik Daerah yang tersedia	100 Persen	25.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua	Persentase barang milik Daerah yang tersedia	100 Persen	25.000,000	

No.	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kel/Desa					Kel/Desa				
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	25.000,000	
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Yang Tersedia	100 Persen 100 Persen	89.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Yang Tersedia	100 Persen 100 Persen	315.012,500	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000,000	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.500,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51.012,500	
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.000,000	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	262.213,50	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	252.000,000	
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan	Persentase Barang milik Daerah yang Terpelihara Persentase Barang	100 Persen 100 Persen	624.900,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan	Persentase Barang milik Daerah yang Terpelihara Persentase Barang	100 Persen 100 Persen	420.000,000	

No.	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		, Semua Kel/Desa	milik Daerah yang terpelihara				, Semua Kel/Desa	milik Daerah yang terpelihara			
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	422.400,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	360.000,000	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	190.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	60.000,000	
22	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten	100 Persen	575.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten	100 Persen	145.000,000	
23	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota yang disusun Jumlah Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah korban bencana dan relokasi program Pemerintah Kabupaten / Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	25.000,00	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota yang disusun Jumlah Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah korban bencana dan relokasi program Pemerintah Kabupaten / Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	10.000,000	
24	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	6 Dokumen	0	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	6 Dokumen	10.000,000	
25	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan	Kab. Solok Selatan,	Terlaksananya Diklat	1 Kegiatan	0	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan	Kab. Solok Selatan,	Terlaksananya Diklat	1 Kegiatan	10.000,000	

No.	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	untuk TimTeknis/Fasilitator penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah Terlaksananya diklat Untuk Tim Teknis / Fasilitator penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah	1 Kegiatan		dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	untuk TimTeknis/Fasilitator penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah Terlaksananya diklat Untuk Tim Teknis / Fasilitator penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah	1 Kegiatan		
26	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	2 Orang	10.000,000	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	2 Orang	10.000,000	
27	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	6 Unit 6 Unit	525.000,00	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	6 Unit 6 Unit	120.000,00	
28	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	190.000,00	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	40.000,000	
29	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit Rumah	335.000,00	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit Rumah	80.000,000	

No.	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	100 Persen 100 Persen	25.000,00	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	100 Persen 100 Persen	5.000,000	
31	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	6 Rumah Tangga	25.000,00	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	6 Rumah Tangga	5.000,000	
32	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	100 Persen	2.527.500,00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	100 Persen	100.000,000	
33	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase Perbaikan RTLH dan PSU di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha Persentase perbaikan RTLH dan PSU di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	100 Persen 20 Persen	2.527.500,00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase Perbaikan RTLH dan PSU di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha Persentase perbaikan RTLH dan PSU di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	100 Persen 20 Persen	100.000,000	
34	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	4 Unit Rumah	2.527.500,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	4 Unit Rumah	100.000,000	
35	PROGRAM	Kab. Solok	Persentase rumah	1,25 Persen	11.590.196,8	PROGRAM	Kab. Solok	Persentase rumah	1,25 Persen	12.025.000,00	

No.	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	yang mendapat akses PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)		4	PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	yang mendapat akses PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)		0	
36	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah rumah yang sudah dilengkapi PSU Jumlah rumah yang sudah dilengkapi PSU	500 Unit 500 Unit	-	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah rumah yang sudah dilengkapi PSU Jumlah rumah yang sudah dilengkapi PSU	500 Unit 500 Unit	-	
37	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	45 Dokumen	400.000.000	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	45 Dokumen	300.000,000	
38	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	7 Lokasi	11.590.196,84	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	7 Lokasi	11.725.000,000	
39	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun	1 dokumen	550.000,000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun	1 dokumen	550.000,000	
40	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase KLHS yang disusun Persentase KLHS yang disusun	1 Persen 100 Persen	300.000,00	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase KLHS yang disusun Persentase KLHS yang disusun	1 Persen 100 Persen	550.000,000	
41	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	300.000,00	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	550.000,000	
42	PROGRAM	Kab. Solok	Indeks Kualitas Air	67,52 indeks		PROGRAM	Kab. Solok	Indeks Kualitas Air	67,52 indeks	50.000,000	

No.	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan Lahan	67,62 indeks 93,26 indeks 75,64 indeks	215.000,00	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan Lahan	67,62 indeks 93,26 indeks 75,64 indeks		
43	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase objek yang teridentifikasi pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup yang ditangani Persentase objek yang teridentivikasi pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup yang ditangani	100 Persen 100 Persen	215.000,00	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase objek yang teridentifikasi pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup yang ditangani Persentase objek yang teridentivikasi pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup yang ditangani	100 Persen 100 Persen	50.000,000	
44	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10 Dokumen	215.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10 Dokumen	50.000,000	
45	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 persen 100 persen	50.000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 persen 100 persen	50.000,000	
46	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat implementasi PPLH Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat implementasi PPLH	5 Usaha/Kegiatan 5 Kegiatan	75.000,000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat implementasi PPLH Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat implementasi PPLH	5 Usaha/Kegiatan 5 Kegiatan	50.000,000	
47	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah	Kab. Solok Selatan, Semua	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	5 Badan Usaha	75.000,000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah	Kab. Solok Selatan, Semua	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	5 Badan Usaha	50.000,000	

No.	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kecamatan , Semua Kel/Desa				terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kecamatan , Semua Kel/Desa				
48	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Kader Lingkungan yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Jumlah Kader Lingkungan yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	63 orang 70 orang	65.000,000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Kader Lingkungan yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Jumlah Kader Lingkungan yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	63 orang 70 orang	30.000,000	
49	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 Kegiatan 1 Kegiatan	40.000,000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 Kegiatan 1 Kegiatan	30.000,000	
50	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	10 Dokumen	25.000,00	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	10 Dokumen	30.000,000	
51	PROGRAM	Kab. Solok	Persentase	100 persen	27.380,00	PROGRAM	Kab. Solok	Persentase	100 persen	25,000,00	

No.	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	tindaklanjut pengaduan masyarakat / penegakan hukum lingkungan hidup			PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	tindaklanjut pengaduan masyarakat / penegakan hukum lingkungan hidup			
52	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH Jumlah Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH	2 Kegiatan 2 Buah	27.380,00	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH Jumlah Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH	2 Kegiatan 2 Buah	20.000,000	
53	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	2 Pengaduan	27.380,00	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	2 Pengaduan	20.000.000	
54	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Cakupan Layanan Persampahan Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Persentase Pengurangan Sampah	100 persen 65 persen 5 persen	3.150.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Cakupan Layanan Persampahan Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Persentase Pengurangan Sampah	100 persen 65 persen 5 persen	2.699.959,200	
55	Pengelolaan Sampah	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase pengurangan sampah Persentase timbulan sampah yang ditangani	5 Persen 45 Persen	3.150.000,00	Pengelolaan Sampah	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase pengurangan sampah Persentase timbulan sampah yang ditangani	5 Persen 45 Persen	2.699.959.200	
56	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 Kelompok	150.000,00	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 Kelompok	246.145.850	
57	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Kab. Solok Selatan,	Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Unit	650.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Kab. Solok Selatan,	Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Unit.	252.757.200	

No.	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			
58	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	15 Ton	75.000.000	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	15 Ton	25.000.000	
59	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	182 Ton	2.375.000,00	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	182 Ton	2.176.056.150	
60	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten /Kota Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas Rasio konektifitas	0,304 Persen 0.21 Persen 0,51 rasio	1.250.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten /Kota Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas Rasio konektifitas	0,304 Persen 0.21 Persen 0,51 rasio	496.211.150	
61	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Jumlah Kendaraan yang telah diuji	100 Persen	314.25,00	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Jumlah Kendaraan yang telah diuji	100 Persen	149.171.000	
62	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang	4 Unit	120.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang	4 Unit	37.778.000	

No.	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		, Semua Kel/Desa	Tersedia				, Semua Kel/Desa	Tersedia			
63	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	2000 Unit	82.000,00	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	2000 Unit	73.893.000	
64	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1300 Dokumen	36.750,00	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1300 Dokumen	37.500.000	
65	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase Kegiatan MRLL yang Dilaksanakan	100 Persen	352.000,00	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase Kegiatan MRLL yang Dilaksanakan	100 Persen	347.040.150	
66	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	328.000,00	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	347.040.150	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat,LSM,asosiasi,perguruantinggimaupundariPerangkatDaerah Kabupaten/Kota maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Musrenbang Nagari dari awal bulan Februari sampai dengan awal bulan Maret tahun 2024 dengan lingkup 39 (tiga puluh sembilan) nagari, kemudian dilanjutkan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan pada minggu ke dua bulan Maret dengan lingkup 7 (tujuh) kecamatan dan telah dilakukan Forum OPD dan dilanjutkan dengan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei 2024.

Dari keseluruhan proses perencanaan tersebut telah menghasilkan usulan kegiatan prioritas yang termuat dalam rekapitulasi musrenbang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman,Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Kabupaten Solok Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	Jalan Padang Alai Kuok Kec. Sangir	Panjang Jalan Perdesaan	100 meter	Dapat diakomodir
2.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	Jalan Bancah tembuh Sungai Ratak Kec. KPGD	Panjang Jalan Perdesaan	100 meter	Dapat di akomodir
3.	Peningkatan Prasarana dan	Jalan Sungai Bong KPGD	Panjang Jalan Perdesaan	100 meter	Dapat di akomodir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sarana Utilitas Umum (PSU)				
4.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	Jalan Mukti Tama	Panjang Jalan Perdesaan	100 meter	Dapat di akomodir
5.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	Jalan dermaga Kampung Baru Pulau Punjung	Panjang Jalan Perdesaan	100 meter	Dapat di akomodir
6.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	Jalan Sumber Rejo Sangir	Panjang Jalan Perdesaan	100 meter	Dapat di akomodir
7.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	Jalan Liki Sangir	Panjang Jalan Perdesaan	100 meter	Dapat di akomodir

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum permasalahan lingkungan hidup masih akan dihadapkan padapencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi; kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai (DAS) dan ekosistem-ekosistem sensitif lainnya; potensi bencana lingkungan, terutama akibat kebakaran hutan dan lahan; serta memburuk nya dampak yang dirasakan akibat fenomena perubahan iklim.

Pemanasan global *(global warming)* merupakan isu sentral saat ini yang merupakan dampak nyata dari penanganan lingkungan yang keliru dan bersumber dari perbuatan manusia yang pada akhirnya mengancam kelangsungan produktivitas. Karena itu lingkungan menjadi salah satu elemen penting sekaligus sasaran pembangunan yang mesti dikelola.

Pembangunan yang hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan belum cukup untuk menjamin terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan dapat berkelanjutan (Sustainable Development) jika memenuhi tiga criteria, yaitu pada pertumbuhan ekonomi yang stabil (Economic Growth with Stability), terjadi pemerataan dengan berpartisipasi yang luas (Equity through Wider Participation) dan lingkungan terjaga/lestari (Protecting the Environment). Seyogyanya dalam proses pembangunan selalu mengedepankan aspek-aspek lingkungan.

Bagi Kabupaten Solok Selatan, pengelolaan lingkungan merupakan suatu keharusan mengingat posisi geografis dan potensi sumber daya alamnya yang cukup menjadikan terdepan di Provinsi Sumatera Barat, maka kerusakan lingkungan akan menjadi kendala utama dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan kedepan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Perhubungan Solok Selatan melakukan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Solok Selatan yang diselenggarakan dengan azas tanggungjawab, berkelanjutan dan azas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat masyarakat Kabupaten Solok Selatan seutuhnya yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan azas diatas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan mempunyai tujuan dalam melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Terwujudnya masyarakat kabupaten Solok Selatan sebagai insan yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta mengelola lingkungan hidup;
2. Terjaminnya kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kepentigan generasi masa kini dan masa yang akan datang;
3. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan;
4. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana yang berpihak kepada kelangsungan hidup masyarakat Kabupaten Solok Selatan.

Adapun sasaran yang akan dicapai dengan penetapan tujuan ini adalah :

1. Aparatur pemerintah yang mengerti arti pentingnya daya tampung dan daya dukung lingkungan dalam setiap tahap pembangunan dan pembuatan kebijakan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan;
2. Masyarakat yang juga bertanggungjawab untuk menjaga, mengelola dan melindungi sumberdaya alam secara lestari agar generasi mendatang tetap bisa menikmatinya;
3. Adanya regulasi yang berfungsi sebagai koridor dalam perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam;
4. Pelaku usaha yang harus mengerti tanggungjawab sosial dan lingkungan hidup sesuai aturan yangberlaku agar kelestarian alam tetap terjaga;
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi dan budaya sebagai hasil dari pemanfaatan sumberdaya alam yang baik dan berkesinambungan;
6. Terjaganya flora dan fauna serta ketersediaan air dan kesuburan tanah yang melimpah diseluruh kawasan di Kabupaten Solok Selatan.

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2021 - 2026 dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga berpatokan pada Peraturan Pemerintah No. 90 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Solok Selatan merencanakan program yang berkaitan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta bidang perhubungan,meliputi:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota terdiri dari kegiatan administrasi keuangan daerah administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daera, penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program Pengembangan Perumahan, terdiri dari kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
3. Program kawasan permukiman terdiri dari kegiatan Peningkatan Kualitas, Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
4. Program peningkatan prasarana, saranadan utilitas umum(psu) terdiri dari kegiatan,urusan penyelenggaraan PSU perumahan
5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, terdiri dari kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota,
6. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota, penanggulangan pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota

7. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terdiri dari kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
8. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat terdiri dari kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota
9. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup terdiri dari kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota
10. Program pengelolaan persampahan terdiri dari kegiatan pengelolaan sampah
11. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kegiatan Pelaksanaan Manajemen rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota,

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tentunya dilakukan dengan menetapkan langkah-langkah strategis, untuk itu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DisPerkimLHHub) perlu menetapkan strategi dan kebijakan agar pelaksanaan program dan kegiatan menjadi terarah dan terpadu. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Adapun Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan juga akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.Strategi dan Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang PerumahanKawasan Permukiman dan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Urusan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pemerintang Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Perhubungan dengan program yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Program Pengembangan Perumahan, Program kawasan permukiman terdiri dari kegiatan Peningkatan Kualitas, Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu) terdiri dari kegiatan,urusan penyelenggaraan PSU perumahanProgram Perencanaan Lingkungan Hidup, terdiri dari kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota,Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup, Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat terdiri dari kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan

lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kotaProgram penanganan pengaduan lingkungan hidup Program pengelolaan persampahan terdiri dari kegiatan pengelolaan sampah dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Mempertimbangkan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan,serta program dankegiatanyangdirencanakan,makapadatahun2025disusun rencana kerja dan pendanaan nya yang bersumber dari APBD Kabupaten Solok Selatan. Pagu Indikatif yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp20.139.502.112,-*(Dua Puluh MiliarSeratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Ribu Seratus Dua Belas Rupiah)*** dengan rincian sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman,Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	11	15	16
						Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan			20.139.502.112,00			24.179.277.218,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16.404.962.112,00			20.518.777.218,00
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			16.404.962.112,00			20.518.777.218,00
1	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.789.502.112,00		-	10.270.277.218,00
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.630.502.112,00		-	9.062.027.218,00
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	8.430.502.112,00	DAU		8.852.027.218,00
	1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	200.000.000,00	DAU		210.000.000,00
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	340.000.000,00		-	357.000.000,00
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi						

						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	10.000.000,00	DAU		10.500.000,00
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	30.000.000,00	DAU		31.500.000,00
	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	DAU		15.750.000,00
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	DAU		31.500.000,00
	1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	5.000.000,00	DAU		5.250.000,00
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	250.000.000,00	DAU		262.500.000,00
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	369.000.000,00		-	378.750.000,00
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	DAU		5.250.000,00
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000,00	DAU		63.000.000,00
	1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	10.000.000,00	DAU		10.500.000,00
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	294.000.000,00	DAU		300.000.000,00
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang terpelihara Persentase Barang milik Daerah yang Terpelihara	100 Persen 100 Persen	450.000.000,00		-	472.500.000,00
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	360.000.000,00	DAU		378.000.000,00
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	90.000.000,00	DAU		94.500.000,00
2	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten	100 Persen	140.000.000,00		-	148.500.000,00

	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota yang disusun	1 Dokumen	10.000.000,00		-	12.000.000,00
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	10.000.000,00	DAU		12.000.000,00
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Diklat untuk TimTeknis/Fasilitator penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah	1 Kegiatan	30.000.000,00		-	31.500.000,00
	1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator						
							Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	2 Orang	30.000.000,00	DAU		31.500.000,00
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	6 Unit	95.000.000,00		-	99.750.000,00
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	50.000.000,00	DAU		52.500.000,00

	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						
							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah	45.000.000,00	DAU		47.250.000,00
	1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	100 Persen	5.000.000,00		-	5.250.000,00
	1	04	02	2.04	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
							Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	3 Rumah Tangga	5.000.000,00	DAU		5.250.000,00
3	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	100 Persen	45.000.000,00		-	100.000.000,00
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase perbaikan RTLH dan PSU di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha Persentase Perbaikan RTLH dan PSU di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	20 Persen 100 Persen	45.000.000,00		-	100.000.000,00
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	01 Unit Rumah	45.000.000,00	DAU		100.000.000,00

4	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah yang mendapat akses PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	1,25 Persen	6.430.460.000,00		-	10.000.000.000,00
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah rumah yang sudah dilengkapi PSU	500 Unit	6.430.460.000,00		-	10.000.000.000,00
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian						
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	7 Lokasi	6.430.460.000,00	DAU		10.000.000.000,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.734.540.000,00			3.660.500.000,00
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			3.235.000.000,00			3.135.500.000,00
5	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	350.000.000,00		-	0,00
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-	350.000.000,00		-	0,00
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						
							Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	350.000.000,00	DAU		0,00
6	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	67,65 indeks	105.000.000,00		-	116.250.000,00

	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase objek yang teridentivikasi pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup yang ditangani	100 Persen	105.000.000,00		-	116.250.000,00
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	80.000.000,00	DAU		90.000.000,00
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	25.000.000,00	DAU		26.250.000,00
7	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100 persen	55.000.000,00		-	63.000.000,00
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat implementasi PPLH Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat implementasi PPLH	5 Kegiatan 5 Usaha/Kegiatan	55.000.000,00		-	63.000.000,00
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						

							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5 Dokumen	25.000.000,00	DAU		26.250.000,00
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	15 Badan Usaha	30.000.000,00	DAU		36.750.000,00
8	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Kader Lingkungan yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Jumlah Kader Lingkungan yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	83 orang 97 orang	100.000.000,00		-	105.000.000,00
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20 Kegiatan 2 Kegiatan	100.000.000,00		-	105.000.000,00
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						

							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000,00	DAU		105.000.000,00
9	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat / penegakan hukum lingkungan hidup	100 persen	25.000.000,00		-	26.250.000,00
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH Jumlah Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH	2 Kegiatan 2 Buah	25.000.000,00		-	26.250.000,00
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Pengaduan	25.000.000,00	DAU		26.250.000,00
10	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-	2.600.000.000,00		-	2.825.000.000,00
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah Persentase timbulan sampah yang ditangani	5 Persen 55 Persen	2.600.000.000,00		-	2.825.000.000,00
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						

							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 Kelompok	175.000.000,00	DAU		183.750.000,00
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	100.000.000,00	DAU		200.000.000,00
	2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah						
							Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	15 Ton	25.000.000,00	DAU		26.250.000,00
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan						
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	182 Ton	2.300.000.000,00	DAU		2.415.000.000,00
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			499.540.000,00			525.000.000,00

11	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas Kinerja Lalu Lintas Kabupaten /Kota Rasio konektifitas	0.19 Persen 0,384 Persen 0,54 rasio	499.540.000,00		-	525.000.000,00
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Jumlah Kendaraan yang telah diuji	100 Persen	149.540.000,00		-	157.500.000,00
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	77.040.000,00	DAU		81.375.000,00
	2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor						
							Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	2000 Unit	35.000.000,00	DAU		36.750.000,00
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1300 Dokumen	37.500.000,00	DAU		39.375.000,00
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan MRLL yang Dilaksanakan	100 Persen	350.000.000,00		-	367.500.000,00
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	350.000.000,00	DAU		367.500.000,00
	J U M L A H								**20.139.502.112,00**			**24.179.277.218,00**

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menuangkan langkah-langkah dan kebijakan yang responsif terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Rencana Kerja yang merupakan suatu proses yang mengarahkan para pemimpin Dinas beserta jajarannya dalam merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang merupakan acuan dasar untuk pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan kebijakan pada tahun yang ditetapkan. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Solok Selatan serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Dengan demikian, Rencana Kerja bagi Dinas Perumahan,Kawsan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan rencana diatasnya (Renstra PD, RKPD dan RPJMD Kabupaten Solok Selatan) serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada di DPKPLHHUB Kabupaten Solok Selatan.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong DPKPLHHUB Kabupaten Solok Selatan untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat. Sesuai denganRealistis Kebutuhan Anggaran untuk pencapaian program-program yang ditetapkan.

Padang Aro, 2024
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan PerhubunganSolok Selatan

Plt.Kepala,

MIMI ARIESMA PUTRI,S.H
NIP. 19770424 201101 2 004

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan secara cepat, efisien dan terpadu. Masukan dan saran sangat terbuka guna menunjang kesempurnaan Renja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan dimasa yang akan datang.

Kami terus melakukan perbaikan terhadap pengembangan system pengukuran kinerja, peningkatan SDM, pengembangan anggaran berbasis kinerja serta kegiatan lainnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dimasa datang. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu terwujudnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan.

Padang Aro, Juli 2024

Kepala

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Solok Selatan

Yolly Hirlandes Putra, ST, MIL

NIP. 198112152006041006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang 1
- 1.2 Landasan Hukum 2
- 1.3 Maksud dan Tujuan 4
- 1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah 7
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17
- 2.3 Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 20
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan masyarakat 32

BAB TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 34
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 37
- 3.3 Program dan Kegiatan 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 44

BAB V PENUTUP 55

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 setiap Perangkat Daerah wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pengertian Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 ini mengacu pada RPJMD 2021 - 2026, dan Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026, serta dokumen perencanaan lainnya yang berisikan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan daerah dan rencana program serta kegiatan prioritas tahun 2025. Renja ini disusun dalam rangka mengevaluasi dan melengkapi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya atau kegiatan yang belum mencapai target serta mempertimbangkan kondisi terakhir tahun 2024 juga permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2025.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan Renja Perangkat Daerah; dan
2. Tahap penyajian Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP didasarkan pada usulan kegiatan dari masing - masing bidang secara formal akan diformulasikan melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang No. 25 Tahun 2004. Dalam Renja ini tersusun program dan kegiatan APBD sektor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA PPAS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan tahun 2025.

Rencana kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lain karena disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan, arah pembangunan yang tertuang dalam pentahapan RPJP Kabupaten Solok Selatan, 13 prioritas pembangunan Kabupaten Solok Selatan. Penyusunan rencana kerja juga berpedoman kepada target tahunan yang akan dicapai menurut Renstra DPMPTSP selama kurun waktu 5 tahun.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019;
21. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 – 2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Solok Selatan 2021-2026.
26. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Solok Selatan 2025.
27. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 yaitu :

1. Sebagai dokumen perencanaan dan operasional jangka pendek 1(satu) tahun,

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Plafond Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.
3. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan tugas pokok unit kerja Dinas untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun tujuan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk satu tahun yaitu tahun 2025 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan 2022 sesuai data yang tersedia.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2025 terdiri dari 4 bab yang berisikan yaitu :

I . Pendahuluan
   a. Latar Belakang
   b. Landasan Hukum
   c. Maksud dan Tujuan
   d. Sistematika Penulisan

II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023
   a. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
   b. Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
   c. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
   d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
   e. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
   a. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Daerah

b. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

c. Program dan Kegiatan

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

a.1 Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

Untuk tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu realisasi kinerja semua memenuhi target (diatas 50%).

a.2 Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Terdiri dari 5 kegiatan yaitu :

a. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu Terpenuhinya kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah. (94%).

b. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu Terpenuhinya kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah. (90%).

c. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. (98%).

d. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah. (78%).

e. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu Terpeliharanya barang milik daerah. (92%).

2. **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

Terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu Terbitnya dokumen perizinan dan non perizinan. (97%).

3. **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

Terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

a. **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu Persentase Perusahaan yang patuh terhadap penerapan Regulasi. (72%).

4. **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**

Terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

a.Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu Terkelolanya data perizinan dan non perizinan. (91%).

a.3 Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak ada program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

a.4 Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program / kegiatan

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya atau tidak terpenuhinya target kinerja yaitu :

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada Dinas ataupun Kantor.
b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan ataupun kegiatan dinas.
c. Belum adanya sop dan spp perizinan.

a.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai target tentunya menimbulkan implikasi terhadap target capaian program Renstra. Belum tercapainya kegiatan ini berpengaruh terhadap capaian Program Renstra Perangkat Daerah. Hal ini dapat disikapi dengan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya sehingga pada akhirnya target Renstra tersebut tercapai.

a.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tidak tercapainya terpenuhinya target kinerja program / kegiatan

Untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja maka hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Telah melakukan permintaan tambahan personil PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Solok Selatan
2. Telah diupayakan meminta data-data perizinan dan realisasi investasi
3. Membuat SK Tim Teknis Perizinan secara berkelanjutan
4. Membuat Regulasi Standar Pelayanan Publik

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP s/d tahun 2024 tersaji dalam Table 2.1 pada halaman berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						DPMPTSP									
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	18					Penanaman Modal									
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100%	0	100%	100%	100	100%	57	60%
2	18	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	0	100%	100%	100	100%	60	60%

2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	28 Orang/Bulan	0	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	100	25 Orang/Bulan	61	60
2	18	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan honornya	72 Dokumen	0	10 Orang	10 Orang	100	12 Dokumen	33	60
												-		-	-
2	**18**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**0**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**32%**	**60%**
2	18	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik yang disediakan	24 Paket	0	6 Jenis	6 Jenis	100	4 Paket	92	60
2	18	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan	24 Paket	0	6 Jenis	6 Jenis	100	4 Paket	62	60
2	18	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	24 Paket	0	10 Jenis	10 Jenis	100	4 Paket	95	60
2	18	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bahan Cetak yang disediakan Bahan Penggandaan yang disediakan Bahan Penjilidan yang disediakan	24 Paket	0	5 Jenis 25000 Lembar 3 Jenis	5 Jenis 25000 Lembar 3 Jenis	100	4 Paket	54	60
2	18	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu yang disediakan	16 Laporan	0	300 kotak makan dan snack	300 kotak makan dan snack	0	4 Laporan	56	60
2	18	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang disediakan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	24 Laporan	0	770 Kotak Makan dan Snack 25 Kali	770 Kotak Makan dan Snack 25 Kali	100	4 Laporan	23	60

						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100%	0	100%	100%	100		
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	1 unit kantor	0	1 unit kantor	1 unit kantor	100	0	0
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Teralis	1 unit kantor	0	1 unit kantor	1 unit kantor	100	0	60
2	**18**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia**	**100%**	**0**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**56%**	**60%**
2	18	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	24 Laporan	0	200 Buah	200 Buah	100	4 Laporan	54	60
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Air Jumlah Pemakaian Jasa Listrik Jumlah Pemakaian Telepon/Internet	72 Laporan	0	35 Kubik 20.95 KWh 1200Gb	35 Kubik 20.95 KWh 1200Gb	100	12 Laporan	36	60
2	18	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 Laporan	0	18 Unit	18 Unit	100	4 Laporan	42	60
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 Laporan						62	
									-			-			-
2	**18**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**100%**	**0**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**58%**	**60%**

2	18	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang terpelihara	14 Unit	0	12 unit	12 unit	100	14 Unit	58	60
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	0	0 unit	0 unit	0	0 Unit	0	60
						PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Jumlah Kebijakan yang mendukung Penanaman Modal**	**6 Dokumen**	**0**	**0 Dokumen**	**0 Dokumen**	**0**	**0**	**0 Dokumen**	**0**
						Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal Jumlah Perda/Perbup yang ditetapkan**	**6 Dokumen**	**0**	**0 Dokumen**	**0 Dokumen**	**0**	**0**	**0 Dokumen**	**0**
						Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal Jumlah Perda/Perbup yang ditetapkan	6 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0
						Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kajian Pelaksanaan Pemberiaan Fasilitas/Insentif	-	0	-		-		-	-
2	18	03				**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investor yang Berminat**	**20 Investor**	**0**	**1 Investor**	**0**	**0**	**1 Investor**	**0 Dokumen**	**18**

2	**18**	**03**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**	**30%**	**0**	**3 Event**	**0**	**0**	**30%**	**0 Dokumen**	**30**
2	18	03	2	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian Strategi Promosi	2 Dokumen	0	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	50
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Investasi	4 Event	0	0 Event	0 Event	0	1 Event		50
2	**18**	**04**				**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**	**7000 izin**	**0**	**100 Izin**	**4743**	**100**	**1.200**	**35**	**50**
2	**18**	**04**	**2**	**01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**	**7000 Izin**	**0**	**100 Izin**	**4743**	**100**	**1.200**	**35**	**50**
2	18	04	2	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Frekuensi Kunjungan Perizinan Keliling	12 Aplikasi 28 Kecamatan 100%	0	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100	7 Kecamatan	32	60
2	18	04	2	01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Izin dalam Pengawasan dan Pemantauan	4540 Izin	0	100 Izin	4743 Izin	99	100 Izin	27	46
2	18	04	2	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PelayananTerpadu Perizinan dan Non Perizinan	IKM	82,00	0	81.9 indeks	77,7indeks	74	81,90	47	60
												-		-	-

2	**18**	**05**				**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Penerapan Regulasi**	**100%**	**0**	**95%**	**36**	**74**	**95%**	**32%**	**95**
2	**18**	**05**	**2**	**01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Penerapan Regulasi**	**100%**	**0**	**95%**	**36**	**74**	**75%**	**32%**	**75**
2	18	05	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dengan Forum TJSLP dan Perusahaan Jumlah Perda/Perbup yang direvisi	30 Kali 4 Dokumen	0	3 Kali	9 Kali	91	3 Kali 1 Dokumen	0	60
2	18	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	18 Kegiatan 1 unit	0	10 Kali	9 Kegiatan	79	1 Kegiatan	46	50
2	18	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan yang dilakukan ke perusahaan	40 Kali	0	8 Kali	62 Kali	53	8 Kali	24	50
											-				-
2	**18**	**06**				**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Data Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola**	**100%**	**0**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**17%**	**60**
2	**18**	**06**	**2**	**01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Data Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola**	**100%**	**0**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**17%**	**60**

2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Data Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	6 Dokumen	0	100%	100%	100	100%	59	60

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu untuk perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja. Analisa dilakukan terhadap 3 indikator kinerja dengan melihat persentase hasil pencapaiannya sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	1,4%	-93,8%	0%
2.	Meningkatnya Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah	95%	100%	100%
3.	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Baik	Sangat Baik	100%

Analisis pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP secara terperinci disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOLOK SELATAN

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten		Jumlah peningkatan investasi di Kabupaten	0,9	1,2	1,5	1,8	0,9	1,2	1,5	1,8	Realisasi 2022 dan 2023 serta proyeksi 2023-2025 memakai angka target
2	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah dokumen penerbitan perizinan dan non perizinan	1100	1200	1200	1250	1100	1200	1200	1250	
3	Laporan realisasi penanaman modal		Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	21	24	24	24	21	24	24	24	
5	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kota		Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	5	5	5	5	5	5	5	5	

6	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	20	20	20	20	20	20	20	20	
	Dokumen Kebijakan Penanaman Modal		Jumlah Perda/Perbup yang ditetapkan	0	1	1	1	0	1	1	1	
	Investor yang berminat		Jumlah Investor yang berminat	2	3	4	4	2	3	4	4	
	Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai IKM	0	81,90	81,95	82,00	0	81,90	81,95	82,00	
	Dokumen Data dan Informasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Persentase Pemanfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah		Persentase Pemanfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Penerapan Regulasi		Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Penerapan Regulasi	90	95	100	100	90	95	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan tupoksi yang telah ada juga berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi tentang permasalahan dan kebutuhan daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yaitu:
   a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia.
   b. Kurangnya Sarana dan Prasarana.
   c. Masih adanya beberapa daerah di Solok Selatan yang masih blank spot.
   d. Kebijakan pusat yang selalu berubah dan memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru dari daerah sehingga kebijakan pusat tidak selalu dapat direalisasikan oleh daerah.
   e. Meningkatnya keunggulan komparatif (daya saing) investasi daerah pesaing sehingga daerah pesaing menjadi lebih menarik untuk berinvestasi.
   f. Belum siapnya Kabupaten Solok Selatan mengikuti Regulasi dibidang investasi yang diterbitkan secara nasional.
   g. Pencapaian indeks kepuasan masyarakat belum optimal.
   h. Promo investasi daerah belum optimal.
   i. Masih adanya investor yang terlambat atau belum membuat LKPM.
   j. Kontain media social milik DPMPTSP masih kurang update.
   k. Masih adanya anggapan dan pemberitaan bahwa pengurusan izin sulit dan adanya konten negative lain terkait DPMPTSP.
   l. Perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan/pengendalian belum menjadi prioritas.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi diatas menciptakan keterbatasan dalam memaksimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah terutama misi 2 yaitu Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah dan misi 5 yaitu Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut :

1. DPMPTSP masih membutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, sarana gedung kantor yang representatif dan sarana prasarana pendukung lainnya, pendataan yang akurat, serta sistim informasi pelayanan yang memadai dengan SDM berpengetahuan optimal dalam fasilitator pelayanan dan investasi.
2. Belum terlatihnya SDM sebagai fasilitator secara maksimal dalam pelayanan dan investasi serta perlunya manajerial yang mumpuni dan cerdas dalam menarik investasi .
3. Krisis global dan Kondisi Geografis Kabupaten Solok Selatan di zona rawan bencana berpengaruh terhadap investasi.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pengurusan perizinan.

Peluang yang ada adalah dengan memaksimalkan hasil yang akan dicapai dengan kekuatan dan kewenangan yang ada di Dinas PMPTSP dan serta hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Tersedianya SDM, Sarana Prasarana dan dukungan dana. Meskipun belum memadai, keberadaan SDM, sarana prasarana serta dukungan dana yang tersedia pada saat ini merupakan peluang dalam melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan.
2. Adanya dasar hukum tentang pembentukan DPMPTSP (Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 dan Perda Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 serta Perbub Nomor 59 Tahun 2022).
3. Banyaknya potensi investasi yang belum tergali.
4. Peningkatan inovasi pelayanan public berbasis teknologi informasi dengan peningkatan kompetensi aparatur pelayanan public yang terpercaya, cepat, tepat dan tanggap serta didukung oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan public.

5. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP

Adapun rumusan isu-isu penting yaitu :

1. Perlunya ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor yang representatif dan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
2. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu dengan menerapkan standard operational prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP).
3. Perlunya reformasi manajemen pelayanan perizinan termasuk lamanya waktu penerbitan dokumen perizinan bagi peningkatan pelayanan kepada publik.

4. Perlunya peningkatan iklim investasi di Kabupaten Solok Selatan agar investor merasa aman dan nyaman berusaha serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi.
5. Perlunya peningkatan kualitas bahan-bahan promosi dengan adanya kajian-kajian teknis dan ekonomis terhadap potensi-potensi daerah yang memberikan informasi yang berkualitas bagi para investor (pemilik modal).
6. Perlunya peningkatan kualitas SDM aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas penunjang (pengembangan sistem aplikasi berbasis IT, penyediaan sarana dan prasarana promosi) di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.
7. Penataan tempat – tempat pelayanan public (ruang pelayanan, ruang tunggu, tempat parker, ruangan masyarakat berkebutuhan khusus, tempat permainan anak dan ibu menyusui).
8. Pelaksanaan FGD Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Aksi Pemanfaatan CSR untuk pemberdayaan masyarakat.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Proses yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk membandingkan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan analisis kebutuhan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 - 2026 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 - 2026.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP secara terperinci disajikan pada Tabel 2.3 halaman berikut :

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DPMPTSP				**5,411,204,497**					**5,411,204,497**	
	URUSAN PENANAMAN MODAL				**5,411,204,497**	**URUSAN PENANAMAN MODAL**				**5,411,204,497**	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		**Jumlah Kebijakan yang mendukung penanaman modal**	1 Dokumen	**0,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		**Jumlah Kebijakan yang mendukung penanaman modal**	1 Dokumen	**0,00**	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	1 Dokumen	**0,00**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	1 Dokumen	**0,00**	IX
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Solok Selatan	Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	1 Dokumen	0,00	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Solok Selatan	Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	1 Dokumen	0,00	

	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		**Jumlah Investor yang berminat**	**4 investor**	**60,000,000**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**		**Jumlah Investor yang berminat**	**4 investor**	**60,000,000**	VII
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko		**Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal**	**30%**	**60,000,000**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal**	**30%**	**60,000,000**	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Kajian Strategi Promosi	1 dokumen	30,000,000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Kajian Strategi Promosi	1 dokumen	30,000,000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Ko		Jumlah pameran investasi	1 event	30,000,000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok Selatan	Jumlah pameran investasi	1 event	30,000,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		**Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Penerapan Regulasi**	**100%**	**674,171,000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		**Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Penerapan Regulasi**	**100%**	**674,171,000**	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase perusahaan yang menyampaikan (LKPM)**	**100%**	**674,171,000**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase perusahaan yang menyampaikan (LKPM)**	**100%**	**674,171,000**	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Solok Selatan	Jumlah Koordinasi dengan Forum TJSLP Jumlah Perda/Perbup yang direvisi	6 kali 1 Dokumen	108,788,000	Koordinasi dan SInkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Solok Selatan	Jumlah Koordinasi dengan Forum TJSLP Jumlah Perda/Perbup yang direvisi	6 kali 1 Dokumen	108,788,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Solok Selatan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	3 Kegiatan	367,275,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Solok Selatan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	3 Kegiatan	367,275,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Solok Selatan	Jumlah Pengawasan yang dilakukan ke Perusahaan	8 Kali	198,108,000				8 Kali	198,108,000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		**Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan**	**1200**	**130,000,000**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		**Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan**	**1200**	**130,000,000**	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penananaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Solok Selatan**	**Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan**	**1200**	**130,000,000**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penananaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan**	**1200**	**130,000,000**	

	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Solok Selatan	Jumlah aplikasi perizinan yang dikelola Frekuensi kunjungan perizinan keliling persentase atas permohonan yang diajukan	2 Aplikasi 7 kecamatan 100%	65,000,000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Solok Selatan	Jumlah aplikasi perizinan yang dikelola Frekuensi kunjungan perizinan keliling persentase atas permohonan yang diajukan	2 Aplikasi 7 kecamatan 100%	65,000,000	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Solok Selatan	Jumlah izin dalam pengawasan dan pemantauan	800 izin	55,000,000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Solok Selatan	Jumlah izin dalam pengawasan dan pemantauan	800 izin	55,000,000	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Solok Selatan	IKM	81,95	10,000,000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Solok Selatan	-Frekuensi kunjungan perizinan keliling -Persentase atas permohonan yang diajukan IKM	81,95	10,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		**Persentase data perizinan dan non perizinan yang terkelola**	**100%**	**20,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		**Persentase data perizinan dan non perizinan yang terkelola**	**100%**	**20,000,000**	

	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegritas pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase data perizinan dan non perizinan yang terkelola**	**100%**	**20,000,000**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegritas pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase data perizinan dan non perizinan yang terkelola**	**100%**	**20,000,000**	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Solok Selatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal	1 Dokumen	20,000,000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Solok Selatan	Persentase data perizinan dan non perizinan yang terkelola	1 Dokumen	20,000,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		**Cakupan layanan operasional kantor**	**100%**	**4,527,033,497**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**Cakupan layanan operasional kantor**	**100%**	**4,527,033,497**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu**	**100%**	**0,00**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu**	**100%**	**0,00**	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	0,00	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	0,00	

	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	0,00	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	0,00	
	Administrasi Keuangan		**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah**	**100%**	**3,044,533,497**	**Administrasi Keuangan**		**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah**	**100%**	**3,044,533,497**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Solok Selatan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/bulan	2,964,533,497	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Solok Selatan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/bulan	2,964,533,497	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Solok Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	80,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Solok Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	80,000,000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**247,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**247,000,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Solok Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	5,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Solok Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	5,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Solok Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	25,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Solok Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	25,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Solok Selatan	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	7,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Solok Selatan	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	7,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Solok Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	20,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Solok Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	20,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	180,000,000	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	180,000,000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang tersedia**	**0%**	**1,000,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang tersedia**	**0%**	**1,000,000,000**	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Solok Selatan	Jumlah Unit Gedung Kantor	Unit	1,000,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Solok Selatan	Jumlah Unit Gedung Kantor	Unit	1,000,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Solok Selatan	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainhya yang disediakan	Unit	0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Solok Selatan	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainhya yang disediakan	Unit	0,00	
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kab. Solok Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Paket	0,00	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kab. Solok Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Paket	0,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Solok Selatan**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**100%**	**132,000,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Solok Selatan**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**100%**	**132,000,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2,000,000	
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	15,000,000	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	15,000,000	

	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Laporan	10,000,000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Laporan	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	105.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	105.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Solok Selatan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100%**	**103,500,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Solok Selatan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100%**	**103,500,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Solok Selatan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	103,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Solok Selatan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	103,500,000	

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Untuk tahun 2025 usulan program dan kegiatan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan diperoleh mulai dari Forum OPD.

Usulan tersebut tentunya ada yang bisa terakomodir dan tidak terakomodir terkait dengan isu-isu penting yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta anggaran yang diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka memenuhi target kinerja dinas. Untuk Usulan yang terkait dengan isu penting yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Tahun 2025 tidak ada masukan usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3		NIHIL			
4					
5					
6					
7					
8					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007/Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)	Kewenangan pemprosesan izin sebagian masih berada pada instansi-instansi teknis

		3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal	
2	Kewenangan penerbitan izin investasi diatas > 10 Milyar	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 43/M-IND/PER/2006	Penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

3	Pelaksanaan OSS (One Single Submission)	1. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penerapan OSS sudah diterapkan di daerah dan SPIPISE sebagai system pelayanan perizinan investasi sebagai system yang diterapkan sebelumnya telah dihentikan
4	Regulasi dan kebijakan yang out of date	1. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2015-2019 2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Perka BKPM Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Kabupaten/Kota	Regulasi yang menjadi acuan dalam dokumen-dokumen sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan di daerah perlu untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal, perizinan, dan pengawasan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal,

   Pelayanan Perizinan dan Pengawasan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal,

   Pelayanan Perizinan dan Pengawasan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang

   Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Pengawasan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan Fungsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tujuan dan sasaran mendukung kebijakan Bupati yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan 2021-2026 dan dijabarkan dalam Rencana Strategis DPMPTSP 2021-2026 sebagai berikut :

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,2
2.	Peningkatan Partisipasi swasta dan perusahaan dalam pembangunan	Meningkatnya Peran Perusahaan dalam Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah	85	100	100	100	100	100

Terlihat pada tabel diatas sasaran target kinerja untuk tahun 2025 yaitu peningkatan investasi kabupaten sebesar 1,8% dan pemanfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah sebesar 100%. Terkait dengan target kinerja tersebut dan untuk mencapainya maka tujuan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan adalah:

1. Membangun sistem akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
2. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan
3. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan sebagai bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
4. Adanya kontribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Solok Selatan.

Dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan adalah :

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal.
2. Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan PTSP.
3. Meningkatkan daya tarik penanaman modal.
4. Meningkatnya perencanaan penanaman modal yang implementatif.
5. Meningkatnya informasi terhadapat layanan publik.
6. Meningkatnya penyusunan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) terhadap pelayanan di Penanaman Modal dan Perizinan.
7. Meningkatnya survey, monitoring dan koordinasi proses perizinan.
8. Meningkatnya investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur prasarana dasar.

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu:
   a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
   b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
   c. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah
   d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   e. Pengembangan daerah terisolir

b. Rekapitulasi Program dan kegiatan

Di Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan merencanakan 5 program dan 9 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 5.411.204.497,-. Program dimaksud terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 kegiatan yaitu :

   A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 3.044.533.497,-
   B. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri 6 dari sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 247.000.000,-
   C. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 1000.000.000,-
   D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 132.000.000,-
   E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 103.500.000,-

2. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan 1 kegiatan yaitu :
   A. Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 130.000.000,-
3. Program Promosi Penanaman Modal dengan 1 kegiatan yaitu :
   A. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 60.000.000,-
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan 1 kegiatan yaitu :
   A. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan DAK NON FISIK sebesar Rp. 674.171.000,-
4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan 1 kegiatan yaitu :

A. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 20.000.000,-

Berikut disajikan pula rencana kegiatan beserta jumlah pendanaan setiap kegiatan secara detail pada tabel 3.1 di bawah ini:

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			RencanaTahun 2025
						Keluaran (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana
									APBD
1					2	3	5	6	7
					DPMPTSP				**5,411,204,497**
					URUSAN PENANAMAN MODAL				**5,411,204,497**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**		**100%**	**4.527,033,497**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Ketersediaan Dokumen Perencanaa, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu**		**100%**	**0,00**
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 dokumen	0,00
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 laporan	0,00
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah**	**Solok Selatan**	**100%**	**3,044,533,497**
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Solok Selatan	25 orang/bulan	2,964,533,497
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Solok Selatan	12 Dokumen	80,000,000
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Solok Selatan	1 Laporan	0,00
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**Solok Selatan**	**100%**	**247,000,000**
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Solok Selatan	4 Paket	5,000,000

2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Solok Selatan	4 Paket	25,000,000
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Solok Selatan	4 Paket	7,000,000
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Solok Selatan	4 Paket	20,000,000
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Solok Selatan	4 Laporan	10.000.000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Solok Selatan	4 Laporan	180,000,000
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang tersedia**	**Solok Selatan**	**100%**	**1.000.000.000**
2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Solok Selatan	1 Unit	1.000.000.000
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Solok Selatan	unit	0
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Solok Selatan	Paket	0
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia**	**Solok Selatan**	**100%**	**132,000,000**
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Solok Selatan	4 Laporan	2,000,000
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Solok Selatan	12 Laporan	15,000,000
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Solok Selatan	4 Laporan	10,000,000
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 Laporan	105.000.000
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**Solok Selatan**	**100%**	**103,500,000**
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Solok Selatan	14 unit	103,500,000
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah kebijakan yang mendukung penanaman modal**	**Solok Selatan**	**1 Dokumen**	**0.00**

2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangana daerah Kabupaten/kota**	**-Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal -Jumlah Perda/Perbup yang ditetapkan**	**Solok Selatan**	**1 Dokumen**	**0.00**
2	18	02	2.01	01	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian /insentif dan kemudahan penanaman modal	-Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal yang ditetapkan	Solok Selatan	1 Dokumen	0.00
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investor yang berminat**	**Solok Selatan**	**1 Investor**	**60.000.000**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**	**Solok Selatan**	**30%**	**60.000.000**
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian Strategi Promosi	Solok Selatan	1 dokumen	30.000.000
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Investasi	Solok Selatan	1 Event	30.000.000
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM**	**Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Penerapan Regulasi**	**Solok Selatan**	**100%**	**647,171,000**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentaase perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)**	**Solok Selatan**	**100%**	**647,171,000**
2	18	05	2.01	01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Solok Selatan	250 kegiatan usaha	108,788,000
2	18	05	2.01	02	Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku usaha yang mengikyti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Solok Selatan	250 kegiatan usaha	367,275,000
2	18	05	2.01	03	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Solok Selatan	250 kegiatan usaha	198,108,000
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan**		**1200**	**130,000,000**

2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu DiBidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan DaerahKabupaten / Kota**	**Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan**	**Solok Selatan**	**1200 Izin dan Non Perizinan**	**130,000,000**
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Solok Selatan	1200 Pelaku Usaha	65,000,000
2	18	04	2.01	02	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Solok Selatan	100 Kegiatan Usaha	55,000,000
2	18	04	2.01	03	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Solok Selatan	12 Pelaku Usaha	10,000,000
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase data perizinan dan non perizinan yang dikelola**	**Solok Selatan**	**100%**	**20,000,000**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase data Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola**	**Solok Selatan**	**100%**	**20,000,000**
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekronik	Persentase data perizinan dan non perizinan yang dikelola	Solok Selatan	100%	20,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk tahun anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan merencanakan mengajukan 5 program dan 9 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Rencana program dan kegiatan untuk tahun 2025 secara terperinci disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN SOLOK SELATAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
						Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
										APBD	APBD Prov.	APBN			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
					DPMPTSP					5,411,204,497					6,197,000,000
					URUSAN PENANAMAN MODAL					5,411,204,497					6,197,000,000
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor			100%	4.527,033,497				100%	5,228,000,000
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaa, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	Tersusunnya Renstra, Renja Awal, Renja Perubahan, RKA Awal, RKA Perubahan, DPA Awal, DPA Perubahan		100%	0,00				100%	0,00

2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra, Renja Awal, Renja Perubahan, RKA Awal, RKA Perubahan, DPA Awal, DPA Perubahan		6 dokumen	0,00				7 dokumen	0,00
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Evaluasi RENJA per triwulan dan LAKIP		5 laporan	0,00				5 laporan	0,00
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah**			**100%**	**3,044,533,497**			**RPJMD**	**100%**	**3,197,863,307**
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dibayarkannya Gaji danTunjangan ASN	Solok Selatan	25 orang/bulan	2,964,533,497			RPJMD	28 orang/bulan	3,002,863,307
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dibayarkannya honor Tenaga administrasi keuangan	Solok Selatan	12 Dokumen	80,000,000			RPJMD	12 Dokumen	120,000,000

2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan	Solok Selatan	1 Laporan	0,00			RPJMD	1 Laporan	75.000.000
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah**		**Solok Selatan**	**100%**	**247,000,000**			**RPJMD**	**100%**	**329,544,693**
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Solok Selatan	4 Paket	5,000,000			RPJMD	4 Paket	7,320,500
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Solok Selatan	4 Paket	25,000,000			RPJMD	4 Paket	48,243,443
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Tersedianya Peralatan rumah tangga	Solok Selatan	4 Paket	7,000,000			RPJMD	4 Paket	10,980,750
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Tersedianya Barang Cetakan, Penggandaan dan Penjilidan	Solok Selatan	4 Paket	20,000,000			RPJMD	4 Paket	43,000,000

2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum tamu	Solok Selatan	4 Laporan	10.000.000			RPJMD	4 Laporan	36.900.000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	Solok Selatan	4 Laporan	180,000,000			RPJMD	4 Laporan	183,100,000
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang tersedia**		**Solok Selatan**	**100%**	**1.000.000.000**			**RPJMD**	**1 unit partisi**	**1.500.000.000**
2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Tersedianya Gedung Kantor	Solok Selatan	1 Unit	1.000.000.000			RPJMD	1 Unit	1.500.000.000
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Solok Selatan	unit	0			RPJMD	1 unit partisi	0
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin kantor	Solok Selatan	Paket	0			RPJMD	0	0
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia**		**Solok Selatan**	**100%**	**132,000,000**			**RPJMD**	**100%**	**135,592,000**

2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai 10,000	Solok Selatan	4 Laporan	2,000,000			RPJMD	4 Laporan	3,000,000
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Solok Selatan	12 Laporan	15,000,000			RPJMD	12 Laporan	27,951,000
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Solok Selatan	4 Laporan	10,000,000			RPJMD	4 Laporan	14,641,000
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Solok Selatan	12 Laporan	105.000.000			RPJMD	12 Laporan	90.000.000
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**			**100%**	**103,500,000**				**100%**	**140,000,000**

2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Solok Selatan	14 unit	103,500,000			RPJMD	14 unit	140,000,000
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah kebijakan yang mendukung penanaman modal**		**Solok Selatan**	**1 Dokumen**	**0.00**			**RPJMD**	**1 Dokumen**	**33,000,000**
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangana daerah Kabupaten/kota**	**-Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal -Jumlah Perda/Perbup yang ditetapkan**		**Solok Selatan**	**1 Dokumen**	**0.00**			**RPJMD**	**1 Dokumen**	**33,000,000**
2	18	02	2.01	01	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian /insentif dan kemudahan penanaman modal	-Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal yang ditetapkan	Tersedianya dokumen kebijakan Penanaman Modal	Solok Selatan	1 Dokumen	0.00			RPJMD	1 Dokumen	33,000,000
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investor yang berminat**		**Solok Selatan**	**1 Investor**	**60.000.000**			**RPJMD**	**5 Investor**	**50,000,000**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**		**Solok Selatan**	**30%**	**60.000.000**			**RPJMD**	**30%**	**50,000,000**

2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian Strategi Promosi	Tersedianya Dokumen Kajian Strategi Promosi	Solok Selatan	1 Dokumen	30.000.000			RPJMD	0	0
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Investasi	Terlaksananya penyelenggaraan pameran investasi	Solok Selatan	1 Event	30.000.000			RPJMD	1 Event	50,000,000
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM**	**Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Penerapan Regulasi**		**Solok Selatan**	**100%**	**674,171,000**			**RPJMD**	**100%**	**535,000,000**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentaase perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)**		**Solok Selatan**	**100%**	**674,171,000**			**RPJMD**	**100%**	**535,000,000**
2	18	05	2.01	01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Terlaksananya Penyelesaian permasalahan Penanaman Modal	Solok Selatan	250 kegiatan usaha	108,788,000			RPJMD	6 kali 1 dokumen	229,000,000

2	18	05	2.01	02	Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya Bimtek Kemudahan Berusaha	Solok Selatan	250 kegiatan usaha	367,275,000			RPJMD	3 kegiatan	190,000,000
2	18	05	2.01	03	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Terlaksananya Pengawasan ke Perusahaan	Solok Selatan	250 kegiatan usaha	198,108,000			RPJMD	8 kali	116,000,000
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan**			**1200**	**130,000,000**				**1250**	**303,000,000**

2	**1 8**	**0 4**	**2 . 0 1**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu DiBidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan DaerahKabupaten / Kota**	**Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan**	**Tersedianya dokumen perizinan dan non perizinan**		**1200 Izin dan Non Perizinan**	**130,000,000**				**1250**	**303,000,000**
2	1 8	0 4	2 . 0 1	0 1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Terlayaninya pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan dan Non Perizinan	Solok Selatan	1200 Pelaku Usaha	65,000,000			RPJMD	2 Aplikasi 7 kecamatan 100%	50,000,000
2	1 8	0 4	2 . 0 1	0 2	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Terlaksananya Pengawasan dan Pemantauan Izin	Solok Selatan	100 Kegiatan Usaha	55,000,000			RPJMD	900 Izin	153,000,000

2	18	04	2.01	03	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Konsultasi Perizinan	Solok Selatan	12 Pelaku Usaha	10,000,000			RPJMD	82,00	100,000,000
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase data perizinan dan non perizinan yang dikelola**			**100%**	**20,000,000**				**100%**	**81,000,000**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase data Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola**			**100%**	**20,000,000**				**100%**	**81,000,000**
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekronik	Persentase data perizinan dan non perizinan yang dikelola	Terwujudnya data perizinan dan non perizinan	Solok Selatan	100%	20,000,000			RPJMD	100%	81,000,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 merupakan acuan didalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 baik uraian maupun jumlah anggarannya. Dalam melaksanakan kegiatan yang telah diajukan, haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu efektif, efisien dan tepat guna.

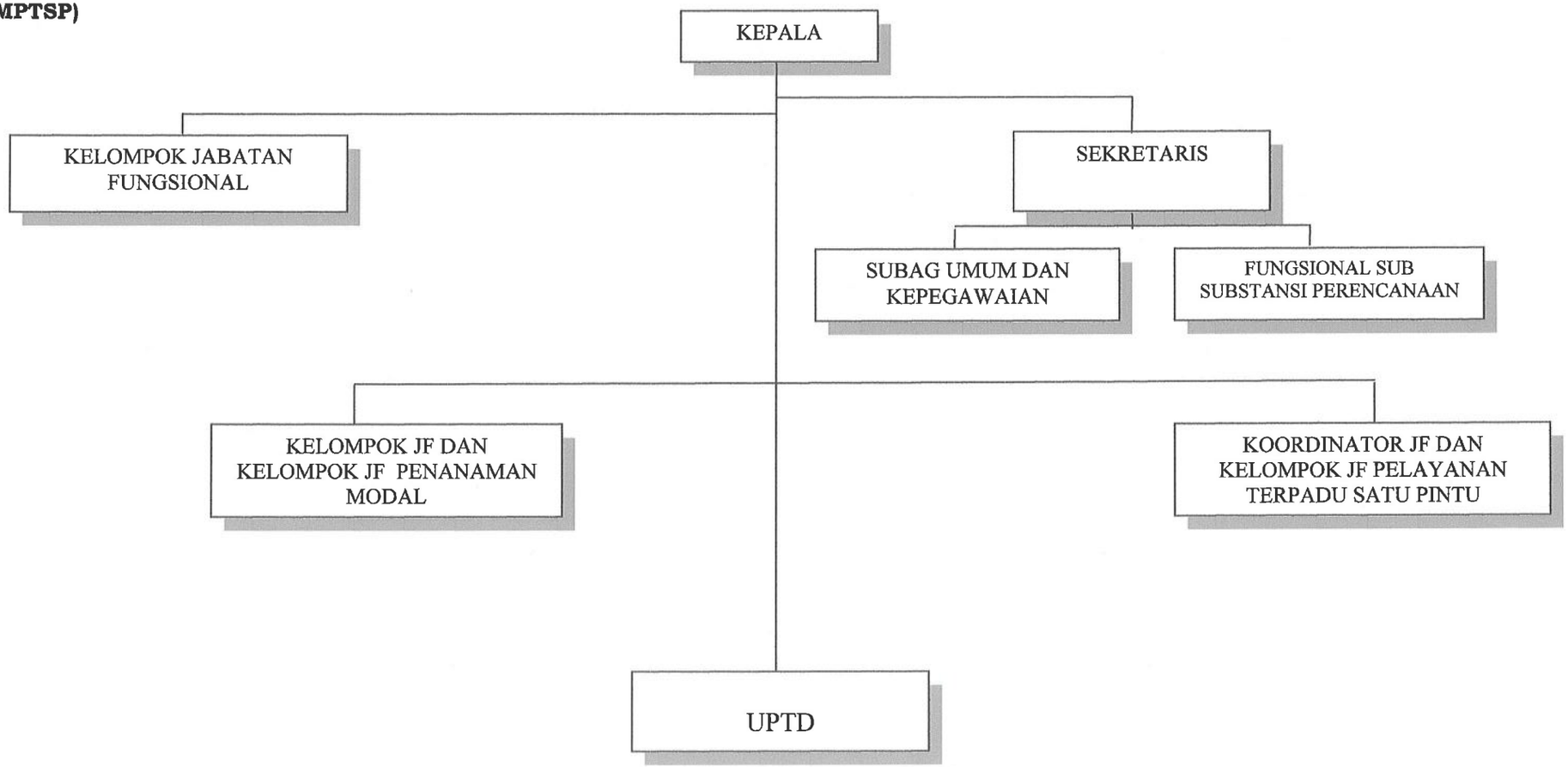
Setelah Renja ini dibuat, maka perlu dipersiapkan Kebijakan umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2025 serta Pra RKA, RKA dan DPA. Dalam penganggaran/pendanaannya harus mengoptimalkan anggaran yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan indikator kinerja dan tolak ukurnya.

Padang Aro, Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Solok Selatan

Yolly Hirlandes Putra, ST, MIL
NIP. 19811215200604100 6

Lampiran 1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN SOLOK SELATAN
(DPMPTSP)



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Innal hamda lillah, Puji serta Syukur atas Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmatdan karunia-Nya maka dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai implementasi tahapan Rencana Strategis 2021-2026. Rencana Kerja disusun dalam rangka memberikan arah/pedoman rencana tindak lanjut Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dan Renja ini juga merupakan kegiatan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Akhir kata kami sangat berharap semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan acuan dan panduan bagi seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuannya sehingga RENJA ini dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan

Padang Aro, 2024

INDRA ZUARDI, ST, MT

NIP. 19690806 199803 1 002

DAFTAR ISI

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM,TATA RUANG

DAN PERTANAHAN

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Landasan Hukum.....3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penulisan.....6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PerangkaDaerah.....7

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah.....33

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....38

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....41

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....67

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....69

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....73

3.3 Program dan Kegiatan.....75

BAB IV **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

4.1 Program dan Kegiatan.....80

BAB V **PENUTUP**.....144

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1..... 15
Tabel 2.2..... 21
Tabel 2.3..... 36
Tabel 2.4..... 38
Tabel 2.5..... 46
Tabel 2.6..... 70
Tabel 4.1..... 83
Tabel 4.2..... 101

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana kerja yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun. Rencana Awal Renja Perangkat Daerah disusun guna mengoperasionalkan Renstra-Perangkat Daerah tahun rencana yang dimaksud. Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah.

Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan sehingga semua rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan terutama dibidang Infrastruktur Kabupaten Solok Selatan untuk masa yang akan datang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan dan Rencana Kinerja Tahunan ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan serta berusaha untuk tetap fokus pada pencapaian target Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan.

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Urusan Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

Proses penyusunan Rencana Awal Renja Perangkat Daerah, Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra–Perangkat Daerah) dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah

   Anggota tim adalah pejabat dan staf yang benar-benar siap dalam hal waktu, dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja Perangkat Daerah.

b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah

   Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

c. Penyusunan Agenda Kerja

   Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja sampai dengan penetapan Renja Perangkat Daerah

d. Pengumpulan Data dan Informasi

   Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut :

   1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis
   2) Mengumpulkan data/informasidari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
   3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Rencana Renja Awal Awal Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah agar terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan Perangkat Daerah dengan rencana tahunan propinsi dan nasional, maka dalam menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerah harus berpedoman

juga kepada arah kebijakan pembangunan Propinsi dan Nasional sehingga akan memudahkan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Solok Selatan.

Bahwa proses perencanaan daerah dimulai dengan penyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun. Untuk penjabaran teknis RPJMD, disusunlah Renstra Perang Daerah sebagai penentu arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan yang juga untuk masa waktu 5 tahunan. Untuk perencanaan tahunan daerah disusunlah RKPD sebagai dokumen yang memuat prioritas program dan kegiatan. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.

Berpedoman pada Renstra perangkat daerah dan RKPD, maka setiap Perangkat Daerah akan menyusun rencana kerja tahunan berupa Renja untuk pencapaian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Setelah finalisasi Renja, akan disusun KUA dan PPAS Perangkat Daerah yang berisi uraian program dan kegiatan, sasaran, indikator sasaran yang ingin dicapai serta besaran pagu dana per kegiatan. Berdasarkan PPAS akan disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berisi uraian belanja per kegiatan yang nantinya menjadi dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD).

I.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) mengacu kepada :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5280)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pembebtukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4348);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dab Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025

14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 -2026 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organiasasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan.
17. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 52 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Renja Awal Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan,kebijakan pembangunan (satu) tahun kedepan pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.
2. Sebagai alat evaluasi capaian kinerja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
3. Dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 dan pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Awal Renja ini dibagi kedalam beberapa bab yang berisikan materi- materi yang terdiri dari :

Bab I **Pendahuluan**

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II **Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III **Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Indikator dan target kinerja Program dan kegiatan pelayanan pada tahun rencana. Kebutuhan satuan kegiatan, menentukan dana indikatif tahun rencana (tahun 2025), memperkirakan dana indikatif tahun yang akan datang (Tahun) serta sumbernya.

BAB V **Penutup**

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaan dengan memperhatikan hal berikut :

1. Kebijakan perencanaan program dan kegiatan
2. Pelaksanaan rencana program dan kegiatan
3. Hasil rencana program dan kegiatan

Program kerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan yang telah dilaksanakan selama ini masih belum optimal dan banyak dijumpai berbagai masalah dan hambatan yang akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja pada masing-masing program yang berasal dari seluruh sumber dana baik dari APBD Kabupaten Solok Selatan, APBN pada Tahun 2025, sebagai berikut :

Pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan, untuk Progam dan Kegiatan :

A. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah. Dengan beberapa kegiatan dibawahnya diantaranya

1. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase singkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan inidkator capaian Presentase tertib administrasi keuangan
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase tertib Administrasi umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Persentase Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan indikator kinerja Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten dan Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.pada program ini ada beberapa kegiatan diantaranya
   1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Luas Wilayah Sungai yang di kelola
   2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik
c. Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator kinerja Akses air minum layak dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja kegiatan Persentase jumlah MCK yang di kelola
d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan indikator kinerja Presentase sistem drainase yang berfungsi dengan baik dengan kegiatan :

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja kegiatan Pesentase panjang sistem drainase yang dikelola

e. Program Penataan Bangunan Gedung dengan indikator kinerja Persentase Bangunan gedung pemerintah yang layak fungsi dan dengan kegiatan diantaranya :
   1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah Bangunan gedung pemerintah yang memiliki sertfikat laik fungsi
f. Program penyelenggaraan jalan dengan indikator kinerja program Tingkat kemantapan jalan kabupaten dan Tingkat kemantapan jembatan kabupaten, program ini ada satu kegiatan
   1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja kegiatan Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang dan Jumlah Jembatan Kabupaten kabupaten dalam kondisi baik dan sedang
g. Program pengembangan jasa konstruksi dengan indikator kinerja program Persentase Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi, program ini memiliki satu kegiatan
   1. Penyelenggaraan Sistem Imformasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten /Kota dengan indikator Terselenggranya Sistem Informasi Jasa Konstruksii cakupan daerah kabupaten
h. Program penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator kinerja program Presentase kesesuaian pemamfaatan ruang dengan rencana tata ruang, program ini memiliki kegiatan diantaranya :
   1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah Dokumen tata ruang yang telah dietetapkan dengan peraturan bupati
   2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah laporan koodinasi dan singkronisasi pemamfaatan ruang daerah kabupaten

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah dokumen koordinasi dan singkronisasi pengendaliaan ruang daerah

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan indikator kinerja program Persentase tanah garapan yang telah diselesaikan, dengan kegiatan

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja kegiatan persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan indikator kinerja program Persentase masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang difasilitasi dapat digunakan untuk pembangunan dengan kegiatan

1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah dokumen permasalahan pertanahan yang telah dilaksanakan

Faktor-faktorakibat tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target Kinerja Program/ Kegiatan adalah

➢ **Sub Bagian Sekretariat**

- Penyelenggaraanpengelolaan barang milik daerah belum optimal;
- Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat;
- Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan programdan kegiatan Dinas belum optimal;
- Belum ada kode etik/aturan perilaku yang diintemalisasikan dengan baik;
- Pendapatan/Sistem Penggajian belum berbasis kinerja;
- Pernyataan Kode Etik/Pemyataan Integritas belum disusun/ditandatangani;
- Belum adanya unit kbusus yang menangani pengaduan masyarakat;
- Strategi dan perencanaan kompetensi pegawai belum disusun;
- Pemantauan kompetensi SOM belum efektif;

- Belum optimalnya data dan informasi Dinas yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- Belum dilakukan pelatihan yang memadai sebelum pegawai menduduki posisi penting;
- SOP/Prosedur untuk penilaian kompetensi pegawai belum ada;
- Belum ada assesment/penilaian kompetensi dari individu kunci;
- Kesesuaian keahlian dengan uraian tugas belum diperhitungkan dalam penilaian kinerja;
- Belum seluruh pegawai dapat diandalkan untuk mencapai tujuan pengendalian intern;
- Belum seluruh resiko pengendalian dan ketaatan telah disusun;
- Kepemimpinan organisasi belum memadai;
- Proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi belum dilakukan secara berkala;
- Program perencanaan dan anggaran pengembangan SDM belum memadai;
- Evaluasi kinerja manajemen belum dilaksanakan secara periodik;
- Peran aktif Oinas sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam urusan PekerjaanUmum Tata Ruang dan Pertanahan masih perlu ditingkatkan;
- Keterbatasan SDM, di mana Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan masih membutuhkan jumlah pegawai yang cukup banyak serta siap pakai denganlatar belakang pendidikan teknik sipil ekonomi Pembangunan/Akuntansi;
- Minimnya Fasilitas kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam mendukung fungsi perencanaan dan pengawasan;
- Minimnya fasilitas pendukung kerja seperti alat ukur teodolit, GPS, Laptop,Komputer dan lain lain;
- Belum adanya Workshop dan bengkel untuk mendukung pelayanan alat berat;
- Belum Adanya fasilitas Laboratorium.

➢ **Sub Bagian Perencanaan**

Pada Sub Bagian Penyusunan Program di 10 item tugas pokok dan fungsi sub bagian perencanaan, terdapat permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas bidang-

bidang lainnya di Dinas PU Tata Ruang dan Pertanahan. Permasalahan dimaksud adalah :

- Belum tersedianya data base jalan lingkungan yang memadai sebagai pedoman dalam pemrograman betonisasi jalan lingkungan yang diprioritaskan Kepala Daerah terpilih;
- Belum tersedianya dokumen Rencana lnduk Sistem Jaringan Drainase Skala Kabupaten, sebagai pedoman pokok untuk pemrograman kegiatan-kegiatan pengendalian banjir di Kabupaten Solok Selatan. Untuk penuntasan pengendalian banjir di Kabupaten Solok Selatan diperlukan grand disain program dan kegiatan pengendalian banjir dan genangan pada seluruh kawasan administrasi kota agar mampu rnensinergikan sernua system drainase yang ada di Kabupaten. Jika dibandingkan dengan panjang jalan kabupaten yaitu 1.980,58 km, berarti panjang drainase yang ideal minimal 2 kali panjang jalan atau 3.961,16 km. Dari sini terlihat perlunya dilakukan pendataan/studi tentang drainase skala kabupaten. Selain itu Rencana lnduk Sistern Jaringan Drainase Skala Kabupaten juga diperlukan dalam mengusulkan dana untuk APBD Propinsi dan APBN karena itu merupkan salah satu syarat dalam pengusulan dana.
- Belum tersedianya dokumen Rencana lnduk Sistem Jaringan Drainase Skala Kabupaten, sebagai pedoman pokok untuk pemrograman kegiatan-kegiatan pengendalian banjir di Kabupaten Solok Selatan. Untuk penuntasan pengendalian banjir di Kabupaten Solok Selatan diperlukan grand disain program dan kegiatan pengendalian banjir dan genangan pada seluruh kawasan administrasi kota agar mampu rnensinergikan sernua system drainase yang ada di Kabupaten. Jika dibandingkan dengan panjang jalan kabupaten yaitu 1.980,58 km, berarti panjang drainase yang ideal minimal 2 kali panjang jalan atau 3.961,16 km. Dari sini terlihat perlunya dilakukan pendataan/studi tentang drainase skala kabupaten. Selain itu Rencana lnduk Sistern Jaringan Drainase Skala Kabupaten juga diperlukan dalam mengusulkan dana untuk APBD Propinsi dan APBN karena itu merupkan salah satu syarat dalam pengusulan dana.

- Belum tersedianya Rencana Indusk Sistern lrigasi yang up-to-date. Dokumen perencanaan jaringan irigasi yang ada baru perencanaan inventarisasi skerna petak dan jaringan, yang sudah dilengkapi dengan data parcial, luas lahan pertanian sawah yang sebenarnya, dan itu baru sebagian daerah lrigasi (DI) belum secara keseluruhan.
- Belum tersedianya Data Base Gedung perkantoran di Kabupaten Solok Selatan.

➢ **Bidang Bina Marga**

- Kebutuhan pemenuhan Prasarana Jalan yang mendukung Sistem transportasi yang layak.
- Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik daerah dan nasional.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
- Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
- Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet.
- Mengantisipasi pertumbuhan persentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada wilayah perkotaan.
- Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan jalan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.
- Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub- bidang jalan, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
- Keterbatasan pemeliharaan baik bagi pemanfaat, pengguna, maupun pemilik.

- Keseimbangan pemerataan pembangunan antar Daerah kawasan berkelanjutan.
- Mempertahankan kemampuan tingkat layanan yang terprogram dan terintegrasi berkelanjutan dan berdampak bertumbuh berkembang berfungsi secara baik dan potensial.
- Mengantisipasi laju pertumbuhan pengguna pemanfaat jalan yang pertumbuhan peningkatan secara global dan terus meningkat.
- Sulitnya dalam pembebasan lahan dikarenakan masyarakat kerap tidak setuju dengan nilai ganti rugi sedangkan sistem pembayaran ganti rugi harus didasarkan pada penilaian konsultan independen.

➢ **Bidang PSDA**

- Belum optimalnya fungsi jaringan Irigasi Teknis dalam mendukung produksi pertanian
- Masih terdapat kawasan persawahan yang belum dilayani irigasi teknis dan hanya mengandalkan irigasi non teknis
- Kurangnya tenaga operasional (penjaga pintu air) sehingga pengaturan dan pemeliharaan jaringan irigasi tidak terlaksana dengan baik, sehingga mengakibatkan sarana yang ada tidak bermanfaat sebagai mana mestinya. Untuk masa yang akan datang diharapkan penambahan tenaga operasional agar irigasi yang ada dapat terjaga dan berfungsi dengan baik.
- Masih banyaknya bangunan-bangunan disetiap irigasi yang belum dibangun sehingga air yang mengalir disaluran tidak sesuai dengan kebutuhan di areal pertanian sehingga mengakibatkan kebutuhan air di areal pertanian tersebut tidak terpenuhi dengan baik.

➢ **Bidang Tata Ruang dan Pertanahan**

- Perkada tentang RDTR belum ditetapkan sehingga belum Tersedianya informasi mengenai RDTR wilayah kabupaten/kota melalui peraturan dan peta
- Pengembangan Kawasan sesuai dengan rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang tertuang di dalam RTRW masih lambat pelaksanaannya
- Koordinasi tim koordinasi penataan ruang daerah cenderung masih terpusat di bidang tata ruang dan pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan, anggota dari Dinas lain cenderung pasif.

- Peraturan yang berhubungan dengan penataan ruang sering berubah
- Belum optimalnya pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang dan pengaturan ruang.
- Sulitnya dalam pembebasan lahan dikarenakan masyarakat kerap tidak setuju dengan nilai ganti rugi sedangkan sistem pembayaran ganti rugi harus didasarkan pada penilaian konsultan independen.
- Rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik (persentase tentang luas tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik).
- Sulitnya sertifikasi tanah ex Erpacht untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.
- Penyelesaian konflik HGU dan tanah terlantar untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat (perubahan sertifikat HGU dan penerbitan sertifikat baru).
- Sulitnya proses pembebasan tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum.

Pada Tahun 2023 dapat dilihat Capaian Kinerja pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten	40,00	38,75
2		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	29,13	29,91

1. Target kinerja indeks kondisi jaringan irigasi wewenang kabupaten pada tahun 2023 tercapai dengan baik, karena adanya Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Peningkatan Jaringan Irigasi, dan Kegiatan Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi, walaupun masih ada beberapa irigasi yang tidak terpelihara dengan baikkarena tidak adanya petugas irigasi

dilapangan seperti juru, ppa dan penjaga bendungDalam Penggunaan Anggaran Tahun 2023 khusus untuk Peningkatan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi telah mencapai Irigasi Wewenang kabuptaen yang kondisi baik sekitar 1,09 % sehingga irigasi kondisi Baik Tahun2023 29, 91% dari 9199 Ha Areal Sawah, dan kondisi rusak sedang 61,7 % dan Kondisi Rusak Berat sekitar 19,40%, dimn telah melebihi target 2023

2. Dari luas Daerah rawan banjir yaitu 20710,89Ha telah ditangani melalui Pembangunan Infrastruktur sungai dengan luas 8118,6 Hektar yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Solok selatan. Pembangunan infrastruktur meliputi perkuatan tebing berupa Pasangan batu dan beton bertulang di sepanjang Aliran Sungai di daeran rawan longsor tebing sungai. kemudian juga dialakukan normalisasi di sepanjang sungai yang mengalami pendangkalan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Akses Air Minum dan Akses Sanitasi Masyarakat	Persentase air minum layak	82,50	0
1.		Persentase sanitasi layak	55,01	55,33

1. Pada Pekerjaan Persentasi Sanitasi Layak akibatnya tidak tercapa target tahun 2023 adalah dikarenakan tidak ada kegiatan fisik untuk dana DAK dan hanya ada SPPD, Pekerjaan tambahan di DPA Perubahan baru pembangunan resevoar dan belum ada penyaluran ke Rumah Tangga. Dharapkai tahun berikutnya akan ada dana untuk pekerjaan sambungan Rumah tangga dari resevoar yang sudah di bangun.
2. Pada Pekerjaan Sanitasi layak hanya ada SPPD dan satu pekerjaan fisik, yaitu pekerjaan Sanitasi pembangunan MCK Mesjid Nurul Pasti Rimbo Tangah. Mengingat sanitasi layak merupakan salah satu cara untuk mengurangi Stunting, maka perlu anggaran yang cukup untuk pembangunan sarana dan prasarana sanitasi seperti Sistem pengelolaan air limbah terpusat. Untuk itu perlu usulan -usulan

pembangunan sanitasi dari nagari-nagari. Kemudian dilakukan pengusulan ke Pemerintah Pusat melalui dana DAK.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang Laik Fungsi	3,75	2,81

Kegiatan fisik di tahun 2023 berjumlah 4 Paket pekerjaan. Dari jumlah tersebut ada 1 (satu) paket pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan, yaitu Pekerjaan Lanjutan Kantor Bupati. Pekerjaan ini tidak dapat terselesaikan sesuai dengan kontrak dan anggaran yang tersedia karena rekanan yang terpilih sebagai pemenang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang sudah di tanda tangani (*wan prestasi*).

Tahun 2024, dana pekerjaan Lanjutan Kantor Bupati masih dianggarkan dengan target siap dan bisa dimanfaatkan. Untuk itu perlu pemilihan pelaksana pekerjaan yang betul-betul professional yang mempunyai tenaga ahli dan pengalaman yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan gedung. Dengan harapan tidak akan terjadi lagi *wan prestasi* sehingga pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan target yang dibebankan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Meningkatnya pengelolaan sistem drainase	Persentase sistem drainase yang berfungsi dengan baik	36,00	36,00

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan sepanjang 706 M dari 17.650 M drainase yang perlu dibangun dan di tingkatkan . Dari data tersebut di dapatkan indeks Pkerjaan Drainase sebesar 4 % , di tahun 2022 nilai indeks drainase masih 32 % maka terealisasi target sesuai dengan target yang di tetapkan yaitu 36%

	Meningkatnya aksesbilitas dan konektivitas antar wilayah	indeks kesulitan geografis		
1		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	46,49	51,67
2		Tingkat kemantapan jembatan kabupaten	82,00	80,97

1. Tingkat Kemantapan Jalan

   Target kinerja Indeks Konektivitas Jalan pada tahun 2023 dapat dicapai. Hal ini karena terlaksananya sub kegiatan Rekonstruksi Jalan, Pelebaran Jalan Menuju Standar dan Rehabilitasi Jalan yang berpengaruh pada kondisi jalan mantap, yang pada akhirnya akan meningkatkan konektivitas jalan.

   Dalam pengunaan anggaran tahun 2023 khususnya dalam peningkatan infrastruktur jalan terdapat peningkatan kemantapan jalan sebesar 1,07%. Pada akhir Tahun Anggaran 2023 nilai kemantapan jalan kabupaten adalah 51,67%, ini menggambarkan bahwa dari total panjang Jalan Kabupaten 1.178,132 KM sesuai Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 600.219-2016 tentang Penambahan Ruas - Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, 51,67% atau sepajang 608,74 KM berada dalam kondisi Baik dan Sedang . Kemantapan Jalan ini melebihi target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan target 50,09%

2. Tingkat Kemantapan Jembatan

   Target kinerja Indeks Kemantapan Jembatan Kabupaten pada tahun 2023 dapat dicapai. Hal ini karena terlaksananya sub kegiatan Pemeliharaan Jembatan, yang berpengaruh pada kondisi jembatan mantap, yang pada akhirnya akan meningkatkan konektivitas antar wilayah.

   Dalam pengunaan anggaran tahun 2023 khususnya dalam pembangunan dan pemeliharaan rutin jembatan terdapat peningkatan kemantapan jembatan sebesar 1,33%. Pada akhir Tahun Anggaran 2023 nilai kemantapan jembatan kabupaten adalah 80.97 %, ini menggambarkan

bahwa terdapat 186 jembatan kabupaten dalam kondisi mantap dari total 226 jembatan kabupaten.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Meningkatnya tata kelola pertanahan dan kesesuaian pemanfaatan ruang dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	100	100
		Persentase pemenuhan tanah untuk pembangunan	100	100

Berikut disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II yang disajikan pada Tabel 2.2 berikut

Hasil Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagaimana pada Tabel 2.2 berikut :

TABEL 2.2

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan

Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi-2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024) %		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5 x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	
		BELANJA LANGSUNG		0	0																				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			0	723.235.545.616	92	273.001.199.192	0	133.335.221.210		1.711.915.022		3.648.105.037			0			5.360.020.059		278.361.219.251		38,488	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah	%	100	71.649.212.701		34.653.310.204	100	12.603.360.050		1.706.328.822		3.046.174.950			0			4.752.503.772		39.405.813.976		54,998	
		Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase singkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daera	%	100	527.500.000	100	14.552.327	100	85.000.000							0					14.552.327		2,759	
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	125.000.000		-	7	20.000.000									0	0		-	0	0,000	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	5	102.500.000		-	5	15.000.000			1	25					1	25	25	25	500	0,000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	300.000.000		14.552.327	4	50.000.000			1	30					1	30	30	14.552.357	750	0,049	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Presentase tertib administrasi keuangan	%	100	47.472.797.366		19.492.960.003	100	7.703.899.501		1.139.135.146		2.525.794.145						3.664.929.291		10.251.700.683		21,595	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	68	43.910.114.866	183	12.567.640.952	68	7.033.899.501	60	1.046.555.146	58	1.055.249.395					118	2.101.804.541	179	14.669.445.493	263,2352941	33,408	
		Belanja Tambahan Penghasilan ASN		Dokumen	12	3.522.682.500	183	6.018.814.051		-		-		1.375.914.750					0	1.375.914.750	61	7.394.728.801	508,3333333	209,918	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	orang	13	-	13	906.505.000	13	660.000.000	13	92.580.000	13	91.930.000					26	184.510.000	26	1.091.015.000	200	0,000	
			Jumlah tenaga pengelola keuangan yang dibayarkan honorariumnya	Laporan	5	40.000.000	1	809.998.500	5	-		-		0				20	0		-	809.998.500	0	2024,996	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun							10.000.000		-		0					0	-	-	-		0,000	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN							12	52.000.000	12	-		2.700.000					12	2.700.000	12	2.700.000	0	0,000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	100	66.000.000		-	100	66.000.000		-		-						-		-		0,000	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stel	64	64.000.000			64	16.000.000		-		0					0		-	-	0	0,000	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	200.000.000			10	50.000.000		-		0					0		-	-	0	0,000	

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi umum Perangkat daerah Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.077.000.000		1.144.584.144	100	1.045.000.000		145.932.500		224.157.211			0			370.089.711		903.800.222		83,918	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	35	50.000.000	6	14.848.000	5	10.000.000		-		-					0	-	-	14.848.000	0	29,696	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	627.700.000	10	124.902.979	12	150.000.000	3	-		118.231.625					3	118.231.625	3	243.134.604	25	38,734	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	15.000.000	15	4.836.500	10	15.000.000	2	1.185.000	1	720.000				5	3	1.905.005	3	6.741.505	30	44,943	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	200.000.000	33	88.249.424	12	35.000.000	1	-		6.469.300				9	1	6.469.309	13	94.718.733	108,3333333	47,359	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	70	35.000.000		236.509.296	10	35.000.000	1	910.000		-				15	1	910.015	1	237.419.311	1,428571429	678,341	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1441	3.222.750.000	480	675.237.945	240	800.000.000	50	143.837.500	50	98.736.286					100	242.573.786	340	917.811.731	23,59472588	28,479	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah yang disediakan		100	2.401.480.363		12.144.696.500	100	2.579.010.549		-		-				550000		-		-		0,000	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	51	-		-	0	500.000.000		-		0					0	-	-	-	0	0,000	

		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	11	14.310.858.585	11	12.144.696.500	2	2.079.010.549				0					0	-	-	12.144.696.500	0	84,864	
								-														-	0	0,000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24.681.531		24.738.000.000								37		-		-		0	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1		1	24.738.000.000							0		0		-	-	0	0,000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42.597.663		42.989.700.000										-		-		0,000	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1		1	42.989.700.000									0	-	-	-	0	0,000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah yang disediakan	%	100	65.040.000		124.277.282	100	355.750.000		90.646.926		56.907.116				45		147.554.042		182.302.460		280,293	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	5.160.000	12	4.500.000	4	5.000.000		300.000		-					0	300.000	4	4.800.000	100	93,023	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah daya listrik yang terpakai	Laporan	84	226.550.000		82.442.282	12	35.000.000	2	6.588.926	2	6.907.116					4	13.496.042	16	95.938.324	19,04761905	42,348	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	44	82.590.000	12	37.335.000	4	15.750.000	1	8.758.000							1	8.758.000	5	46.093.000	11,36363636	55,809	
		Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4				4	300.000.000	1	75.000.000	1	50.000.000					2	125.000.000	2	125.000.000	50	#DIV/0!	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	%	100	3.049.306.750		1.732.239.948	100	768.700.000		330.614.250		239.316.478			0			569.930.728		708.572.056		23,237	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	126	2.121.106.750	21	899.379.978	8	348.700.000	3	65.751.125		15.203.000				14	3	80.954.139	3	980.334.117	2,38 0952 381	46,218	
			Terpeliharanya peralatan/alat berat	Unit	12	-		-	0										0			-	0	0,000	
			0	0	165	-		-	33										0			-	0	0,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	0	928.200.000	14	832.859.970	14	220.000.000		264.863.125		224.113.478				10	0	488.976.613	-	1.321.836.583	0	142,409	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-		1	200.000.000									0	-	-	-	0	0,000	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas wilayah sungai yang dikelola Luas Wilayah Sungai yang di kelola	%	55	54.659.711.458		22.281.278.954	55	9.737.500.000				8.460.000						8.460.000		22.289.738.954		40,779	
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	32,25	-			32,25			-													
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Sungai yang di kelola	Ha	360	11.469.286.466		7.093.716.064	360	2.450.000.000		-		4.800.000			0	98,85		4.800.000		2.382.704.950		20,775	

		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokuman Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	6	661.667.500	13	241.754.500	1	150.000.000		-		4.800.000					0	4.800.000	-	246.554.500	0	37,263	
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Pembangunan Embung	Unit	3	-	-	-	0	1.000.000.000		-		-			0		0	-	-	-	0	0,000	
		Pembangunan bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Km	17	6.517.334.858	70	4.914.228.400	3	1.000.000.000		-		-					0	-	-	4.914.228.400	0	75,402	
		Normalisasi/Restorasi Sungai	panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	11,5	2.290.284.108	29	1.937.733.164	2	300.000.000		-		-					0	-	-	1.937.733.164	0	84,607	
		Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara																0		-		0	0,000	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik	%	38	8.827.867.188		13.021.285.546	38	7287500000		0		3660000						3.660.000		6.082.483.876		68,901	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen Perencanaan Irigasi	Dokumen	10	770.228.500	4	320.870.100	2	-				3.660.000					0	3.660.000	-	324.530.100	0	42,134	
		Peningkatan Jaringan Irugasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	M	1240	6.000.000.000	1.147	3.560.888.900	320								0		0	-	-	3.560.888.900	0	59,348	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	M	1650	33.332.385.439	1.150	9.445.389.620	300										0	-	-	9.445.389.620	0	28,337	
			(DAU)	0	0	-		542.069.900	0										0	-	-	542.069.900	0	0,000	
			(DAK)	0	0	-		-	0										0	-	-	-	0	0,000	

		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Ha	4000	3.087.811.053	847	1.318.344.370	600										0	-	-	1.318.344.370	0	42,695	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses air minum layak	%	90	45.044.943.750		8.877.205.631	90	8.981.875.000								0				8.877.205.631		19,707	
		Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPAM yang dikelola	%	100	45.044.943.750		8.877.205.631	100	8.981.875.000		-	-					0		-		-		0,000	
		Pembangunan spam jaringan perpipaan dikawasan pedesaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	SR	42150	2.136.785.000	800	505.130.000	2000	423.500.000									0	-	-	505.130.000	0	23,640	
			DAU	0	0	-		-	0										0	-	-	-	0	0,000	
			DAK	0	0	-		-	0										0	-	-	-	0	0,000	
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	SR	6410	5.741.000.000	201	1.044.455.074	800	1.100.000.000							0		0	-	-	1.044.455.074	0	18,193	
			Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman (sambungan jaringan air minum/pamsimas dan hibah air minum pedesaan)	SR	17497	14.667.158.750	201	7.321.940.557	800	2.958.375.000							0		0	-	-	7.321.940.557	0	49,921	
			(DAU)	0	0	-			0	50.000.000								0	0	-	-	-	0	0,000	
			(DAK)	0	0	3.139.633.750			0	2.908.375.000									0	-	-	-	0	0,000	
			Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	SR	8986	22.500.000.000		5.680.000	1250	4.500.000.000									0	-	-	5.680.000	0	0,025	
			(DAU)	0	0	-			0	2.000.000.000									0	-	-	-	0	0,000	
			(DAK)	0	0	-			0	2.500.000.000									0	-	-	-	0	0,000	
			Akses sanitasi layak	%	60	18.048.125.000		5.434.063.000	60										0	-	-	5.434.063.000	0	30,109	
			Persentase jumlah MCK yang di kelola	%	60	18.048.125.000		5.434.063.000	60										0	-	-	5.434.063.000	0	30,109	

			Jumlah MCK yang dibangun	Unit	25	5.433.539.000		1.684.975.000	5										0	-	-	1.684.975.000	0	31,011	
			IPAL Kombinasi MCK dan penunjang	Unit	23	12.614.586.000			4										0	-	-	-	0	0,000	
			(DAU)	0	0	-			0										0	-	-	-	0	0,000	
			(DAK)	0	0	-			0										0	-	-	-	0	0,000	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Akses sanitasi layak					5.735.500.000		3.651.875.000	-	-				0			-		5.735.500.000		#DIV/0!	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah MCK yang dl kelola					5.735.500.000		3.651.875.000	-	-				0			-		5.735.500.000		0,000	
		Pembangunan/ Penyediaan Sub sistem pengolahan setempat	Jumlah MCK yang dibangun					1.702.535.000		1.076.900.000									0	-	-	1.702.535.000	0	0	
		Pembangunan /Penyediaan Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	IPAL Kombinasi MCK dan penunjang				10	4.032.965.000		2.574.975.000									0	-	-	4.032.965.000	0	0	
			(DAU)																0	-	-	-	0	0	
			(DAK)																0	-		-	0	0	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang sistem drainase yang dikelola Pesentase panjang sistem drainase yang dikelola	%	50	40.572.888.323		13.512.577.343	50	7.700.000.000	-	-				0			-		13.512.577.343		33,304	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase panjang sistem drainase yang dikelolal	%	0	40.572.888.323		13.512.577.343	0	7.700.000.000	-	-				0			-		1.276.402.408		3,146	
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang ditingkatkan	Km	12,65	9.871.888.323	13	11.806.589.343	3	2.200.000.000				-					0	-	13	11.806.589.343	98,81422925	119,598	
		Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Panjang sarana dranase Perkotaan yang disediakan	Km	26	19.919.000.000	6	1.190.758.000	3	3.300.000.000				-					0	-	6	1.190.758.000	23,07692308	5,978	
		Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Pembangunan Dranase lingkungan	Km	2,8	6.141.000.000	1	515.230.000	0,6	1.100.000.000				-					0	-	1	515.230.000	35,71428571	8,390	

		Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Panjang sarana dranase Lingkungan yang disediakan	Km	2	4.641.000.000	-		0,5	1.100.000.000				-					0	-	-	-	0	0,000	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan gedung pemerintah yang layak fungsi	%	2,5	71.395.995.304		21.917.174.445	2,5	2.000.000.000		-		2.200.000			0			2.200.000		21.919.374.445		30,701	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung Pemerintah yang layak fungsi Jumlah Bangunan gedung pemerintah yang memiliki sertifikat laik fungsi	Unit	12	71.395.995.304		21.917.174.445	2	2.000.000.000		-		2.200.000			0			2.200.000		1.283.798.809		1,798	
		Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Bangunan yang memiliki persyaratan layak fungsi	Unit	15	1.850.000.000	5	244.655.400	2	550.000.000		-	1	2.200.000					1	2.200.000	6	246.855.400	40	13,344	
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan infrastruktur yang dibangun	Unit	14	68.520.995.304	-	21.425.227.790	2	1.200.000.000		-							0	-	-	21.425.227.790	0	31,268	
		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	umlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Unit	8	1.025.000.000	-	247.291.255	1	250.000.000		-							0	-	-	247.291.255	0	24,126	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	55	419.707.709.985		165.673.453.853	55	88.293.750.000		5.586.200		589.470.087			0			595.056.287		166.268.510.140		39,615	

			Tingkat kemantapan jembatan kabupaten	%	90	-			90																		
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang Panjang JembatanKabupaten dalam Kondisi baik dan sedang Jumlah Jembatan Kabupaten kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	Km	647,97	419.707.709.985		165.673.453.853	647,9704	88.293.750.000		5.586.200		589.470.087			0			595.056.287		47.417.305.917		11,298	
			Jumlah Jembatan Kabupaten kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	Unit	227	-		-	227			-		-						-		-		0,000	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan JaringanJalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	37	4.143.261.000	14	2.079.178.938	6	600.000.000		-		-						-	14	2.079.178.938	37,83783784	50,182	
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Dokumen	14	2.723.245.000	18	405.592.900	2	650.000.000		-		-					0	-	18	405.592.900	128,57	14,894	
		Pembangunan Jalan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Km	1547,8	6.808.141.500	7	3.098.020.300	4	1.000.000.000		5.586.200		589.470.087					0	5.586.200	7	3.103.606.500	0,45	45,587	
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruks	Km	1680,5	217.602.535.891		126.561.204.968	33,17	39.021.875.000		-		-					0	-	-	126.561.204.968	0	58,162	
			(DAU)	0	0	-		-	0	21.500.000.000		-		-					0	-	-	-	0	0	
			(DAK)	0	0	-		-	0	17.521.875.000		-		-					0	-	-	-	0	0	
		Rehabilitasi Jalan	anjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	1549,5	51.697.616.364		6.858.061.259	6,666666667	17.521.875.000		-		-					0	-	-	6.858.061.259	0	0	
			(DAU)	0	0	-		-	0	8.500.000.000		-		-					0	-	-	-	0	0	

			(DAK)	0	0	-		-	0	4.000.000.000		-		-					0	-	-	-	0	0	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	1665,8	9.000.000.000	3.905	4.019.603.042	32	4.500.000.000		-		-					0	-	3.905	4.019.603.042	234,417677	44,662	
		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Unit	281	113.170.354.751	15	18.167.093.020	4	22.000.000.000		-		-					0	-	15	18.167.093.020	5,338078292	16,053	
			(DAU)	0	0	-		-	0	10.000.000.000		-		-					0	-		-	0	0	
			(DAK)	0	0	-		-	0	12.000.000.000		-		-					0	-		-	0	0	
		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Unit	276	9.562.555.479	16	1.626.298.165	4	2.000.000.000		-		-					0	-		1.626.298.165	0	17,007	
		Rehabilitasi Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhab secara rutin	Unit	353	5.000.000.000	65	2.858.401.261	20	1.000.000.000		-		1.800.000					0	-		2.858.401.261	0	57,168	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi	%	100	208.494.045		36.890.900	100	41.861.160				1.800.000			0			1.800.000		38.690.900		18,557	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah/Kabupaten /KOta	Terselenggaranya Sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kabupaten	Laporan	1	208.494.045		36.890.900	1	41.861.160				1.800.000			0			1.800.000		1.800.000		0,863	
		Penyususnan data dan informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah tenaga dan badan usahan bersertifikat	Dokumen	5	126.925.614	1		1	25.000.000		-		-					0	-	1	-	20	0,000	
		Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Adanya data ketersediaan/ Penggunaan Material dan peralatan	Dokumen	5	81.568.431	2		1	16.861.160				-					0	-	2	-	40	0,000	
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan		100		-		100	16.860.900			1	1.800.000					1	1.800.000	1	1.800.000	1	0	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase kesesuaian pemamfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	100	1.948.465.050		313.807.862	100	325.000.000		-		-								313.807.862		16,105	

		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen tata Ruang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jumlah Dokumen tata ruang yang telah dietetapkan dengan peraturan bupati	Dokumen	0	1.522.146.050		257.493.192	0	245.000.000		-		-			0					43.623.731		2,866	
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	umlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Laporan	7	375.917.000	2	133.334.001	1	38.700.000							0				2	133.334.001	28,57142857	35,469	
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang ditetapkan	Dokumen	7	963.076.050	2	124.159.191	1	170.000.000											2	124.159.191	28,57142857	12,892	
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan bideng penataan ruang	Jumlah Sosialisasi perundang - undangan	Kali	81	183.153.000		-	15	36.300.000											-	-	0	0,000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koodinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten	Laporan	1	261.790.000		-	1	50.000.000												-		0,000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah rekomendasi pemfaatan ruang daerah yang dikeluarkan oleh forum penataan ruang daerah	Rekomendasi	70	261.790.000	-	-	10	50.000.000							0					-	0	0,000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabuapaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendaliaan ruang daerah	Dokumen	1	164.529.000		56.314.670	1	30.000.000								2				30.108.670		18,300	
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah laporan Pelaksanaan pengedalian pemamfaatan ruang	Laporan	20	164.529.000		56.314.670	20	30.000.000											-	56.314.670		34,228	

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabuapaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendaliaan ruang daerah		0	-		-	0													-		#DIV/0!	
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah laporan Pelaksanaan pengedalian pemamfaatan ruang																							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0		0	48.079.326.591		30.254.639.937	0	5.300.000.000													30.254.639.937		62,927	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase tanah garapan yang telah diselesaikan	%	50	200.000.000		-	50	50.000.000							0					-		0,000	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	200.000.000		-	100	50.000.000							0					-		0,000	
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	Kasus	20	200.000.000	-	-	5	50.000.000													-	0	0,000	
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang difasilitasi dapat digunakan untuk pembangunan	%	100	5.500.000.000		30.182.848.187	100	5.250.000.000							0					30.182.848.187		548,779	
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen permasalahan pertanahan yang telah dilaksanakan	Dokumen	3	47.879.326.591		30.182.848.187	3	5.250.000.000							0					18.532.215.610		38,706	
		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wall Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	85	168.010.000	3	67.111.000	15	27.500.000											3	67.111.000	3,52 9411 765	39,945	

		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	11,5	47.711.316.591	2	30.187.528.937	1,5	5.222.500.000								1			2	30.187.528.937	17,39130435	63,271	
		0	Jumlah dokumen penyerahan hasil pengadaan tanah	Dokumen	14	-	-	-	2													-	-	0	0	
		0	Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan	Ha	14,5	-	-	-	2		0											-	-	0	0	
						771.314.872.207		303.255.839.129				1.711.915.022		3.648.105.037	0		0			5.360.020.059		308.615.859.188		0,400	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan pertanahan Kabupaten Solok Selatan sebagai dinas teknis dituntut untuk mampu berperan memimpin dan menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum Tata Ruang dan pertanahan.

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dapat di lihat dari hal – hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatnya tingkat perekonomian
3. Lancarnya arus transpotasi orang dan barang
4. Meningkatnya hasil pertanian masyarakat
5. Tersedianya sarana dan prasana olah raga
6. Tesedianya pusat perkantoran dan pemerintahan
7. Bertambahnya jaringan pipa air minum

Sedangkan untuk tingkat ketercapaian target Indikator KinerjaPenyelenggaraan Pemerintah Daerah/Indikator Kinerja Kunci (IKK) UrusanPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 terhadap target Tahunan RPJMD Tahun 2021-2026 pada tahun bersangkutan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Capaian Indikator Penyelenggaran Pemerintah Daerah
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2023-2024

No	Uraian	Sat	2023			2024		
			T	R	TR	T	R	TR
1.	Persentase kesesuaian pemamfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	100	100	100	100	100	100
2.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	%	30	48,44	161,45	35	48,44	138,40
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	27	11,33	41,98	28,1	48,01	170,85
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minummelalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota(Akses air minum layak)	%	78	81,01	103,86	80,05	77,46	96,76
5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses sanitasi layak)	%	60,47	59,57	98,51	61,97	55,33	89,29

6	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100
7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	44,09	60,79	137,89	45,29	46,19	101,98
8	Tingkat Kemantapan jembatan	%	79	78,26	99,06	80	78,26	97,83
9	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	0	0	0	0	0
10	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100

TABEL . 2.4

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG DAN PERTAHAN

KABUPATEN SOLOK SELATAN

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Perangkat Daerah						Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten		IKK	30	35	40	45	50	55	48,44	38,75	38,75				
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		IKK	27,05	28,09	29,13	30,17	31,21	32,25	11,33	43	29,91				
3	Persentase air minum layak	SPM			80,05	82,5	85	88,5	90		77,46					
4	Persentase sanitasi layak	SPM			53,8	55,1	56,3	58,2	60	58,57	55,33	55,33				

5	Persentase bangunan gedung yang Laik Fungsi		IKK	1,25	2,5	3,75	2,5	2,5	2,5		2,5	2,81				
6	Meningkatnya pengelolaan sistem drainase		IKK	30,00	32,00	36,00	38,00	40,00	50,00		50	36,00				
7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten		IKK	44,09	45,29	46,49	47,69	48,89	50,09	60,79	58,25	51,67				
8	Tingkat kemantapan jembatan kabupaten		IKK	79	80	82	85	88	90	78,28	75	80,97				
9	Persentase masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang difasilitasi dapat digunakan untuk pembangunan		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
10	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah yang difasilitasi untuk pembangunan		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
11	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang		IKK	100	100	100	100	100	100	Na	100	100				

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan memerlukan integrasi dari berbagai faktor pendukung organisasi seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya sehingga mampu menjawab setiap perubahan yang terjadi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi. Oleh karena itu Analisa lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi berbagai perubahan untuk mencapai tujuan, baik jangka pendek maupun tujuan jangka menegah.

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan merupakan salah satu instansi pemerintah Kabupaten solok selatan yang secara langsung berperan dalam mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan. Sebagai salah satu Dinas yang terkait dalam menunjang pembangunan sarana dan prasarana daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum sangat membutuhkan SDM dan fasilitas yang memadai.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan masih memiliki banyak kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalah tersebut akan memiliki dampak terhadap pencapaian visi dam misi kepala daerah, serta pencapaian dari program nasional. Kendala itu diataranya adalah :

1. Keterbatasan SDM, dimana Dinas PUTRP masih membutuhkan jumlah pegawai yang cukup banyak serta siap pakai dengan latar belakang pendidikan teknik sipil.
2. Minimnya Fasilitas kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam mendukung fungsi perencanaan dan pengawasan.
3. Minimnya fasilitas pendukung kerja seperti alat ukur theodolit, GPS, Laptop, Komputer dan lain-lain.
4. Workshop sudah ada tapi belum layak digunakan karna perlunya akses jembatan sebagai pendukung dan belum adanya bengkel untuk mendukung pelayanan alat berat.
5. Belum Adanya fasilitas Laboratorium untuk pengujian mutu.
6. Belum meratanya penyediaan kualitas layanan jalan kabupaten tiap kecamatan dalam kondisi mantap

7. Belum optimalnya pemenuhan aksesibilitas jalan menuju pusat kegiatan khususnya daerah pesisir, tertinggal dan terisolir dalam wilayah kabupaten
8. Belum optimalnya penyediaan jaringan irigasi untuk lahan pertanian sesusai dengan kewenangan, baik kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam wilayah kabupaten
9. Masih lemahnya sistem informasi/ database jaringan irigasi untuk mengoptimalkan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
10. Masih belum optimalnya sarana dan prasaran penanggulangan bencana p wilayah sungai pasca bencana banjir.
11. Belum optimalnya penanganan jalan dan drainase skala perkotaan dan pedesaan sehingga menghambat aksesibilitas jalan menuju pusat fasilitas umum dan masih banyak terjadi genangan
12. Belum maksimalnya proses perencanaan, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian tata ruang.
13. Berikut ini diuraikan gambaran perkembangan indikator kinerja Urusan Wajib di Kabupaten Solok Selatan tahun 2018-2022
    a. Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD)
    b. Pendidikan Dasar (SD/MI/Paket A)
    c. Pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK/MA/Paket C
    d. Cakupan Layanan Ibu dan Anak
    e. Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat
    f. Kualitas Kesehatan Masyarakat Solok Selatan
    g. Ketersediaan Sarana Pelayanan Kesehatan Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan
    h. Penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan
    i. pelayanan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar, dan Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Solok Selatan
    j. Pencapaian kinerja pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan

Pada zaman era teknologi pada saat sekarang ini, pelayan kepada masyarakat akan lebih berorientasi kepada pelayanan bersifat langsung melalui media elektronik. Teknologi informasi dan komunikasi akan menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. Salah satu implikasi yang telah dilakukan yaitu dengan menerapkan tender/lelang full elektronik sejak tahun 2012. Diharapkan kedepan pelayan di Dinas PU akan lebih berorientasi kepada sistem elektronik baik dalam hal pengelolaan data (website resmi) maupun yang langsung menyentuh masyarakat umum.

Dampak pencapaian Visi Misi kepla daerah terhadap capian program nasional yang adalah sebagai berikut;

1. Meningkatakan pertumbujhan Ekonomi di Indonesia Umumnya dan di Kabupaten

   Solok Selatan khususnya, sehingga target Mensejahterakan Masyarakat tercapai.
2. Pembangunan Infrastruktur yang baik akan membuka peluang investasi bagi investor baik domestik maupun asing yang pada akhirnya dapat Mendorong Perumbuhan Ekonomi
3. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia
4. Terbukanya Lapangan Kerja Baru selama proses pembangunan dan setelah pembangunan selesai
5. Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi dapat membantu memperluas jaringan transportasi, Komunikasi dan mempermudah perdangangan antar daerah
6. Pembangunan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kwalitas hidup Masyarakat memalaui Akssesibilitas dan Pelayanan public yang lebih baik.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Rencana kerja Tahun Anggaran 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan umum yaitu

"Terwujudnya sinergi pembangun infrastruktur yang berkelanjutan berbasis penataan ruang untuk percepatan pembangan kawasan ibukota dan kawasan strategis cepat tumbuh".

Visi tersebut merupakan tindak lanjut dari visi kepala daerah yaitu **"Mewujudkan Solok Selatan Maju dan Sejahtera"**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum telah menyusun rancangan awal rencana strategis pembangunan untuk 5 tahun kedepan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan yaitu untuk melakukan penataan terkait ibu kota kabupaten, Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan. Disamping itu untuk mewujudkan tercapainya target Standar Pelayanan Minimum Dinas Pekerjaan Umum maka hasil analisis kebutuhan untuk pencapaiaan program tersebut maka akan lebih diprioritaskan kepada beberapa aspek yaitu Bidang Jalan, Irigasi dan Air Bersih.

Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Gambaran kinerja pelayanan sub Urusan Wajib Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatatan tahun 2021-2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Kemantapan Jalan

   Target kinerja Indeks Konektivitas Jalan pada tahun 2023 dapat dicapai. Hal ini karena terlaksananya sub kegiatan Rekonstruksi Jalan, Pelebaran Jalan Menuju Standar dan Rehabilitasi Jalan yang berpengaruh pada kondisi jalan mantap, yang pada akhirnya akan meningkatkan konektivitas jalan.

   Dalam pengunaan anggaran tahun 2023 khususnya dalam peningkatan infrastruktur jalan terdapat peningkatan kemantapan jalan sebesar 1,07%. Pada akhir Tahun Anggaran 2023 nilai kemantapan jalan kabupaten adalah 51,67%, ini menggambarkan bahwa dari total panjang Jalan Kabupaten 1.178,132 KM sesuai Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 600.219-2016 tentang Penambahan Ruas - Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok

Selatan, 51,67% atau sepajang 608,74 KM berada dalam kondisi Baik dan Sedang . Kemantapan Jalan ini melebihi target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan target 50,09%

2. Tingkat Kemantapan Jembatan

   Target kinerja Indeks Kemantapan Jembatan Kabupaten pada tahun 2023 dapat dicapai. Hal ini karena terlaksananya sub kegiatan Pemeliharaan Jembatan, yang berpengaruh pada kondisi jembatan mantap, yang pada akhirnya akan meningkatkan konektivitas antar wilayah.

   Dalam pengunaan anggaran tahun 2023 khususnya dalam pembangunan dan pemeliharaan rutin jembatan terdapat peningkatan kemantapan jembatan sebesar 1,33%. Pada akhir Tahun Anggaran 2023 nilai kemantapan jembatan kabupaten adalah 80.97 %, ini menggambarkan bahwa terdapat 186 jembatan kabupaten dalam kondisi mantap dari total 226 jembatan kabupaten.

3. Target kinerja indeks kondisi jaringan irigasi wewenang kabupaten pada tahun 2023 tercapai dengan baik, karena adanya Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Peningkatan Jaringan Irigasi, dan Kegiatan Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi, walaupun masih ada beberapa irigasi yang tidak terpelihara dengan baikkarena tidak adanya petugas irigasi dilapangan seperti juru, ppa dan penjaga bendungDalam Penggunaan Anggaran Tahun 2023 khusus untuk Peningkatan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi telah mencapai Irigasi Wewenang kabuptaen yang kondisi baik sekitar 1,09 % sehingga irigasi kondisi Baik Tahun2023 29, 91% dari 9199 Ha Areal Sawah, dan kondisi rusak sedang 61,7 % dan Kondisi Rusak Berat sekitar 19,40%, dimn telah melebihi target 2023
4. Dari luas Daerah rawan banjir yaitu 20710,89 Ha telah ditangani melalui Pembangunan Infrastruktur sungai dengan luas 8118,6 Hektar yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Solok selatan. Pembangunan infrastruktur meliputi perkuatan tebing berupa Pasangan batu dan beton bertulang di sepanjang Aliran Sungai di daeran rawan longsor tebing sungai. kemudian juga

dialakukan normalisasi di sepanjang sungai yang mengalami pendangkalan.

5. Pada Pekerjaan Persentasi Sanitasi Layak akibatnya tidak tercapa target tahun 2023 adalah dikarenakan tidak ada kegiatan fisik untuk dana DAK dan hanya ada SPPD, Pekerjaan tambahan di DPA Perubahan baru pembangunan resevoar dan belum ada penyaluran ke Rumah Tangga. Dharapkai tahun berikutnya akan ada dana untuk pekerjaan sambungan Rumah tangga dari resevoar yang sudah di bangun.
6. Pada Pekerjaan Sanitasi layak hanya ada SPPD dan satu pekerjaan fisik, yaitu pekerjaan Sanitasi pembangunan MCK Mesjid Nurul Pasti Rimbo Tangah. Mengingat sanitasi layak merupakan salah satu cara untuk mengurangi Stunting, maka perlu anggaran yang cukup untuk pembangunan sarana dan prasarana sanitasi seperti Sistem pengelolaan air limbah terpusat. Untuk itu perlu usulan -usulan pembangunan sanitasi dari nagari-nagari. Kemudian dilakukan pengusulan ke Pemerintah Pusat melalui dana DAK.
7. Kegiatan fisik di tahun 2023 berjumlah 4 Paket pekerjaan. Dari jumlah tersebut ada 1 (satu) paket pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan, yaitu Pekerjaan Lanjutan Kantor Bupati. Pekerjaan ini tidak dapat terselesaikan sesuai dengan kontrak dan anggaran yang tersedia karena rekanan yang terpilih sebagai pemenang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang sudah di tanda tangani (*wan prestasi*).

   Tahun 2024, dana pekerjaan Lanjutan Kantor Bupati masih dianggarkan dengan target siap dan bisa dimanfaatkan. Untuk itu perlu pemilihan pelaksana pekerjaan yang betul-betul professional yang mempunyai tenaga ahli dan pengalaman yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan gedung. Dengan harapan tidak akan terjadi lagi *wan prestasi* sehingga pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan target yang dibebankan.
8. Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan sepanjang 706 M dari 17.650 M drainase yang perlu dibangun dan di tingkatkan . Dari data tersebut di dapatkan indeks Pkerjaan Drainase sebesar 4 % , di tahun 2022 nilai indeks drainase masih 32 % maka terealisasi target sesuai dengan target yang di tetapkan yaitu 36%

Tabel 2.5

RIVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Rancanga Awal RKPD 2025											Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan (Penting
						BELANJA LANGSUNG				**146.393.250.133**	**BELANJA LANGSUNG**			**80.521.021.775**	
1	**03**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**140.993.250.133**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**79.842.377.175**	
1	**03**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah**	**%**	**100**	**13.390.436.366**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah**	**100**	**12.837.369.220**	
1	**03**	**01**	2.01			**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase singkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah**	**%**	**100**	**87.500.000**	**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase singkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah**	**100**	**39.999.700**	
1	03	01	2.01	01		Penysusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	20.000.000	Penysusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	6		

1	03	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	17.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	19.999.900	
1	03	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	4	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	19.999.800	
	03						Jumlah Laporan Keuangan semester		12			Jumlah Laporan Keuangan semester	12		
1	03	**1**	2,02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase tertib administrasi keuangan**	**%**	**100**	**8.861.803.924**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase tertib administrasi keuangan**	**100**	**9.293.141.620**	
1	03	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	68	8.124.153.924	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	8.530.361.620	
1	03	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	727.650.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	762.780.000	

							Jumlah tenaga pengelola keuangan yang dibayarkan honorariumnya	orang	13	727.650.000		Jumlah tenaga pengelola keuangan yang dibayarkan honorariumnya	13		
1	03	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5		
1	03	**1**	**05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**100**	**66.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**80.000.000**	
1	03	01	05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stel	98	16.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65	30,000.000	
1	03	01	05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	50.000.000	
1	03	01	2,06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase tertib Administrasi umum Perangkat daerah**	**%**	**100**	**1.035.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase tertib Administrasi umum Perangkat daerah**	**100**	**729.986.300**	

1	03	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	9.999.300	
1	03	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2	100.000.000	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	50.000.000	
	03						Jumlah ATK yang disediakan	Paket	2			Jumlah ATK yang disediakan	2		
1	03	01	2.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	10	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	15.003.000	
1	03	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakandan Penggandaan yang Disediakan	paket	9	35.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakandan Penggandaan yang Disediakan	9	35.000.000	
1	03	01	2.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	4	35.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	9	19.995.000	
1	03	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan	4	840.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	240	599.989.000	

1	03	**001**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**2.664.522.442**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**-**	
1	03	001	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1		
1	03	001	2.07	03		pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	2	1.944.522.442	pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2	-	
1	03	001	2.07	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	220.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	-	
1	03	**1**	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**%**	**100**	**50.040.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**100**	**494.250.000**	
1	03	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	40.000	Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	10.000.000	
1	03	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	35.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	36.750.000	

1	03	01	2.08	0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	24.500.000	
1	03	01	2.08	0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	300	423.000.000	
1	03	**1**	2,09				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan**	**%**	**100**	**625.570.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan**	**100**	**2.199.991.600**	
1	03	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	383.570.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	-	
								Terpeliharanya peralatan/alat berat	Unit	0			Terpeliharanya peralatan/alat berat	0		
								Terpeliharanya kendaraan roda dua	Unit	33			Terpeliharanya kendaraan roda dua	33		

1	03	01	2.09	0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	10	242.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	**11**	1.999.991.600	
1	03	001	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200.000.000	
1	03	**2**				**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten**	**%**	25	**10.100.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten**	25	**7.221.981.138**	
	03						**Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi**	**%**	25,69			**Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi**	25,69		
1	03	**2**	2,01			**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Luas Wilayah Sungai yang di kelola**	**Ha**	**360**	**1.450.000.000**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Luas Wilayah Sungai yang di kelola**	**360**	**2.512.070.000**	
1	03	02	2.01	0073		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Pajang Sungai yang di operasi dan yang dipelihara	**Km**			Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Pajang Sungai yang di operasi dan yang dipelihara	**3**	**750.000.000**	

1	03	02	2.01	0093		Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang di pelihara	Km	2,5	300.000.000	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang di pelihara	2	1.150.000.000	
1	03	02	2.01	0109		Pembangunan bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	Km	3	1.000.000.000	Pembangunan bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	3	512.070.000	
1	03	02	2.01	0128		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, danBangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan normalisasi sungai yang disusun	Dokumen	1	150.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, danBangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan normalisasi sungai yang disusun	1	100.000.000	
1	03	02	2.01	01		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Pembangunan Embung	Unit	1		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Pembangunan Embung	1		
1	03	**02**	2.02			**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik**	**%**	**28**	**8.650.000.000**	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik**	**28**	**4.709.911.138**	
1	03	02	2.02	0008		Peningkatan Jaringan Irugasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	M	400,00	2.000.000.000	Peningkatan Jaringan Irugasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	400,00	2.411.230.000	
1	03	02	2.02	0014		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi	M	300	5.900.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi	300	1.348.681.138	
1	03	02	2.02	0022		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Pajang Bendung Irigasi yang diopeasikan yang dipelihara	**Bendung**	**5**	600.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Pajang Bendung Irigasi yang diopeasikan yang dipelihara	**5**	750.000.000	
						Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang di pelihara				Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang di			

												pelihara			
1	03	02	2.02	0022		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen Perencanaan Irigasi	Dokumen	1	150.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen Perencanaan Irigasi	1	200.000.000	
1	**03**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM**	**Akses air minum layak**	**%**	**80,05**	**9.300.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM**	**Akses air minum layak**	**80,05**	**2.000.000.000**	
1	**03**	**03**	**2.01**			**Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SPAM yang dikelola**	**%**	**100**	9.300.000.000	**Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SPAM yang dikelola**	**100**	2.000.000.000	
1	03	03	2.01			Pembangunan spam jaringan perpipaan dikawasan pedesaan	Jumlah sambungan Rumah (SR) spam pedesaan yang dibangun	SR	500	465.850.000	Pembangunan spam jaringan perpipaan dikawasan pedesaan	Jumlah sambungan Rumah (SR) spam pedesaan yang dibangun	500	-	
1	03	03	2.01			Peningkatan spam jaringan perpipaan dikawasan perkotaan	Jumlah sambungan Rumah (SR) spam Perkotaan yang dibangun	Sr	800	1.210.000.000	Peningkatan spam jaringan perpipaan dikawasan perkotaan	Jumlah sambungan Rumah (SR) spam Perkotaan yang dibangun	800	-	
1	03	03	2.01			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman (sambungan jaringan air minum/pamsimas dan hibah air minum pedesaan	SR	800	3.124.150.000	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman (sambungan jaringan air minum/pamsimas dan hibah air minum pedesaan	800		

1	03	03	2.01			Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	SR	1250	4.500.000.000	Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	1250		
1	03	03	2.01	0026		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air minum SPAM (Jaringan Perpipipan yang Di tingkatkan	Liter/ Detik	3		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air minum SPAM (Jaringan Perpipipan yang Di tingkatkan	Liter/ Detik	1.000.000.000	
1	03	03	2.01	0028		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air minum SPAM (Jaringan Perpipipan yang Di Bangun	Liter/ Detik	5		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air minum SPAM (Jaringan Perpipipan yang Di Bangun	Liter/ Detik	1.000.000.000	
1	**03**	**005**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Akses sanitasi layak**	**%**	**53,8**	**3.800.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Akses sanitasi layak**	**53,8**	**700.000.000**	
1	**03**	**005**	**2.01**			**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah MCK yang di kelola**	**%**	**50**	**3.800.000.000**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah MCK yang di kelola**	**50**	**700.000.000**	
1	03	05	2.01	0003		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	IPAL Kombinasi MCK dan penunjang	Unit	2	1.184.590.000	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	IPAL Kombinasi MCK dan penunjang	2	-	

1	03	005	2.01	0006		Pembangunan/ Penyediaan Sub sistem pengolahan setempat	Jumlah MCK yang dibangun	Unit	5	2.615.410.000	Pembangunan/ Penyediaan Sub sistem pengolahan setempat	Jumlah MCK yang dibangun	5		
1	03	005	2.01	0024		Optimalisai Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkantoran	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limabh (SPALD) Terpusat skala perkotaan yang dioptimalisasi	Unit	5		Optimalisai Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkantoran	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limabh (SPALD) Terpusat skala perkotaan yang dioptimalisasi	5	**500.000.000**	
1	03	005	2.01	0041		Penyusunan Rencana Kebijakan, Starategi dan Teknis sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkantoran	Jumlah Dokumen RencanaKebijakan, Starategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limabh (SPALD) Terpusat skala perkotaan yang dioptimalisasi	Dokumen	1		Penyusunan Rencana Kebijakan, Starategi dan Teknis sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkantoran	Jumlah Dokumen RencanaKebijakan, Starategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limabh (SPALD) Terpusat skala perkotaan yang dioptimalisasi	1	**200.000.000**	
1	**03**	**006**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Presentase sistem drainase yang berfungsi dengan baik**	**%**	**32**	**7.900.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Presentase sistem drainase yang berfungsi dengan baik**	**32**	**2.743.074.000**	
1	**003**	**06**	**2.01**			**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pesentase panjang sistem drainase yang dikelola**	**%**		**7.900.000.000**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pesentase panjang sistem drainase yang dikelola**		**2.743.074.000**	
1	03	06	2.01	0006		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang ditingkatkan	Km	3	2.420.000.000	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang ditingkatkan	3	0	

1	03	06	2.01	0008		Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Panjang sarana dranase Perkotaan yang disediakan	Km	7	3.060.000.000	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Panjang sarana dranase Perkotaan yang disediakan	7	0	
1	03	06	2.01	0013		Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Pemabangunan Dranase Ilngkungan	Km	0,5	1.210.000.000	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Pemabangunan Dranase Ilngkungan	0,5		
1	03	06	2.01	0014		Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Panjang sarana dranase Lingkungan yang disediakan	Km	0,5	1.210.000.000	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Panjang sarana dranase Lingkungan yang disediakan	0,5		
1	03	06	2.01	0012		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase lingkungan yang dibangun	M			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase lingkungan yang dibangun	2500	980.000.000	
1	03	06	2.01	0019		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase lingkungan yang beroperasi dan terpelihara	M			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase lingkungan yang beroperasi dan terpelihara	2000	150.000.000	
1	03	06	2.01	0021		Peningkatan Sistem Drainase	Jumlah saluran drainase yang ditingkatkan	sistem	4		Peningkatan Sistem Drainase	Jumlah saluran drainase yang ditingkatkan	4	1.000.294.000	
1	03	06	2.01	0026		Penyediaan Sarana Pendukung yang sistem drainase perkotaan yang disediakan	Jumlah Sarana pendukung sistem drainase perkotaan yang disediakan	Unit	2		Penyediaan Sarana Pendukung yang sistem drainase perkotaan yang disediakan	Jumlah Sarana pendukung sistem drainase perkotaan yang disediakan	2	612.780.000	
1	**03**	**07**				**PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN**					**PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN**			**250.000.000**	

1	03	06	2.01			Penyelenggaraan Instruksi pada Permukiman di Kawasan Startegis Dearah Kabupaten/ Kota					Penyelenggaraan Instruksi pada Permukiman di Kawasan Startegis Dearah Kabupaten/ Kota			250.000.000	
1	03	06	2.01	0033		Penyediaan Sub sistem pengolahan setempat di kawasan strategis kabupaten/ kota	Jumlah Rumah Tangga memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	Rumah Tangga			Penyediaan Sub sistem pengolahan setempat di kawasan strategis kabupaten/ kota	Jumlah Rumah Tangga memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	20	250.000.000	
1	**03**	**08**				**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan gedung pemerintah yang layak fungsi**	**%**	**3,75**	**17.609.989.800**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan gedung pemerintah yang layak fungsi**	**3,75**	**6.549.989.800**	
1	**03**	**08**	**2.01**			**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah Bangunan gedung pemerintah yang memiliki sertfikat laik fungsi**		**3**	**17.609.989.800**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah Bangunan gedung pemerintah yang memiliki sertfikat laik fungsi**	**3**	**6.549.989.800**	
1	03	08	2.01	001		Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Bangunan yang memiliki persyaratan layak fungsi	Unit	4	300.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Bangunan yang memiliki persyaratan layak fungsi	4	6.549.989.800	

1	03	08	2.01	0002		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan infrastruktur yang dibangun	Unit	3	16.760.000.000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan infrastruktur yang dibangun	3		
1	03	08	2.01	0018		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya gedung kantor	Unit	4		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya gedung kantor	1	6.000.000.000	
1	03	08	2.01	0021		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	umlah DokumenPembangunan,Pemanfaatan, Pelestariaandan PembongkaranBangunan Gedung untukKepentingan StrategisDaerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	umlah DokumenPembangunan,Pemanfaatan, Pelestariaandan PembongkaranBangunan Gedung untukKepentingan StrategisDaerah Kabupaten/Kota	1		
1	03	08	2.01	0023		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	umlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis	Dokumen	1	549.989.800	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	umlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi	1	549.989.800	

							(TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
1	**03**	**10**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat kemantapan jalan kabupaten**	**%**	**47,1**	**78.550.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat kemantapan jalan kabupaten**	**47,1**	**47.254.634.417**	
							Tingkat kemantapan jembatan kabupaten	**%**	**82**			**Tingkat kemantapan jembatan kabupaten**	**82**		
1	**03**	**10**	**2.01**			**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang**	**Km**	**554,90**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang**	**554,90**		
							Jumlah Jembatan Kabupaten kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	**Unit**	**207,00**			**Jumlah Jembatan Kabupaten kabupaten dalam kondisi baik dan sedang**	**207,00**	-	
1	03	10	2.01	0029		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan JaringanJalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan yang disusun	Dokumen	10	600.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan JaringanJalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan yang disusun	10	600.000.000	
1	03	10	2.01	0033		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang ditingkatkan	Km	33,17	40.300.000.000	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang ditingkatkan	33,17	39.794.252.000	

1	03	10	2.01	0038		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	10,00	1.000.000.000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	**1,00**	1.000.000.000	
1	03	10	2.01	0039		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	20	2.000.000.000	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	4	1.746.202.417	
1	03	10	2.01	0040		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Unit	4	22.000.000.000	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	**4,00**	1.614.180.000	
1	03	10	2.01	0043		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen data base jalan dan Jembatan yang disusun	Dokumen	2	650.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen data base jalan dan Jembatan yang disusun	2	500.000.000	
1	03	10	2.01	0046		Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan rang dipelihara secara rutin	Km	32	2.000.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan rang dipelihara secara rutin	35	2.000.000.000	
						Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang di rehab	Km	9,333	9.000.000.000	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang di rehab	9,333		
						Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	Km	10	1.000.000.000	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	10		
1	**03**	**11**				**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi	%		**42.823.967**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi		-	
1	**03**	**11**	**2.02**			**Penyelenggaraan Sistem Imformasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah/Kabupaten /Kota**	**Terselenggranya Sistem Informasi Jasa Konstruksii cakupan daerah kabupaten**	**Laporan**	**1**	**42.823.967**	**Penyelenggaraan Sistem Imformasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah/Kabupaten /Kota**	**Terselenggranya Sistem Informasi Jasa Konstruksii cakupan daerah kabupaten**	1		

1	03	11	2.02	006		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dok	umlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	1	25.962.807	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dok	umlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1	-	
1	03	11	2.02	007		Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Adanya data ketersediaan/Penggunaan Material dan peralatan	Dokumen	1	16.861.160	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Adanya data ketersediaan/Penggunaan Material dan peralatan	1	**77.860.700**	
1	**03**	**11**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Presentase kesesuaian pemamfaatan ruang dengan rencana tata ruang**	**%**	**100**	-	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Presentase kesesuaian pemamfaatan ruang dengan rencana tata ruang**	**100**	**41.860.700**	
1	**03**	**11**	**2.01**			**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**				-	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**			**25.000.000**	
1	03	11	2.01	0015		Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	Dokumen	2		Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	2	25.000.000	

1	**03**	**11**	**2.02**			**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Terselenggaranya Sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kabupaten				**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Terselenggaranya Sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kabupaten		**16.860.700**	
1	03	11	2.02	0013		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	**1**		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan		16.860.700	
1	**03**	**12**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Presentase kesesuaian pemamfaatan ruang dengan rencana tata ruang**	**%**	**100**	**300.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Presentase kesesuaian pemamfaatan ruang dengan rencana tata ruang**	**100**	**243.467.900**	
1	**03**	**12**	**2.01**			**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen tata Ruangyang telah ditetapkan denganPeraturan BupatiJumlah Dokumen tata ruangyang telah dietetapkandengan peraturan bupati**	**Dokumen**	**1**	**250.000.000**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen tata Ruangyang telah ditetapkan denganPeraturan BupatiJumlah Dokumen tata ruangyang telah dietetapkandengan peraturan bupati**	1	**182.099.900**	
1	03	12	2.01	0005		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	35.070.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Ko	1	38.700.000	

											Kabupaten/Kota	ta			
1	03	12	2.01	0006		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	umlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	175.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	umlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1	107.399.900	
1	03	12	2.01	0013		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan bidang penataan ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Laporan	15	39.930.000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan bidang penataan ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	15	36.000.000	
1	**03**	**12**	**2.03**			**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lporan koodinasi dan singkronisasi pemamfaatan ruang daerah kabupaten**	**Laporan**	**1**	**50.000.000**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lporan koodinasi dan singkronisasi pemamfaatan ruang daerah kabupaten**	1	**61.368.000**	
1	03	12	2.03	000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah rekomendasi pemfaatan ruang daerah yang dikeluarkan oleh forum penataan ruang daerah	Laporan	1	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah rekomendasi pemfaatan ruang daerah yang dikeluarkan oleh forum penataan ruang daerah	1		
1	03	12	2.03	0004		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	10		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	10	58.368.000	

1	03	12	2.03	0005			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1	3.000.000	
1	**03**	**12**	**2.04**				**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabuapaten/Kota**	**Jumlah dokumen koordinasi dan singkronisasi pengendaliaan ruang daerah**	**Dokumen**	**1**	**30.000.000**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabuapaten/Kota**	**Jumlah dokumen koordinasi dan singkronisasi pengendaliaan ruang daerah**	**1**		
2	**10**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**5.400.000.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**331.564.700**	
2	**10**	**04**					**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase tanah garapan yang telah diselesaikan**	**%**	50	**50.000.000**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase tanah garapan yang telah diselesaikan**	50	**17.100.000**	
2	**10**	**04**	**2**	**01**			**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**	**%**	**100**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**	**100**		
2	10	04	2	01			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	umlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	10	50.000.000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	100	17.100.000	

2	10	05				**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Persentase masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang difasilitasi dapat digunakan untuk pembangunan	%	100	5.350.000.000	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Persentase masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang difasilitasi dapat digunakan untuk pembangunan	100	**314.464.700**	
2	**10**	**05**	**2.01**			**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen permasalahan pertanahan yang telah dilaksanakan**	**Dokumen**	**3**	**5.350.000.000**	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen permasalahan pertanahan yang telah dilaksanakan**	**3**	314.464.700	
2	10	05	2.01	0001		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	2	30.250.000	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialiasi terkait hukum peratnahan yang dilakukan	15	14.464.700	
2	10	05	2.01	0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KoordinasidanSinkronisasiPenyelesaian Masalah GantiKerugian dan SantunanTanah untuk Pembangunanoleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota	Dokumen	2	5.319.750.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan tanah	2	300.000.000	
							Jumlah dokumen penyerahan hasil pengadaan tanah	Dokumen	2			Jumlah dokumen penyerahan hasil pengadaan tanah	2		
							Luas Pengadaan tanah untuk	Ha	2			Luas Pengadaan	2		

							pembangunan					tanah untuk pembangunan			
X	**XX**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**								347.079.900	
X	**XX**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**								**347.079.900**	
X	**XX**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tata tertib Administrasi keuangan**	**Persen**	**100**				**100**	**9.999.900**	
X	XX	01	2.02	0005		Koodinasi penyusun Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laopran Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5				5	9.999.900	
X	XX	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100				100		
X	**XX**	**01**	2.07	0003		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat besar yang disediakan	2	Unit				Unit		
X	XX	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	%	100				100	337.080.000	

1	03	01	2.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8				8	337.080.000	

2.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down,* yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant.*

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten yang disajikan pada Tabel 2.4 berikut ini

TABEL 2.6
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Solok Selatan			
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Solok Selatan	Luas Wilayah Sungai yang dikelola	360 Ha	
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Solok Selatan	Panjang Bangunan Tebing yang dibangun	3 Km	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Solok Selatan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten		
		Solok Selatan	Tingkat kemantapan jembatan kabupaten		
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Solok Selatan	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang	617,22 km	
	Rehabilitasi Jembatan	Solok Selatan	Jumlah Jembatan Yang direhabilitasig	4 Jembatan	
	Rekonstruksi Jalan	Solok Selatan	Panjang Jalan Yang ditingkatkan	33,17 Km	

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upayaupaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2021 – 2026 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

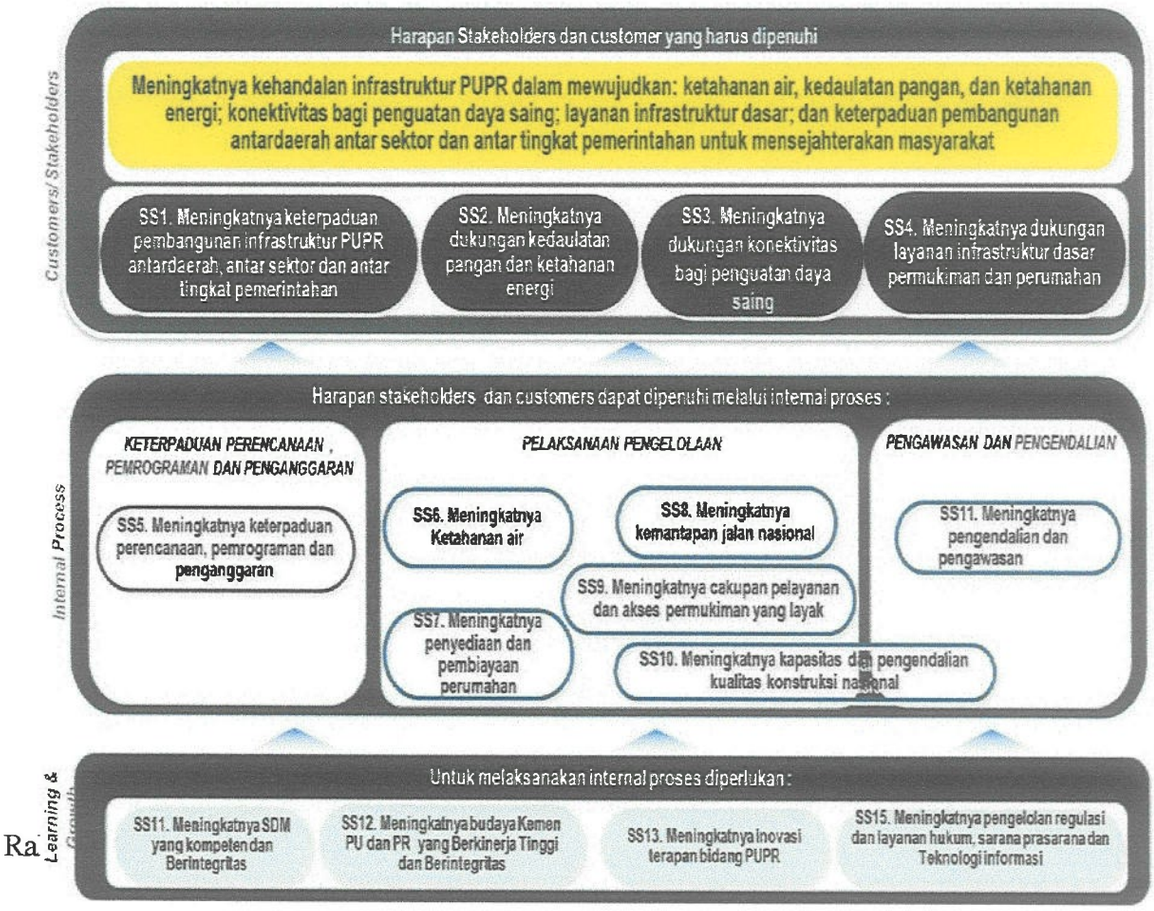
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya

manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Gambar 3.1
Peta Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran / masyarakat (pelayanan eksternal), yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi kegiatan-kegiatan:

a. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
b. Pembinaan Penatagunaan SDA
c. Pembinaan Program dan Anggaran
d. Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
e. Pembinaan Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai

f. Pembinaan Irigasi, Rawa, dan Tambak
g. Pembinaan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah
h. Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana
i. Dukungan Manajemen DSDAN
j. Pembinaan Keamanan Bendungan
k. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya
l. Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
m. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah
n. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Tambak
o. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA
p. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu

2. Program Penyelenggaraan Jalan, meliputi kegiatan-kegiatan:

a. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
b. Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan
c. Pengaturan dan Pembinaan Pengembangan Jaringan Jalan
d. Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan
e. Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan
f. Pengaturan dan Pembinaan Penanganan Jembatan
g. Pengaturan dan Pembinaan Fasilitasi Jalan Daerah, Metropolitan, Kota Besar dan Bebas Hambatan
h. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, meliputi kegiatankegiatan:

a. Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
b. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan Gedung
c. Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan

Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan

d. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
e. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman
f. Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman
g. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sanitasi dan Persampahan

4. **Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur**, meliputi kegiatan - kegiatan:
   a. Pembinaan Investasi Infrastruktur
   b. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
   c. Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi
   d. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
   e. Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
   f. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi
5. **Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan** meliputi kegiatan-kegiatan:
   a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan
   b. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan
   c. Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan
   d. Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan
   e. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
   f. Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan
   g. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU dari PNBP)
   h. Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BA 999)

6. **Program Pengembangan Perumahan**, meliputi kegiatan-kegiatan:
   a. Dukungan manajemen penyelenggaraan penyediaan perumahan
   b. Penyusunan perencanaan penyediaan perumahan
   c. Pembinaan dan pengembangan rumah umum dan komersial dan penyediaan khusus dan pembinaan rumah negara rumah
   e. Pemberdayaan Perumahan Swadaya
   f. Penyediaan Rumah Susun

7. **Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah, meliputi kegiatan-kegiatan:**
   a. Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
   b. Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
   c. Pengembangan Kawasan Strategis.
   d. Pengembangan Perkotaan.
   e. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Kabupaten Solok Selatan yang menjadi salah satu kabupaten yang masih tergolong baru berkembang masih membutuhkan infrastruktur yang banyak. Hal ini diharapkan supaya kabupaten ini bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain yang lebih dulu berkembang serta diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum sebagai penyelenggara utama untuk pembangunan infrastruktur memiliki tantangan yang tidak mudah. Isu-isu strategis pembangunan sesuai tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan adalah :

A. Bidang Pengairan
   1. Optimalisasi jaringan Irigasi yang sudah terbangun, dimana masih banyak jaringan irigasi yang telah seselsai dibangun tapi belum bisa berfungsi secara optimal.

2. Pembinaan Pengelolaan Jaringan Irigasi yang lebih intensif terhadap pemerintah, stake holder lain serta masyarakat petani
3. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air.
4. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor

B. Bidang Bina Marga
1. Sebagian ruas-ruas baru yang dibangun belum dapat berfungsi karena hambatan penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana.
2. Pembebanan berlebih (*overloading*) terhadap infrastruktur jalan masih terjadi terutama pada jalan-jalan utama/pengaturan Tonase Jalan yang belum efektif dan efisien
3. Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil.
4. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.

C. Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi
1. Hambatan dalam pembebasan lahan untuk lokasi pusat pemerintahan, perdagangan dan permukiman
2. Kurangnya Alokasi dana untuk pembangunan bidang keciptakaryaan.

Berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahunan yaitu 2021 – 2026 dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala dan perubahan-perubahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum. Visi, Misi, dan kebijakan yang ingin dicapai sesuai dengan motto PU bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat.

Visi merupakan pandangan kedepan, menyangkut arah mana yang akan dipilih, untuk mewujudkan cita-cita dan kondisi yang lebih baik, yang akan dicapai pada masa akan datang. Penentuan Visi sangat penting untuk dilakukan agar lebih terarah dan fokus kepada hasil yang akan dicapai, maka visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan adalah :

"Terwujudnya Sinergi Pembangun Infrastruktur Yang Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangan Kawasan Ibukota Dan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh".

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 secara umum masih sesuai dengan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan berdasarkan rencana strategis Dinas PUTRP yaitu :

1. Percepatan pembangunan Ibu kota dan kawasan pertumbuhan yang didukung oleh peningkatan akses perhubungan dan telkomunikasi.
2. Normalisasi sungai dan revitalisasi daerah irigasi
3. Bedah rumah dan sanitasi (persampahan dan air bersih)
4. Menuntaskan peningkatan jalan sehingga sehingga menciptakan aksesibilitas yang aman dan nyaman
5. Menuntaskan pembangunan pusat perkantoran pemerintahan di Padang Aro.
6. Menuntaskan pembangunan jaringan Irigasi teknis pada sentra pertanian (Persawahan).
7. Penanggulangan bencana banjir dengan normalisasi sungai dan perkuatan tebing
8. Peningkatan infrstruktur dan prasarana dasar
9. Mewujudkan pusat perkantoran pemerintah yang representatif
10. Mengesahkan / meletakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RTRW)
11. Mengutamakan efektifitas dan efesiensi penanganan infrstruktur kePUan
12. Menciptakan budaya organisasi yang peduli dan tanggap keseluruhan sektor pemeliharaan dan pelayanan infrstruktur

13. Mendorong partisipasi masyarakat dan khususnya stakeholder untuk pengelolaan dan pemamfaatan infrstruktur
14. Mengujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spesial dan pembangunan nasional dan daerah

Program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. **urusan pemerintahan bidangpekerjaan umum dan penataan ruang**
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
   - ❖ Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan sebagai berikut:
     - Normalisasi/Restorasi Sungai
     - Pembangunan Bangunan PerkuatanTebing
     - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
   - ❖ Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan sebagai berikut:
     - Peningkatan Jaringan Irigasi
     - Operasi dan pemeliharaan Bendung Irigasi
     - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   - ❖ Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota , dengan sub Kegiatan sebagai berikut:
     - Pembangunan Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

❖ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pembangunan Sistem Drainase
- Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan

5. Program Pengembangan dan Pemukiman

❖ Penyelenggaraan Infrastruktur padaPermukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

6. Program Penataan Bangunan Gedung

❖ Penyelenggaraan Bangunan Gedung diWilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

- Pemeliharaan, perawatan dan pemerikasaaan Berkala Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota
- Pembangunan, Pemanfaatan, Pelesatarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan strategis Daerah Kabupaten/ Kota.
- Penyelenggaraan Penerbitan PersetujuanBangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi(SLF), Surat Bukti Kepemilikan BangunanGedung (SBKBG), Rencana TeknisPembongkaran Bangunan Gedung (RTB), TimProfesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT),Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

7. Program Penyelenggaraan Jalan

❖ Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota

- Penyusunan Rencana,Kebijakan, danStrategi PengembanganJaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- Rekonstruksi Jalan
- Rehabilitasi Rutin Jembatan
- Rehabilitasi Jembatan
- Pemeliharaan Rutin Jalan

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

❖ Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga TerampilKonstruksi

- Penyediaan SOP Penyelenggaraan PelatihanTenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

❖ Penyelenggaraan Sistem Imformasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah/Kabupaten /Kota

- Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

❖ Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi,Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
- Sosialisasi Kebijakan dan peraturan perundang-undangan Pedoman Penataan Ruang

❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota

❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemnfataan Ruang

I. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

❖ Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Mediasi Penyelesaian Sengketa tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

   ❖ Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan Tanah untuk Pengembangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

      • Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

      • Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor-Faktor Pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten Solok Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan maka Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan lebih fokus pada misi ke – 2 (dua) yaitu **"Pembangunan Infrastruktur, kawasan pertumbuhan, Pelestarian lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana "** yaitu melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam perumusan kebijakan dibidang Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan , rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 menggunakan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah adalah Pada Tabel 4.1berikut.

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Rencana Tahun 2025											Perkiraan Maju Tahun 2026				
Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tahun 2025		Catatan Penting			Unit Kerja	Lokasi
									Target Capaian	Kebutuhan Pagu Pagu Indikatif		Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						BELANJA LANGSUNG				**80.521.021.775**			**131.400.648.785**	**Dinas PUTRP**	
1	**03**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**79.842.377.175**			**121.864.223.785**	**Dinas PUTRP**	
1	**03**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah**	**%**	**100**	**12.837.369.220**	**100**	**100**	**11.062.634.120**	**Dinas PUTRP**	
1	**03**	**01**	2.01			**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase singkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah**	**%**	**100**	**39.999.700**	**100**	**100**	**40.000.000**		
1	03	01	2.01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6		6	6			
1	03	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	19.999.900	5	5	20.000.000		

1	03	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	4	19.999.800	4	4	20.000.000		
	03						Jumlah Laporan Keuangan semester		12		12	12			
1	03	**1**	2,02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase tertib administrasi keuangan**	**%**	**100**	**9.293.141.620**	**100**	**100**	**9.294.394.120**		
1	03	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	68	8.530.361.620	65	68	8.530.361.620		
1	03	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	762.780.000	12	4	764.032.500		
							Jumlah tenaga pengelola keuangan yang dibayarkan honorariumnya	orang	13		13	13			
1	03	**1**	**05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**100**	**80.000.000**	**100**	**100**	**70.000.000**		
1	03	01	05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stel	98	30.000.000	65	98	20.000.000		
1	03	01	05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	50.000.000	10	10	50.000.000		
1	03	01	2,06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase tertib Administrasi umum Perangkat daerah**	**%**	**100**	**729.986.300**	**100**	**100**	**1.077.000.000**		

1	03	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	9.999.300	12	5	10.000.000		
1	03	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2	50.000.000	2	2	100.000.000		
	03						Jumlah ATK yang disediakan	Paket	2		2	2			
1	03	01	2.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	10	15.003.000	10	10	15.000.000		
1	03	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakandan Penggandaan yang Disediakan	paket	9	35.000.000	9	9	35.000.000		
1	03	01	2.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	4	19.995.000	9	4	35.000.000		
1	03	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan	4	599.989.000	240	4	882.000.000		
1	03	**1**	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**%**	**100**	**494.250.000**	**100**	**100**	**65.040.000**		
1	03	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	10.000.000	4	4	40.000		
1	03	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36.750.000	12	12	50.000.000		

1	03	01	2.08	0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	24.500.000	4	12	15.000.000		
1	03	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		423.000.000	300				
							Terpeliharanya peralatan/alat berat	Unit	0		0	0			
							Terpeliharanya kendaraan roda dua	Unit	33		33	33			
1	**03**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan**	**Persen**	**100**	**2.199.991.600**	**100**	**100**	**516.200.000**		
1	03	01	2.09	0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	10	1.999.991.600	11	10	266.200.000		
1	03	001	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	200.000.000	1	2	250.000.000		
1	03	2				**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten**	**%**	25	**7.221.981.138**	25	25	**10.942.867.188**	**Dinas PUTRP**	

	03						**Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi**	**%**	25,69		25,69	25,69			
1	03	**2**	2,01			**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Luas Wilayah Sungai yang di kelola**	**Ha**	**360**	**2.512.070.000**	**360**	**360**	**2.250.000.000**		
1	03	02	2.01	0073		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Pajang Sungai yang di operasi dan yang dipelihara	Km		750.000.000	3		750.000.000		
1	03	02	2.01	0093		Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang di pelihara	Km	2,5	1.150.000.000	2	2,5	350.000.000		
1	03	02	2.01	0109		Pembangunan bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	Km	3	512.070.000	3	3	1.000.000.000		
1	03	02	2.01	0128		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, danBangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan normalisasi sungai yang disusun	Dokumen	1	100.000.000	1	1	150.000.000		
1	03	02	2.01	01		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Pembangunan Embung	Unit	1		1	1			
1	03	**02**	2.02			**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik**	**%**	**28**	**4.709.911.138**	**28**	**28**	**8.692.867.188**		
1	03	02	2.02	0008		Peningkatan Jaringan Irugasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	M	400,00	2.411.230.000	400,00	400,00	2.000.000.000		
1	03	02	2.02	0014		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi	M	300	1.348.681.138	300	300	6.077.867.188		
1	03	02	2.02	0022		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Pajang Bendung Irigasi yang diopeasikan yang dipelihara	**Bendung**	**5**	750.000.000	**5**	**5**	600.000.000		
						Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang di pelihara								

1	03	02	2.02	0022	35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen Perencanaan Irigasi	Dokumen	1	200.000.000	1	1	15.000.000		
1	**03**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM**	**Akses air minum layak**	**%**	**80,05**	**2.000.000.000**	**80,05**	**80,05**	**2.831.000.000**	**Dinas PUTRP**	
1	**03**	**03**	**2.01**			**Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SPAM yang dikelola**	**%**	**100**	2.000.000.000	**100**	**100**	2.831.000.000		
1	03	03	2.01			Pembangunan spam jaringan perpipaan dikawasan pedesaan	Jumlah sambungan Rumah (SR) spam pedesaan yang dibangun	SR	500	-	500	500	-		
1	03	03	2.01			Peningkatan spam jaringan perpipaan dikawasan perkotaan	Jumlah sambungan Rumah (SR) spam Perkotaan yang dibangun	Sr	800	-	800	800	-		
1	03	03	2.01			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman (sambungan jaringan air minum/pamsimas dan hibah air minum pedesaan	SR	800		800	800			
1	03	03	2.01			Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	SR	1250		1250	1250			
1	03	03	2.01	0026		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air minum SPAM (Jaringan Perpipipan yang Di tingkatkan	Liter/ Detik	3	1.000.000.000	Liter/ Detik	3	1.331.000.000		
1	03	03	2.01	0028		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air minum SPAM (Jaringan Perpipipan yang Di Bangun	Liter/ Detik	5	1.000.000.000	Liter/ Detik	5	1.500.000.000		
1	**03**	**005**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Akses sanitasi layak**	**%**	**53,8**	**700.000.000**	**53,8**	**53,8**	**2.878.201.000**	**Dinas PUTRP**	

1	**03**	**005**	**2.01**			**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah MCK yang di kelola**	**%**	**50**	**700.000.000**	**50**	**50**	**2.878.201.000**		
1	03	05	2.01	0003		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	IPAL Kombinasi MCK dan penunjang	Unit	2	-	2	2	-		
1	03	005	2.01	0006		Pembangunan/ Penyediaan Sub sistem pengolahan setempat	Jumlah MCK yang dibangun	Unit	5		5	5			
1	03	005	2.01	0024		Optimalisai Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkantoran	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limabh (SPALD) Terpusat skala perkotaan yang dioptimalisasi	Unit	5	500.000.000	5	5	**2.628.201.000**		
1	03	005	2.01	0041		Penyusunan Rencana Kebijakan, Starategi dan Teknis sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkantoran	Jumlah Dokumen RencanaKebijakan, Starategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limabh (SPALD) Terpusat skala perkotaan yang dioptimalisasi	Dokumen	1	200.000.000	1	1	**250.000.000**		
1	**03**	**006**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Presentase sistem drainase yang berfungsi dengan baik**	**%**	**32**	**2.743.074.000**	**32**	**32**	**6.844.000.000**	**Dinas PUTRP**	
1	**003**	**06**	**2.01**			**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pesentase panjang sistem drainase yang dikelola**	**%**		**2.743.074.000**			**6.844.000.000**		
1	03	06	2.01	0006		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang ditingkatkan	Km	3	0	3	3	0		
1	03	06	2.01	0008		Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Panjang sarana dranase Perkotaan yang disediakan	Km	7	0	7	7	0		
1	03	06	2.01	0013		Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Pemabangunan Dranase lingkungan	Km	0,5		0,5	0,5			
1	03	06	2.01	0014		Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Panjang sarana dranase Lingkungan yang disediakan	Km	0,5		0,5	0,5			
1	03	06	2.01	0012		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase lingkungan	M		980.000.000	2500		1.972.000.000		

							yang dibangun								
1	03	06	2.01	0019		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase lingkungan yang beroperasi dan terpelihara	M		150.000.000	2000		175.000.000		
1	03	06	2.01	0021		Peningkatan Sistem Drainase	Jumlah saluran drainase yang ditingkatkan	sistem	4	1.000.294.000	4	4	3.366.000.000		
1	03	06	2.01	0026		Penyediaan Sarana Pendukung yang sistem drainase perkotaan yang disediakan	Jumlah Sarana pendukung sistem drainase perkotaan yang disediakan	Unit	2	612.780.000	2	2	1.331.000.000		
1	**03**	**07**				**PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN**				250.000.000			**275.000.000**	**Dinas PUTRP**	
1	03	06	2.01			Penyelenggaraan Instruksi pada Permukiman di Kawasan Startegis Dearah Kabupaten/ Kota				250.000.000			275.000.000		
1	03	06	2.01	0033		Penyediaan Sub sistem pengolahan setempat di kawasan strategis kabupaten/ kota	Jumlah Rumah Tangga memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	Rumah Tangga		250.000.000	20		275.000.000		
1	**03**	**08**				**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan gedung pemerintah yang layak fungsi**	**%**	**3,75**	**6.549.989.800**	**3,75**	**3,75**	**17.465.250.000**	**Dinas PUTRP**	
1	**03**	**08**	**2.01**			**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah Bangunan gedung pemerintah yang memiliki sertfikat laik fungsi**		**3**	**6.549.989.800**	**3**	**3**	**17.465.250.000**		
1	03	08	2.01	001		Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Bangunan yang memiliki persyaratan layak fungsi	Unit	4		4	4			
1	03	08	2.01	0002		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan infrastruktur yang dibangun	Unit	3		3	3			
1	03	08	2.01	0018		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah	Terpeliharanya gedung kantor	Unit	4		1	4	300.000.000		

						Kabupaten/Kota									
1	03	08	2.01	0021		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	umlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	6.000.000.000	1	1	17.165.000.000		
1	03	08	2.01	0023		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	umlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	1	549.989.800	1	1	250.000		
1	**03**	**10**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat kemantapan jalan kabupaten**	**%**	**47,1**	**47.254.634.417**	**47,1**	**47,1**	**69.346.348.477**	**Dinas PUTRP**	
							Tingkat kemantapan jembatan kabupaten	**%**	**82**		**82**	**82**			
1	**03**	**10**	**2.01**			**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang**	**Km**	**554,90**		**554,90**	**554,90**			

							Jumlah Jembatan Kabupaten kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	**Unit**	**207,00**	-	**207,00**	**207,00**	-		
1	03	10	2.01	0029		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan JaringanJalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan yang disusun	Dokumen	10	600.000.000	10	10	600.000.000		
1	03	10	2.01	0033		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang ditingkatkan	Km	33,17	39.794.252.000	33,17	33,17	42.996.348.477		
1	03	10	2.01	0038		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	10,00	1.000.000.000	**1,00**	10,00	600.000.000		
1	03	10	2.01	0039		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yangDibangun	Jembatan	20	1.746.202.417	4	20	2.500.000.000		
1	03	10	2.01	0040		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Unit	4	1.614.180.000	**4,00**	4	20.000.000.000		
1	03	10	2.01	0043		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen data base jalan dan Jembatan yang disusun	Dokumen	2	500.000.000	2	2	650.000.000		
1	03	10	2.01	0046		Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan rang dipelihara secara rutin	Km	32	2.000.000.000	35	32	2.000.000.000		
						Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang di rehab	Km	9,333		9,333	9,333			
						Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	Km	10		10	10			
1	**03**	**11**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Presentase kesesuaian pemamfaatan ruang dengan rencana tata ruang**	**%**	**100**	**41.860.700**	**100**	**100**	**20.000.000**	**Dinas PUTRP**	
1	**03**	**11**	**2.01**			**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**				**25.000.000**			-		
1	03	11	2.01	0015		Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	Dokumen	2	25.000.000	2	2	-		

							Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan								
1	**03**	**11**	**2.02**			**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Terselenggaranya Sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kabupaten			16.860.700			**20.000.000**		
1	03	11	2.02	0013		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	1	16.860.700		1	20.000.000		
1	**03**	**12**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Presentase kesesuaian pemamfaatan ruang dengan rencana tata ruang**	**%**	**100**	**243.467.900**	**100**	**100**	**198.923.000**	**Dinas PUTRP**	
1	**03**	**12**	**2.01**			**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen tata Ruang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jumlah Dokumen tata ruang yang telah dietetapkan dengan peraturan bupati**	**Dokumen**	**1**	**182.099.900**	**1**	**1**	**133.923.000**		
1	03	12	2.01	0005		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuansubstansi RTRWKabupaten/Kota	Dokumen	1	38.700.000	1	1	40.000.000		
1	03	12	2.01	0006		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	umlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	107.399.900	1	1	50.000.000		

1	03	12	2.01	0013		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan bidang penataan ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Laporan	15	36.000.000	15	15	43.923.000		
1	**03**	**12**	**2.03**			**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Iporan koodinasi dan singkronisasi pemamfaatan ruang daerah kabupaten**	**Laporan**	**1**	**61.368.000**	**1**	**1**	**65.000.000**		
1	03	12	2.03	000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah rekomendasi pemfaatan ruang daerah yang dikeluarkan oleh forum penataan ruang daerah	Laporan	1		1	1			
1	03	12	2.03	0004		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	10	58.368.000	10	10	60.000.000		
1	03	12	2.03	0005		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1	3.000.000	1	1	5.000.000		
1	**03**	**12**	**2.04**			**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabuapaten/Kota**	**Jumlah dokumen koordinasi dan singkronisasi pengendaliaan ruang daerah**	**Dokumen**	**1**		**1**	**1**			
1	03	12	2.04	04		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah laporan Pelaksanaan pengedalian pemamfaatan ruang	Laporan	1		1	1			
2	**10**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**331.564.700**			**5.536.725.000**	**Dinas PUTRP**	
2	**10**	**04**				**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase tanah garapan yang telah diselesaikan**	**%**	50	**17.100.000**	50	50	**50.000.000**	**Dinas PUTRP**	

2	**10**	**04**	**2**	**01**		**Penyelesalan Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**	**%**	**100**		**100**	**100**			
2	10	04	2	01	00 04	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	10	17.100.000	100	10	50.000.000		
2	10	05				**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Persentase masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang difasilitasi dapat digunakan untuk pembangunan	%	100	314.464.700	100	100	**5.486.725.000**		
2	**10**	**05**	**2.01**			**Penyelesalan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen permasalahan pertanahan yang telah dilaksanakan**	**Dokumen**	**3**	**314.464.700**	**3**	**3**	5.486.725.000		
2	10	05	2.01	0001		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	2	14.464.700	15	2	20.000.000		
2	10	05	2.01	0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KoordinasidanSinkronisasiPenyelesaian Masalah GantiKerugian dan SantunanTanah untuk Pembangunanoleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota	Dokumen	2	300.000.000	2	2	5.466.725.000		
							Jumlah dokumen penyerahan hasil pengadaan tanah	Dokumen	2		2	2			

							Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan	Ha	2		2	2			
X	**XX**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				347.079.900			3.999.700.000		
X	**XX**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				347.079.900			3.999.700.000		
X	**XX**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tata tertib Administrasi keuangan**	**Persen**	**100**	**9.999.900**		**100**	**10.000.000**		
X	**XX**	**01**	2.02	0005		Koodinasi penyusun Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laopran Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	9.999.900		5	10.000.000		
X	XX	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100			100	3.539.700.000		
X	**XX**	**01**	2.07	0003		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat besar yang disediakan	2	Unit			Unit	3.539.700.000		
X	XX	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	%	100	337.080.000	100	100	450.000.000		
1	03	01	2.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	337.080.000	8	8	450.000.000		

TABEL 4.2
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KAB. SOLOK SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN						80.521.021.775,00							131.400.648.785,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						79.842.377.175,00							121.864.223.785,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						79.842.377.175,00							121.864.223.785,00	
1,	1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	12.837.369.220,00						-	11.062.634.120,00	

	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase singkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen 100 Persen	39.999.700,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS	-	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	19.999.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS	)	20.000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	19.999.800,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS	)	20.000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Keuangan Presentase tertib administrasi keuangan*	-			100 Persen 100 Persen	9.293.141.620,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	9.294.394.120,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	8.530.361.620,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		30.361.620,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	762.780.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		764.032.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	80.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS	-	70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	30.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS		20.000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS		50.000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase tertib Administrasi umum Perangkat daerah Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen 100 Persen	729.986.300,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS	-	1.077.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	9.999.300,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktu r yang berkelanjutan	PNS		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	50.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS		00.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	15.003.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	35.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS		35.000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				9 Laporan	19.995.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS	)	35.000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				240 Laporan	599.989.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS		882.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah yang disediakan*	-			100 Persen	494.250.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktu r yang berkelanjutan	PNS	-	65.040.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS		40.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	36.750.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	24.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				300 Laporan	423.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan*	-			100 Persen 100 Persen	2.199.991.600,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS	-	516.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														

			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				11 Unit	1.999.991.600,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS		36.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
2,	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten***	-			**31,21 Persen 50 Persen**	**7.221.981.138,00**						-	**10.942.867.188,00**	

	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Luas wilayah sungai yang dikelola* *Luas Wilayah Sungai yang di kelola*	-			360 Ha 360 Ha	2.512.070.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat	-	2.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai														

			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 KM	750.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														

			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				2 KM	1.150.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing													

			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				3 KM	512.070.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat	00.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya													

			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik*	-			34,8 Persen	4.709.911.138,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat	-	8.692.867.188,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														

			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				2.5 KM	2.411.230.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat		)0.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														

			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				3 KM	1.348.681.138,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat	77.867.188,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi														

			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Bendung	750.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat	00.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														

			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatk an pembangun infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktu r yang berkelanjutan	asyarakat		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
3,	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**	**-**			**-**	**2.000.000.000,00**						**-**	**2.831.000.000,00**	

	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase SPAM yang dikelola*	-			100 Persen	2.000.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat	-	2.831.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				3 Liter/Detik	1.000.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat		31.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				5 Liter/Detik	1.000.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
4,	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Akses sanitasi layak Akses sanitasi layak***	-			**58,2 Persen 66,37 Persen**	**700.000.000,00**						-	**2.878.201.000,00**	

	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase jumlah MCK yang dikelola Persentase jumlah MCK yang di kelola*	-			58 Persen 58 Persen	700.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	asyarakat	-	2.878.201.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan														

			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi				5 Unit	500.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	asyarakat		28.201.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
5,	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Persentase sistem drainase yang berfungsi dengan baik***	-			**40 Persen**	**2.743.074.000,00**						-	**6.844.000.000,00**	

	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Pesentase panjang sistem drainase yang dikelola*	-			1,4 Persen	2.743.074.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat	-	6.844.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														

			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				2500 M	980.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat		72.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan														

			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				2000 Meter	150.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatk an pemban gunan infrastr uktur yang berkea dilan dan berkela njutan Penyed iaan Infrastr uktu r yang berk elanjuta n	asyaraka t		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan														

			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				4 Sistem Drainase Lingkungan	1.000.294.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat	36.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan														

			Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan				2 Unit	612.780.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat		1.331.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
6,	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	-	-			-	**250.000.000,00**						-	**275.000.000,00**	

	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	250.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat	-	275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota													

			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar				20 Rumah Tangga	250.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
7,	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi***	-			**2,50 Persen**	**6.549.989.800,00**						-	**17.465.250.000,00**	

	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Jumlah bangunan gedung Pemerintah yang layak fungsi* *Jumlah Bangunan gedung pemerintah yang memiliki sertfikat laik fungsi*	-			2 Unit 2 Unit	6.549.989.800,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS, Masyarakat	-	17.465.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				4 Bangunan Gedung	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS, Masyarakat		)0.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													

			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	6.000.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatk an pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktu r yang berkelanjutan	PNS, Masyarakat	35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														

			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	549.989.800,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS, Masyarakat		250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
8,	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**47.254.634.417,00**						**-**	**69.346.348.477,00**	

	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	*Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang Jumlah Jembatan Kabupaten kabupaten dalam kondisi baik dan sedang Panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang Panjang JembatanKabupaten dalam Kondisi baik dan sedang*	-			222 Unit 222 Km 617,22 Km 617,22 Km 222 Unit	47.254.634.417,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktu r yang berkelanjutan	asyarakat	-	69.346.348.477,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														

			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat		00.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														

			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				33,17 KM	39.794.252.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat		96.348.477,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				10 Jembatan	1.000.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat		00.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														

			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				20 Jembatan	1.746.202.417,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat		)0.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														

			Jumlah Jembatan yang Dibangun				4 Jembatan	1.614.180.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat		)0.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														

			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				50 KM	500.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														

			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				35 KM	2.000.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
9,	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Persentase Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi***	-			**100 Persen**	**41.860.700,00**						-	**20.000.000,00**	

	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	25.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														

			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	*Terselenggaranya Sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kabupaten Terselenggranya Sistem Informasi Jasa Konstruksii cakupan daerah kabupaten*	-			1 Laporan 1 Laporan	16.860.700,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktu r yang berkelanjutan	-	-	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														

			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	16.860.700,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangun gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktu r yang berkelanjutan	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
10,	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang***	-			**100 Persen**	**243.467.900,00**						-	**198.923.000,00**	

	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	*Jumlah Dokumen tata ruang yang telah dietetapkan dengan peraturan bupati Jumlah Dokumen tata Ruang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati*	-			0 Dokumen 0 Dokumen	182.099.900,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat	-	133.923.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														

			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	38.700.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														

			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	107.399.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat	)	50.000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														

			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				15 Laporan	36.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat	)	43.923	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah laporan koodinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten*	-			1 Laporan 1 Laporan	61.368.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Masyarakat	-	65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														

			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				10 Layanan	58.368.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industrl Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Masyarakat	)	60.000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														

			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri dl Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	Instansi Pemerintah, Masyarakat		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**331.564.700,00**							**5.536.725.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**331.564.700,00**							**5.536.725.000,00**	
1,	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	***Persentase tanah garapan yang telah diselesaikan (masyarakat dengan perusahaan***	**-**			**50 Persen**	**17.100.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	

			dan pemerintah)													
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase tanah garapan yang telah diselesaikan*	-			100 Persen	17.100.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industrl Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat	-	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Berita Acara	17.100.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
2,	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	***Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan***	-			**100 Persen**	**314.464.700,00**						-	**5.486.725.000,00**	

	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah dokumen permasalahan pertanahan yang telah dilaksanakan*	-			3 Dokumen	314.464.700,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat	-	5.486.725.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				2 Dokumen	14.464.700,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industrl Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	asyarakat		56.725.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	X	**ON URUSAN**						**347.079.900,00**							**3.999.700.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**347.079.900,00**							**3.999.700.000,00**	
1,	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**347.079.900,00**						-	**3.999.700.000,00**	

	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Keuangan Presentase tertib administrasi keuangan*	-			100 Persen 100 Persen	900,00	9.999.			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS	-	.000,00	10.000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	900,00	9.999.	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS		)	10.000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah*	-			100 Persen 100 Persen	0,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS	-	3.539.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	X.XX.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														

			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan	PNS		39.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan*	-			100 Persen 100 Persen	337.080.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-	-	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	337.080.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	JUMLAH							**80.521.021.775,00**							**131.400.648.785,00**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Awal 2025 Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan merupakan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat lebih terarah dan terukur.

Dengan telah direncanakannya Rencana Kerja Awal 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan diharapkan akan lebih meningkatkan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum Tata Ruang dan urusan pertanahan

Rancangan Akhir Renja disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dalam penerapannya diharapkan dapat dilakukan secara utuh serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen lainnya, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian target indikator serta parameter yang ada

Disadari bahwa pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan sangat tergantung atas kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Solok Selatan. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan

Padang Aro , 2024

INDRA ZUARDI, ST, MT
NIP. 19690806 199803 1

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 dapat terlaksana. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Tahun 2021-2026 dan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Inspektorat selama satu tahun yang akan dating.

Pencapaian tujuan RENSTRA tersebut kemudian dibagi menjadi tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu lebih pendek yaitu satu tahun. Dengan demikian diharapkan kegiatan pengkoordinasian, pengambilan kebijakan pengendalian dan evaluasi pada bagian-bagian di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan dapat dilakukan dengan lebih baik dan dapat mendukung pembangunan visi dan misi Bupati Kabupaten Solok Selatan.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 disusun semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Aro, Juli 2024

INSPEKTUR,

RADIYATUL HAYAT, SH, MH

NIP. 19690620 199308 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. 1 Latar Belakang 1

1. 2 Landasan Hukum 2

1. 3 Maksud dan Tujuan 4

1. 4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU . 6

2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Inspektorat Tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat 6

2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat..... 14

2. 3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat..... 17

2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 20

2. 5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat..... 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT 27

3. 1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional 27

3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat 30

3. 3 Program dan Kegiatan 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT..... 33

BAB V PENUTUP 43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RENJA Inspektorat ... 9
Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah 16
Tabel 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD 21
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan..... 26
Tabel 3.1 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat 30
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Kerja Tahunan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daerah lainnya.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 126 mengatur bahwa penyusunan Rancangan Akhir Renja PD pada bulan Desember Tahun n-2 berpedoman kepada Renstra PD, hasil evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan. Rancangan Akhir Renja PD ini akan menjadi referensi Bappeda dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Selanjutnya melalui asistensi dengan Bappeda dalam rangka penyamaan persepsi tentang prioritas pembangunan daerah dan mengacu kepada rancangan RKPD, Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan Renja PD. Rancangan Renja PD menjadi bahan untuk didiskusikan dalam kegiatan forum Perangkat Daerah bersama para pemangku kepentingan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Dalam penyusunan Renja PD Tahun 2025 selain mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, juga telah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah. Khusus terkait penggunaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan telah mempedomani pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah

Rencana Kerja ini memiliki keterkaitan erat dengan RKPD dan Renstra karena disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Selanjutnya RPJMd menjadi pedoman penyusunan RKPD tahunan dan Renstra Perangkat Daerah..

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 15);

o. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 82);

p. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Inspektorat tahun 2025 ini **dimaksudkan** sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sedangkan **tujuan** dari Rencana Kerja Inspektorat tahun 2025 adalah:

a. Sebagai Penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.
b. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

c. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan
d. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Solok Selatan merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran Renstra Inspektorat tahun 2021-2026.

Ruang lingkup Rencana Kerja meliputi:

BAB I Pendahuluan

Bab I memuat pendahuluan yang berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

Bab II memuat evaluasi renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 yang berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah hingga triwulan II tahun 2024 dan menjelaskan faktor pendorong, penghambat dan tindaklanjut pelaksanaan kegiatan triwulan berikutnya;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

Bab III memuat tujuan dan sasaran Inspektorat;

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Bab IV memuat rencana memuat perubahan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

BAB V PENUTUP

Bab V memuat Penutup.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Solok Selatan tahun 2023, dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaaan Renja Inspektorat tahun lalu, dan realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat dan/atau realisasi APBD di Inspektorat. Evaluasi Renja Inspektorat 2023 ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Solok Selatan secara keseluruhan menganggarkan Rp. 4.915.920.045,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.439.337.572,- atau 90,30 % alokasi yang ada.

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Untuk program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

1) Sub kegiatan Pengawasan Desa yang hanya ter-realisasi sebanyak 4 dari target 12 hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran.

2) Sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang hanya ter-realisasi sebanyak 6 dari target 18 hal ini disebabkan karena tidak

diubahnya target pada renja perubahan sedangkan target pada Program Kerja Pengawasan Tahunan telah dirubah.

b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Secara umum program/kegiatan yang dilaksanakan rata-rata realisasi keuangan diatas 75% dan capaian fisik 95-100% telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/kegiatan yang melebihi target yang direncanakan yaitu antara lain :

1. Sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang realisasi nya mencapai 30 dari target 25 hal tersebut disebabkan karena Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang belum optimal sehingga kurang tersaringnya opd yang harus dilakukan pengawasan.

2. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja yang realisasinya mencapai 25 dari target 15 hal tersebut dikarenakan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang belum optimal sehingga target pada perencanaan tidak sesuai dengan dengan reviu yang wajib dilakukan.

3. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan yang realisasinya mencapai 11 dari target 6. Hal tersebut dikarenakan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang belum optimal sehingga target pada perencanaan tidak sesuai dengan dengan reviu yang wajib dilakukan.

d. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Program/kegiatan yang tidak memenuhi target tersebut disebabkan karena faktor keterbatasan SDM untuk pelaksanaan program/kegiatan dan adanya pemangkasan anggaran. Sedangkan faktor melebihi target kinerja program/kegiatan disebabkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang belum optimal sehingga target pada perencanaan tidak sesuai dengan kegiatan pengawasan yang akan dilakukan.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat

Masih banyaknya kekurangan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan, dengan keterebatasan SDM, Sarana dan Prasarana serta masih belum optimalnya pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko sangat berdampak signifikan terhadap pencapaian Kinerja Inspektorat.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tidak tercapainya program/kegiatan

Tindakan ataupun kebijakan yang diambil agar Inspektorat dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan efektif dan efisien adalah dengan :

1) Mengisi kekosongan SDM di Inspektorat, baik di bagian Perencanaan dan terutama Auditor dan P2UPD.

2) Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat dengan Peningkatan Kegiatan Pelatihan dan Bimtek.

3) Memperbaiki pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

4) Memperbaiki dan Melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat.

Berikut ini dapat disajikan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan Prakiraan capaian Tahun 2024 sesuai dengan **tabel 2.1** berikut ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)* Kabupaten Solok Selatan

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah **Lembar : 9-13**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	**0.1**	**0.1**				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	cakupan layanan operasional kantor	**100**	33,33	**100**	100	100%	**100**	66,67	66,67%
6	**0.1**	**0.1**	**2**	**0.1**		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	**100**	33,33	**100**	100	100%	**100**	66,67	66,67%
6	0.1	0.1	2	0.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	**12**	4	2	2	100%	2	8	66,67%
6	0.1	0.1	2	0.1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan laporan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	**42**	7	7	7	100%	7	21	50,00%
6	**0.1**	**0.1**	**2**	**0.2**		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	**100**	33,33	100	100	100%	100	66,67	66,67%
6	0.1	0.1	2	0.2	0.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Orang yang dibayarkan gaji dan tunjangann	**160**	46	28	28	100%	30	104	65,00%
6	0.1	0.1	2	0.2	0.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**24**	8	4	4	100%	4	16	66,67%

						Koordinasi dan Penyusunan laporan keungan akhir tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	**6**	2	1	1	100%	1	4	66,67%
6	**0.1**	**0.1**	**2**	**0.5**		administrasi kepegawaian perangkat Daerah	persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah	**100**	33,33	**100**	100	100%	**100**	66,67	66,67%
6	0,1	0,1	2	0.5	0.009	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	**59**	6	10	10	100%	10	26	44,07%
6	0,1	0,1	2	0.5	0.011	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perubdang-undangan	**82**	16	15	29	193%	15	60	73,17%
6	**0.1**	**0.1**	**2**	**0.6**		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	**100**	33,33	100	100	100%	100	66,67	66,67%
6	0.1	0.1	2	0.6	0.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	**24**	8	4	4	100%	4	16	66,67%
6	0.1	0.1	2	0.6	0.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	**24**	8	4	4	100%	4	16	66,67%
6	0.1	0.1	2	0.6	0.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan rumah tangga yang disedikan	**24**	8	4	4	100%	4	16	66,67%
6	0.1	0.1	2	0.6	0.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket cetakan dan Pengadaan yang disediakan	**24**	8	4	4	100%	4	16	66,67%
6	0.1	0.1	2	0.6	0.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**24**	8	4	4	100%	4	16	66,67%
6	0.1	0.1	2	0.6	0.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**24**	8	4	4	100%	4	16	66,67%

6	**0.1**	**0.1**	**2**	**0.7**		Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	**100**	33,33	100	100	100%	100	66,67	66,67%
6	0.1	0.1	2	0.7		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan Dinas Operasional yang tersedia	-			0				
6	0.1	0.1	2	0.7		Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang disediakan	-			0				
6	0.1	0.1	2	0.7		pengadaan peralatan dan mesin	jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan	**2 unit**		2	6				
6	0.1	0.1	2	0.7		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor bangunan lainnya yang dibangun	-			0				
6	0.1	0.1	2	0.7		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-			0				
6	**0.1**	**0.1**	**2**	**0.8**		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia	**100**	33,33	100	100	100%	100	66,67	66,67%
6	0.1	0.1	2	0.8	0.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**24**	8	4	4	100%	4	16	66,67%
6	0.1	0.1	2	0.8	0.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	**24**	8	4	4	100%	4	16	66,67%
6	0.1	0.1	2	0.8	0.003	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	**24**	8	4	4	100%	4	16	66,67%
6	0.1	0.1	2	0.8	0.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**12**	0	-	0		4	4	33,33%

6	**0.1**	**0.1**	**2**	**0.9**		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentase barang milik Daerah yang terpelihara	**100**	33,33	100	100	100%	100	66,67	66,67%
6	0.1	0.1	2	0.9	0.002	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	**60**		12	12		12	24	40,00%
6	0.1	0.1	2	0.9	0.009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	**6**	2	1	1	100%	1	4	66,67%
6	**0.1**	**0.2**				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	**III**	II+	**III**	III	100%	**III**	II+	100%
6	**0.1**	**0.2**	**2**	**0.1**		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan Internal yang dilakukan	**100**	33,33	**100**	100	100%	**100**	66,67	66,67%
6	0.1	0.2	2	0.1	0.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan internal secara berkala	**20**	0	8	2	25%	4	6	30,00%
6	0.1	0.2	2	0.1	0.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan internal secara berkala	**150**	50	25	30	120%	25	105	70,00%
6	0.1	0.2	2	0.1	0.3	Reviu Laporan Kinerja	jumlah Reviu laporan kinerja	**75**		15	25		15	40	53,33%
6	0.1	0.2	2	0.1	0.4	Review Laporan Keuangan	jumlah Reviu Laporan Keuangan	**90**	30	15	11	73%	15	56	62,22%
6	0.1	0.2	2	0.1	0.5	Pengawasan Desa	Jumlah Nagari/Desa yang diawasi	**222**	74	37	4	11%	37	115	51,80%
6	0.1	0.2	2	0.1	0.7	Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP	persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP	**85%**	59%	85%	86%	101%	85%	85%	100%
6	**0.1**	**0.2**	**2**	**0.2**		penyelenggaraan Pengawasan tujuan tertentu	Persentase Pengawasan dan Penanganan kasus yang di tangani	**100**	33,33	**100**	100	100%	***100***	66,67	66,67%
6	0.1	0.2	2	0.2	0.001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	persentase penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang tertangani	**100**	100	100	100	100%	100	100	100,00%

6	0.1	0.2	2	0.2	0.002	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Pengawasan dengan tujuan tertentu	**102**	23	18	6	33%	10	39	38,24%
6	**0.1**	**0.3**				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN , PEMDAMPINGAN DAN ASISTENSI	MATURITAS SPIP	**3**	2,6	**2,8**	2,9	100%	**3,0**	2,6	100%
6	**0.1**	**0.3**	**2**	**0.1**		perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Persentase rumusan kebijakan teknis pengawasan	**18**	6	**3**	3	100%	**3**	12	66,67%
6	0.1	0.3	2	0.1	0.002	perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan	jumlah kebijakan teknis yang ditetapkan	**18**	6	3	3	100%	3	12	66,67%
6	**0.1**	**0.3**	**2**	**0.2**		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP Minimal B	**84%**	-	**60%**	60%	100%	**72%**	60%	71,43%
6	0.1	0.3	2	0.2	0.001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi	**198**	66	33	33	100%	33	132	66,67%
6	0.1	0.3	2	0.2	0.002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	**198**	66	33	33	100%	33	132	66,67%
6	0.1	0.3	2	0.2	0.003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	**30**	10	5	5	100%	5	20	66,67%
6	0.1	0.3	2	0.2	0.004	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penegakkan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	198	66	33	33	100%	33	132	66,67%

Ada beberapa kegiatan yang belum dan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga harus memilih program/kegiatan prioritas. Selain itu ada beberapa kegiatan baru di Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Solok Selatan 2021-2026 yang belum terakomodir pada Renja 2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Solok Selatan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di bidang Pengawasan yang bertanggung jawab kepada Bupati Solok Selatan melalui Sekretaris Daerah.

Kinerja pelayanan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan tahun 2023 dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja kunci INSPEKTORAT dijelaskan sebagai berikut :

a. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.

Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal adalah Jumlah temuan internal dan eksternal yang telah selesai ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah temuan pemeriksaan internal dan eksternal dikali 100 %

b. Nilai Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian Intern sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah. Maturitas SPIP dinilai oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Nilai Interval 0-5

c. *Level* Kapabilitas APIP

Level Kapabilitas APIP adalah Tingkatan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Kemampuan untuk Melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri atas 6 unsur yang saling terkait yaitu : Peran dan Layanan, Pengelolaan Sumber Daya

Manusia, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tatakelola

Untuk lebih rinci analisis Pencapai Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada **tabel 2.2** sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah
Kabupaten Solok Selatan

NO	Indikator Kinerja SPM, IKK, Perjanjian Kinerja	SPM/standar nasional	IKK/IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		PROYEKSI		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)		(14)
1	Maturitas SPIP		✓	2,8	3,0	3,1	3,2	2,9	3,0	3,1	3,2	
2	Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)		✓	III	III	III	III	III	III	III	III	
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal		✓	80	85	85	85	86,6	86,7	86,8	86,9	
4	Capaian Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja		✓	60%	72%	80%	84%	60,84%	72%	80%	84%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi INSPEKTORAT

Kondisi Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan saat ini masih sangat terbatas dalam berbagai aspek, kendati demikian Inspektorat Solok Selatan telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Solok Selatan Sangat berkaitan erat dengan Kementerian dan Lembaga ditingkat pusat antara lain BPKP dan BPK, dan serta Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Inspektorat didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki permasalahan utama yang menghambat dalam pencapaian tujuan organisasi. Inspektorat keterbatasan SDM dibagian Sekretariat dan terutama sekali kekurangan auditor dan P2UPD. Begitu juga dengan kualitas SDM inspektorat yang masih kurang dalam pelaksanaan suatu audit/pemeriksaan sesuai dengan spesifikasi pemeriksaan yang akan dilakukan. Serta Inspektorat juga masih belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat.

Permasalahan-permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya respon auditi untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008. Belum berjalannya Sistem Pengendalian Intern Pemeirntah secara optimal disebabkan karena berbagai faktor antara lain belum tersosialisasikannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada seluruh pegawai.
3. Kuantitas dan kualitas Aparat Pengawas yang profesional belum memadai dan penempatan SDM belum berdasarkan kompetensi.

4. Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

5. Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan (Audit Kepatuhan) sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.

6. Kurangnya sarana dan prasarana yang representatif dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan seperti minimnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem teknologi dan Informasi).

7. Belum optimalnya pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang disebabkan Perangkat Daerah / Unit Kerja belum sepenuhnya memahami PMPRB online sebagai sarana untuk mewujudkan penataan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah

Dampaknya tentu saja akan berpengaruh kepada capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan. Selain berdampak kepada kinerja Inspektorat juga akan berdampak kepada pencapaian visi Kabupaten Solok Selatan sesuai RPJMD Tahun 2021-2026 : Mewujudkan Solok Selatan yang Maju dan Sejahtera. Tepatnya berpengaruh kepada misi 1 (satu) Yakni Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif dan misi ke 3 (tiga) yakni Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani

Disamping permasalahan dan hambatan Inspektorat memiliki Tantangan dan Peluang dalam pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan

1. Independensi dalam melakukan pengawasan

2. Objek pemeriksaan yang tidak kooperatif dan tidak respon terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kurangnya kepedulian untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

3. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

B. Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara nasional.

2. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan.

3. Komitmen aparat pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

4. Peluang kerjasama (joint audit) dengan aparat pengawas eksternal

Adapun isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Peningkatan Kapabilitas APIP;

2. Belum optimalnya penerapan SPIP di pemerintah daerah dan jajaran perangkat daerah;

3. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal oleh perangkat daerah dan aparatur terkait;

4. Belum optimalnya pelaksanaan penataan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan;

5. Belum optimalnya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;

6. Belum optimalnya peran Inspektorat Daerah sebagai *quality assurance* dan consulting serta early warning system;

7. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan antar sesama Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) dan lembaga pengawasan eksternal serta aparat penegak hukum dan

8. Pemenuhan sumber daya pengawasan dan penajaman analisis pengawas untuk meningkatkan mutu hasil pemeriksaan.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Dalam menyusun Rancangan Akhir RKPD, Inspektorat Kabupaten Solok Selatan merincikan berbagai kebutuhan yang dituangkan didalam Program dan Kegiatan. Sebelum disusun telah dilakukan analisis kebutuhan, Analisa kebutuhan tersebut bertujuan agar dapat mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan oleh Inspektorat Kabupaten Solok Selatan, didalam perjalanannya Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan telah tertuang didalam RKPD Kabupaten Solok Selatan.

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025 pada Inspektorat secara terperinci disajikan pada **tabel 2.3** sebagai berikut :

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Kabupaten : **Solok Selatan**

Nama Perangkat Daerah : **Inspektorat Daerah** **Lembar.....dari.....**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	INSPEKTORAT				**5.594.500.000**					**5.291.925.129**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Solok Selatan	cakupan layanan operasional kantor	**100**	4.194.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Solok Selatan	cakupan layanan operasional kantor	**100**	4.672.521.129	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Solok Selatan	ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	**100**	40.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Solok Selatan	ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	**100**	0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Solok Selatan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Solok Selatan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Solok Selatan	jumlah laporan capaian kinerja dan laporan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	7	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Solok Selatan	jumlah laporan capaian kinerja dan laporan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	7		
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Solok Selatan	persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	100	3.478.775.000	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Solok Selatan	persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	100	4.096.183.829	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Solok Selatan	jumlah Orang yang dibayarkan gaji dan tunjangann	28	3.348.775.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Solok Selatan	jumlah Orang yang dibayarkan gaji dan tunjangann	28	4.027.843.829	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Solok Selatan	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	105.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Solok Selatan	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	68.340.000	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan keungan akhir tahun SKPD	Solok Selatan	jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	1	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan keungan akhir tahun SKPD	Solok Selatan	jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	1		

	administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Solok Selatan	persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah	**100**	270.000.000	administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Solok Selatan	persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah	**100**	21.914.000	
	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Solok Selatan	jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	120.000.000	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Solok Selatan	jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	10		
	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Solok Selatan	jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perubdang-undangan	15	150.000.000	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Solok Selatan	jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perubdang-undangan	15	21.914.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Solok Selatan	persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	151.450.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Solok Selatan	persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	239.813.300	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Solok Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	6.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Solok Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	5.723.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Solok Selatan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Solok Selatan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	25.107.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Solok Selatan	Jumlah paket Peralatan rumah tangga yang disedikan	4	6.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Solok Selatan	Jumlah paket Peralatan rumah tangga yang disedikan	4	6.109.200	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Solok Selatan	Jumlah paket cetakan dan Pengadaan yang disediakan	4	10.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Solok Selatan	Jumlah paket cetakan dan Pengadaan yang disediakan	4	13.355.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Solok Selatan	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4.200.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Solok Selatan	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	7.800.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Solok Selatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	113.750.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Solok Selatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	181.718.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Solok Selatan	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	100	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Solok Selatan	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	100	0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Solok Selatan	jumlah kendaraan Dinas Operasional yang tersedia			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Solok Selatan	jumlah kendaraan Dinas Operasional yang tersedia			
	Pengadaan Mebel	Solok Selatan	Jumlah meubeler yang disediakan			Pengadaan Mebel	Solok Selatan	Jumlah meubeler yang disediakan			
	pengadaan peralatan dan mesin	Solok Selatan	jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan	2		pengadaan peralatan dan mesin	Solok Selatan	jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Solok Selatan	jumlah gedung kantor bangunan lainnya yang dibangun			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Solok Selatan	jumlah gedung kantor bangunan lainnya yang dibangun			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Solok Selatan	jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Solok Selatan	jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Solok Selatan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia	100	27.775.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Solok Selatan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia	100	91.075.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Solok Selatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	3.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Solok Selatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Solok Selatan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4	18.975.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Solok Selatan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4	17.565.000	
	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Solok Selatan	Jumlah laporan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	5.000.000	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Solok Selatan	Jumlah laporan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	7.510.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	63.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah	Solok Selatan	Persentase barang milik Daerah yang terpelihara	100	226.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah	Solok Selatan	Persentase barang milik Daerah yang terpelihara	100	223.535.000	

	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Solok Selatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12	206.000.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Solok Selatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12	198.093.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Solok Selatan	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	1	20.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Solok Selatan	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	1	25.442.000	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Solok Selatan	Level Kapabilitas APIP	III	1.200.000.000	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Solok Selatan	Level Kapabilitas APIP	III	448.027.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Solok Selatan	Persentase Pengawasan Internal yang dilakukan	**100**	950.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Solok Selatan	Persentase Pengawasan Internal yang dilakukan	**100**	403.250.000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Solok Selatan	Jumlah Pengawasan internal secara berkala	64	457.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Solok Selatan	Jumlah Pengawasan internal secara berkala	5	50.270.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Solok Selatan	Jumlah Pengawasan Keuangan internal secara berkala	25	50.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Solok Selatan	Jumlah Pengawasan Keuangan internal secara berkala	25	85.150.000	
	Reviu Laporan Kinerja	Solok Selatan	jumlah Reviu laporan kinerja	15	268.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Solok Selatan	jumlah Reviu laporan kinerja	15	74.780.000	
	Review Laporan Keuangan	Solok Selatan	jumlah Reviu Laporan Keuangan	15	35.000.000	Review Laporan Keuangan	Solok Selatan	jumlah Reviu Laporan Keuangan	5	50.270.000	
	Pengawasan Desa	Solok Selatan	Jumlah Nagari/Desa yang diawasi	37	50.000.000	Pengawasan Desa	Solok Selatan	Jumlah Nagari/Desa yang diawasi	37	68.000.000	
	Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP	Solok Selatan	persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP	85	90.000.000	Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP	Solok Selatan	persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP	85	74.780.000	
	penyelenggaraan Pengawasan tujuan tertentu	Solok Selatan	Persentase Pengawasan dan Penanganan kasus yang di tangani	***100***	250.000.000	penyelenggaraan Pengawasan tujuan tertentu	Solok Selatan	Persentase Pengawasan dan Penanganan kasus yang di tangani	***100***	44.777.000	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Solok Selatan	persentase penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang tertangani	100	50.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Solok Selatan	persentase penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang tertangani	100	14.490.000	

	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Solok Selatan	Jumlah Pengawasan dengan tujuan tertentu	18	200.000.000	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Solok Selatan	Jumlah Pengawasan dengan tujuan tertentu	9	30.287.000	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN , PEMDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Solok Selatan	MATURITAS SPIP	2,8	200.000.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN , PEMDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Solok Selatan	MATURITAS SPIP	2,8	171.377.000	
	perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Solok Selatan	Persentase rumusan kebijakan teknis pengawasan	100	30.000.000	perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Solok Selatan	Persentase rumusan kebijakan teknis pengawasan	100	14.575.000	
	perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan	Solok Selatan	jumlah kebijakan teknis yang ditetapkan	3	30.000.000	perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan	Solok Selatan	jumlah kebijakan teknis yang ditetapkan	3	14.575.000	
	Pendampingan dan Asistensi		Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP Minimal B	60%	170.000.000	Pendampingan dan Asistensi	Solok Selatan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP Minimal B	60%	156.802.000	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Solok Selatan	jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi	33	60.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Solok Selatan	jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi	33	57.443.000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Solok Selatan	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33	60.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Solok Selatan	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33	49.589.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Solok Selatan	Jumlah Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	50.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Solok Selatan	Jumlah Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	24.885.000	

Sesuai dengan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan sebanyak Rp. 5.374.500.000,- sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk pelaksanaan program/kegiatan dianggarkan sebanyak Rp. 6.617.125.000,-. Terdapatnya perbedaan Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dikarenakan Penyesuaian terhadap hasil analisis kebutuhan setelah dilaksanakan asistensi dan penelaahan terhadap rencana pelaksanaan terhadap program/kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk tahun 2025 usulan program dan kegiatan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan diperoleh melalui musrenbang tingkat kecamatan sampai dengan musrenbang kabupaten. Inspektorat Kabupaten Solok Selatan belum ada usulan program/kegiatan dari masyarakat berdasarkan musrenbang yang dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan tugas penanganan kasus atau pengaduan masyarakat, Inspektorat masih memiliki kewenangan didalam melakukan pemeriksaan yang bersifat khusus, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.

Tabel 2.4 (T-C. 3.2)

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	volume	Catatan
1					
2	**N I H I L**				
3					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri

Inspektorat Jendral Kemendagri adalah unsur pengawas di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Inspektorat Jendral memiliki visi, "Menjadi Konsultan dan Katalisator Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri".

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan misi Inspektorat Jendral dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Adapun misi Inspektorat Jendral adalah :

1. Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
2. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan
3. Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka Inspektorat Jendral dalam periode waktu 2019-2023 menetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

A. Tujuan

Adapun tujuan Inspektorat Jendral adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

B. Sasaran

Sasaran dari Inspektorat Jendral adalah :

1. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan
3. Pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

C. Indikator

Sedangkan yang menjadi indikator sasaran adalah :

1. Nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
2. Nilai akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan
3. Nilai penegakan integritas.

Dilihat dari tujuan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, terdapat hubungan keselarasan dengan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan yaitu "**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**".

3.1.2 Telaahan terhadap Kebijakan Inspektorat Provinsi

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah unsur pengawas di linkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Tujuan, sasaran dan indikator sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

B. Sasaran

Sasaran dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. Meningkatnya peran Inspektorat Daerah Provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
2. Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam tata kelola Pemerintah Daerah;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
4. Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Provinsi Sumatera barat;
5. Meningkatnya pembangunan zona integritas pada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan
6. Meningkatnya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

C. Sedangkan yang menjadi Indikator sasaran adalah :

1. Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar;
2. Persentase Perangkat Daerah yang Bebas dari penyimpangan material;
3. Persentase rekomendasi SKPD yang bebas dari penyimpangan aset;
4. Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti;
5. Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B ke atas;
6. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Perangkat Daerah yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM dan
8. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dilihat dari tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terdapat hubungan keselarasan dengan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok selatan yaitu **"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih".**

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi acuan dalam menyusun Renja Inspektorat Kabupaten Solok Selatan diadopsi dari Renstra Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Hubungan antara misi, tujuan dan sasaran dari Inspektorat Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada **tabel 3.1** sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran
Inspektorat Kabupaten Solok Selatan

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	2	3	4	5
	Menjadi pengawas yang profesional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Solok Selatan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Opini BPK
				Nilai SAKIP
				Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD)
			Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
				Nilai Maturitas SPIP
				Level Kapablitas APIP
				Capaian nilai SAKIP Daerah pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja

3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan Inspektorat disusun berdasarkan Tujuan dan Sasaran Inspektorat, yakni tujuan inspektorat adalah "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih" dan sasaran Inspektorat "Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah". Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dapat dilakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan peningkatan kualitas pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Solok Selatan memiliki beberapa **Program dan Kegiatan** yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang diaplikasikan kedalam 2 (Dua) kegiatan pokok, yaitu ;

1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal

a) Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah

b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

c) Reviu laporan kinerja

d) Reviu laporan keuangan

e) Pengawasan desa/nagari

f) Monev, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP

2) Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu

a) Penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah

b) Pengawasan dengan tujuan tertentu

b. Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi

1) Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan

a) perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan

2) Pendampingan dan Asistensi

a) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

b) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

c) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

BAB IV

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung dengan pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman kepada renstra Inspektorat Kabupaten Solok Selatan dan mengacu pada rencana kerja pemerintahan daerah (RKPD), Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian kegiaatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian penyusunan APBD. Rencana kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencaanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan dan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian Program dan Kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA). Rumusan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, adalah sebagaimana tercantum pada **tabel 4.1** Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

TABEL 4.1
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT						5.291.925.129,00							6.347.800.000,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						1.242.167.300,00							1.947.800.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						1.242.167.300,00							1.947.800.000,00	
1,	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan operasional kantor	-			100 Persen	622.763.300,00						-	632.800.000,00	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	-			100 persen	68.340.000,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan	-	105.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	68.340.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		105.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 persen	239.813.300,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan	-	182.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.723.600,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		6.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	25.107.500,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	6.109.200,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		6.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	13.355.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		10.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	7.800.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		9.000.000,00	INSPEKTORAT

	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	181.718.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia	-			100 persen	91.075.000,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan	-	104.300.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		3.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	17.565.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	7.510.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		8.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	63.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		72.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	-			100 Persen	223.535.000,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan	-	241.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	198.093.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		206.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si				1 Unit	25.442.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		35.000.000,00	INSPEKTORAT
2,	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Kapabilitas APIP	-			III Level	448.027.000,00						-	1.015.000.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan Internal yang dilakukan	-			100 Persen	403.250.000,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan	-	835.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Laporan	50.270.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				4 Laporan	85.150.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja															
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				3 Laporan	74.780.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan															
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				2 Laporan	50.270.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		80.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa															
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				4 Laporan	68.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP															

			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				12 Dokumen	74.780.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		95.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dan Penanganan kasus yang ditangani	-			100 persen	44.777.000,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan	-	180.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	14.490.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				2 Laporan	30.287.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		150.000.000,00	INSPEKTORAT
3,	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Matu ritas SPIP	-			3,1 tingkat	171.377.000,00						-	300.000.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis pengawasan Persentase rumusan kebijakan teknis pengawasan	-			3 Dokumen 100 persen	14.575.000,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan	-	25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														

			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	14.575.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan		25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP Minimal B	-			60 Persen	156.802.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan	-	275.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				33 perangkat daerah	57.443.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		[illegible]	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				33 perangkat daerah	49.589.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		[illegible]	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	24.885.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		[illegible]	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														

			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				33 perangkat daerah	24.885.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola pemerintah	Kabupaten Solok Selatan		85.000.000,00	INSPEKTORAT
	X	NON URU						4.049.757.829,00							4.400.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.049.757.829,00							4.400.000.000,00	
1,	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan operasional kantor	-			100 Persen	4.049.757.829,00						-	4.400.000.000,00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	-			100 persen	4.027.843.829,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	4.300.000.000,00	INSPEKTORAT
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bul an	4.027.843.829,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.300.000.000,00	INSPEKTORAT
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah	-			100 persen	21.914.000,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Kabupaten Solok Selatan	-	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	21.914.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n sumber daya manusia yang kompetitif	Kabupaten Solok Selatan		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	J U M L A H							5.291.925.129,00							6.347.800.000,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang pengawasan.

Adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar Inspektorat Kabupaten Solok Selatan beserta seluruh aparaturnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat dan transparan.

5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional yang menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Inspektorat Kabupaten Solok Selatan secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025 maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demi penyempurnaan program dan kegiatan di masa mendatang bimbingan dan arahan dari Pimpinan Daerah serta masukan-masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tetap menjadi harapan kami. Dan penyusunan Rencana Kerja ini juga tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh aparatur Inspektorat serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan. Atas segala bimbingan, arahan, dukungan, kerjasama dan masukan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Padang Aro, Juli 2024

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

RADIYATUL HAYAT, SH, MH
NIP. 19690620 199308 2 001

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun suatu Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Rencana Kerja ini dibuat sebagai pedoman kerja Kecamatan Pauh Duo Tahun 2025, berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1(satu) tahun. Untuk mencapai program dan kegiatan tersebut, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh perlu menerapkan prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif. Selanjutnya keterpaduan dan sinkronisasi baik diantara kegiatan dalam suatu program maupun antar program perlu dilakukan secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi dan misi Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh yaitu "Terwujudnya Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Sebagai Instansi Pemerintahan Yang Memberikan Pelayanan Prima".

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah ini berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Tahun 2025 ini masih jauh dari yang diharapkan serta masih banyak kekurangan, maka kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif bagi penyempurnaan penyusunan ini.

Pakan Rabaa, Agustus 2024

CAMAT KOTO PARIK GADANG DIATEH

SONNI PATRISIA, ST

NIP. 197002032010011004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	6
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategi Perangkat Daerah	6
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
	2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
	3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	32
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	33
	3.3 Program dan Kegiatan	33
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
BAB V	PENUTUP	49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan.Didalam Rencana Kerja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Tahunan Daerah. Selain itu guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dapat dikerjakan secara *simultan/paralel* dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu

terhadap kondisi existing Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, evaluasi kinerja pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh

Rencana Kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, karena disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dan segenap pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud danTujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai acuan kerja perangkat daerah di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1) Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2023 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2025.
2) Mengarahkan visi Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2025.
3) Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh yang dituangkan ke dalam susunan program dan indikasi kegiatanTahun 2025.
4) Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan yang ada pada program / kegiatanyang ada di Rencana Kerja kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS)
2. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks
3. Mengelola keberhasilan organisas secara sistemik.
4. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
5. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
6. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
8. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Berisi Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian renstra, analisis kenerja pelayanan, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dari pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategi Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Solok Selatan, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggran 2023 Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh telah melaksanakan 6 program yang didalamnya terdapat 9 kegiatan.

Dengan menggunakan format Penetapan kinerja, Pengukuran kegiatan dan pengukuran Pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun anggaran 2023 Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerja.

Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan dan kelemahan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Dalam hal ini Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh tidak ada kegiatan yang tidak terealisasi anggarannya dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2023. Sisa anggaran yang ada hanya berupa anggaran yang tidak bisa digunakan atau sisa belanja kegiatan.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Pada umumnya Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh pada tahun Anggaran 2023, realisasi kinerja maupun keuangan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan telah memenuhi target kinerja

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh tidak ada realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023.

2.1.4 Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

A. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan

1. Karena adanya administrasi keuangan yang cukup rumit sementara anggarannya bisa dilaksanakan dengan alternatif lain.
2. kendaraan operasional roda dua tidak layak digunakan sehingga BBM untuk kendaraan operasional roda dua tidak terpakai namun diperubahan dialokasikan kepada kendaraan roda empat.

B. Faktor Penyebab terpenuhinya target kinerja dan program kegiatan

Terdapat 12 (dua belas) sub kegiatan yang telah terpenuhi target kinerja dan program kegiatan Karena merupakan kegiatan rutinitas dan kebutuhan kantor.

Adapun untuk melihat lebih rinci terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
Pencapaian Renstra Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh s.d Tahun 2024
Kabupaten Solok Selatan

OPD : Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/7*100*	*10*	*11=6+8+10*	*12=11/5*
	KECAMATAN										
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**persen**	**100**	**33.33**	**100.00**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**43.26**
X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**33.33**	**100.00**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**43.26**
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/bulan	108	23	23	23	100	24	70	64.81%

X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	72	12	12	12	100	12	36	50%
		Jumlah Tenaga Pendukung administrasi Kantor yang dibayarkan honornya	Orang	5	5	0	0	0	0	5	100%
X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**50**
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	24	4	4	4	100	4	12	50%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	24	4	4	4	100	4	12	50%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	24	4	4	4	100	4	12	50%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	24	4	4	4	100	4	12	50%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	24	4	4	4	100	4	12	50%
X.XX.01.2.06.09	Pelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dari konsultasi SKPD	Laporan	24	4	4	4	100	4	12	50%
X.XX.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**40**

X.XX.01.2.07.02	Pengadaankendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional / lapangan yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0%
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	paket	2	0	0	0	0	0	0	0%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	paket	2	0	0	0	0	0	0	0%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor / bangunan lainnya yang disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0%
X.XX.01.2.07.09	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2	0	0	0	0	2	100%
X.XX.01.2.08	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**38.89**
X.XX.01.2.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	laporan	24	4	4	5	1	4	13	54.17%
X.XX.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikn yang disediakan	laporan	72	12	12	12	1	4	4	5.56%
X.XX.01.2.08.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa perrbaikan peraltan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	24	4	4	4	1	4	12	50.00%
X.XX.01.2.09	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**47.73**

X.XX.01.2.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit / tahun	36	6	6	6	**100**	6	18	50.00%
X.XX.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Unit/tahun	6	4	3	1	**100**	1	6	100.00%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan PATEN**	**persen**	**100**	**33.33**	**50**	**50**	**100**	**100**	**58.33**	116.67%
7.01.02.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**116.67**
7.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terfasilitasinya kegiatan pemuda dan olah raga	Kali	2	1	2	0	0	0	1	50%
		Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	kali	4	3	2	0	0	0	3	75%
		Jumlah koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanankan	kali	4	2	2	2	0	0	4	100%
		Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan	Kali	4	3	2	2	100	0	5	125%
7.01.02.2.02	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	**33.33**	**50**	**50**	**100**	**100**	**58.33**	**33.33**

7.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Layanan	48	8	8	28	100	8	44	91.67%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	**Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan**	tahun	1	**33.33**	1	0	0	0	**33.33**	33.33%
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Terlaksananya layanan perizinan non usaha	tahun	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan pelayanan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	tahun	0	0	0	0	0	0	0	0%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan**	**kali**	**18**	**33.33**	**2**	**3**	**100**	**3**	**34.33**	191%
7.01.03.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**kali**	**18**	**33.33**	**3**	**3**	**100**	**3**	**34.33**	190.74%
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	kali	18	4	3	7	100	3	18	100.00%
	Kegiatan : pemberdayaan kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Keluruahan	Nagari	0	0	0	0	100	0	0	0%
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat diKelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dimonitoring	Nagari	0	0	0	0	100	0	0	0%

7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penegakan Perda yang difasilitasi**	**persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**40**
7.01.04.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase penyelesaian masalah-masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum**	**persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**40.00**	**40**
7.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan	Kali	16	0	3	6	200	4	10	63%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**35.94**
7.01.05.2.01	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**35.94**
7.01.05.2.01.03	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	kali	12	2	2	3	150	2	7	58.33%
7.01.05.2.01.04	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	kali	30	5	5	9	180	6	20	66.67%
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	8	2	2	2	0	2	6	75.00%

	Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	kali	8	0	0	2	0	2	4	50%
		Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan	kali	4	0	0	4	0	1	5	125%
		Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	kali	4	0	0	4	0	1	5	125%
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan yang dilaksanakan dikecamatn	kali	24	0	4	12	300	4	16	67%
		Jumlah Car free day yang dilaksanakan	Kali	180	0	0	12	0	45	57	32%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	33,33
7.01.06.. 2.01	**Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah nagari yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi**	**Nagari**	**30**	**33.33**	**8**	**8**	**100**	**4**	**35.33**	117.78%
7.01.06.. 2.01.02	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam penyusunan administrasi tata pemerintahan desa	Nagari	48	1	8	8	100	4	13	27.08%
7.01.06.. 2.01.03	Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Nagari	48	0	8	8	100	4	12	25.00%
7.01.06.. 2.01.5	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat nagari	Nagari	0	0	0	0	100	0	10	0.00%

7.01.06.. 2.01.07	Sub kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	jumlah nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Nagari	0	0	0	0	100	0	0	100%
7.01.06.. 2.01.08	Sub Kegiatan : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi rekomendasi untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Nagari	0	0	0	0	100	0	0	0.00%
7.01.06.. 2.01.09	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	6	1	1	1	100	1	3	50.00%
7.01.06.. 2.01.15	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	Nagari	18	**5**	0	8	#DIV/0!	0	13	72%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan mempunyai kewenangan :

a. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
b. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

- **Kinerja Pelayanan**

1. Persentase Nagari yang menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan
2. Persentase PelayananTerpadu Kecamatan

Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh merupakan pintu terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada tahun 2023 Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh telah memberikan pelayanan yang cukup maksimal dimana telah dilaksanakan beberapa program yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

Kinerja pelayanan PATEN Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh didukung oleh :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai

Hambatan pencapaian kinerja pelayanan PATEN Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh adalah :

1. Adanya tumpang tindih kewenangan antara Kabupaten dengan Kecamatan.
2. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintahan nagari dengan pemerintahan kecamatan
3. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat

3. IKM Terhadap Pelayanan Pemerintah

Adapun Untuk pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, dapat dilihat pada table 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Solok Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan		√	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pelayanan Terpadu Kecamatan		√	%	50	100	100	100	50	100	100	100	
3	IKM Terhadap Pelayanan Pemerintah		√	%	87,5	90	92,5	95	87,5	90	92,5	95	

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAEREH

2.3.1. Tingkat kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam era otonomi Daerah ini untuk mewujudkan Pemerintahan yang Good Governance dan *Clean Governance* diperlukan aparatur yang mempunyai integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian Perangkat Daerah terus meningkatkan SDM Aparaturnya dengan harapan kinerja Perangkat Daerah dapat mendorong terwujudnya Masyarakat Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagai Instansi Pemerintahan Yang Memberikan Pelayanan Prima. Namun demikian yang perlu mendapat perhatian bersama adalah:

a) Belum jelasnya pembagian kewenangan daerah dan kecamatan dalam pelayanan publik
b) Belum adanya payung yang mengatur tentang pembagian kewenangan
c) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN Kecamatan, khususnya untuk pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi ASN Perangkat Daerah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
d) Rendahnya Ketersediaan sarana dan prasarana ASN
e) Belum maksimalnya penerapan reward dan punishment bagi aparatur pemerintahan
f) Masih minimnya penerapan teknologi dalam pelayanan birokrasi pemerintah
g) Belum maksimalnya fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan

Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh selaku Perangkat Daerah dengan fungsi penunjang berkewajiban mendukung pencapaian misi Kabupaten Solok Selatan terutama sekali misi **3 "Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani"** yang memiliki tujuan sebagai berikut :

"Terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani"

Misi ini menitikberatkan pada peningkatan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke

sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Terdapat beberapa program prioritas daerah yang merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam pencapaian misi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani, berkaitan dengan bidang pemerintahan yaitu :

- Peningkatan manajemen pemerintah dalam pembangunan daerah
- Peningkatan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik yang terpercaya, cepat, tepat dan tanggap serta didukung oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik
- Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan public
- Perkuatan peran pemerintah kecamatan dan percepatan kemandirian nagari dalam pembangunan daerah
- Penyediaan kendaraaan operasional jorong

2.3.2. Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terkait dengan permasalahan dan hambatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dihadapi oleh Perangkat Daerah di Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan birokrasi kecamatan
2. Belum jelasnya pembagian kewenangan daerah dan kecamatan dalam pelayanan publik
3. Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pembagian kewenangan
4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN Kecamatan, khususnya untuk pelatihan dan Bimtek-bimtek bagi ASN.

- **Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Rencana Kerja Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, analisis terhadap

lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana kerja Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Dari analisis ini, jajaran Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dapat mengidentifikasikan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Atas dasar itu, strategi pencapaian misi visi organisasi dapat diformulasikan. serta dapat diketahui faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi strategi dalam mencapai misi visi yang telah ditetapkan.

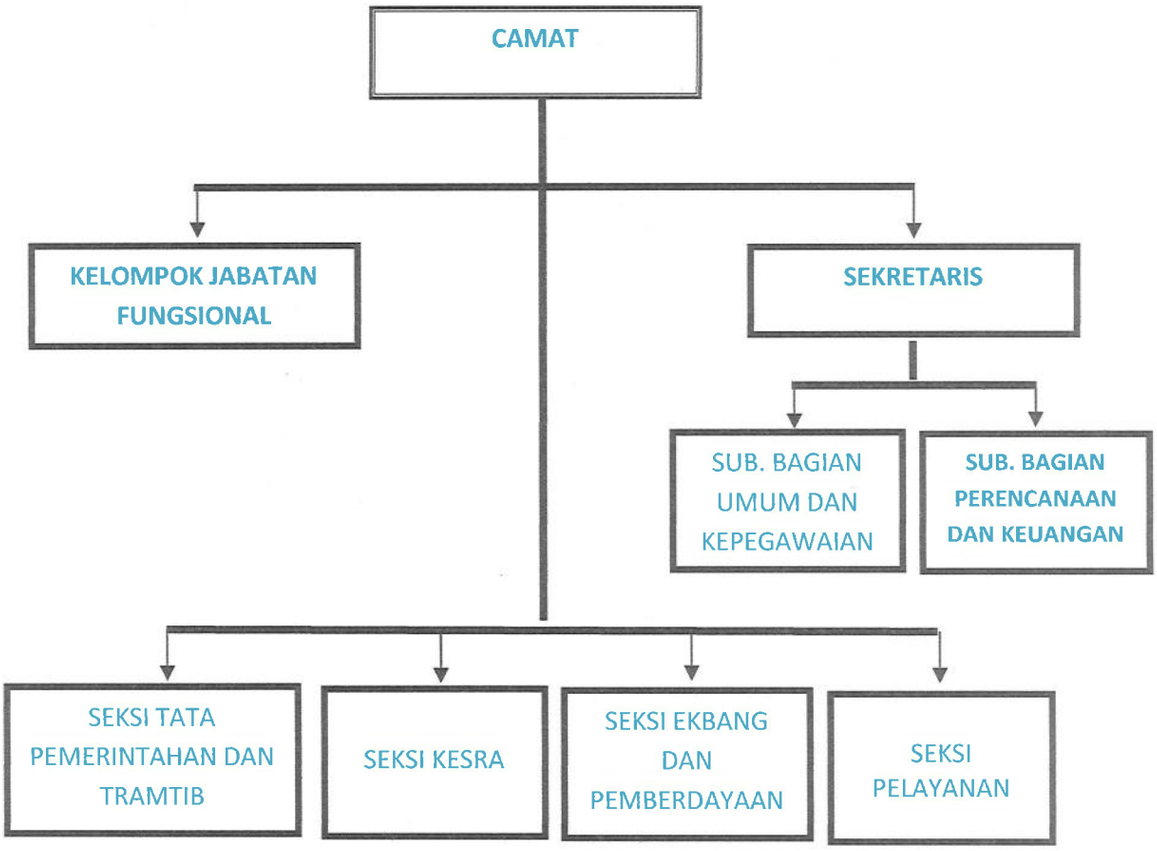
Analisis lingkungan dilakukan baik terhadap lingkungan internal maupun terhadap lingkungan eksternal. Analisis terhadap lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Sementara itu, analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasikan peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Secara singkat, hasil analisis lingkungan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dapat dijabarkan sebagai berikut :

- **Kekuatan**

  Kekuatan yang dimiliki oleh Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh yaitu :

  1. Tersedianya ASN dengan latar belakang pendidikan yang cukup baik dan bervariasi (SLTA, S1 dan S2), namun jumlah dan kualitas masih belum memadai, karena belum adanya pelatihan dan bimtek bagi ASN.
  2. Tersedianya anggaran kegiatan dan sarana dan prasarana, walaupun belum optimal
  3. Sudah adanya struktur organisasi Perangkat daerah dan PembagianTugas (job description) yang jelas, walaupun masih ada struktur yang belum terisi yaitu Kasi PEM dan Trantib.

Pembagian Tugas dan struktur organisasi Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016, dengan adanya pembagian tugas yang jelas, maka lebih memudahkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing seksi.



- **Kelemahan**

1. Kurangnya tenaga trampil dibidangnya masing-masing, Belum dilaksanakannya prinsip *The right man in the right place*, dimana dalam menempatan seseorang pada suatu jabatan kurang memperhatikan latar belakang pendidikan yang dimiliki sehingga mengakibatkan kurang lancarnya pelaksanaan fungsi dan tugas.
2. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk aparatur kecamatan. Masih kurangnya pemberian kesempatan untuk pelaksanaan pendidikan bagi Aparatur kecamatan baik struktural maupun pendidikan teknis lainnya.
3. Kurangnya sarana dan prasarana.

   Pada saat ini sarana dan prasarana yang ada belum memadai untuk mendukung tugas-tugas di kecamatan, terutama sarana dan prasarana dibidang teknologi informasi. Sementara informasi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan.
4. Belum tersusunnya program kegiatan secara terinci dan belum optimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan.

- **Peluang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pelimpahan wewenang pada daerah dilaksanakan secara utuh, bulat yaitu meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan, program dan kebijakan pemerintah, hal ini berarti memerlukan kemandirian, keleluasaan dan prakarsa kepada daerah dalam mengelola sumber daya adminsitrasi dengan memperhatikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang dapat memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, hal ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi dan terciptanya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

Budaya yang berkembang dalam masyarakat yaitu budaya musyawarah dan mufakat yang telah berkembang, melalui musyawarah dan mufakat tersebut dapat di identifikasi permasalahan yang berkembang dimasyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- **Ancaman**

a. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan diperlukan partisipasi aktif masyarakat, namun pada saat ini tingkat pengetahuan masyarakat belum memadai, masyarakat masih rentan dengan berbagai isu yang dapat mengancam pelaksanaan pembangunan.
b. Terjadinya kemelut dibidang politik, keamanan, dan kepastian hukum, sewaktu-waktu dapat mengakibatkan pertentangan dan pertikaian yang mengarah ke disintegrasi bangsa.
c. *Restrukturisasi* / Pergantian Pimpinan

- **Isu Strategis terkait perumusan program dan kegiatan**

Berikut isu strategis terkait perumusan program dan kegiatan pada Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh yaitu perlunya peningkatan **Pelayanan Publik** yang *good governance* (terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah; reformasi

birokrasi; profesionalis ASN; dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah)

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berisikan uraian perbandingan rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dengan hasil analisa kebutuhan, setelah anggaran disahkan terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD dilakukan penyusunan sesuai dengan Renstra Tahun Rencana dan untuk Analisa Kebutuhan disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian target.

Sehubungan dengan analisis diatas dapat dirinci sesuai Tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Solok Selatan

Perangkat Daerah : Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KECAMATAN					**2.625.000.000**	**KECAMATAN**					**3.612.223.734**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**%**	**100**	**2.300.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**%**	**100**	**3.244.851.534**
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**1.868.000.000**	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**1.741.045.233**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kpgd	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	14	1.813.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kpgd	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	14	2.620.321.245
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kpgd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	55.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kpgd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	50.960.000
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**214.200.000**	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**244.570.289**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kpgd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	3.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kpgd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	8.145.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kpgd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	10.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kpgd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	22.027.900
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	kpgd	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	20.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kpgd	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	6.764.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	kpgd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	16.200.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kpgd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	18.184.389

	Subg Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	kpgd	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	15.000.000	Subg Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kpgd	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	10.000.000
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	kpgd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	150.000.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kpgd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	179.449.000
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia**	**%**	**100**	**40.000.000**	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia**	**%**	**0**	**0**
	Sub Kegiatan : Pengadaan sarana dan sarana gedung kantor	kpgd	Jumlah sarana dan prasarna gedung kantor	Paket	1	15.000.000	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Kpgd	Jumlah Paket Mebel yand disediakan	Paket	0	0
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kpgd	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Paket	1	10.000.000	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kpgd	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Paket	0	0
	Sub Kegiatan : Pengadaan sarana dan sarana gedung kantor	kpgd	Jumlah unit gedung kantor gedung kantor	paket		15.000.000						
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia**	**%**	**100**	**12.800.000**	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia**	**%**	**100**	**139.000.000**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kpgd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kpgd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4.000.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kpgd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	6.800.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kpgd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	21.000.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kpgd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	3.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kpgd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	30.000.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kpgd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kpgd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	84.000.000
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**%**	**100**	**165.000.000**	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**%**	**100**	**190.000.000**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	kpgd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit/ Tahun	7	100.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kpgd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit/ Tahun	7	75.000.000

	Jabatan						Jabatan					
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kpgd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit/ Tahun	1	65.000.000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kpgd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit/ Tahun	1	115.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Persentase Layanan PATEN**	**%**	**95**	**60.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Layanan PATEN**	**%**	**95**	**20.000.000**
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		**Persentase Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**%**	**95**	**60.000.000**	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Persentase Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**%**	**95**	**20.000.000**
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kpgd	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Layanan	8	60.000.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kpgd	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Layanan	8	20.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan**	**Kali**	**3**	**75.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan**	**Kali**	**3**	**50.000.000**
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kali**	**3**	**75.000.000**	**Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kali**	**3**	**50.000.000**
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kpgd	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	3	75.000.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kpgd	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	3	50.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi**	**%**	**100**	**50.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi**	**%**	**100**	**20.000.000**
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**50.000.000**	**Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**20.000.000**
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	kpgd	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan	Kali	4	50.000.000	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kpgd	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan	Kali	4	20.000.000

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan**	**%**	**100**	**90.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan**	**%**	**100**	**232.372.200**
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**%**	**100**	**90.000.000**	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**%**	**100**	**232.372.200**
	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kpgd	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	Kali	2	63.000.000	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kpgd	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	Kali	2	70.000.000
	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kpgd	Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kali	5	8.000.000	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kpgd	Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kali	5	70.000.000
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kpgd	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan	Kali	4	2.000.000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kpgd	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan	Kali	4	36.700.000
			Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	2	2.000.000			Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	2	2.700.000
			Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	2	2.000.000			Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	2	5.222.200
			Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan	Kali	1	15.000.000			Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan	Kali	1	24.000.000
			Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali	1	2.000.000			Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali	1	10.750.000
			Jumlah kegiatan Car Fee Day yang dilaksanakan	Kali	45	9.000.000			Jumlah kegiatan Car Fee Day yang dilaksanakan	Kali	45	13.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**%**	**100**	**50.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**%**	**100**	**45.000.000**
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Jumlah desa yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi**	**Nagari**	**4**	**50.000.000**	**Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Jumlah desa yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi**	**Nagari**	**4**	**45.000.000**
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kpgd	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nagari	4	17.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kpgd	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nagari	4	10.000.000

	Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	kpgd	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	4	17.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kpgd	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	4	10.000.000
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	kpgd	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	1	16.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kpgd	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	1	25.000.000

Berdasrkan table 2.3 diatas terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dikarenakan :

- Pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dikarenakan adanya penambahan ASN sebanyak 4 orang pada Tahun 2024.
- Pada sub kegiatan lainnya adanya perubahan dikarenakan adanya refocusing anggaran dan sesuai kebutuhan perangkat daerah.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan. Untuk tahun 2025 tidak terdapat usulan program atau kegiatan dari para pemangku kepentingan.

Dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Solok Selatan

OPD : **Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk tingkat kecamatan kebijakan nasional yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam penyelenggaraan pelayanan yaitu Memperkuat stabilitas Politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan selaku lembaga teknis daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan pegawai.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal :

- **Eksternal:**
  1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
  2) Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
  3) Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

4) Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan.
5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

- **Internal :**

1) Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu / pegawai.
2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
3) Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel
4) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kementerian PPN/Bappenas.
5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang melayani	Meningkatkan pelayanan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan Paten yang diselenggarakan
		Meningkatkan Meningkatkan tata kelola pemerintahan nagari	Persentase Nagari yang menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2025 Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, mempunyai satu urusan yaitu urusan pemerintahan. Pada Urusan tersebut terdapat 6 program, 9 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 ada

beberapa perbedaan dengan Analisa Kebutuhan dikarenakan masih menyesuaikan dengan usulan pada Renstra Tahun 2021-2026.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

RUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PADA KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Installasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan 2. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2	**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah

	DAN PELAYANAN PUBLIK	yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan
3	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	**KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	1.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
5	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional 3.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa 3.Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berisi program/kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Kecamatan Koto PariknGadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, adalah sebagaimana tercantum pada Bab IV tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026. Perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pada Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Tabel 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH KAB. SOLOK SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH						3.612.223.734,00							2.695.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.612.223.734,00							2.695.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						3.612.223.734,00							2.695.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.244.851.534,00						-	2.339.942.500,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.671.281.245,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Pegawai kantor Camat	-	1.870.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	2.620.321.245,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Pegawai kantor Camat		1.815.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	50.950.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Pegawai kantor Camat		55.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	244.570.289,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-	-	219.500.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	8.145.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		3.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	22.027.900,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		16.500.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	6.764.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		3.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	18.184.389,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		10.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	22.027.900,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		16.500.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	6.764.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		3.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	18.184.389,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		10.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		12.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	179.449.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		175.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	139.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-	-	96.442.500,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		3.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		33.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		3.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	84.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		57.442.500,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	190.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-	-	154.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	75.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		70.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	115.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		84.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-			-	**20.000.000,00**						-	**65.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat kecamatan KPGD	-	65.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	20.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat kecamatan KPGD		65.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-			-	**50.000.000,00**						-	**75.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat kecamatan KPGD	-	75.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	50.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat kecamatan KPGD		75.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
4.	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-			-	20.000.000,00						-	55.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat kecamatan KPGD	-	55.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	20.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat kecamatan KPGD		55.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-			-	**232.372.200,00**						-	**105.057.500,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	232.372.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat kecamatan KPGD	-	105.057.500,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				2 Orang	70.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat kecamatan KPGD		45.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5 Orang	70.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat kecamatan KPGD		20.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	92.372.200,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat kecamatan KPGD		40.057.500,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
6.	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-			-	45.000.000,00						-	55.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	45.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	8 Nagari	-	55.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	8 Nagari		19.000.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	8 Nagari		19.500.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	8 Nagari		16.500.000,00	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	JUMLAH							3.612.223.734,00							2.665.000.000,00	

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Perangkat Daerah sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025, Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh pada Tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat daerah, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan Perangkat Daerah.

Pakan Rabaa, Agustus 2024

CAMAT KOTO PARIK GADANG DIATEH,

SONNI PATRISIA, ST

NIP. 197002032010011004

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

KECAMATAN PAUH DUO

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun suatu Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Rencana Kerja ini dibuat sebagai pedoman kerja Kecamatan Pauh Duo Tahun 2025, berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1(satu) tahun. Untuk mencapai program dan kegiatan tersebut, Kecamatan Pauh Duo perlu menerapkan prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif. Selanjutnya keterpaduan dan sinkronisasi baik diantara kegiatan dalam suatu program maupun antar program perlu dilakukan secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi dan misi Kecamatan Pauh Duo yaitu "Terwujudnya Kecamatan Pauh Duo Sebagai Instansi Pemerintahan Yang Memberikan Pelayanan Prima".

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah ini berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Pauh Duo Tahun 2025 ini masih jauh dari yang diharapkan serta masih banyak kekurangan, maka kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif bagi penyempurnaan penyusunan ini.

Pakan Salasa, Juli 2024

CAMAT PAUH DUO

AIG WADENKO, S.STP

NIP.198604192004121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		.....	i
DAFTAR ISI		.....	ii
DAFTAR TABEL		.....	iii
BAB I	PENDAHULUAN	.....	1
1.1	Latar Belakang	.....	1
1.2	Landasan Hukum	.....	2
1.3	Maksud danTujuan	.....	4
1.4	SistematikaPenulisan	.....	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	.....	6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	.....	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah	.....	18
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	.....	21
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	26
2.5	Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	.....	36
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	.....	38
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	.....	38
3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	.....	39
3.3	Program dan Kegiatan	.....	39
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	.....	42
BAB V	PENUTUP	.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Pauh Duo	10
Tabel 2.3	Review Tergadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024	27
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024	37
Tabel 4.1	Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kecamatan Pauh Duo sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan.Didalam Rencana Kerja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Tahunan Daerah. Selain itu guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pauh Duo mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pauh Duo dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Kecamatan Pauh Duo, evaluasi kinerja pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Pauh Duo.

Rencana Kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, karena disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kecamatan pauh Duo dan segenap pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud danTujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai acuan kerja perangkat daerah di Kecamatan Pauh Duo dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1) Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2023 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2025.
2) Mengarahkan visi Kecamatan Pauh Duo ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2025.
3) Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Pauh Duo yang dituangkan ke dalam susunan program dan indikasi kegiatanTahun 2025.
4) Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan yang ada pada program / kegiatanyang ada di Rencana Kerja kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS)
2. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
3. Mengelola keberhasilan organisas secara sistemik.
4. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
5. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
6. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
8. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Berisi Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian renstra, analisis kenerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dari pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategi Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Pauh Duo tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Solok Selatan, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggran 2023 Kecamatan Pauh Duo telah melaksanakan 6 program yang didalamnya terdapat 9 kegiatan.

Dengan menggunakan format Penetapan kinerja, Pengukuran kegiatan dan pengukuran Pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun anggaran 2023 Kecamatan Pauh Duo dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerja.

Kecamatan Pauh Duo menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan dan kelemahan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Dalam hal ini Kecamatan Pauh Duo tidak ada kegiatan yang tidak terealisasi anggarannya dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2023. Sisa anggaran yang ada hanya berupa anggaran yang tidak bisa digunakan atau sisa belanja kegiatan.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Pada umumnya Kecamatan Pauh Duo pada tahun Anggaran 2023, realisasi kinerja maupun keuangan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan telah memenuhi target kinerja

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

KecamatanPauh Duo tidak ada realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023.

2.1.4. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

A. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan

1. Karena adanya administrasi keuangan yang cukup rumit sementara anggarannya bisa dilaksanakan dengan alternatif lain.
2. kendaraan operasional roda dua tidak layak digunakan sehingga BBM untuk kendaraan operasional roda dua tidak terpakai namun diperubahan dialokasikan kepada kendaraan roda empat.

B. Faktor Penyebab terpenuhinya target kinerja dan program kegiatan

Terdapat 12 (dua belas) sub kegiatan yang telah terpenuhi target kinerja dan program kegiatan Karena merupakan kegiatan rutinitas dan kebutuhan kantor.

Adapun untuk melihat lebih rinci terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pauh Duo Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Pauh Duo dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel : 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s.d Tahun 2024

Kabupaten Solok Selatan

OPD : **Kecamatan Pauh Duo**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/7*100*	*10*	*11=6+8+10*	*12=11/5*
	KECAMATAN										
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Layanan Operasional Kantor	persen	100	33,33	100	100	100	100	66,67	66,67
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	33,33	100	100	100	100	66,67	66,67

X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/bulan	110	15	20	20	100	21	56	50,91%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	72	12	12	12	100	12	36	50,00%
		Jumlah Tenaga Pendukung administrasi Kantor yang dibayarkan honornya	Orang	34		0	0	-	0	0	0,00%
X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,67**	**66,67**
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	24	4	4	4	100	4	12	50,00%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	24	4	4	4	100	4	12	50,00%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	24	4	4	4	100	4	12	50,00%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang	Jumlah paket barang	paket	24	4	4	4	100	4	12	50,00%

	Cetakan dan Penggandaan	cetakan dan penggandaan yang disediakan									
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	24	4	4	4	100	4	12	50,00%
X.XX.01.2.06.09	Pelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dari konsultasi SKPD	Laporan	24	4	4	4	100	4	12	50,00%
X.XX.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,67**	**66,67**
X.XX.01.2.07.02	Pengadaankendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional / lapangan yang disediakan	Unit	2	0	0	0	0	0	0	0%
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	paket	2	1	1	0	0	1	0	0%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	paket	2	0	0	0	0	0	0	0%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor / bangunan lainnya yang disediakan	unit	2	0	0	0	0	0	0	0%

X.XX.01.2.07.09	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	0	0	0	0	0	0	0%
X.XX.01.2.08	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,67**	**66,67**
X.XX.01.2.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	laporan	24	4	4	4	100%	4	12	50,00%
X.XX.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikn yang disediakan	laporan	72	12	12	12	100%	12	12	16,67%
X.XX.01.2.08.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa perrbaikan peraltan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	24	4	4	4	100%	4	12	50,00%
X.XX.01.2.09	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,67**	**66,67**
X.XX.01.2.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan	Unit / tahun	24	4	4	4	100	4	12	50,00%

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan pajaknya									
X.XX.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Unit/tahun	11	1	2	2	100	2	5	45,45%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan PATEN**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,67**	**66,67**
7.01.02.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**40**	**116,67**
7.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terfasilitasinya kegiatan pemuda dan olah raga	Kali	2	0	0	0	0	0	0	0%
		Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	kali	4	0	0	0	0	0	0	0%
		Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan	Kali	8	0	0	0	100	0	0	0%
7.01.02.2.02	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak**	**Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di**	**persen**	**100**	**40**	**50**	**50**	**100**	**100**	**33,33**	**33,33**

	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**wilayah kecamatan**									
7.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Layanan	48	**8**	8	8	100	8	**66,67**	**66,67**
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	tahun	1	**1**	1	0	0	0	33,33	33,33%
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Terlaksananya layanan perizinan non usaha	tahun	1	**1**	0	0	0	0	1	100,00%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan pelayanan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	tahun	1	**1**	0	0	0	0	1	100,00%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan**	**kali**	**18**	**3**	**3**	**3**	**100**	**3**	**9**	66,67
7.01.03.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Kegiatan**	**Jumlah koordinasi kegiatan**	**kali**	**18**	**3**	**3**	**3**	**100**	**3**	**9**	66,67

	Pemberdayaan Desa	**pemberdayaan desa**									
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	kali	18	3	3	3	100	3	9	66,67
	Kegiatan : pemberdayaan kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Keluruahan	Nagari	10	5	5	5	100	0	10	100%
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat diKelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dimonitoring	Nagari	10	5	5	5	100	0	10	100%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penegakan Perda yang difasilitasi**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,67**	**66,67**
7.01.04.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase penyelesaian masalah-masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,67**	**66,67**
7.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan	Kali	20	4	4	4	100	4	12	60%

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,67**	**66,67**
7.01.05.2.01	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,67**	**66,67**
7.01.05.2.01.03	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	kali	12	2	2	2	100	2	6	66,67%
7.01.05.2.01.04	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	kali	30	5	5	5	100	5	15	66,67%
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	8	0	0	0	-	2	2	25,00%
		Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	kali	8	0	0	0	0	2	2	25%

		Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan	kali	4	0	0	0	0	1	1	25%
		Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	kali	4	0	0	0	0	1	1	25%
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan yang dilaksanakan dikecamatn	kali	32	8	8	8	100	4	20	63%
		Jumlah Car free day yang dilaksanakan	Kali	180	0	-	-	0	45	45	25%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,67**	**66,67**
7.01.06..2.01	**Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah nagari yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi**	**Nagari**	**30**	**33,33**	**5**	**5**	**100**	**5**	**66,67**	**66,67**
7.01.06..2.01.02	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam penyusunan administrasi tata pemerintahan desa	Nagari	30	5	5	5	100	5	15	50,00%
7.01.06..2.01.03	Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan	Nagari	30	5	5	5	100	0	10	33,33%

	Desa	pendayagunaan aset desa									
7.01.06..2.01.5	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat nagari	Nagari	10	5	5	5	100	0	10	100%
7.01.06..2.01.07	Sub kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	jumlah nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Nagari	10	5	5	5	100	0	10	100%
7.01.06..2.01.08	Sub Kegiatan : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi rekomendasi untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Nagari	10	5	5	5	100	0	10	100%
7.01.06..2.01.09	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	6	1	1	1	100	1	3	50,00%
7.01.06..2.01.15	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	Nagari	10	5	5	5	100	0	10	100%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan mempunyai kewenangan :

a. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
b. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

- **Kinerja Pelayanan**

1. **Persentase Nagari yang menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan**
2. **Persentase PelayananTerpadu Kecamatan**

   Kecamatan Pauh Duo merupakan pintu terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada tahun 2023 Kecamatan Pauh Duo telah memberikan pelayanan yang cukup maksimal dimana telah dilaksanakan beberapa program yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

   Kinerja pelayanan PATEN Kecamatan Pauh Duo didukung oleh :

   1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup
   2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai

   Hambatan pencapaian kinerja pelayanan PATEN Kecamatan Pauh Duo adalah :

   1. Adanya tumpang tindih kewenangan antara Kabupaten dengan Kecamatan.
   2. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintahan nagari dengan pemerintahan kecamatan
   3. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat

3. IKM Terhadap Pelayanan Pemerintah

Adapun Untuk pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pauh Duo, dapat dilihat pada table 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja PelayananPerangkat Daerah

Kabupaten Solok Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*7*	*11*	*12*		*13*	*17*
1	Persentase Nagari yang menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan		v	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pelayanan Terpadu Kecamatan		v	%	40	50	100	100	40	50	100	100	
3	IKM Terhadap Pelayanan Pemerintah		v	%	85	87,5	87,5	92,50	85	87,5	92,50	95	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Tingkat kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam era otonomi Daerah ini untuk mewujudkan Pemerintahan yang Good Governance dan Clean Governance diperlukan aparatur yang mempunyai integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian Perangkat Daerah terus meningkatkan SDM Aparaturnya dengan harapan kinerja Perangkat Daerah dapat mendorong terwujudnya Masyarakat Kecamatan Pauh Duo sebagai Instansi Pemerintahan Yang Memberikan Pelayanan Prima. Namun demikian yang perlu mendapat perhatian bersama adalah:

a) Belum jelasnya pembagian kewenangan daerah dan kecamatan dalam pelayanan publik
b) Belum adanya payung yang mengatur tentang pembagian kewenangan
c) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN Kecamatan, khususnya untuk pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi ASN Perangkat Daerah Kecamatan Pauh Duo
d) Rendahnya Ketersediaan sarana dan prasarana ASN
e) Belum maksimalnya penerapan reward dan punishment bagi aparatur pemerintahan
f) Masih minimnya penerapan teknologi dalam pelayanan birokrasi pemerintah
g) Belum maksimalnya fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan

Kecamatan Pauh Duo selaku Perangkat Daerah dengan fungsi penunjang berkewajiban mendukung pencapaian misi Kabupaten Solok Selatan terutama sekali misi **3 "Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani"** yang memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani

Misi ini menitikberatkan pada peningkatan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan

efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Terdapat beberapa program prioritas daerah yang merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam pencapaian misi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani, berkaitan dengan bidang pemerintahan yaitu :

- Peningkatan manajemen pemerintah dalam pembangunan daerah
- Peningkatan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik yang terpercaya, cepat, tepat dan tanggap serta didukung oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik
- Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan public
- Perkuatan peran pemerintah kecamatan dan percepatan kemandirian nagari dalam pembangunan daerah
- Penyediaan kendaraaan operasional jorong

2.3.2. Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terkait dengan permasalahan dan hambatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dihadapi oleh Perangkat Daerah di Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan birokrasi kecamatan
2. Belum jelasnya pembagian kewenangan daerah dan kecamatan dalam pelayanan publik
3. Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pembagian kewenangan
4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN Kecamatan, khususnya untuk pelatihan dan Bimtek-bimtek bagi ASN.

● Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Rencana Kerja Kecamatan Pauh Duo memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana kerja Kecamatan Pauh Duo. Dari analisis ini, jajaran Kecamatan Pauh Duo dapat mengidentifikasikan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Atas dasar itu, strategi pencapaian misi visi organisasi dapat diformulasikan. serta dapat diketahui faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi strategi dalam mencapai misi visi yang telah ditetapkan.

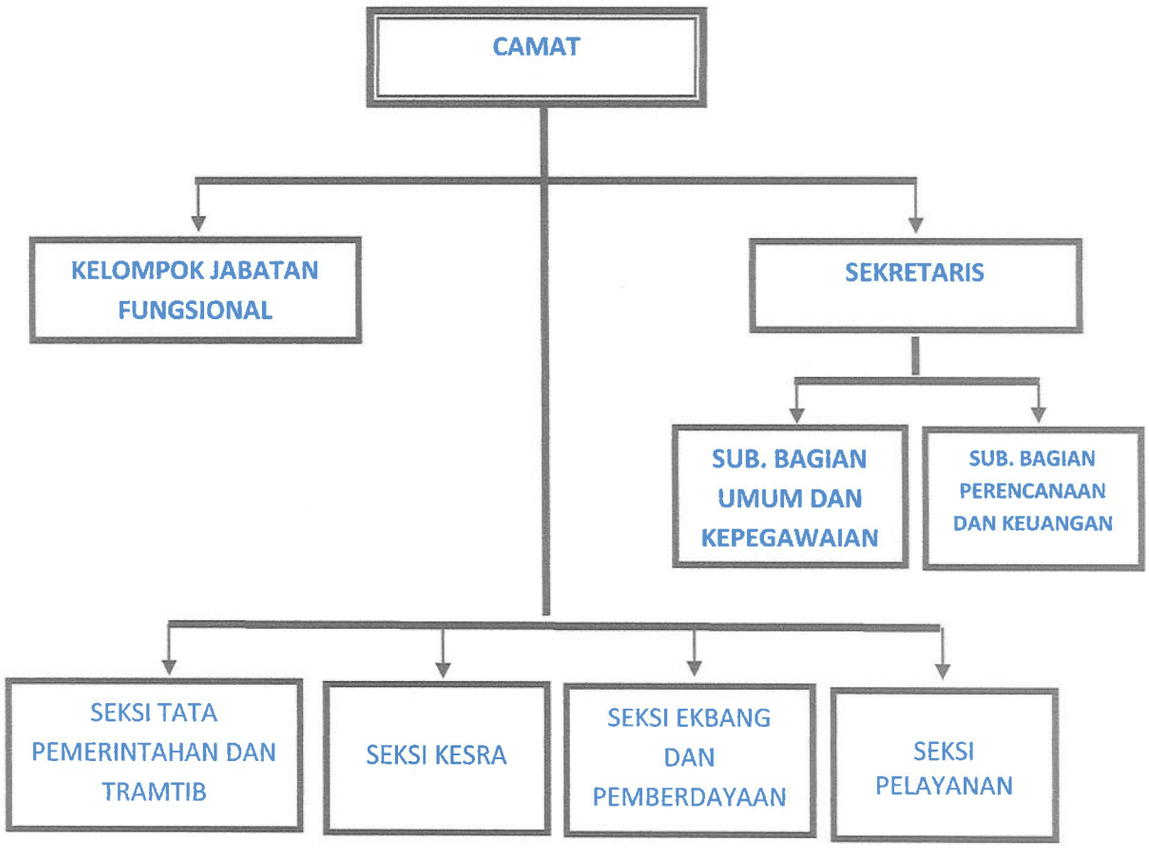
Analisis lingkungan dilakukan baik terhadap lingkungan internal maupun terhadap lingkungan eksternal. Analisis terhadap lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Pauh Duo. Sementara itu, analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasikan peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Kecamatan Pauh Duo. Secara singkat, hasil analisis lingkungan Kecamatan Pauh Duo dapat dijabarkan sebagai berikut :

- **Kekuatan**

  Kekuatan yang dimiliki oleh Kecamatan Pauh Duo yaitu :

  1. Tersedianya ASN dengan latar belakang pendidikan yang cukup baik dan bervariasi (SLTA, S1 dan S2), namun jumlah dan kualitas masih belum memadai, karena belum adanya pelatihan dan bimtek bagi ASN.
  2. Tersedianya anggaran kegiatan dan sarana dan prasarana, walaupun belum optimal
  3. Sudah adanya struktur organisasi Perangkat daerah dan PembagianTugas (job description) yang jelas, walaupun masih ada struktur yang belum terisi yaitu Kasi PEM dan Trantib.

Pembagian Tugas dan struktur organisasi Kecamatan Pauh Duo ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016, dengan adanya pembagian tugas yang jelas, maka lebih memudahkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing seksi.



- **Kelemahan**

1. Kurangnya tenaga trampil dibidangnya masing-masing, Belum dilaksanakannya prinsip *The right man in the right place,* dimana dalam menempatan seseorang pada suatu jabatan kurang memperhatikan latar belakang pendidikan yang dimiliki sehingga mengakibatkan kurang lancarnya pelaksanaan fungsi dan tugas.
2. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk aparatur kecamatan. Masih kurangnya pemberian kesempatan untuk pelaksanaan pendidikan bagi Aparatur kecamatan baik struktural maupun pendidikan teknis lainnya.
3. Kurangnya sarana dan prasarana.

   Pada saat ini sarana dan prasarana yang ada belum memadai untuk mendukung tugas-tugas di kecamatan, terutama sarana dan prasarana dibidang teknologi informasi. Sementara informasi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan.
4. Belum tersusunnya program kegiatan secara terinci dan belum optimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan.

- **Peluang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pelimpahan wewenang pada daerah dilaksanakan secara utuh, bulat yaitu meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan, program dan kebijakan pemerintah, hal ini berarti memerlukan kemandirian, keleluasaan dan prakarsa kepada daerah dalam mengelola sumber daya adminsitrasi dengan memperhatikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang dapat memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, hal ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi dan terciptanya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

Budaya yang berkembang dalam masyarakat yaitu budaya musyawarah dan mufakat yang telah berkembang, melalui musyawarah dan mufakat tersebut dapat di identifikasi permasalahan yang berkembang dimasyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- **Ancaman**

a. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan diperlukan partisipasi aktif masyarakat, namun pada saat ini tingkat pengetahuan masyarakat belum memadai, masyarakat masih rentan dengan berbagai isu yang dapat mengancam pelaksanaan pembangunan.
b. Terjadinya kemelut dibidang politik, keamanan, dan kepastian hukum, sewaktu-waktu dapat mengakibatkan pertentangan dan pertikaian yang mengarah ke disintegrasi bangsa.
c. Restrukturisasi / Pergantian Pimpinan

- **Isu Strategis terkait perumusan program dan kegiatan**

Berikut isu strategis terkait perumusan program dan kegiatan pada Kecamatan Pauh Duo yaitu perlunya peningkatan **Pelayanan Publik** yang *good governance* (terkait dengan peningkatan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintah; reformasi birokrasi; profesionalis ASN; dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah)

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berisikan uraian perbandingan rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Pauh Duo dengan hasil analisa kebutuhan, setelah anggaran disahkan terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD dilakukan penyusunan sesuai dengan Renstra Tahun Rencana dan untuk Analisa Kebutuhan disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian target.

Sehubungan dengan analisis diatas dapat dirinci sesuai Tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Solok Selatan

PD :
Kecamatan Pauh Duo

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikator	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikator	
1	*2*	*3*			*5*	*6*	7	8			10	11	12
	KECAMATAN					1.980.000.000	**KECAMATAN**					3.226.118.967	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**%**	**100**	**1.730.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**%**	**100**	**2.895.215.767**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**1.421.087.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**2.473.398.967**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pauh Duo	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang /bulan	20	1.366.087.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pauh Duo	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang /bulan	22	2.423.118.967	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pauh Duo	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	55.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pauh Duo	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	50.280.000	
	Administrasi Umum Perangkat daerah		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**188.251.000**	**Administrasi Umum Perangkat daerah**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**183.431.100**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pauh Duo	Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	4	3.751.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pauh Duo	Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	4	2.995.100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pauh Duo	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	4	16.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pauh Duo	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	4	43.196.920	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pauh Duo	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	4	5.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pauh Duo	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	4	3.549.200	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pauh Duo	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	4	12.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pauh Duo	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	4	10.008.880	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pauh Duo	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	4	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pauh Duo	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	4	4.950.000	
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi	Pauh Duo	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan	laporan	4	146.000.000	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi	Pauh Duo	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	4	118.731.000	

	SKPD		Konsultasi SKPD				SKPD						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pauh Duo	Persentase Barang Milik Daerah Yang Tersedia	Persen	100	50.000.000							
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pauh Duo	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit	1	10.000.000							
	Pengadaan Mebel	Pauh Duo	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	paket	1	10.000.000							
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pauh Duo	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	paket	1	10.000.000							
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pauh Duo	Jumlah unit gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	unit	1	10.000.000							
	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Pauh Duo	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	1	10.000.000							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang**	**%**	**100**	**17.662.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**		**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**%**	**100**	**106.500.000**	

	Pemerintahan Daerah		**tersedia**				**Pemerintahan Daerah**						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pauh Duo	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	lapor an	4	2.662.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pauh Duo	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	lapor an	4	2.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pauh Duo	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	lapor an	12	10.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pauh Duo	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	lapor an	4	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pauh Duo	Jumlah laporan penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	lapor an	4	5.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pauh Duo	Jumlah laporan penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	lapor an	4	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Pauh Duo	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	lapor an	12	-	Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Pauh Duo	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	lapor an	12	84.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	%	100	53.000.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	%	100	131.885.700	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Pauh Duo	Jumlah Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit/t ahun	4	43.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Pauh Duo	Jumlah Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit/t ahun	4	51.885.700	

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pauh Duo	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit/tahun	2	10.000.000	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pauh Duo	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit/tahun	2	80.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pauh Duo	**Persentase Layanan PATEN**	**%**	**100**	**60.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Layanan PATEN**	**%**	**50**	**5.034.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		**Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan**	**%**	**100**	**60.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan**	**%**	**50**	**5.034.000**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Pauh Duo	Jumlah layanan PATEN	Layan an	8	60.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Pauh Duo	Jumlah layanan PATEN	Layan an	8	5.034.000	

	Kecamatan						Kecamatan						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Jumlah kegiatan pemberdayaan**	**kali**	**3**	**45.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Jumlah kegiatan pemberdayaan**	**kali**	**3**	**43.450.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**kali**	**3**	**45.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**kali**	**3**	**43.450.000**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pauh Duo	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	kali	3	45.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pauh Duo	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	kali	3	43.450.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Cakupan penegakan Perda yang difasilitasi**	**%**	**100**	**20.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Cakupan penegakan Perda yang difasilitasi**	**%**	**100**	**11.317.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Persentase penyelesaian masalah-masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum**	**%**	**100**	**20.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase penyelesaian masalah-masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum**	**%**	**100**	**11.317.000**	
	Sinergitas dengan	Pauh	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah	Kali	4		Sinergitas dengan	Pauh	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trantib yang	Kali	4	11.317.000	

	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Duo	trantib yang dilaksanakan			20.000.000	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Duo	dilaksanakan				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**65.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**235.658.800**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**%**	**100**	**65.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**%**	**100**	**235.658.800**	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pauh Duo	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	kali	2	25.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pauh Duo	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	kali	2	75.934.800	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	Pauh Duo	Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	kali	5	15.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	Pauh Duo	Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	kali	5	47.756.000	

	Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional						Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional						
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pauh Duo	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan	Kali	4	25.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pauh Duo	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan	Kali	4	111.968.000	
			Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	2				Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	2		
			Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	kali	2				Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	kali	2		
			Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan	kali	1				Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan	kali	1		
			Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	kali	1				Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	kali	1		
			Jumlah car free day yang dilaksanakan	Kali	45				Jumlah car free day yang dilaksanakan	Kali	45		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**%**	**100**	**60.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**%**	**100**	**35.443.400**	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Jumlah Nagari yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi**	**Nagari**	**5**	**60.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Jumlah Nagari yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi**	**Nagari**	**5**	**35.443.400**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pauh Duo	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam penyusunan administrasi tata pemerintahan desai	Nagari	5	19.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pauh Duo	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam penyusunan administrasi tata pemerintahan desai	Nagari	5	6.302.200	
	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Pauh Duo	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Nagari	5	5.000.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Pauh Duo	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Nagari	5	6.062.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Pauh Duo	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	1	36.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Pauh Duo	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	1	23.079.200	

Berdasrkan table 2.3 diatas terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dikarenakan :

- Pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dikarenakan adanya penambahan ASN sebanyak 4 orang pada Tahun 2024.
- Pada sub kegiatan lainnya adanya perubahan Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pada tahun ini.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan. Untuk tahun 2025 tidak terdapat usulan program atau kegiatan dari para pemangku kepentingan.

Dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Solok Selatan

OPD : **Kecamatan Pauh Duo**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TelaahTerhadap Kebijakan Nasional

Untuk tingkat kecamatan kebijakan nasional yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam penyelenggaraan pelayanan yaitu Memperkuat stabilitas Politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan selaku lembaga teknis daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal :

- **Eksternal:**

1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2) Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
3) Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

4) Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan.
5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

- **Internal :**

1) Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu / pegawai.
2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
3) Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel
4) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kementerian PPN/Bappenas.
5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang melayani	Meningkatkan pelayanan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan Paten yang diselenggarakan
		Meningkatkan Meningkatkan tata kelola pemerintahan nagari	Persentase Nagari yang menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2025 Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, mempunyai satu urusan yaitu urusan pemerintahan. Pada Urusan tersebut terdapat 6 program, 9 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 ada beberapa perbedaan dengan Analisa Kebutuhan dikarenakan masih menyesuaikan dengan usulan pada Renstra Tahun 2021-2026.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

RUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PADA KECAMATAN PAUH DUO
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Installasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan 2. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2	**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4	**KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	1.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
5	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional 3.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa 3.Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berisi program/kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, adalah sebagaimana tercantum pada Bab IV tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026. Perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pada Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Tabel 4.1 **RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**
KECAMATAN PAUH DUO KAB. SOLOK SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PAUH DUO						**3.226.118.967,00**							**2.071.295.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.223.123.867,00**							**2.067.206.410,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.223.123.867,00**							**2.067.206.410,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan operasional kantor***	-			**100 persen**	**2.892.220.867,00**						-	**1.817.208.410,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah*	-			100 persen	2.473.398.967,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Pegawai Kecamatan Pauh Duo	-	1.434.228.210,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2.423.118.967,00	Kab, Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Pegawai Kecamatan Pauh Duo		1.379.228.210,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	50.280.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Pegawai Kecamatan Pauh Duo		55.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah*	-			100 persen	180.436.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Pegawai Kecamatan Pauh Duo	-	199.550.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	43.196.920,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Pegawai Kecamatan Pauh Duo		16.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	3.549.200,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Pegawai Kecamatan Pauh Duo		6.050.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	10.008.860,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Pegawai Kecamatan Pauh Duo		12.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4.950.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Pegawai Kecamatan Pauh Duo		5.500.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	118.731.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Pegawai Kecamatan Pauh Duo		160.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 persen	106.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Pegawai Kecamatan Pauh Duo	-	102.428.200,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	2.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Pegawai Kecamatan Pauh Duo		2.928.200,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Pegawai Kecamatan Pauh Duo		10.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Pegawai Kecamatan Pauh Duo		5.500.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	84.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Pegawai Kecamatan Pauh Duo		84.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang dipelihara*	-			100 persen	131.885.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Pegawai Kecamatan Pauh Duo	-	81.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	51.885.700,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Pegawai Kecamatan Pauh Duo		51.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	80.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Pegawai Kecamatan Pauh Duo		30.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase layanan PATEN***	-			**100 persen**	**5.034.000,00**						-	**60.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan*	-			100 persen	5.034.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Pauh Duo	-	60.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	5.034.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Pauh Duo		60.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Jumlah kegiatan pemberdayaan***	-			**3 kali**	**43.450.000,00**						-	**45.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa*	-			3 kali	43.450.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Pauh Duo	-	45.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	43.450.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Pauh Duo		45.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Cakupan penegakkan perda***	-			**100 persen**	**11.317.000,00**						-	**20.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase penyelesaian masalah-masalah terkait ketentraman dan ketertiban*	-			100 persen	11.317.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Pauh Duo	-	20.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	11.317.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Pauh Duo		20.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan***	-			**100 persen**	**235.868.600,00**						-	**65.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daeah*	-			100 persen	235.858.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Pauh Duo	-	85.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				2 Orang	75.934.800,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Pauh Duo		25.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5 Orang	47.756.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Pauh Duo		15.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	111.968.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Pauh Duo		25.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/nagari***	-			**100 persen**	**35.443.400,00**						-	**60.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah nagari yang difasilitasi dimonitoring dan evaluasi*	-			5 nagari	35.443.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Pauh Duo	-	60.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	6.302.200,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Pauh Duo		19.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5 Dokumen	6.062.000,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Pauh Duo		5.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	23.079.200,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Pauh Duo		36.000.000,00	KECAMATAN PAUH DUO
	X	**NON URUSAN**						**2.995.100,00**							**4.088.590,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**2.995.100,00**							**4.088.590,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan operasional kantor***	-			**100 persen**	**2.995.100,00**						-	**4.088.590,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah*	-			100 persen	2.995.100,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-	-	4.088.590,00	KECAMATAN PAUH DUO
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.995.100,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		4.086.590,00	KECAMATAN PAUH DUO
	JUMLAH							3.226.118.967,00							2.071.295.000,00	

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Perangkat Daerah sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Pauh Duo untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025, Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Pauh Duo pada Tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat daerah, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan Perangkat Daerah.

Pakan Selasa, Juli 2024

CAMAT PAUH DUO,

AIG WADENKO, S.STP

NIP.198604192004121002

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

KECAMATAN SANGIR

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Program Pembangunan Kecamatan Sangir dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tupoksi Kecamatan.

Rencana Kerja Kecamatan Sangir Tahun 2025 ini mencakup Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan acuan bagi Kecamatan Sangir dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini bertujuan sebagai dasar pembuatan Rencana Kerja Anggaran bagi Kecamatan Sangir Tahun 2025, dan juga berfungsi sebagai bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan serta sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan Rencana Anggran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

Demikianlah dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sangir ini dibuat, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Tahun 2025.

Lubuk Gadang, Juli 2024

CAMAT SANGIR

ABUL ABAS,SE

NIP.197103161993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
BAB.I		**PENDAHULUAN**	
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	2
	1.3	Maksud dan Tujuan	4
	1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB.II		**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**	
	2.I	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2	Analisis Kinerja PelayananPerangkat Daerah	12
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	18
	2.5	Penelaahan usulan program dan kegiatanmasyarakat	23
BAB. III		**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	
	3.1	Telaah terhadap Kebijakan Nasional	25
	3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	26
	3.3	Program dan Kegiatan	27
BAB. IV		**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	29
BAB.V		**PENUTUP**	34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kecamatan Sangir sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Didalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Tahunan Daerah. Selain itu guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Proses Penyusunan Renja Kecamatan Sangir mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Sangir dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Kecamatan Sangir, evaluasi kinerja pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Sangir,

Rencana Kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, karena disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Sangir dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Kecamatan Sangir Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2025 dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di Kecamatan Sangir dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

a. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran tahun 2023 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2025.
b. Mengarahkan visi Kecamatan Sangir kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2025.
c. Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Sangir yang dituangkan ke dalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2025.
d. Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sangir ini adalah :

a. Sebagai bahan masukan yang ada pada Program/Kegiatan di Rencana Kerja kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS)
b. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
c. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
d. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
e. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
f. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.
g. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
h. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Sangir berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Berisi Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dari pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Sangir Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Solok Selatan, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direlisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggran 2023 Kecamatan Sangir telah melaksanakan 6 program yang didalamnya terdapat 9 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 3.238.142.807,-

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan Pengukuran Kinerja untuk Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sangir dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam Pencapaian Kinerja.

Kecamatan Sangir menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan dan kelemahan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Sangir Pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, pada umumnya telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran karena merupakan kegiatan rutinitas tahunan dan kebutuhan kantor.

2.1.2.Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Pada Umumnya Kecamatan Sangir pada Tahun Anggaran 2023 realisasi Kinerja maupun Keuangan terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan telah memenuhi target kinerja.

2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Sangir tidak ada realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2023.

2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/ Kegiatan

Adapun faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan kegiatan adalah :

1. Tersedianya Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Terlakasananya koordinasi antar Perangkat Daerah dengan baik.
3. Adanya komitmen antara pihak terkait yang ada di Kecamatan.
4. Pembagian Tugas (job description).

Adapun untuk melihat lebih rinci terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sangir tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sangir dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel : 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023

Kabupaten Solok Selatan

Perangkat Daerah : Kecamatan Sangir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d Tahun Berjalan (2024)	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = (8/7)*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12 = (11/5)*
	KECAMATAN										
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**%**	**100**	**29**	**100**	**50**	**50**	**100**	**54,00**	**54,00**
7.01.01.2.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**33**	**100**	**50**	**50**	**100**	**58,00**	**58,00**
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	78	19	13	19	146,2	13	**51**	65,38
7.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72	15	12	12	100	12	**39**	54,17
		Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Kantor yang dibayarkan Honornya	Orang	6	0	0	0	0	0	**0**	0
7.01.01.2.06	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**33**	**100**	**75**	**75**	**100**	**62,17**	**62,17**
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	24	33	4	0	0	4	37	154,17
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	24	33	4	3	75	4	40	166,67
7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	24	33	4	3	75	4	40	166,67
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	24	33	4	0	0	4	37	154,17
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	**24**	**33**	**4**	0	75	4	40	166,67

7.01.01.2.08	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia**	**%**	**100%**	**33**	**100**	**75**	**75**	**100**	**62,17**	**62,17**
7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	33	4	3	75	4	**40**	166,67
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	72	33	12	3	25	12	**48**	66,67
7.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	24	33	4	3	75	4	**40**	166,67
7.01.01.2.09	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**%**	**100**	**17**	**100**	**75**	**75**	**100**	**46,17**	**46,17**
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit/ Tahun	28	17	5	3	100	5	**19**	316,67
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit/ Tahun	6	0	1	1	60	1	**8**	28,57
7.01.01.2.07	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**persen**	**100**	**33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66,33**	**66,33**
7.01.01.2.07.02	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	jumlah unit kenderaan Dinas operasional atau Lapangan yang disediakan	unit/tahun	5	2	1	0	0	0	**2**	40,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan PATEN**	**%**	**100**	**8**	**70**	**0**	**0**	**85**	**22,17**	**22,17**
7.01.02.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**100**	**95**	**100**	**8**	**8**	**100**	**113,00**	**113,00**
7.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	6	33	0	0	0	0	**33**	550,0
		Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	8	3	0	0	0	0	**3**	37,50
		Terfasilitasinya kegiatan pemuda dan olah raga	Kali	4	0	0	0	0	0	**0**	0,0
		Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali	12	0	0	0	0	0	**0**	**0,00**
7.01.02.2.02	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**%**	**100**	**11**	**70**	**8**	**11,43**	**85**	**26,50**	**26,50**
7.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Layanan	48	8	8	8	100	8	**24**	50,00

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan**	**Kali**	**18**	**6**	**3**	**3**	**100**	**3**	**7,00**	**38,89**
7.01.03.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kali**	**18**	**0**	**3**	**3**	**100**	**3**	**1**	**5,56**
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	18	6	3	3	100	3	**12**	66,67
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi**	**%**	**100**	**6**	**100**	**0**	**0**	**100**	**22,67**	**22,67**
7.01.04.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**16,67**	**16,67**
7.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan	Kali	20	4	4	0	0	4	**8**	40,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan**	**%**	**100**	**33**	**100**	**25**	**25**	**100**	**53,83**	**53,83**
7.01.05.2.01	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**%**	**100**	**0**	**100**	**50**	**50**	**100**	**25,00**	**25,00**
7.01.05.2.01.03	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	Kali	10	4	2	0	0	2	**6**	60,00
7.01.05.2.01.04	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kali	25	10	5	0	0	5	**15**	60,00
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan	Kali	4	1	1	0	0	1	**2**	50,00
		Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	10	0	2	0	0	2	**2**	20,00
		Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	5	0	1	0	0	1	**1**	20,00
		Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan	Kali	10	0	2	0	0s	2	**2**	20,00
		Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali	17	1	4	0	0	4	**5**	29,41
		Jumlah kegiatan Car Fee Day yang dilaksanakan	Kali	180	0	45	0	0	45	**45**	25,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari**	**%**	**100**	**21**	**100**	**50**	**50**	**100**	**46,00**	**46,00**
7.01.06..2.01	**Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Nagari yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi**	**Nagari**	**28**	**7**	**7**	**14**	**200**	**7**	**10,50**	**37,50**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan mempunyai kewenangan :

a. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
b. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

- **Kinerja Pelayanan**

1. Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Tepat Waktu

2. Persentase Pelayanan Terpadu Kecamatan

Kecamatan Sangir merupakan pintu terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada tahun 2023 Kecamatan Sangir telah memberikan pelayanan yang cukup maksimal dimana telah dilaksanakan beberapa program yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

Kinerja Pelayanan Terpadu Kecamatan Sangir didukung oleh :

a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang cukup.
b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai.

Hambatan dalam pencapaian kinerja Pelayanan Terpadu Kecamatan Sangir adalah :

a. Adanya tumpang tindih Kewenangan antara Kabupaten dengan Kecamatan.
b. Belum Optimalnya Koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan Pemerintahan Kecamatan.
c. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

3. IKM Terhadap Pelayanan Pemerintah

Adapun untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sangir dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel : 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Solok Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan		√	%	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pelayanan Terpadu Kecamatan		√	%	%	100	100	100	100	70	95	100	
3	IKM Terhadap Pelayanan Pemerintah		√	%	%	70	85	100	100	87,5	90	92,5	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam era otonomi Daerah ini untuk mewujudkan Pemerintahan yang Good Governance dan Clean Governance diperlukan aparatur yang mempunyai integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian Kecamatan Sangir terus belajar dan meningkatkan SDM Aparaturnya dengan harapan kinerja Kecamatan Sangir dapat mendorong terwujudnya Kecamatan Sangir sebagai Instansi Pemerintahan yang memberikan Pelayanan Prima. Namun demikian yang perlu mendapat perhatian bersama adalah :

a. Belum jelasnya pembagian kewenangan Daerah dan Kecamatan dalam Palayanan Publik.
b. Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pembagian Kewenangan.
c. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN Kecamatan.
d. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana ASN.
e. Belum maksimalnya penerapan reward dan punishment bagi aparatur Pemerintahan.
f. Masih minimnya penerapan teknologi dalam pelayanan birokrasi pemerintahan.
g. Belum maksimalnya fungsi koordinasi antar OPD dan keterpaduan pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Kecamatan Sangir selaku Perangkat Daerah dengan fungsi penunjang berkewajiban mendukung pencapaian misi tersebut terutama sekali misi 3 **"Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani"** yang memiliki tujuan sebagai berikut Terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani.

Misi ini menitikberatkan pada peningkatan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumbersumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terkait dengan permasalahan dan hambatan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dihadapi Kecamatan Sangir yaitu :

a. Belum optimalnya pelayanan birokrasi Kecamatan.
b. Belum jelasnya pembagian kewenangan Daerah dan Kecamatan dalam palayanan publik.
c. Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pembagian kewenangan.
d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN Kecamatan.

2.3.3 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

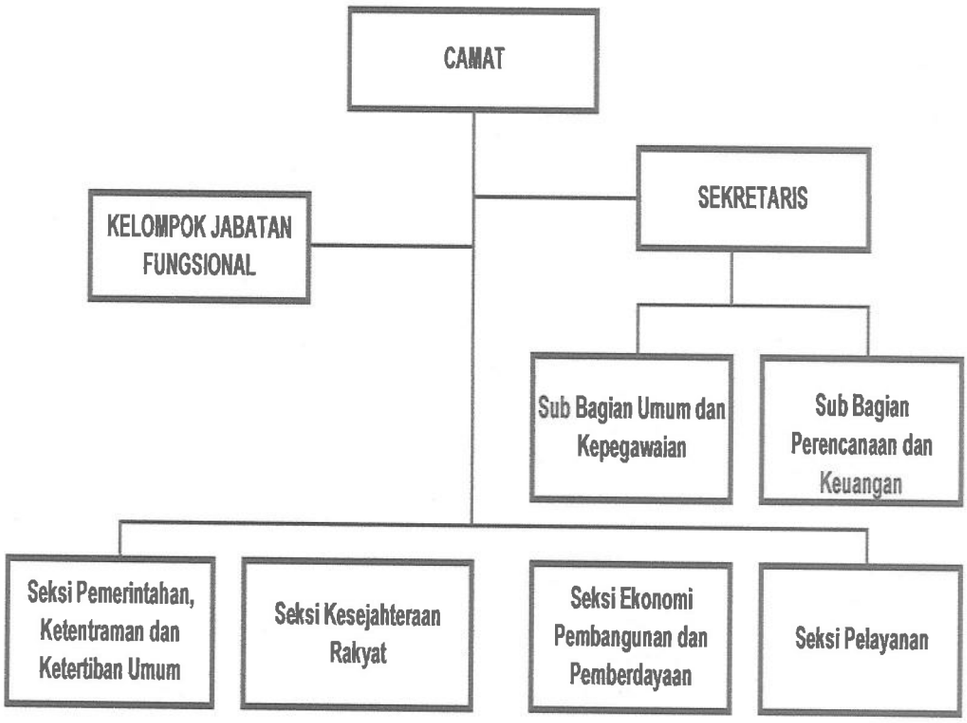
Rencana Kerja Kecamatan Sangir memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana kerja Kecamatan Sangir Dari analisis ini, jajaran Kantor Camat Sangir dapat mengidentifikasikan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Atas dasar itu, strategi pencapaian misi visi organisasi dapat diformulasikan. serta dapat diketahui faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi strategi dalam mencapai misi visi yang telah ditetapkan.

Analisis lingkungan dilakukan baik terhadap lingkungan internal maupun terhadap lingkungan eksternal.Analisis terhadap lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Sangir . Sementara itu, analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasikan peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Kecamatan Sangir. Secara singkat, hasil analisis lingkungan Kecamatan Sangir dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Kekuatan**
  - Terlakasananya koordinasi antar Perangkat Daerah dengan baik.
  - Adanya komitmen antara pihak terkait yang ada di Kecamatan

- Tersedianya Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
- Pembagian Tugas (job description)

Pembagian Tugas dan struktur organisasi Kecamatan Sangir Balai Janggo ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016, dengan adanya pembagian tugas yang jelas, maka lebih memudahkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing seksi.



- **Kelemahan**

1. Kurangnya tenaga trampil dibidangnya masing-masing, Belum dilaksanakannya prinsip *The right man in the ringt place*, dimana dalam menempatan seseorang pada suatu jabatan kurang memperhatikan latar belakang pendidikan yang dimiliki sehingga mengakibatkan kurang lancarnya pelaksanaan fungsi dan tugas.
2. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk staf kecamatan. Masih kurangnya pemberian kesempatan untuk pelaksanaan pendidikan bagi staf kecamatan baik struktural maupun pendidikan teknis lainnya.
3. Kurangnya sarana dan prasarana.

4. Pada saat ini sarana dan prasarana yang ada belum memadai untuk mendukung tugas-tugas di kecamatan, terutama sarana dan prasarana dibidang teknologi informasi. Sementara informasi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan.
5. Belum tersusunnya program kegiatan secara terinci dan belum optimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan.

- **Peluang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pelimpahan wewenang pada daerah dilaksanakan secara utuh, bulat yaitu meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan, program dan kebijakan pemerintah, hal ini berarti memerlukan kemandirian, keleluasaan dan prakarsa kepada daerah dalam mengelola sumber daya adminsitrasi dengan memperhatikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang dapat memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, hal ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi dan terciptanya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

Budaya yang berkembang dalam masyarakat yaitu budaya musyawarah dan mufakat yang telah berkembang, melalui musyawarah dan mufakat tersebut dapat di identifikasi permasalahan yang berkembang dimasyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- **Ancaman**

a. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan diperlukan partisipasi aktif masyarakat, namun pada saat ini tingkat pengetahuan masyarakat belum memadai, masyarakat masih rentan dengan berbagai isu yang dapat mengancam pelaksanaan pembangunan.

b. Terjadinya kemelut dibidang politik, keamanan, dan kepastian hukum, sewaktu-waktu dapat mengakibatkan pertentangan dan pertikaian yang mengarah kedisintegrasi bangsa.
c. Restrukturisasi / Pergantian Pimpinan

2.3.4 Isu Strategis terkait perumusan program dan kegiatan

Berikut isu strategis terkait perumusan program dan kegiatan pada Kecamatan Sangir "**Peningkatan pelayanan public yang goog governance** (terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Reformasi birokrasi; Profesionalitas ASN; dan Indek Kepuasan Masyarakatan terhadap pelayanan pemerintahan)".

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian perbandingan rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Sangir dengan hasil analisa kebutuhan, setelah anggaran disahkan terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD, data rincinya dapat dilihat pada tabel Tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel : 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Solok Selatan

Perangkat Daerah : Kecamatan Sangir

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KECAMATAN					2.441.000.000	**KECAMATAN**					3.064.680.489
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	%	100	2.070.000.000	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	%	100	2.572.580.489
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	%	100	1.515.800.000	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	%	100	2.204.000.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Sangir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	13	1.390.800.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Sangir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	19	2.153.900.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec.Sangir	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	125.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec.Sangir	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	50.100.000
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	%	100	169.700.000	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	%	100	131.500.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Sangir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Sangir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	1.500.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Sangir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	15.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Sangir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	20.000.000

	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec.Sangir	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	28.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec.Sangir	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	5.000.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Sangir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	1.500.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Sangir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	12.000.000
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Sangir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	120.200.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Sangir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	93.000.000
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia**	**%**	**100**	-	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia**	**%**	**0**	-
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec.Sangir	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit/ tahun		-	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec.Sangir	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit/ tahun		-
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Kec.Sangir	Jumlah Paket Mebel yand disediakan	Paket		-	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Kec.Sangir	Jumlah Paket Mebel yand disediakan	Paket		-
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Sangir	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit/ tahun		-	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Sangir	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit/ta hun		-
	Sub Kegiatan : Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec.Sangir	Jumlah unit Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	unit/ tahun		-	Sub Kegiatan : Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec.Sangir	Jumlah unit Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	unit/ta hun		-
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Sangir	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit/ tahun		-	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Sangir	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit/ta hun		-
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia**	**%**	**100**	**14.500.000**	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia**	**%**	**100**	**174.850.000**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Sangir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.500.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Sangir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.850.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Sangir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	11.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Sangir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	15.000.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Sangir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	2.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Sangir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	10.000.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Sangir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	-	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Sangir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7	147.000.000
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**%**	**100**	**350.000.000**	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**%**	**100**	**62.230.489**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Sangir	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit/ Tahun	5	50.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Sangir	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit/ Tahun	4	62.230.489
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Sangir	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit/ Tahun	1	300.000.000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Sangir	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit/ Tahun	0	-
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Sangir	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	%	**100**	**20.000.000**	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec.Sangir	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	%	**100**	-

	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kec.Sangir	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang disediakan	**Unit**	**1**	20.000.000	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kec.Sangir	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang disediakan	**Unit**	**0**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Persentase Layanan PATEN**	**%**	**50**	**60.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Layanan PATEN**	**%**	**100**	**45.000.000**
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		**Persentase Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**%**	**50**	**60.000.000**	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Persentase Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**%**	**100**	**45.000.000**
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sangir	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Layanan	8	60.000.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sangir	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Layanan	8	45.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan**	**Kali**	**3**	**70.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan**	**Kali**	**3**	**45.000.000**
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kali**	**3**	**70.000.000**	**Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kali**	**3**	**45.000.000**
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sangir	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	3	70.000.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sangir	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	3	45.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi**	**%**	**100**	**30.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi**	**%**	**100**	**25.000.000**
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**30.000.000**	**Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**25.000.000**
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec.Sangir	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan	Kali	4	30.000.000	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec.Sangir	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan	Kali	4	25.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan**	**%**	**100**	**170.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan**	**%**	**100**	**318.850.000**
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**%**	**100**	**170.000.000**	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**%**	**100**	**318.850.000**
	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec.Sangir	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	Kali	2	50.000.000	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec.Sangir	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	Kali	2	66.350.000
	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec.Sangir	Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kali	5	60.000.000	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec.Sangir	Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kali	5	162.500.000
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Sangir	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan	Kali	4	5.000.000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Sangir	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan	Kali	10	90.000.000

			Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	2	5.000.000			Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	0	-
			Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	2	35.000.000			Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	0	-
			Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan	Kali	1	5.000.000			Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan	Kali	0	-
			Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali	1	10.000.000			Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali	0	-
			Jumlah kegiatan Car Fee Day yang dilaksanakan	Kali	45				Jumlah kegiatan Car Fee Day yang dilaksanakan	Kali	0	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**%**	**100**	**41.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWABAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**%**	**100**	**58.250.000**
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Jumlah desa yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi**	**Nagari**	**7**	**41.000.000**	**Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Jumlah desa yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi**	**Nagari**	**7**	**58.250.000**
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Sangir	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nagari	7	13.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Sangir	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nagari	7	10.000.000
	Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kec.Sangir	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	7	13.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kec.Sangir	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	7	13.250.000
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kec.Sangir	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	1	15.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kec.Sangir	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	1	35.000.000

Sesuai dengan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Anggaran Kecamatan Sangir disesuaikan dengan Renstra yang telah disusun sebesar Rp. 2.441.000.000,- sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk pelaksanaan Program/Kegiatan dianggarkan sebesar Rp.3.460,890.000.-.

Terdapat perbedaaan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dikarenakan adanya penambahan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 6 Orang dan rumusan Program/Kegiatan baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD. Perbandingan dari Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan yaitu setelah dilakukan asistensi dan penelaahan terhadap rencana pelaksanaan Program/Kegiatan pada Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/ Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan.

Untuk Tahun 2025 tidak terdapat usulan Program atau Kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Sangir, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel : 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Solok Selatan

Perangkat Daerah : Kecamatan Sangir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	N	I	H	I	L

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk tingkat Kecamatan kebijakan nasional yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam penyelenggaraan pelayanan yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan selaku lembaga teknis daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola dengan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
b. Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
c. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
d. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
e. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.

Adapun Strategi yang akan dilaksanakan adalah mencakup Eksternal dan Internal, yaitu sebagai berikut :

1. Eksternal

a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
b. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

c. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
d. Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan.
e. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

2. Internal

a. Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai.
b. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
c. Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel
d. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di Kementerian PPN/Bappenas.
e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Layanan Paten yang diselenggarakan
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan tepat Waktu

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2025 Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, mengampu satu urusan yaitu urusan pemerintahan. Pada Urusan tersebut terdapat 6 program, 9 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 ada beberapa perbedaan dengan Analisa Kebutuhan dikarenakan masih menyesuaikan dengan usulan pada Renstra Tahun 2021-2026.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah sebagaimana TabeL.3.1 berikut :

RUMUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
KECAMATAN SANGIR
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		Milik Dearah Penunjang Pemeliharaan Barang Urusan pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional dan Nasional 3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

IV
RENCANA KERJA BAB DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berisi Program/ Kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada BAB IV Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026. Perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pada Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

TABEL 4.1

RUMUSAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SANGIR TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN SOLOK SELATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan(Outpu)	Satuan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu indikatif
	KECAMATAN					**1.391.839.200.000**				**1.411.688.000.000**
7.001.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**%**	Sangir	**100**	**1.391.459.200.000**			**100**	**1.411.288.000.000**
7.001.01.2.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**Sangir**	**100**	**1.390.925.000.000**			**100**	**1.410.625.000.000**
7.001.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/bulan	Sangir	13	1.390.800.000.000	APBD		13	1.410.500.000.000
7.00101.2.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	Sangir	12	125.000.000	APBD		12	125.000.000
7.01.01.2.06	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	Sangir	100	**169.700.000**			**100**	**179.500.000**
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	Sangir	4	5.000.000	APBD		4	6.000.000
7.001.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	Sangir	4	15.000.000	APBD		4	15.000.000
7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	Sangir	4	28.000.000	APBD		4	30.000.000
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	Sangir	4	1.500.000	APBD		4	1.500.000
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Sangir	4	120.200.000	APBD		4	127.000.000

7,01.01.2.07	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	%	Sangir	100	20.000.000	APBD		100	20.000.000
7.01.01.2.07.02	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit/tahun	Sangir	1	20.000.000			1	20.000.000
7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit/tahun	Sangir	0	-			0	
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit/tahun	Sangir	0	-			0	
7,01.01.2.07.09	Sub Kegiatan : Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	**unit/tahun**	Sangir	0	-			0	
7.01.01.2.07.11	Sub Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit/tahun	Sangir	0	-			0	
7.01.01.2.08.02	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	%	Sangir	100	14.500.000	APBD		100	113.500.000
7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	laporan	Sangir	4	1.500.000	APBD		4	1.500.000
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	Sangir	12	11.000.000	APBD		12	110.000.000
7.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	Sangir	4	2.000.000	APBD		4	2.000.000
7.01.01.2.09	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	%	Sangir	**100**	**350.000.000**			**100**	**350.000.000**
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit/tahun	Sangir	5	50.000.000	APBD		5	50.000.000
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit/tahun	Sangir	1	300.000.000			1	300.000.000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan PATEN**	%	Sangir	**85**	**60.000.000**			**100**	**65.000.000**
7.01.02.2.02	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan**	%	Sangir	**100**	**60.000.000**			**100**	**65.000.000**
7.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Layanan	Sangir	8	60.000.000	APBD		8	65.000.000

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah kegiatan pemberdayaan	**kali**	Sangir	**6**	**70.000.000**			**3**	**80.000.000**
7.01.03.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**kali**	Sangir	**3**	**70.000.000**			**3**	**80.000.000**
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	kali	Sangir	3	70.000.000	APBD		8	10.000.000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penegakan Perda yang difasilitasi**	**%**	Sangir	**100**	**30.000.000**			**100**	**30.000.000**
7.01.04.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase penyelesaian masalah-masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum**	**%**	Sangir	**100**	**30.000.000**			**100**	**30.000.000**
7.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan	Kali	Sangir	4	30.000.000	APBD		4	30.000.000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan**	**%**	Sangir	**100**	**170.000.000**			**100**	**170.000.000**
7.01.05.2.01	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**%**	Sangir	**100**	**170.000.000**			**100**	**170.000.000**
7.01.05.2.01.03	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	kali	Sangir	2	50.000.000	APBD		2	60.000.000
7.01.05.2.01.04	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	kali	Sangir	5	60.000.000	APBD		5	90.000.000
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan	Kali	Sangir	4	5.000.000	APBD		4	1.000.000
		Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	Sangir	2	5.000.000			2	1.000.000
		Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	Sangir	2	35.000.000			2	5.000.000
		Terfasilitasinya kegiatan pemuda dan olah raga	Kali	Sangir	1	5.000.000			1	3.000.000

		Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali	Sangir	1	10.000.000			1	10.000.000
		Jumlah Car Free Day yang dilaksanakan	Kali	Sangir	45				45	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**%**	Sangir	**100**	**50.000.000**			**100**	**55.000.000**
7.01.06..2.01	**Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Nagari yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi**	**Nagari**	Sangir	**5**	**50.000.000**			**5**	**55.000.000**
7.01.06..2.01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam penyusunan administrasi tata pemerintahan desai	Nagari	Sangir	7	22.000.000	APBD		7	27.000.000
7.01.06..2.01.03	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Nagari Terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	Sangir	7	13.000.000	APBD		7	13.000.000
7.01.06..2.01.09	Sub Kegiatan : Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	Sangir	1	15.000.000	APBD		1	15.000.000

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja Kecamatan Sangir Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Sangir sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Rencana Kerja Kecamatan Sangir Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Sangir untuk periode satu tahun yaitu Tahun 2025, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Sangir pada Tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Sangir, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Sangir diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras. Akhir kata, semoga Rencana Kerja Kecamatan Sangir Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Demikianlah Rencana Kerja Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan Perangkat Daerah.

Lubuk Gadang, Juli 2024

Camat Sangir



ABUL ABAS,SE

NIP. 19710316 1993031001

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

KECAMATAN SANGIR BATANG HARI

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Program Pembangunan Kecamatan Sangir Batang Hari dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tupoksi Kecamatan.

Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari Tahun 2025 ini mencakup Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan sebagai dasar pembuatan Rencana Kerja Anggaran bagi Kecamatan Sangir Batang Hari Tahun 2025, dan juga berfungsi sebagai bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan serta sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan Rencana Anggran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

Demikianlah Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari ini dibuat, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan pada Tahun 2025.

Abai, Juli 2024

CAMAT SANGIR BATANG HARI

MARDISON, S.Pd

NIP. 19680630 199312 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1. Maksud 3

2. Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 13

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 17

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 21

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 22

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 22

3.2. Tujuan dan Sasaran 23

3.3. Program dan Kegiatan 24

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 26

BAB V. PENUTUP 30

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kecamatan Sangir Batang Hari sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Didalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Tahunan Daerah. Selain itu guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Proses Penyusunan Renja Kecamatan Sangir Batang Hari mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Sangir Batang Hari dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Kecamatan Sangir Batang Hari, evaluasi kinerja pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Sangir Sangir Batang Hari.

Rencana Kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, karena disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Sangir Batang Hari dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari Tahun 2025 dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di Kecamatan Sangir Batang Hari dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

a. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran tahun 2023 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2025.
b. Mengarahkan visi Kecamatan Sangir Batang Hari kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2025.
c. Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Sangir Batang Hari yang dituangkan ke dalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2025.
d. Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari ini adalah :

a. Sebagai bahan masukan yang ada pada Program/Kegiatan di Rencana Kerja kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS).
b. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
c. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
d. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
e. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
f. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.
g. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
h. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Sangir Batang Hari berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Berisi Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V. PENUTUP

Berisi Kesimpulan dari pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Solok Selatan, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sangir Batang Hari telah melaksanakan 6 program yang didalamnya terdapat 11 kegiatan dan 27 Sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 2.875.676.596,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 2.691.120.889,- dan dan Belanja Modal Rp. 184.555.707,-.

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan Pengukuran Kinerja untuk Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sangir Batang Hari dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam Pencapaian Kinerja.

Kecamatan Sangir Batang Hari menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan dan kelemahan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. **Realisasi Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan**

   Kecamatan Sangir Batang Hari Pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, pada umumnya telah memenuhi

target kinerja hasil/keluaran karena merupakan kegiatan rutinitas tahunan dan kebutuhan kantor.

2. **Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan**

   Pada Umumnya Kecamatan Sangir Batang Hari pada Tahun Anggaran 2023 realisasi Kinerja maupun Keuangan terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan telah memenuhi target kinerja.

3. **Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan**

   Kecamatan Sangir Batang Hari ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2023 yaitu:

   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
   b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

4. **Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/ Kegiatan**

   Adapun faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan kegiatan adalah :

   a. Tersedianya Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
   b. Terlakasananya koordinasi antar Perangkat Daerah dengan baik.
   c. Adanya komitmen antara pihak terkait yang ada di Kecamatan.
   d. Pembagian Tugas (*Job Description*).

Adapun untuk melihat lebih rinci terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sangir Batang Hari dapat dilihat pada Tabel 2.1. dibawah ini:

TABEL 2.1.
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN SANGIR BATANG HARI KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan (2024)	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = (8/7)*	*10*	*11 = (6+8+10)*	*12 = (11/5)*
	KECAMATAN										
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	%	100	33,33	100	74	74,00	100	34,56	34,56
7.01.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	33,33	100	70	70,00	100	33,89	33,89
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Org/Bln	99	20	20	20	100,00	17	57	57,58
7.01..01.2.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72	9	12	12	100,00	6	27	37,50
		Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Kantor yang dibayarkan Honornya	Orang	10	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7.01.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	33,33	100	100	100,00	100	38,89	38,89
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	24	4	4	4	100,00	4	12	50,00
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	24	4	4	4	100,00	4	12	50,00
7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	24	4	4	4	100,00	4	12	50,00
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	24	4	4	4	100,00	4	12	50,00
7.01.01.2.06.08	Subg Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	16	0	0	0	0,00	4	4	25,00
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	4	4	4	100,00	4	12	50,00
7.01.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia	%	100	33,33	100	100	100,00	0	22,22	22,22
7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	1	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	3	3	1	1	100,00	0	4	133,33
7.01.01.2.07.11	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	3	2	0	0	0,00	0	2	66,67

7.01.01.2.08	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia	%	100	33,33	100	100	100,00	100	38,89	38,89
7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	4	4	4	100,00	4	12	50,00
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	72	12	4	4	100,00	12	28	38,89
7.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	24	4	4	3	75,00	4	11	45,83
7.01.01.2.09	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	%	100	33,33	100	100	100,00	100	38,89	38,89
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit/ Tahun	30	5	5	5	100,00	5	15	50,00
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit/ Tahun	4	0	1	2	200,00	1	3	75,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan PATEN**	%	100	38	50	45	70,00	95	95,00	95,00
7.01.02.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	%	100	40	0	0	0,00	0	6,67	6,67
7.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan koordinasi ekonomi pembangunan	Kali	3	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	3	1	0	0	0,00	0	1	33,33
		Terfasilitasinya kegiatan pemuda dan olahraga	Kali	3	2	0	0	0,00	0	2	66,67
		Terfasilitasinya kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial	Kali	3	1	0	0	0,00	0	1	33,33
7.01.02.2.02	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	%	100	48	60	60	70,00	95	33,75	95,00
7.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Layanan	48	32	8	60	750,00	4	96	200,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan**	**Kali**	100	4	3	3	100,00	4	11	11,00
7.01.03.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa**	**Kali**	22	4	3	3	100,00	4	11	50,00
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	22	4	3	3	100,00	4	11	50,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penegakan Perda yang difasilitasi**	%	100	25	100	100	100,00	100	37,50	37,50
7.01.04.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum**	%	100	25	100	100	100,00	100	37,50	37,50
7.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan	Kali	18	1	3	3	100,00	4	8	44,44

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**38,89**	**38,89**
7.01.05.2.01	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**%**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**38,89**	**38,89**
7.01.05.2.01.03	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	Kali	19	4	3	3	100,00	3	10	52,63
7.01.05.2.01.04	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Kali	19	1	4	4	100,00	3	8	42,11
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan	Kali	11	2	4	4	100,00	4	10	90,91
		Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	9	0	2	2	100,00	2	4	44,44
		Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	6	0	2	2	100,00	2	4	66,67
		Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan	Kali	6	0	1	1	100,00	1	2	33,33
		Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali	6	0	2	2	100,00	1	3	50,00
		Jumlah Car Fre Day yang dilaksanakan	Kali	168	0	45	45	100,00	45	90	53,57
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari**	**%**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**38,89**	**38,89**
7.01.06.2.01	**Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Nagari yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi**	**Nagari**	**24**	**7**	**7**	**7**	**100,00**	**7**	**21**	**87,50**
7.01.06.2.01.01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Nagari	14	7	0	0	0,00	0	7	50,00
7.01.06.2.01.02	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nagari	42	7	7	7	100,00	7	21	50,00
7.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	42	7	7	7	100,00	7	21	50,00
7.01.06.2.01.05	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Nagari	7	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7.01.06.2.01.06	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Nagari	7	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7.01.06.2.01.07	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Nagari	7	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7.01.06.2.01.08	Sub Kegiatan : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Nagari	7	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7.01.06.2.01.09	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	6	2	1	1	0,00	7	10	166,67
7.01.06.2.01.10	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Antar-Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Terfasilitasinya kegiatan kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Nagari	7	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7.01.06.2.01.15	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terfasilitasinya Pembinaan Nagari	Nagari	7	0	0	0	0,00	0	0	0,00

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan mempunyai kewenangan:

1. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
3. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
4. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

KINERJA PELAYANAN

1. Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Tepat Waktu.
2. Persentase Pelayanan Terpadu Kecamatan.

   Kecamatan Sangir Batang Hari merupakan pintu terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada tahun 2023 Kecamatan Sangir Batang Hari telah memberikan pelayanan yang cukup maksimal dimana telah dilaksanakan beberapa program yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

   Kinerja Pelayanan Terpadu Kecamatan Sangir Batang Hari didukung oleh:

   a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang cukup.
   b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai.

   Hambatan dalam pencapaian kinerja Pelayanan Terpadu Kecamatan Sangir Batang Hari adalah :

   a. Adanya tumpang tindih Kewenangan antara Kabupaten dengan Kecamatan.
   b. Belum Optimalnya Koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan Pemerintahan Kecamatan.
   c. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.
3. IKM Terhadap Pelayanan Pemerintah

Adapun untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sangir Batang Hari dapat dilihat pada Tabel 2.2. dibawah ini:

TABEL 2.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
KABUPATEN SOLOK SELATAN

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan		√	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pelayanan Terpadu Kecamatan		√	%	70	95	100	100	70	95	100	100	
3	IKM Terhadap Pelayanan Pemerintah		√	%	87,5	90	92,5	95	87,5	90	92,5	95	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan berbagai permasalahan, tantangan, peluang, hambatan dan kekuatan yang dimiliki pihak Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, maka terdapat beberapat isu-isu strategis yang didasarkan pada beberapa faktor dari pelayanan Kecamatan Sangir Batang Hari yaitu:

1. **Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah**

   Dalam era otonomi Daerah ini untuk mewujudkan Pemerintahan yang *Good Governance* dan *Clean Governance* diperlukan aparatur yang mempunyai integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian Kecamatan Sangir Batang Hari terus belajar dan meningkatkan SDM Aparaturnya dengan harapan kinerja Kecamatan Sangir Batang Hari dapat mendorong terwujudnya Kecamatan Sangir Batang Hari sebagai Instansi Pemerintahan yang memberikan Pelayanan Prima. Namun demikian yang perlu mendapat perhatian bersama adalah:

   a. Belum jelasnya pembagian kewenangan Daerah dan Kecamatan dalam Palayanan Publik.
   b. Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pembagian Kewenangan.
   c. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN Kecamatan.
   d. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana ASN.
   e. Belum maksimalnya penerapan reward dan punishment bagi aparatur Pemerintahan.
   f. Masih minimnya penerapan teknologi dalam pelayanan birokrasi pemerintahan.
   g. Belum maksimalnya fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah dan keterpaduan pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Kecamatan Sangir Batang Hari selaku Perangkat Daerah dengan fungsi penunjang berkewajiban mendukung pencapaian misi Kepala Daerah terutama sekali misi 3 yaitu **"PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MELAYANI"** yang memiliki tujuan **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Baik dan Bersih.**

Misi ini menitikberatkan pada peningkatan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat ke sumber-

sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terkait dengan permasalahan dan hambatan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dihadapi Kecamatan Sangir Balai Janggo yaitu:

a. Belum optimalnya pelayanan birokrasi Kecamatan.
b. Belum jelasnya pembagian kewenangan Daerah dan Kecamatan dalam palayanan publik.
c. Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pembagian kewenangan.
d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN Kecamatan.

3. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo. Dari analisis ini, jajaran Kantor Camat Sangir Balai Janggo dapat mengidentifikasikan Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Tantangan/kendala (*Threats*) yang ada. Atas dasar itu, strategi pencapaian misi visi organisasi dapat diformulasikan. serta dapat diketahui faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi strategi dalam mencapai misi visi yang telah ditetapkan.

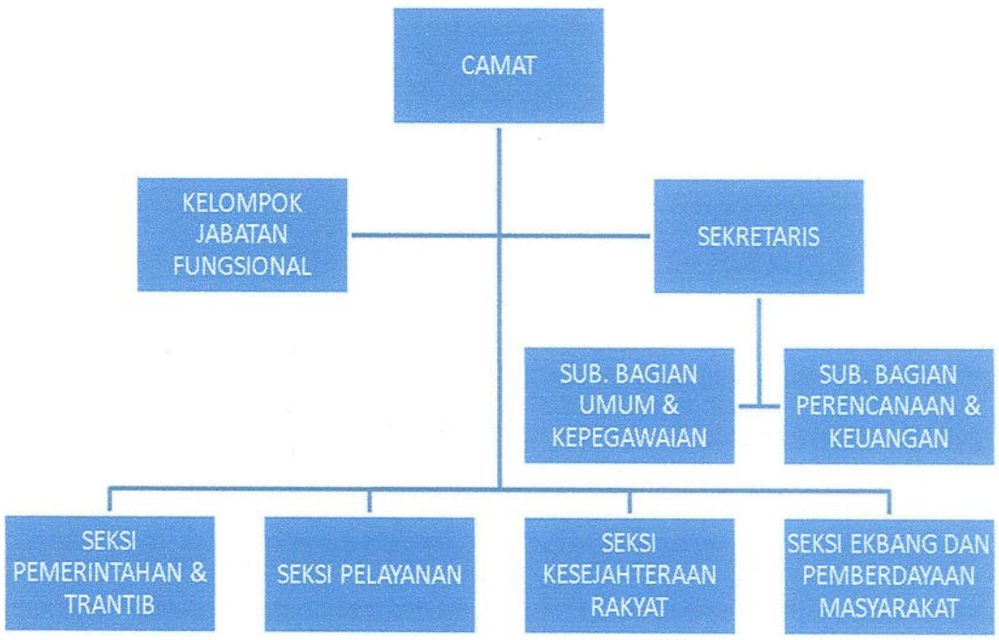
Analisis lingkungan dilakukan baik terhadap lingkungan internal maupun terhadap lingkungan eksternal.Analisis terhadap lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Sangir Balai Janggo. Sementara itu, analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasikan peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Kecamatan Sangir Balai Janggo. Secara singkat, hasil analisis lingkungan Kecamatan Sangir Balai Janggo dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kekuatan

1) Terlaksananya koordinasi antar Perangkat Daerah dengan baik.
2) Adanya komitmen antara pihak terkait yang ada di Kecamatan.
3) Tersedianya Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
4) Pembagian Tugas (*Job Description*).

Pembagian Tugas dan struktur organisasi Kecamatan Sangir Batang Hari ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016, dengan adanya pembagian tugas yang jelas, maka lebih memudahkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing seksi.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN SANGIR BATANG HARI



b. Kelemahan

1) Kurangnya tenaga terampil dibidangnya masing-masing, Belum dilaksanakannya prinsip *The Right Man In The Right Place*, dimana dalam menempatan seseorang pada suatu jabatan kurang memperhatikan latar belakang pendidikan yang dimiliki sehingga mengakibatkan kurang lancarnya pelaksanaan fungsi dan tugas.
2) Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk staf kecamatan. Masih kurangnya pemberian kesempatan untuk pelaksanaan pendidikan bagi staf kecamatan baik struktural maupun pendidikan teknis lainnya.

3) Kurangnya sarana dan prasarana.
4) Pada saat ini sarana dan prasarana yang ada belum memadai untuk mendukung tugas-tugas di kecamatan, terutama sarana dan prasarana dibidang teknologi informasi. Sementara informasi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan.
5) Belum tersusunnya program kegiatan secara terinci dan belum optimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan.

c. Peluang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pelimpahan wewenang pada daerah dilaksanakan secara utuh, bulat yaitu meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan, program dan kebijakan pemerintah, hal ini berarti memerlukan kemandirian, keleluasaan dan prakarsa kepada daerah dalam mengelola sumber daya adminsitrasi dengan memperhatikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang dapat memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, hal ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi dan terciptanya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

Budaya yang berkembang dalam masyarakat yaitu budaya musyawarah dan mufakat, melalui musyawarah dan mufakat tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang berkembang dimasyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

d. Ancaman

1) Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan diperlukan partisipasi aktif masyarakat, namun pada saat ini tingkat pengetahuan masyarakat belum memadai, masyarakat masih rentan dengan berbagai isu yang dapat mengancam pelaksanaan pembangunan.

2) Terjadinya kemelut dibidang politik, keamanan, dan kepastian hukum, sewaktu-waktu dapat mengakibatkan pertentangan dan pertikaian yang mengarah kedisintegrasi bangsa.
3) Restrukturisasi / Pergantian Pimpinan.

4. Isu Strategis terkait perumusan program dan kegiatan

Berikut isu strategis terkait perumusan program dan kegiatan pada Kecamatan Sangir Batang Hari "**Peningkatan Pelayanan Publik yang *Good Governance*** (terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Reformasi birokrasi; Profesionalitas ASN; dan Indeks Kepuasan Masyarakatan terhadap pelayanan pemerintahan)".

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berisikan uraian perbandingan rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan hasil analisa kebutuhan, setelah anggaran disahkan terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD, data rincinya dapat dilihat pada tabel Tabel 2.3. di bawah ini:

TABEL 2.3.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN SOLOK SELATAN

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	KECAMATAN					**2.239.000.000**	**KECAMATAN**					**2.910.191.248**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**%**	**100**	**1.959.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**%**	**100**	**2.598.223.748**
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**1.591.850.000**	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**2.058.977.998**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SBH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	18	1.541.850.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SBH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	18	2.008.457.998
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SBH	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	50.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SBH	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	50.520.000
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**189.550.000**	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**235.782.070**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SBH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	5.300.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SBH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	2.993.670
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SBH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	25.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SBH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	18.000.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SBH	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	5.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SBH	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	4.966.900
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SBH	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	10.750.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SBH	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	10.000.000
	Subg Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	SBH	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	Subg Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	SBH	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.995.000
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	SBH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	143.500.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	SBH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	194.826.500
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia**	**%**	**100**	-	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia**	**%**	**100**	**60.241.920**
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	SBH	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	-	-	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	SBH	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	50	43.893.840
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SBH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Paket	-	-	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SBH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	3	16.348.080
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia**	**%**	**100**	**102.600.000**	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia**	**%**	**100**	**106.570.300**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SBH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.500.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SBH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.500.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SBH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	10.100.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SBH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	10.100.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SBH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	5.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SBH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	9.970.300
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SBH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	84.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SBH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	84.000.000

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Persentase Layanan PATEN**	**%**	**100**	**15.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Layanan PATEN**	**%**	**100**	**9.990.000**
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		**Jumlah Laporan PATEN di Wilayah Kecamatan**	**Laporan**	**100**	**15.000.000**	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Jumlah Laporan PATEN di Wilayah Kecamatan**	**Laporan**	**4**	**9.990.000**
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SBH	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	15.000.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SBH	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	9.990.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan**	**Kali**	**4**	**40.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan**	**Kali**	**4**	**49.950.000**
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kali**	**4**	**40.000.000**	**Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kali**	**4**	**49.950.000**
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SBH	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	40.000.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SBH	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	49.950.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi**	**%**	**100**	**20.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi**	**%**	**100**	**9.990.000**
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**20.000.000**	**Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**9.990.000**
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	SBH	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kali	3	20.000.000	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	SBH	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kali	3	9.990.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan**	**%**	**100**	**110.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan**	**%**	**100**	**175.868.400**
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**%**	**100**	**110.000.000**	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**%**	**100**	**175.868.400**
	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	SBH	Jumlah Orang yang Mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Orang	15	35.000.000	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	SBH	Jumlah Orang yang Mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Orang	15	75.924.000
	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	SBH	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	12	35.000.000	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	SBH	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	12	29.986.650
	Sub kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	SBH	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Dokumen	6	40.000.000	Sub kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	SBH	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Dokumen	6	69.957.750

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	95.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	66.169.100
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Jumlah desa yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi**	**Nagari**	**7**	**95.000.000**	**Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Jumlah desa yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi**	**Nagari**	**7**	**66.169.100**
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	SBH	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nagari	3	40.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	SBH	Jumlah dokumen yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	3	14.973.900
	Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	SBH	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	6	35.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	SBH	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Dokumen	6	31.213.200
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	SBH	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	1	20.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	SBH	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	19.982.000

Sesuai dengan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Anggaran Kecamatan Sangir Batang Hari disesuaikan dengan RENSTRA yang telah disusun sebesar Rp. 2.239.000.000,- sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk pelaksanaan Program/Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 2.910.191.248,-.

Terdapat perbedaan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil Analisis Kebutuhan dikarenakan adanya penambahan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN disebabkan ada kenaikan Gaji Bagi ASN, TNI dan POLRI dan rasionalisasi anggaran pada sub-sub kegiatan lainnya. Perbandingan dari Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan yaitu setelah dilakukan asistensi dan penelaahan terhadap rencana pelaksanaan Program/Kegiatan pada Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/ Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan.

Untuk Tahun 2025 tidak terdapat usulan Program atau Kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Sangir Balai Janggo, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4. dibawah ini :

TABEL 2.4.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	N	I	H	I	L

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Untuk tingkat Kecamatan kebijakan nasional yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam penyelenggaraan pelayanan yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan selaku lembaga teknis daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:

1. Faktor Eksternal
   a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

b. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
c. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
d. Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan.
e. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

2. Faktor Internal
   a. Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai.
   b. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
   c. Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel.
   d. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Kementerian PPN/Bappenas.
   e. Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Rencan Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari yaitu:

No.	TUJUAN	No.	SASARAN	INDIKATOR
1.	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahanyang Melayani	1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Nagari	Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan tepat Waktu
		2.	Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase Pelayanan Pemerintahan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, mengampu satu urusan yaitu urusan pemerintahan. Pada Urusan tersebut terdapat 6 program, 9 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 ada beberapa perbedaan dengan Analisa Kebutuhan dikarenakan masih menyesuaikan dengan usulan pada Renstra Tahun 2021-2026.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel 3.1. berikut:

TABEL. 3.1.
RUMUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN
KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

No.	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
I.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu 8. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

			3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
III.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
IV.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
V.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional dan Nasional. 3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berisi Program/ Kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada BAB IV Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026. Perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pada Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

TABEL 4.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SANGIR BATANG HARI
TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan(Outpu)	Satuan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif
	KECAMATAN					2.910.191.248				2.268.600.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	%		100	2.598.223.748			100	1.942.600.000
7.01.01.2.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**%**		**100**	**2.058.977.998**			**100**	**1.375.000.000**
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	Kec. SBH	18	2.008.457.998	APBD		18	1.310.000.000
7.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kec. SBH	12	50.520.000	APBD		12	65.000.000
7.01.01.2.06	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**		**100**	**235.782.070**			**100**	**259.000.000**
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	Kec. SBH	4	2.993.670	APBD		4	5.500.000
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	Kec. SBH	4	18.000.000	APBD		4	18.000.000
7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	Kec. SBH	4	4.966.900	APBD		4	5.000.000
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	Kec. SBH	4	10.000.000	APBD		4	10.000.000
7.01.01.2.06.08	Subg Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Kec. SBH	4	4.995.000	APBD		4	10.000.000
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kec. SBH	4	194.826.500	APBD		4	210.500.000
7.01.01.2.07	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia**	**%**		**0**	**60.241.920**			**0**	**50.000.000**
7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	Kec. SBH	50	43.893.840	APBD		50	25.000.000
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Paket	Kec. SBH	3	16.348.080	APBD		3	25.000.000
7.01.01.2.07.11	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	Kec. SBH	0	-	APBD		0	-

7.01.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia	%		100	106.570.300			100	118.600.000
7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kec. SBH	4	2.500.000	APBD		4	2.500.000
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	Kec. SBH	12	10.100.000	APBD		12	10.100.000
7.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	Kec. SBH	4	9.970.300	APBD		4	10.000.000
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	Kec. SBH	12	84.000.000	APBD		12	96.000.000
7.01.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	%		100	136.651.460			100	140.000.000
7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit/ Tahun	Kec. SBH	5	63.341.510	APBD		7	65.000.000
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit/ Tahun	Kec. SBH	1	73.309.950	APBD		1	75.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan PATEN	%		95	9.990.000			100	10.000.000
7.01.02.2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%		95	9.990.000			100	10.000.000
7.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Layanan	Kec. SBH	8	9.990.000	APBD		8	10.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kali		3	49.950.000			3	60.000.000
7.01.03.2.01	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kali		3	49.950.000			3	60.000.000
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	Kec. SBH	4	49.950.000	APBD		4	60.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi	%		100	9.990.000			100	15.000.000
7.01.04.2.01	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	%		100	9.990.000			100	15.000.000
7.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan	Kali	Kec. SBH	3	9.990.000	APBD		4	15.000.000

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan**	**%**		**100**	**175.868.400**			**100**	**176.000.000**
7.01.05.2.01	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**%**		**100**	**175.868.400**			**100**	**176.000.000**
7.01.05.2.01.03	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	Kali	Kec. SBH	15	75.924.000	APBD		2	76.000.000
7.01.05.2.01.04	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kali	Kec. SBH	12	29.986.650	APBD		5	30.000.000
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan	Kali	Kec. SBH	4	8.000.000	APBD		4	9.000.000
		Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali		2	3.000.000			2	3.000.000
		Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali		2	3.000.000			2	3.000.000
		Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan	Kali		1	15.000.000			1	15.000.000
		Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali		1	26.957.750			1	26.000.000
		Jumlah kegiatan Car Fee Day yang dilaksanakan	Kali		45	14.000.000			45	14.000.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari**	**%**		**100**	**66.169.100**			**100**	**65.000.000**
7.01.06..2.01	**Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Nagari yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi**	**Nagari**		**4**	**66.169.100**			**4**	**65.000.000**
7.01.06..2.01.02	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nagari	Kec. SBH	3	14.973.900	APBD		3	20.000.000
7.01.06..2.01.03	Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	Kec. SBH	6	31.213.200	APBD		6	25.000.000
7.01.06..2.01.09	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	Kec. SBH	1	19.982.000	APBD		1	20.000.000

BAB V. PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Perangkat Daerah sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Rencana Kerja Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025, Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Perangkat Daerah pada tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerjayang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Demikianlah Rencana Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan Perangkat Daerah.

Abai, Juli 2024

CAMAT SANGIR BATANG HARI

MARDISON, S.Pd

NIP. 19680630 199312 1 002

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Program Pembangunan Kecamatan Sangir Balai Janggo dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tupoksi Kecamatan.

Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2025 ini mencakup Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan acuan bagi Kecamatan Sangir Balai Janggo dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan sebagai dasar pembuatan Rencana Kerja Anggaran bagi Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2025, dan juga berfungsi sebagai bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan serta sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan Rencana Anggran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

Demikian dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2025 ini dibuat, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Tahun 2025.

Sungai Kunyit, Juli 2024

Camat Sangir Balai Janggo

M U S L I M, S.Pd

NIP. 19700808 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 16

2.4 Terhadap Rancangan Awal RKPD 21

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 29

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 30

3.3 Program dan Kegiatan 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .. 33

BAB V PENUTUP 45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kecamatan Sangir Balai Janggo sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Didalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Tahunan Daerah. Selain itu guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Proses Penyusunan Renja Kecamatan Sangir Balai Janggo mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, oleh karena itu penyusunan Renja

Kecamatan Sangir Balai Janggo dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Kecamatan Sangir Balai Janggo, evaluasi kinerja pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Sangir Balai Janggo.

Rencana Kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, karena disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Sangir Balai Janggo dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai JanggoTahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2025 dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di Kecamatan Sangir Balai Janggo dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

a. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran tahun 2023 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2025.
b. Mengarahkan visi Kecamatan Sangir Balai Janggo kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2025.
c. Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Sangir Balai Janggo yang dituangkan ke dalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2025.
d. Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo ini adalah :

a. Sebagai bahan masukan yang ada pada Program/Kegiatan di Rencana Kerja kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS)
b. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
c. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
d. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
e. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
f. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.
g. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
h. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Sangir Balai Janggo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Berisi Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dari pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Solok Selatan, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direlisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggran 2023 Kecamatan Sangir Balai Janggo telah melaksanakan 6 program yang didalamnya terdapat 10 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 2.166.303.685,-.

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan Pengukuran Kinerja untuk Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sangir Balai Janggo dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam Pencapaian Kinerja.

Kecamatan Sangir Balai Janggo menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan dan kelemahan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Sangir Balai Janggo Pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, pada umumnya telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran karena merupakan kegiatan rutinitas tahunan dan kebutuhan kantor.

2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Pada Umumnya Kecamatan Sangir Balai Janggo pada Tahun Anggaran 2023 realisasi Kinerja maupun Keuangan terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan telah memenuhi target kinerja.

2.1.3 Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Sangir Balai Janggo tidak ada realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2023.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/ Kegiatan

Adapun faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan kegiatan adalah :

1. Tersedianya Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Terlakasananya koordinasi antar Perangkat Daerah dengan baik.
3. Adanya komitmen antara pihak terkait yang ada di Kecamatan.
4. Pembagian Tugas (job description).

Adapun untuk melihat lebih rinci terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sangir Balai Janggo dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023
Kabupaten Solok Selatan

Perangkat Daerah : Kecamatan Sangir Balai Janggo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d Tahun Berjalan (2024)	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = (8/7)*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12 = (11/5)*
	KECAMATAN										
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**%**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**66,66**	**66,66**
7.01.01.2.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**66,66**	**66,66**
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	80	22	14	13	92,86	14	49	61,25
7.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72	24	12	12	100,00	12	48	66,67
		Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Kantor yang dibayarkan Honornya	Orang	5	9	0	0	0	0	9	180,00
7.01.01.2.06	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**66,66**	**66,66**
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	24	8	4	4	100,00	4	16	66,67
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	24	8	4	4	100,00	4	16	66,67

7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	24	8	4	4	100,00	4	16	66,67
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	24	8	4	4	100,00	4	16	66,67
7.01.01.2.06.08	Subg Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	16	0	4	4	100,00	4	8	50,00
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	8	4	4	100,00	4	16	66,67
7.01.01.2.07	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia**	**%**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**66,66**	**66,66**
7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	2	1	0	0	0	0	1	50,00
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Paket	3	1	1	1	100,00	1	2	66,67
7.01.01.2.07.11	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	3	2	0	0	0	1	2	66,67
7.01.01.2.08	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia**	**%**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**66,66**	**66,66**
7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	8	4	4	100,00	4	16	66,67
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	72	24	12	12	100,00	12	48	66,67
7.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	24	8	4	4	100,00	4	16	66,67
7.01.01.2.09	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**%**	**33,33**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**66,66**	**66,66**
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit/ Tahun	42	14	7	7	100,00	7	28	66,67
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit/ Tahun	3	1	0	0	0	1	2	66,67

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan PATEN**	**%**	**100**	**55**	**70**	**70**	**70**	**95**	**95**	**95,00**
7.01.02.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**100**	**25**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25,00**	**25,00**
7.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan : Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	4	2	0	0	0,00	0	2	50,00
		Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	4	1	0	0	0,00	0	1	25,00
		Terfasilitasinya kegiatan pemuda dan olah raga	Kali	2	1	0	0	0,00	0	1	50,00
		Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali	4	1	0	0	0,00	0	1	25,00
7.01.02.2.02	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**%**	**100**	**55**	**70**	**70**	**70**	**95**	**95**	**95,00**
7.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Layanan	48	16	8	8	100,00	8	32	66,67
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan**	**Kali**	**18**	**6**	**3**	**3**	**100,00**	**3**	**12**	**66,67**
7.01.03.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kali**	**18**	**6**	**3**	**3**	**100,00**	**3**	**12**	**66,67**
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	18	6	3	3	100,00	3	12	66,67
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi**	**%**	**100**	**29,17**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**76,39**	**76,39**
7.01.04.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**29,17**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**62,50**	**62,50**
7.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan	Kali	24	7	3	3	100,00	4	14	58,33

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan**	**%**	**100**	**31,83**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**65,16**	**65,16**
7.01.05.2.01	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**%**	**100**	**31,83**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**65,16**	**65,16**
7.01.05.2.01.03	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	Kali	12	4	2	2	100,00	2	8	66,67
7.01.05.2.01.04	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kali	30	9	5	5	100,00	5	19	63,33
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan	Kali	24	8	4	4	100,00	4	16	66,67
		Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	8	0	2	2	100,00	2	4	50,00
		Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	8	0	2	2	100,00	2	4	50,00
		Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan	Kali	4	0	1	1	100,00	1	2	50,00
		Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali	4	0	1	1	100,00	1	2	50,00
		Jumlah kegiatan Car Fee Day yang dilaksanakan	Kali	180	0	45	43	95,56	45	88	48,89
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari**	**%**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**66,66**	**66,66**
7.01.06..2.01	**Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Nagari yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi**	**Nagari**	**24**	**8**	**4**	**4**	**100,00**	**4**	**16**	**66,67**
7.01.06..2.01.01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Nagari	8	8	0	0	0,00	0	8	100,00

7.01.06..2.01.02	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nagari	24	8	4	4	100,00	4	16	66,67
7.01.06..2.01.03	Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	24	8	4	4	100,00	4	16	66,67
7.01.06..2.01.04	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Nagari yang terfasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Nagari	8	8	0	0	0,00	0	8	100,00
7.01.06..2.01.5	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Nagari	8	8	0	0	0,00	0	8	100,00
7.01.06..2.01.07	Sub kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Nagari	8	8	0	0	0,00	0	8	100,00
7.01.06..2.01.08	Sub Kegiatan : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Nagari	8	8	0	0	0,00	0	8	100,00
7.01.06..2.01.09	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	6	2	1	1	100,00	1	4	66,67

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan mempunyai kewenangan :

a. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
b. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

- **Kinerja Pelayanan**

1. **Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Tepat Waktu**
2. **Persentase Pelayanan Terpadu Kecamatan**

   Kecamatan Sangir Balai Janggo merupakan pintu terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada tahun 2023 Kecamatan Sangir Balai Janggo telah memberikan pelayanan yang cukup maksimal dimana telah dilaksanakan beberapa program yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

   Kinerja Pelayanan Terpadu Kecamatan Sangir Balai Janggo didukung oleh :

   a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang cukup.
   b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai.

   Hambatan dalam pencapaian kinerja Pelayanan Terpadu Kecamatan Sangir Balai Janggo adalah :

   a. Adanya tumpang tindih Kewenangan antara Kabupaten dengan Kecamatan.
   b. Belum Optimalnya Koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan Pemerintahan Kecamatan.
   c. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

3. IKM Terhadap Pelayanan Pemerintah

Adapun untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sangir Balai Janggo dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Solok Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan		√	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pelayanan Terpadu Kecamatan		√	%	70	95	100	100	70	95	100	100	
3	IKM Terhadap Pelayanan Pemerintah		√	%	87,5	90	92,5	95	87,5	90	92,5	95	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam era otonomi Daerah ini untuk mewujudkan Pemerintahan yang Good Governance dan Clean Governance diperlukan aparatur yang mempunyai integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian Kecamatan Sangir Balai Janggo terus belajar dan meningkatkan SDM Aparaturnya dengan harapan kinerja Kecamatan Sangir Balai Janggo dapat mendorong terwujudnya Kecamatan Sangir Balai Jango sebagai Instansi Pemerintahan yang memberikan Pelayanan Prima. Namun demikian yang perlu mendapat perhatian bersama adalah :

a. Belum jelasnya pembagian kewenangan Daerah dan Kecamatan dalam Palayanan Publik.
b. Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pembagian Kewenangan.
c. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN Kecamatan.
d. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana ASN.
e. Belum maksimalnya penerapan reward dan punishment bagi aparatur Pemerintahan.
f. Masih minimnya penerapan teknologi dalam pelayanan birokrasi pemerintahan.
g. Belum maksimalnya fungsi koordinasi antar OPD dan keterpaduan pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Kecamatan Sangir Balai Janggo selaku Perangkat Daerah dengan fungsi penunjang berkewajiban mendukung pencapaian misi Kabupaten Solok Selatan terutama sekali misi **3 "Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani"** yang memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani

   Misi ini menitikberatkan pada peningkatan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan

juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Terdapat beberapa program prioritas daerah yang merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam pencapaian misi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani, berkaitan dengan bidang pemerintahan yaitu :

- Peningkatan manajemen pemerintah dalam pembangunan daerah
- Peningkatan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik yang terpercaya, cepat, tepat dan tanggap serta didukung oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik
- Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan public
- Perkuatan peran pemerintah kecamatan dan percepatan kemandirian nagari dalam pembangunan daerah
- Penyediaan kendaraaan operasional jorong

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terkait dengan permasalahan dan hambatan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dihadapi Kecamatan Sangir Balai Janggo yaitu :

a. Belum optimalnya pelayanan birokrasi Kecamatan.
b. Belum jelasnya pembagian kewenangan Daerah dan Kecamatan dalam palayanan publik.
c. Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pembagian kewenangan.
d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN Kecamatan.

2.3.3 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

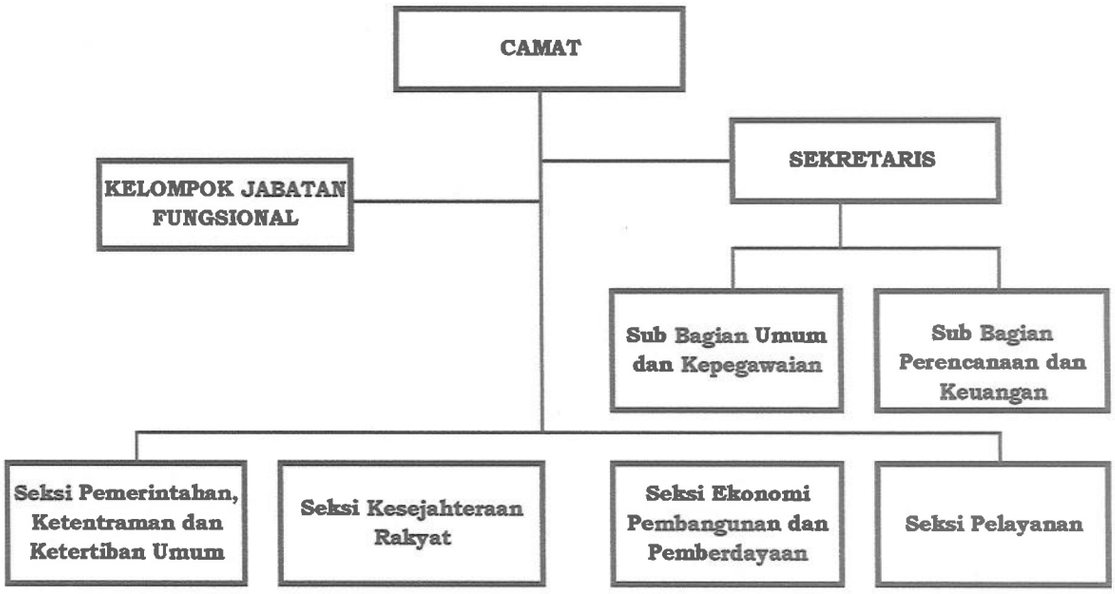
Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo. Dari analisis ini, jajaran Kantor Camat Sangir Balai Janggo dapat mengidentifikasikan kekuatan (*strengths*),

kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Atas dasar itu, strategi pencapaian misi visi organisasi dapat diformulasikan. serta dapat diketahui faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi strategi dalam mencapai misi visi yang telah ditetapkan.

Analisis lingkungan dilakukan baik terhadap lingkungan internal maupun terhadap lingkungan eksternal.Analisis terhadap lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Sangir Balai Janggo. Sementara itu, analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasikan peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Kecamatan Sangir Balai Janggo. Secara singkat, hasil analisis lingkungan Kecamatan Sangir Balai Janggo dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Kekuatan**
  - Terlakasananya koordinasi antar Perangkat Daerah dengan baik.
  - Adanya komitmen antara pihak terkait yang ada di Kecamatan
  - Tersedianya Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
  - Pembagian Tugas (job description)

Pembagian Tugas dan struktur organisasi Kecamatan Sangir Balai Janggo ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016, dengan adanya pembagian tugas yang jelas, maka lebih memudahkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing seksi.



- **Kelemahan**

1. Kurangnya tenaga trampil dibidangnya masing-masing, Belum dilaksanakannya prinsip *The right man in the ringt place*, dimana dalam menempatan seseorang pada suatu jabatan kurang memperhatikan latar belakang pendidikan yang dimiliki sehingga mengakibatkan kurang lancarnya pelaksanaan fungsi dan tugas.
2. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk staf kecamatan. Masih kurangnya pemberian kesempatan untuk pelaksanaan pendidikan bagi staf kecamatan baik struktural maupun pendidikan teknis lainnya.
3. Kurangnya sarana dan prasarana.
4. Pada saat ini sarana dan prasarana yang ada belum memadai untuk mendukung tugas-tugas di kecamatan, terutama sarana dan prasarana dibidang teknologi informas sementara informasi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan.
5. Belum tersusunnya program kegiatan secara terinci dan belum optimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan.

- **Peluang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pelimpahan wewenang pada daerah dilaksanakan secara utuh, bulat yaitu meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi

terhadap seluruh kegiatan, program dan kebijakan pemerintah, hal ini berarti memerlukan kemandirian, keleluasaan dan prakarsa kepada daerah dalam mengelola sumber daya adminsitrasi dengan memperhatikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang dapat memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, hal ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi dan terciptanya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

Budaya yang berkembang dalam masyarakat yaitu budaya musyawarah dan mufakat yang telah berkembang, melalui musyawarah dan mufakat tersebut dapat di identifikasi permasalahan yang berkembang dimasyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- **Ancaman**
  a. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan diperlukan partisipasi aktif masyarakat, namun pada saat ini tingkat pengetahuan masyarakat belum memadai, masyarakat masih rentan dengan berbagai isu yang dapat mengancam pelaksanaan pembangunan.
  b. Terjadinya kemelut dibidang politik, keamanan, dan kepastian hukum, sewaktu-waktu dapat mengakibatkan pertentangan dan pertikaian yang mengarah kedisintegrasi bangsa.
  c. Restrukturisasi / Pergantian Pimpinan

2.3.4 Isu Strategis terkait perumusan program dan kegiatan

Berikut isu strategis terkait perumusan program dan kegiatan pada Kecamatan Sangir Balai Janggo **"Peningkatan pelayanan public yang goog governance** (terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Reformasi birokrasi; Profesionalitas ASN; dan Indek Kepuasan Masyarakatan terhadap pelayanan pemerintahan)".

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian perbandingan rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan hasil analisa kebutuhan, setelah anggaran disahkan terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD, data rincinya dapat dilihat pada tabel Tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Solok Selatan

Perangkat Daerah : Kecamatan Sangir Balai Janggo

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KECAMATAN					**2.106.000.000**	**KECAMATAN**					**2.589.545.233**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**%**	**100**	**1.751.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**%**	**100**	**2.201.045.233**
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**1.284.600.000**	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**1.741.045.233**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SBJ	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	14	1.234.600.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SBJ	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	14	1.690.765.233
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SBJ	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	50.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SBJ	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	50.280.000
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**232.000.000**	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**224.500.000**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SBJ	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	4.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SBJ	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	4.000.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SBJ	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	17.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SBJ	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	20.000.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SBJ	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	4.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SBJ	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	4.000.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SBJ	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	12.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SBJ	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	12.000.000
	Subg Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	SBJ	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.500.000	Subg Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	SBJ	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.500.000
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	SBJ	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	190.500.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	SBJ	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	180.000.000

	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia**	%	**100**	**75.000.000**	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia**	%	**0**	**0**
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	SBJ	Jumlah Paket Mebel yand disediakan	Paket	1	35.000.000	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	SBJ	Jumlah Paket Mebel yand disediakan	Paket	0	0
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SBJ	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Paket	1	40.000.000	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SBJ	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Paket	0	0
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia**	%	**100**	**14.400.000**	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia**	%	**100**	**95.000.000**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SBJ	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SBJ	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.000.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SBJ	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	6.400.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SBJ	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	3.000.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SBJ	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	5.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SBJ	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	6.000.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SBJ	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SBJ	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	84.000.000
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	%	**100**	**145.000.000**	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	%	**100**	**140.000.000**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SBJ	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit/ Tahun	7	70.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SBJ	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit/ Tahun	7	70.000.000
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SBJ	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit/ Tahun	1	75.000.000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SBJ	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit/ Tahun	1	70.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Persentase Layanan PATEN**	%	**95**	**60.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Layanan PATEN**	%	**95**	**22.500.000**
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		**Persentase Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	%	**95**	**60.000.000**	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Persentase Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	%	**95**	**22.500.000**
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SBJ	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Layanan	8	60.000.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SBJ	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Layanan	8	22.500.000

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan**	**Kali**	**3**	**50.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan**	**Kali**	**3**	**50.000.000**
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kali**	**3**	**50.000.000**	**Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kali**	**3**	**50.000.000**
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SBJ	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	3	50.000.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SBJ	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	3	50.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi**	**%**	**100**	**100.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi**	**%**	**100**	**7.500.000**
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**100.000.000**	**Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**7.500.000**
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	SBJ	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan	Kali	4	100.000.000	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	SBJ	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan	Kali	4	7.500.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan**	**%**	**100**	**100.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan**	**%**	**100**	**275.500.000**
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**%**	**100**	**100.000.000**	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**%**	**100**	**275.500.000**
	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	SBJ	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	Kali	2	40.000.000	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	SBJ	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	Kali	2	125.000.000
	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	SBJ	Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kali	5	15.000.000	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	SBJ	Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kali	5	34.000.000
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	SBJ	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan	Kali	4	8.000.000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	SBJ	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan	Kali	4	36.700.000
			Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	2	3.000.000			Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	2	2.700.000

			Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	2	3.000.000			Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	2	1.350.000
			Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan	Kali	1	15.000.000			Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan	Kali	1	34.000.000
			Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali	1	2.000.000			Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali	1	26.750.000
			Jumlah kegiatan Car Fee Day yang dilaksanakan	Kali	45	14.000.000			Jumlah kegiatan Car Fee Day yang dilaksanakan	Kali	45	15.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**%**	**100**	**45.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**%**	**100**	**33.000.000**
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Jumlah desa yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi**	**Nagari**	**4**	**45.000.000**	**Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Jumlah desa yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi**	**Nagari**	**4**	**33.000.000**
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	SBJ	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nagari	4	26.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	SBJ	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nagari	4	5.000.000
	Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	SBJ	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	4	4.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	SBJ	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	4	5.000.000
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	SBJ	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	1	15.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	SBJ	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	1	23.000.000

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   Adanya penambahan ASN sebanyak 1 orang pada tahun 2024 dan sesuai dengan perhitungan kebutuhan anggaran untuk kebutuhan Belanja Gaji dan Tunjangan (kenaikan pangkat dan berkala) ASN Kecamatan Sangir Balai Janggo pada Tahun 2025.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Pengalokasian Anggaran untuk belanja ATK, Kertas dan Cover hanya dialokasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, tidak ada lagi pada sub kegiatan lainnya.

3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD

   Sesuai dengan perhitungan kebutuhan anggaran untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan Sangir Balai Janggo selama Tahun 2025.

4. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

   Terbatasnya Anggaran sehingga Belanja Modal Pengadaan Mebel di Kecamatan Sangir Balai Janggo tidak dapat diakomordir pada Tahun 2025.

5. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Terbatasnya Anggaran sehingga Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya di Kecamatan Sangir Balai Janggo tidak dapat diakomordir pada Tahun 2025.

6. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Penganggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang awalnya pada BKPSDM Kabupaten Solok Selatan, pada Tahun 2025 dianggarkan pada setiap Perangkat Daerah (sebanyak 4 orang).

7. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

   Sesuai dengan perhitungan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Sangir Balai Janggo selama Tahun 2025.

8. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

   Sesuai dengan perhitungan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sangir Balai Janggo selama Tahun 2025.

9. Sub kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

   Sesuai dengan perhitungan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan mengikuti Peringatan HUT Kabupaten dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka Peringatan HUT Republik Indonesia di Tingkat Kecamatan.

10. Sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional

    Sesuai dengan perhitungan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan Keagamaan di Tingkat Kecamatan selama Tahun 2025.

11. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

    Penambahan anggaran untuk belanja Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (sesuai dengan SK Kepala Daerah) dan belanja fasilitasi kegiatan-kegiatan OPD di Kecamatan.

12. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

    Sesuai dengan perhitungan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa/ Nagari di Kecamatan Sangir Balai Janggo selama Tahun 2025.

13. Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

    Sesuai dengan perhitungan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tingkat Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/ Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan.

Untuk Tahun 2025 tidak terdapat usulan Program atau Kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Sangir Balai Janggo, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Solok Selatan

Perangkat Daerah : Kecamatan Sangir Balai Janggo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk tingkat Kecamatan kebijakan nasional yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam penyelenggaraan pelayanan yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan selaku lembaga teknis daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola dengan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
b. Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
c. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
d. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
e. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.

Adapun Strategi yang akan dilaksanakan adalah mencakup Eksternal dan Internal, yaitu sebagai berikut :

1. Eksternal

a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
b. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

c. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
d. Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan.
e. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

2. Internal

a. Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai.
b. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
c. Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel
d. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di Kementerian PPN/Bappenas.
e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Layanan Paten yang diselenggarakan
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan tepat Waktu

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2025 Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, mengampu satu urusan yaitu urusan pemerintahan. Pada Urusan tersebut terdapat 6 program, 9 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Terhadap

rancangan awal RKPD tahun 2025 ada beberapa perbedaan dengan Analisa Kebutuhan dikarenakan masih menyesuaikan dengan usulan pada Renstra Tahun 2021-2026.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel 4.1 berikut :

RUMUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional dan Nasional 3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berisi Program/ Kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada BAB IV Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026. Perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pada Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Tabel 4.1 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO KAB. SOLOK SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO						2.589.545.233,00							2.149.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.589.545.233,00							2.149.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.589.545.233,00							2.149.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Cakupan Layanan Operasional Kantor*	-			100 Persen	2.201.045.233,00						-	1.784.000.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.741.045.233,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo	-	1.290.600.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.690.765.233,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		1.240.600.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	50.280.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasen Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		50.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	224.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo	-	250.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		4.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	20.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		17.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		4.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	12.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		12.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		4.500.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	180.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		208.500.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia*	-			100 Persen	95.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo	-	98.400.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	2.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		3.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		6.400.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	6.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		5.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	84.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		84.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara*	-			100 Persen	140.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo	-	140.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	70.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		70.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	70.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		75.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Layanan PATEN***	-			**95 Persen**	**22.500.000,00**						-	**60.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan*	-			95 %	22.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo	-	60.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	22.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		60.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Jumlah Kegiatan Pemberdayaan***	-			**3 Kali**	**50.000.000,00**						-	**60.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			3 Kali	50.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo	-	60.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	50.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		60.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi***	-			**100 Persen**	**7.500.000,00**						-	**100.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-			100 Persen	7.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo	-	100.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	7.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		100.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
6.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan***	-			**100 Persen**	**275.500.000,00**						-	**100.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			100 Persen	275.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo	-	100.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				2 Orang	125.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		40.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5 Orang	34.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		15.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	116.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		45.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari***	-			**100 Persen**	**33.000.000,00**						-	**45.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Nagari yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi*	-			4 Nagari	33.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo	-	45.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		26.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		4.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	23.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo		15.000.000,00	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	JUMLAH							2.589.545.233,00							2.149.000.000,00	

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Sangir Balai Janggo sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Sangir Balai Janggo untuk periode satu tahun yaitu Tahun 2025, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Sangir Balai Janggo pada Tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Sangir Balai Janggo, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Sangir Balai Janggo diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras. Akhir kata, semoga Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Demikianlah Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan Perangkat Daerah.

Sungai Kunyit, Juli 2024

Camat Sangir Balai Janggo

M U S L I M, S.Pd

NIP. 19700808 199203 1 006

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

KECAMATAN SANGIR JUJUAN

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Program Pembangunan Kecamatan Sangir Jujuan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tupoksi Kecamatan.

Rencana Kerja Kecamatan Sangir Jujuan Tahun 2025 ini mencakup Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan sebagai dasar pembuatan Rencana Kerja Anggaran bagi Kecamatan Sangir Jujuan Tahun 2025, dan juga berfungsi sebagai bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan serta sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan Rencana Anggran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

Demikianlah dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sangir Jujuan ini dibuat, untukdijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Tahun 2025

Lubuk Malako, Juli 2024
CAMAT SANGIR JUJUAN

ELFI HENDRI, M.Pd
NIP. 19820226 200604 1006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	.....	1
1.1 Latar Belakang	.....	1
1.2 Landasan Hukum	.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	.....	4
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.	.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	.....	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	.....	18
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	24
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	.....	31
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	.....	32
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	.....	
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	.....	
3.3 Program dan Kegiatan	.....	
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		
BAB V.PENUTUP	.....	36
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, TataCara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata CaraPerubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan undang – undang Nomor 25 Tahun Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang Membuat program program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan perangkat daerah untuk periode satu tahun berjalan. Di dalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan – permasalahan yang belum dapat di selesai dan memuat program – program Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Tahunan Derah. Selain itu guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan

masyarakat yang sudah di capai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kecamatan Sangir Jujuan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mengkoordinasikan program- program pembangunan dan program sosial, melaksanakan tugasnya dilingkup Pemerintah Kecamatan sampai ke Nagari. Sehingga berbagai program pembangunan dapat bersinergi dan berdaya manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam rangka pengkoordinasian urusan-urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan ketertiban umum, dan urusan pembangunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah

upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai acuan bagi perangkat daerah di Kecamatan Sangir Jujuan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1) Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2023 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2025.
2) Mengarahkan visi Perangkat Daerah kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2025.
3) Menyusun kebijakan pembangunan Perangkat Daerah yang dituangkanke dalamsusunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2025.
4) Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

b. Tujuan ;

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan yang ada pada program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS).
2. Merencanakan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
3. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
4. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan danpembangunan.
5. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi padamasa depan.
6. Memudahkan para pemangku kepentingan untuk menghadapi masa depan.
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
8. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Sangir Jujuan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerda Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Berisi Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian renstra, analisis kenerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dari pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana strategis Perangkat Daerah.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Solok Selatan, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggran 2023 Kecamatan Sangir Jujuan telah melaksanakan 6 program yang didalamnya terdapat 11 kegiatan dan 28 Sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 2.231.182.489,-.

Dengan menggunakan format Penetapan kinerja, Pengukuran kegiatan dan pengukuran Pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun anggaran 2023 Perangkat Daerah dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerja.

Perangkat Daerah menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab keukarang dan kelemahan tersebut sebagai umpan balik / feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Dalam hal ini Perangkat Daerah terdapat 3 kegiatan yang Kurang terealisasi anggarannya Tahun 2023

Adapun kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, penyebabnya adalah karena kelebihan penganggaran pada Honorarium

Instruktur Senam CFD.

2. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, penyebabnya adalah karena kurang terealisasinya Kegiatan Fasilitasi Pemilu Tahun 2024.
3. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Sib kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Penyebabnya adalah dikarenakan Kegiatan tersebut tidak terealisasi karena kurangnya kegiatan ke Nagari.

2.1.2 Realisasi Program /Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2023, realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun realisasi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1tahun
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun
3. Penyediaan peralatan rumah tangga selama 1 tahun
4. Penyediaan barang catakan dan penggandaan selama 1 tahun
5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah selama 1 tahun
6. Penyediaan jasa surat selama 12 bulan
7. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan
8. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun
9. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraandinas operasional atau lapangan selama 1 tahun
10. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunanlainnya selama 1 tahun

11. Koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait selama 1 tahun
12. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan selama 1 tahun
13. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan dan swasta di wilayah kerja kecamatan selama 1 tahun
14. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
15. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional selama 1 tahun
16. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa selama 1 tahun
17. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa

2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil /Keluaran yang direncanakan

Perangkat Daerah tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2023.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan

Adapun faktor yang menyebabkan kegiatan tidak terealisasinya anggaran dari target adalah adanya beberapa kebijakan diambil oleh Pemerintah kabupaten Solok Selatan. Sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja di tahun 2023, serta adanya kegiatan Pengadaan yang dianggarkan di Perubahan Anggaran sehingganya tidak terealisasi target karena Kurangnya Sumber Daya Manusia yang akan Melaksanakan dan Mengkoordinir Serta Sarana Prasarana yang tidak tersedia Untuk Kegiatan Tesebut. sedangkan kegiatan yang melebihi target tidak ada.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Rencana strategis Perangkat Daerah

Dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah :

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah
b. Meningkatnya koordinasi berbagai pihak di bidang pembangunan

2.1.6 Kebijakan / Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi Faktor-faktor penyebab tersebut

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut, sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun untuk melihat lebih rinci terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihatpada table 2.1 dibawah ini :

Tabel : 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024
Kabupaten Solok Selatan

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Sangir Jujuan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja OPD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=6+8+10*	*12=11/5*
	KECAMATAN										
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**Persen**	**100**	**33**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**77,67**	**78**
X.XX.01.2.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**33**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**77,67**	**78**
X.XX.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/Bln	96	79	15	15	100%	16	110	115
X.XX.01.2.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	24	10	4	4	100%	4	18	75
		Jumlah tenaga pendukung Administrasi kantor yang dibayarkan honornya	Orang	11	4	0	0	100%	4	8	73
X.XX.01.2.06	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**86,67**	**87**
X.XX.01.2.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	24	8	4	4	100%	4	16	67
X.XX.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	24	31	4	4	100%	4	39	163

	Kantor										
X.XX.01.2.06.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	24	21	4	4	100%	4	29	121
X.XX.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	24	7	4	4	100%	4	15	63
X.XX.01.2.06.08	Subg Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	16	0	4	4	0	4	8	50
X.XX.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	24	8	4	4	100%	4	16	67
X.XX.01.2.07	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**Persen**	**100**	**60**	**100**	**100**	**100**	**0**	**53,33**	**53**
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit/Tahun	2	0	0	0	0%	0	0	0
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor/ Bangunan lainnya yang disediakan	Unit/Tahun	1	1	0	0	0%	0	1	100
X.XX.01.2.07.11	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Unit/Tahun	91	12	4	4	100%	0	16	18
X.XX.01.2.08	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**Persen**	**100**	**60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**86,67**	**87**
X.XX.01.2.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	Laporan	24	8	4	4	100%	4	16	67
X.XX.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lapran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	24	8	4	4	100%	4	16	67
X.XX.01.2.08.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan Penglengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	24	8	4	4	100%	4	16	67
X.XX.01.2.09	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**Persen**	**100**	**60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**86,67**	**87**
X.XX.01.2.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atasu kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	42	14	7	7	100%	7	28	67

	Dinas Operasional atau Lapangan										
X.XX.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/Direhabilitasi	Unit	11	4	2	2	100%	2	8	73
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan PATEN**	**Persen**	**100**	**52,5**	**35**	**35**	**70**	**35**	**40,83**	**41**
7.01.02.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**Persen**	**100**	**60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**86,67**	**87**
7.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	8	0	3	3	100%	3	6	75
		Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	8	0	2	2	100%	2	4	50
		Terfasilitasinya kegiatan pemuda dan olah raga	Kali	4	0	0	0	0%	0	0	0
		Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali	8	0	3	3	100%	3	6	75
7.01.02.2.02	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan**	**Persen**	**70**	**55**	**35**	**35**	**35**	**35**	**42**	**60**
7.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Layanan	48	16	8	8	35%	8	32	67
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan**	**Kali**	**43**	**7**	**8**	**8**	**100**	**8**	**23**	**53**
7.01.03.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa**	**Kali**	**43**	**7**	**8**	**8**	**100**	**8**	**23**	**53**
7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang difasilitasi	Kali	25	0	5	5	100%	5	10	40

7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	18	6	3	3	100%	3	12	67
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penegakan Perda yang difasilitasi**	**Persen**	**100**	**60**	**100**	**100**	**0**	**100**	**87**	**87**
7.01.04.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase penyelesaian masalah-masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**100**	**60**	**100**	**100**	**0**	**100**	**87**	**87**
7.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan	Kali	20	0	4	4	0%	4	8	40
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan**	**Persen**	**100**	**60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**87**	**87**
7.01.05.2.01	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Persen**	**100**	**60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**87**	**87**
7.01.05.2.01.03	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terfasilitasinya kegiatan hari besar nasional dan daerah	Kali	12	1	2	2	100%	2	5	42
7.01.05.2.01.04	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kali	30	9	5	5	100%	5	19	63
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan	Kali	24	8	4	4	100%	4	16	67
		Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	8	0	2	2		2	4	50
		Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	8	0	2	2		2	4	50
		Terfasilitasinya kegiatan pemuda dan olah raga	Kali	4	0	1	1		1	2	50
		Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali	4	0	1	1		1	2	50

7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**33,33**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**78**	**78**
7.01.06..2.01	**Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi**	**Nagari**	**5**	**7,5**	**5**	**5**	**100%**	**5**	**18**	**350**
7.01.06..2.01.01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Nagari	10	5	0	0	0%	0	5	50
7.01.06..2.01.02	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nagari	30	5	5	5	0%	5	15	50
7.01.06..2.01.03	Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Terfasilitasinya pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	25	1	5	5	20%	5	11	44
7.01.06..2.01.04	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terfasilitasinya penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Nagari	5	0	0	0	0%	0	0	0
7.01.06..2.01.5	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Nagari	10	5	0	0	0%	0	5	50
7.01.06..2.01.07	Sub kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Nagari	10	0	0	0	0%	0	0	0
7.01.06..2.01.08	Sub Kegiatan : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terfasilitasinya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Nagari	5	2	0	0	0%	0	2	40
7.01.06..2.01.09	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	6	3	1	1	100%	1	5	83

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan mempunyai kewenangan :

a. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
b. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

- **Kinerja Pelayanan**

1. Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Tepat Waktu.
2. Persentase Pelayanan Terpadu Perangkat Daerah

Kecamatan Sangir Jujuan merupakan pintu terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada tahun 2022 Kecamatan Sangir Jujuan telah memberikan pelayanan yang cukup maksimal dimana telah dilaksanakan beberapa program yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

Kinerja layanan PATEN Perangkat Daerah didukung oleh :

1. Ketersedian Sarana dan prasarana yang cukup
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai

Hambatan/Kendala kinerja Pelayanan PATEN di Perangkat Daerah adalah :

1. Adanya tumpang tindih kewenangan antara Kabupaten dan kecamatan.
2. Belum optimalnya Koordinasi antara Pemerintahan Nagari dan Pemerintahan Kecamatan

3. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Adapun untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Perangkat Daerah, dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Satuan					Realisasi Capaian				Catatan Analisa
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Nagari yang menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan		v	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Layanan PATEN yang diselenggarakan			Persentase	35	35	35	35	35	35	35	35	
3	IKM terhadap pelayanan pemerintah kecamatan			Persentase	87.5	90	92.5	85	87.5	90	92.5	95	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1 Tingkat Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam era otonomi Daerah ini untuk mewujudkan Pemerintahan yang Good Governance dan Clean Governance diperlukan aparatur yang mempunyai integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian Kecamatan Sangir Jujuan terus belajar dan meningkatkan SDM Aparaturnya dengan harapan kinerja Kecamatan Sangir Jujuan dapat mendorong terwujudnya Kecamatan Sangir Jujuan sebagai Instansi Pemerintahan yang memberikan Pelayanan Prima. Namun demikian yang perlu mendapat perhatian bersama adalah :

a. Belum jelasnya pembagian kewenangan Daerah dan Kecamatan dalam Palayanan Publik.
b. Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pembagian Kewenangan.
c. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN Kecamatan.
d. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana ASN.
e. Belum maksimalnya penerapan reward dan punishment bagi aparatur Pemerintahan.
f. Masih minimnya penerapan teknologi dalam pelayanan birokrasi pemerintahan.
g. Belum maksimalnya fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah dan keterpaduan pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kecamatan Sangir Jujuan Selaku Perangkat Daerah dengan fungsi penunjang berkewajiban mendukung Pencapaian nilai Kabupaten Solok Selatan terutama sekali misi **"Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani"** yang memiliki tujuan sebagai berikut :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan baik. Bersih dan melayani. Misi ini menitik beratkan pada peningkatan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahanefektif, Efisien, transparan dan akuntabel dengan memamfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa – jasa layanan publik pemerintahan, meningkatkan akses masyarakat ke sumber – sumber informasi yang dimiliki, menangani keluhan

masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam PenyelenggarakanTugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terkait dengan permasalahan dan hambatan penyelenggaraan tugas dan fungsi yangdirasakan Kecamatan Sangir Jujuan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan birokrasi Kecamatan.
2. Belum jelasnya pembagian kewenangan Daerah dan Kecamatan dalam pelayanan publik.
3. Belum adanya payung yang mengatur tentang pembagian kewenangan.
4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN Kecamatan.

2.3.3 Permasalahan Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Rencana Kerja Kecamatan Sangir Jujuan memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana kerja Kecamatan Sangir Jujuan. Dari analisis ini, jajaran Kecamatan Sangir Jujuan dapat mengidentifikasikan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Atas dasar itu, strategi pencapaian misi visi organisasi dapat diformulasikan. serta dapat diketahui faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi strategi dalam mencapai misi visi yang telah ditetapkan.

Analisis lingkungan dilakukan baik terhadap lingkungan internal maupun terhadap lingkungan eksternal.Analisis terhadap lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Sangir Jujuan. Sementara itu, analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasikan peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Kecamatan Sangir Jujuan. Secara singkat, hasil analisis lingkungan Kecamatan Sangir Jujuan

dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Kekuatan**

  - **Pembagian Tugas (job description)**

    Pembagian Tugas dan struktur organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor : 15 Tahun 2016, dengan adanya pembagian tugas yang jelas, maka lebih memudahkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari



- **Kelemahan**

1. Kurangnya tenaga trampil dibidangnya masing-masing, Belum dilaksanakannya prinsip *The right man in the ringt place,* dimana dalam menempatan seseorang pada suatu jabatan kurang memperhatikan latar belakang pendidikan yang dimiliki sehingga mengakibatkan kurang lancarnya pelaksanaan fungsi dan tugas.
2. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk staf kecamatan. Masih kurangnya pemberian kesempatan untuk pelaksanaan pendidikan bagi staf kecamatan baik struktural maupun pendidikan teknis lainnya.
3. Kurangnya sarana dan prasarana.
4. Pada saat ini sarana dan prasarana yang ada belum memadai untuk mendukung tugas-tugas di kecamatan, terutama sarana dan prasarana dibidang teknologi

informasi. Sementara informasi mempunyai peran penting dalam pelaksanaanpemerintahan.

5. Belum tersusunnya program kegiatan secara terinci dan belum optimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan.

- **Peluang**

  Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pelimpahan wewenang pada daerah dilaksanakan secara utuh, bulat yaitu meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan, program dan kebijakan pemerintah, hal ini berarti memerlukan kemandirian, keleluasaan dan prakarsa kepada daerah dalam mengelola sumber daya adminsitrasi dengan memperhatikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  Misi pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang dapat memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, hal ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi dan terciptanya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

  Letak geografis Kecamatan Sangir Jujuan yang sangat strategis dan berbatas langsung dengan Kecamatan Sangir Batang Hari, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sungai Pagu dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi menjadikan kecamatan Sangir Jujuan sebagai jalur lalu lintas ekonomi.

  Budaya yang berkembang dalam masyarakat yaitu budaya musyawarah dan mufakat yang telah berkembang, melalui musyawarah dan mufakat tersebut dapat di identifikasi permasalahan yang berkembang dimasyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- **Ancaman**

  Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan diperlukan partisipasi aktif masyarakat, namun pada saat ini tingkat pengetahuan masyarakat belum memadai, masyarakat masih rentan dengan berbagai isu yang dapat mengancam pelaksanaan pembangunan.

  a. Terjadinya kemelut dibidang politik, keamanan, dan kepastian hukum, sewaktu- waktu dapat mengakibatkan pertentangan dan pertikaian yang mengarah kedisintegrasi bangsa
  b. Restrukturisasi / Pergantian Pimpinan

2.3.4 Isu Strategis terkait perumusan program dan kegiatan

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, berbagai permasalahan dan isu pembangunan terkait Perangkat Daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten adalah "**Peningkatan pelayanan Publik yang good governance** (terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah ; Reformasi birokrasi; Profesionalitas ASN; dan indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah)".

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berisikan uraian perbandingan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan hasil analisa kebutuhan, setelah anggaran di sahkan terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD, data rincinya dapat dilihat pada table 2.3 di bawah ini :

Tabel : 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SANGIR JUJUAN

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan(Output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan(Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN							**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**				
	KECAMATAN					**2.076.000.000**					**2.904.645.240**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**SJJ**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**Persen**	**100**	**1.800.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	**lancarnya pelayanan administrasi perkantoran**	**tahun**	**2.624.766.640**	
I	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	SJJ	**Persentase Pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**1.481.300.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa	**persentase pelaksanaan administrasi keuangan kantor**	**persen**	**1.967.825.340**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SJJ	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/Bln	15	1.433.300.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/Bln	1.917.545.340	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SJJ	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	48.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	50.280.000	

II	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	SJJ	**Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran**	**Persen**	**100**	**194.250.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa	**Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran**	**persen**	**158.437.900**	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	SJJ	Jumlah paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	3.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	Jumlah paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2.999.700	
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SJJ	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	20.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	20.013.800	
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SJJ	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	4.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4.003.100	
4	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SJJ	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	13.500.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	13.488.300	
5	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	SJJ	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	3.900.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	3.000.000	
6	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	SJJ	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	149.850.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	114.933.000	
III	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	SJJ	**Persentase Barang milik daerah yang tersedia**	**Persen**	**100**	-	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa	**Persentase Barang milik daerah yang tersedia**	**persen**	**320.312.400**	
	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan lainnya	SJJ	Jumlah Unit Gedung Kantor/ Bangunan lainnya yang disediakan	Paket	1	-	Lanjutan Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan lainnya	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	Jumlah Unit Gedung Kantor/ Bangunan lainnya yang disediakan	1 Paket	60.145.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SJJ	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Paket	2	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Paket	231.071.000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	5		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Unit	29.096.400	
IV	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	SJJ	**Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran**	**Persen**	**1004**	**24.450.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa	**Persentase Ketersediaan jasa Penunjang yang tersedia Persentase Ketersediaan jasa Penunjang yang tersedia**	**100 persen 100 persen**	**107.340.000**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SJJ	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	Laporan	4	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	Laporan	2.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SJJ	Jumlah Lapran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12.700.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	Jumlah Lapran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	11.000.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SJJ	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan Penglengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	9.750.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan Penglengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	10.340.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SJJ	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	84.000.000	
V	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	SJJ	**Persentase Jumlah sarana dan prasarana aparatur**	**Persen**	**100**	**100.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	**Persentase Barang milik daerah yang dipelihara Persentase Barang milik daerah yang dipelihara**	**persen**	**70.851.000**	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SJJ	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atasu kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	7	60.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atasu kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	Unit	59.307.000	
5	Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SJJ	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/Direhabilitasi	Unit	2	40.000.000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/Direhabilitasi	Unit	11.544.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Persentase Layanan PATEN**	**Persen**	**70**	**60.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	**Persentase Layanan PATEN**	**%**	**10.001.000**	

II	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	SJJ	**Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan**	**Persen**	**70**	**60.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	**Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan**	**%**	**10.001.000**	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SJJ	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Layanan	8	60.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kecamatan	Layanan	10.001.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**SJJ**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan Jumlah kegiatan pemberdayaan Undefined Jumlah kegiatan pemberdayaan**	**Kali**	**5**	**60.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan Jumlah kegiatan pemberdayaan Undefined Jumlah kegiatan pemberdayaan**	**persen**	**54.058.000**	
I	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah kegiatan pemberdayaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**Kali**	**5**	**60.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah kegiatan pemberdayaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**persen**	**54.058.000**	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**SJJ**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari	Kali	5	5.000.000	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	
2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SJJ	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	3	55.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	54.058.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SJJ	**Cakupan penegakan Perda yang difasilitasi**	**Persen**	**100**	**20.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa	**Cakupan penegakan Perda yang difasilitasi**	**persen**	**9.261.000**	
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SJJ	**Persentase penyelesaian masalah-masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**100**	**20.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa	**Cakupan penegakan Perda yang difasilitasi Persentasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Persentase Penyelesaian masalah masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum**	**persen**	**9.261.000**	

	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	SJJ	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan	Kali	4	20.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	9.261.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**SJJ**	**Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan**	**Persen**	**100**	**86.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	**Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan**	**Persen**	**162.558.800**	
1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	SJJ	**Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Persen**	**100**	**86.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa	**Persentase Penyelesaian masalah - masalah terkait ketentraman dan Ketertiban Umum Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Persen**	**162.558.800**	
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	SJJ	Jumlah Orang Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kali	2	60.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa	Jumlah Orang Yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2	72.293.000	
2	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	SJJ	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kali	5	16.000.000	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	SJJ	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	5	22.660.000	
3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	SJJ	Jumlah Dokumen Tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kali	4	10.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	4	67.605.800	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**SJJ**	**Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Nagari Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Nagari**	**persen**	**100**	**50.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Nagari Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Nagari**	**100 persen**	**43.999.800**	

I	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	SJJ	**jumlah Nagari yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi**	**nagari**	**5**	**50.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa	**jumlah Nagari yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi jumlah Nagari yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi Persentase pembinaan dan pengawsasan Pemerintahan Nagari**	**5 nagari 5 nagari 100 persen**	**43.999.800**	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	SJJ	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nagari	5	31.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa	Jumlah nagari yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	14.000.000	
2	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	SJJ	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	5	4.500.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa	Jumlah nagari yang difasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	5 Dokumen	4.999.800	
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	SJJ	Jumlah dokumen Singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dalam pembangunan desa	DOK	1	14.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kab.solsel,SJJ,Semua Kel/ desa	Jumlah dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	1 Dokumen	25.000.000	
	JUMLAH					**2.076.000.000**	**JUMLAH**				**2.904.645.240**	

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPP dengan hasil analisis kebutuhan pada pada beberapa Sub Kegiatan sebagai :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik karena di anggaran awal tidak teranggarkan.
2. Adanya pengurangan ASN yang menyebabkan kelebihan anggaran Sub kegiatan Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini di uraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang disulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan. Untuk tahun 2024 tidak terdapat usulan program atau kegiatan dari para pemangku kepentingan.

Dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel : 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

TAHUN 2025

KABUPATEN SOLOK SELATAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SANGIR JUJUAN

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk tingkat Kecamatan Kebijakan Nasional yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam penyelenggaraan pelayanan yaitu **Memperkuat Reformasi Politik, Hukum Dan Birokrasi Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyelundupan**, Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi, serta penguatan kerja sama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama. Hal ini didukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia dan keamanan siber. Pada bidang pelayanan publik difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kerja, dan standardisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, tahapan persiapan pemilu akan dimulai dengan verifikasi data Kartu Tanda Penduduk secara online.

Terkait dengan kebijakan nasional Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan selaku lembaga teknis daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas I reformasi birokrasi dan tata kelola dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.

4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal :

- **Eksternal :**

1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2) Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
3) Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
4) Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan.
5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

Internal :

1) Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga Hingga kinerjaindividu/pegawai.
2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk

mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

3) Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana ditingkatpusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel
4) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* diKementerian PPN/ Bappenas.
5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangkamendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR
1.	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Nagari	Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu
		2.	Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase Pelayanan Pemerintahan

Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, mengampu satu urusan yaitu urusan Pemerintahan. Pada Urusan tersebut terdapat 6 Program , 9 Kegiatan dan 23 Sub kegiatan.

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka ditetapkan program-program sesuai tabel 3.2 berikut :

Tabel : 3.2

No	Program/Kegiatan Tahun 2025
1.	**PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
	KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
	1) Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2) Penyediaan Alat Tulis Kantor
	3) Penyediaan peralatan rumah tangga
	4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
	6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH
	KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA URUSAN PEMERINTAH DAERAH
2.	1) Penyediaan jasa surat menyurat
	2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
	3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	4) Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor
	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PENUNJANG URUSAN
3.	**PEMERINTAH DAERAH**
	1) Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau
	lapangan
	2) Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan

	Bangunan Lainnya
4	**PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK** **KEGIATAN : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN** 1) Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
5	**PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KEGIATAN : KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA** 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
4	**PROGRAM : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** **KEGIATAN : KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** 1) Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatani
5	**PROGRAM : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM** **KEGIATAN : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH** 1) Pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa 2) Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional 3) Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
6	**PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA** **KEGIATAN : FASILITASI REKOMENDASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** 1) Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa 2) Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

	3) Fasilitasi sinkronisasi pembangunan daerah dengan pembangunan desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berisi Program/ Kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada BAB IV Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026. Perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Tabel : 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SANGIR JUJUAN KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SANGIR JUJUAN						**2.904.645.240,00**							**2.786.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.845.338.240,00**							**2.726.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.845.338.240,00**							**2.726.800.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Layanan Operasional Kantor Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan***	-			**100 persen 100 Persen**	**2.665.459.640,00**						-	**2.481.800.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Operasional Kantor Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen 100 Persen 100 Persen	1.967.825.340,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola	-	-	1.530.850.000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang Orang/bulan	1.917.545.340,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola	-		1.482.850.000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	50.280.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola	-		48.000.000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah* *Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen 100 Persen	158.437.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola	-	-	193.950.000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.999.700,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola	-		3.000.000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	20.013.800,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola	-		20.000.000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4.003.100,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola	-		4.000.000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	13.488.300,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola	-		13.200.000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola	-		3.900.000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	114.933.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola	-		149.850.000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia Persentase Barang Milik Daerah Yang tersedia*	-			0 Persen 0 Persen	320.312.400,00			**Memperkua t Reformasi Politik,** Hukum, dan Birokrasi, serta Memp **erkuat Pen** cegahan dan Pembe **rantasan Korupsi, Narkoba, Judi** dan Pe nyeludupan	**Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i** tata kelola	-	-	560.000.000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	29.096.400,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola	-		30.000.000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	60.145.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola	-		80.000.000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	231,071,000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola	-		450,000,000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	107,340,000,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola	-	-	107,000,000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	2,000,000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola	-		2,000,000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	11,000,000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola	-		11,000,000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	10,340,000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola	-		[illegible]	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	84.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola	-			KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara Persentase barang milik daerah yang terpelihara*	-			100 Persen 100 Persen	11.544.000,00			**Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan**	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola	-	-		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	11.544.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola	-			KECAMATAN SANGIR JUJUAN
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Layanan Paten***	-			**100 Persen**	**10.001.000,00**						-		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan* *Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan*	-			35 Persen 35 Persen	10.001.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	-		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	10.001.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani			KECAMATAN SANGIR JUJUAN

3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Jumlah kegiatan pemberdayaan Jumlah kegiatan pemberdayaan***	-			**6 kegiatan 8 kali 8 Kali**	**54.058.000,00**						-		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah kegiatan pemberdayaan Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa*	-			8 kali 8 kali 6 Kegiatan	54.058.000,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasaan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola	-	-	60.000.000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga K emasyarakat an	0,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasaan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola	-		5.000.000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	54.058.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasaan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola	-		55.000.000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Cakupan Penegakan Perda Yang difasilitasi Cakupan penegakan Perda yang difasilitasi***	-			**100 persen 100 Persen**	**9.261.000,00**						-	**20.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan penegakan Perda yang difasilitasi Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan persentase penyelesaian masalah-masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum Persentase penyelesaian masalah-masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum*	-			100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	9.261.000,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasaan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola	-	-		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	9.261.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola	-			KECAMATAN SANGIR JUJUAN
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-			-	**162.558.800,00**						-		
	7.01.06.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	162.558.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola	-	-		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.06.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				50 Orang	72.293.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola	-			KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.06.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	22.660.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola	-			KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.06.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	67.605.800,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola	-			KECAMATAN SANGIR JUJUAN
6,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-			-	**43.999.800,00**						-		

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	43.999.800,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola	-	-	85.000.000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola	-		85.000.000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5 Dokumen	4.999.800,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola	-		5.000.000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa															
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformas i tata kelola	-		15.000.000,00	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	X	**NON URU**						**59.307.000,00**							**60.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**59.307.000,00**							**60.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Layanan Operasional Kantor Persentase ketercapaian penunjang urusan***	-			**100 persen 100 Persen**	**59.307.000,00**						-	**60.000.000,00**	

	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara Persentase barang milik daerah yang terpelihara*	-			100 Persen 100 Persen	59.307.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola	-	-	60.000.000,00	KECAMATAN BANGIR JUJUAN
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	59.307.000,00	Kab. Solok Selatan, Bangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola	-		60.000.000,00	KECAMATAN BANGIR JUJUAN
	JUMLAH							**2.904.645.240,00**							**2.786.800.000,00**	

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Perangkat Daerah sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Rencana Kerja Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025, Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Perangkat Daerah pada tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Demikianlah Rencana Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan Perangkat Daerah.

Lubuk Malako, Juli 2024

CAMAT SANGIR JUJUAN

ELFI HENDRI, M.Pd

NIP. 19820226 200604 1006

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

KECAMATAN SUNGAI PAGU

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Program Pembangunan Kecamatan Sungai Pagu dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tupoksi Kecamatan.

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2025 ini mencakup Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan acuan bagi Kecamatan Sungai Pagu dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan sebagai dasar pembuatan Rencana Kerja Anggaran bagi Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2025, dan juga berfungsi sebagai bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan serta sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan Rencana Anggran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

Demikian dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2025 ini dibuat, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Tahun 2025.

Muaralabuh, Agustus 2024
Camat Sungai Pagu

IBRAHIM, SH, MM
NIP. 196910081992031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 15
2.4 Terhadap Rancangan Awal RKPD 19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 25
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 26
3.3 Program dan Kegiatan 27

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 29

BAB V PENUTUP 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kecamatan Sungai Pagu sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Didalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Tahunan Daerah. Selain itu guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Proses Penyusunan Renja Kecamatan Sungai Pagu mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Sungai Pagu dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Kecamatan Sungai Pagu, evaluasi kinerja pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Sungai Pagu.

Rencana Kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, karena disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Sungai Pagu dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Kecamatan Sungai PaguTahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2025 dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di Kecamatan Sungai Pagu dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

a. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran tahun 2023 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2025.
b. Mengarahkan visi Kecamatan Sungai Pagu kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2025.
c. Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Sungai Pagu yang dituangkan ke dalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2025.
d. Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu ini adalah :

a. Sebagai bahan masukan yang ada pada Program/Kegiatan di Rencana Kerja kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS)
b. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
c. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
d. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
e. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
f. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.
g. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
h. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Sungai Pagu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Berisi Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dari pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Solok Selatan, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direlisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggran 2023 Kecamatan Sungai Pagu telah melaksanakan 6 program yang didalamnya terdapat 09 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 3,153,133292,-.

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan Pengukuran Kinerja untuk Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sungai Pagu dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam Pencapaian Kinerja.

Kecamatan Sungai Pagu menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan dan kelemahan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Sungai Pagu Pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, pada umumnya telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran karena merupakan kegiatan rutinitas tahunan dan kebutuhan kantor.

2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Pada Umumnya Kecamatan Sungai Pagu pada Tahun Anggaran 2023 realisasi Kinerja maupun Keuangan terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan telah memenuhi target kinerja.

2.1.3 Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Sungai Pagu tidak ada realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2023.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/ Kegiatan

Adapun faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan kegiatan adalah :

1. Tersedianya Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Terlakasananya koordinasi antar Perangkat Daerah dengan baik.
3. Adanya komitmen antara pihak terkait yang ada di Kecamatan.
4. Pembagian Tugas (job description).

Adapun untuk melihat lebih rinci terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Pagu dapat dilihat pada tabel T-C.29 dibawah ini :

Tabel : T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023

Kabupaten Solok Selatan

Perangkat Daerah : Kecamatan Sungai Pagu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan (2024)	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = (8/7)*	*10*	*11 = (6+8+10)*	*12 = (11/5)*
	KECAMATAN										
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**%**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100.00**	**100**	**66.66**	**66.66**
7.01.01.2.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100.00**	**100**	**66.66**	**66.66**
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	80	22	22	22	100.00	22	66	82.50
7.01..01.2.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72	24	12	12	100.00	12	48	66.67
		Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Kantor yang dibayarkan Honornya	Orang	9					4	4	44.44
7.01.01.2.06	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100.00**	**100**	**66.66**	**66.66**
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	24	8	4	4	100.00	4	16	66.67
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	24	8	4	4	100.00	4	16	66.67
7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	24	8	4	4	100.00	4	16	66.67
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	24	8	4	4	100.00	4	16	66.67
7.01.01.2.06.08	Subg Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	16	0	4	4	100.00	4	8	50.00
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	8	4	4	100.00	4	16	66.67
7.01.01.2.07	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia**	**%**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100.00**	**100**	**66.66**	**66.66**
7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	2	1	0	0	0.00	0	1	50.00
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Paket	3	1	1	1	100.00	0	2	66.67
7.01.01.2.07.11	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	3	2	0	0	0.00	0	2	66.67

7.01.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia	%	100	33.33	100	100	100.00	100	66.66	66.66
7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	8	4	4	100.00	4	16	66.67
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	72	24	12	12	100.00	12	48	66.67
7.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	24	8	4	4	100.00	4	16	66.67
7.01.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	%	100	33.33	100	100	100.00	100	66.66	66.66
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit/ Tahun	42	14	7	7	100.00	7	28	66.67
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit/ Tahun	3	1	0	0	0.00	1	2	66.67
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan PATEN	%	100	55	70	70	70.00	95	95	95.00
7.01.02.2.01	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	25	0	0	0.00	0	25.00	25.00
7.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	4	2	0	0	0.00	0	2	50.00
		Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	4	1	0	0	0.00	0	1	25.00
		Terfasilitasinya kegiatan pemuda dan olah raga	Kali	2	1	0	0	0.00	0	1	50.00
		Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali	4	1	0	0	0.00	0	1	25.00
7.01.02.2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	100	55	70	70	70	95	95	95.00
7.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Layanan	48	16	8	8	100.00	8	32	66.67
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kali	18	6	3	3	100.00	3	12	66.67
7.01.03.2.01	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kali	18	6	3	3	100.00	3	12	66.67
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	18	6	3	3	100.00	3	12	66.67
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi	%	100	29.17	100	100	100.00	100	62.50	62.50
7.01.04.2.01	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	29.17	100	100	100.00	100	76	76.39
7.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan	Kali	24	7	3	3	100.00	4	14	58.33

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	100	31.83	100	100	100.00	100	65.16	65.16
7.01.05.2.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	31.83	100	100	100.00	100	65.16	65.16
7.01.05.2.01.03	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	Kali	12	4	2	2	100.00	2	8	66.67
7.01.05.2.01.04	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kali	30	9	5	5	100.00	5	19	63.33
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan	Kali	24	8	4	4	100.00	4	16	66.67
		Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	8	0	2	2	100.00	2	4	50.00
		Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	8	0	2	2	100.00	2	4	50.00
		Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan	Kali	4	0	1	1	100.00	1	2	50.00
		Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali	4	0	1	1	100.00	1	2	50.00
		Jumlah kegiatan Car Fee Day yang dilaksanakan	Kali	180	0	45	43	95.56	45	88	48.89
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari	%	100	33.33	100	100	100.00	100	66.66	66.66
7.01.06.2.01	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Nagari	11	0	11	4	36.36	4	8	72.73
7.01.06.2.01.01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Nagari	11		0	0	0.00	11	11	100.00
7.01.06.2.01.02	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nagari	11		11	11	100.00	11	22	200.00
7.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan penday agunaan aset Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan penday agunaan aset Desa	Nagari	11		11	11	100.00	11	22	200.00
7.01.06.2.01.04	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Nagari yang terfasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Nagari	11		11	11	0.00	11	22	200.00
7.01.06.2.01.5	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Nagari	11		11	11	0.00	11	22	200.00
7.01.06.2.01.07	Sub kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Nagari	11		0	0	0.00	11	11	100.00
7.01.06.2.01.08	Sub Kegiatan : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Nagari	11		11	11	0.00	11	22	200.00
7.01.06.2.01.09	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	1		1	1	100.00	1	2	200.00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan mempunyai kewenangan :

a. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
b. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

- **Kinerja Pelayanan**

  1. **Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Tepat Waktu**
  2. **Persentase Pelayanan Terpadu Kecamatan**

     Kecamatan Sungai Pagu merupakan pintu terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada tahun 2023 Kecamatan Sungai Pagu telah memberikan pelayanan yang cukup maksimal dimana telah dilaksanakan beberapa program yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

     Kinerja Pelayanan Terpadu Kecamatan Sungai Pagu didukung oleh :

     a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang cukup.
     b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai.

     Hambatan dalam pencapaian kinerja Pelayanan Terpadu Kecamatan Sungai Pagu adalah :

     a. Adanya tumpang tindih Kewenangan antara Kabupaten dengan Kecamatan.
     b. Belum Optimalnya Koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan Pemerintahan Kecamatan.

c. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

3. IKM Terhadap Pelayanan Pemerintah

Adapun untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Pagu dapat dilihat pada Tabel T-C. 30 dibawah ini :

Tabel : T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Solok Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan		v	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pelayanan Terpadu Kecamatan		v	%	50	100	100	100	70	95	100	100	
3	IKM Terhadap Pelayanan Pemerintah		v	%	87.5	90	92.5	95	87.5	90	92.5	95	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam era otonomi Daerah ini untuk mewujudkan Pemerintahan yang Good Governance dan Clean Governance diperlukan aparatur yang mempunyai integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian Kecamatan Sungai Pagu terus belajar dan meningkatkan SDM Aparaturnya dengan harapan kinerja Kecamatan Sungai Pagu dapat mendorong terwujudnya Kecamatan Sangir Balai Jango sebagai Instansi Pemerintahan yang memberikan Pelayanan Prima. Namun demikian yang perlu mendapat perhatian bersama adalah :

a. Belum jelasnya pembagian kewenangan Daerah dan Kecamatan dalam Palayanan Publik.
b. Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pembagian Kewenangan.
c. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN Kecamatan.
d. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana ASN.
e. Belum maksimalnya penerapan reward dan punishment bagi aparatur Pemerintahan.
f. Masih minimnya penerapan teknologi dalam pelayanan birokrasi pemerintahan.
g. Belum maksimalnya fungsi koordinasi antar OPD dan keterpaduan pelaksanaan Program dan Kegiatan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terkait dengan permasalahan dan hambatan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dihadapi Kecamatan Sungai Pagu yaitu :

a. Belum optimalnya pelayanan birokrasi Kecamatan.
b. Belum jelasnya pembagian kewenangan Daerah dan Kecamatan dalam palayanan publik.
c. Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pembagian kewenangan.
d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN Kecamatan.

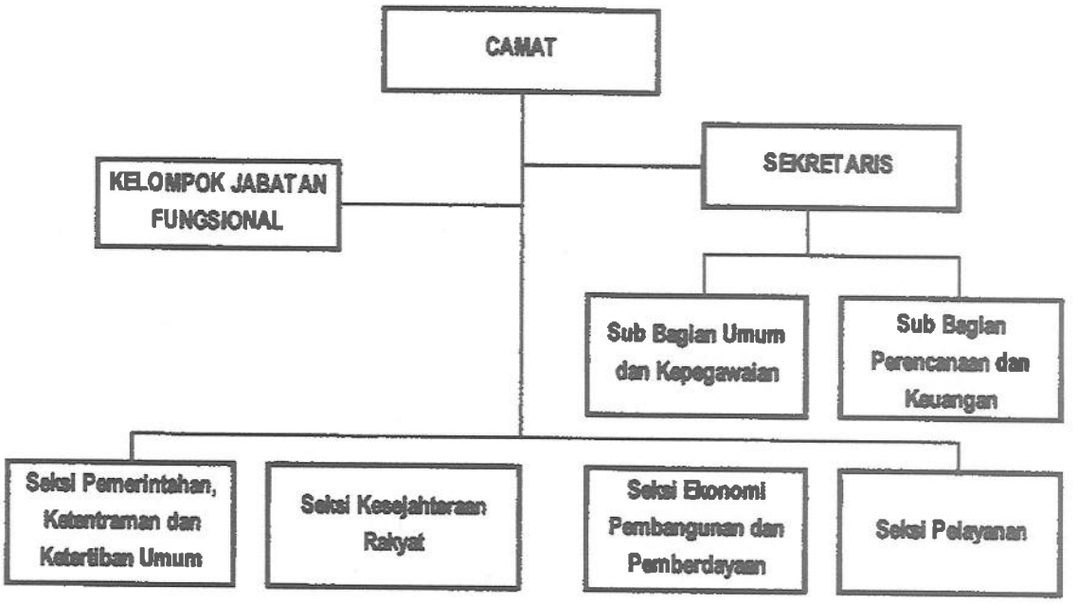
2.3.3 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana kerja Kecamatan Sungai Pagu. Dari analisis ini, jajaran Kantor Camat Sungai Pagu dapat mengidentifikasikan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Atas dasar itu, strategi pencapaian misi visi organisasi dapat diformulasikan. serta dapat diketahui faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi strategi dalam mencapai misi visi yang telah ditetapkan.

Analisis lingkungan dilakukan baik terhadap lingkungan internal maupun terhadap lingkungan eksternal.Analisis terhadap lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Sungai Pagu. Sementara itu, analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasikan peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Kecamatan Sungai Pagu. Secara singkat, hasil analisis lingkungan Kecamatan Sungai Pagu dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Kekuatan**
  - Terlakasananya koordinasi antar Perangkat Daerah dengan baik.
  - Adanya komitmen antara pihak terkait yang ada di Kecamatan
  - Tersedianya Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
  - Pembagian Tugas (job description)

    Pembagian Tugas dan struktur organisasi Kecamatan Sungai Pagu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016, dengan adanya pembagian tugas yang jelas, maka lebih memudahkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing seksi.



- **Kelemahan**
  1. Kurangnya tenaga trampil dibidangnya masing-masing, Belum dilaksanakannya prinsip *The right man in the ringt place*, dimana dalam menempatan seseorang pada suatu jabatan kurang memperhatikan latar belakang pendidikan yang dimiliki sehingga mengakibatkan kurang lancarnya pelaksanaan fungsi dan tugas.
  2. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk staf kecamatan. Masih kurangnya pemberian kesempatan untuk pelaksanaan pendidikan bagi staf kecamatan baik struktural maupun pendidikan teknis lainnya.
  3. Kurangnya sarana dan prasarana.
  4. Pada saat ini sarana dan prasarana yang ada belum memadai untuk mendukung tugas-tugas di kecamatan, terutama sarana dan prasarana dibidang teknologi informasi. Sementara informasi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan.
  5. Belum tersusunnya program kegiatan secara terinci dan belum optimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan.

- **Peluang**

  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pelimpahan wewenang pada daerah dilaksanakan secara utuh, bulat yaitu meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan, program dan kebijakan pemerintah, hal ini berarti memerlukan kemandirian, keleluasaan dan prakarsa kepada daerah dalam mengelola sumber daya adminsitrasi dengan memperhatikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  Misi pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang dapat memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, hal ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi dan terciptanya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

  Budaya yang berkembang dalam masyarakat yaitu budaya musyawarah dan mufakat yang telah berkembang, melalui musyawarah dan mufakat tersebut dapat di identifikasi permasalahan yang berkembang dimasyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- **Ancaman**

  a. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan diperlukan partisipasi aktif masyarakat, namun pada saat ini tingkat pengetahuan masyarakat belum memadai, masyarakat masih rentan dengan berbagai isu yang dapat mengancam pelaksanaan pembangunan.
  b. Terjadinya kemelut dibidang politik, keamanan, dan kepastian hukum, sewaktu-waktu dapat mengakibatkan pertentangan dan pertikaian yang mengarah kedisintegrasi bangsa.
  c. Restrukturisasi / Pergantian Pimpinan

2.3.4 Isu Strategis terkait perumusan program dan kegiatan

Berikut isu strategis terkait perumusan program dan kegiatan pada Kecamatan Sungai Pagu **"Peningkatan pelayanan public yang goog governance** (terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Reformasi birokrasi; Profesionalitas ASN; dan Indek Kepuasan Masyarakatan terhadap pelayanan pemerintahan)".

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian perbandingan rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu dengan hasil analisa kebutuhan, setelah anggaran disahkan terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD, data rincinya dapat dilihat pada tabel Tabel T-C.31 di bawah ini :

Tabel : T-C. 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Solok Selatan

Perangkat Daerah : Kecamatan Sungai Pagu

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KECAMATAN					3,572,485,585	**KECAMATAN**					3,667,583,096
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**%**	**100**	**3,184,485,585**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**%**	**100**	**3,302,583,096**
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**2,687,583,096**	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**2,792,583,096**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sungai Pagu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	25	2,632,583,096	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sungai Pagu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	25	2,732,583,096
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sungai Pagu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	55,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sungai Pagu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	60,000,000
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**131,000,000**	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**239,000,000**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sungai Pagu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	3,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sungai Pagu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	4,000,000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sungai Pagu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	15,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sungai Pagu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	17,500,000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sungai Pagu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	3,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sungai Pagu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	5	3,500,000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sungai Pagu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	10,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sungai Pagu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	12,000,000
	Subg Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sungai Pagu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	10,000,000	Subg Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sungai Pagu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	12,000,000
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sungai Pagu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	90,000,000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sungai Pagu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	190,000,000
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia**	**%**	**100**	**89,669,000**	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia**	**%**	**100**	**92,000,000**
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Sungai Pagu	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	10	20,000,000	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Sungai Pagu	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	12	22,000,000
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungai Pagu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	10	69,669,000	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungai Pagu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	12	70,000,000
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia**	**%**	**100**	**120,233,489**	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia**	**%**	**100**	**123,000,000**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sungai Pagu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sungai Pagu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	5,000,000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sungai Pagu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	15,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sungai Pagu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	17,000,000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sungai Pagu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	17,233,489	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sungai Pagu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	17,000,000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sungai Pagu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	84,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sungai Pagu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	84,000,000
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**%**	**100**	**156,000,000**	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**%**	**100**	**56,000,000**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sungai Pagu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit/ Tahun	7	56,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sungai Pagu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit/ Tahun	7	56,000,000
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sungai Pagu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit/ Tahun	1	100,000,000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sungai Pagu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi			

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Persentase Layanan PATEN**	**%**	**100**	**30,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Layanan PATEN**	**%**	**95**	**30,000,000**
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		**Persentase Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**%**	**100**	**30,000,000**	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Persentase Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**%**	**70**	**30,000,000**
Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sungai Pagu	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Laporan	8	30,000,000	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sungai Pagu	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Laporan	8	30,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan**	**Kali**	**6**	**50,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan**	**Kali**	**6**	**50,000,000**
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Jumlah koordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kali**	**3**	**50,000,000**	**Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kali**	**3**	**50,000,000**
Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sungai Pagu	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyaraket di wilayah kecamatan	Laporan	3	50,000,000	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sungai Pagu	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Laporan	3	50,000,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi**	**%**	**100**	**20,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi**	**%**	**100**	**20,000,000**
Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**20,000,000**	**Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**20,000,000**
Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sungai Pagu	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Laporan	4	20,000,000	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sungai Pagu	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Laporan	4	20,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan**	**%**	**100**	**253,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan**	**%**	**100**	**230,000,000**
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**%**	**100**	**253,000,000**	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**%**	**100**	**230,000,000**
Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Sungai Pagu	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Kali	2	70,000,000	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Sungai Pagu	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	Kali	2	70,000,000
Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Sungai Pagu	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama Ras dan golongan lainya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan Nasional	Kali	5	70,000,000	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Sungai Pagu	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama Ras dan golongan lainya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan Nasional	Kali	5	70,000,000
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sungai Pagu	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan	Dokumen	12	30,000,000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sungai Pagu	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan	Kali	4	90,000,000
		Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	2	10,000,000			Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	2	
		Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	2	11,000,000			Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	2	
		Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan	Kali	1	10,000,000			Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan	Kali	1	
		Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali	1	12,000,000			Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali	1	
		Jumlah kegiatan Car Fee Day yang dilaksanakan	Kali	45	40,000,000			Jumlah kegiatan Car Fee Day yang dilaksanakan	Kali	48	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	35,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	35,000,000
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Nagari	11	35,000,000	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Nagari	11	35,000,000
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sungai Pagu	Jumlah Dokumen yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	5,000,000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sungai Pagu	Jumlah Dokumen yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	5,000,000
	Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Sungai Pagu	Jumlah Dokumen I yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Dokumen	4	5,000,000	Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Sungai Pagu	Jumlah Dokumen yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	4	5,000,000
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Sungai Pagu	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	1	25,000,000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Sungai Pagu	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	1	25,000,000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/ Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan.

Untuk Tahun 2025 tidak terdapat usulan Program atau Kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Sungai Pagu, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel T-C. 32 dibawah ini :

Tabel : T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Solok Selatan

Perangkat Daerah : Kecamatan Sungai Pagu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	N	I	H	I	L

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk tingkat Kecamatan kebijakan nasional yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam penyelenggaraan pelayanan yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan selaku lembaga teknis daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola dengan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
b. Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
c. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
d. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
e. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.

Adapun Strategi yang akan dilaksanakan adalah mencakup Eksternal dan Internal, yaitu sebagai berikut :

1. Eksternal

a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

b. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
c. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
d. Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan.
e. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

2. Internal

a. Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai.
b. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
c. Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel
d. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di Kementerian PPN/Bappenas.
e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Layanan Paten yang diselenggarakan
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan tepat Waktu

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2025 Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, mengampu satu urusan yaitu urusan pemerintahan. Pada Urusan tersebut terdapat 6 program, 9 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 ada beberapa perbedaan dengan Analisa Kebutuhan dikarenakan masih menyesuaikan dengan usulan pada Renstra Tahun 2021-2026.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel T-C.33 berikut :

RUMUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
KECAMATAN SUNGAI PAGU
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		Pemeliharaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional dan Nasional 3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berisi Program/ Kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada BAB IV Table.T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026. Perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pada Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SUNGAI PAGU KAB. SOLOK SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SUNGAI PAGU						3.572.466.666,00							3.667.263.096,00	
	7	URUSAN KEWILAYAHAN						3.572.466.666,00							3.667.263.096,00	
	7.01	KECAMATAN						3.572.466.666,00							3.667.263.096,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.184.466.666,00						-	3.302.563.096,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.687.583.096,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	-	-	2 792.563.096,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2.632.583.096,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	-		2 732.563.096,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	-		80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah*	-			100 Persen	131.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-	-	236.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		4.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	15.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		17.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	3.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		3.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	10.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan sumber daya manusia yang kompeten	-		12.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	-		12.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	90.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	-		180.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia*	-			100 Persen 100 Persen	89.869.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	-	-	92.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Meal yang Disediakan				10 Unit	20.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	-		22.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				10 Unit	69.869.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		70.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	120.233.489,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-	-	123.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		17.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	17.233.439,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		17.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	84.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		84.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	156.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-	-	56.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	56.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		56.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		0,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
2.	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	*Persentase Layanan PATEN*	-			100 Persen	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan undefined*	-			100 Persen 100 Persen undefined undefined	30.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	30.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		30.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
3.	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	*jumlah kegiatan pemberdayaan*	-			4 kali	50.000.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa* *Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			6 kegiatan 3 Keli	50.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	50.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	*Cakupan Penegakan Perda Yang difasilitasi* *Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi*	-			100 persen 100 Persen	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum* *Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-			100 Persen 100 Persen	20.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	20.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan* ***Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan***	-			100 persen 100 Persen	253.000.000,00						-	230.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah yang difasilitasi* *Terfasilitasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah*	-			100 Persen 100 Persen	253 000 000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-	-	230.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				2 Orang	70 000 000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		70.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5 KALI Orang	70.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		70.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.06.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	113.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		90.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari* *persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*	-			100 persen 100 Persen	35.000.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Nagari yang difasilitasi dimonitoring dan dievaluasi* *Jumlah Nagari yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi*	-			11 nagari 11 Nagari	35.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-	-	35.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		25.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PAGU
	JUMLAH							3.572.486.963,00							3.697.583.096,00	

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Sungai Pagu sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Sungai Pagu untuk periode satu tahun yaitu Tahun 2025, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Sungai Pagu pada Tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Sungai Pagu, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Sungai Pagu diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras. Akhir kata, semoga Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Demikianlah Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan Perangkat Daerah.

Muara Labuh, Agustus 2024
Camat Sungai Pagu

IBRAHIM, SH, MM
NIP. 196910081992031001

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

Rencana Kerja ini dibuat sebagai pedoman kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan yang berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk mencapai program dan kegiatan tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik perlu menerapkan prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif. Selanjutnya keterpaduan dan sinkronisasi baik diantara kegiatan dalam suatu program maupun antar program perlu dilakukan secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan yaitu "TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK SELATAN YANG DEMOKRATIS, BERBUDAYA, DINAMIS, BERSATU, TENTRAM, AMAN DAN DAMAI BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945"

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan, ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Renja ini berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari yang diharapkan serta masih banyak kekurangan, maka kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif bagi penyempurnaan penyusunan ini.

Padang Aro, Juli 2024

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SOLOK SELATAN
KEPALA

ZULHENDRA WILSON.SE
NIP. 19771007 200604 1 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		.....	i
DAFTAR ISI		.....	ii
DAFTAR TABEL		.....	iv
BAB I	PENDAHULUAN	.....	1
1.1	Latar Belakang	.....	1
1.2	Landasan Hukum	.....	2
1.3	Maksud dan Tujuan	.....	3
1.4	Sistematika Penulisan	.....	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	.....	6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	.....	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	.....	21
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	.....	27
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	33
2.5	Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	.....	46
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	.....	47
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	.....	47
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	.....	52
3.3	Program dan Kegiatan	.....	54
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	.....	58
BAB V	PENUTUP	.....	68

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023 10

TABEL 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 26

TABEL 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2025 Kabupaten Solok Selatan 33

TABEL 2.4 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Solok Selatan 46

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Tahun 2025 53

TABEL 4.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Solok Selatan 59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Kerja Tahunan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daerah lainnya.

Rencana Kerja ini disusun dalam rangka mengevaluasi dan melengkapi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya atau kegiatan yang belum mencapai target dan mempertimbangkan kondisi terakhir tahun 2024 juga permasalahan dan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Proses penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada usulan kegiatan dari masing-masing seksi dan sub bagian secara formal yang diformulasikan melalui Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan untuk tahun 2026 nantinya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang nantinya juga akan mempedomani RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lain karena disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan segenap pemangku kepentingan *(stakeholder)* dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan, selanjutnya RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan dan Renstra Perangkat Daerah.

Sebagai komponen pemerintah daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan bangsa yang demokratis, dinamis, tentram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Renja Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 disusun dengan mengedepankan aspek prioritas terhadap program dan kegiatan yang menjadi urusan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan.

Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD yang dituangkan dalam dokumen RKA dan DPA Perangkat daerah nantinya, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan masyarakat Kabupaten Solok Selatan
13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah :

1. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik dalam kebijaksanaan umum maupun strategi.

2. Untuk mengetahui/mengevaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
3. Untuk menentukan tindakan/langkah yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan yang memuat Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan serta sebagai pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil dari pelaksnanaan yang dilakukan secara sistematis dan kesinambungan.

B. Tujuan

Adapun tujuannya adalah :

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
2. Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan perencanaan tahunan berikutnya.
3. Tercapainya indikator kinerja program dan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Berisi Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dari pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan telah melaksanakan 6 program yang didalamnya terdapat 10 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 14.404.798.156,00,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 14.127.771.570,- atau sebesar Rp 98,08%.

Untuk evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan, dapat dilihat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan (LKjIP) tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerja.

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat satu Program yang realisasi anggarannya dibawah 90% atau sebesar 45,37% yaitu pada sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yaitu pada pelaksanaan Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan , dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), akan tetapi realisasi fisik dari program ini dapat terlaksana sebesar 100%. Rendahnya realisasi anggaran pada program ini kareana tidak terealisasinya pembayaran Honorarium Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan , dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang direncanakan akan dibayarkan kepada ASN dari unsur Pemerintah Daerah .

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Adapun Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan pada Kantor Kesbangpol untuk TA 2023 adalah sebagai berikut :

1. Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang idiologi radikal dan isu separatisme di daerah telah terealisasi sebesar 100%
2. Persentase Parpol yang mendapat Pembinaan dapat direalisasikan sebesar 100%
3. Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku telah terealisasi sebesar 100%
4. Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat dapat direalisasikan sebesar 100%

Hal ini ditandai dengan terciptanya suasana yang kondusif di Kabupaten Solok Selatan, tidak ada konflik sosial karena selalu dilaksanakan tindakan pencegahan konflik melalui Forum- forum Srategis Kesbangpol TA 2023.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Untuk Tahun Anggaran 2023 tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan

Pada tahun 2023, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target indikator kinerja, Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Adanya koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan beberapa instansi dalam penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten sehingga pelaksanaan pencegahan konflik, dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Adanya peran dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam dalam menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG (Ancaman, Tantangan Hambatan dan Gangguan)
3. Telah terbentuknya tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan yaitu Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS), Tim Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan FORKOPIMDA. Forum-forum ini berperan penting dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.
4. Terjalinnya koordinasi intensif dengan Forkopimda Solok Selatan dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang sehingga dapat terwujud persamaan persepsi, visi dan misi serta dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan di daerah.

5. Terjalinnya koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.
6. Tersedianya daftar pemetaan potensi konflik yang disusun sebagai salah satu upaya meminimalisir meluasnya konflik yang dipicu oleh berbagai faktor.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul akibat tidak tercapainya target kinerja program /kegiatan terhadap target capaian program Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Apabila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

1.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi Faktor-faktor penyebab tersebut

Dalam upaya pencapaian sasaran target kinerja ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Dalam perencanaan besaran anggaran tahun berikutnya harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga penyerapan anggaran dapat tercapai.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan dan Pencapaian Renstra Tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 2.1,** sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023
Kabupaten Solok Selatan

Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d Tahun Berjalan (2024)	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Perkantoran**	**Persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**66.67**
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**66.67**
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	orang	78	26	13	13	100	12	51	65.38

8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72	24	12	12	100	12	48	66.67
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian	orang	3	-	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**66.67**
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Lisrik atau Penerangan Bangunan Gedung Kantor Yang Disediakan	Paket	24	8	4	4	100	4	16	66.67

8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	24	8	4	4	100	4	16	66.67
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	24	8	4	4	100	4	16	66.67
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	24	8	4	4	100	4	16	66.67
8.01.01.2.06.05	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	16	0	4	4	100	4	8	50.00
8.01.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Laporan	24	8	4	4	100	4	16	66.67
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**66.67**

8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit	1	0	0	0	0	0	0	0
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	unit	3	0	0	0	0	0	0	0
8.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	6	2	1	1	100	1	4	66.67
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	16	0	5	5	100	0	5	31.25
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia**	**Persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**66.67**
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	8	4	4	100	4	16	66.67

8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	72	24	12	12	100	12	48	66.67
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	24	8	4	4	100	4	16	66.67
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**66.67**
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	24	8	4	5	100	5	18	75.00

8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang idiologi radikal dan isu separatisme di daerah**	**Persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**66.67**
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Penyimpangan Ideologi Pancasila**	**Penyimpangan**	**0**	**-**	**0**	**0**	**100**	**0**	**66.67**	**66.67**
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	255	500	350	350	100	500	1,350	529.41

8.01.03.2	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Parpol yang mendapat Pembinaan**	**Persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**66.67**
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya politik yang demokratis**	**Persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100.00**	**100.00**	**66.67**
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Jumlah Partai Politik yang mendapat Bantuan Keuangan Partai Politik	parpol	60	20	10	10	100	10	40	66.67

	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dari APBD Kabupaten Solok Selatan									
		Jumlah Peserta Bimtek	Orang	240	80	40	40	100	20	140	58.33
		Jumlah Peserta Sosialisasi dan Promosi Persiapan PEMILU dan PILKADA 2024	Orang	700	0	600	600	100	600	1,200	171.43
		Jumlah TPS yang dipantau	TPS	550	-		-	-	590	590	107.27
		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi PEMILU dan PILKADA 2024	Kali	20	-	10	10	100	20	30	150.00
		Jumlah Lembaga yang diberikan dana Hibah Pemilu / PILKADA	Lembaga	6	-	2	2	100	4	6	100.00
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persetase Ormas yang diawasi**	**Persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**66.67**

8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku**	**Persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**66.67**
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang dimonitoring	ormas	120	40	20	20	100	20	80	66.67
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Kasus Narkoba yang tertangani**	%	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**66.67**
8.01.05.2.01	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**	**Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat**	%	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**66.67**

8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi P4GN	orang	140	0	0	0	0	0	-	-
		Jumlah Rapat Tim P4GN dalam 1 Tahun	kali	12	4	2	2	100	2	8	66.67
		Jumlah Rapat GNRM	kali	0	0	0	0	0	0	-	-
		Jumlah Rapat FPK	kali	0	0	0	0	0	0	-	-
		Jumlah Rapat FKUB dalam 1 Tahun	kali	12	4	2	2	100	2	8	66.67
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Penanganan Konflik Sosial**	**Persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100.00**	**66.67**	**66.67**
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase pencegahan konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat**	**Persen**	**100**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**66.67**	**66.67**
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,	Jumlah Peserta Sosialisasi	orang	50	2000	1500	1500	100	3,000	6,500	13,000

	Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	kali	12	4	2	2	100	2	8	66.67
		Jumlah Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD)	kali	12	4	2	2	100	2	8	66.67
		Pemantauan Orang Asing	kali	6	2	1	1	100	1	4	66.67
		Jumlah Rapat Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS)	kali	12	4	2	2	100	2	8	66.67
		Jumlah Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	kali	72	24	12	12	100	48	84	116.67

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berpedoman kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan tidak termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib dan pilihan) tetapi melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur di dalam pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Adapun urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut meliputi:

a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;

d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
g) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan. Dijelaskan bahwa Kantor Kesatuan Bangsa, Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Kantor Kesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasar peraturan perundang-undangan;
2) Pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
3) Pengkoordinasian penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik;
4) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kantor;

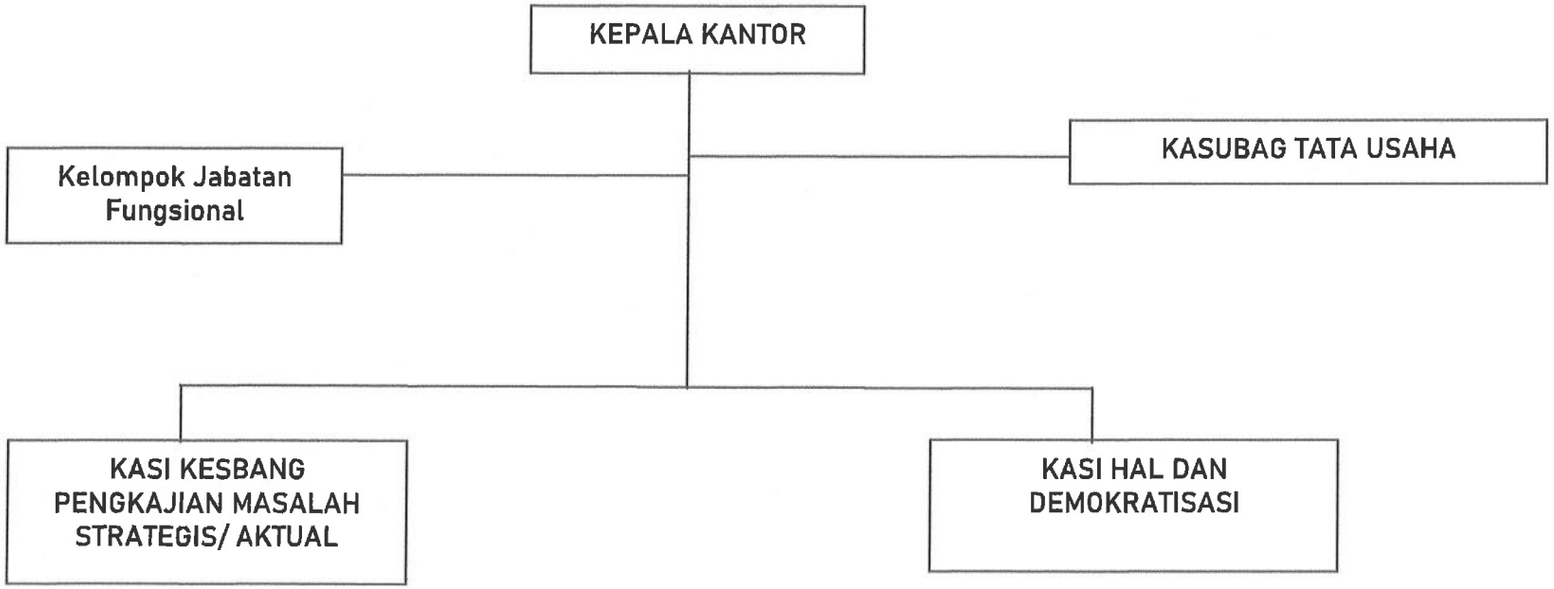
5) Penyelenggaraan tugas kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
6) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Kantor;
8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana diatur Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 38 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:

a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Kesatuan Bangsa, Pengkajian Masalah Strategis dan Aktual;
d. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi ;
e. Seksi Perlindungan Masyarakat
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 18 Tahun Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Terhitung tanggal 01 Januari 2017 Seksi Linmas pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan digabungkan ke Dinas SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan



Berdasarkan tugas dan pokok dan fungsi di atas, untuk mengukur kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat 2 (dua) indikator kinerja kunci (IKK) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Tingkat capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan sasaran/target dan indikator kinerja pada periode sebelumnya dapat dijelaskan pada **tabel 2.2** dibawah ini :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Nama Perangkat Daerah : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah konflik sosial, politik, dan penyimpangan ideologi pancasila		√	0	0	0	0	0	0	0	0	Pada Umumnya seluruh potensi konflik di Kabupaten Solok Selatan dapat diredam sehingga tidak ada potensi konflik di Kabupaten Solok Selatan yang berdampak pada Konflik Sosial, Politik, dan Penyimpangan Ideologi Pancasila
2	Persentase partisipasi pemilih dalam PEMILU,PILPRES dan PILKADA		√	—	85%	-	—	—	40%	-	—	- Jadwal PEMILU, PILRES Pada Tanggal 14 Februari 2024 - Jadwal PILKADA Pada Tanggal 27 November 2024 - Tidak ada Target untuk Tahun 2025

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a) Tingkat kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat daerah

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan fondasi bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Namun secara objektif, karakteristik daerah yang dibangun diatas kemajemukan, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan kewilayahan, yang dapat mengarah pada konflik sosial berdimensi vertikal dan horizontal. Kondisi kemajemukan masyarakat secara umum rawan akan konflik, ditambah dengan kebijakan publik yang belum memuaskan serta kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan.

Pelaksanaan pembangunan yang terpusat dan tidak merata ternyata telah menjadi pemicu konflik sosial. Menguatnya gejala disintegrasi bangsa seperti yang terjadi di provinsi atau di Kabupaten atau di Kabupaten/ Kota lain bisa saja terjadi di Kabupaten Solok Selatan yang selama ini cukup terpelihara dengan baik.

Pembangunan nasional di daerah sejauh ini masih memerlukan perhatian serius, karena permasalahan pembangunan itu sendiri mengalami perkembangan sejalan dengan berkembangnya kemajuan iptek, sehingga tuntutan terhadap kemajuan pembangunan selalu saja menimbulkan permasalahan seiring dengan perkembangan kemajuan tersebut. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang diharapkan akan dapat saling menopang guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sementara itu, pengaruh globalisasi yang antara lain terwujud dalam arus informasi yang begitu deras yang membawa masyarakat ke arah keterbukaan, disamping berdampak positif bagi kemajuan bangsa juga berdampak positif terhadap ketahanan bangsa.Salah satu dampak dari

bergulirnya reformasi adalah perubahan secara mendasar dalam pembangunan sistem politik nasional. Perubahan tersebut adalah perlunya menegakkan kedaulatan rakyat, serta perlunya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Pembangunan di bidang politik difokuskan untuk meningkatkan dan mengembangkan budaya politik yang demokratis dan penegakan hukum serta menghormati HAM berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Akhir-akhir ini pengembangan sistem politik yang demokratis telah berjalan sedemikian rupa baik pada level pemerintahan maupun pada level masyarakat luas. Ini ditandai dengan lahirnya banyak partai politik yang disatu sisi menaruh harapan optimis bagi masyarakat untuk bersaing secara demokratis dan dinamis dalam membentuk pemerintahan yang legitimate. Namun, pemerintahan yang terbentuk pun dinilai masyarakat belum mampu mengatasi masalah-masalah bangsa, sehingga muncul pergeseran sikap yang semakin menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

Semakin bertambah banyaknya ORMAS juga merupakan pemusatan kekuatan dalam berbagai kegiatan bermasyarakat. Untuk itu perlu dikembangkan komunikasi timbal balik di antara sesama ORMAS maupun antara ORMAS dengan pemerintah, sehingga program dan kegiatan ORMAS bisa disejalankan dengan program pemerintah dan selanjutnya ORMAS bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya.

Timbulnya anarkhisme ditengah-tengah masyarakat yang disebabkan berbagai persoalan, baik masalah pemerataan ekonomi, keributan dan sengketa lahan perkebunan antara Perusahaan dan masyarakat, dan Perkelahian antar Nagari

Sebagai komponen pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berperan di bidang pembinaan kesatuan bangsa yang juga memfasilitasi pengembangan sistem politik yang demokratis serta meningkatkan perlindungan masyarakat di daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kab. Solok Selatan dewasa ini dihadapkan pada tantangan tugas yang tidak ringan. Selain situasi dan kondisi yang telah diidentifikasi tersebut diatas, juga terdapat beberapa situasi dan kondisi khusus yang kurang kondusif terkait dengan tupoksi Kantor Kesbangpol.

Kondisi ini pada dasarnya terdiri dari sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat pelaksanaan tupoksi. Namun demikian, tedapat juga sejumlah momentum strategis yang dimiliki oleh Kantor Kesbangpol dimana terdapat sejumlah faktor positif didalamnya yang diidentifikasi sebagai kekuatan yang signifikan mampu mendorong peningkatan kinerja.

b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

(a) Kondisi politik :

- Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam berdemokrasi.
- Belum maksimalnya infra struktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi.
- Adanya fenomena disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Masih eksisnya prilaku politik yang tidak responsif terhadap agenda reformasi.
- Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma dan etika yang menunjukkan prilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi

(b) Kondisi Sosial :

- Belum mantapnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat.
- Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- ❖ Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh globalisasi.
- ❖ Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

(c) Kondisi Ekonomi :

- ❖ Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
- ❖ Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalian sumber pendapatan asli daerah.
- ❖ Masih signifikannya kesenjangan pendapat antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
- ❖ Belum terkelolanya aset daerah dengan baik.
- ❖ Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.

(d) Kondisi Keamanan dan Ketentraman :

- ❖ Masih terdapatnya konflik sosial dan politik serta aksi unjuk rasa yang menjurus anarkis dan berdampak mengganggu ketentraman dan keamanan.
- ❖ Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- ❖ Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap budaya luar.

c) Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Kinerja

(a) Kondisi Politik :

- ❖ Makin terbukanya komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik.
- ❖ Makin berperannya kelembagaan legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
- ❖ Berkembangnya ORMAS sebagai aset pembangunan daerah.

- ❖ Makin meningkatnya kepedulian ORMAS dalam pemberdayaan masyarakat.
- ❖ Berkembangnya partisipasi politik masyarakat.

(b) Kondisi Sosial Budaya :

- ❖ Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai aset budaya nasional.
- ❖ Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat NKRI.
- ❖ Makin mantapnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis dan berdaya tahan terhadap pengaruh budaya asing sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Sumatera Barat "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
- ❖ Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap laten ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- ❖ Makin meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan di tengah kehidupan bermasyarakat.
- ❖ Berkembangnya perguruan tinggi sebagai sumber penyerapan IPTEK.

(c) Kondisi Ekonomi :

- ❖ Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
- ❖ Masih potensialnya kekayaan sumber daya alam dan objek wisata sumber kekuatan perekonomian daerah.
- ❖ Terbukanya kesempatan masyarakat untuk melakukan inovasi teknologi.

(d) Kondisi Keamanan/Ketentraman :

- ❖ Terkoordinasinya penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat.

- Berperannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu konflik dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat.
- Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan.
- Terakomodasinya potensi satuan linmas dalam pembangunan demokrasi dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Nama Perangkat Daerah : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Cakupan Layanan Operasional Perkantoran**	**100 %**	**1,200,000,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Cakupan Layanan Operasional Perkantoran**	**100 %**	**1,943,658,458**	**–**
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**870,292,599**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**1,500.789.490**	**–**
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7 orang/ bulan	783,172,599	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KABUPATEN SOLOK SELATAN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang /bulan	1,427,109,490	Penambahan Jumlah Pegawai dan Kenaikan Gaji PNS

B	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	dokumen	87,120,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KABUPATEN SOLOK SELATAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	dokumen	73.680.000	Perubahan Besaran Honorarium sesuai SAB
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**231,107,401**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**253,423,868**	**–**
A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Lisrik atau Penerangan Bangunan Gedung Kantor Yang Disediakan	4	paket	1,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Lisrik atau Penerangan Bangunan Gedung Kantor Yang Disediakan	4	paket	2.002.100	Kenaikan Harga Barang
B	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	paket	35,663,401	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	paket	39.981.600	Kenaikan Harga Barang
C	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	paket	2,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	paket	3.629.700	Kenaikan Harga Barang

D	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	paket	15,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	paket	11.958.468	-
E	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	laporan	6,544,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	laporan	8.250.000	Kenaikan Aktifitas Jumlah Tamu
F	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	4	laporan	170,900,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	4	laporan	187.602.000	
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia**	**100**	**%**	**30,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia**	**100**	**%**	**30,000,000**	–
D	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	unit	30,000,000	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	unit	30,000,000	Biaya Sewa Gedung Kantor
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia**	**100**	**%**	**23,600,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia**	**100**	**%**	**94,440,000**	–

A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	3,000,000	Sesuai Pagu Anggaran yang diberikan
B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	Laporan	17,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	Laporan	3,600,000	Estimasi berdasarkan realisasi tahun lalu
C	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Laporan	3,600,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Laporan	3,840,000	Penambahan Anggaran Sewa Karangan Bunga
D	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	Laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	4	84,000,000	Alokasi Gaji TKD
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100**	**%**	**45,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100**	**%**	**65,005,100**	**–**

A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Kendaraan Perorangan atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	unit	45,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Kendaraan Perorangan atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 unit	65,005,100	Penggantian Kendaraan Dinas Pimpinan dari Avanza ke Innova
II	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang idiologi radikal dan isu saparatisme di daerah**	**100**	**%**	**40,000,000**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Jumlah Penyimpangan Ideologi Pancasila**	**100 %**	**714.950.000**	**—**
1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Jumlah Penyimpangan Ideologi Pancasila**	**0**	**Penyimpangan**	**40,000,000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang idiologi radikal dan isu saparatisme di daerah**	**0 Penyimpangan**	**714.950.000**	**—**

A	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	35	orang	40,000,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300	orang	75.000.000	Penambahan Peserta Sosialisasi Wawasam Kebangsaan
B	Pembentukan Paskibraka	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	35	orang		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300	orang	639.950.000	Optimalisasi Kegiatan Paskibra

III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	KAB. SOLOK SELATAN	Persentase Parpol yang mendapat Pembinaan	100	%	1,100,000,000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	KAB. SOLOK SELATAN	Persentase Parpol yang mendapat Pembinaan	100 %	1,035.582.976	–
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	KAB. SOLOK SELATAN	Persentase Pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya politik yang demokratis	100	%	1,100,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	KAB. SOLOK SELATAN	Persentase Pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya politik yang demokratis	100 %	1,035.582.976	–

A	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40	Orang	1,100,000,000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40	Orang	1,035.582.976	Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase Ormas yang diawasi**	**100**	**%**	**50,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase Ormas yang diawasi**	**100**	**%**	**50,000,000**	–

1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase pencegahan terhadap aktivitas Ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku**	**100 %**	**50,000,000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase pencegahan terhadap aktivitas Ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku**	**100 %**	**9.870.000**	**–**
A	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 Orang	50,000,000	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 Orang	9.870.000	–
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase kasus Narkoba yang ditangani**	**100 %**	**50,000,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase kasus Narkoba yang ditangani**	**100 %**	**73,050,000**	–

A	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat**	**100 %**	**50,000,000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat**	**100 %**	**73,050,000**	—
A	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan didaerah	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan didaerah	100 orang	50,000,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan didaerah	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan didaerah	100 orang	73,050,000	Optimalisasi P4GN

	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase Penanganan Konflik Sosial**	**100 %**	**120,000,000**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase Penanganan Konflik Sosial**	**100 %**	**539.396.000**	–
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase Pencegahan Konflik Sosial yang berkembang di tengah masyarakat**	**100 %**	**120,000,000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**KAB. SOLOK SELATAN**	**Persentase Pencegahan Konflik Sosial yang berkembang di tengah masyarakat**	**100 %**	**539.396,000**	–
	Pelaksanaan koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	50 orang	120,000,000	Pelaksanaan koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	KAB. SOLOK SELATAN	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	5000 orang	539.396,000	Optimalisasi Peran FORKOPIMDA dengan Bersinergi Ke Nagari dan Sekolah
TOTAL					**2,810,000,000**	**TOTAL**				**4.316.507.434**	

Adapun perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan Hasil analisis kebutuhan pada tabel 2.2 diatas disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dibutuhkan penambahan anggaran karena ada Penambahan Jumlah Pegawai dan Kenaikan Gaji PNS
2. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN anggarannya disesuaikan karena adanya Perubahan Besaran Honorarium sesuai Standar Akuntansi Biaya
3. Perbedaan Anggaan pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga karena estimasi kenaikan harga barang
4. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu disebakan oleh Kenaikan Aktifitas Jumlah Tamu
5. Pengadaan Sub Kegiatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dibutuhkan untuk Biaya Sewa Gedung Kantor dikarenakan Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan belum memiliki bangunan gedung kantor sendiri
6. Penyesuaian Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Estimasi berdasarkan realisasi tahun lalu
7. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor karena adanya Penambahan Anggaran Sewa Karangan Bunga
8. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor kerena Alokasi Gaji TKD
9. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan karena Penggantian Kendaraan Dinas Pimpinan dari mobil Avanza ke mobil Innova

10. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Penambahan Peserta Sosialiisasi Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, dan Karakter Bangsa karean adanya Penambahan Peserta Sosialisasi Wawasam Kebangsaan
11. Pada Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka untuk Optimalisasi Kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten Solok Selatan
12. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Karean adanya penanmbaha Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024 - 2029
13. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah menyesuaikan dengan urutan Program Prioritas Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan
14. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan didaerah dalam rangka Optimalisasi Peran Tim Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan , dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

15. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah dalam rangka Optimalisasi Peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam perjalanan proses penyusunan RKPD nantinya akan dilakukan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan dari setiap Perangkat Daerah yang menyangkut kepada kegiatan masyarakat.

Selanjutnya untuk usulan Program / Kegiatan usulan pemangku kepentingan Kantor Kesbangpol tidak memiliki usulan pemangku kepentingan / NIHIL.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat seperti pada terlihat pada tabel terlampir.

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Nama Perangkat Daerah : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan terhadap RPJMN Tahun 2025-2029

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2025-2045, periode pembangunan 2025-2029 merupakan tahap pertama RPJPN 2025-2045 dimana tahap ini merupakan penguatan fondasi transformasi yang terdiri dari transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Visi Abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai *"**Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**."* Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 8 misi yaitu : *1). Transformasi Sosial. 2). Transformasi Ekonomi. 3). Transformasi Tata Kelola. 4). Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia 5). Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi 6). Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan. 7). Mewujudkan Sarana dan Pra Sarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan. 8). Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.*

Adapun yang menjadi agenda pembangunan dalam kurun waktu 2025-2029 dalam rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 adalah :

1. Transformasi Tata Kelola
2. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
3. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Dari 3 (tiga) agenda pembangunan RPJMN 2025-2029, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan sangat berperan dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian ketiga agenda tersebut.

Dalam mewujudkan agenda pembangunan transformasi tata kelola, terdapat beberapa proyek pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol diantaranya (1) Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi politik untuk kader partai politik , (2) pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi politik untuk komunitas/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan, (3) Pelatihan tata kelola bantuan keuangan partai politik (4) Penyusunan laporan verifikasi kelengkapan administrasi dan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik, (5) Publikasi laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik dan Publikasi laporan keuangan partai politik.

Selanjutnya, dalam mewujudkan agenda pembangunan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, Kantor Kesbangpol berperan dalam menfasilitasi pembinaan kerukunan antar dan intra suku, umat beragama, penghayat kepercayaan, ras, serta golongan. Adapun peran Kesbangpol dalam mewujudkan agenda pembangunan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi adalah melaksankan pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara.

Untuk mendukung agenda pembangunan tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan telah menyusun program diantaranya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial, Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas

3.1.2 Arah Kebijakan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan Visi Pembangunan serta 3 (tiga) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029, disusun arah kebijakan dan strategi untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum), diantaranya:

1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.
2) Peningkatan kapasitas partai politik.
3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.
5) Penghayatan, pengamalan, pembumian nilai-nilai ideologi pancasila.
6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa.
7) Fasilitasi penanganan konflik sosial.
8) Pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah.
9) Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyusun 1 program yaitu Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum dengan sasaran program yaitu :

1) Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi, dengan indikator kinerja program :
   a) Indeks Demokrasi Indonesia
   b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu
   c) Indeks Kinerja Ormas

2) Simpul Strategis Pembumian Pancasila Berjalan Optimal, dengan indikator kinerja program :
   a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
   b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
   c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonom
   d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
3) Aparatur Pusat dan Daerah, Timdu Penanganan Konflik Sosial yang Mampu Melaksanakan secara Optimal Deteksi Dini dan Cegah Dini Serta Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing, dengan indikator kinerja program :
   a) Persentase Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah secara efektif
   b) Jumlah aparatur pusat dan daerah yang mampu melaksanakan deteksi dini dan cegah dini

Program ini dijabarkan dalam 6 kegiatan yaitu :

a. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
b. Fasilitasi Politik Dalam Negeri
c. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
d. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
e. Bina Idiologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Polpum

3.1.3 Telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025 (tahap keempat). Adapun visi jangka menengah daerah dari kepala daerah terpilih adalah : ***"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan."***.

Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengatahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS-SBK
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekoomi digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, serta berkualitas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat salah satu lembaga Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bertanggung jawab dalam pelaksanaan misi kedua yaitu **"Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS-SBK"**

Untuk mendukung misi 2 tersebut, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK. Dengan pelaksanaan prinsip-prinsip revolusi mental, pengamalan ajaran agama yang baik dan penerapan adat dan budaya Minangkabau yang intensif di tengah kehidupan masyarakat, diharapkan akan dicapai :

1. Masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya serta punya etos kerja yang tinggi dan produktif
2. Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran dan cinta damai

3. Pengamalan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi
4. Penurunan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat
5. Pewarisan nilai-nilai kearifan adat Minangkabau
6. Optimalisasi peran lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga adat
7. Penurunan perbuatan maksiat.

Kondisi di atas merupakan isu-isu strategis yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Provinsi Sumatera Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Renstra Kantor Kesbangpol Tahun 2021-2026 yang memuat program dan kegiatan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola organisasi
2. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
3. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan kewenangan Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan maka tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya untuk mencegah timbulnya disintegrasi bangsa dan meningkatnya perlindungan masyarakat yang merupakan potensi untuk tetap utuhnya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pencapaian tujuan umum program dan kegiatan pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi serta berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tersebut tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan.

Dengan demikian interaksi pelaksanaan tugas pemerintah Kabupaten Daerah sangat menentukan pencapaian tujuan, secara lebih khusus sesuai dengan kewenangan yang ada di Kabupaten Solok Selatan maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang melayani

Sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan merupakan jabaran dari tujuan dengan indikator sasaran untuk diwujudkan pada kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan

Sasaran yang hendak dicapai oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan adalah :

1. ***Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat di Kabupaten Solok Selatan***
2. ***Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Demokratisasi***

Untuk uraian lebih lengkap mengenai tujuan, sasaran, indikator tahun 2025 dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat di Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Konflik Sosial, Politik, dan Penyimpangan Ideologi
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Demokratisasi	Persentase Partisipasi Pemilih dalam PILEG, PILPRES dan PILKADA

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi, misi dan tujuan pelayanan Perangkat Daerah.

Elemen-elemen utama program berisikan indikasi kegiatan, indikasi pendanaan dan sumbernya, dirinci menurut lokalitas Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan kewilayahan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka disusunlah rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai wujud untuk menentukan tindakan prioritas. Program adalah rangkaian kegiatan utama yang dipaket berdasarkan kebijakan yang telah diputuskan dan dipilih yang dilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

- Belum maksimalnya infra struktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi.
- Masih eksisnya prilaku politik yang tidak responsif terhadap agenda reformasi.
- Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma dan etika yang menunjukkan prilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi.
- Adanya fenomena disintegrasi bangsa.

- ❖ Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
- ❖ Masih terdapatnya konflik sosial dan politik serta aksi unjuk rasa yang menjurus anarkis dan berdampak mengganggu ketentraman dan keamanan.
- ❖ Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap budaya luar.

Terdapat beberapa program prioritas daerah yang merupakan program unggulan Bupati/Wakil Bupati dalam pencapaian misi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani, Hal ini diwujudkan dengan melaksanakan sejumlah program urusan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik yang terdiri dari :

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
8.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**
8.01.02.2.03	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**
8.01.02.2.02	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 6 program
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 adalah sebanyak 9 kegiatan dengan 19 sub kegiatan
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan Renja Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 secara total sebesar Rp **4,316, 507,434**,- (**Empat Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan tertuang dalam Tabel 4.1, Sebagai berikut :

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Nama Perangkat Daerah : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Perkantoran**	**Kab. Solok Selatan**	**100**	**%**	**1,943,658,458**	**Dana Perimbangan**		**100**	**%**	**2,056,500,000**
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Solok Selatan**	**100**	**%**	**1,500,789,490**	**Dana Perimbangan**		**100**	**%**	**1,570,000,000**
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Solok Selatan	13	Orang / bulan	1,427,109,490	Dana Perimbangan	Penambahan Jumlah Pegawai dan Kenaikan Gaji PNS	13	Orang / bulan	1,450,000,000
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Solok Selatan	4	dokumen	73,680,000	Dana Perimbangan	Perubahan Besaran Honorarium sesuai SAB	4	dokumen	120,000,000

8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Solok Selatan**	**100**	**%**	**253,423,868**	**Dana Perimbangan**	**–**	**100**	**%**	**297,500,000**
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Lisrik atau Penerangan Bangunan Gedung Kantor Yang Disediakan	Kab. Solok Selatan	4	paket	2,002,100	Dana Perimbangan	Kenaikan Harga Barang	4	paket	2,000,000
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Solok Selatan	4	paket	39,981,600	Dana Perimbangan	Kenaikan Harga Barang	4	paket	45,000,000
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Solok Selatan	4	paket	3,629,700	Dana Perimbangan	Kenaikan Harga Barang	4	paket	3,500,000
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Solok Selatan	4	paket	11,958,468	Dana Perimbangan	-	4	paket	10,000,000
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Solok Selatan	4	laporan	8,250,000	Dana Perimbangan	Kenaikan Aktifitas Jumlah Tamu	4	laporan	225,000,000
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Kab. Solok Selatan	4	laporan	187,602,000	Dana Perimbangan		4	laporan	150,900,000
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia**	**Kab. Solok Selatan**	**100**	**%**	**30,000,000**	**Dana Perimbangan**	–	**100**	**%**	**30,000,000**

8.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Solok Selatan	1	unit	30,000,000	Dana Perimbangan	Biaya Sewa Gedung Kantor	1	unit	30,000,000
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia**	**Kab. Solok Selatan**	**100**	**%**	**94,440,000**	**Dana Perimbangan**	—	**100**	**%**	**89,000,000**
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Solok Selatan	4	Laporan	3,000,000	Dana Perimbangan	Sesuai Pagu Anggaran yang diberikan	4	Laporan	3,500,000
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Solok Selatan	4	Laporan	3,600,000	Dana Perimbangan	Estimasi berdasarkan realisasi tahun lalu	4	Laporan	5,500,000
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Solok Selatan	4	Laporan	3,840,000	Dana Perimbangan	Penambahan Anggaran Sewa Karangan Bunga	4	Laporan	5,000,000
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Solok Selatan	Laporan	4	84,000,000	Dana Perimbangan	Alokasi Gaji TKD	-	-	75,000,000
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara**	**Kab. Solok Selatan**	**100**	**%**	**65,000,100**	**Dana Perimbangan**	—	**100**	**%**	**70,000,000**
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Solok Selatan	5	unit	65,000,100	Dana Perimbangan	Penggantian Kendaraan Dinas Pimpinan dari Avanza ke Innova	4	unit	70,000,000

8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Jumlah Penyimpangan Ideologi Pancasila**	**Kab. Solok Selatan**	**0**	**Kasus**	**714,950,000**	**Dana Perimbangan**	**–**	**0**	**%**	**950,000,000**
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang idiologi radikal dan isu saparatisme di daerah**	**Kab. Solok Selatan**	**100**	**%**	**714,950,000**	**Dana Perimbangan**	**–**	**100**	**%**	**950,000,000**
8.01.02.2.1.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyimpangan Ideologi Pancasila	Kab. Solok Selatan	1	Kali	75,000,000	Dana Perimbangan	Penambahan Anggaran untuk Kegiatan Paskibra	300	orang	150,000,000
8.01.02.2.1.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Anggota Paskibraka	Kab. Solok Selatan	75	Orang	639.950.000	Dana Perimbangan	Penambahan Anggaran untuk Kegiatan Paskibra	300	orang	800,000,000
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Parpol yang mendapat Pembinaan**	**Kab. Solok Selatan**	**100**	**%**	**1,035,582,976**	**Dana Perimbangan**	**–**	**100**	**%**	**1,050,000,000**

8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase Pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya politik yang demokratis**	**Kab. Solok Selatan**	**100**	**%**	**1,035,582,976**	**Dana Perimbangan**	**–**	**100**	**%**	**1,050,000,000**
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Solok Selatan	40	Orang	1,035,582,976	Dana Perimbangan	Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik	40	Orang	1,050,000,000
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Ormas yang diawasi**	**Kab. Solok Selatan**	**100**	**%**	**9,870,000**	**Dana Perimbangan**	**–**	**100**	**%**	**50,000,000**

8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase pencegahan terhadap aktivitas Ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku**	**Kab. Solok Selatan**	**100**	**%**	**9,870,000**	**Dana Perimbangan**	**–**	**100**	**%**	**50,000,000**
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Solok Selatan	20	Orang	9,870,000	Dana Perimbangan	–	70	Orang	50,000,000
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase kasus Narkoba yang ditangani**	**Kab. Solok Selatan**	**100**	**%**	**73,050,000**	**Dana Perimbangan**	**–**	**100**	**%**	**120,000,000**
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat**	**Kab. Solok Selatan**	**100**	**%**	**73,050,000**	**Dana Perimbangan**	**–**	**100**	**%**	**120,000,000**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perumusan program dan kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Selain itu juga disinkronkan dalam menunjang visi dan misi Kepala Daerah untuk Tahun 2025 dengan Program dan Kegiatan yang mengakomodir Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

Harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional. Melalui dokumen ini SatpolPP dan Damkar mencoba merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berazaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Padang Aro, Juli 2024
KEPALA SATPOLPP dan DAMKAR
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOVRIZON, S.Pd, M.Si
NIP. 19671109 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 15

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 19

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyrakat..... 23

BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH 25

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 25

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 25

3.3 Program dan Kegiatan 26

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 32

BAB V PENUTUP 39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 - 2026. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Renstra ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

a. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun;

b. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.

Terkait dengan amanat tersebut, penyusunan renja SatpolPP dan Damkar Tahun 2025 cukup disesuaikan dengan arahan RPJP Nasional, RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 dan Renstra 2021-2026, dan acuan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 serta inventarisasi kebutuhan riil pembangunan melalui

musrenbang, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; substansi RKPD merupakan acuan bagi SatpolPP dan Damkar dalam menyusun Renja disamping Renstra.

Renja SatpolPP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke tiga periode perencanaan pembangunan Tahun 2021-2026 berdasarkan Perda Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu stategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Renja, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar. Penyusunan dokumen Renja juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah kabupaten / kota merupakan bagian daerah provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Untuk itu, perlu dirancang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas di tambah kebutuhan dan masukan-masukan dari berbagai pihak.

Proses penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didasarkan pada usulan kegiatan dari masing-masing bidang secara formal yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.25 Tahun 2004. Dan untuk tahun 2025 nantinya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang nantinya juga akan mempedomani RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.

Rencana kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lain karena disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Selanjutnya RPJM Daerah menjadi pedoman penyusunan RKPD tahunan dan Renstra.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja SatpolPP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 88 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja SatpolPP dan Damkar tahun 2025 ini ***dimaksudkan*** sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sedangkan ***tujuan*** dari Rencana Kerja SatpolPP dan Damkar tahun 2025 adalah sebagai berikut : **Maksud** dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan ini adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Solok Selatan pada setiap tahun anggaran;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efesien, dan berkelanjutan;
4. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
5. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan pada setiap tahun anggaran selama 1 (satu) tahun.

Tujuan

1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan untuk Tahun 2025

2. Terciptanya Keamanan dan Ketentraman Masyarakat;

3. Sebagai media informasi dalam memberikan arah yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan;

4. Untuk Menentukan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada Tahun 2025;

5. Agar tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan lanjutan penjabaran visi – misi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja ini kami susun dengan sitematika sebagai berikut :

BAB I **PENDAHULUAN**

bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan capaian Renstra SatpolPP dan Damkar, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

memuat tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Dearah, serta program dan kegiatan.

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

BAB V **PENUTUP**

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pelaksanaan evaluasi dilakukan sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan. Sesuai target kinerja dalam Renja SatpolPP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan tahun 2023, Renstra SatpolPP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 maka evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, dan;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan Perkiraan capaian tahun 2024, mengacu kepada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada saat penyusunan Renja Perangkat Daerah telah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Derah dalam melaksanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung untuk belanja gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Langsung terdiri dari 3 Program dan 8 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar *Rp.8.120.826.059,-* dan terealisasi sebesar *Rp. 7.949.562.097,-* atau (97,89%). Sedangkan secara fisik mencapai 100%.

Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan menyadari bahwa masih ada kelemahan/ kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dicapai dan akan dilaksanakan.

Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan menyadari bahwa masih ada kelemahan/ kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dicapai dan akan dilaksanakan.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini tidak ada realisasi program/kegiatan Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2023.
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Perangkat Daerah pada tahun 2023 realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Perangkat Daerah tidak ada

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan.
- Baiknya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah.
- Relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SatpolPP dan Damkar. Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah :

- Adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam renstra Satpol-PP dan Damkar.
- Tercapainya visi-misi Satpol-PP dan Damkar sehingga arah program yang telah direncanakan berjalan sesuai harapan.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/ tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah :

- Mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
- Memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan yang berbasis teknologi informasi
- Mengadakan pemetaaan terhadap kebutuhan sosial masyarakat yang berkaitan dengan trantibum masyarakat
- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi serta pelaksanaan pengembangkan aplikasi *e-government.*

Untuk lebih jelasnya evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023, dapat dilihat pada tabel Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Perangkat Daerah terlampir sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan
s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan (2024)	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7x100)	10	11 = (6+8+10)	12=(11/5x100)
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
1 05 001	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***CAKUPAN LAYANAN OPERASIONAL KANTOR***	***Persen***	***100***	***100***	***100***	100	**100**	***100***	**50**	**50**
1 05 001 2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	100	**100**	100	**100**	**100**	**50**	**50**
1 05 001 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	339	62	61	58	**95**	57	**177**	**52**
1 05 001 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honornya	Dokumen	72	12	12	12	**100**	12	**36**	**50**
1 05 001 2.06	**ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	100	**100**	100	**100**	**100**	**50**	**50**
1 05 001 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	4	4	4	**100**	4	**12**	**50**
1 05 001 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24	4	4	4	**100**	4	**12**	**50**
1 05 001 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	24	4	4	4	**100**	4	**12**	**50**
1 05 001 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	4	4	4	**100**	4	**12**	**50**
1 05 001 2.06 09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	4	4	4	**100**	4	**12**	**50**
1 05 001 2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Barang milik Daerah yang Tersedia**	**persen**	**100**	100	**100**	100	**100**	**100**	**50**	**50**
1 05 001 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	58	35	10	7	**70**	0	**42**	**72**
1 05 001 2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase ketersedian jasa penunjang yang tersedia**	**Persen**	**100**	100	**100**	100	**100**	**100**	**50**	**50**
1 05 001 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	4	4	4	**100**	4	**12**	**50**
1 05 001 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	12	12	12	**100**	12	**36**	**50**
1 05 001 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	4	4	4	**100**	4	**12**	**50**
1 05 001 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	72	12	12	12	**100**	4	**28**	**39**
1 05 001 2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Barang milik Daerah yang Terpelihara**	**persen**	**100**	100	**100**	100	**100**	**100**	**50**	**50**
1 05 001 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	60	10	10	10	**100**	10	**30**	**50**
1 05 001 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	1	1	**100**	1	**3**	**50**
1 05 002	***PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	***Cakupan penegakan Perda dan Perkada***	***Persen***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***50***	***50***

1 05 002 2.01	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban**	**persen**	**100**	100	**100**	100	**100**	**100**	**50**	**50**
1 05 002 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah anggota Satpol-PP yang melaksanakan piket pada tempat-tempat penting dan strategis	Orang	218	98	33	98	**297**	37	**232**	**107**
		Jumlah patroli wilayah/patroli rutin, penertiban dan operasi gabungan	Kali	400	39	70	20	**29**	60	**119**	**30**
		Jumlah pengawalan dan pengamanan kepala daerah serta pejabat lainnya dan pengamanan kegiatan dan hari-hari nasional	Kali	345	39	60	20	**33**	50	**109**	**32**
1 05 002 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penanganan pelanggaran perda/perkada	Kasus	125	100	25	100	**400**	0	**200**	**160**
1 05 002 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan dokumen kerjasama penyelenggaraan trantibum linmas	Kali	30	5	6	5	**83**	6	**16**	**53**
1 05 002 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas yang terbentuk	Orang	235	47	47	47	**100**	47	**141**	**60**
1 05 002 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya pelatihan anggota satpol-PP	Orang	215	11	43	11	**26**	43	**65**	**30**
		Terlaksananya pembinaaan Jabatan fungsional Pol-PP	Orang								
1 05 002 2.01 07	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah operasi gabungan Tim SK-4	persen	100	100	100	100	**100**	100	**300**	**300**
1 05 002 2.01 08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedia dan terpeliharanaya sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	60	0	10	0	**0**		**0**	**0**
1 05 002 2.02	***Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota***	***Cakupan penanganan pelanggaran perda/ perkada yang terselesaikan***	***persen***	***100***	100	***100***	100	**100**	0	**33**	**33**
1 05 002 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya sosialisasi perda trantibum Kabupaten Solok Selatan	Orang	162	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**
1 05 002 2.02 02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penanganan pelanggaran perda/perkada	Kasus	104	39	20	20	**100**	24	**83**	**80**
1 05 002 2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten**	**Jumlah Penyidik**	**orang**	**4**	0	**1**	0	**0**	0	**0**	**0**
1 05 002 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Ops sekber PPNS Kabupaten Solok Selatan	Kali	4	0	1	0	**0**	0	**0**	**0**
1 05 004	***PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN***	***Capaian Waktu Tanggap (Response Time)***	***Persen***	***61,85%***	***83,33%***	***56,85%***	***85,18%***	***149,83%***	***55,85%***	***0***	***100***
1 05 004 2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**Persen**	**61,85%**	83,33%	**56,85%**	85,18%	**149,83%**	55,85%	**0**	**100**
1 05 004 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan kebakaran	Menit	215	14,08	35	13,04	37	100	127	59
		Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana	Unit	37	7	6	7	117	100	114	308
		Jumlah anggota piket Damkar	orang	240	36	42	36	86	100	172	72
1 05 004 2.01 02	Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemadaman dan pengendalian kebakaran	Kali	120	25	20	27	135	100	152	127
1 05 004 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non kebakaran	Jumlah penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Kali	48	25	7	27	386	100	152	317
1 05 004 2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	***cakupan layanan pemadam kebakaran***	**Persen**	**100**	25	**100**	100	**100**	25	**25**	**25**
1 05 004 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	orang	150	25	25	20	**80**	0	**45**	**30**

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Namun disisi lain juga adanya keterbatasan sumber daya aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Wilayah Kabupaten Solok Selatan yang begitu luasnya dimana terdiri dari 7 Kecamatan, 39 Nagari, dan 269 Jorong serta sumber daya alam dan kondisi penduduk yang beraneka ragam baik bidang ekonomi, sosial, dan budaya sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum). Unjuk rasa yang marak dalam bidang ekonomi di wilayah Kabupaten Solok Selatan juga tetap menjadi perhatian Satpolpp dan Damkar Kabupaten Solok Selatan.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan trantibum serta penegakan peraturan daerah di Kabupaten Solok Selatan, Satpol PP dan Damkar semakin berperan aktif dan profesional sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten Solok Selatan relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari cukup tingginya tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui penetapan peraturan daerah (perda) dalam mendukung peningkatan iklim usaha, dan semakin tumbuhnya bangunan toko.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Solok Selatan. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah di Kabupaten Solok Selatan menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Perangkat Daerah, melalui usulan anggaran tahun 2023.

Untuk lebih jelasnya tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS	CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023 (THN N-2)	TAHUN 2024 (THN N-1)	TAHUN 2025 (THN N)	TAHUN 2026 (THN N+1)	TAHUN 2023 (THN N-2)	TAHUN 2024 (THN N-1)	TAHUN 2025 (THN)	TAHUN 2026 (THN N+1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
1	Persentase Ketersediaan Satlinmas		IKK	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
2	Rasio Pos Satlinmas Perjumlah Jorong		IKK	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
3	Cakupan Penegak Perda dan Peraturan Kepala Daerah	SPM		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
4	Persentase Gamgguan Trantibum yang diselesaikan	SPM		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
5	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	SPM		56,85%	57,85%	58,85%	60,85%	83,33%	85,18%	100,00%	100,00%		
6	Tingkat Waktu Tanggap Daerah WMK	SPM		15	15	15	15	13,21	13,04	15	15		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Menumbuh kembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi melalui:

a. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering bebenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun citra Satpol-PP dan Damkar yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat.
b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan tehnis dan pengawasan terhadap bentuk–bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satpol-PP dan Damkar dan Perlindungan Masyarakat yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing–masing. Bentuk-bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya–upaya yang mengutamakan tindakan–tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan teratur.
c. Minimnya anggaran dan lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan peraturan daerah yang dilakukan Satpol PP dan Damkar tidak maksimal dalam memperoleh hasil yang diharapkan. Upaya dalam bentuk tindakan yang didasarkan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan guna mencari serta menyimpulkan barang bukti atas dilanggar atau tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dilaksanakan melalui tindakan pidana ringan (TIPIRING) berkerjasama dengan kejaksaan dan instansi terkait.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satpol-PP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan :

Faktor Internal :

a. Masih perlunya kualitas dan kuantitas personil; (Staf yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar Satpol PP (Diklatsar Satpol PP) bagi staf maupun pejabat eselon masih sedikit, kurangnya tenaga PPNS, serta tenaga teknis lainnya.
b. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana;
c. Masih perlunya penambahan Anggaran.

Faktor Eksternal :

a. Masih banyaknya penyimpangan Pelanggaran Peraturan Daerah;
b. Meningkatnya Kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Sering terjadinya Unjuk rasa dan persengketaan;
d. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten dan kota disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai adalah Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di kabupaten/kota, di mana ditargetkan pada Tahun 2022 harus mencapai persentase 85%. Jenis pelayanan dasar ini merupakan domainnya Satpol PP dan Damkar.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di kabupaten/kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai peraturan daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil (dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) adalah :

a. Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum.
b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP dan Damkar.
c. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan.
d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP dan Damkar.
e. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah di kawasan perkotaan.
f. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah di kawasan Kabupaten/Pedesaan;
g. Monitoring dan evaluasi.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Permasalahan :

a. Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda
b. Masih rendahnya Pelayanan Penanganan Kebakaran
c. Belum Optimalnya Keterpaduan pengurangan resiko bencana

Penyebab:

Belum efektifnya penegakan hukum dan peraturan daerah yang disebabkan rendahnya ketersediaan aparatur,sarana dan prasarana.

a. Rendahnya koordinasi antar Perangkat Dearah dan instansi yang terkait dengan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
b. Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM yang terkait dengan mitigasi bencana.
c. Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan bencana alam (banjir,longsor,gempa).

2.3.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

1) Terbatasnya jumlah ASN dan kualitas handal dan profesionalisme karena kurangnya memiliki pendidikan dan pelatihan.
2) Kualitas pekerjaan yang semakin berat yang memerlukan ruangan kerja dan alat komunikasi yang memadai.
3) Terbatasnya kendaraan operasional atau armada pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan yang mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan ketertiban, keamanan masyarakat.
4) Berkurangnya kesadaran dan kepatuhan yang bersumber dari kurangnya pemahaman nilai-nilai keagamaan dan pengaruh revermasi atau kebebasan yang tidak terkendali.

Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meliputi :

1) Tuntunan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik, kebutuhan akan keamanan mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan.
2) Kemauan dasar masyarakat akan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat yang selalu meningkat.
3) Keamanan dan kenyamanan yang selalu dibutuhkan masyarakat guna meningkatkan rasa nyaman kepada masyarakat.
4) Tuntutan terhadap pengetahuan dan keterampilan masyarakat cukup tinggi.

2.3.4 Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Peningkatan **Pelayanan Publik** yang *Good Governance* (terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, Revormasi birokrasi, Profesionalitas ASN, dan Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah)

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Berisikan uraian perbandingan rancangan awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan hasilanalisa kebutuhan, setelah anggaran disahkan terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD, data rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6.500.000.000					9.833.460.701	
1 05 001	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA***		***CAKUPAN LAYANAN OPERASIONAL KANTOR***	***Persen***	***4.000.000.000***	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA***		***CAKUPAN LAYANAN OPERASIONAL KANTOR***	***Persen***	***8.528.960.701***	
1 05 001 2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**			**Persen**	**10.000.000**	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**			**Persen**	-	
1 05 001 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	000	
1 05 001 2.01 06	Koordinasi dan Oenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Oenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	000	
1 05 001 2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**3.434.000.000**	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.339.968.101**	
1 05 001 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	3.320.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	**6.223.868.101**	
1 05 001 2.02 02	Penyedinan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honornya	4 Dokumen	112.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honornya	4 Dokumen	**116.100.000**	
1 05 001 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Satpol PP dan Damkar**	Junlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	
1 05 001 2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**		**Persentase pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**258.000.000**	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**		**Persentase pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**199.992.600**	
1 05 001 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	**4.995.600**	
1 05 001 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedinkan	4 Paket	**24.998.000**	
1 05 001 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Paket Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Paket Rumah Tangga yang Disedinkan	4 Paket	**4.999.000**	
1 05 001 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	22.000.000	Penyedlaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	**25.000.000**	
1 05 001 2.06 09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	200.000.000	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	**140.000.000**	
1 05 001 2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**Persentase Barang milik Daerah yang Tersedia**	**100 Persen**	**40.000.000**	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**Persentase Barang milik Daerah yang Tersedia**	**100 Persen**	-	
1 05 001 2.07 05	Pengadaan Mebel	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	40.000.000	Pengadaan Mebel	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	-	

1 05 001 2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase ketersedian jasa penunjang yang tersedia**	**100 Persen**	**43.000.000**	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase ketersedian jasa penunjang yang tersedia**	**100 Persen**	**1.794.000.000**	
1 05 001 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.000.000	
1 05 001 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	15.000.000	
1 05 001 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	13.000.000	
1 05 001 2.08 02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.764.000.000	
1 05 001 2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**Persentase Barang milik Daerah yang Terpelihara**	**100 persen**	**215.000.000**	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**Persentase Barang milik Daerah yang Terpelihara**	**100 persen**	**195.000.000**	
1 05 001 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	140.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	150.000.000	
1 05 001 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45.000.000	
1 05 002	***PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***		***Cakupan penegakan Perda dan Perkada***	***Persen***	***1.100.000.000***	***PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***		***Cakupan penegakan Perda dan Perkada***	***Persen***	***637.500.000***	
1 05 002 2.01	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Satpol PP dan Damkar**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban**	**persen**	**1.000.000.000**	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Satpol PP dan Damkar**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban**	**persen**	**577.500.000**	
1 05 002 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah anggota Satpol-PP yang melaksanakan piket pada tempat-tempat penting dan strategis	Orang	570.000.000	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah anggota Satpol-PP yang melaksanakan piket pada tempat-tempat penting dan strategis	Orang	329.000.000	
			Jumlah patroli wilayah/patroli rutin, penertiban dan operasi gabungan	Kali				Jumlah patroli wilayah/patroli rutin, penertiban dan operasi gabungan	Kali		
			Jumlah pengawalan dan pengamanan kepala daerah serta pejabat lainnya dan pengamanan kegiatan dan hari-hari nasional	Kali				Jumlah pengawalan dan pengamanan kepala daerah serta pejabat lainnya dan pengamanan kegiatan dan hari-hari nasional	Kali		
1 05 002 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	**Satpol PP dan Damkar**	Cakupan penanganan pelanggaran perda/perkada	Kasus	35.000.000	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	**Satpol PP dan Damkar**	Cakupan penanganan pelanggaran perda/perkada	Kasus	45.000.000	
1 05 002 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaman Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah koordinasi dan dokumen kerjasama penyelenggaraan trantibum linmas	Kali	102.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah koordinasi dan dokumen kerjasama penyelenggaraan trantibum linmas	Kali	50.000.000	
1 05 002 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Satlinmas yang terbentuk	Orang	80.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah Satlinmas yang terbentuk	Orang	40.000.000	
1 05 002 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	**Satpol PP dan Damkar**	Terlaksananya pelatihan anggota satpol-PP	Orang	118.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	**Satpol PP dan Damkar**	Terlaksananya pelatihan anggota satpol-PP	Orang	50.000.000	
			Terlaksananya pembinaaan Jabatan fungsional Pol-PP					Terlaksananya pembinaaan Jabatan fungsional Pol-PP			
1 05 002 2.01 07	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah operasi gabungan Tim SK-4	persen	50.000.000	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah operasi gabungan Tim SK-4	persen	63.500.000	
1 05 002 2.01 08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Satpol PP dan Damkar**	Tersedia dan terpeliharanaya sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	45.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Satpol PP dan Damkar**	Tersedia dan terpeliharanaya sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	000	
1 05 002 2.02	***Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota***	**Satpol PP dan Damkar**	***Cakupan penanganan pelanggaran perda/ perkada yang terselesaikan***	***persen***	***70.000.000***	***Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota***	**Satpol PP dan Damkar**	***Cakupan penanganan pelanggaran perda/ perkada yang terselesaikan***	***persen***	***35.000.000***	
1 05 002 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Satpol PP dan Damkar**	Terlaksananya sosialisasi perda trantibum Kabupaten Solok Selatan	Orang	30.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Satpol PP dan Damkar**	Terlaksananya sosialisasi perda trantibum Kabupaten Solok Selatan	Orang	000	
1 05 002 2.02 02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah penanganan pelanggaran perda/perkada	Kasus	40.000.000	Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah penanganan pelanggaran perda/perkada	Kasus	35.000.000	

1 05 002 2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten**		**Jumlah Penyidik**	**orang**	**30.000.000**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten**		**Jumlah Penyidik**	**orang**	**25.000.000**	
1 05 002 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	**Satpol PP dan Damkar**	Ops sekber PPNS Kabupaten Solok Selatan	Kali	30.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	**Satpol PP dan Damkar**	Ops sekber PPNS Kabupaten Solok Selatan	Kali	**25.000.000**	
1 05 004	***PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN***		**Capaian Waktu Tanggap (Response Time)**	**Persen**	**1.400.000.000**	***PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN***		**Capaian Waktu Tanggap (Response Time)**	**Persen**	**667.000.000**	**Tidak jadi adanya pembelian**
1 05 004 2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Satpol PP dan Damkar**	**Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**Persen**	**1.400.000.000**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Satpol PP dan Damkar**	**Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**Persen**	**667.000.000**	
1 05 004 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Satpol PP dan Damkar**	Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan kebakaran	Menit	1.320.000.000	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Satpol PP dan Damkar**	Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan kebakaran	Menit	**640.000.000**	
			Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana	Unit				Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana	Unit		
			Jumlah anggota piket Damkar	orang				Jumlah anggota piket Damkar	orang		
1 05 004 2.01 02	Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah pemadaman dan pengendalian kebakaran	Kali		Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah pemadaman dan pengendalian kebakaran	Kali	**13.500.000**	
1 05 004 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non kebakaran	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non	Kali		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non kebakaran	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Kali	**13.500.000**	
1 05 004 2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Satpol PP dan Damkar**	***cakupan layanan pemadam kebakaran***	**Persen**	**80.000.000**	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Satpol PP dan Damkar**	***cakupan layanan pemadam kebakaran***	**Persen**	-	
1 05 004 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah peserta sosialisasi	orang	80.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan	**Satpol PP dan Damkar**	Jumlah peserta sosialisasi	orang	000	

Catatan:
1. Belanja urusan penunjang yang semula Rp. 6.500.000.000,00 menjadi Rp. 9.833.460.701,00 dikarenakan adanya penambahan ASN yang semula hanya 45 orang menjadi 58 orang serta Gaji Tenaga Kontrak Daerah (TKD) juga bertambah darti Rp. 1.500.000 menjadi Rp 1.750.000

2. Beanja urusan Trantibum dari Rp 1.100.000.000 menjadi Rp 637.500.000 terjadi penurunan dimana adanya pengurangan anggaran serta tidak adanya Diklat untuk Anggota Satpol-PP

3. Belanja urusan Damkar dari Rp 1.400.000.000 menjadi Rp. 667.000.000 terjadi penurunan dimana ada penganggaran belanja modal mobil damkar dan dibatalkan karna adanya pemotongan anggaran

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Satpol-PP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 tidak ada kaitannya dengan usulan dari masyarakat, tetapi Program dan Kegiatan tersebut sudah sesuai dengan Tugas, Pokok dan fungsi serta aturan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya tentang usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan 2025, dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah, selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional. Untuk kebijakan Nasional yang harus diperhatikan dan diperioritaskan dalam penyelenggaraan pelayanan yaitu memperkuat Reformasi Publik serta memperkuat pencegahan dan pemberantasn Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public.* Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam kurun waktu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat
2. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kecamatan, desa atau kelurahan;

Terkait dengan kebijakan Nasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan selaku lembaga teknis daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam perioritas reformasi birokrasi dan tata kelola .

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan melayani	Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik
2	Meningkatkan Kertersediaan Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, mempunyai 1 urusan pemerintahan yaitu urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat. Pada Urusan tersebut terdapat 3 program, 8 kegiatan 26 sub kegiatan. Tahap Rancangan awal RKPD tahun 2025 ada beberapa perbedaan dengan Analisa Kebutuhan dikarenakan masih menyesuaikan dengan usulan pada Renstra Tahun 2021-2026

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
RUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PADA SATPOL-PP DAN DAMKAR
KABUPATEN SOLOK SELATAN

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Brang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

			3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan 2. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 6. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 7. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran

	PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berisi program/kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis SatpolPP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, adalah sebagaimana tercantum pada Tabel4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026. Perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pada SatpolPP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan didasrkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARANKAB. SOLOK SELATAN

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran						9.833.460.701,00							6.428.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.833.460.701,00							6.428.000.000,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN						9.833.460.701,00							6.428.000.000,00	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	-			100 persen	8.528.960.701,00						-	3.963.000.000,00	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen 100 Persen	6.339.968.101,00			Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Seluruh ASN dan TKD	-	3.432.500.000,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	6.223.868.101,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Seluruh ASN dan TKD		3.320.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	116.100.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Seluruh ASN dan TKD		112.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	199.992.600,00			Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Seluruh ASN dan TKD	-	271.000.000,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4.995.600,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Seluruh ASN dan TKD		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	24.998.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Seluruh ASN dan TKD		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4.999.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Seluruh ASN dan TKD		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disedlakan				4 Paket	25.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Seluruh ASN dan TKD		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	140.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Seluruh ASN dan TKD		210.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia Persentase ketersedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen 100 Persen	1.794.000.000,00			Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Seluruh ASN dan TKD	-	44.500.000,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Seluruh ASN dan TKD		4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Seluruh ASN dan TKD		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	13.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Seluruh ASN dan TKD		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.764.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Seluruh ASN dan TKD		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang Terpelihara Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	-			100 Persen 100 Persen	195.000.000,00			**Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan**	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas** Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Seluruh ASN dan TKD	-	215.000.000,00	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	150.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Seluruh ASN dan TKD		140.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	45.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Seluruh ASN dan TKD		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan Perda dan Perkada	-			100 persen	637.500.000,00						-	985.000.000,00	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 Persen 100 Persen	577.500.000,00			Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,** akuntabel dan **berkualitas** Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat	-	920.000.000,00	
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														

							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat		80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia															
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				20 Orang	50.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat		65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				4 Dokumen	63.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan															
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				30 laporan	329.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat		570.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa															
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				30 Laporan	45.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat		35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan Peanganan Pelanggaran Perda/Perkada yang terselesaikan Cakupan penanganan pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan	-			100 Persen 100 Persen	35.000.000,00			Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-	-	35.000.000,00	
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	35.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	-		35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyidik Jumlah Penyidik	-			1 orang 1 Orang	25.000.000,00			Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat	-	30.000.000,00	
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	capaian waktu tanggap (response Time)	-			59,85 persen	667.000.000,00						-	1.480.000.000,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Cakupan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	-			59,85 Persen 58,85 Persen	667.000.000,00			Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat	-	1.480.000.000,00	
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				4 Dokumen	640.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat		1.320.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	13.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat		80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				4 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik,Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	Masyarakat		80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	JUMLAH											**9.833.460.701,00**							**6.428.000.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah SatpolPP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun ke 4 (Empat) periode Renstra 2021-2026, dan Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025. Pembangunan daerah program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai dan mendukung tercapainya visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Dimana dalam melaksanakan kegiatan yang telah diajukan, haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu efektif, efisien dan tepat guna.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional yang menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025 maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demi penyempurnaan program dan kegiatan di masa mendatang bimbingan dan arahan dari Pimpinan Daerah serta masukan-masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tetap menjadi harapan kami. Dan penyusunan Rencana Kerja ini juga tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh aparatur SatpolPP dan Damkar serta peran aktif stake holder yang bersangkutan. Atas segala bimbingan, arahan, dukungan, kerjasama dan masukan tersebut kami ucapkan terima kasih.

KEPALA
Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

NOVRIZON, S.Pd, M.Si
NIP. 19671109 199203 1 006

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan KaruniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama satu tahun yang akan datang. Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.

Pencapaian tujuan RENSTRA tersebut kemudian dibagi menjadi tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu lebih pendek, yaitu satu tahunan. Dengan demikian diharapkan kegiatan pengkoordinasian, pengambilan kebijakan pengendalian dan evaluasi pada bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan dapat dilakukan dengan lebih baik dan dapat mendukung pembangunan visi dan misi Bupati Kabupaten Solok Selatan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 disampaikan terima kasih.

Padang Aro, Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH

Dr. H. SYAMSURIZALDI, SIP, SE, MM
NIP. 197312301993031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 32

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 34

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 53

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 53

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah 53

3.3 Program dan Kegiatan 54

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 59

BAB V PENUTUP..... 78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 11

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 33

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025..... 37

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 52

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 54

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 60

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA).

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencananaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Tahunan Daerah. Selain itu guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025. Adapun tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja ini

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah ini selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Adapun rancangan renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Apabila berdasarkan verifikasi Bappeda ada perbaikan, maka disampaikan saran dan rekomendari kepada Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah melakukan perbaikan sesuai dengan saran dan rekomendasi tersebut serta disampaikan kembali ke Bappeda.

Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Sekretariat Daerah, evaluasi kinerja pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

Rencana Kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, karena disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah dan segenap pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklakur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 – 2032;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. **Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dan arah bagi Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Solok Selatan dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah.

b. **Tujuan**

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah sebagi berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025;
2. Mengevaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun sebelumnya;
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun sebelumnya;
4. Perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
5. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;

1.4. Sistematika Penulisan

Berpedoman Pasal 129 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Sekretariat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kejian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perengkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi mengenai Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja serta Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaannya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Daerah Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kebupaten Solok Selatan, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 Sekretariat Daerah telah dilaksanakan 4 program yang di dalamnya terdapat 15 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 52.854.674.644,-.

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kegiatan dan Pengukuran Penetapan Pencapaian Sasaran dilakukan Pengukuran Kinerja untuk Tahun Anggaran 2023 Sekretariat Daerah dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam Pencapaian Kinerja.

Sekretariat Daerah menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan dan kelemahan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Sekretariat Daerah pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, pada umumnya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran karena merupakan kegiatan rutinitas tahunan dan kebutuhan kantor.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Pada Tahun Anggaran 2023, target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan di Sekretariat Daerah pada umumnya telah memenuhi target. Adapun program unggulan yang ada di Sekretariat Daerah secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil Keluaran yang direncanakan

Sekretariat Daerah pada Tahun Anggaran 2023 ada realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yakni pada target Peringkat MTQ Tingkat Nasional yang ditargetkan Peringkat 5 dan berhasil mendapatkan Peringkat 4.

Gambaran lengkap evaluasi capaian renstra dan renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 lampiran renja berikut ini :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
KABUPATEN SOLOK SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
BAGIAN PEMERINTAHAN														
4	**01**	**01**	**2.1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**67**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**67**
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	24 Laporan	8	4	4	100	4	16	67
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**16.67**	**100**	**100**	**100**	**100**	**36**	**36**
4	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit	1	1	1	100	1	1	100
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang**	**100 Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**39**	**39**
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase kebijakan yang ditetapkan dan dievaluasi**	**100 Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**39**	**39**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD yang disusun tepat waktu	**2 Dokumen**	**2**	**2**	**2**	**100**	**2**	**2**	**100**
4	1	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah kebijakan bidang administrasi pemerintahan yang dirumuskan dan dievaluasi	24 Dokumen	6	4	4	100	4	14	58
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kecamatan yang dibina	7 Kecamatan	7	7	7	100	7	7	100
						Jumlah Dokumen Pembakuan Rupa Bumi yang disusun	6 Dokumen	2	1	1	100	1	4	67
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Pencapaian Pelaksanaan SPM	6 Dokumen	2	1	1	100	1	4	67
						Jumlah Dokumen LKPJ dan LPPD yang disusun	12 Dokumen	4	2	2	100	2	8	67
						Jumlah kerjasama daerah	120 Buah	58	20	32	160	20	110	92
						Jumlah Hari Besar Nasional yang difasilitasi peringatannya	18 HBN	6	3	3	100	3	12	67
5	**07**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**Persentase segmen batas Nagari yang diselesaikan**	**100 Persen**	**23**	**100**	**100**	**100**	**100**	**37**	**37**
5	**07**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	**Persentase segmen batas kecamatan dan dokumen batas yang terselesaikan**	**100 Persen**	**23**	**100**	**100**	**100**	**100**	**37**	**37**
5	01	2	2.02	01	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Nagari yang difasilitasi kesepakatan penyelesaian segmen Batasnya	39 Nagari	9	13	13	100	24	46	118
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	**01**	**01**	**2.1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100**	**Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**67**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**67**
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	8	4	4	100	4	16	67
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100**	**Persen**	**16.67**	**100**	**100**	**100**	**100**	**36**	**36**
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	1	1	1	100	1	1	100
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti**	**100**	**Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**39**	**39**
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Terlaksananya kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan keagamaan**	**100**	**Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**39**	**39**
4	1	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Hari Besar Islam yang diperingati	48	PHBI	16	8	8	100	8	32	67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Jumlah Fasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji	12	Kali	0	2	2	100	2	4	33
						Jumlah Ulama, Dai, Khatib, Imam Masjid dan Guru MDA yang dibina	900	Orang	75	150	0	0	0	75	8
						Jumlah Event keagamaan yang difasilitasi	17	Event	4	2	3	100	2	9	53
						Jumlah Guru Tahfidz yang dibina	1118	Orang	77	274	274	100	274	625	56
						Jumlah Kafilah yang Fasilitasi	576	Orang	0	71	71	100	0	71	12
						Jumlah Masjid yang dikunjungi dan diberi bantuan	156	Mesjid	25	48	48	100	40	113	72
						Jumlah Wirid dan Jumlah Tausiah yang dilaksanakan	168	Kali	0	0	0	0	0	0	0
						Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan bantuan operasional	30	Lembaga	5	5	2	40	5	12	40
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah UKS yang di Fasilitasi	18	UKS	6	3	3	3	3	12	67
						Jumlah kebijakan bidang Kesejahteraan Sosial yang dirumuskan dan dievaluasi	24	Dokumen	5	4	4	100	4	13	54
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat yang dirumuskan dan dievaluasi	24	Dokumen	4	4	4	100	4	12	50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Jumlah Beasiswa Bagi Siswa Tingkat SLTA yang diberikan	470 Orang	129	0	0	0	100	229	49
						Jumlah Beasiswa Bagi Mahasiswa yang diberikan	296 Orang	130	205	205	100.00	83	418	141
BAGIAN HUKUM														
4	**01**	**01**	**2.1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**67**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**67**
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	24 Laporan	8	4	4	100	4	16	67
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**39**	**39**
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2	2	2	100	2	2	100
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**33**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah**	**100**	**Persen**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**33**
						Jumlah kelompok sadar hukum	**7**	**Kelompok**	**7**	**7**	**7**	**7**	**100**	**7**	**100**
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Nagari Yang dimonitoring dan dievaluasi produk hukumnya	39	Nagari	27	39	15	38	39	39	100
						Jumlah produk hukum yang diharmonisasi	73	Ranperda	20	11	11	100	14	45	62
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pendapat hukum yang diberikan dan ditindaklanjuti	57	Pendapat Hukum	16	7	7	100	10	33	58
						Jumlah perkara yang tertangani	18	Perkara	4	3	3	100	3	10	56
						Jumlah keluarga sadar hukum yang dibina	42	Kelompok	14	7	7	100	7	28	67
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Peraturan Daerah yang tertata melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	41	Perda	12	6	6	100	7	25	61
						Jumlah Peraturan Daerah yang diinventarisasi	41	Perda	13	6	6	100	7	26	63
						Jumlah Peraturan Daerah yang disosialisasikan	41	Perda	12	6	6	100	7	25	61
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA															
4	**01**	**01**	**2.1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100**	**Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**67**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**67**
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	8	4	4	100	4	16	67
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**16.67**	**100**	**100**	**100**	**100**	**36**	**36**
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	1	1	1	100	1	1	50
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**25.00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**38**	**38**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**25.00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**38**	**38**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan BLUD	144 Dokumen	36	24	24	100	24	84	58

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan	60 Laporan	20	10	10	100	4	34	57
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	60 Dokumen	20	10	10	100	4	34	57
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan kebijakan sumber daya alam**	**Persentase pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditetapkan dan dievaluasi**	**100 Persen**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**33**
4	01	03	2.04	01	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal dan	32 Dokumen	0	8	8	100	8	16	50
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN														
4	**01**	**01**	**2.1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**31.58**	**100**	**100**	**100**	**100**	**39**	**39**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan pelaporan tepat waktu**	**38 Dokumen**	**31.58**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**63**
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 Dokumen	12	6	6	100	6	24	63

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum**	**100 Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**67**
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	24 Laporan	8	4	4	100	4	16	67
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**39**	**39**
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2	2	2	100	2	2	100
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**39**	**39**
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase kebijakan pengendalian kegiatan pembangunan yang diterbitkan**	**100 Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**39**	**39**
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan terkait pelaksanaan pengendalian dan evaluasi	24 Dokumen	8	4	4	100	4	16	67
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan	72 Dokumen	24	12	12	100	12	48	67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA														
4	**01**	**01**	**2.1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	13	0	0	100	0	13	100
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	0	0	0	0	0	0	0
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**16.67**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**50**
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	4	4	4	100	4	12	50
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**16.67**	**100**	**100**	**100**	**100**	**36**	**36**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	1	1	1	100	1	1	100
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	**Persen**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**33**
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase realisasi pengadaan barang dan jasa tepat waktu**	**100**	**Persen**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**33**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Tender yang terlaksana melalui ULP	560	Buah	194	47	47	100	100	341	61
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa dengan Aplikasi (SPSE)	1027	Buah	134	3220	3220	100	100	3454	336
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Perbup PBJ yang ditetapkan dan dievaluasi	11	Perbup	1	2	0	100	2	3	27
						Jumlah sanggah dan pengaduan yang diproses	13	Dokumen	4	2	4	100	2	10	77
BAGIAN UMUM															
4	**01**	**01**	**2.1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi keuangan**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	581	Orang/bulan	180	95	95	100	98	373	64

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	8	4	4	100	4	16	67
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	6 Laporan	2	1	1	100	1	4	67
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum**	**100 Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**39**	**39**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	8	4	4	100	4	16	67
4	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24 Paket	8	4	4	100	4	16	67
4	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	8	4	4	100	4	16	67
4	01	04	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	8	4	4	100	4	16	67
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	24 Laporan	8	4	4	100	4	16	67
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**100 Persen**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**33**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	16	Unit	2	2	2	100	2	6	38
4	01	02	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	211	Unit	100	50	50	100	5	155	73
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi**	**100**	**Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**39**	**39**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	Laporan	8	4	4	100	4	16	67
4	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	72	Laporan	24	12	12	100	12	48	67
4	01	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	24	Laporan	8	4	4	100	4	16	67
4	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Laporan	24	12	12	100	12	48	67
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100**	**Persen**	**100.00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
4	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	25	Unit	50	49	49	100	49	49	196

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	1	1	100	1	1	100
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	1	Unit	1	1	1	100	1	1	100
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase layanan kedinasan Sekretaris Daerah**	**100**	**Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**39**	**39**
4	01	01	2.12	03	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	24	Paket	8	4	4	100	4	16	67
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase pelayanan keprotokolan yang dilaksanakan sesuai standar keprotokolan**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4	01	01	2.14	03	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah event yang diadakan	2	Event	1	1	1	100	0	2	100
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah event yang diikuti	2	Event	1	1	1	100	0	2	100
KDH/WKDH															
4	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4	01	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	Paket	4	4	4	100	0	8	100
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum**	**100**	**Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**39**	**39**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	Paket	8	4	4	100	4	16	67
4	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24	Paket	8	4	4	100	4	16	67
4	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	Paket	8	4	4	100	4	16	67
4	01	04	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan	8	4	4	100	4	16	67
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	8	4	4	100	4	4	17
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**100**	**Persen**	**43.48**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**83**
4	01	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung/kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	69	Unit	30	15	15	100	12	57	83
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**39**	**39**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	Laporan	8	4	4	100	4	16	67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	24	12	12	100	12	48	67
4	01	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	8	4	4	100	4	16	67
4	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	24	12	12	100	12	48	67
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**100.00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan/dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8	8	8	100	8	8	100
4	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaran dinas/operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8	8	8	100	8	8	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase layanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi**	**100**	**Persen**	**0.00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**33**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang	0	2	2	100	2	2	100
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	16	Paket	0	4	4	100	4	4	25
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16	Orang	8	4	4	100	4	16	100
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang	0	4	4	100	2	2	100
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase layanan kedinasan Sekretaris Daerah**	**100**	**Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**39**	**39**
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	24	Paket	8	4	4	100	4	16	67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24	Paket	8	4	4	100	4	16	67
BAGIAN ORGANISASI															
4	**01**	**01**	**2.1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100**	**Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**67**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum**	**100**	**Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**67**
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	8	4	4	100	4	16	67
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100**	**Persen**	**16.67**	**100**	**100**	**100**	**100**	**36**	**36**
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Kali	1	2	2	100	2	2	100
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Indeks Kematangan Kelembagaan**	**P-5**	**Indeks**	**0**	**n.a**	**n.a**			**39**	
						Persentase Jabatan Yang Memiliki Standar Kompetensi Jabatan	**100**	**Persen**	**0**	**100**	**100**			**100 Persen**	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Nilai Sakip dari Komponen Pelaporan	**90 Nilai**	**100**	**60**	**9,63**		**65**	**65**	
4	01	04	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Anjab yang disusun dan Dievaluasi	33 Dokumen	33	33	33	100	33	33	100
						Jumlah Regulasi terkait penetapan standar kompetensi manajerial yang ditetapkan dan Dievaluasi	1 Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
						Jumlah Regulasi Kelembagaan dan Analisa Jabatan yang dibentuk dan dievaluasi	33 Dokumen	33	33	33	100	33	33	100
4	01	04	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen IKM dan Dokumen Standar Pelayanan OPD yang disusun dan dievaluasi	33 Dokumen	33	33	33	33	33	33	100
						Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang difasilitasi untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik	1 Dokumen	1	1	0	0	1	1	100
						Jumlah Dokumen Peta proses dan SOP yang disusun dan Dievaluasi	33 Dokumen	0	33	33	33	33	33	100
4	01	04	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Road Map RB Kabupaten Solok Selatan yang disusun dan dievaluasi	6 Dokumen	1	1	1	100	1	3	50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	12 Dokumen	2	2	2	100	2	6	50
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN														
4	**01**	**01**	**2.1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**33**
4	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian Perangkat**	**100 Persen**	**50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**42**	**42**
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	40	40	40	0	0	80	100
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**16.67**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33**	**33**
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Majalah	4	0	0	0	0	4	17
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	8	4	4	100	4	16	67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**33.33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**39**	**39**
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2	2	2	100	2	2	100
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase pelayanan keprotokolan yang dilaksanakan sesuai standar keprotokolan**	**100 Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
4	01	04	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah pelayanan keprotokolan yang dilaksanakan sesuai standar keprotokolan	560 Kali	139	475	475	100	360	974	174
4	01	04	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Media Publikasi publik yang mengakomodir kegiatan pimpinan	1 Media Publikasi	1	1	1	100	2	2	100
4	01	04	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pimpinan yang didokumentasikan dan dipublikasikan	560 Kali	139	475	475	100	360	974	174

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak.

Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsif *good govermance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor–faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya Jumlah SDM Dalam rangka optimalisasi Tupoksi
2. Kurangnya Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan
3. Tata Kelola Pemerintahan yang masih lemah

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM
2. Peningkatan Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan
3. Mengkoordinasikan Percepatan pelaksanaan Reformasi birokrasi

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2023 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Solok Selatan

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (7 -15) Hafiz Qur'an 1 Juz		IKU	5,00	5,83	6,67	7,50	5,07	5,83	6,67	7,50	
2	Persentase Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (7 -15) Hafiz Qur'an 2 Juz		IKU	0,56	0,62	0,69	0,76	0,33	0,62	0,69	0,76	
3	Persentase Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (7 -15) Hafiz Qur'an lebih atau sama 3 Juz		IKU	0,56	0,62	0,70	0,80	0,22	0,62	0,70	0,80	
4	Peringkat MTQ Tingkat Provinsi		IKU	Peringkat 5	-	Peringkat 5	-	Peringkat 4	-	Peringkat 5	-	
5	Nilai SAKIP		IKU	70	80	85	90	60,58	80	85	90	
6	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		IKU	3.08	3.10	3.12	3.15	2.7961	3.10	3.12	3.15	
7	Nilai Indeks Kematangan Kelembagaan		IKU	36 (Sedang)	39 (Tinggi)	42 (Tinggi)	46 (Tinggi)	n.a	39 (Tinggi)	42 (Tinggi)	46 (Tinggi)	
8	Skala Kematangan UKPBJ		IKU	3	4	4	5	3	4	4	5	
9	Indeks Pelayanan Publik		IKU	B (3,75)	A- (4,01)	A- (4,30)	A- (4,30)	B (3,57)	A- (4,01)	A- (4,30)	A- (4,30)	

Berdasarkan tabel 2.2 diatas, adapun tingkat pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator persentase penduduk usia sekolah Pendidikan Dasar (7-15) hafidz qur'an 1 mencapai target sebesar 5,07% dari target yang ditetapkan 5,00%.
2. Untuk indikator persentase penduduk usia sekolah Pendidikan Dasar (7-15) hafidz qur'an 2 hanya mencapai target sebesar 0,33% dari target yang ditetapkan 0,56%.
3. Untuk indikator persentase penduduk usia sekolah Pendidikan Dasar (7-15) hafidz qur'an lebih atau sama 3 juz hanya mencapai target sebesar 0,22% dari target yang ditetapkan 0,56%.

   Hal ini menunjukkan capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Peringkat MTQ Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat mencapai peringkat 4 dari target yang ditetapka peringkat 5.
5. Untuk indikator Nilai SAKIP yang telah ditetapkan 70 mencapai nilai 60,58 dan telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.
6. Untuk nilai LPPD yang telah ditetapkan 3,08 hanya mendapatkan nilai 2,7961 dari Kementerian Dalam Negeri.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Besarnya rentang kendali di internal Sekretariat Daerah 9 Bagian menjadikan perlunya koordinasi ekstra utamanya di bidang kepegawaian, perencanaan dan administrasi umum di internal Sekretariat Daerah.
2. Dinamisnya produk hukum dan perundang-undangan memerlukan kajian dan analisa bagi pemerintah daerah dalam penerapan dan pelaksanaannya di daerah masing masing sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik di masyarakat.

3. Tuntutan transparansi menuntut adanya upaya bagi daerah untuk mempublikasikan produk hukum dan kebijakan daerah melalui media yang dapat di akses masyarakat.
4. Pelayanan prima dalam bidang pelayanan publik. Sebagai unsur Sekretariat Daerah yang membantu Sekretaris Daerah dalam bidang pelayanan publik, maka sudah tentu Bagian Organisasi Setda Kabupaten Solok Selatan harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani masyarakat dan instansi terkait. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak yang tekait dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Solok Selatan.
5. Belum tersedianya data – data kemasyarakatan dan keagamaan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan;
6. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Dinas, Badan, dan Lembaga Teknis belum berjalan secara proporsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan, ada beberapa hambatan yang dihadapi, yakni :

a. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang peralatan kantor;
b. Masih kurangnya pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis aparatur;
c. Terbatasnya pendanaan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan.

Adapun peluang yang mempengaruhinya adalah adanya komitmen dari pimpinan untuk terus mendukung pelaksanaan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disamping itu akses kelancaran internet sangat membantu dan memudahkan Sekretariat Daerah dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan.

Tantangan yang biasanya ditemukan pada Sekretariat Daerah yaitu dengan tingginya ekspektasi masyarakat atas kualitas pelayanan publik dan perkembangan IPTEK yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah termasuk dalam salah satu pelaksana Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi yang mengfungsikan diri sebagai perumus kebijakan penataan dan evaluasi kelembagaan serta fasilitasi penyusunan standarisasi ketatalaksanaan, khususnya pelayanan publik berkewajiban mendukung terwujudnya pelayanan prima pada seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Solok Selatan dan RPJMD Bupati terpiih 2021-2026 Sebagaimana tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD TAHUN 2025
Kabupaten Solok Selatan

SEKRETARIAT DAERAH

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kabupaten Solok Selatan		**100 Persen**	**26,460,000,000**		**Kabupaten Solok Selatan**		**100 Persen**	**42,897,386,565**	
BAGIAN UMUM					**14,109,000,000**					**24,365,549,969**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kabupaten Solok Selatan**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**14,109,000,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**24,365,549,969**	
		Kabupaten Solok	**Nilai SAKIP**	**85**			**Kabupaten**	**Nilai SAKIP**	**85**		
		Kabupaten Solok	**Nilai LPPD**	**3,12**			**Kabupaten**	**Nilai LPPD**	**3,12**		
		Kabupaten Solok Selatan	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan**	**100 Persen**			**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan**	**100 Persen**		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pelaksanaan administrasi keuangan kantor**	**100 Persen**	**11,719,000,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pelaksanaan administrasi keuangan kantor**	**100 Persen**	**12,403,437,244**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/bulan	9,879,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/Bulan	11,967,590,244	Bertambahnya jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1,820,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	415,980,000	Gaji TKD terletak pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20,000,000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	19,867,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**1,170,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2,691,440,900**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	119,952,200	Meningkatnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	20,000,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	120,128,600	Meningkatnya komponen instalasi listrik/penerangan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	4 Paket	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	4 Paket	120,002,400	Meningkatnya jumlah paket peralatan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	149,995,000	Meningkatnya jumlah bahan logistik
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	119,946,700	Meningkatnya jumlah barang
	Fasilitasi kunjungan tamu	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	100,000,000	Fasilitasi kunjungan tamu	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	967,769,000	Meningkatnya jumlah fasilitasi kunjungan
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1,000,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1,093,647,000	Meningkatnya jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**100 Persen**	**430,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**100 Persen**	**3,093,634,400**	
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	430,000,000	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	2,137,840,000	Meningkatnya pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	62,837,600	Meningkatnya pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	892,956,800	Meningkatnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 Persen**	**270,000,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 Persen**	**4,234,080,500**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	20,000,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	15,000,000	Berkurangnya penyediaan
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200,000,000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	349,713,000	Meningkatnya Penyediaan jasa komunikasi sumber daya
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	50,000,000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1,665,640,000	Meningkatnya jumlah jasa peralatan dan perlengkapan
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,203,727,500	Gaji TKD sebanyak 72 orang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**450,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**1,852,959,925**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	200,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	1,502,701,125	Meningkatnya biaya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,000,000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250,250,000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	4 Unit	100,008,800	Meningkatnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang akan dipelihara/di
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase layanan kedinasan Sekretaris Daerah yang terfasilitasi**	**100 Persen**	**70,000,000**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase layanan kedinasan Sekretaris Daerah yang terfasilitasi**	**100 Persen**	**89,997,000**	
	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket	70,000,000	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket	89,997,000	
KDH/WKDH					**3,526,000,000**					**6,526,881,700**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kabupaten Solok Selatan**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**3,526,000,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**6,526,881,700**	
		Kabupaten Solok	**Nilai SAKIP**	**85**			**Kabupaten**	**Nilai SAKIP**	**85**		
		Kabupaten Solok	**Nilai LPPD**	**3,12**			**Kabupaten**	**Nilai LPPD**	**3,12**		
		Kabupaten Solok Selatan	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan**	**100 Persen**			**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan**	**100 Persen**		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**1,160,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**1,944,949,800**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	50,000,000	Meningkatnya jumlah barang
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	20,000,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	99,977,800	Meningkatnya jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	4 Paket	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	4 Paket	44,999,200	Meningkatnya jumlah peralatan rumah tangga yang
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	200,000,000	Meningkatnya jumlah bahan logistik
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	4 Paket	20,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	4 Paket	49,999,800	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Fasilitasi kunjungan tamu	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	100,000,000	Fasilitasi kunjungan tamu	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	499,988,000	Meningkatnya penyediaan fasilitasi kunjungan tamu
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1,000,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	999,985,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**100 Persen**	**100,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**100 Persen**	**1,000,000,000**	
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung/kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	100,000,000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung/kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	1,000,000,000	Meningkatnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 Persen**	**215,000,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 Persen**	**406,000,000**	
Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	20,000,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	6,000,000	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	120,000,000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	250,000,000	Meningkatnya penyediaan jasa komunikasi sumber daya
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	75,000,000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	150,000,000	Meningkatnya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**325,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**519,990,700**	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan/dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	300,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan/dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	499,990,700	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaran dinas/operasional atau lapangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	25,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaran dinas/operasional atau lapangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	20,000,000	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase layanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi**	**100 Persen**	**826,000,000**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase layanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi**	**100 Persen**	**1,155,958,400**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	166,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	166,000,000	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	200,000,000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	499,958,400	Meningkatnya penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan
	Pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	60,000,000	Pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	90,000,000	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	400,000,000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	400,000,000	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase layanan kedinasan Sekretaris Daerah yang terfasilitasi**	**100 Persen**	**900,000,000**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase layanan kedinasan Sekretaris Daerah yang terfasilitasi**	**100 Persen**	**1,499,982,800**	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	500,000,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	799,983,200	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	400,000,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	699,999,600	
BAGIAN ORGANISASI					**385,000,000**					**369,958,000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kabupaten Solok Selatan**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**385,000,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**369,958,000**	
		Kabupaten Solok Selatan	**Nilai SAKIP**	**85**			**Kabupaten Solok Selatan**	**Nilai SAKIP**	**85**		
		Kabupaten Solok	**Nilai LPPD**	**3,12**			**Kabupaten**	**Nilai LPPD**	**3,12**		
		Kabupaten Solok Selatan	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan**	**100 Persen**			**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan**	**100 Persen**		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**60,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**19,970,000**	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	60,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	19,970,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**25,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**29,988,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2 Unit	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit	29,988,000	
	Penataan Organisasi	**Kabupaten Solok Selatan**	**Indeks Kematangan Kelembagaan**	**36**	**300,000,000**	**Penataan Organisasi**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Indeks Kematangan Kelembagaan**	**36**	**320,000,000**	
		Kabupaten Solok Selatan	**Persentase Jabatan Yang Memiliki Standar Kompetensi**	**100 Persen**			**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Jabatan Yang Memiliki Standar Kompetensi**	**100 Persen**		
		Kabupaten Solok Selatan	**Nilai Sakip dari Komponen Pelaporan**	**10.3**			**Kabupaten Solok Selatan**	**Nilai Sakip dari Komponen Pelaporan**	**10.3**		
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Dokumen Anjab yang disusun dan Dievaluasi	33 Dokumen	100,000,000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Dokumen Anjab yang disusun dan Dievaluasi	33 Dokumen	40,000,000	
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Regulasi terkait penetapan standar kompetensi manajerial yang ditetapkan dan Dievaluasi	1 Dokumen			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Regulasi terkait penetapan standar kompetensi manajerial yang ditetapkan dan Dievaluasi	1 Dokumen		
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Regulasi Kelembagaan dan Analisa Jabatan yang dibentuk dan dievaluasi	33 Dokumen			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Regulasi Kelembagaan dan Analisa Jabatan yang dibentuk dan dievaluasi	33 Dokumen		
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Dokumen IKM dan Dokumen Standar Pelayanan OPD yang disusun dan dievaluasi	33 Dokumen	100,000,000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Dokumen IKM dan Dokumen Standar Pelayanan OPD yang disusun dan dievaluasi	33 Dokumen	180,000,000	
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang difasilitasi untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik	1 Dokumen			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang difasilitasi untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik	1 Dokumen		
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Dokumen Peta proses dan SOP yang disusun dan Dievaluasi	33 Dokumen			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Dokumen Peta proses dan SOP yang disusun dan Dievaluasi	33 Dokumen		
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Solok Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Dokumen Road Map RB Kabupaten Solok Selatan yang disusun dan dievaluasi	1 Dokumen	100,000,000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Solok Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Dokumen Road Map RB Kabupaten Solok Selatan yang disusun dan dievaluasi	1 Dokumen	100,000,000	
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	2 Dokumen			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	2 Dokumen		
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN					**420,000,000**					**959,998,956**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kabupaten Solok Selatan**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**420,000,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**959,998,956**	
		Kabupaten Solok	**Nilai SAKIP**	**85**			**Kabupaten**	**Nilai SAKIP**	**85**		
		Kabupaten Solok	**Nilai LPPD**	**3,12**			**Kabupaten**	**Nilai LPPD**	**3,12**		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
		Kabupaten Solok Selatan	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan**	**100 Persen**			**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan**	**100 Persen**		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian Perangkat**	**100 Persen**	-	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian Perangkat**	**100 Persen**	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**49,996,717**	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4 Majalah	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	0	-	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	100,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	49,996,717	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**30,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**77,984,635**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	30,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	77,984,635	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Solok Selatan	Persentase pelayanan keprotokolan yang dilaksanakan sesuai standar keprotokolan	**100 Persen**	**290,000,000**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Kabupaten Solok Selatan	Persentase pelayanan keprotokolan yang dilaksanakan sesuai standar keprotokolan	**100 Persen**	**832,017,604**	
	Fasilitasi Keprotokolan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah pelayanan keprotokolan yang dilaksanakan sesuai standar keprotokolan	100 Kali	90,000,000	Fasilitasi Keprotokolan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah pelayanan keprotokolan yang dilaksanakan sesuai standar keprotokolan	300 Kali	179,917,120	Meningkatnya jumlah pelayanan
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Media Publikasi publik yang mengakomodir kegiatan pimpinan	1 Media Publikasi	100,000,000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Media Publikasi publik yang mengakomodir kegiatan pimpinan	1 Media Publikasi	147,736,000	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kegiatan Pimpinan yang didokumentasikan dan dipublikasikan	100 Kali	100,000,000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kegiatan Pimpinan yang didokumentasikan dan dipublikasikan	300 Kali	504,364,484	Meningkatnya jumlah pendokumentasian tugas
BAGIAN PEMERINTAHAN					**785,000,000**					**340,000,000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kabupaten Solok Selatan**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**85,000,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**50,000,000**	
		Kabupaten Solok	**Nilai SAKIP**	**85**			**Kabupaten**	**Nilai SAKIP**	**85**		
		Kabupaten Solok	**Nilai LPPD**	**3,12**			**Kabupaten**	**Nilai LPPD**	**3,12**		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
		Kabupaten Solok Selatan	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan**	**100 Persen**			**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan**	**100 Persen**		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**60,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**20,000,000**	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	60,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	20,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**25,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**30,000,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	30,000,000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang**	**100 Persen**	**640,000,000**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang**	**100 Persen**	**260,000,000**	
	Administrasi Tata Pemerintahan	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase kebijakan yang ditetapkan dan dievaluasi**	**100 Persen**	**640,000,000**	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase kebijakan yang ditetapkan dan dievaluasi**	**100 Persen**	**260,000,000**	
		Kabupaten Solok Selatan	**Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD yang disusun tepat waktu**	**2 Dokumen**			**Kabupaten Solok Selatan**	**Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD yang disusun tepat waktu**	**2 Dokumen**		
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah kebijakan bidang administrasi pemerintahan yang dirumuskan dan dievaluasi	4 Dokumen	100,000,000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah kebijakan bidang administrasi pemerintahan yang dirumuskan dan dievaluasi	4 Dokumen	32,212,000	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kecamatan yang dibina	7 Kecamatan	100,000,000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kecamatan yang dibina	7 Kecamatan	40,000,000	
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Dokumen Pembakuan Rupa Bumi yang disusun	1 Dokumen			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Dokumen Pembakuan Rupa Bumi yang disusun	1 Dokumen		
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Dokumen Pencapaian Pelaksanaan SPM	1 Dokumen	440,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Dokumen Pencapaian Pelaksanaan SPM	1 Dokumen	187,788,000	
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Dokumen LKPJ dan LPPD yang disusun	2 Dokumen			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Dokumen LKPJ dan LPPD yang disusun	2 Dokumen		
		Kabupaten Solok Selatan	Persentase jumlah MoU yang ditindaklanjuti	100 Persen			Kabupaten Solok Selatan	Persentase jumlah MoU yang ditindaklanjuti	100 Persen		
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Hari Besar Nasional yang difasilitasi peringatannya	3 HBN			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Hari Besar Nasional yang difasilitasi peringatannya	3 HBN		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase segmen batas Nagari yang diselesaikan**	**62 Persen**	**60,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase segmen batas Nagari yang diselesaikan**	**62 Persen**	**30,000,000**	
	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase segmen batas kecamatan dan dokumen batas yang terselesaikan**	**62 Persen**	**60,000,000**	**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase segmen batas kecamatan dan dokumen batas yang terselesaikan**	**62 Persen**	**30,000,000**	
	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Nagari yang difasilitasi kesepakatan penyelesaian segmen Batasnya	29 Nagari	60,000,000	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Nagari yang difasilitasi kesepakatan penyelesaiau segmen Batasnya	24 Nagari	30,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					**6,012,000,000**					**9,520,000,000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kabupaten Solok Selatan**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**85,000,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**50,000,000**	
		Kabupaten Solok	**Nilai SAKIP**	**70**			**Kabupaten**	**Nilai SAKIP**	**70**		
		Kabupaten Solok	**Nilai LPPD**	**3,08**			**Kabupaten**	**Nilai LPPD**	**3,08**		
		Kabupaten Solok Selatan	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan**	**100 Persen**			**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan**	**100 Persen**		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**60,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**20,000,000**	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	60,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	20,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**25,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**30,000,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	30,000,000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang**	**100 Persen**	**5,927,000,000**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang**	**100 Persen**	**9,470,000,000**	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Terlaksananya kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan keagamaan**	**100 Persen**	**5,927,000,000**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Terlaksananya kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan keagamaan**	**100 Persen**	**9,470,000,000**	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kegiatan Hari Besar Islam yang diperingati	8 PHBI	5,727,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kegiatan Hari Besar Islam yang diperingati	8 PHBI	7,000,000,000	Meningkatnya Gaji Guru Tahfidz yang akan dibayarkan dan bertambahnya jumlah mesjid yang akan dikunjungi dan diberi bantuan
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Fasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji	2 Kali			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Fasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji	2 Kali		
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Event keagamaan yang difasilitasi	3 Event			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Event keagamaan yang difasilitasi	3 Event		
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Guru Tahfidz yang dibina	170 Orang			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Guru Tahfidz yang dibina	274 Orang		
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kafilah yang Fasilitasi	120 Orang			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kafilah yang Fasilitasi	120 Orang		
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Masjid yang dikunjungi dan diberi bantuan	25 Mesjid			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Masjid yang dikunjungi dan diberi bantuan	40 Mesjid		
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan bantuan operasional	5 Lembaga			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan bantuan operasional	5 Lembaga		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah UKS yang di Fasilitasi	3 UKS	100,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah UKS yang di Fasilitasi	3 UKS	70,000,000	
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah kebijakan bidang Kesejahteraan Sosial yang dirumuskan dan dievaluasi	4 Dokumen			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah kebijakan bidang Kesejahteraan Sosial yang dirumuskan dan dievaluasi	4 Dokumen		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat yang dirumuskan dan dievaluasi	4 Dokumen	100,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat yang dirumuskan dan dievaluasi	4 Dokumen	2,400,000,000	Bertambahnya jumlah beasiswa yang akan dibayarkan dan pembagian seragam gratis untuk siswa baru
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Beasiswa Bagi Siswa Tingkat SLTA yang diberikan	95 Orang				Jumlah Beasiswa Bagi Siswa Tingkat SLTA yang diberikan	95 Orang		
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Beasiswa Bagi Mahasiswa yang diberikan	50 Orang				Jumlah Beasiswa Bagi Mahasiswa yang diberikan	50 Orang		
BAGIAN HUKUM					**418,000,000**					**349,997,940**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kabupaten Solok Selatan**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**85,000,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**49,997,940**	
		Kabupaten Solok	**Nilai SAKIP**	**85**			**Kabupaten**	**Nilai SAKIP**	**85**		
		Kabupaten Solok	**Nilai LPPD**	**3,12**			**Kabupaten**	**Nilai LPPD**	**3,12**		
		Kabupaten Solok Selatan	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan**	**100 Persen**			**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan**	**100 Persen**		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**60,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**19,998,740**	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	60,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	19,998,740	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**25,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**29,999,200**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	29,999,200	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang**	**100 Persen**	**333,000,000**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang**	**100 Persen**	**300,000,000**	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah**	**100 Persen**	**333,000,000**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah**	**100 Persen**	**300,000,000**	
		Kabupaten Solok Selatan	**Jumlah kelompok sadar hukum**	**7 Kelompok**			**Kabupaten Solok Selatan**	**Jumlah kelompok sadar hukum**	**7 Kelompok**		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Nagari Yang dimonitoring dan dievaluasi	39 Nagari	125,000,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Nagari Yang dimonitoring dan dievaluasi	39 Nagari	120,000,000	
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah produk hukum yang diharmonisasi	12 Ranperda			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah produk hukum yang diharmonisasi	12 Ranperda		
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Pendapat hukum yang diberikan dan ditindaklanjuti	10 Pendapat Hukum	108,000,000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Pendapat hukum yang diberikan dan ditindaklanjuti	10 Pendapat Hukum	150,000,000	Bertambahnya honorarium tim pendamping bantuan
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah perkara yang tertangani	3 Perkara			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah perkara yang tertangani	3 Perkara		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah keluarga sadar hukum yang dibina	7 Kelompok			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah keluarga sadar hukum yang dibina	7 Kelompok		hukum
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Peraturan Daerah yang tertata melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	7 Perda	100,000,000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Peraturan Daerah yang tertata melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	7 Perda	30,000,000	
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Peraturan Daerah yang diinventarisasi	7 Perda			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Peraturan Daerah yang diinventarisasi	7 Perda		
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Peraturan Daerah yang disosialisasikan	7 Perda			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Peraturan Daerah yang disosialisasikan	7 Perda		
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA					**235,000,000**					**130,000,000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kabupaten Solok Selatan**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**85,000,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**50,000,000**	
		Kabupaten Solok	**Nilai SAKIP**	**85**			**Kabupaten**	**Nilai SAKIP**	**85**		
		Kabupaten Solok	**Nilai LPPD**	**3,12**			**Kabupaten**	**Nilai LPPD**	**3,12**		
		Kabupaten Solok Selatan	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan**	**100 Persen**			**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan**	**100 Persen**		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum**	**100 Persen**	**60,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum**	**100 Persen**	**20,000,000**	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	60,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	20,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**25,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**30,000,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	30,000,000	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang**	**100 Persen**	**150,000,000**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang**	**100 Persen**	**80,000,000**	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**120,000,000**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**55,000,000**	
	Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan BLUD	24 Kali	40,000,000	Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan BLUD	24 Kali	20,000,000	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan	10 Kali	40,000,000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan	10 Kali	15,000,000	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah perencanaan dan pengawasan ekonomin mikro kecil yang dilaksanakan	10 Kali	40,000,000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah perencanaan dan pengawasan ekonomin mikro kecil yang dilaksanakan	10 Kali	20,000,000	
	Pemantauan kebijakan sumber daya alam	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditetapkan dan dievaluasi**	**100 Persen**	**30,000,000**	**Pemantauan kebijakan sumber daya alam**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditetapkan dan dievaluasi**	**100 Persen**	**25,000,000**	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dilaksanakan	8 Kali	30,000,000	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dilaksanakan	8 Kali	25,000,000	
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					**235,000,000**					**130,000,000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kabupaten Solok Selatan**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**135,000,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**70,000,000**	
		Kabupaten Solok	**Nilai SAKIP**	**85**			**Kabupaten**	**Nilai SAKIP**	**85**		
		Kabupaten Solok	**Nilai LPPD**	**3,12**			**Kabupaten**	**Nilai LPPD**	**3,12**		
		Kabupaten Solok Selatan	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan**	**100 Persen**			**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan**	**100 Persen**		
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan pelaporan tepat waktu**	**6 Dokumen**	**50,000,000**	**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan pelaporan tepat waktu**	**6 Dokumen**	**20,000,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	20,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**60,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**20,000,000**	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	60,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	20,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**25,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**30,000,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	30,000,000	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100,000,000**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**60,000,000**	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase kebijakan pengendalian kegiatan pembangunan yang**	**100 Persen**	**100,000,000**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase kebijakan pengendalian kegiatan pembangunan yang**	**100 Persen**	**60,000,000**	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah rumusan kebijakan terkait pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	4 Dokumen	50,000,000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah rumusan kebijakan terkait pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	4 Dokumen	30,000,000	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan	12 Dokumen	50,000,000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan	12 Dokumen	30,000,000	
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					**335,000,000**					**205,000,000**	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kabupaten Solok Selatan**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**85,000,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 Persen**	**50,000,000**	
		Kabupaten Solok	**Nilai SAKIP**	**85**			**Kabupaten**	**Nilai SAKIP**	**85**		
		Kabupaten Solok	**Nilai LPPD**	**3,12**			**Kabupaten**	**Nilai LPPD**	**3,12**		
		Kabupaten Solok Selatan	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan**	**100 Persen**			**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan**	**100 Persen**		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian Perangkat**	**100 Persen**	-	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian Perangkat**	**100 Persen**	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	13 Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan admiuistrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**60,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**20,000,000**	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	60,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	20,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**25,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 Persen**	**30,000,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	30,000,000	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang**	**100 Persen**	**250,000,000**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang**	**100 Persen**	**155,000,000**	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase realisasi pengadaan barang dan jasa tepat waktu**	**100 Persen**	**250,000,000**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Kabupaten Solok Selatan**	**Persentase realisasi pengadaan barang dan jasa tepat waktu**	**100 Persen**	**155,000,000**	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Tender yang terlaksana melalui ULP	100 Buah	170,000,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Tender yang terlaksana melalui ULP	100 Buah	70,000,000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa dengan Aplikasi (SPSE)	100 Buah	55,000,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa dengan Aplikasi (SPSE)	100 Buah	70,000,000	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Perbup PBJ yang ditetapkan dan dievaluasi	2 Perbup	25,000,000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Perbup PBJ yang ditetapkan dan dievaluasi	2 Perbup	15,000,000	
		Kabupaten Solok Selatan	Jumlah sanggah dan pengaduan yang diproses	2 Dokumen			Kabupaten Solok Selatan	Jumlah sanggah dan pengaduan yang diproses	2 Dokumen		

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada beberapa Sub Kegiatan yang mana secara keseluruhan meningkatnya kebutuhan untuk penunjang kegiatan rutinitas kantor dan kebutuhan kantor, diantaranya sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   Adanya penambahan ASN sebanyak 5 orang pada tahun 2024 dan sesuai dengan perhitungan anggaran untuk kebutuhan Belanja Gaji dan Tunjangan (kenaikan pangkat dan berkala) ASN Sekretariat Daerah pada Tahun 2025.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   Munculnya Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai kebutuhan.
3. Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
   Adanya penambahan pengadaan kendaraan menjadi 5 unit untuk Tahun 2025.
4. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   Adanya penambahan anggaran untuk belanja instalasi listrik kantor untuk Tahun 2025.
5. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   Adanya penambahan anggaran untuk belanja instalasi listrik kantor untuk Tahun 2025.
6. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan
   Adanya penambahan anggaran untuk Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan untuk Tahun 2025.
7. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
   Adanya penambahan anggaran untuk kegiatan MTQ Nasional ke 41 Tahun 2025 di Kota Bukittinggi.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat yang

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Solok Selatan

Sekretariat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat/ Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir	Bantuan Pembangunan Mesjid Jorong Padang Alai	1 Unit	Sudah terakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2025
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat/ Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Nagari Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir	Bantuan Pembangunan Mesjid Di Jorong Tandai Simpang Tigo	1 Unit	Sudah terakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2025
3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat/ Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kecamatan Sangir Batang Hari dan Kecamatan Sangir Balai Janggo	Hibah Mesjid	1 Unit	Sudah terakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan perencanaan pembangunan diprioritaskan pada mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.

Sekretariat Daerah mendukung Prioritas kebijakan Nasional yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi PD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daeah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan agama	Persentase Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (7-15) Hafidz Quran 1 Juz
			Persentase Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (7 - 15) Hafidz Qur'an 2 Juz
			Persentase Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (7 - 15) Hafidz Qur'an lebih atau sama 3 Juz
			Peringkat MTQ Tingkat Provinsi
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya Kinerja dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai LPPD
			Nilai SAKIP
			Indeks Kematangan Kelembagaan
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Skala Kematangan UKPBJ
			Indeks Pelayanan Publik

3.3. Program dan Kegiatan

Penyusunan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan yang direncanakan dalam Renja mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan adalah :

- Rumusan program dan kegiatan yang dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan terkait dengan Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
- Target indikator strategis yang digunakan terhadap rumusan program dan kegiatan

Adapun program/kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
   a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, yang terdiri dari :
      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari :
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
   c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari :
      - Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
      - Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
      - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor
      - Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
      - Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu
      - Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
   d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :
      - Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari :
   - Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
   - Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
   - Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari :
   - Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan/dinas atau kendaraan dinas jabatan
   - Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

g. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang terdiri dari :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   - Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

h. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, yang terdiri dari :

- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah

i. Kegiatan Penataan Organisasi, yang terdiri dari :
- Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

j. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang terdiri dari :
- Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
- Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari :
   a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, yang terdiri dari :
      - Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
      - Sub Kegiatan Administrasi Kewilayahan
      - Sub Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
   b. Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari :
      - Sub Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual
      - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
      - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
   c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, yang terdiri dari :
      - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
      - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
      - Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
3. Program Perekonomian dan Pembangunan yang terdiri dari :
   a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, yang terdiri dari :

- Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

b. Kegiatan Pemantauan kebijakan sumber daya alam, yang terdiri dari :
- Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

c. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, yang terdiri dari :
- Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, yang terdiri dari :
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

4. Program Pengelolaan Perbatasan yang terdiri dari :
   a. Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan, yang terdiri dari :
      - Sub Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan

Adapun Program yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan ada 4 (empat) yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Bagian Umum, Program Perekonomian dan Pembangunan terdapat pada Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdapat pada Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat. Program Pengelolaan Perbatasan juga terletak pada Bagian Pemerintahan. Untuk Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Seluruh program yang ada di Sekretariat Daerah bersumberkan dari APBD.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Adapun program dan kegiatan – kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEKRETARIAT DAERAH							**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**42,897,386,565**	**APBD**		**100 Persen**	**27,155,000,000**
BAGIAN UMUM									**24,365,549,969**				**14,599,000,000**
4	**01**	**01**	**2.1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**24,365,549,969**	**APBD**		**100 Persen**	**14,599,000,000**
						Nilai SAKIP	**Kabupaten Solok Selatan**	**85**				**90**	
						Nilai LPPD	**Kabupaten Solok Selatan**	**3,12**				**3,15**	
						Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**				**100 Persen**	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**12,403,437,244**	**APBD**		**100 Persen**	**11,789,000,000**
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Solok Selatan	102 Orang/Bulan	11,967,590,244	APBD		97 Orang/Bulan	10,269,000,000
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Solok Selatan	12 Dokumen	415,980,000	APBD		12 Dokumen	1,500,000,000
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Solok Selatan	1 Laporan	19,867,000	APBD		1 Laporan	20,000,000
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**2,691,440,900**	**APBD**		**100 Persen**	**1,170,000,000**

					PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	119,952,200	APBD		4 Paket	20,000,000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	120,128,600	APBD		4 Paket	20,000,000
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	120,002,400	APBD		4 Paket	-
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	149,995,000	APBD		4 Paket	-
4	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	119,946,700	APBD		4 Paket	30,000,000
4	01	04	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	967,769,000	APBD		4 Laporan	100,000,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	1,093,647,000	APBD		4 Laporan	1,000,000,000
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**3,093,634,400**	**APBD**		**100 Persen**	**750,000,000**
4	01	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	3 Unit	2,137,840,000	APBD		1 Unit	400,000,000
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	3 Unit	62,837,600	APBD		1 Unit	30,000,000
4	01	02	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Unit	892,956,800	APBD		10 Unit	320,000,000

					PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**4,234,080,500**	**APBD**		**100 Persen**	**390,000,000**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	15,000,000	APBD		4 Laporan	20,000,000
4	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	12 Laporan	349,713,000	APBD		4 Laporan	200,000,000
4	01	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	1,665,640,000	APBD		4 Laporan	170,000,000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	12 Laporan	2,203,727,500	APBD		4 Laporan	-
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**1,852,959,925**	**APBD**		**100 Persen**	**430,000,000**
4	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Solok Selatan	49 Unit	1,502,701,125	APBD		25 Unit	200,000,000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Solok Selatan	1 Unit	250,250,000	APBD		1 Unit	200,000,000
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	Kabupaten Solok Selatan	4 Unit	100,008,800	APBD		1 Unit	30,000,000
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase layanan kedinasan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**89,997,000**	**APBD**		**100 Persen**	**70,000,000**

					PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025				CATATA	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
4	01	01	2.12	03	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	89,997,000	APBD		4 Paket	70,000,000
KDH/WKDH									**6,526,881,700**				**3,526,000,000**
4	**01**	**01**	**2.1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**6,526,881,700**	**APBD**		**100 Persen**	**3,526,000,000**
						Nilai SAKIP	**Kabupaten Solok**	**85**				**90**	
						Nilai LPPD	**Kabupaten Solok**	**3,12**				**3,15**	
						Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**				**100 Persen**	
4	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian Perangkat**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	-	APBD		**100 Persen**	-
4	01	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Solok Selatan	0	-	APBD		0	-
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**1,944,949,800**	**APBD**		**100 Persen**	**1,160,000,000**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	50,000,000	APBD		4 Paket	20,000,000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	99,977,800	APBD		4 Paket	20,000,000
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	44,999,200	APBD		4 Paket	-
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	200,000,000	APBD		4 Paket	-
4	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	49,999,800	APBD		4 Paket	20,000,000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	499,988,000	APBD		4 Laporan	100,000,000

					PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	999,985,000	APBD		4 Laporan	1,000,000,000
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**1,000,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**100,000,000**
4	01	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung/kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaran pendukung gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Kabupaten Solok Selatan	15 Unit	1,000,000,000	APBD		1 Unit	100,000,000
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**406,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**215,000,000**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	6,000,000	APBD		4 Laporan	20,000,000
4	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	250,000,000	APBD		12 Laporan	120,000,000
4	01	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	150,000,000	APBD		4 Laporan	75,000,000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	12 Laporan	-	APBD		12 Laporan	-
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**519,990,700**	**APBD**		**100 Persen**	**325,000,000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan/dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Solok Selatan	8 Unit	499,990,700	APBD		8 Unit	300,000,000

					PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaran dinas/operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Solok Selatan	8 Unit	20,000,000	APBD		8 Unit	25,000,000
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase layanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**1,155,958,400**	**APBD**		**100 Persen**	**826,000,000**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Solok Selatan	2 Orang	166,000,000	APBD		2 Orang	166,000,000
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	499,958,400	APBD		4 Paket	200,000,000
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Kabupaten Solok Selatan	8 Orang	90,000,000	APBD		8 Orang	60,000,000
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Solok Selatan	2 Orang	400,000,000	APBD		2 Orang	400,000,000
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase layanan kedinasan Sekretaris Daerah yang terfasilitasi**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**1,499,982,800**	**APBD**		**100 Persen**	**900,000,000**
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	799,983,200	APBD		4 Paket	500,000,000
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	699,999,600	APBD		4 Paket	400,000,000
BAGIAN ORGANISASI									**369,958,000**				**385,000,000**
4	**01**	**01**	**2.1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**369,958,000**	**APBD**		**100 Persen**	**385,000,000**
						Nilai SAKIP	**Kabupaten Solok**	**85**				**90**	

					PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						Nilai LPPD	**Kabupaten Solok**	**3,12**				**3,15**	
						Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**				**100 Persen**	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**19,970,000**	**APBD**		**100 Persen**	**60,000,000**
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	19,970,000	APBD		4 Laporan	60,000,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**29,988,000**	**APBD**		**100 Persen**	**25,000,000**
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Solok Selatan	2 Unit	29,988,000	APBD		2 Unit	25,000,000
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Indeks Kematangan**	**Kabupaten Solok**	**36**	**320,000,000**	**APBD**		**39**	**300,000,000**
						Persentase Jabatan Yang Memiliki Standar	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**				**100 Persen**	
						Nilai Sakip dari Komponen Pelaporan	**Kabupaten Solok Selatan**	**10.3**				**10.4**	
4	01	04	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Anjab yang disusun dan Dievaluasi	Kabupaten Solok Selatan	33 Dokumen	40,000,000	APBD		33 Dokumen	100,000,000
						Jumlah Regulasi terkait penetapan standar kompetensi manajerial yang ditetapkan dan Dievaluasi	Kabupaten Solok Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
						Jumlah Regulasi Kelembagaan dan Analisa Jabatan yang dibentuk dan dievaluasi	Kabupaten Solok Selatan	33 Dokumen				33 Dokumen	

					PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
4	01	04	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen IKM dan Dokumen Standar Pelayanan OPD yang disusun dan dievaluasi	Kabupaten Solok Selatan	33 Dokumen	180,000,000	APBD		33 Dokumen	100,000,000
						Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang difasilitasi untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik	Kabupaten Solok Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
						Jumlah Dokumen Peta proses dan SOP yang disusun dan Dievaluasi	Kabupaten Solok Selatan	33 Dokumen				33 Dokumen	
4	01	04	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Road Map RB Kabupaten Solok Selatan yang disusun dan dievaluasi	Kabupaten Solok Selatan	1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	100,000,000
						Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	Kabupaten Solok Selatan	2 Dokumen				2 Dokumen	
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN									**959,998,956**				**480,000,000**
4	**01**	**01**	**2.1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**959,998,956**	**APBD**		**100 Persen**	**480,000,000**
						Nilai SAKIP	**Kabupaten Solok**	**70**				**80**	
						Nilai LPPD	**Kabupaten Solok**	**3,08**				**3,10**	
						Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**				**100 Persen**	
4	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian Perangkat**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	-	APBD		**100 Persen**	20,000,000
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Solok Selatan	0	-	APBD		40 Orang	20,000,000
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**49,996,717**	**APBD**		**100 Persen**	**140,000,000**

					PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kabupaten Solok Selatan	0	-	APBD		4 Majalah	40,000,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	49,996,717	APBD		4 Laporan	100,000,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**77,984,635**	**APBD**		**100 Persen**	**30,000,000**
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Solok Selatan	2 Unit	77,984,635	APBD		2 Unit	30,000,000
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase pelayanan keprotokolan yang dilaksanakan sesuai standar keprotokolan**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**832,017,604**	**APBD**		**100 Persen**	**290,000,000**
4	01	04	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah pelayanan keprotokolan yang dilaksanakan sesuai standar keprotokolan	Kabupaten Solok Selatan	300 Kali	179,917,120	APBD		100 Kali	90,000,000
4	01	04	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Media Publikasi publik yang mengakomodir kegiatan pimpinan	Kabupaten Solok Selatan	1 Media Publikasi	147,736,000	APBD		1 Media Publikasi	100,000,000
4	01	04	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pimpinan yang didokumentasikan dan dipublikasikan	Kabupaten Solok Selatan	300 Kali	504,364,484	APBD		100 Kali	100,000,000
BAGIAN PEMERINTAHAN									**340,000,000**				**820,000,000**
4	**01**	**01**	**2.1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**50,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**85,000,000**
						Nilai SAKIP	**Kabupaten Solok**	**85**				**90**	
						Nilai LPPD	**Kabupaten Solok**	**3,12**				**3,15**	

					PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**				**100 Persen**	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**20,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**60,000,000**
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	20,000,000	APBD		4 Laporan	60,000,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**30,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**25,000,000**
4	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Solok Selatan	1 Unit	30,000,000	APBD		1 Unit	25,000,000
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**260,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**670,000,000**
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase kebijakan yang ditetapkan dan dievaluasi**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**260,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**670,000,000**
						Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD yang disusun tepat waktu	**Kabupaten Solok Selatan**	**2 Dokumen**		**APBD**		**2 Dokumen**	
4	1	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah kebijakan bidang administrasi pemerintahan yang dirumuskan dan dievaluasi	Kabupaten Solok Selatan	4 Dokumen	32,212,000	APBD		4 Dokumen	100,000,000
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kecamatan yang dibina	Kabupaten Solok Selatan	7 Kecamatan	40,000,000	APBD		7 Kecamatan	100,000,000
						Jumlah Dokumen Pembakuan Rupa Bumi yang disusun	Kabupaten Solok Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Pencapaian Pelaksanaan SPM	Kabupaten Solok Selatan	1 Dokumen	187,788,000	APBD		1 Dokumen	470,000,000

					PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						Jumlah Dokumen LKPJ dan LPPD yang disusun	Kabupaten Solok Selatan	2 Dokumen				2 Dokumen	
						Persentase jumlah MoU yang ditindaklanjuti	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen				100 Persen	
						Jumlah Hari Besar Nasional yang difasilitasi peringatannya	Kabupaten Solok Selatan	3 HBN				3 HBN	
5	**07**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**Persentase segmen batas Nagari yang diselesaikan**	**Kabupaten Solok Selatan**	**62 Persen**	**30,000,000**	**APBD**		**74 Persen**	**65,000,000**
5	**07**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	**Persentase segmen batas kecamatan dan dokumen batas yang terselesaikan**	**Kabupaten Solok Selatan**	**62 Persen**	**30,000,000**	**APBD**		**74 Persen**	**65,000,000**
5	01	2	2.02	01	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Nagari yang difasilitasi kesepakatan penyelesaian segmen Batasnya	Kabupaten Solok Selatan	24 Nagari	30,000,000	APBD		39 Nagari	65,000,000
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									**9,520,000,000**				**6,082,000,000**
4	**01**	**01**	**2.1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**50,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**85,000,000**
						Nilai SAKIP	**Kabupaten Solok**	**85**				**90**	
						Nilai LPPD	**Kabupaten Solok**	**3,12**				**3,15**	
						Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**				**100 Persen**	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**20,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**60,000,000**
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	20,000,000	APBD		4 Laporan	60,000,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**30,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**25,000,000**

					PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Solok Selatan	2 Unit	30,000,000	APBD		2 Unit	25,000,000
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**9,470,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**5,997,000,000**
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Terlaksananya kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan keagamaan**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**9,470,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**5,997,000,000**
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Hari Besar Islam yang diperingati	Kabupaten Solok Selatan	8 PHBI	7,000,000,000	APBD		8 PHBI	5,797,000,000
						Jumlah Fasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji	Kabupaten Solok Selatan	2 Kali				2 Kali	
						Jumlah Ulama, Dai, Khatib, Imam Masjid dan Guru MDA yang dibina	Kabupaten Solok Selatan	150 Orang				150 Orang	
						Jumlah Event keagamaan yang difasilitasi	Kabupaten Solok Selatan	3 Event				3 Event	
						Jumlah Guru Tahfidz yang dibina	Kabupaten Solok Selatan	170 Orang				200 Orang	
						Jumlah Kafilah yang Fasilitasi	Kabupaten Solok Selatan	120 Orang				100 Orang	
						Jumlah Masjid yang dikunjungi dan diberi bantuan	Kabupaten Solok Selatan	25 Mesjid				35 Mesjid	
						Jumlah Wirid dan Jumlah Tausiah yang dilaksanakan	Kabupaten Solok Selatan	28 Kali				28 Kali	
						Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan bantuan operasional	Kabupaten Solok Selatan	5 Lembaga				5 Lembaga	
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja	Jumlah UKS yang di Fasilitasi	Kabupaten Solok Selatan	3 UKS	70,000,000	APBD		3 UKS	100,000,000

					PROGRAM/KEGIATAN/SUB terkait Kesejahteraan Sosial	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						Jumlah kebijakan bidang Kesejahteraan Sosial yang dirumuskan dan dievaluasi	Kabupaten Solok Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
						Jumlah Beasiswa Bagi Siswa Tingkat SLTA yang diberikan	Kabupaten Solok Selatan	95 Orang				95 Orang	
						Jumlah Beasiswa Bagi Mahasiswa yang diberikan	Kabupaten Solok Selatan	50 Orang				50 Orang	
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat yang dirumuskan dan dievaluasi	Kabupaten Solok Selatan	4 Dokumen	2,400,000,000	APBD		4 Dokumen	100,000,000
BAGIAN HUKUM									**349,997,940**				**418,000,000**
4	**01**	**01**	**2.1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**49,997,940**	**APBD**		**100 Persen**	**85,000,000**
						Nilai SAKIP	**Kabupaten Solok**	**85**				**90**	
						Nilai LPPD	**Kabupaten Solok**	**3,12**				**3,15**	
						Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**				**100 Persen**	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**19,998,740**	**APBD**		**100 Persen**	**60,000,000**
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	19,998,740	APBD		4 Laporan	60,000,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**29,999,200**	**APBD**		**100 Persen**	**25,000,000**
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Solok Selatan	2 Unit	29,999,200	APBD		2 Unit	25,000,000
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**300,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**333,000,000**

					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**300,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**333,000,000**
						Jumlah kelompok sadar hukum	**Kabupaten Solok Selatan**	**7 Kelompok**		**APBD**		**7 Kelompok**	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Nagari Yang dimonitoring dan dievaluasi produk hukumnya	Kabupaten Solok Selatan	39 Nagari	120,000,000	APBD		39 Nagari	150,000,000
						Jumlah produk hukum yang diharmonisasi	Kabupaten Solok Selatan	12 Ranperda				12 Ranperda	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pendapat hukum yang diberikan dan ditindaklanjuti	Kabupaten Solok Selatan	10 Pendapat Hukum	150,000,000	APBD		10 Pendapat Hukum	108,000,000
						Jumlah perkara yang tertangani	Kabupaten Solok Selatan	3 Perkara				3 Perkara	
						Jumlah keluarga sadar hukum yang dibina	Kabupaten Solok Selatan	7 Kelompok				7 Kelompok	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Peraturan Daerah yang tertata melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kabupaten Solok Selatan	7 Perda	30,000,000	APBD		7 Perda	75,000,000
						Jumlah Peraturan Daerah yang diinventarisasi	Kabupaten Solok Selatan	7 Perda				7 Perda	
						Jumlah Peraturan Daerah yang disosialisasikan	Kabupaten Solok Selatan	7 Perda				7 Perda	
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA									**130,000,000**				**235,000,000**
4	**01**	**01**	**2.1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**50,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**85,000,000**
						Nilai SAKIP	**Kabupaten Solok**	**85**				**90**	
						Nilai LPPD	**Kabupaten Solok**	**3,12**				**3,15**	
						Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**				**100 Persen**	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**20,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**60,000,000**

					PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	20,000,000	APBD		4 Laporan	60,000,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**30,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**25,000,000**
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Kabupaten Solok Selatan	2 Unit	30,000,000	APBD		2 Unit	25,000,000
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**80,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**150,000,000**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang dilaksanakan**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**55,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**120,000,000**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan BLUD	Kabupaten Solok Selatan	24 Kali	20,000,000	APBD		24 Kali	40,000,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan	Kabupaten Solok Selatan	10 Kali	15,000,000	APBD		10 Kali	40,000,000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah perencanaan dan pengawasan ekonomin mikro kecil yang dilaksanakan	Kabupaten Solok Selatan	10 Kali	20,000,000	APBD		10 Kali	40,000,000
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan kebijakan sumber daya alam**	**Persentase pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditetapkan dan dievaluasi**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**25,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**30,000,000**
4	01	03	2.04	01	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dilaksanakan	Kabupaten Solok Selatan	8 Kali	25,000,000	APBD		8 Kali	30,000,000

					PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									**130,000,000**				**235,000,000**
4	**01**	**01**	**2.1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**70,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**135,000,000**
						Nilai SAKIP	**Kabupaten Solok**	**85**				**90**	
						Nilai LPPD	**Kabupaten Solok**	**3,12**				**3,15**	
						Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**				**100 Persen**	
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan pelaporan tepat waktu**	**Kabupaten Solok Selatan**	**6 Dokumen**	**20,000,000**	**APBD**		**6 Dokumen**	**50,000,000**
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pengganggaran perangkat daerah yang disusun	Kabupaten Solok Selatan	6 Dokumen	20,000,000	APBD		6 Dokumen	50,000,000
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**20,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**60,000,000**
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	20,000,000	APBD		4 Laporan	60,000,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**30,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**25,000,000**
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Kabupaten Solok Selatan	2 Unit	30,000,000	APBD		2 Unit	25,000,000
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**60,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**100,000,000**

					PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase kebijakan pengendalian kegiatan pembangunan yang diterbitkan**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**60,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**100,000,000**
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan terkait pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Kabupaten Solok Selatan	4 Dokumen	30,000,000	APBD		4 Dokumen	50,000,000
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan	Kabupaten Solok Selatan	12 Dokumen	30,000,000	APBD		12 Dokumen	50,000,000
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA									**205,000,000**				**375,000,000**
4	**01**	**01**	**2.1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**50,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**125,000,000**
						Nilai SAKIP	**Kabupaten Solok**	**85**				**90**	
						Nilai LPPD	**Kabupaten Solok**	**3,12**				**3,15**	
						Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**				**100 Persen**	
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian Perangkat**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	-	**APBD**		**100 Persen**	**40,000,000**
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kabupaten Solok Selatan	0	-	APBD		13 Orang	20,000,000
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Solok Selatan	0	-	APBD		100 Orang	20,000,000
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**20,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**60,000,000**

					PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	20,000,000	APBD		30 Kali	60,000,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**30,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**25,000,000**
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Solok Selatan	2 Unit	30,000,000	APBD		2 Unit	25,000,000
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**155,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**250,000,000**
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase realisasi pengadaan barang dan jasa**	**Kabupaten Solok Selatan**	**100 Persen**	**155,000,000**	**APBD**		**100 Persen**	**250,000,000**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Tender yang terlaksana melalui ULP	Kabupaten Solok Selatan	100 Buah	70,000,000	APBD		100 Buah	170,000,000
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa dengan Aplikasi (SPSE)	Kabupaten Solok Selatan	100 Buah	70,000,000	APBD		100 Buah	55,000,000
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Perbup PBJ yang ditetapkan dan dievaluasi	Kabupaten Solok Selatan	2 Perbup	15,000,000	APBD		2 Perbup	25,000,000
						Jumlah sanggah dan pengaduan yang diproses	Kabupaten Solok Selatan	2 Dokumen				2 Dokumen	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2025 apabila menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana dalam RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang mempunyai satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Seluruh bagian di Sekretariat Daerah secara bersama-sama bertanggungjawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
b. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.2. Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan Perangkat Daerah.

Padang Aro, Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH

Dr. H. SYAMSURIZALDI, SIP, SE, MM
NIP. 19731230 199303 1 002

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan ucapan terima kasih atas dukungan dari semua pihak, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan ini diharapkan dapat menjadi arahan dan pedoman serta motivasi dalam upaya peningkatan kinerja bagi para pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian pengantar Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, karena kelemahan dan keterbatasan yang ada, maka kami harapkan masukan semua pihak guna penyempurnaan lebih lanjut, terima kasih.

Padang Aro, Juli 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SOLOK SELATAN

DELVI, S.Sos., MM
NIP. 19661118 199303 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 6

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 17

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 20

2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD 23

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 35

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 34

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 34

3.3. Program dan Kegiatan 35

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 38

BAB VI. PENUTUP **47**

DAFTAR TABEL

Tabel TC. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 9

Tabel TC. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan 19

Tabel TC. 31 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan 25

Tabel TC. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 33

Tabel TC. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan bahwa kedudukandan fungsi DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Daerah.

Dalam rumusan Undang-undang tersebut penyelenggaraan Pemerintah di Daerah dapat terwujud melalui kerjasama yang baik dan serasi antara Kepala Daerah dengan DPRD. Lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-undang tersebut bahwa tugas pokok DPRD adalah merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan Daerah, bersama Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut antara lain dituangkan dalam Arah Kebijakan Umum sebagai acuan penyusunan APBD pada setiap tahunnya. Disamping itu DPRD adalah lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi yaitu membentuk Peraturan Daerah bersama dengan Bupati.
2. Fungsi Anggaran yaitu menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan Bupati.
3. Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang dan Perda kepada Bupati dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja

Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undangn Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Didalam Rencana Kerja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai pejabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Tahunan Daerah. Selain itu guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh perangkat daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025. Oleh karena itu, penyusunanRencana Kerja Sekretariat DPRD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Sekretariat DPRD, evaluasi kinerja pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD.

Rencana Kerja ini memeliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, karena disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedman bagi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini didasarkan pada :

1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

8 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2011 Nomor 2);

9 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

11 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026;

12 Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan;

13 Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

1.3. Maksuddan Tujuan

Maksud:

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang target dan perioritas kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2025.

Tujuan:

Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 serta untuk merencanakan dan memprediksi kebutuhan anggaran pada Sekretariat

DPRD dalam membiayai pelaksanaan kegiatan Tahun 2025. Serta memberikan pedoman sehingga terciptanya keterpaduan, kebersamaan dan tanggung jawab Sekretariat DPRD, sekaligus untuk dapat memberikan dorongan motivasi, pembangunan inisiatif dan kreatifitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada dalam rangka peningkatan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud danTujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN2023

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja PelayananSekretariat DPRD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, Review terhadap Rancangan awal RKPD, Penelaahan usulan Program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Kaidah-kaidah Pelaksanaan, rencana tindak lanjut serta catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BABV : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan.

Pada bagian ini diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan serta progres capaian kinerja dalam renstra periode 2021-2026, sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Sekretariat DPRD melaksanakan Program dan Kegiatannya.

Untuk pelaksanaan rencana kerja Tahun 2023 pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan.

Capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2023 yang tertuang dalam renstra Sekretariat DPRD berupa program dan kegiatan yang telah disusun sebagai penunjang pelaksanaan fungsi DPRD diperkirakan pelaksanaannya akan sesuai dengan target yang direncanakan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel review evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan tahun 2023 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023, yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi untuk belanja Pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.881.905.670,- dan Belanja Barang Jasa alokasi anggarannya sebesar Rp. 14.638.711.124,- sedangkan Belanja Modal adalah belanja modal peralatan dan mesin

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131.470.678,-. Belanja terdiri dari 2 Program dan 14 Kegiatan dengan 35 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar *Rp.26.581.910.853,-* dan terealisasi sebesar *Rp.25.369.998.823,-* atau (95,44%). Sedangkan secara fisik mencapai 95,44%.

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

   Untuk tahun 2023program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik dikarena kegiatan ini direncanakan pada akhir tahun dan dengan adanya keterbatasan waktu serta padatnya kegiatan DPRD sehingga kegiatan ini belum bisa optimal dan dilanjutkan di tahun 2024

b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

   Secara umum program / kegiatan yang dilaksanakan rata-rata realisasi keuangan di atas 80% dan realisasi fisik tercapai 95-100% telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Untuk tahun anggaran 2023 tidak ada kegiatan yang melebihi target kegiatan. Pada umumnya memenuhi target rata-rata kegiatan.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

   Pada tahun 2023 tidak ada program / kegiatan yang tidak memenuhi atau melebihi target

   1) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD

      Pada dasarnya tidak ada program/kegiatan yang tidak mencapai target. Andaipun ada yang hanya mencapai target minimal, hal ini tidak terlalu memberikan dampak/pengaruh yang signifikan.

   2) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tidak tercapainya

program/kegiatan

Tindakan ataupun kebijakan yang diambil agar teratasinya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaranya itu dengan melakukan perencanaan yang berbasis kinerja.

Berikut ini dapat disajikan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 sesuai dengan tabel 2.1 berikut ini :

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2024

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Cpaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9 = (7/6)*100	10	11=6+8+10	12=(11/5)*100
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**Persen**	100	33	**100**	**95**	95	**100**	65,50	65,50
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	100	32	**100**	**99**	99	**100**	65,17	65,17
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dan Anggota DPRD	Orang/Bulan	348	116	50	50	100	58	224	64,37
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminsitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24	8	4	4	100	4	16	66,67
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	100	25	**100**	**75**	75	**100**	54,17	54,17
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan ASDEKSI	Orang	162	36	33	6	18,18	24	66	40,74
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	100	51	**100**	**95**	95	**100**	83,50	83,50

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Cpaian Realisasi Target Renstra (%)
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	24	8	4	4	100	4	16	66,67
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	24	8	4	4	100	4	16	66,67
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	24	8	4	4	100	4	16	66,67
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	24	8	4	4	100	4	16	66,67
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	24	8	4	4	100	4	16	66,67
4	02	01	2.06	06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	16	0	4	4	100	4	8	50,00
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	8	4	4	100	4	16	66,67
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PEMDA**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**Persen**	100	2	100	100	0	**100**	35,33	35,33
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang disediakan	Unit	4	0	0	0	0	1	1	25,00
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	44	1	2	6	300	12	19	43,18

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Cpaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	10	0	0	0	0	2	2	20,00
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	5	2	0	0	0	1	3	60,00
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakannya	Unit	5	0	2	0	0	1	1	20,00
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia**	**Persen**	100	22	**100**	**92**	92	**100**	54,00	54,00
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	8	4	4	100	4	16	66,67
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	24	8	4	4	100	4	16	66,67
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	20	0	4	4	100	0	4	20,00
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PEMDA**		**Persen**	**100**	40	**100**	**83**	83	**100**	70,50	70,50
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaranan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	2	1	1	100	1	4	66,67

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Cpaian Realisasi Target Renstra (%)
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diperlihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	12	6	6	100	6	24	66,67
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	Unit	24	8	4	4	100	4	16	66,67
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terfasilitasi**	**Persen**	100	32	**100**	**100**	100	**100**	65,33	65,33
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	34	55	6	7	116,67	6	68	200,00
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	150	50	25	25	100	25	100	66,67
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Layanan Administrasi DPRD**	**Persen**	100	46	**100**	**100**	100	**100**	79,33	79,33
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	24	8	4	4	100	4	16	66,67
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas menjadi Perda**	**Persen**	**100**	35	**100**	**92**	92	**100**	67,00	67,00
						Jumlah Perda Inisiatif yang diterbitkan	**Perda**	**6**	0	**1**	**0**	0	**1**	0,17	2,78

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Cpaian Realisasi Target Renstra (%)
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persentase Ranperda Usulan Pemda yang dibahas DPRD menjadi Perda**	**Persen**	**100**	42	**100**	**98**	98	**100**	75,00	75,00
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	36	13	6	5	83,33	6	24	66,67
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	4	0	1	1	0	1	2	50,00
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang disahkan**	**Persen**	**100**		**100**	**95**		**100**	32,50	32,50
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	10		2	2		2	4	40,00
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	10		2	2		2	4	40,00
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	10					2	2	20,00
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	10		2	2		2	4	40,00
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	16	**100**	**99**	99	**100**	49,17	49,17

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Cpaian Realisasi Target Renstra (%)
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Ururan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	24	4	4	4	100	4	12	50,00
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Ururan Pemerintah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	24	4	4	4	100	4	12	50,00
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Ururan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	24	4	4	4	100	4	12	50,00
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Ururan Pemerintah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	24	0	0	0	0	4	4	16,67
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Ururan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	20	0	0	0	0	4	4	20,00
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	20	4	4	1	25	4	9	45,00
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	20	0	0	0	0	4	4	20,00

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Cpaian Realisasi Target Renstra (%)
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	20	0	0	0	0	4	4	20,00
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	33	**100**	**98**	98	**100**	66,00	66,00
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	8	0	0	0	0	4	4	50,00
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	24	8	4	4	100	4	16	66,67
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	24	8	4	4	100	4	16	66,67
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	12	0	0	0	0	3	3	25,00
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	35	7	7	7	100	7	21	60,00
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD**	**Persen**	100	26	**100**	**99**	99	**100**	59,17	59,17
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	20	0	0	0	0	4	4	20,00
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	16	0	0	0	0	4	4	25,00
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	18	6	3	3	100	3	12	66,67

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Cpaian Realisasi Target Renstra (%)
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persen**	100	0	**0**	**0**	0	**100**	16,67	16,67
4	02	02	2.06		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	20	0	0	0	0	4	4	20,00
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**Persen**	**100**	37	**100**	**85**	85	**100**	67,83	67,83
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	36	12	6	6	100	6	24	66,67
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	16	0	4	4	100	4	8	50,00

Penjelasan dari Tabel diatas adalah sebagai berikut :

- Kolom 5 merupakan kondisi target kinerja capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 di akhirperiodeRenstra.
- Kolom 7 merupakan kondisi target kinerja program kegiatan tahun 2023 dikosongkankarenaberdasarkanRenstratahun 2016-2021.
- Kolom 11 merupakan perkiraan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 merupakan tahun keempat pada RenstraTahun 2021-2026.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Namun disisi lain juga adanya keterbatasan sumber daya aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, setiap Daerah diamanatkan untuk melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah setiap tahunnya yang meliputi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi yaitu :

1) Fasilitasi rapat anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan;
2) Menyampaikan bahan pertimbangan kepada DPRD dalam pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
3) Melaksanakan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan;

4) Pengelolaan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian (tenaga ahli), mengelola keuangan dan pembekalan DPRD;
5) Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan DPRD; dan
6) Membina ketertiban serta keamanan dalam acara-acara persidangan.

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

a. Sekretaris Dewan (Eselon II/b)
b. Kepala Bagian Umum dan Humas (Eselon III/a)
    1. Subbag Umum, Kepegawaian dan Humas (Eselon IV/a)
    2. Kelompok JF
c. Kepala Bagian Fasilitasi Hukum dan Persidangan (Eselon III/a)
    1. Kelompok JF
d. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Persidangan (Eselon III/a)
    1. Kelompok JF

Secara lengkap Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

No	Indikator	SPM	IKK/IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*		*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas menjadi Perda		✓	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Jumlah Perda Inisiatif yang diterbitkan		✓	1	1	1	1	0	1	1%	1%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permendagri nomor 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, kemudian Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan.

Dengan struktur organisasi tipe C, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari tiga bagian dengan masing-masing dua subbagian. Pembagian tersebut bisa dianalisis bahwa sesuai dengan Permendagri 104 tahun 2016 Sekretariat DPRD lebih memperkuat fungsi dan tugas pokok sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada Pemangku Kepentingan dalam hal ini adalah Anggota DPRD yang terdiri dari unsur pimpinan dan anggota DPRD.

a. Tingkat Pelayanan kinerja OPD.

   Dalam menyelenggarakan tugas dan pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada paragraf 2 Pasal 9 (5), dimana Sekretariat DPRD melaksanakan fungsinya sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi; 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi; 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi. Fungsi tersebut diatas akan dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD sebagai pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD yang akan dijabarkan oleh masing-masing bagian di Sekretariat DPRD.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.

   Permasalahan :

   Belum optimalnya peran legislatif dalam inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah

   Penyebab :

   Kurangnya inisiatif legislatif dalam inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan 2021–2026 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi Ketiga yaitu: "***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani***" dengan tujuan RPJMD "***Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih***" yang akan dilaksanakan melalui program–program OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi.Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan, bisa digambarkan melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi.

Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika komplek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada : 1) Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik. 2) Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi

dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan selama beberapa waktu kedepan dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Kondisi internal, yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan :
   a. Kekuatan (strengths)

      Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antaralain : 1) Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan; 2) Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD; 3) Kemandirian dalam rangka optimalisasi fasilitasi terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 4) Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi.

   b. Kelemahan (weaknesses)

      Pada sisi kelemahan, terdapat faktor-faktor yaitu: "Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan".

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :
   a. Peluang (Opportunities)

      Pada sisi peluang, terdapat faktor-faktor strategis antara lain: 1) Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan public ke depan;

b. Tantangan/ancaman/hambatan (Threats)

Pada sisi tantangan/ancaman/hambatan, terdapat faktor-faktor strategis antara lain: 1) Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat; 2) Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan

e. Dari isu-isu penting dan peluang yang kami kemukakan di atas maka untuk tahun 2025 kami akan berusaha dan merekomendasikan dengan Memberikan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan Fungsi, Tugas, Wewenang dan hak dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dan Memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke Sekretariat DPRD kabupaten Solok Selatan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) OPD tahun 2025DPRD dan berdampak kepada Visi dan Misi kepala Daerah dengan mewujudkan "***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani***" merumuskan program dan kegiatan yang akan dirumuskan/dikemukakan pada penelaahan usulan program dan kegiatan Rencana Kerja ini

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021–2026 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rancangan rencana kerja memuat

informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan, dan identifikasi program/kegiatan yang akan didanai dengan APBD. Sehingga dalam mendukung pencapaian kebijakan tersebut maka Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan menetapkan program prioritas, Program prioritas tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan (Program/Kegiatan) dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

TABEL 2.3
RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

RANCANGAN AWAL RKPD (Ambil dari Renstra 2024)						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan..										
	Bidang Urusan..				**26.700.000.000**					**32.169.390.989**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100**	**15.700.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100**	**17.669.873.989**	
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**13.144.840.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**13.537.175.739**	
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dan Anggota DPRD	58	13.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dan Anggota DPRD	50	13.394.495.739	
2)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminsitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	144.840.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminsitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	142.680.000	
2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**30.000.000**	
3)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat DPRD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan ASDEKSI	24	100.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal	Sekretariat DPRD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan ASDEKSI	6	30.000.000	
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**696.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**880.757.700**	
4)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	51.640.900	

RANCANGAN AWAL RKPD (Ambil dari Renstra 2024)						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	60.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	50.000.000	
6)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	50.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	44.968.200	
7)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	120.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	140.019.600	
8)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	116.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	150.003.000	
9)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	200.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	150.000.000	
10)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	120.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	294.126.000	
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PEMDA**		**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**100**	243.220.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PEMDA**		**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**100**	141.792.500	
11)	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang disediakan	1	55.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang disediakan	3	-	
12)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	8	90.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	4	70.960.000	
13)	Pengadaan Mebel	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4	25.000.000	Pengadaan Mebel	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3	70.832.500	
14)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	43.220.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	-	
15)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakannya	1	30.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakannya	0	-	

RANCANGAN AWAL RKPD (Ambil dari Renstra 2024)						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda**		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia**	**100**	**270.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda**		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia**	**100**	**1.638.727.650**	
16)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	5.000.000	
17)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4	92.727.650	
18)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	60.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	50.000.000	
19)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4	1.491.000.000	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PEMDA**		**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100**	**329.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PEMDA**		**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100**	**455.482.400**	
19)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaranan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	115.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaranan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	182.566.300	
20)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diperlihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	114.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diperlihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	223.057.000	
21)	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	4	100.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	4	49.859.100	

RANCANGAN AWAL RKPD (Ambil dari Renstra 2024)						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terfasilitasi**	**100**	**425.000.000**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terfasilitasi**	**100**	**375.000.000**	
22)	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6	375.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5	325.000.000	
23)	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25	50.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25	50.000.000	
8	**Layanan Administrasi DPRD**		**Persentase Layanan Administrasi DPRD**	**100**	**491.940.000**	**Layanan Administrasi DPRD**		**Persentase Layanan Administrasi DPRD**	**100**	**610.938.000**	
24)	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4	491.940.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4	610.938.000	
II	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas menjadi Perda**	**100**	**11.000.000.000**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas menjadi Perda**	**100**	**14.499.517.000**	
			Jumlah Perda Inisiatif yang diterbitkan	**1**				**Jumlah Perda Inisiatif yang diterbitkan**	**1**		
9	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**		**Persentase Ranperda Usulan Pemda yang dibahas DPRD menjadi Perda**	**100**	**4.600.000.000**	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**		**Persentase Ranperda Usulan Pemda yang dibahas DPRD menjadi Perda**	**100**	**2.591.566.000**	
25)	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6	4.550.000.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6	2.529.392.000	
26)	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1	50.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1	62.174.000	
10	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang disahkan**	**100**	**625.000.000**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang disahkan**	**100**	**3.064.928.000**	
27)	Pembahan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	225.000.000	Pembahan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	635.120.000	

RANCANGAN AWAL RKPD (Ambil dari Renstra 2024)						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
28)	Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2	300.000.000	Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2	2.002.382.000	
29)	Pembahasan Laporan Semester	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2	50.000.000	Pembahasan Laporan Semester	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2	30.476.000	
30)	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2	50.000.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2	396.950.000	
11	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan**	**100**	**430.000.000**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan**	**100**	**999.794.000**	
31)	Pengawasan Urursan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum	Solok Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4	60.000.000	Pengawasan Urursan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum	Solok Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2	41.420.000	
32)	Pengawasan Urursan Pemerintah Bidang Infrastruktur	Solok Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4	60.000.000	Pengawasan Urursan Pemerintah Bidang Infrastruktur	Solok Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2	41.420.000	
33)	Pengawasan Urursan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Solok Selatan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4	60.000.000	Pengawasan Urursan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Solok Selatan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2	41.420.000	
34)	Pengawasan Urursan Pemerintah Bidang Perekonomian	Solok Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4	60.000.000	Pengawasan Urursan Pemerintah Bidang Perekonomian	Solok Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2	41.420.000	
35)	Pengawasan Urursan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam	Solok Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4	60.000.000	Pengawasan Urursan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam	Solok Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		-	
36)	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4	50.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	396.950.000	

RANCANGAN AWAL RKPD (Ambil dari Renstra 2024)						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	**Catatan Penting**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
37)	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4	40.000.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Solok Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	40.214.000	
38)	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Solok Selatan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4	40.000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Solok Selatan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	396.950.000	
12	**Peningkatan Kapasitas DPRD**		**Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan**	**100**	**1.640.000.000**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**		**Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan**	**100**	**1.387.400.000**	
39)	Orientasi DPRD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	**4**	350.000.000	Orientasi DPRD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	**4**	-	
40)	Pendalaman Tugas DPRD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4	755.000.000	Pendalaman Tugas DPRD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4	981.400.000	
41)	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4	175.000.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4	100.000.000	
42)	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3	108.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3	54.000.000	
43)	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	252.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	252.000.000	
13	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD**	**100**	**800.000.000**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD**	**100**	**828.515.000**	
44)	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	4	300.000.000	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	2	229.463.000	
45)	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4	100.000.000	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	0		
46)	Pelaksanaan Reses	Solok Selatan	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	400.000.000	Pelaksanaan Reses	Solok Selatan	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	599.052.000	
14	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		**Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**100**	75.000.000	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		**Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**100**	-	
47)	Penyusunan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	4	75.000.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0	-	
15	**Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**		**Persentase Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**100**	**2.830.000.000**	**Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**		**Persentase Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**100**	**5.627.314.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD (Ambil dari Renstra 2024)						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
48)	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6	2.420.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6	5.078.190.000	
49)	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4	410.000.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4	549.124.000	

Penjelasan dari tabel :

Dari uraian tabel diatas adanya penambahan dan pengurangan terhadap rancangan awal RKPD yakni dikarenakan :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, terjadinya perubahan dikarenakan adanya mutasi ASN antar SKPD
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah kegiatan Asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia yang diikuti oleh Pegawai Sekretariat DPRD seluruh Indonesia, terjadinya perubahan terhadap kegiatan ini dikarenakan adanya batasan oleh atasan untuk mengikuti acara tersebut
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terjadinya penambahan atau pengurungan dalam RKPD karena disesuaikan dengan kebutuhan kantor
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terjadi penguranan karena disesuaikan dengan kebutuhan
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terjadi penambahan atau pengurungan dikarenakan pada saat penyusunan renstra untuk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik termasuk juga belanja internet dan untuk tahun 2025 ini belanja internet sudah diserahkan ke kominfo sedangkan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk tahun sebelumnya dianggarkan di BKPSDM sedangkan tahun 2025 dianggarkan di kantor masing-masing
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, penambahan dan pengurungannya terjadi karena disesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan, awalnya anggaran hanya untuk pemeliharaan kendaraan dinas ketua DPRD namun pada tahun 2025 ini terdapat 2 kendaraan dinas jabatan ketua dan wakil ketua DPRD

7. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, terdapat pengurangan karena disesuaikan dengan kebutuhan
8. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, terjadi penambahan karena disesuaikan dengan kebutuhan
9. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD terjadi penurunan karena pada awalnya kegiatan pembahasan kebijakan anggaran disatukan pada kegiatan pembentukan perda dan peraturan DPRD, untuk tahun di 2025 sudah dirinci
10. Kegiatan pembahasan kebijakan anggaran terjadi penambahan dan pengurangan dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan.
11. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah adapun penambahan dan pengurangannya terjadi dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan seperti Sub Kegiatan Pengawasan TLHP Lap. Keuangan oleh BPK dan Pembahasan LKPJ Kepala Daerah yang sebelumnya belum dianggarkan sesuai kebutuhan
12. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, terjadinya pengurangan dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan seperti kegiatan orientasi DPRD sudah dianggarkan pada tahun 2024 dan akan dilaksanakan pada tahun 2024 jadi untuk tahun 2025 tidak dianggarkan lagi
13. Kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat terjadi penambahan disesuaikan dengan kebutuhan
14. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, terjadi pengurangan dikarenakan terkendala keterbatasan waktu dan terjadi pergantian anggota DPRD untuk masa jabatan 2024-2029
15. Kegiatan fasilitasi tugas pimpinan DPRD, terjadi perubahan penambahan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas anggota DPRD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung ataupun dari LSM melalui reses yang dilakukan

Anggota DPRD akan disampaikan ke Perangkat Daerah terkait untuk dianggarkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis yang menangani segala usulan yang disampaikan melalui aspirasi masyarakat.

Adapun rencana program dimaksud yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 berikut ini :

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2025

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan*
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Adapun arah Kebijakan Nasionaladalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Menyangkut kebijakan Nasional dalam pelaksanaan pembangunan dibidang pemerintahan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan pada Prioritas 7 Yaitu Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, Sekretariat DPRD mendukung rencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yaitu Reformasi Birokrasi dibidang pemerintahan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
I	**Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
1		Meningkatnya Kinerja Legislasi dan Pengawasan Daerah	Persentase Usulan Ranperda Perangkat Daerah yang dibahas menjadi Perda
			Jumlah Perda Inisiatif yang diterbitkan
2		Meningkatnya Sistem akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan merencanakan 2 (dua) program dan 15 (lima belas) Kegiatan serta 46 (empat puluh enam) sub kegiatan, sebagaimana rinciannya sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

					8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					9	Fasilitasi Kunjungan Tamu
					10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
			4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PEMDA	11	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					13	Pengadaan Mebel
			5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					15	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
					16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PEMDA	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					20	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	21	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
					22	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
			8	Layanan Administrasi DPRD	23	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
II	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		9	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	24	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
					25	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
			10	Pembahasan Kebijakan Anggaran	26	Pembahan KUA dan PPAS

				27	Pembahasan APBD
				28	Pembahasan Laporan Semester
				29	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
			11	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	30	Pengawasan Urursan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum
					31	Pengawasan Urursan Pemerintah Bidang Infrastruktur
					32	Pengawasan Urursan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat
					33	Pengawasan Urursan Pemerintah Bidang Perekonomian
					34	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
					35	Pengawasan Penggunaan Anggaran
					36	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
			12	Peningkatan Kapasitas DPRD	37	Orientasi DPRD
					38	Pendalaman Tugas DPRD
					39	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
					40	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
					41	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
			13	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	42	Kunjungan Kerja Dalam Daerah
					43	Pelaksanaan Reses
			14	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	44	Penyusunan Kode Etik DPRD
			15	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	45	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
					46	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025 disusun mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sebagai pedoman perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun dan merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Penyusunan renja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Rumusan Rencana Progam dan Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

TABEL 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DPRDKAB. SOLOK SELATAN
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Sekretariat DPRD						32.169.390.989,00							30.586.780.000,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						32.169.390.989,00							30.586.780.000,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						32.169.390.989,00							30.586.780.000,00	
1	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	-			100 persen	17.669.873.989,00						-	17.176.780.000,00	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	13.537.175.739,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD	-	13.144.840.000,00	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	13.394.495.739,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		13.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	142.680.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		144.840.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	30.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD	-	100.000.000,00	
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	880.757.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD	-	720.000.000,00	
	4	02	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	51.640.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	50.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	44.968.200,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	140.019.600,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	SEKRETARIAT DPRD		130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	150.003.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	SEKRETARIAT DPRD		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	150.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	SEKRETARIAT DPRD		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	294.126.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	SEKRETARIAT DPRD		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	-			100 Persen	141.792.500,00			-	-	SEKRETARIAT DPRD	-	155.000.000,00	
	4	02	01	2.07	000	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	70.832.500,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	SEKRETARIAT DPRD		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	70.960.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	SEKRETARIAT DPRD		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia	-			100 Persen	1.638.727.650,00			-	-	SEKRETARIAT DPRD	-	1.416.000.000,00	
	4	02	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	SEKRETARIAT DPRD		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	92.727.650,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	SEKRETARIAT DPRD		90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	SEKRETARIAT DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.491.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	SEKRETARIAT DPRD		1.266.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	-			100 Persen	455.482.400,00			-	-	SEKRETARIAT DPRD	-	515.000.000,00	
	4	02	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	182.566.300,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	SEKRETARIAT DPRD		115.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	223.057.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	SEKRETARIAT DPRD		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	49.859.100,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	SEKRETARIAT DPRD		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terfasilitasi	-			100 Persen	375.000.000,00			-	-	ANGGOTA DPRD	-	425.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	01	2.15	000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	325.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ANGGOTA DPRD		375.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ANGGOTA DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	-			100 Persen	610.938.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD	-	700.940.000,00	
	4	02	01	2.16	000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				4 Laporan	610.938.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		700.940.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase usulan ranperda OPD yang dibahas menjadi Perda Jumlah Perda Inisiatif yang diterbitkan	-			100 Persen 1 Perda	14.499.517.000,00						-	13.410.000.000,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Ranperda Usulan Pemda yang dibahas DPRD menjadi Perda	-			100 Persen	2.591.566.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD	-	5.100.000.000,00	
	4	02	02	2.01	000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 Dokumen	2.529.392.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		5.050.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	62.174.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang disahkan Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang disahkan	-			100 Persen 100 Persen	3.064.928.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD	-	2.525.000.000,00	
	4	02	02	2.02	000	Pembahasan KUA dan PPAS														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	635.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		225.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	000	Pembahasan APBD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	2.002.382.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		2.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	000	Pembahasan Laporan Semester														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	30.476.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				2 Dokumen	396.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	-			100 Persen 100 Persen	999.794.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	ANGGOTA DPRD	-	585.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	02	2.03	000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				4 Laporan	41.420.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyclenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	ANGGOTA DPRD		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				4 Laporan	41.420.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	ANGGOTA DPRD		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				4 Laporan	41.420.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	ANGGOTA DPRD		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				4 Laporan	41.420.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	ANGGOTA DPRD		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				4 Dokumen	396.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	ANGGOTA DPRD		60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	000	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				4 Dokumen	40.214.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	ANGGOTA DPRD		60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	02	2.03	000	Pembahasan Laporan Keterangan														
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				4 Dokumen	396.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	ANGGOTA DPRD		65.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	-			100 Persen 100 Persen	1.387.400.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD	-	1.290.000.000,00	
	4	02	02	2.04	000	Pendalaman Tugas DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	981.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		755.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	54.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		108.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	252.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		252.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	000	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD	-			100 Persen	828.515.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD	-	700.000.000,00	
	4	02	02	2.05	000	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				4 Laporan	229.463.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	000	Pelaksanaan Reses														
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	599.052.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-			100 Persen	5.627.314.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD	-	3.210.000.000,00	
	4	02	02	2.08	000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				6 Dokumen	5.078.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		2.720.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				4 Dokumen	549.124.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Percepatan transformasi tata kelola pemerintah	SEKRETARIAT DPRD		490.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
											J U M L A H	**32.169.390.989,00**							**30.586.780.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Perangkat Daerah sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025. Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Sekretariat DPRD tahun 2025 agar sesuai dengan strategi, arah kebijakan, program dan kebijakan yang ditetapkan. Dengan adanya Rencana Kerja merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi perangkat daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja berikutnya.

Padang Aro, Juli 2024
SEKRETARIS DPRD

DELVI, S.Sos., M.Si
NIP. 19661118 199303 1 013